WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 100.3.3.3/377/BAPPERIDA/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 86);
5. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 23);
6. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja anggaran perangkat daerah Tahun 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 26 Agustus 2025
WALI KOTA BONTANG,

WALI KOTA BONTANG

NENI MOERNIAENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Seluruh Kepala Perangkat Daerah

I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Walikota No 000.7.2/495/BAPPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, RPJMD Kota Bontang 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Adapun penyusunan dokumen Renja Perubahan ini dilakukan dengan sebab sebagai berikut :

1) **Penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional dan daerah**, termasuk arah kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, serta penyesuaian terhadap kebijakan RPJMD Kota Bontang dan hasil Musrenbang.
2) **Kondisi riil pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan**, yang menunjukkan perlunya penyempurnaan target kinerja, realokasi anggaran, serta penyesuaian sasaran dan indikator untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan.
3) **Aspirasi masyarakat dan stakeholder pendidikan dan kebudayaan**, yang disampaikan melalui forum konsultasi publik, Musrenbang, serta evaluasi kinerja triwulanan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang melakukan perubahan terhadap dokumen Renja Tahun 2025 agar tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, akuntabel dalam pengelolaan anggaran, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Perubahan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kebudayaan di Kota Bontang secara berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Tahun 2025 adalah :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tantang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
m. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
n. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2026
o. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
p. Peraturan Walikota Bontang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
q. Surat Edaran Walikota Nomor 000.7.2/495/BAPPERIDA/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
r. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen **Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Tahun 2025** dimaksudkan sebagai penyesuaian atas dokumen Renja yang telah ditetapkan sebelumnya dengan berbagai perubahan yang terjadi,

baik secara internal maupun eksternal, agar pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan tetap berjalan **efektif, efisien, dan tepat sasaran.** Perubahan Renja ini juga merupakan tindak lanjut atas instruksi dan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.3.2.Tujuan

Adapun tujuan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang tahun 2025 di antaranya:

1) Memastikan bahwa seluruh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap selaras dengan arah kebijakan terbaru dari pemerintah daerah maupun pusat;
2) Mengakomodasi dinamika kebutuhan pendidikan dan kebudayaan;
3) Meningkatkan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal;
4) Memberikan ruang untuk menyesuaikan kegiatan dinas dengan hasil musrenbang perubahan, pokok-pokok pikiran DPRD, atau masukan dari masyarakat dan lembaga pendidikan;
5) Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan dan Kebudayaan yang berorientasi pada hasil;
6) Sebagai instrumen bagi masyarakat dan stakeholder dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan 2 Tahun 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang sampai dengan Triwulan 2 tahun 2025.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Utama. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan; dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Bab III Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannyamaupun seandainya ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD, dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan 2 Tahun 2025

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan 2 serta untuk menindaklanjuti capaian program dan kegiatan yang dilakukan, dengan disesuaikan pada kondisi aktual daerah. Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang merencanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebanyak 7 Program 21 Kegiatan dan 222 Sub Kegiatan.

Secara Rinci Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sampai Dengan Triwulan 2 Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**	**196.078.296.945**	**25**	**43.453.581.949**	**25**	**43.992.246.411**		**0**		**0**		**87.445.828.360**
1.01.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKATDAERAH**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1 dokumen**	**82.176.718**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**-**
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	80.725.320	0	0	0	0		0		0		-
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.451.398	0	0	0	0		0		0		-
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 laporan			0				0		0		-
1.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 dokumen**	**175.435.222.631**	**0**	**41.075.436.122**	**0**	**41.219.271.766**		**0**		**0**		**82.294.707.888**

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1090 orang/bulan	175.425.718.631	1090	41.075.436.122	1090	41.214.276.766		0		0		82.289.712.888
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 dokumen			0				0		0		-
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	1 laporan			0				0		0		-
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	5.184.000	0	0	0	4.995.000		0		0		4.995.000
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	4.320.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.01.2.03	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadministrasikan**	**74951 unit**	**1.210.000**	**74951**	**0**	**74.951**	**0**		**0**		**0**		**-**
1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.210.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen			0				0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan			0				0		0		-
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan			0				0		0		-
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan			0				0		0		-
1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen			0				0		0		-
1.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian**	**1 laporan**	**2.560.017.619**	**0**	**0**	**0**	**5.800.000**		**0**		**0**		**5.800.000**
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1.910.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 dokumen			0				0		0		-
1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen			0				0		0		-
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 orang	613.280.000	0	0	0	5.800.000		0		0		5.800.000
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	1.465.125.988	0	0	0	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 orang	479.701.631	0	0	0	0		0		0		-
1.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum**	**1 laporan**	**5.063.555.015**	**0**	**70.682.610**	**0**	**932.933.305**		**0**		**0**		**1.003.615.915**
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	226.145.406	0	0	0	103.313.250		0		0		103.313.250
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	770.585.628	0	0	1	398.895.150		0		0		398.895.150
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	221.358.006	0	0	0	71.040.000		0		0		71.040.000
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	65.799.593	1	0	0	59.481.403		0		0		59.481.403
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	1.506.756.988	1	0	5	151.719.050		0		0		151.719.050
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	84.143.200	0	0	0	0		0		0		-
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket			0				0		0		-
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	62.246.194	0	0	0	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2.124.610.000	0	70.682.610	0	148.484.452		0		0		219.167.062
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.910.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen			0				0		0		-
1.01.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	**14 unit**	**543.081.250**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**-**
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	79.657.250	0	0	0	0		0		0		-
1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	258.309.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	205.115.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	**4 laporan**	**11.385.549.712**	**1**	**2.203.994.057**	**1**	**1.495.588.381**		**0**		**0**		**3.699.582.438**
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	72.000.000	0	10.000.000	0	5.000.000		0		0		15.000.000

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	801.000.000	3	22.886.621	3	46.793.248		0		0		69.679.869
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	248.102.432	0	22.422.000	0	176.712.000		0		0		199.134.000
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	10.264.447.280	3	2.148.685.436	3	1.267.083.133		0		0		3.415.768.569
1.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**250 unit**	**1.007.484.000**	**250**	**103.469.160**	**250**	**338.652.959**		**0**		**0**		**442.122.119**
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkanPajaknya	5 unit	254.340.000	5	45.008.000	5	42.606.000		0		0		87.614.000
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	43 unit	453.534.000	43	49.525.660	43	65.024.050		0		0		114.549.710
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	38.780.000	1	8.935.500	0	6.993.000		0		0		15.928.500
1.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit			0		-		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	260.830.000	0	0	1	224.029.909		0		0		224.029.909
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK SD (Paket Setara SD)**	**104.65 Persen**	**253.463.149.304**	**0**	**20.184.683.565**	**-**	**34.106.002.482**		**0**		**0**		**54.290.686.047**
		APK SMP (Paket Setara SMP)	**103.86 Persen**											**-**
		APK PAUD	**85.91 Persen**											**-**
1.01.02.2.01	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**	**Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola**	**56 satuan pendidikan**	**130.194.870.374**	**56**	**13.521.883.500**	**56**	**19.245.779.243**		**0**		**0**		**32.767.662.743**
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 unit	11.303.708.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 unit	2.703.900.000	0	0	0	394.592.478		0		0		394.592.478
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 paket	6.828.346.572	1	5.857.699.000	0	240.500.000		0		0		6.098.199.000
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 paket	22.653.047.748	0	4.232.000.000	1	15.627.775.000		0		0		19.859.775.000

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	540.780.000	0	0	1	504.155.734		0		0		504.155.734
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 peserta didik	1.110.238.614	0	0	750	9.458.000		0		0		9.458.000
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	550 orang	30.997.360.376	550	1.584.552.580	550	0		0		0		1.584.552.580
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	72 orang	1.146.620.639	0	0	30	220.000.000		0		0		220.000.000
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SD)	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	30 satuan pendidikan	133.715.927	30	0	30	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SD swasta)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	25 satuan pendidikan	7.122.600.000	25	0	25	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 001 Bontang Utara	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	479.750.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 002 Bontang Utara	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	439.850.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 003 Bontang Utara	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	606.100.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 004 Bontang Utara	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	521.550.000	1	0	1	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 005 Bontang Utara	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	572.850.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 006 Bontang Utara	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	327.750.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 007 Bontang Utara	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	531.050.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 008 Bontang Utara	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	528.200.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 009 Bontang Utara	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	379.050.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 010 Bontang Utara	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	476.900.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 011 Bontang Utara	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	61.750.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 001 Bontang Selatan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	438.900.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 002 Bontang Selatan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	539.600.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 003 Bontang Selatan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	368.600.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 004 Bontang Selatan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	346.750.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 005 Bontang Selatan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	318.250.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 006 Bontang Selatan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	380.000.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 007 Bontang Selatan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	237.500.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 009 Bontang Selatan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	486.400.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 010 Bontang Selatan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	332.500.000	1	0	1	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 011 Bontang Selatan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	395.200.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 012 Bontang Selatan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	386.650.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 013 Bontang Selatan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	355.300.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 014 Bontang Selatan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	58.900.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 015 Bontang Selatan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	12.350.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 016 Bontang Selatan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	32.300.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 001 Bontang Barat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	317.300.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 002 Bontang Barat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	221.350.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 003 Bontang Barat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	329.650.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SDN 004 Bontang Barat	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	639.350.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SD	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	57 orang	92.536.927	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Pendidikan	30 orang	97.402.442	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 konten digital	54.141.431	0	0	0	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 orang	128.540.388	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	137.957.278	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 komunitas	226.533.717	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0043	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan,dan intoleransi	1 kegiatan	244.315.364	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 paket	18.043.612.196	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	1.393.950.000	0	0	0	394.321.160		0		0		394.321.160
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas BidangPendidikan yang dilaksanakan	400 orang	2.497.921.000	300	1.847.631.920	0	0		0		0		1.847.631.920
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	811.170.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8064 peserta didik	3.216.300.000	8064	0	8064	1.277.398.000		0		0		1.277.398.000

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 001 Bontang Utara	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	505 peserta didik	328.242.763	505	0	505	51.888.777		0		0		51.888.777
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 002 Bontang Utara	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	463 peserta didik	277.799.774	463	0	463	44.479.812		0		0		44.479.812
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 003 Bontang Utara	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	638 peserta didik	382.799.903	638	0	638	29.322.297		0		0		29.322.297
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 004 Bontang Utara	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	549 peserta didik	329.346.541	549	0	549	20.880.260		0		0		20.880.260
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 005 Bontang Utara	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	603 peserta didik	361.798.249	603	0	603	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 006 Bontang Utara	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	345 peserta didik	207.000.000	345	0	345	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 007 Bontang Utara	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	559 peserta didik	335.399.088	559	0	559	7.200.000		0		0		7.200.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 008 Bontang Utara	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	556 peserta didik	333.596.943	556	0	556	51.720.695		0		0		51.720.695
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 009 Bontang Utara	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	399 peserta didik	239.259.319	399	0	399	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 010 Bontang Utara	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	502 peserta didik	301.199.536	502	0	502	105.511.336		0		0		105.511.336

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 011 Bontang Utara	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	65 peserta didik	227.498.352	65	0	65	8.000.000		0		0		8.000.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 001 Bontang Selatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	462 peserta didik	277.191.541	462	0	462	27.209.816		0		0		27.209.816
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 002 Bontang Selatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	568 peserta didik	340.772.283	568	0	568	23.643.000		0		0		23.643.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 003 Bontang Selatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	388 peserta didik	232.795.490	388	0	388	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 004 Bontang Selatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	365 peserta didik	218.982.000	365	0	365	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 005 Bontang Selatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	335 peserta didik	201.000.000	335	0	335	9.408.000		0		0		9.408.000
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 006 Bontang Selatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 peserta didik	239.874.504	400	0	400	9.397.820		0		0		9.397.820
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 007 Bontang Selatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	250 peserta didik	149.999.708	250	0	250	16.659.591		0		0		16.659.591
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 009 Bontang Selatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	512 peserta didik	307.196.415	512	0	512	30.267.268		0		0		30.267.268
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 010 Bontang Selatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	350 peserta didik	209.999.591	350	0	350	29.927.075		0		0		29.927.075

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 011 Bontang Selatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	416 peserta didik	270.380.570	416	0	416	10.030.360		0		0		10.030.360
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 012 Bontang Selatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	407 peserta didik	244.136.454	407	0	407	19.826.695		0		0		19.826.695
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 013 Bontang Selatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	374 peserta didik	224.391.475	374	0	374	35.900.146		0		0		35.900.146
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 014 Bontang Selatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	62 peserta didik	216.982.426	62	0	62	13.200.201		0		0		13.200.201
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 015 Bontang Selatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13 peserta didik	45.498.882	13	0	13	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 016 Bontang Selatan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	34 peserta didik	118.994.865	34	0	34	19.606.540		0		0		19.606.540
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 001 Bontang Barat	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	334 peserta didik	200.346.053	334	0	334	13.499.182		0		0		13.499.182
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 002 Bontang Barat	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	233 peserta didik	151.445.538	233	0	233	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 003 Bontang Barat	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	347 peserta didik	208.200.000	347	0	347	0		0		0		-
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar SDN 004 Bontang Barat	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	673 peserta didik	403.793.492	673	0	673	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 paket	2.600.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.02	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**	**Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang dikelola**	**27 satuan pendidikan**	**92.472.776.069**	**27**	**4.711.351.615**	**27**	**14.102.173.796**		**0**		**0**		**18.813.525.411**
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 unit	3.603.935.500	0	0	0	91.769.250		0		0		91.769.250
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 unit	3.011.978.000	0	0	0	669.375.636		0		0		669.375.636
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	284.390.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	272.601.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 paket	2.868.357.153	1	2.366.315.000	0	392.200.000		0		0		2.758.515.000
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 paket	14.674.273.047	0	276.000.000	2	11.538.975.000		0		0		11.814.975.000
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	2.211.000	0	0	0	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik (SMP)	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4749 peserta didik	2.708.600.000	4749	0	4749	1.227.746.400		0		0		1.227.746.400
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama SMPN 1	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	857 peserta didik	642.749.557	857	0	857	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama SMPN 2	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	789 peserta didik	591.227.723	789	0	789	11.450.000		0		0		11.450.000
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama SMPN 3	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	595 peserta didik	416.499.874	595	0	595	9.450.000		0		0		9.450.000
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama SMPN 4	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	540 peserta didik	377.998.505	540	0	540	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama SMPN 5	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	616 peserta didik	431.196.954	616	0	616	13.309.000		0		0		13.309.000
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama SMPN 6	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	276 peserta didik	193.158.269	276	0	276	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama SMPN 7	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	403 peserta didik	282.098.736	403	0	403	19.005.180		0		0		19.005.180

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama SMPN 8	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	413 peserta didik	289.091.902	413	0	413	70.481.530		0		0		70.481.530
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama SMPN 9	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	343 peserta didik	240.099.855	343	0	343	48.532.800		0		0		48.532.800
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	600 peserta didik	1.516.749.164	0	0	600	9.879.000		0		0		9.879.000
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah MenengahPertama	349 orang	4.709.077.000	349	819.062.500	349	0		0		0		819.062.500
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	58 orang	1.136.084.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SMP)	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	30 satuan pendidikan	215.616.927	30	0	30	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP Swasta)	Jumlah Sekolah Menegah Pertama yang Mengelola Dana BOS	22 satuan pendidikan	4.409.160.000	22	0	22	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMPN 1	Jumlah Sekolah Menegah Pertama yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	994.120.000	1	0	1	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMPN 2	Jumlah Sekolah Menegah Pertama yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	915.240.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMPN 3	Jumlah Sekolah Menegah Pertama yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	690.200.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMPN 4	Jumlah Sekolah Menegah Pertama yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	626.400.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMPN 5	Jumlah Sekolah Menegah Pertama yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	714.560.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMPN 6	Jumlah Sekolah Menegah Pertama yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	320.160.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMPN 7	Jumlah Sekolah Menegah Pertama yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	467.480.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMPN 8	Jumlah Sekolah Menegah Pertama yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	479.080.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMPN 9	Jumlah Sekolah Menegah Pertama yang Mengelola Dana BOS	1 satuan pendidikan	397.880.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMP	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah MenengahPertama	30 orang	83.542.542	0	0	30	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Pendidikan	18 orang	71.725.279	0	0	0	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 konten digital	89.161.464	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	18 orang	86.847.769	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SMP)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	132.326.010	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 komunitas	331.019.743	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0055	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan,dan intoleransi	1 kegitan	199.114.824	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 ruang	3.990.914.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas BidangPendidikan yang dilaksanakan	50 orang	1.490.409.000	50	1.249.974.115	0	0		0		0		1.249.974.115
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 paket	37.487.540.832	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 paket	27.900.440	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.03	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**	**Jumlah satuan PAUD yang dikelola**	**149 satuan pendidikan**	**26.120.000.523**	**149**	**1.951.448.450**	**149**	**653.051.243**		**0**		**0**		**2.604.499.693**

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 paket	246.244.310	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3667 peserta didik	1.451.247.384	3667	0	3667	0		0		0		-
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD TKN 1	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	191 peserta didik	95.499.580	191	0	191	11.666.360		0		0		11.666.360
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD TKN 2	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35 peserta didik	17.464.494	35	680.950	35	3.114.050		0		0		3.795.000
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD TKN 3	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	44 peserta didik	21.999.438	44	0	44	10.840.000		0		0		10.840.000
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	650 orang	9.818.970.720	650	1.942.371.500	650	191.253.000		0		0		2.133.624.500
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	58 orang	197.840.062	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	149 satuan pendidikan	845.910.162	149	0	149	42.810.920		0		0		42.810.920
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	142 satuan pendidikan	4.253.910.000	142	0	142	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD TKN 1	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 satuan pendidikan	120.330.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD TKN 2	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 satuan pendidikan	22.050.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD TKN 3	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 satuan pendidikan	27.720.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	146 orang	4.920.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 konten digital	37.460.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	165 orang	227.597.639	0	0	165	176.944.500		0		0		176.944.500
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (PAUD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di BidangPendidikan	1 dokumen	221.610.639	0	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 dokumen	183.421.639	0	0	0	79.880.270		0		0		79.880.270
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 komunitas	156.587.639	0	0	0	81.164.000		0		0		81.164.000
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan KapasitasBidang Pendidikan yang dilaksanakan	148 orang	1.007.337.977	0	8.396.000	0	38.016.623		0		0		46.412.623
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 paket	4.449.646.000	0	0	0	17.361.520		0		0		17.3

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
														61.520
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	1.154.443.980	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	197.962.500	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 paket	1.160.428.860	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	199.397.500	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.04	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN**	**Jumlah Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola**	**50 Satuan Pendidikan**	**4.675.502.338**	**50**	**0**	**50**	**104.998.200**		**0**		**0**		**104.998.200**
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	...	811.200.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan SPNF SKB	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	204 peserta didik	101.997.489	204	0	204	4.364.000		0		0		4.364.000
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 orang	258.481.616	0	0	0	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	49 satuan pendidikan	155.695.639	49	0	49	49.330.200		0		0		49.330.200
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 satuan pendidikan	1.373.080.000	14	0	14	0		0		0		-
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan SPNF SKB	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 satuan pendidikan	234.330.000	1	0	1	0		0		0		-
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP SekolahNonformal/Kesetaraan	50 orang	1.000.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Pendidikan	18 orang	115.220.639	0	0	0	51.304.000		0		0		51.304.000
1.01.02.2.04.0025	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 konten digital	37.460.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (PNF)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	5.000.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 dokumen	5.000.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 komunitas	5.000.000	0	0	0	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan,dan intoleransi	1 kegiatan	184.809.639	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 paket	5.000.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	jumlah Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	1 paket	5.000.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 paket	803.855.800	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas BidangPendidikan yang dilaksanakan	25 orang	21.840.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	18 peserta didik	5.000.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	164.093.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 paket	183.370.516	0	0	0	0		0		0		-
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 ruang	199.068.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal**	**20 persen**	**217.421.516**	**20**	**0**	**20**	**0**		**0**		**0**		**-**

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.03.2.01	**PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR**	**Jumlah kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan**	**2 kurikulum**	**206.221.516**	**2**	**0**	**2**	**0**		**0**		**0**		**-**
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	101.959.516	0	0	0	0		0		0		-
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	4500 buku	94.262.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	20 orang	5.000.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	5.000.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.03.2.02	**PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DANPENDIDIKAN NONFORMAL**	**Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD PNF yang ditetapkan**	**1 kurikulum**	**11.200.000**	**1**	**0**	**1**	**0**		**0**		**0**		**-**
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 dokumen	5.000.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yangTersedia	500 buku	5.000.000	0	0	0	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini danPendidikan Nonformal yang Tersusun	1 dokumen	1.200.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru Murid**	**50.88 Siswa per guru**	**33.062.324.136**	**0**	**660.693.800**	**0**	**0**		**0**		**0**		**660.693.800**
1.01.04.2.01	**PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKANNONFORMAL/KESETARAAN**	**Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**	**85,14 persen**	**33.062.324.136**	**0**	**660.693.800**	**0**	**0**		**0**		**0**		**660.693.800**
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan SatuanPendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 dokumen	32.363.115.900	0	660.693.800	0	0		0		0		660.693.800
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan SatuanPendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 laporan	699.208.236	0	0	0	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki izin**	**100 persen**	**309.289.639**	**100**	**0**	**100**	**0**		**0**		**0**		**-**
1.01.05.2.01	**PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEHMASYARAKAT**	**Jumlah izin operasional lembaga pendidikan dasar yang terbit**	**1 dokumen**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**-**
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan olehMasyarakat	1 dokumen	10.000.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yangDiselenggarakan oleh Masyarakat	1 dokumen	10.000.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.05.2.02	**PENERBITAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANGDISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**	**Jumlah izin Operasional Satuan PAUD PNF yang terbit**	**7 dokumen**	**289.289.639**	**7**	**0**	**7**	**0**		**0**		**0**		**-**
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yangDiselenggarakan oleh Masyarakat	7 dokumen	57.770.000	0	0	7	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan PendidikanNonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	7 dokumen	73.414.000	0	0	0	0		0		0		-
1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan olehMasyarakat	146 dokumen	158.105.639	0	0	0	0		0		0		-
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAN**	**Persentase pelestarian budaya**	**100 persen**	**9.173.643.110**	**0**	**0**	**0**	**337.747.715**		**0**		**0**		**337.747.715**
2.22.02.2.01	**PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAMDAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah kebudayaan masyarakat Kota Bontang yang dikelola**	**2 kebudayaan**	**2.619.380.904**	**0**	**0**	**0**	**246.172.715**		**0**		**0**		**246.172.715**
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 objek	2.323.868.904	0	0	1	246.172.715		0		0		246.172.715
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	10 orang	295.512.000	0	0	0	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
2.22.02.2.02	**PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYADALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan**	**25 kesenian**	**849.867.047**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		-
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 objek	798.995.595	0	0	0	0		0		0		-
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam PemajuanKebudayaan	10 sertifikat	50.871.452	0	0	0	0		0		0		-
2.22.02.2.03	**PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAHKABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Lembaga Adat yang dibina**	**2 lembaga**	**5.704.395.159**	**0**	**0**	**0**	**91.575.000**		**0**		**0**		**91.575.000**
2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan danPemanfaatan	5 objek	500.847.600	5	0	5	91.575.000		0		0		91.575.000
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	3 orang	4.230.000	0	0	0	0		0		0		-
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 unit	5.199.317.559	0	0	0	0		0		0		-

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (Tahun 2025) (Efisiensi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025	
					I		II		III		IV			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan kesenian**	**100 persen**	**1.274.438.930**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**-**
2.22.03.2.01	**PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah yang dibina**	**35 kesenian**	**1.274.438.930**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**-**
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan(Ditingkatkan Kompetensinya)	2 orang	1.274.438.930	0	0	0	0		0		0		-
TOTAL				**493.578.563.580**		**64.298.959.314**		**78.435.996.608**						**142.734.955.922**
						13,54		**15,89**						**28,92**

Penjabaran atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan dengan target 100%. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp 196.078.296.945,00 dan target triwulan II Rp 140.263.762.436 serta realisasi Rp 87.445.828.360,00 atau 44,60%.

   Pada program ini terdapat 8 kegiatan, yaitu:

   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Indikator kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi dengan target 1 dokumen. Anggaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 82.176.718,00 dan target Rp 82.176.718,00 serta realisasi 0.

   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Indikator kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 1 dokumen. Anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp 175.435.222.631,00 dan target Rp 125.421.232.796,00 serta realisasi Rp 82.294.707.888,00 atau 46,91%.

   3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

      Indikator kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yaitu Jumlah Barang Milik Daerah yang diadministrasikan dengan target 74951 unit. Anggaran kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah sebesar Rp 1.210.000,00 dan target Rp 1.210.000,00 serta realisasi 0.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian dengan target 1 laporan. Anggaran kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp 2.560.017.619,00 dan target Rp 2.240.421.869,00 serta realisasi Rp 5.000.000,00 atau 0,23%.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu Jumlah Laporan Administrasi Umum dengan target 1 laporan. Anggaran kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp 5.063.555.015,00 dan target Rp 3.511.833.371,00 serta realisasi Rp 1.003.615.915,00 atau 19,82%.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan dengan target 14 unit. Anggaran kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp 543.081.250,00 dan target Rp 539.301.250,00 serta realisasi 0.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang dengan target 4 laporan. Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp 11.385.549.712,00 dan target Rp 7.685.602.432,00 serta realisasi Rp 3.699.582.438,00 atau 32,49%.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara dengan target 250 unit. Anggaran kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 1.017.484.000,00 dan target Rp 781.984.000,00 serta realisasi Rp 442.122.119,00 atau 43,88%.

Belanja yang telah dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berupa belanja gaii dan tunjangan bagi pegawai baik ASN dan Non ASN serta belanja perlengkapan dan peralatan kantor seperti 10 unit laptop. 4 unit personal computer, 10 unit printer, pengadaan Alat Tulis Kantor serta belanja operasional kantor seperti pembayaran tagihan listrik, air dan internet setiap bulan.

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Indikator pada Program Pengelolaan Pendidikan yaitu APK PAUD, SD dan SMP yang akan dihitung pada triwulan 4. Anggaran Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp 253.463.149.304,00 dan target triwulan II Rp 147.385.389.337,00 serta realisasi Rp 54.290.686.047,00 atau 21,42%.

Pada program ini terdapat 4 kegiatan, yaitu:

1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yaitu jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola dengan target 56 satuan pendidikan. Anggaran kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp 130.194.870.374,00 dan target Rp 90.059.523.848,00 serta realisasi Rp 32.767.662.743,00 atau 25,17%. Beberapa belanja yang telah dilaksanakan seperti pengadaan mebel dan personal computer bagi sekolah dasar, pelaksanaan bimbingan teknis Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK); Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran Sekolah dengan ARKAS; dan Pengelolaan Dapodik untuk Meningkatkan Akurasi Data Sekolah dengan peserta pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar. Pencairan insentif triwulan II bagi guru swasta sekolah dasar di Kota Bontang akan segera

dilaksanakan. Dilaksanakan pula kegiatan lomba Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Seni dan Sastra Siswa Nasional jenjang SD tingkat kota Bontang. Pemenang lomba tersebut akan mewakili kota Bontang untuk lomba ditingkat provinsi. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SDN 007 BU sedang dalam proses tender.

2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama yaitu jumlah satuan Pendidikan SMP yang dikelola dengan target 27 satuan pendidikan. Anggaran kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp 92.472.776.069,00 dan target Rp 38.906.388.436,00 serta realisasi Rp 18.813.525.411,00 atau 20,34%. Beberapa belanja yang telah dilaksanakan seperti pengadaan mebel dan personal computer bagi SMP, pelaksanaan bimbingan teknis Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK); Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran Sekolah dengan ARKAS; dan Pengelolaan Dapodik untuk Meningkatkan Akurasi Data Sekolah dengan peserta pendidik dan tenaga kependidikan SMP. Pencairan insentif triwulan II bagi guru swasta jenjang SMP di Kota Bontang akan segera dilaksanakan. Dilaksanakan pula kegiatan lomba Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Seni dan Sastra Siswa Nasional jenjang SMP tingkat kota Bontang. Pemenang lomba tersebut akan mewakili kota Bontang untuk lomba ditingkat provinsi. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMPN 1 sedang dalam proses tender. Pembangunan yang telah dilaksanakan yaitu pembagunan kantin di SMPN 3 dan Pembangunan parit di SMPN 6, sedangkan Pembangunan pagar di SMPN 4 sedang dalam proses pengerjaan.

3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu jumlah satuan PAUD yang dikelola dengan target 149 satuan Pendidikan. Anggaran kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 26.120.000.523,00 dan target Rp 14.233.863.204,00 serta realisasi Rp 2.604.499.693,00 atau 9,97%. Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajara Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF; Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Dapodik, ARKAS dan SIPLAH) BOSP PAUD serta Pencairan dana operasional sekolah PAUD semester 1 telah dilaksanakan. Belanja yang akan dilaksanakan seperti pencairan triwulan II insentif guru swasta PAUD di Kota Bontang.

4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yaitu jumlah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola dengan target 50 satuan Pendidikan. Anggaran kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp 4.675.502.338,00 dan target Rp 4.185.613.849 serta realisasi Rp 104.998.200,00 atau 2,25%. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (Dapodik, ARKAS dan SIPLAH) BOSP Kesetaraan serta Pencairan dana operasional sekolah Kesetaraan/ Nonformal semester 1 telah dilaksanakan.

3. Program Pengembangan Kurikulum

Indikator Program Pengembangan Kurikulum yaitu Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal dengan target 20%. Anggaran Program Pengembangan Kurikulum sebesar Rp 217.421.516,00 dan target triwulan II Rp 211.211.516,00 serta realisasi Rp 0.

Pada program ini terdapat 2 kegiatan, yaitu:

1) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Indikator kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yaitu Jumlah kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar yang

ditetapkan dengan target 2 kurikulum. Anggaran kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar sebesar Rp 206.221.516,00 dan target Rp 205.011.516,00 serta realisasi Rp 0.

2) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Indikator kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yaitu Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD PNF yang ditetapkan dengan target 1 kurikulum. Anggaran kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebesar Rp 11.200.000,00 dan target Rp 6.200.000,00 serta realisasi Rp 0.

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu rasio guru murid dengan target 50,88 dan akan dihitung pada triwulan 4. Anggaran Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp 33.062.324.136,00 dan target triwulan II Rp 16.561.276.400,00 serta realisasi Rp 660.693.800,00 atau 2,00%.

Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Indikator pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yaitu Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dengan target 85.14%. Anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp 33.062.324.136,00 dan target Rp 16.561.276.400,00 serta realisasi Rp 660.693.800,00 atau 2,00%. Telah dilaksanakan pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik.

5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Indikator Program Pengendalian Perizinan Pendidikan yaitu Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki izin dengan target 100%. Anggaran Program Pengendalian Perizinan Pendidikan sebesar Rp 309.289.639,00 dan target Rp 198.675.639,00 serta realisasi Rp 0.

Pada program ini terdapat 2 kegiatan, yaitu :

1) Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

   Indikator kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yaitu Jumlah izin operasional lembaga pendidikan dasar yang terbit dengan target 1 dokumen. Anggaran kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat sebesar Rp 20.000.000,00 dan target Rp 0 serta realisasi Rp 0.

2) Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

   Indikator kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yaitu Jumlah izin Operasional Satuan PAUD PNF yang terbit dengan target 7 dokumen. Anggaran kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat sebesar Rp 289.289.639,00 dan target Rp 198.675.639,00 serta realisasi Rp 0. Pada triwulan II telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terkait perizinan Lembaga sekolah PAUD dan Nonformal/ Kesetaraan.

6. Program Pengembangan Kebudayaan

   Indikator Program Pengembangan Kebudayaan yaitu Persentase pelestarian budaya dengan target 100%. Anggaran Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp 9.173.643.110,00 dan target Rp 963.507.759,00 serta realisasi Rp 337.747.715,00 atau 3,68%.

   Pada program ini terdapat 3 kegiatan, yaitu:

1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota yaitu Jumlah kebudayaan masyarakat Kota Bontang yang dikelola dengan target 2 kebudayaan. Anggaran kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 2.619.380.904,00 dan target Rp 452.770.000,00 serta realisasi Rp 246.172.715,00 atau 9,40%.

2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota yaitu Jumlah Kesenian tradisional yang dilestarikan dengan target 25 kesenian. Anggaran kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 849.867.047,00 dan target Rp 0 serta realisasi Rp 0.

3) Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota yaitu Jumlah Lembaga Adat yang dibina dengan target 2 lembaga. Anggaran kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 5.704.395.159,00 dan target Rp 510.737.759,00 serta realisasi Rp 91.575.000,00 atau 1,61%.

   Disdikbud telah mengikuti kegiatan APEKSI pada bulan Mei di Surabaya dan kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Juni di Samarinda. Kegiatan Bontang City Carnival, Pesta Laut Bontang Kuala dan Erau Pelas Benua akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Pengadaan alat musik

tradisional dan mebel Replika Rumah Adat Kutai di Guntung sedang proses pengusulan standar harga.

7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

   Indikator Program Pengembangan Kesenian Tradisional yaitu Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan kesenian dengan target 100%. Anggaran Program Pengembangan Kesenian Tradisional sebesar Rp 1.274.438.930,00 dan target triwulan II Rp 471.840.000,00 serta realisasi Rp 0.

   Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

   Indikator kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota yaitu Jumlah Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah yang dibina dengan target 35 kesenian. Anggaran kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 1.274.438.930,00 dan target Rp 471.840.000,00 serta realisasi Rp 0.

   Kegiatan Seribu Jepen akan dilaksanakan pada HUT Kota Bontang bulan Oktober mendatang. Persiapan latihan dan pengadaan baju penari akan dilaksanakan pada triwulan III.

2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang

Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun capaian Kinerja Kunci Utama Kota Bontang sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bontang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Capaian Indikator Kinerja			
						Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
1	Tersedia dan terjangkaunya akses Pendidikan serta meningkatkan efektifitas dan relevansi mutu layanan Pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi PAUD, SD, SMP dan PNF	Angka melek huruf	Persentase	98,70	99,68	-	-		
		Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	Persentase	1,75	1,80	-	-		
		Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTS/Paket B	Persentse	1,70	1,93	-	-		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentase	98,14	94,60	-	-		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	Persentase	86,85	84,05	-	-		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase	0	0	-	-		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase	0	0	-	-		
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (100%)	Persentase	100	100	-	-		
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (100%)	Persentase	100	100	-	-		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persentase	103,75	100	-	-		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase	77,46	85,91	-	-		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persentase	105,20	104,65	-	-		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persentase	105,18	103,86	-	-		
2	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu dengan kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	Rasio	56,70	50,88	-	-		
		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persentase	92,25	95,76	-	-		
3	Terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar kelayakan	Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Sekolah	98,18	95,22	-	-		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	Sekolah	93,55	92,44	-	-		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Capaian Indikator Kinerja			
						Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
	sebagaimana ditetapkan	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah	Rasio	30,79	32,58	-	-		
4	Meningkatnya pelestarian budaya daerah melalui fasilitasi penyelenggaraan dan event seni budaya	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	22	25	-	-		
		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Tahun	3	3	-	-		
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	103	103	-	-		
5	Meningkatnya sistem tatakelola dan SDM yang handal	Nilai IKM Perangkat Daerah SKPD	Nilai	84,50	86,01	-	-		
		Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	NA	A	-	-		

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang dihitung pertahun sehingga data pada triwulan II Tahun 2025 masih kosong. Capaian indikator kinerja akan dihitung pada triwulan IV dan dilaporkan pada tahun selanjutnya. Namun dari capaian 2024 yang terlihat pada tabel 2.2 tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Capaian kinerja yang melebihi target ditunjukkan pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dengan capaian kinerja 103,86%; pada Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dengan capaian kinerja 103,75%; pada Angka Patisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dengan capaian kinerja 100,91%; pada Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik dengan capaian kinerja 100,48%; dan pada Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya dengan capaian kinerja 104,76%.
2) Capaian kinerja yang sesuai target ditunjukkan pada indikator Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dengan capaian kinerja 100%; pada Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs dengan capaian kinerja 100%; pada Angka Kelulusan (AL) SD/MI dengan capaian kinerja 1005; pada Angka

Kelulusan (AL) SMP/MTs dengan capaian kinerja 100%; pada Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu dengan capain kinerja 1005; pada Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan dengan capaian kinerja 100%; dan pada Nilai Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja 100%.

3) Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator Angka Melek Huruf (AMH) dengan capaian kinerja 99,10%; pada Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A dengan capaian kinerja 98,31%; pada Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS/Paket B dengan capaian kinerja 91,40%; pada Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dengan capaian kinerja 99,41%; Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dengan capaian kinerja 92,78%; pada Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B dengan capaian kinerja 99,17%; pada Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata dengan capaian kinerja 89,52%; pada Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV dengan capaian kinerja 96,97%; pada Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik dengan capaian kinerja 99,93%; pada Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah dengan capaian kinerja 78,67%; dan pada Nilai IKM Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 93,90%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan di Kota Bontang saat ini menghadapi sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Isu-isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Urusan Pendidikan
   a. Capaian Angka Partisipasi PAUD Belum Optimal. Tingkat partisipasi anak usia 5–6 tahun yang mengikuti layanan PAUD belum mencapai target nasional. Masih terdapat kesenjangan antara jumlah anak usia dini yang ada dengan yang terlayani di lembaga PAUD. Salah

satu faktor penyebabnya sebagian masyarakat masih memandang PAUD bukan sebagai kebutuhan mendasar, melainkan pilihan tambahan, sehingga tidak semua anak usia dini dikirim ke lembaga pendidikan.

b. Kesenjangan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan khususnya akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus baik dari sisi jumlah sekolah penyelenggara maupun kapasitas tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus.
c. Hasil asesmen nasional menunjukkan capaian literasi dan numerasi yang berada di bawah target nasional, menandakan perlunya penguatan kualitas pembelajaran.
d. Alokasi anggaran pendidikan masih dominan pada belanja fisik (sarana dan prasarana), sementara dukungan untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan inovasi pembelajaran relatif lebih kecil.

2) Urusan Kebudayaan

a. Inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya tak benda (WBTb) belum sepenuhnya lengkap dan berkelanjutan, sehingga berpotensi hilangnya pengetahuan dan tradisi lokal.
b. Ruang ekspresi dan apresiasi budaya, seperti panggung pertunjukan, galeri seni, atau pusat kebudayaan, masih terbatas.
c. Regenerasi pelaku seni dan budaya menghadapi tantangan, terutama dalam menarik minat generasi muda agar terlibat aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.

BAB III

3.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BONTANG

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu anggaran perubahan yang terjadi sesuai kebutuhan. Pada Perubahan Renja 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pagu anggaran menjadi Rp. 517.543.052.865,66 dengan 7 Program, 21 Kegiatan, dan 222 Sub Kegiatan. Penyusunan rencana kerja perubahan tahun 2025 disusun dengan asumsi :

a) Pergeseran anggaran dan rasionalisasi anggaran;
b) Penambahan atau pengurangan target kinerja;
c) Penambahan atau pengurangan pagu indikatif dan kelompok sasaran.

Adapun perubahan anggaran berupa penambahan, pengurangan, ataupun pergeseran per program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran pada penetapan APBD 2025 sebesar Rp. 204.184.168.891 menjadi Rp. 197.471.779.740,11. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian terhadap jumlah pegawai pensiun dan penerimaan ASN PPPK.
2. Program Pengelolaan Pendidikan. Anggaran pada penetapan APBD 2025 sebesar Rp. 222.870.645.667,00 menjadi Rp. 276.108.982.991,55. Kenaikan pagu ini disebabkan karena adanya koreksi atau penyesuaian atas kebutuhan pendidikan untuk peningkatan mutu layanan seperti rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan sarana prasarana, dan peningkatan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan melalui kenaikan insentif.
3. Program Pengembangan Kurikulum. Anggaran pada penetapan APBD 2025 sebesar 1.412.088.904,00 menjadi Rp. 127.421.516,00. Penurunan

tersebut disebabkan ditiadakannya kegiatan bimbingan teknis terkait penyusunan kurikulum muatan lokal dan di alihkan pada kegiatan pembinaan minat bakat dan krativitas siswa.

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Anggaran pada penetapan APBD 2025 sebesar Rp. 33.281.706.136,00 menjadi Rp. 33.070.423.136,00. Karena dilakukan efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas.
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan. Anggaran pada penetapan APBD 2025 sebesar Rp. 417.137.089 menjadi Rp. 277.190.639,00. Penurunan terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran.
6. Program Pengembangan Kebudayaan. Anggaran pada penetapan APBD 2025 sebesar Rp. 11.232.299.736 menjadi Rp. 9.587.359.305,00. Penurunan terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran.
7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Anggaran pada penetapan APBD 2025 Rp. 1.336.639.515 menjadi Rp. 1.087.349.038,00. Penurunan terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran

II. DINAS KESEHATAN

BAB I
P E N D A H U L U A N

I.1. Latar Belakang

Penetapan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dimulai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan periode 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai merupakan rencana pembangunan tahunan.

Sesuai dengan RPJMD Kota Bontang Tahun 2025-2029, Dinas Kesehatan Kota Bontang telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan penyusunan tujuan, sasaran dan.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun lima tahun (2025-2029). Renstra tersebut menjadi pedoman Dinas Kesehatan dalam menyusun kebijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Renja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas pembangunan kesehatan beserta pendanaannya untuk tahun berikutnya.

Dalam proses penyusunan Renja, Dinas Kesehatan telah menyusun

Rancangan Renja yang telah diselaraskan dengan Renstra Dinas Kesehatan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2025. Dokumen tersebut selanjutnya disempurnakan berdasarkan hasil masukan pada Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Bontang Tahun 2024 dan menjadi Rancangan Akhir Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah-atas (*Bottom Up Planning*) berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi.

Untuk memastikan adanya penyelarasan dengan dokumen perencanaan lain, maka pembahasan terhadap dokumen tersebut dilakukan oleh tim dari Dinas Kesehatan Kota Bontang. Pembahasannya mencakup :

A. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bontang berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan;
B. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bontang;
C. Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD terkait di Kota Bontang dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bontang;
D. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Kesehatan Kota Bontang.

Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025-2029, mengacu pada program/kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2025. Dengan demikian program/kegiatannya diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD, Renstra Dinas Kesehatan dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam

renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025 adalah :

a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
m. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabuapaten/Kota;
n. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
o. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan RI 2015-2019;
p. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Kota Bontang;
q. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Bontang;

I.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bontang tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan Renstra yang memuat perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bontang yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Pembangunan Kesehatan Kota Bontang sesuai dengan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.
2. Sebagai Pedoman Operasional program dan kegiatan pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bontang pada tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

I.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD

I.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan RENJA OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing OPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

III.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA OPD.

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

III.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rangkaian rangkaian program dan kegiatan, indikator program dan kegiatan serta anggaran

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting dan kaidah pelaksanaan yang perlu mendapatkan perhatian pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Secara umum, tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Bontang adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, dengan fungsi utama adalah perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagaimana digambarkan pada tabel II.1

Anggaran Dinas Kesehatan Adapun Realisasi dari Belanja Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 adalah Belanja Operasi yang merupakan belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa dan Belanja Hibah dalam satu tahun sebesar Rp. 370.766.857.582,- (90,28%) dan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 93.247.595.655,- atau 91,29%. Total Realisasi Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 Rp. 464.014.453.237 (90.48%).

Adapun usulan program/kegiatan Dinas Kesehatan sesuai dengan Renstra pada tahun 2024 adalah 5 Porgram, 23 Kegiatan dan 94 Dinas Kesehatan dan UPT sedangkan RSUD ada 24 Subkegiatan dengan jumlah total anggaran Rp. 512.782.694.327,00. Anggaran tersebut dialokasikan sebagian besar untuk Kegiatan Program di Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan serta RSUD Taman Husada Kota Bontang. Selain itu alokasi tersebut juga dominan dipergunakan untuk premi jaminan pelayanan kesehatan (PBI Kota Bontang), jasa administrasi perkantoran/pelayanan kesehatan untuk tenaga non PNS

dan pokir dalam bidang kesehatan. Untuk capian realisasi kinerja program/kegiatan OPD Dinas Kesehatan pada tahun 2024 dan perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD Dinas Kesehatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel II.2

Diproyeksikan bahwa pada tahun 2024, semua program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100% terutama untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai semua.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

a. Faktor Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia bidang kesehatan meski secara kuantitas telah tercukupi sesuai standar (jumlah, jenis tenaga), namun secara kualitas (kompetensi) masih perlu ditingkatkan keterampilannya dalam hal terkait dengan pelayanan, karena hal ini akan berperan dalam pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan secara menyeluruh serta diperlukan pengembangan kompetensi SDM baik dibidang teknis yang di butuhkan seperti Arsiparis, Administrasi Kesehatan dan jabatan fungsional tertentu.

   Disamping itu adanya kebijakan revitalisasi puskesmas pada yang dimulai Bulan Januari tahun 2012, yang berakibat pada pemekaran jumlah puskesmas yang sebelumnya hanya 3 (tiga) sekarang menjadi 6 (enam) sehingga berdampak pada kebutuhan ada keterbatasan terutama tenaga fungsional seperti tenaga medis dan paramedis yang merupakan sebagian tenaga kontrak sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan program dilapangan.

Selain itu kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan belum optimal, karena itu diperlukan perencanaan pelaksanaan kegiatan (Kerangka Acuan Kegiatan) yang baik sehingga program/kegiatan terjadwal sesuai dengan tahapan-tahapannya agar dapat berjalan sesuai dengan capaian kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Faktor masyarakat

Peran serta masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, karena seolah pembangunan kesehatan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Disamping itu mobilitas penduduk yang cukup tinggi sehingga menyulitkan dalam penetapan data sasaran untuk rencana intervensi kegiatan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Masih adanya puskesmas yang belum memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan sarana dan prasarana yang terbatas Disamping itu masih terbatasnya sarana tertentu terutama dalam menjangkau pelayanan di daerah perifer dalam menunjang pelayanan kesehatan dan sebagai Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seperti Puskesmas Bontang Lestari sebagai pusat pelayanan masyarakat terutama di wilayah pesisir, oleh karena itu sesuai dengan program proritas Wali kota Bontang yaitu

peningkatan layanan di wilayah perifer maka perlu dukungan sarana dan prasarana diantaranya sarana transportasi darat maupun laut yang akan digunakan dalam pelayanan kesehatan.

Prasarana kefarmasian juga perlu perhatian khusus dimana kebutuhan tersebut merupakan titik riskan dalam pelayanan kesehatan kuratif untuk menunjang peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bontang.

d. Faktor Lingkungan

Kebijakan Walikota saat itu untuk melakukan efisiensi anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tertunda bahkan tidak dilaksanakan, disamping itu kebijakan terkait dinamika regulasi pengelolaaan keuangan seperti pengaturan terkait dengan bantuan sosial dan hibah yang berefek pada pergeseran bantuan tersebut menjadi bagian dari tugas pokok dari fungsi Dinas Kesehatan.

Dari beberapa identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan menjadi hal yang dilakukan secara sistematis baik secara internal organisasi maupun yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai selama ini dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya jalinan koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder terkait baik intra dan sektor terkait serta pelibatan peran serta organisasi lain seperti Forum Kota Sehat (Forkohat), PKK. KPAD, LSM,CSR dan BPJS Kesehatan yang bergerak di bidang kesehatan dan lain-lain sehingga sebagian besar

kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang tahun 2021-2026, maka dalam upaya pengembangan pelayanan kesehatan untuk kedepan diambil langkah-langkah strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Kesehatan Kota Bontang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan puskesmas dan jejaringnya (Akreditasi Puskesmas)
2. Menerapkan regulasi perizinan kesehatan dan sistem kesehatan daerah.
3. Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam hal manfaat pelayanan kesehatan.
4. Peningkatan upaya pencegahan penyakit baik penyakit menular maupun tidak menular melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Termasuk kesiapsiagaan kegawatdaruratan, bencana, dan penanggulangan KLB/wabah serta peningkatan sistem surveilans masyarakat berbasis evidence base, sosialisasi, seminar, Home Visite (PHN), dll.
5. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan Kegiatan Gerakan Masyarakah Hidup Sehat melalui Pendekatan Keluarga dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat dengan 10 Indikator PHBS, peningkatan hygiene sanitasi lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum lainnya dengan survei STBM.
6. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan melalui peningkatan capacity Building dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat managerial maupun teknis termasuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan lingkungan kerja aparatur.

7. Mengembangkan infrastruktur pelayanan kesehatan melalui penambahan fasilitas pelayanan seperti puskesmas 24 jam dan pengembangan Public Safety Center (PSC).
8. Mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan, serta melindungi masyarakat dari bahan berbahaya.
9. Mengembangkan pelayanan kesehatan penunjang seperti laboratorium yang berbasis kearah pemeriksaan lingkungan, makanan dan minuman dalam upaya perlindungan terhadap masyarakat.
10. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti pengadaan alat kesehatan termasuk pemeliharaanya dalam rangka pemenuhan standar pelayanan dan pemenuhan revitalisasi puskesmas dan UPT Labkesda dalam peningkatan mutu pelayanan.
11. Proaktif dalam advokasi untuk mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dan swasta sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan kesehatan. Serta membangun kemitraan dengan penyedia pelayanan swasta, organisasi profesi bidang kesehatan termasuk tenaga swasta.
12. Peningkatan status gizi masyarakat melalui pemberian makanan tambahan bagi semua ibu hamil, balita yang tergolong rawan bermasalah gizi, atau kelompok miskin.
13. Mengembangkan regulasi, standar dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan serta menjamin perlindungan terhadap masyarakat.
14. Pembinaan, pemantauan, dan pengawasan secara terus menerus untuk perlindungan terhadap masyarakat meliputi anak sekolah, dan kelompok penduduk yang rawan seperti bayi, balita, dan ibu hamil dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sesuai target Nasional (RENSTRA dan SDG's).

Tabel II.2
Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan		Unit Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)						
(1)	(3)	(1)	(3)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)			(18)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	129,993,607,442	140,805,616,500	188,138,239,045	195,209,244,158	202,450,448,618	210,045,553,480	143,358,281,252	152,723,923,537	259,476,054,957	101.81	81.18	132.92	177,773,784,881	185,186,086,582	DINKES
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	221,460,440	83,000,000	1,089,000,000	647,200,000	711,200,000	781,380,000	143,968,734	56,627,500	414,622,100	173.46	5.20	64.05	588,873,407	205,139,445	DINKES
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	205,010,440	17,000,000.00	520,000,000	572,000,000	629,200,000	692,120,000	20,088,746	1,248,750	386,322,100	118.17	0.24	67.54	439,221,740	135,886,532	DINKES
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5,175,000	7,000,000.00	489,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	9,045,000	0	0.00	1.85	0.00	87,029,167	3,015,000	DINKES
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,375,000	50,000,000.00	40,000,000	44,000,000	48,400,000	53,240,000	116,979,984	19,338,750	0	233.96	48.35	0.00	40,002,500	45,439,578	DINKES
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,900,000	7,000,000.00	20,000,000	22,000,000	24,200,000	26,620,000	6,900,004	26,995,000	28,500,000	98.57	134.98	129.55	17,786,667	20,758,335	DINKES
	Kegiatan RSUD		**Kegiatan RSUD**															
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RSUD)		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RSUD)	0	1,200,000	10,000,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2,566,667	0	RSUD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (RSUD)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (RSUD)	0	400,000	5,000,000	400,000	500,000	500,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1,133,333	0	RSUD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RSUD)		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RSUD)	0	400,000	5,000,000	400,000	500,000	500,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1,133,333	0	RSUD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	110,116,409,780	119,030,000,000	120,240,000,000	122,174,000,000	123,189,400,000	124,208,840,000	113,127,036,853	125,275,782,852	147,305,216,501	95.04	104.19	120.57	119,826,441,630	128,569,345,402	DINKES
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42,303,750,359	47,000,000,000	48,000,000,000	49,000,000,000	50,000,000,000	51,000,000,000	44,124,048,665	49,338,489,310	126,603,471,160	93.88	104.04	262.46	47,883,358,393	74,222,003,045	DINKES
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,727,500	20,000,000.00	140,000,000	154,000,000	169,400,000	186,340,000	21,910,000	1,340,000	66,951,200	109.55	0.96	43.47	115,077,917	30,067,067	DINKES
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8,000,000		50,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	4,020,000	0	0.00	8.04	0.00	17,600,000	2,010,000	DINKES
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,225,000	10,000,000.00	50,000,000	10,000,000	10,000,000	12,500,000	20,774,992	4,020,000	0	207.75	8.04	0.00	15,787,500	8,264,997	DINKES
	Kegiatan RSUD		**Kegiatan RSUD**															
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	67,208,565,063	71,191,800,000	71,191,800,000	72,191,800,000	72,191,800,000	72,191,800,000	68,308,551,512	69,313,688,446	18,543,460,811	95.95	97.36	25.69	71,027,927,511	52,055,233,590	RSUD
	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN (RSUD)		Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN (RSUD)	573,141,858	808,200,000	808,200,000	808,200,000	808,200,000	808,200,000	651,751,684	6,014,225,096	91,333,330	80.64	744.15	11.30	769,023,643	2,252,436,703	RSUD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	0		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000		28,757,250	43,780,000	0.00	95.86	145.93	24,000,000	36,268,625	DINKES
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	28,757,250	43,780,000	0.00	95.86	145.93	30,000,000	24,179,083	DINKES
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	0	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	2,280,000	37,660,000	0.00	15.20	251.07	10,000,000	13,313,333	DINKES
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	o	2,280,000	37,660,000	0.00	15.20	251.07	12,000,000	13313333.33	DINKES
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	624,951,948	380,000,000	1,570,000,000	770,000,000	620,000,000	820,000,000	366,754,500	2,839,437,602	5,047,217,367	96.51	180.86	655.48	797,491,991	2,751,136,490	DINKES
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	160,490,000	180,000,000	200,000,000	150,000,000		150,000,000	366,754,500	0	734,470,000	203.75	0.00	489.65	168,098,000	367,074,833	DINKES
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		400,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	4,854,000	19,475,000	0.00	1.21	97.38	115,000,000	8,109,667	DINKES
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	344,460,050		670,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	1,062,227,440	4,060,557,630	0.00	158.54	1624.22	352,896,010	1,707,595,023	DINKES
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	23,600,000	103,700,000	0.00	23.60	103.70	100,000,000	42,433,333	DINKES
	Kegiatan RSUD		**Kegiatan RSUD**															
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RSUD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	119,981,898	200,000,000	200,000,000	250,000,000	250,000,000	300,000,000	0	1,748,756,162	129,014,737	0.00	874.38	51.61	219,996,983	625,923,633	RSUD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	3,876,156,175	3,515,000,000	7,886,000,000	8,729,600,000	9,447,060,000	10,098,766,000	3,732,485,445	6,404,369,377	85,342,362,927	106.19	81.21	977.62	7,258,763,696	31,826,405,916	DINKES
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,314,100	5,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	13,629,580	8,145,000	70,890,000	272.59	8.15	64.45	80,402,350	30,888,193	DINKES
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165,089,110	150,000,000	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	1,567,587,253	2,970,784,770	6,696,443,215	1045.06	1485.39	3043.84	207,214,852	3,744,938,413	DINKES
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146,157,313	250,000,000	250,000,000	275,000,000	300,000,000	300,000,000	257,757,815	171,973,800	192,052,000	103.10	68.79	69.84	253,526,219	207,261,205	DINKES

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan		Unit Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)						
(1)	(3)	(1)	(3)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)			(18)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	84,277,700	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	292,820,000	343,932,775	161,062,798	257,332,305	171.97	73.21	106.34	217,549,617	254,109,293	DINKES
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,240,000	10,000,000	11,000,000	12,100,000	13,310,000	14,641,000	18,480,000	0	9,036,000	184.80	0.00	74.68	11,715,167	9,172,000	DINKES
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		50,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	45,947,000	53,251,500	0.00	91.89	177.51	35,000,000	33,066,167	DINKES
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540,128,876	900,000,000	4,855,000,000	5,340,500,000	5,874,550,000	6,462,005,000	813,538,413	2,129,844,361	3,667,422,118	90.39	43.87	68.67	3,995,363,979	2,203,601,631	DINKES
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		100,000,000	0		100,000,000	0	209,775,000	0	0.00	209.78	0.00	66,666,667	69,925,000	DINKES
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		100,000,000	0	100,000,000		0	275,700,000	0	0.00	275.70	0.00	66,666,667	91,900,000	DINKES
	Kegiatan RSUD		**Kegiatan RSUD**															
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,356,589,360	1,500,000,000	1,300,000,000	1,800,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	603,515,302	0	73,378,761,016	40.23	0.00	4076.60	1,659,431,560	24,660,758,773	RSUD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,356,589,360	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0	351,687,450	0.00	0.00	87.92	559,431,560	117,229,150	RSUD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	-	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	358,338,534	0.00	0.00	179.17	66,666,667	119,446,178	RSUD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204,770,356	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	114,044,307	431,136,648	307,148,789	114.04	431.14	307.15	117,461,726	284,109,915	RSUD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	0	500,000,000	1,010,000,000	1,121,000,000	1,133,100,000	646,410,000	2,132,433,500	168,000,000	1,733,344,637	426.43	16.63	154.62	735,085,000	1,344,592,712	DINKES
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	500,000,000	0	0	0	1,250,760,000	0	0	0.00	0.00	0.00	83,333,333	416,920,000	DINKES
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	-	500,000,000	500,000,000	0	400,000,000	0	1,050,144,637	0.00	0.00	210.03	166,666,667	483,381,546	DINKES
	Pengadaan Mebel		Pengadaan Mebel	0	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	146,410,000	291,086,500	168,000,000	0	291.09	152.73	0.00	101,751,667	153,028,833	DINKES
	Kegiatan RSUD		**Kegiatan RSUD**															
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RSUD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RSUD
	Pengadaan Mebel		Pengadaan Mebel	0	400,000,000	400,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	190,587,000	0	683,200,000	47.65	0.00	136.64	383,333,333	291,262,333	RSUD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	13,747,048,468	14,755,000,000	53,470,798,394	58,487,878,233	63,896,666,057	69,846,332,662	13,038,968,394	14,418,938,315	13,913,410,418	88.37	26.97	23.80	45,700,620,636	13,792,439,042	DINKES
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,043,200	5,000,000	5,500,000	6,050,000	6,655,000	7,320,500	0	306,500	744,780	0.00	5.57	12.31	5,928,117	350,427	DINKES
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	180,956,500	300,000,000	330,000,000	363,000,000	399,300,000	439,230,000	269,633,016	296,388,371	354,380,534	89.88	89.81	97.63	335,414,417	306,800,640	DINKES
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,186,287,105	10,200,000,000	48,835,298,394	53,718,828,233	59,090,711,057	64,999,782,162	9,315,664,180	8,681,740,644	8,217,711,299	91.33	17.78	15.30	41,171,817,825	8,738,372,041	DINKES
	Kegiatan RSUD		**Kegiatan RSUD**															
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RSUD
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3,374,761,663	4,250,000,000	4,300,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	3,453,671,198	5,440,502,800	5,346,573,805	81.26	126.52	121.51	4,187,460,277	4,746,915,934	RSUD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1,407,580,631	2,542,616,500	2,827,440,651	3,370,809,930	3,557,890,923	3,763,680,016	10,816,633,826	3,532,010,641	5,632,241,007	425.41	124.92	167.09	2,911,669,775	6,660,295,158	DINKES
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,595,500	1,300,000,000	300,000,000	330,000,000	363,000,000	399,300,000	1,125,105,375	185,809,869	246,402,330	86.55	61.94	74.67	455,482,583	519,105,858	DINKES
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	314,518,410	0	1,000,000,000	1,100,000,000	1,210,000,000	1,331,000,000	0	990,159,400	911,436,470	0.00	99.02	82.86	825,919,735	633,865,290	DINKES
	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Mebel	-		10,000,000	11,000,000	12,100,000	13,310,000	100,000,000	0	5,900,000	0.00	0.00	53.64	11,602,500	35,300,000	DINKES
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,118,000	117,150,000	188,571,247	207,538,372	228,292,209	251,121,430	182,773,750	80,826,980	74,232,379	156.02	42.84	35.77	168,648,543	112,611,036	DINKES
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18,304,000	125,466,500	202,065,053	222,271,558	244,498,714	268,948,586	8,812,067,721	407,287,118	0	7023.44	201.56	0.00	180,259,068	3,073,118,280	DINKES
	Kegiatan RSUD		**Kegiatan RSUD**															
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	RSUD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan		Unit Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)						
(1)	(3)	(1)	(3)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)			(18)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42,680,430	96,770,000	96,770,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	47,159,660	45,570,000	65,634,316	48.73	47.09	65.63	89,370,072	52,787,992	RSUD
	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Mebel	28,072,000	30,000,000	30,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	39,678,667	0	RSUD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	346,610,000	273,295,648	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	549,527,320	444,928,350	1,760,477,650	201.07	111.23	440.12	369,984,275	918,311,107	RSUD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	398,172,986	400,000,000	400,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	199,990,600	396,079,339	0.00	50.00	66.01	499,695,498	198,689,980	RSUD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,509,305	199,934,352	199,934,352	350,000,000	350,000,000	350,000,000	0	1,177,438,324	2,172,078,523	0.00	588.91	620.59	274,896,335	1,116,505,616	RSUD
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	134,779,595,313	125,546,185,037	91,835,636,300	120,927,117,704	127,992,421,188	145,859,448,008	211,073,277,257	206,092,743,966	260,172,590,902	168.12	224.41	215.15	124,490,067,258	225,779,537,375	DINKES
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	20,189,006,178	22,562,625,205	21,839,640,238	25,120,896,612	22,252,552,987	28,012,392,987	36,277,137,473	54,969,401,559	73,750,024,120	180.78	251.70	293.58	23,329,519,035	54,998,854,384	DINKES
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	6,412,219,015		4,500,000,000				0	0	0	0.00	0.00	0.00	5,456,109,508	0	DINKES
	Pembangunan Puskesmas		Pembangunan Puskesmas		4,500,000,000	-	5,000,000,000		0	0	0	2,341,782,300	0.00	0.00	46.84	2,375,000,000	780,594,100	DINKES
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	765,756,236	400,000,000	-	1,500,000,000	0	0	1,926,289,211	0	322,050,600	481.57	0.00	21.47	444,292,706	749,446,604	DINKES
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya								0	579,563,290	0.00	0.00	0.00		289,781,645	DINKES
	Pengembangan Puskesmas		Pengembangan Puskesmas	62,850,000		-	1,200,000,000	0	2,000,000,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	652,570,000	0	DINKES
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	828,951,762	400,000,000	600,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1,853,127,608	670,678,150	161,749,075	463.28	83.83	80.87	438,158,627	895,184,944	DINKES
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		0	100,000,000	0	0	150,000,000	0	1,157,844,350	1,109,849,003	0.00	1157.84	0.00	50,000,000	755,897,784	DINKES
	Pengadaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	470,139,301	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	804,321,432	619,597,225	0	268.11	206.53	0.00	328,356,550	474,639,552	DINKES
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,137,489,330	400,000,000	440,000,000	484,000,000	532,400,000	585,640,000	909,545,855	462,947,875	0	227.39	105.22	0.00	596,588,222	457,497,910	DINKES
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,965,891,915	5,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	9,000,000,000	12,000,000,000	10,579,055,316	3,535,433,462	3,025,161,255	192.35	70.71	60.50	6,410,981,986	5,713,216,678	DINKES
	Pengadaan Obat, Vaksin		Pengadaan Obat, Vaksin	1,160,973,790	3,000,000,000	2,300,000,000	2,530,000,000	2,783,000,000	3,061,300,000	3,971,630,892	1,090,340,330	0	132.39	47.41	0.00	2,472,545,632	1,687,323,741	DINKES
	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Pengadaan Bahan Habis Pakai	2,247,037,876	1,500,000,000	1,650,000,000	1,815,000,000	1,996,500,000	2,196,150,000	7,194,179,024	3,809,185,802	0	479.61	218.74	0.00	1,900,781,313	3,601,121,609	DINKES
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							0	0	2,842,931,985	0.00	0.00	0.00		947,643,995	DINKES
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	146,410,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	122,102,000	0	DINKES
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20,790,000		100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	96,978,000	0	DINKES
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	192,673,721	300,000,000	330,000,000	363,000,000	399,300,000	439,230,000	1,079,060,275	261,017,336	274,108,700	359.69	79.10	75.51	337,367,287	538,062,104	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	146,410,000	0	0	23,700,000	0.00	0.00	19.59	122,102,000	7,900,000	DINKES
	Kegiatan RSUD		**Kegiatan RSUD**															
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	293,378,050	0	-	-	600,000,000	600,000,000	0	0	3,543,176,830	0.00	0.00	0.00	298,675,610	1,181,058,943	RSUD
	Pengembangan Rumah Sakit		Pengembangan Rumah Sakit	0	0	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	32,850,279,509	0.00	0.00	5475.05	200,000,000	10,350,093,170	RSUD
	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit		Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	347,419,166	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	451,138,953	0	0	0.00	0.00	0.00	391,236,528	150,379,651	RSUD
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	625,847,265	62,625,205	99,640,238	376,896,612	654,152,987	654,152,987	0	0	0	0.00	0.00	0.00	412,219,216	0	RSUD
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,702,298,325	6,000,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000	7,115,390,055	43,562,357,029	26,675,671,573	118.59	1210.07	740.99	4,450,383,054	25,784,472,886	RSUD
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	615,785,900	0	500,000,000	500,000,000	0	0	393,398,852	0	0	0.00	0.00	0.00	269,297,650	131,132,951	RSUD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan		Unit Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)						
(1)	(3)	(1)	(3)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)			(18)
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	339,504,526	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0		0.00	0.00	156,584,088	0	RSUD
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**113,877,439,635**	**101,083,559,832**	**69,101,234,862**	**99,661,135,546**	**105,307,243,100**	**112,437,974,010**	**172,251,700,508**	**150,720,833,805**	**179,105,050,719**	**170.41**	**218.12**	**179.71**	**100,244,765,498**	**167,359,195,011**	**DINKES**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	302,526,149	250,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	161,172,580	84,921,200	105,214,714	64.47	84.92	95.65	169,437,692	117,102,831	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260,000	0.00	0.00	0.00	0	1,086,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0.00	0.00	0.00	0	266,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0.00	0.00	0.00	0	400,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0.00	0.00	0.00	0	666,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bontang Barat)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bontang Barat)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,710,000	0.00	0.00	0.00	0	2,903,333	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bontang Lestari)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,580,000	0.00	0.00	0.00	0	3,526,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		100,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	228,045,936	83,939,100	243,977,256	228.05	83.94	221.80	112,820,000	185,322,097	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,925,000	0.00	0.00	0.00	0	2,308,333	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000	0.00	0.00	0.00	0	616,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Bontang Barat)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Bontang Barat)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,000	0.00	0.00	0.00	0	553,333	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Bontang Lestari)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	0.00	0.00	0.00	0	1,900,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		100,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	267,059,888	83,598,500	135,455,622	267.06	83.60	123.14	112,820,000	162,038,003	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	256,945,755	150,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	349,973,652	97,354,000	94,199,280	233.32	97.35	85.64	145,174,293	180,508,977	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	164,478,500	150,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	382,688,840	44,557,400	95,744,473	255.13	44.56	87.04	129,763,083	174,330,238	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	79,800,000	0.00	0.00	0.00	0	26,600,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000	0.00	0.00	0.00	0	1,800,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300,000	0.00	0.00	0.00	0	3,766,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Bontang Barat)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Bontang Barat)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,800,000	0.00	0.00	0.00	0	4,266,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Bontang Lestari)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000	0.00	0.00	0.00	0	2,466,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8,838,600	200,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	404,737,600	69,189,752	106,356,874	202.37	69.19	96.69	112,156,433	193,428,075	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	153,473,297	100,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	185,829,616	100,088,300	101,948,890	185.83	100.09	92.68	119,595,550	129,288,935	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13,070,638	100,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	213,219,968	238,893,704	175,767,330	213.22	238.89	159.79	96,195,106	209,293,667	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5,109,891	50,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	54,742,100	119,063,441	419,620,293	109.48	119.06	381.47	86,534,982	197,808,611	DINKES

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan		Unit Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)						
(1)	(3)	(1)	(3)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)			(18)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1,720,000	100,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	116,625,000	32,260,100	62,940,000	116.63	32.26	57.22	94,303,333	70,608,367	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20,960,346	100,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	164,153,626	266,825,040	459,942,169	164.15	266.83	418.13	97,510,058	296,973,612	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	0.00	0.00	0.00	0	2,266,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0.00	0.00	0.00	0	833,333	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0.00	0.00	0.00	0	1,100,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0.00	0.00	0.00	0	1,666,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Bontang Barat)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Bontang Barat)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0.00	0.00	0.00	0	666,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Bontang Lestari)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0.00	0.00	0.00	0	233,333	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	71,498,500	100,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	293,605,332	42,481,600	156,517,182	293.61	42.48	142.29	105,933,083	164,201,371	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0.00	0.00	0.00	0	216,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0.00	0.00	0.00	0	666,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Bontang Barat)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Bontang Barat)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0.00	0.00	0.00	0	600,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Bontang Lestari)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0.00	0.00	0.00	0	83,333	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		100,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	0	0	469,631,884	0.00	0.00	426.94	112,820,000	156,543,961	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4,483,114,053	5,000,000,000	300,000,000	330,000,000	363,000,000	399,300,000	8,629,438,957	45,056,600	274,272,120	143.82	15.02	83.11	1,979,235,676	2,982,922,559	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	133,549,463	450,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	435,192,970	320,537,569	231,624,350	96.71	320.54	210.57	174,608,244	329,118,296	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	158,601,258	0.00	0.00	0.00	0	52,867,086	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	76,428,904	0.00	0.00	0.00	0	25,476,301	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	90,132,294	0.00	0.00	0.00	0	30,044,098	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	73,248,192	0.00	0.00	0.00	0	24,416,064	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Barat)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Barat)	0	0	0	0	0	0	0	0	67,977,859	0.00	0.00	0.00	0	22,659,286	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Lestari)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,515,800	0.00	0.00	0.00	0	3,171,933	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10,500,000	130,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	608,148,004	64,339,881	87,804,880	467.81	64.34	79.82	100,766,667	253,430,922	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	211,789,600	350,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	753,369,367	654,628,087	283,487,300	215.25	654.63	257.72	170,981,600	563,828,251	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0.00	0.00	0.00	0	2,000,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0.00	0.00	0.00	0	2,666,667	PUSKESMAS

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan		Unit Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)						
(1)	(3)	(1)	(3)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)			(18)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0.00	0.00	0.00	0	500,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Bontang Barat)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Bontang Barat)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0.00	0.00	0.00	0	500,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Bontang Lestari)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0.00	0.00	0.00	0	1,033,333	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	140,041,000	200,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	933,880,047	84,677,876	709,870,169	466.94	84.68	645.34	134,023,500	576,142,697	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		100,000,000	100,000,000	200,000,000	220,000,000	242,000,000	457,374,484	31,396,000	180,716,775	457.37	31.40	90.36	172,400,000	223,162,420	DINKES
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2,170,000	100,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	0	216,976,776	394,128,130	0.00	216.98	358.30	94,378,333	203,701,635	DINKES
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)		Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	64,625,000	0.00	0.00	0.00	0	21,541,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)		Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	49,910,000	0.00	0.00	0.00	0	16,636,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)		Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	47,806,000	0.00	0.00	0.00	0	15,935,333	PUSKESMAS
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)		Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	32,100,000	0.00	0.00	0.00	0	10,700,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Barat)		Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Barat)	0	0	0	0	0	0	0	0	56,019,000	0.00	0.00	0.00	0	18,673,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Lestari)		Pengelolaan Surveilans Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	0	0	0	0	0	0	0	0	35,630,000	0.00	0.00	0.00	0	11,876,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	0	750,000,000	400,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	1,287,954,757	601,701,600	0	171.73	150.43	0.00	541,666,667	629,838,786	DINKES
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	328,046,575	300,000,000	300,000,000	330,000,000	363,000,000	399,300,000	629,105,779	875,769,366	920,531,249	209.70	291.92	278.95	336,724,429	808,468,798	DINKES
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	133,723,000	0.00	0.00	0.00	0	44,574,333	PUSKESMAS
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	79,310,000	0.00	0.00	0.00	0	26,436,667	PUSKESMAS
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	77,550,000	0.00	0.00	0.00	0	25,850,000	PUSKESMAS
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	86,222,000	0.00	0.00	0.00	0	28,740,667	PUSKESMAS
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bontang Barat)		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bontang Barat)	0	0	0	0	0	0	0	0	100,150,000	0.00	0.00	0.00	0	33,383,333	PUSKESMAS
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bontang Lestari)		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	0	0	0	0	0	0	0	0	48,494,800	0.00	0.00	0.00	0	16,164,933	PUSKESMAS
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	21,460,189,600	24,000,000,000	25,000,000,000	27,500,000,000	30,250,000,000	33,275,000,000	47,633,686,364	23,297,501,900	25,463,060,600	198.47	93.19	92.59	26,314,198,267	32,131,416,288	DINKES
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BU1)		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BU1)	1,081,005,140	1,414,947,169	1,556,441,886	1,712,086,074	1,883,294,682	2,071,624,150	1,368,433,815	910,814,478	1,458,263,145	96.71	58.52	85.17	1,619,899,850	1,245,837,146	PUSKESMAS
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BU2)		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BU2)	950,632,730	1,326,962,167	1,459,659,384	1,605,624,222	1,766,186,645	1,942,805,309	1,210,089,600	767,672,705	1,288,814,994	91.19	52.59	80.27	1,508,645,076	1,088,859,100	PUSKESMAS
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BS1)		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BS1)	878,548,563	1,431,428,218	1,574,571,040	1,732,028,144	1,905,230,958	2,095,754,054	1,240,318,544	846,282,322	1,029,372,509	86.65	53.75	59.43	1,602,926,829	1,038,657,792	PUSKESMAS
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BS2)		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BS2)	1,061,042,036	1,224,117,076	1,346,528,783	1,481,181,661	1,629,299,827	1,792,229,810	1,029,351,919	604,073,726	1,028,563,267	84.09	44.86	69.44	1,422,399,866	887,329,637	PUSKESMAS
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BB)		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BB)	736,722,421	973,988,408	1,071,387,248	1,178,525,973	1,296,378,571	1,426,016,428	883,707,663	610,029,765	1,053,621,051	90.73	56.94	89.40	1,113,836,508	849,119,493	PUSKESMAS
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BL)		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BL)	368,389,531	485,164,020	533,680,422	587,048,464	645,753,311	710,328,642	399,770,245	236,044,008	405,297,047	82.40	44.23	69.04	555,060,732	347,037,100	PUSKESMAS
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN Klinik PNS)		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN Klinik PNS)	1,282,507,664	1,028,628,931	1,131,491,924	1,244,641,007	1,369,105,107	1,506,015,618	1,152,227,545	551,817,277	1,175,506,009	112.02	48.77	94.45	1,260,398,375	959,850,277	KLINIK PNS

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan		Unit Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)						
(1)	(3)	(1)	(3)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)			(18)
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM Baru)		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM Baru)		0	400,000,000	440,000,000	484,000,000	532,400,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	371,280,000	0	PUSKESMAS
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	233,161,344	500,000,000	500,000,000	550,000,000	605,000,000	665,500,000	983,569,678	228,204,419	393,783,190	196.71	45.64	71.60	508,943,557	535,185,762	DINKES
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	772,247,600	27,493,166	23,040,340	0.00	27.49	23.04	100,000,000	274,260,369	DINKES
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan		Pengelolaan Penelitian Kesehatan		-	100,000,000	0	500,000,000		0	0	0	0.00	0.00	0.00	150,000,000	0	DINKES
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RS Baru)		Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RS Baru)			100,000,000	1,800,000,000	2,100,000,000	4,400,000,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2,100,000,000	0	DINKES
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT PKM BU1)		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT PKM BU1)	431,284,230	1,165,842,354	800,000,000	880,000,000	968,000,000	1,064,800,000	728,645,654	1,801,834,301	3,377,105,291	62.50	225.23	383.76	884,987,764	1,969,195,082	PUSKESMAS
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT PKM BU2)		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT PKM BU2)	300,358,557	1,032,042,067	800,000,000	880,000,000	968,000,000	1,064,800,000	728,978,110	1,234,516,132	2,795,434,102	70.63	154.31	317.66	840,866,771	1,586,309,448	PUSKESMAS
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT PKM BS1)		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT PKM BS1)	154,236,888	897,910,045	800,000,000	880,000,000	968,000,000	1,064,800,000	373,556,713	2,141,962,370	3,171,180,374	41.60	267.75	360.36	794,157,822	1,895,566,486	PUSKESMAS
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT PKM BS2)		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT PKM BS2)	357,368,491	1,116,005,590	800,000,000	880,000,000	968,000,000	1,064,800,000	733,165,182	1,109,583,918	2,707,390,514	65.70	138.70	307.66	864,362,347	1,516,713,205	PUSKESMAS
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT PKM BB)		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT PKM BB)	231,265,775	896,962,330	800,000,000	880,000,000	968,000,000	1,064,800,000	828,955,520	1,474,172,887	3,006,325,718	92.42	184.27	341.63	806,838,018	1,769,818,042	PUSKESMAS
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT PKM BL)		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT PKM BL)	358,457,439	959,561,457	800,000,000	880,000,000	968,000,000	1,064,800,000	684,739,885	2,199,602,967	3,297,076,136	71.36	274.95	374.67	838,463,816	2,060,472,996	PUSKESMAS
	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT PKM Baru)		Operasional Pelayanan Puskesmas (UPT PKM Baru)	0		800,000,000	880,000,000	968,000,000	1,064,800,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	742,560,000	0	PUSKESMAS
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (IFK dan Klinik PNS)		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (IFK dan Klinik PNS)	447,462,074	750,000,000	500,000,000	550,000,000	605,000,000	665,500,000	0	0	99,025,000	0.00	0.00	18.00	586,327,012	33,008,333	KLINIK PNS
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)	830,010,616	1,000,000,000	500,000,000	550,000,000	605,000,000	665,500,000	742,329,872	1,907,900,132	1,977,210,954	74.23	381.58	359.49	691,751,769	1,542,480,319	LABKES
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Bontang Utara 1)		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Bontang Utara 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	13,650,000	0.00	0.00	0.00	0	4,550,000	PUSKESMAS
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Bontang Utara 2)		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Bontang Utara 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0.00	0.00	0.00	0	700,000	PUSKESMAS
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Bontang Selatan 1)		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Bontang Selatan 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,262,600	0.00	0.00	0.00	0	1,087,533	PUSKESMAS
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Bontang Selatan 2)		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Bontang Selatan 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670,000	0.00	0.00	0.00	0	890,000	PUSKESMAS
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Bontang Barat		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Bontang Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	3,094,000	0.00	0.00	0.00	0	1,031,333	PUSKESMAS
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		150,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000		461,446,760	52,022,000	0.00	461.45	47.29	122,820,000	256,734,380	DINKES
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	DINKES
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) UPT Puskesmas Bontang Utara 2)		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0.00	0.00	0.00	0	133,333	PUSKESMAS
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0.00	0.00	0.00	0	66,667	PUSKESMAS
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	PUSKESMAS
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) UPT Puskesmas Bontang Barat)		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) UPT Puskesmas Bontang Barat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	PUSKESMAS
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) UPT Puskesmas Bontang Lestari)		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) UPT Puskesmas Bontang Lestari)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	PUSKESMAS
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		150,000,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	306,005,772	66,989,820	53,120,144	204.00	66.99	48.29	122,820,000	142,038,579	DINKES
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	448,832,904	125,002,664	507,072,000	0.00	125.00	460.97	116,025,000	360,302,523	DINKES

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan		Unit Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)						
(1)	(3)	(1)	(3)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)			(18)
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Utara 1)		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Utara 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0.00	0.00	0.00	0	833,333	PUSKESMAS
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Utara 2)		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Utara 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0.00	0.00	0.00	0	2,000,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Selatan 1)		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Selatan 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0.00	0.00	0.00	0	1,266,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Barat)		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Barat)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0.00	0.00	0.00	0	1,000,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Lestari)		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (UPT Puskesmas Lestari)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	PUSKESMAS
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0.00	0.00	0.00	0	233,333	PUSKESMAS
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0.00	0.00	0.00	0	400,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0	333,333	PUSKESMAS
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (UPT Puskesmas Bontang Barat)		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (UPT Puskesmas Bontang Barat)	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0.00	0.00	0.00	0	233,333	PUSKESMAS
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (UPT Puskesmas Bontang Lestari)		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	13,673,000	0.00	0.00	0.00	0	4,557,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0.00	0.00	0.00	0	400,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,360,917	0.00	0.00	0.00	0	2,120,306	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,144,000	0.00	0.00	0.00	0	2,714,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (UPT Puskesmas Bontang Barat)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (UPT Puskesmas Bontang Barat)	0	0	0	0	0	0	0	0	15,342,000	0.00	0.00	0.00	0	5,114,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (UPT Puskesmas Bontang Lestari)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	0	0	0	0	0	0	0	0	40,112,200	0.00	0.00	0.00	0	13,370,733	PUSKESMAS
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (Dinkes)		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (Dinkes)	0	0	0	0	0	0	0	0	20,700,000	0.00	0.00	0.00	0	6,900,000	DINKES
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	35,155,000	0.00	0.00	0.00	0	11,718,333	PUSKESMAS
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0.00	0.00	0.00	0	133,333	PUSKESMAS
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	0.00	0.00	0.00	0	1,900,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0.00	0.00	0.00	0	1,000,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (UPT Puskesmas Bontang Barat)		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (UPT Puskesmas Bontang Barat)	0	0	0	0	0	0	0	0	21,581,000	0.00	0.00	0.00	0	7,193,667	PUSKESMAS
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (UPT Puskesmas Bontang Lestari)		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000,000	0.00	0.00	0.00	0	11,000,000	PUSKESMAS
	Kegiatan RSUD		**Kegiatan RSUD**															
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	199,018,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	0	50,550,000	0.00	0.00	8.43	533,169,667	16,850,000	RSUD
	Operasional pelayanan Rumah Sakit (Oprasional BLUD)		Operasional pelayanan Rumah Sakit (Oprasional BLUD)	76,207,946,169	50,000,000,000	23,827,474,175	48,000,000,000	48,000,000,000	48,000,000,000	93,446,725,420	105,959,632,196	117,241,891,570	186.89	444.70	244.25	49,005,903,391	105,549,416,395	RSUD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan		Unit Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)						
(1)	(3)	(1)	(3)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)			(18)
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	303,219,000	600,000,000	529,761,200	642,450,000	517,720,000	683,692,000	394,697,032	78,710,270	511,901,400	65.78	14.86	79.68	546,140,367	328,436,234	DINKES
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	10,000,000	20,000,000.00	32,210,200	24,200,000	26,620,000	29,282,000	36,562,496	3,027,270	0	182.81	9.40	0.00	23,718,700	13,196,589	DINKES
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	60,484,000	250,000,000.00	100,000,000	250,000,000	100,000,000	250,000,000	110,565,050	0	255,411,400	44.23	0.00	102.16	168,414,000	121,992,150	DINKES
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Utara 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	PUSKESMAS
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Utara 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	PUSKESMAS
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Selatan 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	PUSKESMAS
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Selatan 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,330,000	0.00	0.00	0.00	0	3,330,000	PUSKESMAS
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Barat		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	PUSKESMAS
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Lestari)		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (UPT Puskesmas Bontang Lestari)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	PUSKESMAS
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	29,635,000	100,000,000.00	161,051,000	121,000,000	133,100,000	146,410,000	247,569,486	75,683,000		247.57	46.99	0.00	115,199,333	161,626,243	DINKES
	Kegiatan RSUD		**Kegiatan RSUD**															
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	203,100,000	230,000,000	236,500,000	247,250,000	258,000,000	258,000,000	0	0	246,500,000	0.00	0.00	99.70	238,808,333	82,166,667	RSUD
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	409,930,500	1,300,000,000.00	365,000,000	461,500,000	509,650,000	519,615,000	2,149,742,244	323,798,332	6,805,614,663	165.36	88.71	1474.67	594,282,583	3,093,051,746	DINKES
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		1,000,000,000.00	50,000,000	100,000,000	110,000,000	100,000,000	1,411,377,776	0	5,222,884,910	141.14	0.00	5222.88	272,000,000	2,211,420,895	DINKES
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	20,162,500	150,000,000.00	150,000,000	180,000,000	200,000,000	200,000,000	363,733,154	290,621,332	1,538,489,123	242.49	193.75	854.72	150,027,083	730,947,870	DINKES
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	389,768,000	150,000,000.00	165,000,000	181,500,000	199,650,000	219,615,000	374,631,314	33,177,000	44,240,630	249.75	20.11	24.38	217,588,833	150,682,981	DINKES
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	1,153,379,647	1,410,000,000	313,500,000	1,676,250,000	1,816,375,000	1,733,012,500	5,145,871,960	3,470,080,244	6,828,917,897	364.96	1106.88	407.39	1,350,419,525	5,148,290,034	DINKES
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	16,772,200	25,000,000	27,500,000	30,250,000	33,275,000	36,602,500	0	0	38,416,000	0.00	0.00	127.00	28,233,283	12,805,333	DINKES
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	16,772,200	25,000,000	27,500,000	30,250,000	33,275,000	36,602,500	0	0	38,416,000	0.00	0.00	127.00	28,233,283	12,805,333	DINKES
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	1,015,706,447	100,000,000	210,000,000	121,000,000	233,100,000	146,410,000	123,104,264	178,287,220	173,078,465	123.10	84.90	143.04	304,369,408	158,156,650	DINKES
	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	803,571,447	-	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0		0.00	0.00	0.00	167,261,908	0	DINKES
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	212,135,000	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	146,410,000	123,104,264	178,287,220	173,078,465	123.10	162.08	143.04	137,107,500	158,156,650	DINKES
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	120,901,000	1,285,000,000	76,000,000	1,525,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000	5,022,767,696	3,291,793,024	6,617,423,432	390.88	4331.31	433.93	1,017,816,833	4,977,328,051	DINKES

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan		Unit Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)						
(1)	(3)	(1)	(3)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)			(18)
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120,901,000	1,000,000,000	26,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	4,825,917,696	1,501,666,147	3,431,541,167	482.59	5775.64	285.96	791,150,167	3,253,041,670	DINKES
	Kegiatan RSUD		**Kegiatan RSUD**															
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	285,000,000	50,000,000	325,000,000	350,000,000	350,000,000	196,850,000	1,790,126,877	3,185,882,265	69.07	3580.25	980.27	226,666,667	1,724,286,381	RSUD
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	491,593,300	360,000,000	490,000,000	539,000,000	592,900,000	652,190,000	1,635,265,232	340,942,378	574,440,322	454.24	69.58	106.58	520,947,217	850,215,977	DINKES
	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		**Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	59,654,900	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	146,410,000	25,359,792	17,768,400	124,014,305	25.36	16.15	102.49	111,694,150	55,714,166	DINKES
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	59,654,900	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	146,410,000	25,359,792	17,768,400	124,014,305	25.36	16.15	102.49	111,694,150	55,714,166	DINKES
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	426,288,400	100,000,000	204,000,000	224,400,000	246,840,000	271,524,000	1,140,569,592	280,136,678	329,474,366	1140.57	137.32	146.82	245,508,733	583,393,545	DINKES
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	426,288,400	100,000,000	204,000,000	224,400,000	246,840,000	271,524,000	1,140,569,592	280,136,678	329,474,366	1140.57	137.32	146.82	245,508,733	583,393,545	DINKES
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**		100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	146,410,000	388,159,284	30,192,400	71,217,151	388.16	27.45	58.86	122,102,000	163,189,612	DINKES
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	146,410,000	388,159,284	30,192,400	71,217,151	388.16	27.45	58.86	122,102,000	163,189,612	DINKES
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	5,650,000	60,000,000	66,000,000	72,600,000	79,860,000	87,846,000	81,176,564	12,844,900	49,734,500	135.29	19.46	68.50	61,992,667	47,918,655	DINKES
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	5,650,000	60,000,000	66,000,000	72,600,000	79,860,000	87,846,000	81,176,564	12,844,900	49,734,500	135.29	19.46	68.50	61,992,667	47,918,655	DINKES
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	265,887,539	500,000,000	640,000,000	699,000,000	763,900,000	835,290,000	1,513,616,081	1,111,529,599	2,546,422,248	302.72	173.68	364.30	617,346,257	1,723,856,109	DINKES
	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	91,463,839	50,000,000	105,000,000	115,500,000	127,050,000	139,755,000	79,950,000	53,735,158	1,125,512,915	159.90	51.18	974.47	104,794,807	419,732,691	DINKES
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	91,463,839	50,000,000	105,000,000	115,500,000	127,050,000	139,755,000	79,950,000	53,735,158	1,125,512,915	159.90	51.18	974.47	104,794,807	419,732,691	DINKES
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	174,423,700	200,000,000	260,000,000	281,000,000	304,100,000	329,510,000	693,875,916	715,027,814	986,406,813	346.94	275.01	351.03	258,172,283	798,436,848	DINKES
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	125,088,700	100,000,000	210,000,000	231,000,000	254,100,000	279,510,000	693,875,916	294,947,814	340,031,132	693.88	140.45	147.20	199,949,783	442,951,621	DINKES

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan		Unit Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)						
(1)	(3)	(1)	(3)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)			(18)
	Kegiatan RSUD		**Kegiatan RSUD**															
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	49,335,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	420,080,000	646,375,681	0.00	840.16	1292.75	58,222,500	355,485,227	RSUD
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	0	250,000,000	275,000,000	302,500,000	332,750,000	366,025,000	739,790,165	342,767,027	434,502,520	295.92	124.64	143.64	254,379,167	505,686,571	DINKES
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		250,000,000	275,000,000	302,500,000	332,750,000	366,025,000	739,790,165	342,767,027	427,240,520	295.92	124.64	141.24	305,255,000	503,265,904	DINKES
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Bontang Lestari		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Bontang Lestari	0	0	0	0	0	0	0	0	4,682,000	0.00	0.00	0.00	0	1,560,667	DINKES
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Bontang Utara 2		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) UPT Puskesmas Bontang Utara 2	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000	0.00	0.00	0.00	0	860,000	DINKES
				266,684,063,241	252,952,740,865	296,471,835,956	319,050,611,902	333,616,044,806	359,125,493,988	362,726,311,782	363,739,220,124	464,008,423,326	143.40	122.65	145.43	304,650,131,793	396,824,651,744	

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Bontang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan kesehatan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan kesehatan Kota Bontang digunakan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan standar yang ditetapkan oleh PP Nomor 02 tahun 2019. Adapun analisis kinerja pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bontang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bontang

No	Indikator Kinerja	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK & IKU	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Perangkat Daerah						Rasio Capaian Perangkat Daerah					
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025* TW 1	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025* TW 1	Tahun 2026
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20
1	Persentase FKTP Milik Pemerintah yang terakreditasi	Persen		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	,-	100	100	100	100	100	,-
2	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen		√	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,29	0,29	0,27	0,27	0,26	,-	2900	2900	2700	2700	2600	,-
3	Presentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	Persen		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	,-	100	100	100	100	100	,-
4	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per- satuan penduduk	Rasio		√	1 : 16.000	1 : 16.000	1 : 16.000	1 : 16.000	1 : 16.000	1 : 16.000	1 : 7.549	1 : 16.000	1 : 4.374	4 : 16.000	4 : 16.000	,-	100	100	27	300	300	,-
5	Persentase Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persen		√	100	100	100	100	100	100	102	104	103	101	100,56	,-	102	104	103	101	100,56	,-
6	Persentase FKTP menggunakan sistem informasi kesehatan Terpadu	Persen		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	,-	100	100	100	100	100	,-
7	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Rasio		√	270	250	200	183	172	161	467	119	0	122	0	,-	173,0	47,6	0	67	0	,-
8	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 bayi	Rasio		√	15,94	11	11	10	10	10	14,4	11	13,5	15,9	8,7	,-	90,3	100	123	159	87	,-
9	Prevalensi Balita Gizi Kurus / Wasting (BB/TB)	Persen		√	7	7	7	6	6	6	12,03	15,13	8,03	7,05	13,81	,-	171,9	216	115	118	230,2	,-

No	Indikator Kinerja	Satuan	SPM/Standar Nasional	IKK & IKU	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Perangkat Daerah						Rasio Capaian Perangkat Daerah					
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025* TW 1	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025* TW 1	Tahun 2026
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20
10	Prevalensi Baduta pendek / Stunting (TB/U)	Persen		√	18	18	18	17	17	17	20,31	23,06	16,22	21,55	17	,-	112,8	128	90	127	100,0	,-
11	Prevalensi Gizi Kurang / Underweight (BB/U)	Persen		√	13	13	12	11	10	10	7,03	8,1	15,67	15,7	6,15	,-	54,1	62	131	143	61,5	,-
12	Insidensi Rate DBD per 100.000 penduduk	Rasio		√	245,6	250	230	210	200	200	321,69	317	244	154	14	,-	131,0	127	106	73	7,0	,-
13	Angka kesembuhan TB	Persen	√	√	68	92	93	94	95	95	76,19	86	85	50	54	,-	112,0	93	91	53	56,8	,-
14	Prevalensi HIV/AIDS	Persen	√	√	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,2	0,27	1,21	0,99	0,009	,-	111,1	159	712	619	5,6	,-
15	Prevalensi Hipertensi	Persen	√	√	25	25	25	9	9	9	3,04	3,64	9,23	9,23	3,7	,-	12,2	15	37	103	41,1	,-
16	Persentase FKTP dengan SDM sesuai standar	Persen		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	,-	100,0	100	100	100	100,0	,-
17	Penerapan/pelaksanaan 5 kluster kebujakan germas di kelurahan (Peningkatan aktivitas fisik, peningkatan PHBS, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan hidup)	Persen		√	100	35	40	45	50	55	100	47	67	100	0	,-	100,0	134	168	222	0,0	,-
18	SPM RSUD	Persen		√	69,07	75	80,2	84,8	88,4	94,7	69,07	70,39	84,8	88,4	78,35	,-	100,0	94	106	104	88,6	,-
19	Kinerja Keuangan RSUD	Score		√	18	19	20	21	22	23	21,6	19	21	20	0	,-	120,0	100	105	95	0,0	,-
20	Status Akreditasi RSUD	Predikat		√	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	,-	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	,-
21	Persentase sarana produksi obat, sarana distribusi obat dan makanan yang berijin	Persen		√	100	100	100	100	100	100	86,3	86,2	100	100	100	,-	86,3	86	100	100	100,0	,-
22	Ketersediaan Obat Essensial	Persen		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92,5	,-	100,0	100	100	100	92,5	,-
23	Persentase tenaga kesehatan berijin	Persen		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	71,25	,-	100,0	100	100	100	71,3	,-
24	Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah,jenis dan kompetensi)	FKTP		√	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	,-	100,0	100	100	100	100,0	,-
25	Jumlah RS dengan SDM sesuai standar	RS		√	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5	,-	100,0	100	100	83	83,3	,-
26	Jumlah Tenaga kesehatan yang mendapatkan pelatihan sesuai standar	Orang		√	30	75	100	125	150	150	21	171	237	264	55	,-	70,0	228	237	211	36,7	,-
27	Jumlah Tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan pendidikan	Orang		√	15	20	25	30	35	40	19	12	11	65	0	,-	126,7	60	44	217	0,0	,-

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan memberikan pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain :

- Peningkatan akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan;
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, baik di Rumah Sakit Umum Daerah kota Bontang maupun pusat kesehatan lainnya, hingga memenuhi standar–standar pelayanan kesehatan;
- Peningkatan kualitas dan kompetensi dokter dan paramedis lainnya, menambah jumlah dokter spesialis dan menyekolahkan tenaga medis ke jenjang pendidikan lebih tinggi;
- Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Rumah Sakit dengan faslitas lengkap dan berkualitas;
- Reorientasi, revitalisasi, dan perbaikan manajemen Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
- Perbaikan gizi masyarakat terutama bayi, balita dan perhatian khusus terhadap ibu hamil;
- Sistem rujukan kerumah sakit yang lebih mudah;
- Memberikan perhatian khusus pada penyakit-penyakit yang berbahaya seperti HIV, malaria, TBC dll;
- Mengoptimalkan peranan posyandu;
- Pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS yang preminya dibayarkan melalui APBD;
- Peningkatan kesejahteraan tenaga Rumah Sakit dan Pukesmas

Pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal harus memenuhi unsur kualitas hidup serta unsur mortalitas, morbiditas, dan status gizi masyarakat. Pada tahun 2024 secara umum kualitas penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kota Bontang mengalami

peningkatan. Cakupan upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat meskipun menunjukkan peningkatan trend yang positif, namun masih ada beberapa indikator yang memiliki kinerja yang masih kurang beserta solusi tindaklanjut yaitu antara lain :

1. Angka Kematian Ibu. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2024, indikator ini mencapai 122/100.000 Kelahiran Hidup dari target 183/100.000 Kelahiran Hidup dengan capaian kinerja 66%. Capaian ini mengalami penurunan kinerja dari tahun 2023 dengan capaian 100% atau 0 (Nol) Kasus. Penyebab permasalahan kematian ibu belum mencapai target yang ditetapkan disebabkan penyebab tidak langsung dimana ibu meninggal dikarenakan terpapar penyakit gangguan peredaran darah dan penyakit infeksi lainnya serta belum semua RS melakukan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP-SR) secara internal terkait belum maksimal dilaksanakan.

   Upaya tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan menguatkan kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP-SR) untuk mencegah kasus berulang kematian ibu dan anak, melakukan skrining layak hamil dan edukasi Pasangan Usia Subur (PUS) resti kehamilan, pemberian layanan ANC standar, melakukan kerjasma dengan TPK pemantauan ibu hamil serta melakukan edukasi melalui media promkes terkait layanan ANC.
2. Insidensi Rate DBD per 100.000 penduduk. Demam Berdarah Dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Penyakit ini dapat menyerang semua orang terutama pada anak, dan sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Indonesia. Penyakit ini ditemukan di daerah tropis dan sub-tropis, dan menjangkit luas di banyak negara di Asia Tenggara. Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit berbasis vektor yang menjadi penyebab

kematian utama di daerah tropis. Virus Dengue penyebab Demam Dengue (DD), Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Dengue Shock Syndrome (DSS) termasuk dalam kelompok B Arthropoda Virus (Arbovirosis) yang sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviridae, dan mempunyai 4 jenis serotipe, yaitu: Den-1, Den-2, Den-3, Den-4. Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di Kota Bontang. Setiap tahun, kejadian penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Bontang cenderung meningkat pada pertengahan musim penghujan. indikator Insidensi Rate (IR/Angka Kesakitan) DBD tahun 2024 mencapai 154/100.000 penduduk dibandingkan target 210/100.000 penduduk, maka capaian ini dapat dikatakan dibawah target atau mengalami penurunan kasus yakni sebesar -110% capaian kinerja. Dibandingkan di Tahun 2023 capaian Incident Rate DBD sebesar 244/100.000 penduduk. dapun hambatan/permasalahan pada indikator IR DBD Bontang merupakan wilayah endemis DBD, faktor lingkungan yg cocok untuk berkembangbiaknya nyamuk Aedes aegypti serta diperparah dengan masih kurangnya perilaku masyarakat untuk Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sehingga masih banyak sampah-sampah bekas yang menjadi tempat perindukan nyamuk aedes aegypti. Upaya tindak lanjut pada indikator IR DBD adalah edukasi pencegahan dan penanggulangan DBD dengan perilaku PSN, abatesasi dan fogging jika ada kasus terus digalakkan. menyediakan logistik abate dan bahan aktif fogging, menganggarkan petugas survei jentik, menyediakan logistik reagen deteksi dini penyakit DBD sebagai bentuk kewaspadaan dini, melakukan pertemuan dengan petugas surveilans puskesmas untuk melakukan validasi data kasus DBD bulanan dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) abatesasi, fogging jika ada kasus dan program inovasi Pengendalian DBD dengan nyamuk berwolbachia.

3. Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB), Indikator masalah gizi adalah indikator yang digunakan untuk menilai besaran masalah gizi yang terjadi di satu wilayah. Indikator masalah gizi salah satunya adalah Persentase Balita Gizi Kurus (Wasting). Berat Badan Kurang merupakan masalah gizi yang bersifat umum dapat disebabkan karena masalah kronis ataupun akut, sehingga perlu konfirmasi lebih lanjut. Masalah Berat Badan Kurus yang terjadi lama akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Indikator ini sebagai indikator outcome yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari upaya program gizi yang telah dilakukan. Capaian Kinerja Indikator Prevalensi Gizi Kurus Kota Bontang Tahun 2024 diketahui bahwa realisasi indikator prevalensi balita gizi kurus telah mencapai 15,7% dari target yang ditetapkan sebesar 11% dengan capaian mencapai 57% dengan kinerja kurang. Penyebab masih terdapat balita dengan Gizi Kurus adalah disebabkan pola asuh dan pola makan tidak sesuai standar sehingga angka kecukupan gizi tidak sesuai dengan usia anak, banyak bumil Kurang Energi Kronik (KEK) dan anemia, pemantauan pertumbuhan balita masih rendah, fasilitas yang belum memenuhi standar atau pasien yang belum mendapatkan layanan sesuai standar, Faktor lingkungan yang buruk seperti kelurarga ada yang merokok keluarga mengalami sakit infeksi seperti TB, HIV dan lain-lain. Sanitasi yang buruk, air bersih yang kurang memadai (air minum, air untuk memasak)

   Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk prevalensi balita gizi kurus (underweight) yaitu jika ditemukan balita underweight akan diberikan pemberian makanan tambahan (PMT) Lokal, PMT Stimulan, PMT Pemulihan bekerjasama dengan CSR, Baznas dan lain-lain dan penguatan edukasi kepada keluarga dengan pendekatan komunikasi aktif personal.

   Prevalensi Balita

4. Prevalensi Baduta Stunting. Selain kasus balita gizi kurang (wasting), Prevalensi baduta pendek (stunting) juga menjadi masalah yang banyak terjadi di masyarakat. Baduta pendek (stunting) ini terjadi disebabkan oleh gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar. Target prevalensi baduta pendek (stunting) sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang yaitu sebanyak 17%. Target ini lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada level Provinsi sebanyak 25,5% dan lebih rendah dibandingkan dengan target pada level Nasional sebanyak 14%. ada tahun 2024, target yang telah ditetapkan untuk indikator prevalensi baduta pendek (stunting) sebesar 17% dan realisasi sebesar 21,55%. Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2024 untuk indikator prevalensi baduta pendek (stunting) realisasinya sebesar 21,55% dengan capaian kinerja sebesar 73%. indikator ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, dimana realisasinya mencapai 16,22% dengan capaian kinerja sebesar 109,89%.
   Upaya tindak lanjut yang dilakukan prevalensi baduta pendek (stunting) yaitu jika ditemukan balita stunting maka akan dilakukan rujukan dan dilakukan tatalaksana stunting.
5. Prevalensi Hipertensi Pada tahun 2024, target yang telah ditetapkan untuk indikator prevalensi hipertensi sebesar 25% dan berubah menjadi sebesar 9% realisasi sebesar 9,23% dan capaian kinerja sebesar 97%. Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2024, untuk indikator prevalensi hipertensi realisasinya mencapai 9,23% dengan capaian kinerja sebesar 97%. Pada indikator ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dikarenakan pada 2023, untuk indikator prevalensi hipertensi realisasinya juga mencapai 9,23% dengan capaian kinerja sebesar 168,08%

Adapun hambatan/permasalahan pada indikator prevalensi hipertensi, diantaranya adalah masih ada masyarakat yang malas berobat, belum semua faskes swasta melaporkan data layanan hipertensi, kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap penyakit hipertensi. Dan Upaya tindak lanjut pada indikator prevalensi hipertensi adalah koordinasi lintas program lebih ditingkatkan lagi utamanya pada promosi kesehatan tentang hipertensi kepada seluruh warga, meningkatkan upaya skrining di tempat terjangkau seperti event Kota, TNI, Polri, Polisi Militer dan Gereja atau tempat ibadah lainnya serta melakukan penganggaran alat kesehatan yang digunakan dalam pemeriksaan hipertensi.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan kesehatan adalah :

1. Perubahan kebijakan Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar di Kota Bontang, menyebabkan ada beberapa sumber daya saat ini kurang terpenuhi dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, untuk itu diperlukan penambahan, relokasi sumberdaya dalam rangka mendukung upaya revitalisasi pelayanan agar pelayanan dapat lebih optimal.
2. Peran serta masyarakat dan sektor swasta, serta kesadaran masyarakat untuk turut serta melaksanakan pembangunan kesehatan masih belum optimal, hal ini digambarkan dari beberapa indikator kesehatan yang tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan peran serta masyarakat dan angka capaiannya masih tergolong rendah, yakni Menurunkan AKI dan AKB, UCI kelurahan, pelayanan anak balita, penemuan kasus TBC Paru, Menurunka Angka Kejadian DBD dan Malaria serta pengendalian penanganan kasus KLB lainnya.

3. Masih kurang optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan kasus, terutama yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan penanganan kasus oleh sarana kesehatan (klinik, praktek dokter, praktek bidan) yang ada di wilayah Puskesmas.
4. Koordinasi dengan lintas sektor terkait yang masih kurang, masing-masing OPD bekerja secara parsial.
5. Adanya kepercayaan pada masyarakat, seperti terhadap kehalalan vaksin yang berpengaruh terhadap tingkat imunisasi.
6. Masih adanya gap kompetensi kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia terutama dalam penanganan dan pelayanan kasus-kasus yang memerlukan skill yang harus dapat ditangani di lingkup pelayanan kesehatan dasar terutama pada penerapan BPJS bidang kesehatan.
7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi oleh petugas termasuk jejaring pelayanan kesehatan yang lain yang masih kurang.
8. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi, sehingga menyulitkan dalam penetapan dan pemetaan data sasaran, akibatnya intervensi terhadap sasaran kurang akurat.
9. Upaya penanggulangan penyakit menular yang belum menunjukkan hasil yang memuaskan dan masih sangat fluktuatif, menunjukkan pendekatan yang perlu lebih diintensifkan dan perlunya upaya-upaya terobosan, diantaranya melalui pendekatan hukum (regulasi).
10. Belum optimalnya pemanfaatan dana kapitasi BPJS, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan suatu keharusan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat diperoleh melalui peningkatan kompetensi dan memberikan

pelatihan baik penjenjangan, teknis fungsional, maupun manajemen kesehatan. Disamping itu pemenuhan sarana dan prasarana unit pelayanan puskesmas dan jaringannya serta penunjang pelayanan kesehatan seperti laboratorium sesuai dengan standar pelayanan kesehatan serta menyusun standar operasional prosedur pelayanan bidang kesehatan. Dengan upaya tersebut maka kinerja organisasi akan senantiasa mengalami peningkatan pada tahun-tahun kedepan.

Dalam hal penyusunan program/kegiatan untuk pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya masih ada beberapa hal yang perlu menjadi fokus dan prioritas pelaksanaan seperti :

1. Kebijakan walikota terkait Bidang kesehatan antara lain :

    a. Efek dari perubahan kebijakan Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar berimplikasi pada redesain organisasi dan manajemen UPTD sesuai kebutuhan dan dinamika lingkungan dan peraturan yang berlaku, meliputi perubahan struktur organisasi, job description, alur pelayanan SOP, penambahan sumberdaya baik tenaga, sarana prasarana pelayanan dan penunjang pelayanan kesehatan, dan relokasi sumberdaya, termasuk pembangunan fisik serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan baik agar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
    b. Pemberian jaminan pelayanan kesehatan pada seluruh masyarakat di puskesmas dan rumah sakit baik untuk rawat jalan maupun rawat inap kelas 3 tetap dilanjutkan dengan upaya penambahan benefit bagi peserta.
    c. Adanya Integrasi Peserta Jamkesda Masyarakat ke BPJS Kesehatan secara bertahap sampai tahun 2021.
    d. Optimalisasi Kegiatan Pembangunan Kesehatan untuk peningkatan capaian program yang telah ditetapkan oleh

Kementerian Kesehatan (Standar Nasional) yaitu Standar SPM Kesehatan dan MDG's/SDG's.

2. Upaya Peningkatan Perlindungan Terhadap Kesehatan Masyarakat (pemberian Protektif), Perlindungan terhadap masyarakat ditingkatkan melalui implementasi Perda Nomor 7 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan. Pengawasan terhadap semua aspek yang terkait seperti penertiban perizinan baik sarana, tenaga, pengobatan tradisional dan usaha industri makanan, termasuk kantin sekolah ditingkatkan. Peningkatan sarana penunjang pelayanan kesehatan seperti laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) diarahkan pada pemeriksaan berbasis lingkungan.
3. Upaya kesehatan lainnya yang bersifat rutin dan merupakan suatu keharusan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan komitmen global seperti SDG's.

II.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD

Dinas Kesehatan Kota Bontang akan melaksanakan 5 program untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Adapun sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Bontang adalah :

1. Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan
2. Meningkatnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat
3. Meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Perubahan Tahun 2025 Kota Bontang

No	Rancangan Akhir RKPD					No	RKPD Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bontang	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	89 %	Rp.198.026.984.713	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bontang	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	89 %	Rp. 218.249.338.702	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bontang	Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi , Ketersediaan obat Esensial, Cakupan Kepesertaan JKN	200 11 100 100	Rp.199.387.795.524	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bontang	Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi , Ketersediaan obat Esensial, Cakupan Kepesertaan JKN	200 11 100 100	Rp. 223.230.274.419 ,	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bontang	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	100 %	Rp.1.163.673.668	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bontang	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	100 %	Rp. 800.569.320	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kota Bontang	Persentase sarana produksi obat, sarana distribusi obat dan makanan yg berizin	100%	Rp. 459.220.437	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kota Bontang	Persentase sarana produksi obat, sarana distribusi obat dan makanan yg berizin	100%	Rp. 382.630.679	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat	Kota Bontang	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di	40 %	Rp.1.049.394.637	5	Program Pemberdayaan Masyarakat	Kota Bontang	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan	40 %	Rp. 2.997.551.380	

	Bidang Kesehatan		Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)				Bidang Kesehatan		GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)			

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa adanya perbedaan penetapan program/kegiatan di dalam Ranhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan untuk perubahan tahun 2025. Hal ini dikarenakan kebutuhan perangkat daerah yang tertuang di Renstra OPD masih semua terakomodir pada ranhir RKPD, Namun ada beberapa pagu indikatif yang harus menyesuaikan kebutuhan program kesehatan di Tahun 2025 seperti sarana dan prasarana layanan kesehatan dan kefarmasian untuk peningkatan dan pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai

permasalahan dan tantangan, melayani / memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Ketengakerjaan Kota Bontang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranhir RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Sesuai dengan peraturan yang ada, saat ini Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down,* yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Perencanaan yang bersifat *bottom up* telah dilaksanakan mulai dari tingkat RT, Kelurahan, dan Kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan

Secara umum semua usulan masyarakat yang telah diusulkan pada Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Tingkat Kota telah diakomodir dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pelayanan kesehatan esensial adalah pelayanan kesehatan rutin dasar yang kebutuhannya akan terus ada di masyarakat dan perlu diprioritaskan keberlanjutannya selama situasi pandemi.

Pelayanan tersebut dilakukan untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan melalui UKM.

Pelayanan luar gedung yang berpengaruh antara lain kegiatan posyandu yang merupakan wahana untuk menjangkau sasaran imunisasi, penimbangan balita dan sebagian untuk pemeriksaan ibu hamil, semua bentuk UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) juga berkurang termasuk misalnya Posyandu PTM (Penyakit Tidak Menular), sehingga pengendalian penyakit menular juga terganggu, dan kunjungan rumah dalam rangka Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK).

Berdasarkan tabel II.5 diatas untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 Dinas Kesehatan sebesar Rp. 400.087.068.979.00,- kemudian bertambah di dalam RKPD Perubahan sebesar Rp. 445.660.364.500.00 sesuai dengan pagu yang telah di rumuskan oleh Tim Penyusun Perencanaan Anggaran Kota Bontang.

Adapun usulan kegiatan tersebut setelah di analisis prioritas kegiatan pada masing-masing program (seksi) dan Rumah Sakit Umum Daerah sehingga terdapat beberapa kegiatan yang mendapatkan pengurangan ataupun penambahan anggaran sesuai dengan Prioritas Masalah dan Target SPM Kesehatan serta Capaian Indikator Program di masing-masing unit/program.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum Nasional bidang tenaga kerja mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap keempat, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Review kebijakan adalah telaah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum dengan tujuan melakukan perubahan yang implikasinya lebih baik bagi masyarakat luas. Review kebijakan merupakan langkah penting dalam penyusunan rencana dan pengambilan keputusan dalam implementasi pembangunan. Semakin banyak dukungan (sinergitas) program-program di tingkat pelaksana akan semakin mudah upaya untuk mensinergikan program maupun pembiayaan implementasi.

Adapun rencana kajian terkait pelayanan kesehatan yang perlu untuk ditindak lanjuti antara lain :

a. Wacana pemekaran wilayah yang berdampak pada pemetaan sarana fasilitas kesehatan khusunya milik Pemerintah;

b. Pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN;

c. Status kelembagaan dan pelayanan Klinik Pegawai dan Pelayanan 24 Jam PSC;

d. Pelayanan 2 shift Puskesmas dan pelayanan 24 Jam Puskesmas Bontang Lestari;

e. Status Pengelolaan dan Perijinan Unit Transfusi Darah (UTD); dan

f. Kelayakan operasional rencana RSUD Tipe D Taman Sehat

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan untuk jenis tenaga tertentu yang masih belum terpenuhi, pengembangan karir belum berjalan, sistem penghargaan dan sanksi belum berjalan sebagaimana mestinya.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang telah diperdakan perlu dioptimalkan, pelaksanaannya harus terintegrasi dengan sistem lainnya. Perencanaan pembangunan kesehatan perlu disinkronkan dengan OPD terkait dan dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi.

Sistem Infromasi kesehatan yang dikembangkan belum optimal, pemanfaatan data data belum optimal dan surveilans belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Permasalahan pada harmonisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi Dinas Kesehatan dan dengan rumah sakit serta komitmen pemerintah kota untuk membiayai pembangunan kesehatan sesuai yang tercantum dalam SKD yaitu sebesar 10 % dari APBD.

Promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada

perilaku hidup bersih dan sehat, yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat.

Untuk gizi perlu difokuskan pada kelompok sasaran ibu hamil dan anak sampai usia 2 tahun mengingat dampaknya terhadap tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktifitas generasi yang akan datang.

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggungwab sektor kesehatan, melainkan tanggungjawab sektor lain, disamping tanggungjawab individu dan keluarga. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan SKD dapat dilakukan sinergi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dan OPD lain yang terkait.

Isu strategis international antara lain globalisasi seperti Sustainable Development Goals (SDG's), Isu Strategi Nasional seperti New Emerging Disease, deregulasi diberbagai perijinan, pemberdayaan masyarakat, kerusakan dan pencemaran lingkungan.

National Summit, ada 4 isu pokok pembangunan kesehatan yaitu (1) Peningkatan Pembiayaan kesehatan untuk memberikan Jaminan Kesehatan masyarakat, (2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Untuk Mempercepat SDG's, (3) Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan (4) Peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas tenaga kesehatan.

Dalam Rencana Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Revitalisasi puskesmas menjadi prioritas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten/Kota diberi kesempatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas beserta jaringannya dalam rangka peningkatan pelayanan terutama terkait dengan upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka

Kematian Bayi (AKB). Setiap Kabupaten/Kota diberi anggaran dalam bentuk bantuan keuangan untuk peningkatan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas yang diarahkan menjadi puskesmas 24 jam, hal tersebut mendorong peningkatan pelayanan di kabupaten/kota. Lemahnya sinkronisasi perencanaan pembangunan kesehatan termasuk kerjasama lintas program antara provinsi dengan kabupaten/kota menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan.

III.2. Tujuan, sasaran, Rancangan Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 yang menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Bontang mempunyai tugas membatu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bontang adalah sebagai berikut :

Tabel III.2.1 Tujuan, Sasaran, Indiaktor Rancangan Renja Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan melalui penguatan upaya kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dan meningkatnya jaminan layanan Universal Coverage	Angka Kematian Ibu	*Jumlah kematian ibu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000*	Rasio / 100.000 Kelahiran Hidup	275	250	200	183	172	161
			Angka Kematian Bayi	*Jumlah kematian bayi dibagi Jumlah Kelahiran Hidup x 1.000*	Rasio / 1.000 Kelahiran Hidup	15,94	11	11	10	10	10
			Angka kesembuhan TB	*Jumlah pasien TB BTA (+) Sembuh dibagi Jumlah pasien TB BTA (+) diobati x 100%*	Persen	91	92	93	94	95	95
			Prevalensi HIV	*Jumlah kasus HIV pada tahun berjalan dibagi Jumlah Penduduk x 1.000*	Persen	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16
			IR DBD	*Jumlah kasus DBD dibagi Jumlah Penduduk x 100.000*	Rasio / 100.000 Penduduk	275	250	230	210	200	200
			Prevalensi Hipertensi	*Jumlah kunjungan baru pasien hipertensi pada tahun berjalan dibagi Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas x 100%*	Persen	25	25	25	25	25	25
			Prevalensi Hipertensi	*Jumlah kunjungan baru pasien hipertensi pada tahun berjalan dibagi Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas x 100%*	Persen	25	25	25	25	25	25
			Cakupan Kepesertaan JKN	*Jumlah peserta JKN aktif dibagi jumlah penduduk x 100%*	Persen	100	100	100	100	100	100
			Prevalensi balita gizi kurang	*Jumlah balita gizi kurang / Jumlah balita diukur x 100%*	Persen	7,36	7	7	6	6	6

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap PHBS, pola asuh dan pola makan	(Wasting)								
			Prevalensi Baduta Pendek (Stunting)	*Jumlah Baduta Pendek dibagi Jumlah Baduta diukur x 100%*	Persen	19,73	18	18	17	17	17
			Prevalensi balita Gizi Kurus (BB Kurang/ Underweight)	*Jumlah balita underweight dibagi Jumlah balita diukur x 100%*	Persen	12,27	13	12	11	10	10
			Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)	*Jumlah standar minimal SDM di FKTP Milik Pemerintah dibandingkan dengan jumlah SDM Kesehatan yang ada*	FKTP	6	6	6	6	6	6
			Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)	*Jumlah standar minimal SDM di FKTP Milik Pemerintah dibandingkan dengan jumlah SDM Kesehatan yang ada*	FKTP	6	6	6	6	6	6
			Jumlah Rumah Sakit dengan SDM sesuai Standar	*Jumlah standar minimal SDM kesehatan di RS dibandingkan dengan jumlah SDM Kesehatan yang ada fungsinya di lingkup Dinas Kesehatan, UPT maupun RSUD*	RS	5	5	5	6	6	6
			Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan	*Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan pendidikan di lingkup Dinas Kesehatan, UPT Maupun RSUD*	orang	15	20	25	30	35	40
		Menyediakan sarana dan prasarana layanan kesehatan	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	*Jumlah FKTP Pemerintah dibagi Jumlah Penduduk*	Rasio	1 : 7.549	1 : 16.000	1 : 16.000	1 : 16.000	1 : 16.000	1 : 16.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			persatuan pnduduk								
			Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	*Jumlah FKTP Pemerintah Terakreditasi dibagi Jumlah FKTP Seluruhnya x 100%*	Persen	100	100	100	100	100	100
			Terbangunnya Sistem informasi kesehatan daerah (SikDa) terpadu	*Jumlah Puskesmas yang melaksanak an SIKDA dibagi Jumlah Puskesmas x 100%*	Persen	95	100	100	100	100	100
			Ketersediaan Obat Esensial	*Jumlah ketersedian obat di FKTP dibagi Jumlah obat yang harus ada di FKTP x 100% dibagi Jumlah sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang dipantau x 100%*	Persen	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan	SPM RSUD	*Jumlah indikator SPM yang terpebuhi dibagi Jumlah indikator SPM Seluruhnya x 100%*	Persen	105 (69,07%)	114 (75%)	122 (80,2%)	129 (84,8%)	136 (89,4%)	144 (94,7%)
			Status Akreditasi RSUD	*Status akreditasi RS*	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
			Kinerja Keuangan RSUD	*Jumlah skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan dan Aspek Pelayanan*	Skor	18	19	20	21	22	23
2	Penguatan Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Mengoptimalkan Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)	Penerapan/ pelaksanaan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan	*Jumlah kelurahan yang menerapkan 5 Kluster Kebijakan GERMAS dibagi Jumlah kelurahan seluruhnya x 100 %*	Persen	100	35	40	45	50	55

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			(Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)								

III.3. Program Kegiatan Tahun 2021 - 2026

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Bontang tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian visi Kota Bontang yaitu "***"Terwujudnya Kota Bontang Sebagai Kota Industri dan Jasa Yang Maju,Sejahtera dan Berkelanjutan Sebagai Daerah Mitra IKN".*** Dan misi ***" Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing"***
2. Tugas dan fungsi dinas yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 40 Tahun 2018.

Tabel III.3.1

Rencana Program Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bontang 2021 -2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Program Dedicated	Lokasi	Indikator Kinerja							Pagu 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju				
				Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan												
				Tolok Ukur	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026		2022	2023	2024	2025	2026
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											218.908.828.413	252.952.740.865	296.471.835.956	319.050.611.902	333.616.044.806	359.125.493.988
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kota Bontang	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	87,58	88	89	90	91	92	139.813.734.774	137.883.000.000	187.887.676.544	195.209.244.198	202.450.448.618	210.045.553.480
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8	8	8	8	8	8	252.644.968	83.000.000	1.089.000.000	647.200.000	711.200.000	781.380.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2	2	2	2	2	2	219.131.500	17.000.000,00	520.000.000	572.000.000	629.200.000	692.120.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	2	2	2	5.793.750	7.000.000,00	489.000.000	7.000.000	7.000.000,00	7.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	1	1	18.942.900	50.000.000,00	40.000.000	44.000.000	48.400.000	53.240.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	4	4	6.900.000	7.000.000,00	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.620.000
Kegiatan RSUD											1.876.818	2.000.000	20.000.000	2.200.000	2.400.000	2.400.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RSUD)	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	2	2	2	2	2	2	1.200.000	1.200.000	10.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (RSUD)	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	1	1	1	1	195.000	400.000	5.000.000	400.000	500.000	500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RSUD)	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	2	2	2	2	481.818	400.000	5.000.000	400.000	500.000	500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3	3	3	3	3	3	118.217.928.697	119.030.000.000	120.240.000.000	122.174.000.000	123.189.400.000	124.208.840.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	608	608	608	608	608	608	46.401.546.105	47.000.000.000	48.000.000.000	49.000.000.000	50.000.000.000	51.000.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	1	21.081.500	20.000.000,00	140.000.000	154.000.000	169.400.000	186.340.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	2	2	2	2	8.043.750		50.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	1	1	1	1	1	1	2.343.750	10.000.000,00	50.000.000	10.000.000	10.000.000	12.500.000
Kegiatan RSUD											71.784.913.592	72.000.000.000	72.000.000.000	73.000.000.000	73.000.000.000	73.000.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	660	660	660	660	660	660	70.976.713.592	71.191.800.000	71.191.800.000	72.191.800.000	72.191.800.000	72.191.800.000
Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN (RSUD)	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	1	1	808.200.000	808.200.000	808.200.000	808.200.000	808.200.000	808.200.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1	1	1	1	0		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	1	1	1	1	-		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			1	1	1	1	0		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12	1	12	12	12	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Program Dedicated	Lokasi	Indikator Kinerja							Pagu 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju		
				Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan										
				Tolok Ukur	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026		2022	2023	2024
											121.674.000	200.000.000	200.000.000	250.000.00
ai Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Kota Bontang	Dinas Beserta	660 org	660 org	660	660 org	660 org	660 org	-	-	-	
n Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Berdasarkan Tugas dan	17 org	20 org	25	25 org	25 org	25 org	121.674.000	200.000.000	200.000.000	250.000.00
ngkat Daerah			Kota Bontang	Jumlah laporan administrasi umum	1	1	1				1.902.686.293	3.515.000.000	7.086.000.000	8.729.600.00
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	Kota Bontang	Instalasi	18	22	25	28	25	26	16.805.392	5.000.000	100.000.000	110.000.00
an Perlengkapan Kantor	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Perlengkapan Kantor yang	29	35	38	32	34	30	180.504.208	150.000.000	200.000.000	220.000.00
tik Kantor	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Logistik Kantor yang	55	58	58	65	65	68	167.434.832	250.000.000	250.000.000	275.000.00
ukan dan Penggandaan	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Cetakan dan Penggandaan	17	20	25	27	33	35	137.694.228	200.000.000	220.000.000	242.000.00
an dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	Kota Bontang	Bacaan dan Peraturan	25	30	35	40	45	50	9.240.000	10.000.000	11.000.000	12.100.00
ra	-	-	Kota Bontang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			10	10	10	10			50.000.000	30.000.00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Penyelenggaraan Kegiat	50	55	60	65	70	75	624.331.000	900.000.000	4.855.000.000	5.340.500.00
nunisi pada SKPD	-	-	Kota Bontang	Penatausahaan Arsip			1			1			100.000.000	
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Pelaksanaan Sistem			1		1				100.000.000	
											4.706.676.172	2.000.000.000	2.000.000.000	2.100.000.00
an Perlengkapan Kantor	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Perlengkapan Kantor yang	6 paket	6 paket	6	6 paket	6 paket	6 paket	3.028.169.388	1.500.000.000	1.300.000.000	1.300.000.00
tik Kantor	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Logistik Kantor yang	7 paket	7 paket	7	7 paket	7 paket	7 paket	1.515.827.300	400.000.000	400.000.000	400.000.00
ukan dan Penggandaan	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket	1	1 paket	1 paket	1 paket	-		200.000.000	200.000.00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Penyelenggaraan Kegiat	30 OK	40 OK	40	40 OK	40 OK	40 OK	222.679.884	100.000.000	100.000.000	100.000.00
h Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kota Bontang	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik	1	1	1				439.085.000	500.000.000	1.010.000.000	1.121.000.00
Perangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	Kota Bontang	Perangan Dinas atau	0	0	1	0	0	0	0	0	500.000.000	
Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	Kota Bontang	Dinas Operasional atau	0	0	0	2	2	0	0	0	-	500.000.00
	-	-	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1 paket	1	1 paket	1 paket	1 paket	0	100.000.000	110.000.000	121.000.00
											439.085.000	400.000.000	400.000.000	500.000.00
Perangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	Kota Bontang	Perangan Dinas atau	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	Kota Bontang	Dinas Operasional atau	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	-	-	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	2 paket	2	2 paket	2 paket	2 paket	439.085.000	400.000.000	400.000.000	500.000.00
Ujung Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Bontang	Waktu penyediaan jasa penunjang	12 bulan	12 bulan	12				15.001.389.816	14.711.000.000	12.470.798.394	13.487.878.23
Berkuasi	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Penyediaan Jasa Surat	1	1	1	1	1	1	8.075.000	5.000.000	5.500.000	6.050.00
Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Penyediaan Jasa	12 bulan	12 bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	174.400.000	300.000.000	330.000.000	363.000.00
Jum Umum Kantor	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Penyediaan Jasa Pelayanan	12 bulan	12 bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10.600.314.816	10.200.000.000	48.835.298.394	53.718.828.23
											4.218.600.000	4.250.000.000	4.300.000.000	4.400.000.00
Berkuasi	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Penyediaan Jasa Surat	12 bulan	12bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	0	0	-	
Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Penyediaan Jasa	12 bulan	12 bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4.218.600.000	4.250.000.000	4.300.000.000	4.400.000.00
tik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Bontang	Pemeliharaan Barang Milik Pendukung	12 bulan	12 bulan	1	1	1	1	0		2.176.878.150	3.234.565.96
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Perangan Dinas atau	5	6	7	8	8	8	121.320.000	1.300.000.000	300.000.000	330.000.00
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Operasional atau Lapangan			50				519.880.000	0	1.000.000.000	1.100.000.00
			Kota Bontang	Jumlah Mebel yang Disediakan	40	30	30	30	30	30			10.000.000	11.000.00

Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Program Dedicated	Lokasi	Indikator Kinerja							Pagu 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju		
				Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan										
				Tolok Ukur	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026		2022	2023	2024
n dan Mesin Lainnya			Kota Bontang	Mesin Lainnya yang	50	50	50	50	50	50	48.800.000	117.150.000	128.865.000	141.751.50
asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Bontang	Bangunan Lainnya yang	1	1	1	1	1	1	28.014.680	125.466.500	138.013.150	151.814.46
					74 unit	75 unit		75 unit	75 unit	75 unit	1.076.704.352	1.000.000.000	1.000.000.000	1.500.000.00
Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Lebatan	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Peronangan Dinas atau	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan sional atau Lapangan	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Operasional atau Lapangan	74 unit	74 unit	74	74 unit	74 unit	74 unit	96.770.000	96.770.000	96.770.000	100.000.00
			Kota Bontang	Jumlah Meber yang Digunkara	1 paket	1 paket	1	1 paket	1 paket	1 paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.00
n dan Mesin Lainnya			Kota Bontang	Mesin Lainnya yang	2 paket	2 paket	2	2 paket	2 paket	2 paket	350.000.000	273.295.648	273.295.648	400.000.00
asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Bontang	Bangunan Lainnya yang	2 paket	2 paket	2	2 paket	2 paket	2 paket	400.000.000	400.000.000	400.000.000	600.000.00
asi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan			Kota Bontang	prasarana yang digunkara/dimanfaatkan	1 paket	1 paket	1	1 paket	1 paket	1 paket	199.934.352	199.934.352	199.934.352	350.000.00
AN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA SEHAT			Kota Bontang	Angka Kematian Ibu			200				76.248.031.956	70.966.181.085	67.346.899.825	77.205.982.15
				Angka Kematian Bayi			11							
				Ketersediaan obat Esensial			100							
				Cakupan Kepesertaan JKN			100							
elayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan ota			Kota Bontang	Ketersediaan obat Esensial	100%	100%	100				25.344.022.956	22.562.621.205	21.839.640.238	25.120.896.61
				Kunjungan Sehat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	1:30.000	1:25.000	1:16.000							
Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	Program Penunjang	Kota Bontang	Tenaga Kesehatan yang yang Memenuhi Rasio			1				6.711.493.634		4.500.000.000	
ves			Kota Bontang	Masyarakat (Puskesmas)	0	2 unit	0	1 unit	1 unit	0	-	4.500.000.000	-	5.000.000.00
Kesehatan Lainnya			Kota Bontang	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya di Bangun	0	1 unit	0	1 unit	0	0	791.435.460	400.000.000	-	1.500.000.00
nnas			Kota Bontang	Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Sarana,	0	0	0	0	0	0	67.250.000		-	1.200.000.00
Pemeliharaan Puskesmas			Kota Bontang	Pemeliharaan Gedung, gkendaraan dan alat kesehatan yang	5 Pkbl	1 unit	2	1 unit	1 Unit	1 Unit	831.599.516	400.000.000	800.000.000	200.000.00
Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			Kota Bontang	Pemeliharaan Gedung, gkendaraan dan alat kesehatan yang			1			1 unit	-	0	100.000.000	
Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kota Bontang	Pemeliharaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	0		1				479.970.000	300.000.000	300.000.000	300.000.00
dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kota Bontang	Pemeliharaan di Fasilitas Pelayanan	70	75	80	85	90	95	2.201.044.207	400.000.000	440.000.000	484.000.00
atan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kota Bontang	Penunjang Medik Fasilitas	175 jenis	200 jenis	240	288	345	414	4.296.853.600	5.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.00
n	Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Bontang	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	270	283	297	312	328	345	1.796.102.702	3.000.000.000	2.300.000.000	2.530.000.00
s Pakai	Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Bontang	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	250 jenis	275	300	330	360	396	2.389.715.748	1.500.000.000	1.650.000.000	1.815.000.00
asilitas Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Bontang	Pelayanan Kesehatan yang	0	8 FKTP	8	8 FKTP	8 FKTP	8 FKTP		100.000.000	110.000.000	121.000.00
a dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Bontang	Pelayanan Kesehatan yang	8 FKTP	8 FKTP	8	8 FKTP	8 FKTP	8 FKTP	20.900.000		100.000.000	110.000.00
n Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Bontang	penunjang medik fasilitas	300	325	350	375	400	425	222.530.000	300.000.000	330.000.000	363.000.00
Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			Kota Bontang	Sudah Dikunjungi dan			1000					100.000.000	110.000.000	121.000.00
											5.345.127.409	6.062.621.205	6.039.640.238	6.276.896.61
Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			Kota Bontang	Tenaga Kesehatan yang yang Memenuhi Rasio	2 paket	2 paket	0	2 paket	2 paket	2 paket	300.086.711	0	-	
Sakit	Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Bontang	Jumlah dukun yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sehiap	1 paket	1 paket	2	2 paket	2 paket	2 paket	300.086.711	0	600.000.000	600.000.00
harsan rumah sakit	Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Bontang	Pemeliharaan gkendaraan dan alat kesehatan yang	2 paket	2 paket	2	2 paket	2 paket	2 paket	350.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.00
dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kota Bontang	Pemeliharaan di Fasilitas Pelayanan	3 paket	3 paket	3	3 paket	3 paket	3 paket	660.454.492	62.625.205	99.640.238	376.896.61
atan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kota Bontang	Penunjang Medik Fasilitas	4 paket	4 paket	4	4 paket	4 paket	4 paket	2.994.763.765	6.000.000.000	3.600.000.000	3.600.000.00
a dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Bontang	Pelayanan Kesehatan yang	5 keg	5 keg	5	5 keg	5 keg	5 keg	839.822.500	0	500.000.000	500.000.00
n Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Pemenuhan Pelayanan Kesehatan	-	Kota Bontang	penunjang medik fasilitas	3 keg	3 keg	3	3 keg	3 keg	3 keg	400.000.000	0	300.000.000	300.000.00

Uraian Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Program Dedicated	Lokasi	Indikator Kinerja							Pagu 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju		
				Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan										
				Tolok Ukur	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026		2022	2023	2024
Urusan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah			Kota Bontang	Angka Kematian Ibu	90	50	200				89.658.447.153	90.482.330.830	94.675.709.587	51.861.135.346
				Angka Kematian Bayi	0,18	0,17	11							
				Prevalensi balita gizi kurang	240,6	250	7							
				Prevalensi Balita Stunting	25	25	18							
				Prevalensi balita Gizi Kurus	5,37	7,36	13							
				Angka kesembuhan TB	10,56	12,27	93							
				Prevalensi HIV	100%	100%	0,17							
				Al DBD			250							
				Prevalensi Hipertensi			25							
Kesehatan Ibu Hamil	Capaian SPM	-	Kota Bontang	Cakupan ibu hamil yang Mendapatkan Pelayanan	3.400	3.400	3400	3.400	3.400	3.400	400.100.200	250.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan Ibu Bersalin	Capaian SPM	-	Kota Bontang	Cakupan ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	3.200	3.200	3200	3.200	3.200	3.200	-	100.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan Bayi Baru Lahir	Capaian SPM	-	Kota Bontang	Cakupan bayi baru lahir yang Mendapatkan	1.200	1.200	1200	1.200	1.200	1.200	-	100.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan Balita	Capaian SPM	-	Kota Bontang	Cakupan balita yang Mendapatkan Pelayanan.	15.000	15.000	15000	15.000	15.000	15.000	312.428.638	150.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Capaian SPM	-	Kota Bontang	Cakupan pada usia Pendidikan Dasar yang	18.000	18.000	27000	18.000	18.000	18.000	194.746.234	150.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan pada Usia Produktif	Capaian SPM	-	Kota Bontang	Cakupan pada usia Produktif (15-59 th) yang	125.000	125.000	125000	125.000	125.000	125.000	16.875.000	200.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan pada Usia Lanjut	Capaian SPM	-	Kota Bontang	Cakupan pada usia Lanjut (>60 th) yang	9.000	9.000	8700	9.000	9.000	9.000	192.949.931	100.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan Penderita Hipertensi	Capaian SPM	-	Kota Bontang	Cakupan Hipertensi yang	12.000	12.000	12000	12.000	12.000	12.000	13.387.638	100.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Capaian SPM	-	Kota Bontang	Cakupan yang Mendapatkan Mellitus yang Mendapatkan	4.000	4.000	4000	4.000	4.000	4.000	5.109.091	50.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Capaian SPM	-	Kota Bontang	Cakupan yang Mendapatkan Pelayanan	150	150	200	150	150	150	17.000.000	100.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Capaian SPM	-	Kota Bontang	Cakupan orang terduga Menderita Tuberkulosis			1800				10.625.068	100.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Capaian SPM	-	Kota Bontang	Cakupan orang terduga Menderita HIV yang			4800				97.981.232	100.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Capaian SPM	-	Kota Bontang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa yang Pengelolaan Pelayanan	1	1	1	1	1	1	-	100.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan Berpotensi Bencana	Peningkatan Pandemi Covid-19	-	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	1	1	1	1	1	1	9.036.383.455	6.000.000.000	300.000.000	330.000.000
Kesehatan Gizi Masyarakat	Penurunan Stunting	-	Kota Bontang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan	1	1	1	1	1	1	194.766.270	450.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	Kota Bontang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan	1	1	1	1	1	1	27.343.614	100.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan Lingkungan	Penurunan Stunting	-	Kota Bontang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan	1	1	1	1	1	1	256.891.006	350.000.000	100.000.000	110.000.000
Promosi Kesehatan	Penurunan Stunting	-	Kota Bontang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan	1	1	1	1	1	1	247.028.464	200.000.000	100.000.000	110.000.000
Kesehatan Tradisional Akupuntur dan/atau Asuhan Mandiri dan	-	-	Kota Bontang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan	1	1	1	1	1	1	-	100.000.000	100.000.000	200.000.000
Kesehatan	-	-	Kota Bontang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Surveilans	1	1	1	1	1	1	8.770.000	100.000.000	100.000.000	110.000.000
Pelayan Khusus	Pelayanan Pasien dan Kepuasan	-	Kota Bontang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan	1	1	1	1	1	1	71.000.000	750.000.000	400.000.000	700.000.000
Wajib Menular dan Tidak Menular	Capaian Indikator Lain-lain Kota	-	Kota Bontang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan	1	1	1	1	1	1	940.882.104	300.000.000	300.000.000	330.000.000
Kesehatan Masyarakat	Capaian Program (SPM Lain)	-	Kota Bontang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Jaminan	1	1	1	1	1	1	33.699.363.000	34.000.000.000	25.000.000.000	27.500.000.000
Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BU1)	-	Program Pendukung Capaian UHC	Kecamatan Bontang Utara	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Jaminan	1	1	1	1	1	1	1.286.315.409	1.414.947.160	1.556.441.886	1.712.086.074
Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BU2)	-	Program Pendukung Capaian UHC	Kecamatan Bontang Utara	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Jaminan	1	1	1	1	1	1	1.206.329.243	1.326.962.167	1.459.658.384	1.605.624.222
Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BS1)	-	Program Pendukung Capaian UHC	Kecamatan Bontang Selatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Jaminan	1	1	1	1	1	1	1.301.298.380	1.431.428.218	1.574.571.040	1.732.028.144
Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BS2)	-	Program Pendukung Capaian UHC	Kecamatan Bontang Selatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Jaminan	1	1	1	1	1	1	1.114.464.705	1.225.911.176	1.348.508.294	1.483.349.124
Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BB)	-	Program Pendukung Capaian UHC	Kecamatan Bontang Barat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Jaminan	1	1	1	1	1	1	885.444.807	974.989.408	1.071.987.348	1.178.525.973
Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM BL)	-	Program Pendukung Capaian UHC	Kecamatan Bontang Lestari	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Jaminan	1	1	1	1	1	1	441.058.200	485.164.020	533.680.422	587.048.464
Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN KS-nik PNS)	-	Program Pendukung Capaian UHC	Kota Bontang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Jaminan	1	1	1	1	1	1	935.117.210	1.028.628.931	1.131.491.824	1.244.641.007
Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi JKN PKM Baru)	-	-	-	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Jaminan	1	1	1	1	1	1			400.000.000	440.000.000
Kota/Kota Sehat	Penurunan Stunting		Kota Bontang	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan	1	1	1	1	1	1	353.623.208	500.000.000	500.000.000	550.000.000

...usan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Program Dedicated	Lokasi	Indikator Kinerja							Pagu 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju		
				Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan										
				Tolok Ukur	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026		2022	2023	2024
...e di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	Program Pendukung Pelayanan	Kota Bontang	Jumlah Tenaga Kesehatan (Faskes) yang Melayani Konsultasi	0	1	3	5	5	6			100.000.000	100.000.0
...kesehatan	-	-	Kota Bontang	Pengelolaan Penelitian	0	0	1	0	1	0	0	-	100.000.000	
...Rumah Sakit (RS Baru)	-	Program Pendukung Pelayanan	Kota Bontang	Operasional Pelayanan	12	12	12	12	12	12			100.000.000	1.800.000.0
...Puskesmas (UPT Pkm BU1)	-	Program Pendukung Pelayanan	Kecamatan Bontang Utara	Operasional Pelayanan	12	12	12	12	12	12	1.059.856.685	1.165.842.354	800.000.000	880.000.0
...Puskesmas (UPT Pkm BU2)	-	Program Pendukung Pelayanan	Kecamatan Bontang Utara	Operasional Pelayanan	12	12	12	12	12	12	938.220.061	1.032.042.067	800.000.000	880.000.0
...Puskesmas (UPT Pkm BS1)	-	Program Pendukung Pelayanan	Kecamatan Bontang Selatan	Operasional Pelayanan	12	12	12	12	12	12	816.281.859	897.910.045	800.000.000	880.000.0
...Puskesmas (UPT Pkm BS2)	-	Program Pendukung Pelayanan	Kecamatan Bontang Selatan	Operasional Pelayanan	12	12	12	12	12	12	1.014.550.536	1.116.005.590	800.000.000	880.000.0
...Puskesmas (UPT Pkm BB)	-	Program Pendukung Pelayanan	Kecamatan Bontang Barat	Operasional Pelayanan	12	12	12	12	12	12	815.400.300	896.962.330	800.000.000	880.000.0
...Puskesmas (UPT Pkm BL)	-	Program Pendukung Pelayanan	Kecamatan Bontang Selatan	Operasional Pelayanan	12	12	12	12	12	12	872.328.597	959.561.457	800.000.000	880.000.0
...Puskesmas (UPT Pkm Baru)	-	-	-	Operasional Pelayanan	12	12	12	12	12	12			800.000.000	880.000.0
...Fasilitas Kesehatan Lainnya (IFK dan Klinik PNS)	-	Program Pendukung Pelayanan	Kota Bontang	Operasional Pelayanan	12	12	12	12	12	12	684.410.000	750.000.000	500.000.000	550.000.0
...Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)	-	Program Pendukung Pelayanan	Kota Bontang	Operasional Pelayanan	12	12	12	12	12	12	1.023.259.663	1.000.000.000	500.000.000	550.000.0
...Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Program Prioritas Akreditasi Faskes	-	Kota Bontang	Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di	6 FKTP	6 FKTP	6	6 FKTP	6 FKTP	6 FKTP	0	150.000.000	100.000.000	110.000.0
...an Dini dan Respon Wabah	-	-	Kota Bontang	Pelaksanaan Kewaspadaan	1	1	1	1	1	1	2.095.318	150.000.000	100.000.000	110.000.0
...ikasi Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Pelayanan Kesehatan 24 Jam	-	Kota Bontang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan			1	1	1	1			100.000.000	110.000.0
											80.000.000.000	50.000.000.000	23.827.474.175	48.000.000.0
...Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	Kota Bontang	Pengelolaan Pelayanan	1 paket	1 paket	1	1 paket	1 paket	1 paket	109.709.950	600.000.000	600.000.000	600.000.0
...Rumah Sakit (Operasional BLUD)	-	Program Pendukung Pelayanan	Kota Bontang	Operasional Pelayanan	12	12	12	12	12	12			23.827.474.175	48.000.000.0
...n Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			**Kota Bontang**	**Terselenggara sistem informasi kesehatan**	**75%**	**85%**	**100**				**592.235.528**	**600.000.000**	**468.500.000**	**642.450.0**
...formasi Kesehatan	-	-	Kota Bontang	Pengelolaan Data dan	1	1	1	1	1	1	19.887.494	20.000.000,00	22.000.000	24.200.0
...rmasi Kesehatan	-	-	Kota Bontang	Pengelolaan Sistem	6	6	6	6	6	6	184.814.000	250.000.000,00	100.000.000	250.000.0
...at Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	-	-	Kota Bontang	Sistem Informasi	5	5	5	5	5	5	172.534.034	100.000.000,00	110.000.000	121.000.0
					2 paket	**2 paket**		**2 paket**	**2 paket**	**2 paket**	**215.000.000**	**230.000.000**	**236.500.000**	**247.250.0**
...at Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	-	-	Kota Bontang	Sistem Informasi	2 paket	2 paket	2	2 paket	2 paket	2 paket	215.000.000	230.000.000	236.500.000	247.250.0
...Unit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan ...aten/Kota			**Kota Bontang**	**...** pemerintah yang	**100%**	**100%**	**100**				**641326919**	**1300000000**	**363.000.000**	**461.500.0**
				UPM RSUD			**80,2**							
				Status Akreditasi RSUD			**Paripurna**							
				Kinerja Keuangan RSUD			**20**							
...awasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah ...itas Pelayanan Kesehatan Lainnya	-	-	Kota Bontang	C, D dan Fasilitas	4	4	4	4	4	4	-	1.000.000.000,00	50.000.000	100.000.0
...anan Fasilitas Kesehatan	-	-	Kota Bontang	yang Dilakukan Pengukuran	6	6	6	6	6	6	138.546.728	150.000.000,00	150.000.000	180.000.0
...an Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	Kota Bontang	Penyajian Perumusan dan	12 bulan	12 bulan	1	12 bulan	12 bulan	12 bulan	522.780.191	150.000.000,00	165.000.000	181.500.0
...AN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			**Kota Bontang**	**Persentase tenaga kesehatan yang berijin**			**100**				**2.284.302.976**	**1.410.000.000**	**313.500.000**	**1.676.250.0**
...Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			**Kota Bontang**	**Persentase tenaga kesehatan yang berijin**	**100%**	**100%**	**100**				**18.634.750**	**25.000.000**	**27.500.000**	**30.250.0**
...asan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan ...n	-	-	Kota Bontang	Pembinaan dan	50	75	1	125	150	150	18.634.750	25.000.000	27.500.000	30.250.0
...n dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan ...Wilayah Kabupaten/Kota			**Kota Bontang**	**...** sesuai standar (jumlah,	**58%**	**50%**	**6**				**2.101.056.979**	**100.000.000**	**210.000.000**	**121.000.0**
				...sesuai SDM sesuai			**6**							

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Program Prioritas	Program Dedicated	Lokasi	Indikator Kinerja							Pagu 2021 (Rp.)	Prakiraan Maju		
				Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan										
				Tolok Ukur	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026		2022	2023	2024
daya manusia kesehatan sesuai standar	-	Program pendukung pelayanan	Kota Bontang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang			608				1.868.748.671	-	100.000.000	-
Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	Kota Bontang	Jumlah Usulkan Mutasi Pendorsan dan	166	119	1	85	75	60	232.307.000	100.000.000	110.000.000	121.000.000
Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Daerah Kabupaten/Kota			Kota Bontang	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan	50%	100%	100				164.611.251	1.285.000.000	76.000.000	1.125.000.000
				Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan			25							
ningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota	-	Program pendukung pelayanan	Kota Bontang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan	10	40	45	40	40	40	164.611.251,00	1.000.000.000	26.000.000	1.200.000.000
											0	285.000.000	50.000.000	325.000.000
ningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota	-	Program pendukung pelayanan	Kota Bontang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	25 paket	5	30 paket	30 paket	30 paket	0	285.000.000	50.000.000	325.000.000
SI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Kota Bontang	Persentase sarana produksi obat, sarana			100				203.793.106	360.000.000	400.000.000	520.000.000
Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha (MOT)			Kota Bontang	Persentase sarana distribusi obat yang	90%	92%	100				91.481.000	100.000.000	110.000.000	121.000.000
dan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	Program pendukung layanan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak	1	1	1	1	1	1	91.481.000	100.000.000	110.000.000	121.000.000
si Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang ustri Rumah Tangga			Kota Bontang	Persentase sarana produksi makanan yang berizin yang memenuhi kelayakan	50%	55%	100				91.481.000	100.000.000	204.000.000	224.400.000
dan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi ga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk yang dapat Digolongkan oleh Industri Rumah Tangga	-	Program pendukung layanan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	1	1	1	1	1	1	91.481.000	100.000.000	204.000.000	224.400.000
Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) h Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			Kota Bontang	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat	44%	50%	55				91.481.000	100.000.000	110.000.000	121.000.000
dan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	Program pendukung layanan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	1	1	1	1	1	1	91.481.000	100.000.000	110.000.000	121.000.000
pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan			Kota Bontang	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kualitas Umum (TPU) yang	94%	95%	96				9.250.100	60.000.000	66.000.000	72.600.000
dan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Sentra Makanan Jajanan	-	Program pendukung layanan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak	1	1	1	1	1	1	9.250.100	60.000.000	66.000.000	72.600.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Kota Bontang	Persentase Puskesmas yang memiliki kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS,			40				279.943.409	400.000.000	760.000.000	696.000.000
Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan ah Kabupaten/Kota			Kota Bontang	Jumlah Pedoman/ regulasi/ rekomendasi penerapan kebijakan GERMAS	2 buah	4 buah	9				135.146.704	50.000.000	105.000.000	115.500.000
Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan	-	Program pendukung layanan	Kota Bontang	Kesehatan, Advokasi,	0	0	1	0	1	1	135.146.704	50.000.000	105.000.000	115.500.000
Lingkungan Promotif Preventif Tingkat Daerah			Kota Bontang	Posyandu Balita, Posyandu Lansia, tanggal, sekolah, institusi	50%	55%	60				143.818.905	100.000.000	260.000.000	286.000.000
Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	Program pendukung layanan	Kota Bontang	Jumlah Usulan Mutasi Penyelenggaraan Promosi	1	1	1	1	1	1	143.818.905	100.000.000	210.000.000	231.000.000
											50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	-	Kota Bontang	Jumlah Usulan Mutasi Penyelenggaraan Promosi	1 paket	1 paket	1	0,8	0,8	0,8	143818905	100000000	50.000.000	50.000.000
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Daerah Kabupaten/Kota			Kota Bontang	Persentase Posyandu aktif	40%	60%	60				-	250.000.000	305.000.000	302.500.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan (UKM)	-	Program pendukung layanan	Kota Bontang	Bimbingan Teknis dan	0	1	1	1	1	1	0	250.000.000	275.000.000	302.500.000
TOTAL											216.908.828.413	214.999.181.035	256.798.076.369	275.409.476.354

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bontang yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu-isu strategis tahun 2025 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bontang diarahkan pada :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran perubahan 2025 adalah sebanyak 5 program dan 24 kegiatan. Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program / kegiatan sebesar **Rp. 445.660.364.500.00** ***(Empat Ratus Empat Puluh Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)***

Tabel IV.1

Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**268.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**268.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**268.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan**				**81 persen**	**81 persen**	**180.383.788.882,00**	**202.980.589.434,00**	**202.330.587.373,00**	**27.057.668.118,00**							**127.436.637.977,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan*				8 laporan	8 laporan	72.557.520,00	36.209.520,00	26.054.760,00	-46.502.760,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		778.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.984.000,00	8.640.000,00	8.630.000,00	-3.984.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			867.170.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.984.000,00	8.640.000,00	8.630.000,00	-3.984.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	11 Laporan	59.389.530,00	9.409.920,00	5.434.760,00	-23.944.780,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			53.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	23.220.000,00	10.720.000,00	8.570.000,00	14.650.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA HASIL (DBH)		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			26.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan*				3 laporan	3 laporan	83.587.989.292,00	177.070.647.817,00	177.061.303.057,00	93.473.313.765,00			-	- -	Masyarakat		51.208.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				608 Orang/ bulan	910 Orang/ bulan	83.518.630.480,00	177.046.752.402,00	177.048.752.402,00	93.530.112.917,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH TAMBAHAN PEMBIAYAAN PENGURANGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA		-			51.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	49.820.273,00	3.849.520,00	1.974.760,00	-47.845.513,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			188.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Somesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Somesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Somesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	14.703.639,00	13.400.000,00	8.040.000,00	6.723.639,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4.905.660,00	4.545.995,00	2.535.995,00	2.430.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA HASIL (DBH)		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			12.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 laporan	1 laporan	19.677.100,00	8.525.500,00	4.506.250,00	-15.170.850,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Pendataan dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Pendataan dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19.677.100,00	8.525.500,00	4.506.250,00	-15.170.850,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA DAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				1 laporan	1 laporan	14.868.320,00	11.149.896,00	10.683.346,00	-4.174.974,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0007	Pelayanan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	14.868.320,00	11.149.896,00	10.683.346,00	-4.174.974,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian*				1 laporan	1 laporan	707.073.180,00	756.469.300,00	345.886.300,00	-361.176.880,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		370.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	19.810.000,00	13.085.000,00	6.700.000,00	-12.910.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	602.150.000,00	682.070.000,00	281.882.000,00	-320.268.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan				100 Orang	100 Orang	85.333.180,00	61.334.300,00	57.314.300,00	-27.988.880,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum*				1 laporan	1 laporan	4.885.168.020,00	3.256.544.060,00	3.734.552.008,00	-1.130.616.012,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		7.325.916.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	82.054.520,00	38.593.837,00	38.593.837,00	-43.460.683,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA DAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	35 Paket	3.296.268.967,00	804.828.238,00	2.397.139.047,00	-899.129.920,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA DAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			266.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				65 Paket	65 Paket	286.785.311,00	101.200.985,00	101.200.985,00	-98.494.326,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA DAGI HASIL (DBH)		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Rahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan				45 Dokumen	45 Dokumen	3.100.596,00	3.280.000,00	3.280.000,00	179.404,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			14.641.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	12 Laporan	30.432.500,00	22.701.000,00	12.831.000,00	17.601.500,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANYA UNTUK KESEHATAN		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	1.068.310.000,00	2.055.586.000,00	1.088.736.239,00	20.426.239,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			6.462.005.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	95.216.136,00	20.344.000,00	2.680.000,00	-92.536.136,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah*				1 laporan	1 laporan	237.889.598,00	158.152.258,00	158.152.258,00	-79.737.340,00				Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		346.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	95.225.184,00	19.012.560,00	19.012.560,00	-76.212.624,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			146.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	142.664.414,00	139.139.698,00	139.139.698,00	-3.524.716,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Waktu penyediaan jasa penunjang*				12 bulan	12 bulan	8.995.079.920,00	9.063.629.436,00	9.063.629.436,00	68.549.516,00				Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		69.446.332.662,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11 Laporan	11 Laporan	4.950.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	-1.260.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			7.320.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	655.600.000,00	674.800.000,00	674.800.000,00	19.200.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			439.230.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.334.529.920,00	8.385.139.436,00	8.385.139.436,00	50.609.516,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			64.969.782.167,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				1 laporan	1 laporan	1.883.465.932,00	1.128.452.000,00	1.128.452.000,00	-755.013.932,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		1.915.129.315,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	466.242.774,00	41.060.000,00	41.060.000,00	-407.182.774,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH RAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			300.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Biayanya Pajak dan Perlengkapannya				50 Unit	50 Unit	1.200.133.158,00	948.842.000,00	948.842.000,00	251.291.158,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DALAM (PAD) PAJAK RAHAN BAKAR KLNDARAAN BRMOTOR (PBRKB)		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			1.331.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	4.980.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	-1.280.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA UMUM HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			13.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	180.130.000,00	134.870.000,00	134.870.000,00	-45.260.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DALAM (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			171.519.315,00	DINAS KESEHATAN
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kepesertaan JKN Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu**				**100 10 172 persen rasio rasio**	**100 10 172 persen rasio rasio**	**39.672.919.484,00**	**43.751.943.550,00**	**61.670.267.384,00**	**22.208.885.516,00**							**61.879.805.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyelbian Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PKTP Sesuai standar Rasio PKTP per satuan penduduk*				100 persen 1:20000 rasio	100 persen 1:20000 rasio	5.389.590.654,00	8.834.966.781,00	21.258.863.847,00	15.869.273.193,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		15.846.940.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				-	1 Unit	0,00	2.289.613.980,00	3.994.766.940,00	3.994.766.940,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung	SISA LLUH PLH ITURAN ANGGARAN TAHUN SLULLUMNYA	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	489.618.800,00	440.000.000,00	11.208.591.008,00	10.718.972.208,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	549.949.700,00	500.000.000,00	500.000.000,00	49.949.700,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DALAM (PAD)		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diadakan				345 Unit	345 Unit	1.499.987.965,00	758.199.357,00	759.352.357,00	-740.635.608,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITPNTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			12.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyedaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pelaksanaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				400 Unit	443 Unit	249.786.450,00	200.616.183,00	200.616.183,00	-49.169.267,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITPNTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			439.230.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disalurkan				328 Paket	339 Paket	2.499.867.750,00	4.577.535.361,00	4.577.535.361,00	2.077.667.611,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA UMUM HASIL (DBH) DAU YANG DITPNTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			3.081.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1000 Keluarga	1000 Keluarga	100.379.589,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-70.379.589,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DALAM (PAD) SISA LPBH PPHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SPRPLUMNYA	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			146.410.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Kematian Bayi* *Angka Kematian Ibu* *Prevalensi balita Gizi Kurus* *Prevalensi Hipertensi* *Prevalensi HIV*				0,16 persen 10 rasio 11 persen 177 rasio 25 persen	0,16 persen 10 rasio 11 persen 177 rasio 25 persen	33.774.851.927,00	33.716.032.825,00	39.310.651.043,00	5.535.799.116,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		45.263.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3400 Orang	3400 Orang	229.732.000,00	235.612.000,00	172.452.000,00	57.280.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK/DANA BOK/BOK DINAS/ BOK KAB UNTUK KOTA		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3200 Orang	3200 Orang	230.544.000,00	172.970.376,00	172.970.376,00	57.573.624,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1200 Orang	2824 Orang	229.981.000,00	172.520.000,00	289.394.000,00	59.413.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15000 Orang	15000 Orang	229.980.653,00	167.718.473,00	350.622.201,00	120.641.548,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19000 Orang	19000 Orang	149.999.939,00	112.470.195,00	9.370.917,00	140.629.022,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				125000 Orang	125000 Orang	229.999.941,00	84.386.616,00	66.226.478,00	163.773.463,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9000 Orang	9000 Orang	229.998.697,00	121.304.000,00	64.970.000,00	-165.028.697,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12000 Orang	12000 Orang	229.999.744,00	109.485.737,00	56.169.443,00	-173.830.301,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4000 Orang	4000 Orang	229.999.990,00	51.581.324,00	35.208.174,00	-194.791.786,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	109.999.777,00	45.230.900,00	18.425.340,00	-91.574.437,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3580 Orang	3580 Orang	289.999.758,00	176.143.388,00	133.477.788,00	-156.521.970,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas		133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5351 Orang	5351 Orang	229.999.901,00	61.326.238,00	31.753.331,00	-198.246.570,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas		133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	79.920.000,00	58.784.745,00	31.891.745,00	-48.318.255,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas		133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	149.774.000,00	97.328.741,00	50.936.741,00	-98.837.259,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas		399.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	200.635.277,00	951.250.000,00	1.871.358.400,00	1.671.321.123,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas		133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	99.970.032,00	94.566.552,00	24.590.552,00	-75.379.480,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas		133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	299.999.690,00	234.606.910,00	234.606.910,00	-65.392.780,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas		133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	299.912.303,00	334.284.754,00	283.395.754,00	-16.516.549,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK DANA BOK BOK PAUD-BOK KB STUNTING	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas		133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	79.997.328,00	52.506.000,00	16.134.000,00	-63.863.328,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DIALIHKAN PENGGUNAAN UNTUK BIDANG KESEHATAN	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas		242.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	99.932.000,00	87.451.770,00	32.449.360,00	-67.482.640,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas		133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (16-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	769.969.714,00	113.207.600,00	202.940.600,00	-97.059.714,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			399.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	24.900.002.600,00	21.864.805.200,00	22.430.081.800,00	-1.569.920.800,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	- -			33.275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	584.926.549,00	307.220.334,00	234.972.264,00	349.954.285,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAHAN BAKAR KENDARAAN UMUM DKI (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			865.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Tenaga Kesehatan Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				5 Unit	5 Unit	100.169.939,00	97.500.000,00	67.500.000,00	-32.669.939,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				17 Unit	17 Unit	149.965.838,00	85.708.000,00	38.434.000,00	-111.561.838,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			199.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	99.971.000,00	66.503.000,00	30.900.000,00	-69.071.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediakan Terkoneksi dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	99.999.217,00	76.248.200,00	76.248.200,00	23.751.017,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	99.981.392,00	100.631.207,00	53.297.207,00	-46.684.185,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	199.969.940,00	149.907.600,00	19.754.600,00	-180.245.940,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Terbangunya Sistem informasi kesehatan daerah (SikDa) terpadu*				100 person	100 person	199.966.328,00	288.478.944,00	281.591.894,00	82.525.566,00				Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				6 Dokumen	6 Dokumen	199.966.328,00	288.478.944,00	281.591.894,00	82.525.566,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi*				100 persen	100 persen	309.410.575,00	912.465.000,00	819.160.000,00	509.750.025,00				Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		510.615.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diterbitkan, Dicabut dan Diperpanjang Perizinannya				4 Unit	4 Unit	109.240.000,00	709.113.000,00	707.087.000,00	597.847.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				6 Unit	6 Unit	99.969.000,00	138.951.000,00	88.577.000,00	-11.392.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.901.575,00	74.421.000,00	23.496.000,00	-76.705.575,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			219.615.000,00	DINAS KESEHATAN
3	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan berizin**				**100 persen**	**100 persen**	**1.013.796.668,00**	**557.162.320,00**	**289.100.320,00**	**469.215.832,00**							**1.483.012.500,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase tenaga kesehatan berizin*				100 persen	100 persen	14.999.625,00	9.832.818,00	5.142.818,00	9.856.807,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		36.602.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.999.625,00	9.832.818,00	5.142.818,00	-9.856.807,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			36.602.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)* *Jumlah Rumah Sakit dengan SDM sesuai Standar*				5 RS 6 PKTP	5 RS 6 PKTP	249.460.043,00	116.189.502,00	51.081.502,00	-198.378.541,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		246.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				30 Orang	30 Orang	100.460.000,00	32.352.000,00	5.810.000,00	-94.650.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SUM yang unggul dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	149.000.043,00	83.337.502,00	45.471.502,00	-103.528.541,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			146.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah tenaga kesehatan yang meningkatkan pengetahuan Pendidikan* *Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar*				100 persen 40 orang	100 persen 40 orang	749.337.000,00	431.140.000,00	232.876.000,00	-516.461.000,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SUM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				40 Orang	/5 Orang	749.337.000,00	431.140.000,00	232.876.000,00	-516.461.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SUM yang unggul dan berkualitas			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana produksi obat, sarana distribusi obat dan makanan yg berizin**				**100 persen**	**100 persen**	**459.220.437,00**	**562.745.679,00**	**382.630.679,00**	**192.969.563,00**							**652.190.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase sarana distribusi obat yang berizin yang memenuhi ketentuan*				100 persen	100 persen	129.903.000,00	119.580.952,00	53.188.952,00	-76.793.048,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		146.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Pertinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	129.993.000,00	119.688.952,00	53.189.952,00	-76.793.048,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH I (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SILUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas. Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas.			146.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase sarana produksi makanan yang berizin yang memenuhi ketentuan*				100 persen	100 persen	129.999.612,00	330.031.547,00	239.965.547,00	109.965.935,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		271.524.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	129.999.612,00	330.031.547,00	239.965.547,00	109.965.935,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SILUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK/DANA BOK-BOK BINAS BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			271.524.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan sesuai standar (jasa boga, RM, DAM, Sentra Makanan Jajanan, kantin, makanan jajanan*				74 persen	74 persen	129.951.900,00	86.689.150,00	73.139.150,00	-56.812.750,00				Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		146.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	129.951.900,00	86.689.150,00	73.139.150,00	-56.812.750,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SILUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			146.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan sesuai standar*				99 persen	99 persen	69.285.925,00	16.336.030,00	16.336.030,00	-52.949.895,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		87.846.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	69.285.925,00	16.336.030,00	16.336.030,00	-52.949.895,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH I (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SILUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			87.846.000,00	DINAS KESEHATAN
5	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Pencegatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)**				**55 persen**	**55 persen**	**999.436.700,00**	**1.129.996.301,00**	**1.552.241.555,00**	**-214.145.700,00**							**785.200.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pedoman/ regulasi/ rekomendasi penerapan kebijakan GERMAS*				15 buah	15 buah	499.900.000,00	499.837.917,00	499.837.917,00	62.083,00				Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		139.755.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promasi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	499.900.000,00	499.837.917,00	499.837.917,00	62.083,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH I (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SIRPI LUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas.			139.755.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Desa/Kelurahan/Kota	*PHBS 5 Tatanan (Rumah tangga, sekolah, institusi kesehatan, tempat kerja, tempat umum)*				60 persen	60 persen	199.536.000,00	244.524.751,00	244.524.751,00	44.988.751,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		270.510.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	199.536.000,00	244.524.751,00	244.524.751,00	44.988.751,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			279.510.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Pertama Kabupaten/Kota	*Persentase Posyandu Aktif*				60 persen	60 persen	299.999.700,00	385.633.633,00	807.878.887,00	507.879.187,00				Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		366.025.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2 Dokumen	299.999.700,00	385.633.633,00	807.878.887,00	507.879.187,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGI HASIL LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK DANA INSENTIF DAERAH UPAYA BOK KAB/KOTA	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			366.025.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS BONTANG UTARA 1							**142.629.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.595.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**100.383.768.862,00**	**202.980.589.434,00**	**202.330.507.373,00**	**27.052.869.115,00**							**127.436.637.977,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	11.520.809.687,00	10.797.267.958,00	10.797.267.958,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah RI UP yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.249.417.416,00	1.928.662.084,00	1.928.662.084,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN/ DANA FKTP	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kepesertaan JKN Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu**				**100 10 172 persen rasio rasio**	**100 10 172 persen rasio rasio**	**39.672.919.484,00**	**43.751.943.550,00**	**61.670.267.384,00**	**22.206.885.516,00**							**61.879.805.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka kesembuhan TB Insiden Rate DBD Prevalensi Balita Stunting Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi Hipertensi Prevalensi HIV*				0,16 persen 11 persen 17 persen 200 rasio 25 persen 6 persen 95 persen	0,16 persen 11 persen 17 persen 200 rasio 25 persen 6 persen 95 persen	33.774.851.927,00	33.716.037.875,00	39.310.651.043,00	5.535.799.116,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		45.263.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	549.999.992,00	1.813.075.009,00	2.667.385.329,00	2.117.385.347,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RAHAN BAKAN KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) BAGI HASIL PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			1.084.800.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS BONTANG UTARA 2							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**100.383.768.862,00**	**202.980.589.434,00**	**202.330.507.373,00**	**27.052.869.115,00**							**127.436.637.977,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	11.520.809.687,00	10.797.267.958,00	10.797.267.958,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	2.223.679.834,00	1.681.570.669,00	1.681.570.669,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			0,00	DINAS KESPHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kepesertaan JKN Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu**				**100 10 172 persen rasio rasio**	**100 10 172 persen rasio rasio**	**39.672.919.484,00**	**43.761.943.660,00**	**61.670.267.384,00**	**22.206.886.516,00**							**61.879.805.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan KKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka kesembuhan TB (A kesembuhan TB) Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi balita gizi kurus Prevalensi balita gizi stunting Prevalensi Hipertensi Prevalensi HIV*				0,16 persen 11 persen 17 persen 200 rasio 25 persen 6 persen 95 persen	0,16 persen 11 persen 17 persen 200 rasio 25 persen 6 persen 95 persen	33.774.851.927,00	33.716.032.825,00	39.310.651.043,00	5.535.799.116,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat			45.263.250.000,00	DINAS KESPHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	549.980.010,00	674.118.113,00	1.331.991.113,00	782.011.103,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK DANA BOK PUSKESMAS	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			1.064.869.000,00	DINAS KESPHATAN
		UPT PUSKESMAS BONTANG SELATAN 1							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**100.383.768.862,00**	**202.980.589.434,00**	**202.330.507.373,00**	**27.052.869.115,00**							**127.436.637.977,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	11.520.809.687,00	10.797.267.958,00	10.797.267.958,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0,00	2.548.995.239,00	2.244.752.234,00	2.244.752.234,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Kepesertaan JKN Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu**				**100 10 172 persen rasio rasio**	**100 10 172 persen rasio rasio**	**39.672.919.484,00**	**43.761.943.660,00**	**61.670.267.384,00**	**22.206.886.516,00**							**61.879.805.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka kesembuhan TB (A kesembuhan TB) Prevalensi Balita Stunting Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi balita GDI Kurus Prevalensi Hipertensi Prevalensi HIV*				0,16 persen 11 persen 17 persen 200 rasio 25 persen 6 persen 95 persen	0,16 persen 11 persen 17 persen 200 rasio 25 persen 6 persen 95 persen	33.774.851.927,00	33.716.032.825,00	39.310.651.043,00	5.535.799.116,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat			45.263.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	549.999.964,00	635.589.614,00	1.256.439.442,00	706.439.478,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH PENERIMAAN PERMOTOR (PRMK) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK DANA BOK PUSKESMAS		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			1.064.869.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS BONTANG SELATAN 2							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**100.383.768.862,00**	**202.980.589.434,00**	**202.330.507.373,00**	**27.052.869.115,00**							**127.436.637.977,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	11.520.809.687,00	10.797.267.958,00	10.797.267.958,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-			0,00	DINAS KLSLLHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyelaskan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	0,00	1.499.943.173,00	1.726.016.424,00	1.726.016.424,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-				-	-	**39.672.919.484,00**	**43.751.943.550,00**	**61.670.267.384,00**	**22.206.885.516,00**							**61.879.805.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.774.851.927,00	33.716.032.825,00	39.310.851.043,00	5.535.799.116,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		45.263.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				13 Dokumen	13 Dokumen	549.999.007,00	609.979.599,00	1.397.135.010,00	847.135.943,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) SWDKLLJ PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH (PLPADYS)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			1.064.800.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS BONTANG BARAT							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**100.383.768.862,00**	**202.980.589.434,00**	**202.330.607.373,00**	**27.052.869.115,00**							**127.436.637.977,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	11.520.809.687,00	10.797.267.958,00	10.797.267.958,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah RS/PKM yang Menyelaskan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.783.392.577,00	1.387.509.267,00	1.387.509.267,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan obat Esensial Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu**				**100 10 172 persen rasio rasio**	**100 10 172 persen rasio rasio**	**39.672.919.484,00**	**43.751.943.550,00**	**61.670.267.384,00**	**22.206.885.516,00**							**61.879.805.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka kesembuhan TB Imi DM3 Prevalensi Balita Stunting Prevalensi balita Gizi Kurang Prevalensi balita Gizi Buruk Prevalensi Hipertensi Prevalensi HIV*				0,16 persen 11 persen 17 persen 25 persen 6 persen 95 persen	0,16 persen 11 persen 17 persen 25 persen 6 persen 95 persen	33.774.851.927,00	33.716.032.825,00	39.310.851.043,00	5.535.799.116,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat		45.263.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				13 Dokumen	13 Dokumen	549.999.735,00	924.152.748,00	1.578.625.748,00	1.028.625.513,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH (PLPADYS)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			1.064.800.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS BONTANG LESTARI							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**142.529.141.151,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.935.477,00**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**100.383.768.862,00**	**202.980.589.434,00**	**202.330.607.373,00**	**27.052.869.115,00**							**127.436.637.977,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	11.520.809.687,00	10.797.267.958,00	10.797.267.958,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	790.564.750,00	848.757.265,00	848.757.265,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan obat Esensial Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu**				**100 10 172 persen rasio rasio**	**100 10 172 persen rasio rasio**	**39.672.919.484,00**	**43.751.943.550,00**	**61.670.267.384,00**	**22.206.885.516,00**							**61.879.805.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka kesembuhan TB RI DBD Prevalensi Balita Stunting Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi balita Gizi Kurus Prevalensi Hipertensi Prevalensi HIV*				0,16 persen 11 persen 17 persen 200 rasio 25 persen 6 persen 95 persen	0,16 persen 11 persen 17 persen 200 rasio 25 persen 6 persen 95 persen	33.774.851.927,00	33.716.032.825,00	39.310.651.043,00	5.535.799.116,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat			45.263.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	599.999.453,00	832.088.082,00	1.165.570.005,00	565.570.552,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK DANA BOK BOK PUSKESMAS		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			1.064.800.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT LABORATORIUM KESEHATAN							**142.629.141.161,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.936.477,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**142.629.141.161,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.936.477,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**142.629.141.161,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.936.477,00**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**100.383.768.862,00**	**202.980.589.434,00**	**202.330.507.373,00**	**27.052.869.115,00**							**127.436.637.977,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	11.520.869.687,00	10.797.767.958,00	10.797.767.958,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	424.816.898,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KLUSTER PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan obat Esensial Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu**				**100 10 172 persen rasio rasio**	**100 10 172 persen rasio rasio**	**39.672.919.484,00**	**43.751.943.550,00**	**61.670.267.384,00**	**22.206.885.516,00**							**61.879.805.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka kesembuhan TB RI DBD Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi balita Gizi Kurus Prevalensi balita gizi stunting Prevalensi Hipertensi Prevalensi HIV*				0,16 persen 11 persen 17 persen 200 rasio 25 persen 6 persen 95 persen	0,16 persen 11 persen 17 persen 200 rasio 25 persen 6 persen 95 persen	33.774.851.927,00	33.716.032.825,00	39.310.651.043,00	5.535.799.116,00				Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat			45.263.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	850.049.132,00	578.957.288,00	1.327.097.288,00	477.048.156,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA/BIDANG KESEHATAN		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			965.500.000,00	DINAS KESEHATAN
		KLINIK PNS							**142.629.141.161,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.936.477,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**142.629.141.161,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.936.477,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**142.629.141.161,00**	**248.972.437.284,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.936.477,00**	
1	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-				-	-	**39.672.919.484,00**	**43.751.943.550,00**	**61.670.267.384,00**	**22.206.885.516,00**							**61.879.805.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.774.851.927,00	33.716.032.825,00	39.310.651.043,00	5.535.799.116,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-			45.263.250.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	22.650.156,00	22.650.156,00	22.650.156,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintah Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	17 Laporan	99.759.000,00	105.487.000,00	105.487.000,00	5.728.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	RISA I PRIH PRIHITUNGAN ANGGARAN SMUA SLLLLUMNYA	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintah Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah*				1 laporan	1 laporan	39.877.000,00	39.877.000,00	39.877.000,00	0,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintah Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	39.877.000,00	39.877.000,00	39.877.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintah Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya sumber daya air, listrik, komunikasi dan Tenaga Kontrak Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	5.772.173.500,00	5.760.000.000,00	5.760.000.000,00	-12.173.500,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		4.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.772.173.500,00	5.760.000.000,00	5.760.000.000,00	-12.173.500,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			4.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Aset Barang Milik Daerah terpelihara*				12 Bulan	12 Bulan	488.469.400,00	6.622.482.800,00	6.622.482.800,00	6.154.013.400,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			811.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	36 Unit	12.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	26.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	100 Unit	33.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-25.600.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	6 Unit	210.475.000,00	652.771.000,00	652.771.000,00	431.796.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	4 Unit	211.994.400,00	5.943.711.800,00	5.943.711.800,00	5.731.817.400,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG KESEHATAN		Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan kepesertaan JKN ; Capaian SPM Tingkat Kota ; Prevalensi Baduta Stunting ; Akreditasi RSUD**				**100 ; 100 ; 10 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;**	**100 ; 100 ; 10 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;**	**132.785.034.545,00**	**159.714.876.040,00**	**161.580.005.035,00**	**-84.102.881.558,00**							**48.882.152.987,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase FKTP Sesuai standar ; Rata-rata RL1 FKTP per bulan penyakit ; Persentase FKTL Sesuai standar ; Ketersediaan Alat Kesehatan dan obat esensial*				100 , 100 ; 100 , 100 persen ; 5&5 ; person ; person	100 , 100 ; 100 , 100 persen ; 5&5 ; person ; person	785.034.545,00	27.714.876.040,00	38.318.981.840,00	35.533.947.295,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		882.152.987,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	3 Unit	267.774.400,00	267.774.400,00	267.774.400,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			654.159.987,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik I asilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diadakan				1 Unit	20 Unit	5.210.600,00	24.257.561.400,00	32.699.585.000,00	32.694.374.400,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	DANA BAGI HASIL (DBH) DAN DISKRESIMEK ESEHATAN PENGUJIAN SISTIM KLSLIJIAN	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Ruta dan Perkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik I asilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				3 Unit	4 Unit	522.549.545,00	3.200.040.240,00	3.200.040.240,00	2.677.490.695,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			7.000.000,00	DINAS KESELIJIATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk dan/atau beban kerja dalam rangka pemenuhan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	0,00	162.082.300,00	162.082.300,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kaukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka kesembuhan TB ; Prevalensi HIV ; IR DBD ; Prevalensi Ipontonia ; Prevalensi balita gizi kurang ; Prevalensi balita gizi kurus ; Persentase Cakupan Kesehatan Ibu Termasuk Terselenggara*				95 ; 0,18 ; 200 ; 25 ; 6 ; 10 ; 100 angka ; person	95 ; 0,18 ; 200 ; 25 ; 6 ; 10 ; 100 angka ; person	132.000.000.000,00	132.000.000.000,00	125.241.023.195,00	-6.758.976.805,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		48.000.000.000,00	DINAS KESLIJIATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	132.000.000.000,00	132.000.000.000,00	125.241.023.195,00	-6.758.976.805,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	PENDAPATAN DARI BLUD		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			48.000.000.000,00	DINAS KESLIJIATAN
3	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Fasilitas Kesehatan Dengan SDM Sesuai Standar (Jumlah, Jenis dan Kompetensinya)**				**100 persen**	**100 persen**	**149.877.000,00**	**981.197.000,00**	**511.469.000,00**	**290.123.000,00**							**360.000.000,00**	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemenuhan kebutuhan SDMK mendapatkan pengembangan kompetensi*				100 persen	100 persen	149.877.000,00	981.197.000,00	511.469.000,00	361.592.000,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		360.000.000,00	DINAS KESLIJIATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				15 Orang	155 Orang	149.877.000,00	981.197.000,00	511.469.000,00	361.592.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Keluahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Perubahan Perilaku Gizi, Peningkatan Deteksi Dini Faktor Resiko Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)**				**100 persen**	**100 persen**	**49.958.937,00**	**994.849.231,00**	**1.445.309.833,00**	**41.083,00**							**50.000.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Provenif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*PHBS di Tatanan / Rumah tangga sekolah institusi kesehatan tempat kerja tempat umum)*				100 persen	100 persen	49.958.937,00	994.849.231,00	1.445.309.833,00	1.395.350.896,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	8 Dokumen	49.958.937,00	994.849.231,00	1.445.309.833,00	1.395.350.896,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			J U M L A H						**142.529.141.151,00**	**248.972.437.294,00**	**266.224.747.311,00**	**123.695.606.160,00**							**192.236.936.477,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA KOTA BONTANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA							**230.828.086.333,00**	**178.769.647.104,00**	**179.435.615.197,00**	**-51.192.471.136,00**							**130.066.552.987,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**230.828.086.333,00**	**178.769.647.104,00**	**179.435.615.197,00**	**-51.192.471.136,00**							**130.066.552.987,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**230.828.086.333,00**	**178.769.647.104,00**	**179.435.615.197,00**	**-51.192.471.136,00**							**130.066.552.987,00**	
1	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**97.643.215.851,00**	**17.078.724.833,00**	**15.918.831.329,00**	**-16.658.815.851,00**							**80.984.400.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan*				4 dokumen	4 dokumen	2.400.192,00	2.412.352,00	5.698,00	-2.394.494,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.250,00	1.225.830,00	0,00	-1.400.250,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban / Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	499.971,00	592.691,00	0,00	-499.971,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	499.971,00	593.831,00	5.698,00	-494.273,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan*				12 Laporan	12 Laporan	90.922.686.536,00	144.000.000,00	144.000.000,00	-90.778.686.536,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		73.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				489 Orang/ bulan	489 Orang/ bulan	90.778.686.536,00	0,00	0,00	-90.778.686.536,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			72.191.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			808.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian*				1 laporan	1 laporan	149.877.000,00	147.762.000,00	0,00	-149.877.000,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berkesesuaian Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	23 Orang	149.877.000,00	147.762.000,00	0,00	-149.877.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi umum*				1 laporan	1 laporan	287.732.223,00	4.382.190.881,00	3.362.485.631,00	3.064.733.608,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18 Paket	165.323.067,00	4.234.053.525,00	3.224.328.675,00	3.059.005.608,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	22.650.156,00	22.650.156,00	22.650.156,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Balikpapan	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			400.000.000,00	DINAS KLSLH LAINNYA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	17 Laporan	99.759.000,00	100.487.000,00	105.487.000,00	5.728.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Balikpapan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SPPR LIMNYA		Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			100.000.000,00	DINAS KLSLH LAINNYA
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah*				1 laporan	1 laporan	39.877.000,00	39.877.000,00	39.877.000,00	0,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		21.000.000,00	DINAS KLSLH LAINNYA
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	39.877.000,00	39.877.000,00	39.877.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya sumber daya air, listrik, komunikasi dan Tenaga Kontrak Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	5.772.173.500,00	5.760.000.000,00	5.760.000.000,00	12.173.500,00				Pengembangan daya saing SUM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SUM yang unggul dan berkualitas			4.400.000.000,00	DINAS KLSLH LAINNYA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.772.173.500,00	5.760.000.000,00	5.760.000.000,00	12.173.500,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Bontang Utara, Bontang Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)		Pengembangan daya saing SUM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SUM yang unggul dan berkualitas			4.400.000.000,00	DINAS KLSLH LAINNYA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			-			0,00	DINAS KLSLH LAINNYA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Aset Barang Milik Daerah terpelihara*				12 Bulan	12 Bulan	466.469.400,00	6.622.462.800,00	6.622.462.800,00	6.156.013.400,00				Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			811.000.000,00	DINAS KLSLH LAINNYA
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	36 Unit	12.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	26.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Balikpapan	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			11.000.000,00	DINAS KLSLH LAINNYA
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	100 Unit	33.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	25.600.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Balikpapan	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KLSLH LAINNYA
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	6 Unit	210.475.000,00	632.271.000,00	632.271.000,00	421.796.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Balikpapan	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			400.000.000,00	DINAS KLSLH LAINNYA
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	4 Unit	211.894.400,00	5.943.711.800,00	5.943.711.800,00	5.731.817.400,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Balikpapan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA KESEHATAN		Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			350.000.000,00	DINAS KLSLH LAINNYA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan kepesertaan JKN ; Capaian SPM Tingkat Kota ; Prevalensi Balita Stunting ; Akreditasi RSUD**				**100 ; 100 ; 10 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;**	**100 ; 100 ; 10 ; Paripurna Persen ; Persen ; Persen ;**	**132.785.034.646,00**	**169.714.876.040,00**	**161.560.005.035,00**	**-84.102.881.658,00**							**48.682.152.987,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase FKTP Sesuai standar ; Rasio FKTP per satuan penduduk ; Persentase FKTL Sesuai standar ; Ketersediaan Alat Kesehatan dan obat esensial*				100 ; 120.000 ; 100 ; 100 persen , rasio , persen ; persen	100 ; 120.000 ; 100 ; 100 persen , rasio , persen ; persen	785.034.545,00	27.714.876.040,00	36.318.981.840,00	35.533.947.295,00				Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			682.152.987,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	3 Unit	257.274.400,00	257.274.400,00	257.274.400,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Selambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			654.152.987,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diadakan				1 Unit	20 Unit	5.210.600,00	24.267.561.400,00	32.699.585.000,00	32.694.374.400,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Selambu	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK/DJ/DAK KESEHATAN/FEN DANA SISA LEBIH KESEHATAN	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Kulit dan Lekuka Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				3 Unit	4 Unit	522.549.345,00	3.200.040.240,00	3.200.040.240,00	2.677.490.895,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Selambu	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan pengelenggaraan tata kelola pemerintahan			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan minimal rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1/1000 dan/atau dalam rangka penegakan kelaikan pelayanan rumah sakit			-	1 Unit	0,00	0,00	162.082.200,00	162.082.200,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Selambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka kesembuhan TB , Prevalensi HIV , ST PMS , Prevalensi Hipertensi , Prevalensi Stunting , Prevalensi balita Gizi kurang , Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Terakreditasi*				95 , 0.16 , 200 , 35 , 6 , 10 ; 100 angka , persen	95 , 0.16 , 200 , 35 , 6 , 10 ; 100 angka , persen	132.000.000.000,00	132.000.000.000,00	125.241.023.195,00	-6.758.976.805,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		48.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	132.000.000.000,00	132.000.000.000,00	125.241.023.195,00	6.758.976.805,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Telihan	PENDAPATAN DAN HIBAH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN BLUD		Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			48.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Fasilitas Kesehatan Dengan SDM Sesuai Standar (Jumlah, Jenis dan Kompetensinya)**				**100 persen**	**100 persen**	**149.877.000,00**	**981.197.000,00**	**511.469.000,00**	**200.123.000,00**							**350.000.000,00**	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemenuhan kebutuhan SDMK memdapatkan pengembangan kompetensi*				100 persen	100 persen	149.877.000,00	981.197.000,00	511.469.000,00	361.592.000,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				15 Orang	159 Orang	149.877.000,00	981.197.000,00	511.469.000,00	361.592.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Selambu	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Penerapan 5 Muatan kebijakan GERMAS di Keluarahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)**				**100 persen**	**100 persen**	**49.958.937,00**	**994.849.231,00**	**1.445.309.833,00**	**41.063,00**							**50.000.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Prevensi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*PHBS 5 Tatanan (Rumah tangga sekolah institusi kesehatan tempat kerja tempat umum)*				100 person	100 person	49.958.937,00	994.849.231,00	1.445.309.833,00	1.395.350.896,00				Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	8 Dokumen	49.958.937,00	994.849.231,00	1.445.309.833,00	1.395.350.896,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Selambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	JUMLAH								**239.628.086.333,00**	**178.769.647.104,00**	**179.435.615.197,00**	**-51.192.471.136,00**							**130.086.552.987,00**	

III. DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, setiap Perangkat Daerah (PD) harus merumuskan atau menyusun Rencana Jangka Menengah atau Rencana Strategis PD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sebagai salah satu PD yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Bontang berkewajiban untuk menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi kerangka acuan, rujukan, komitmen dan kesanggupan dari segenap komponen organisasi untuk mengatasi beragam permasalahan yang tercakup dalam bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota terutama dalam menunjang upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan publik.

Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap SKPD menyusun Perubahan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra - OPD) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).Dengan ditetapkannya UU tersebut maka setiap daerah otonomi diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bontang tahun 2025 - 2029, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota telah menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum yang diikuti dengan sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota tahun berikutnya.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota telah menyusun Rancangan Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dan rancangan awal RKPD Kota Bontang Tahun 2025. Dokumen tersebut selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan dari hasil Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kota Bontang Tahun 2024 dan menjadi Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025.

Untuk memastikan keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya, maka dilakukan pembahasan terhadap dokumen tersebut oleh Tim Verifikasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang. Pembahasan ini mencakup :

a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang;
c. Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD Kota Bontang dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang;
d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kota Tahun 2025 merupakan penjabaran program / kegiatan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2025 - 2029, mengacu pada program / kegiatan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 serta berpedoman pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim 2025. Dengan demikian program / kegiatannya diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD, Renstra Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam perubahan renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Daerah Kota Bontang Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan

keuangan daerah yang diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

22. Perda RPJMD (Lembaran Daerah)
23. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang untuk periode 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 14) (Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 85);
26. Peraturan Walikota Bontang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 5).

Pengembangan pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum disusun dengan pendekatan Sistem Manajemen Strategis *(Strategic Management System)*, dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menjadi salah satu pendekatan untuk menunjang kesinambungan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Bontang, dengan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergitas program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maupun pengembangan program pembangunan lintas sektor yang diselengarakan di daerah. Implementasi Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tersebut dapat dipandang sebagai instrumen efektif dalam rangka pelembagaan kegiatan perencanaan yang partisipatif.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tahun 2025 :

a. Acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2025 sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.

b. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota selama tahun 2025.
c. Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan prasarana dan sarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memadai di Kota Bontang.
d. Menciptakan kemudahan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh elemen internal maupun eksternal institusi dalam rangka meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.
e. Mensinergikan dan mensikronisasikan program-program nasional, provinsi dan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL RENJA TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2025

1.4.1 Evaluasi Hasil Renja Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2025

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2025 Triwulan II (Triwulan Dua) yang mengacu pada pelaksanaan APBD tahun berjalan.

BAB III SASARAN DAN PRIORITAS RENJA TAHUN 2025

1.4.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang berhubungan langsung dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

1.4.3 Tujuan dan Sasaran Rancangan Perubahan RENJA OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD agar dapat dicapai.

1.4.4 Prioritas Perubahan Rencana Kerja

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

1.4.5 Rencana Kerja dan Pendanaan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi rencana kerja dan pendanaan pada Rencana Kerja Triwulan II (Triwulan Dua) tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2025

2.1 EVALUASI HASIL RENJA TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2025

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2025 merupakan informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian misi dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2025. Laporan ini selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 juga dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk implementasi dan sasaran kerja, rencana anggaran dan rencana strategis pada tahun anggaran selanjutnya.

Kinerja OPD diukur berdasarkan tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran serta pencapaian kinerja program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 mengacu kepada hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Triwulan II (Triwulan Dua). Hasil evaluasi ini memuat realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja serta faktor penyebabnya. Lebih lanjut hasil evaluasi kegiatan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun 2025 ini kemudian dijadikan acuan dalam implikasi pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dalam pengambilan kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran tahun 2026.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tahun 2025, dapat disampaikan bahwa Anggaran Tahun 2025 sebesar ***Rp. 831.712.725.868,-*** yang terdiri dari ***11*** program dan ***22*** kegiatan dengan pencapaian kinerja fisik sebesar ***40,35 % dan realisasi keuangan sebesar 29,73%.***

Adapun pencapaian hasil evaluasi Rencana Kerja Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang sebagaimana berikut:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
S/D Tahun 2025
Kota Bontang

Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat		Catatan	
									Murni										
									Triwulan I		Triwulan II								
					Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K	Triwulan I	Triwulan II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	19	20	21	22	23	24
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	38,943,962,390.00	0	100	100	8,700,477,397.00	25	9,028,142,558.00	25	0	0	50	SR	SR		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	Persen	5,620,518.00	0	100	100	0	0	0	100	0	0	100	SR	ST		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,620,518.00	0	1	1	0	0	0	1	0	0	100	SR	ST		Tahap penyusunan RENSTRA OPD tahun 2025-2029 dan RENJA OPD tahun 2026
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	Persen	23,723,547,291.00	0	100	100	5,346,492,761.00	25	5,656,148,653.00	25	0	0	50	SR	SR		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	23,721,673,785.00	0	97	97	5,346,492,761.00	106	5,656,148,653.00	106	0	0	54.64	SR	R	Jumlah PNS 84 orang, jumlah PPPK 22 orang	Jumlah PNS 84 orang, jumlah PPPK 22 orang (Target indikator akan dirubah diperubahan 2025)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1,873,506.00	0	1	1	0	0	0	1	0	0	100	SR	ST		

			Keuangan Akhir Tahun SKPD																
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	Persen	1,281,447,394.00	0	100	100	707,060,742.00	19	259,471,922.00	60	0	0	79	SR	T		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	236,871,394.00	0	3	3	0	0	225,453,000.00	3	0	0	100	SR	ST		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	975,257,000.00	0	150	150	707,060,742.00	85	34,018,922.00	12	0	0	64.67	SR	R		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	69,319,000.00	0	35	35	0	0	0	35	0	0	100	SR	ST		Pelaksanaan di bulan Juli pada minggu pertama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	Persen	1,233,824,159.00	0	100	100	207,501,583.00	16	824,651,238.00	64	0	0	80	SR	T		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	178,870,638.00	0	1	1	0	0	116,745,750.00	1	0	0	100	SR	ST		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	206,081,256.00	0	3	3	0	0	205,993,400.00	3	0	0	100	SR	ST		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	48,822,421.00	0	2	2	0	0	48,762,750.00	2	0	0	100	SR	ST		

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	29,092,528.00	0	2	2	5,784,400.00	2	1,870,000.00	2	0	0	100	SR	ST		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	484,008,000.00	0	120	120	201,717,183.00	19	170,096,288.00	45	0	0	53.33	SR	R		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	286,949,316.00	0	350	350	0	0	281,183,050.00	350	0	0	100	SR	ST		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	Persen	183,872,412.00	0	100	100	0	25	139,360,150.00	25	0	0	50	SR	SR		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	31,562,000.00	0	1	1	0	0	0	1	0	0	100	SR	ST		Pengadaan Kendaraan menunggu daftar harga dari LKPP pusat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6,261,800.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR		Dalam Proses survey barang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	146,048,612.00	0	7	7	0	0	139,360,150.00	7	0	0	100	SR	ST		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	Persen	10,844,864,940.00	0	100	100	2,344,645,923.00	25	1,803,374,705.00	25	0	0	50	SR	SR		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	8,000,000.00	0	200	200	0	0	8,000,000.00	200	0	0	100	SR	ST		

aan Ruang Kota																			
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4,370,400,000.00	0	12	12	831,179,288.00	3	745,820,892.00	3	0	0	50	SR	SR		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,466,464,940.00	0	114	114	1,513,466,635.00	114	1,049,553,813.00	114	0	0	50	SR	SR		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pelayanan Aparatur	Persen	1,670,785,676.00	0	100	100	94,776,388.00	25	345,135,890.00	25	0	0	50	SR	SR		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	698,233,480.00	0	25	25	94,110,388.00	25	162,203,894.00	25	0	0	50	SR	SR		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	972,552,196.00	0	76	76	666,000.00	76	182,931,996.00	76	0	0	50	SR	SR	proses pelaksanaan pemeliharaan peralatan mesin	proses pelaksanaan pemeliharaan peralatan mesin
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kapasitas unit air tanah/air baku	Persen	227,323,248,938.00	0	87	87	58,300,270.00	79.85	39,501,551,453.00	79.85	0	0	45.89	SR	SR		Jumlah kapasitas sumur air tanah / air baku eksisting (457,02 l/dt) / Jumlah kapasitas sumur air tanah / air baku rencana atau ideal (572,34 l/dt) X 100%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang turap dan tanggul yang telah dibangun/ panjang keseluruhan sungai	M	227,323,248,938.00	0	1,233.00	1,233.00	58,300,270.00	0	39,501,551,453.00	507	0	0	41.12	SR	SR		Sudah Sesuai kurva S penyedia
Dinas Pekerjaan Umum dan	1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit	2,500,000,000.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	SSH dan HSPK Kota Bontang belum tersedia, menunggu usulan di	SSH dan HSPK Kota Bontang belum tersedia, menunggu usulan di

Penataan Ruang Kota																		ASTARA dan menunggu anggaran perubahan	ASTARA dan menunggu anggaran perubahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Km	4,879,826,093.00	0	13	13	12,280,013.00	3	13,864,927.00	3.5	0	0	50	SR	SR		Sudah sesuai dengan kurva S
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.02.2.01.0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pembangunan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir yang dibangun	pintu air	193,071,020.00	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR		Tahap proses perencanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	M	5,269,451,033.00	0	130	130	0	0	0	50	0	0	38.46	SR	SR	proses lelang	Sudah Sesuai Kurva S Penyedia
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	M	163,467,875,323.00	0	1,985.00	1,985.00	23,821,957.00	0	38,615,364,867.00	350	0	0	17.63	SR	SR	Proses administrasi (Lelang)	Sudah Sesuai Kurva S Penyedia
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	5,383,098,240.00	0	16	16	5,166,600.00	0	846,827,859.00	10	0	0	62.5	SR	R	Proses Lelang/Penunjukan Langsung	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah polder/Kolam retensi yang di bangun	Unit	44,037,598,509.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	Pengalihan anggaran untuk pembebasan lahan pada P APBD 2025	Pengalihan anggaran untuk pembebasan lahan pada P APBD 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pembangunan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir yang dibangun	Unit	800,000,000.00	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR		Sudah Sesuai Kurva S Penyedia
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan	Dokumen	792,328,720.00	0	4	4	17,031,700.00	1	25,493,800.00	1	0	0	50	SR	SR	Proses Lelang	

aan Ruang Kota		Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun																
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase penduduk berakses air minum layak	Persen	38,892,116,496.00	0	84.8	84.8	115,208,090.00	88.39	6,169,348,422.00	88.39	0	0	52.12	SR	R		Penduduk berakses air minum (169545 jiwa) / Jumlah penduduk (191811 jiwa) X 100%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	Persen	38,892,116,496.00	0	84.8	84.4	115,208,090.00	88.39	6,169,348,422.00	88.39	0	0	52.36	SR	R		Penduduk berakses air minum (169545 jiwa) / Jumlah penduduk (191811 jiwa) X 100%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	800,220,000.00	0	4	4	0	0	0	1	0	0	25	SR	SR		sedang dalam proses penyusunan dokumen perencanaan (survei pengumpulan data primer dan data sekunder)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan yang di bangun	Liter/Detik	28,619,767,496.00	0	50	50	52,198,925.00	0	4,503,706,716.00	32	0	0	64	SR	R		dalam proses pelaksanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) yang dioprasikan dan dipelihara	Unit	204,909,000.00	0	1	1	5,397,400.00	1	3,990,000.00	1	0	0	100	SR	ST		pemeliharaan rutin
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan rumah yang terlayanioleh perluasan sistem penyediaan air minum SPAM jaringan perpipaan	SR	9,267,220,000.00	0	50	50	57,611,765.00	0	1,661,651,706.00	0	0	0	0	SR	SR		proses perijinan crosing pipa PT. Pertamina Gas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA / TPS-3R/TPS	Persen	3,237,784,000.00	0	31	31	0	34.24	257,273,570.00	34.24	0	0	55.23	SR	R		Sisa kapasitas TPA (171215 m3) / Kapasitas TPA (m3) (500000 m3) x 100%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penat	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah	Jumlah rumah tangga yang terlayani persampahannya	Rumah Tangga	3,237,784,000.00	0	200	200	0	0	257,273,570.00	0	0	0	0	SR	SR		proses ecatalog

aan Ruang Kota		Kabupaten/Kota																	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang di bangun	Ton	2,401,083,000.00	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR		masih dalam proses e katalog
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	836,701,000.00	0	3	3	0	0	257,273,570.00	2	0	0	66.67	SR	S		proses penyususnan dokumen perencanaa survei data primer dan sekunder
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	6,601,663,469.00	0	97	97	22,422,600.00	96.26	111,938,070.00	96.26	0	0	49.62	SR	SR		Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi (air limbah domestik) (49457 unit) / Jumlah rumah tinggal (51377) x 100%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah untuk rumah tangga	Jiwa	6,601,663,469.00	0	200	200	22,422,600.00	0	111,938,070.00	19	0	0	9.5	SR	SR	indikator kinerja seharusnya jumlah penduduk berakses air limbah domestik	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala permukiman yang dioptimalisasi	Unit	3,873,970,000.00	0	3	3	0	0	15,221,630.00	0	0	0	0	SR	SR		terkait kendala dalam kepemilikan lahan untuk lokasi pembangunan PUMP station
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	85,254,386.00	0	291	291	0	135	0	145	0	0	96.22	SR	ST		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1,301,952,083.00	0	6	6	22,422,600.00	6	96,716,440.00	6	0	0	100	SR	ST	Pemeliharaan Rutin 5 IPALdan 1 IPLT	Pemeliharaan Rutin 5 IPALdan 1 IPLT
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	jJumlah rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Rumah Tangga	1,161,500,000.00	0	20	20	0	0	0	19	0	0	95	SR	ST		

Ruang Kota																			
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	178,987,000.00	0	3	3	0	0	0	3	0	0	100	SR	ST		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Persen	277,305,548,809.00	0	93.52	93.52	26,162,400.00	98.48	49,864,112,395.00	98.48	0	0	52.65	SR	R		Panjang drainase perkotaan tidak tersumbat pembuangan aliran air (38091 meter) / Panjang seluruh drainase perkotaan di daerah kabupaten (38678 meter) X 100%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara	M	277,305,548,809.00	0	1,266.00	1,266.00	26,162,400.00	0	49,864,112,395.00	559	0	0	44.15	SR	SR		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	jJumlah sistem drainase yang ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	181,218,446,361.00	0	3,000.00	3,000.00	0	0	33,765,915,156.00	559	0	0	18.63	SR	SR	proses lelang	Sesuai dengan Kurva S penyedia
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit	695,450,000.00	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	jJumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	83,717,148,609.00	0	1,750.00	1,750.00	0	0	15,204,222,315.00	317	0	0	18.11	SR	SR		Sudah Sesuai Kurva S Penyedia
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	11,674,503,839.00	0	50	50	26,162,400.00	0	893,974,924.00	14	0	0	28	SR	SR		
Dinas Pekerjaan Umu	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi	Persen	31,972,494,254.00	0	63.51	63.51	297,853,288.00	61.64	1,381,947,392.00	61.64	0	0	48.53	SR	SR		Jumlah bangunan gedung yg sesuai kriteria teknis

m dan Penataan Ruang Kota			persyaratan teknis																(45 unit) / Jumlah seluruh bangunan gedung (73 unit) x 100%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penyelenggaraan gedung negara	Unit	31,972,494,254.00	0	15	15	297,853,288.00	0	1,381,947,392.00	7	0	0	46.67	SR	SR	Proses perencanaan	Realisasi Fisik kegiatan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kanaan - Pemeliharaan Halaman Rumah Tongkonanan - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Asrama Putri Makassar - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Disperindakop - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPUPR Bontang Lestari - Ubahsuai Sarana dan Prasarana Auditorium Gedung Graha Taman Praja - Ubahsuai Sarana dan Prasarana Gedung Asrama Putra Makassar
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang diubahsuaikan	Bangunan Gedung	7,127,480,700.00	0	5	5	36,002,850.00	0	419,759,000.00	2	0	0	40	SR	SR	Realisasi Perencanaan kegiatan - Perencanaan Teknis Ubahsuai Sarana dan Prasarana Auditorium Gedung Graha - Perencanaan Teknis Ubahsuai Sarana dan Prasarana Gedung Asrama Putra Makassar	Realisasi Perencanaan kegiatan - Perencanaan Teknis Ubahsuai Gedung MUI - Review Perencanaan Teknis Ubahsuai Sarana Pendukung Masjid Terapung Realisasi Pekerjaan Fisik - Ubahsuai Sarana dan Prasarana Auditorium Gedung Graha Taman Praja - Ubahsuai Sarana dan Prasarana Gedung Asrama Putra Makassar - Teknis Ubahsuai Sarana Pendukung Masjid Terapung Kegiatan di pending karena dana Realisasi Pekerjaan Pengawasan - Pengawasan Teknis Ubahsuai Sarana dan Prasarana Auditorium Gedung Graha Taman Praja - Pengawasan Teknis Ubahsuai

																			Sarana dan Prasarana Gedung Asrama Putra Makassar
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis kabupaten/kota yang dipelihara, dirawat dan diperisa berkala	Bangunan Gedung	1,383,914,763.00	0	7	7	195,246,330.00	0	789,341,208.00	5	0	0	71.43	SR	S	Realisasi Pekerjaan Perencanaan : - Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kanaan - Perencanaan Teknis Pemeliharaan Halaman Rumah Tongkonanan - Perencanaan Teknis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Asrama Putri Makassar - Perencanaan Teknis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Disperindakop - Perencanaan Teknis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPUPR Bontang Lestari	Realisasi Pekerjaan Perencanaan : - Perencanaan Teknis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Telihan Realisasi Pekerjaan Fisik : - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kanaan - Pemeliharaan Halaman Rumah Tongkonanan - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Asrama Putri Makassar - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Disperindakop - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPUPR Bontang Lestari Realisasi Pekerjaan Pengawasan : - Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Kanaan - Pengawasan Teknis Pemeliharaan Halaman Rumah Tongkonanan - Pengawasan Teknis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Asrama Putri Makassar - Pengawasan Teknis Pemeliharaan

																			Sarana dan Prasarana Kantor Disperindakop - Pengawasan Teknis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPUPR Bontang Lestari
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembangunan , pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strrategis daerah kabupaten/kota	Dokumen	22,611,993,396.00	0	16	16	34,999,892.00	0	144,457,400.00	6	0	0	37.5	SR	SR	Proses penyusunan HPS paket lelang	- Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pertemuan dan Sekertariat Bersama Organisasi Mitra DP3AKB 100 % - pembangunan kel. tanjung laut Kontrak tanggal 16 Juni 2025 Progres sesuai Schedule - pembangunan Lapangan Hop 1 Kontrak per tanggal 7 Juli, progres sesuai Schedule - Progres Andalalin 100% dan AMDAL Hop 1 sesuai Schedule - Progres perencanaan masjid kawasan bontang lestari sesuai Schedule
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Orang	44,192,286.00	0	75	75	0	28	0	22	0	0	66.67	SR	S	Sebagian pemohonan ber ada di Tahun 2024	Kurang nya tenaga ahli yang berlisensi/ bersertifikat yang ada di Kota Bontang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung	Jumlah Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (LSF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung	Dokumen	804,913,109.00	0	50	75	31,604,216.00	22	28,389,784.00	18	0	0	53.33	SR	R	Permohonan Tahun 2024 Selesai di Triwulan 1 Tahun 2025	Kurangnya Tenaga Ahli yang berlensi yang ada di kota bontang

		(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIM BG																
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase sempadan sungai yang tertata	Persen	496,437,000.00	0	18.46	18.46	0	18.46	0	18.46	0	0	50	SR	SR		Panjang sempadan sungai yang telah tertata (5124 meter) / Jumlah total panjang sempadan sungai (27282 meter) X 100%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Sempadan Sungai yang tertata	Kawasan	496,437,000.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	Proses survei harga material untuk disepakati	Proses penyusunan HPS
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	44,224,000.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	Fisik sedang tahap survey harga material	Fisik sedang tahap penyusunan HPS
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	452,213,000.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	Proses survei harga material untuk disepakati	Proses penyusunan HPS
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Drainase Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	158,141,640,978.00	0	92.83	92.83	282,670,739.00	90.55	14,154,725,007.00	90.55	0	0	48.77	SR	SR		Panjang jalan kondisi mantap (176878 m) / Panjang jalan seluruhnya (195337 m) X 100%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dalam kondisi mantap	Meter	158,141,640,978.00	0	176,878.00	176,878.00	282,670,739.00	176,878.00	14,154,725,007.00	176,878.00	0	0	50	SR	SR		

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	1,807,374,000.00	0	8	8	94,355,500.00	1	0	5	0	0	75	SR	S	Proses pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan perencanaan	pelaksanaan pekerjaan perencanaan telah berkontrak
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Km	6,396,530,000.00	0	9.24	9.24	16,119,996.00	0.25	463,807,400.00	5.55	0	0	62.76	SR	R	proses pemilihan penyedia	pekerjaan pengawasan telah berjalan pada lokasi pekerjaan yang telah ditentukan, untuk output kegiatan pada pekerjaan pengawasan mungkin bisa direvisi menjadi dokumen, karena outputnya berupa dokumen pengawasan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	44,057,365,828.00	0	2	2	29,509,468.00	0.1	2,894,203,600.00	1	0	0	55	SR	R	proses pemilihan penyedia dan pekerjaan persiapan	trase jalan sudah terbentuk sepanjang 1 km tetapi tahap pekerjaan tanah (galian dan timbunan), untuk pekerjaan struktur jalan rencana pelaksanaan dimulai pada triwulan ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Rekonstruksi	Km	71,140,219,156.00	0	1.01	1.01	74,541,455.00	0.1	5,546,905,743.00	0.4	0	0	49.5	SR	SR		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	336,500,000.00	0	1	1	0	0	152,568,514.00	1	0	0	100	SR	ST		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Km	245,881,822.00	0	9.24	9.24	50,113,120.00	76	4,213,300.00	76	0	0	100	SR	ST	Terdapat kekeliruan dalam penginputan indikator capaian yang tidak sesuai dengan Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kota sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/232/DPUPR/2025	Terdapat kekeliruan dalam penginputan indikator capaian yang tidak sesuai dengan Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kota sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/232/DPUPR/2025

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Jembatan	212,000,682.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 3	Dalam proses kontrak (penyusunan RAB)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	470,265,192.00	0	350	350	0	76	9,405,300.00	76	0	0	10.86	SR	SR	Terdapat kekeliruan dalam penginputan indikator capaian yang tidak sesuai dengan Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kota sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/232/DPUPR/2025	Terdapat kekeliruan dalam penginputan indikator capaian yang tidak sesuai dengan Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kota sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/232/DPUPR/2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	26,564,568,310.00	0	5.84	5.84	5,101,200.00	0	4,496,965,300.00	4	0	0	68.49	SR	S	Proses pemilihan penyedia	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	6,910,935,988.00	0	0.39	0.39	12,930,000.00	0.05	586,655,850.00	0.15	0	0	51.28	SR	R	0.050 (pemeliharaan jalan oleh THL)	0.050 (pemeliharaan jalan oleh THL)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Persen	1,533,236,428.00	0	84.57	84.57	36,525,648.00	83.12	597,980,500.00	84.57	0	0	49.57	SR	SR		Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat (2103 orang) / Jumlah seluruh tenaga kerja konstruksi (2530 orang) X 100%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja terampil konstruksi yang telah tersertifikasi	Orang	99,413,340.00	0	2,340.00	2,340.00	0	0	87,498,000.00	2,266.00	0	0	96.84	SR	ST	Pelaksanaan dilakukan di Triwulan II	adanya efisiensi anggaran sehingga target tidak tercapai. akan dilakukan perubahan target indikator Jumlah tenaga kerja tahun sebelumnya 2103 + 163 (pelatihan berjalan tahun 2025) = 2266 tenaga kerja bersertifikat
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang di fasilitasi sertifikasi	Orang	99,413,340.00	0	50	50	0	0	87,498,000.00	50	0	0	100	SR	ST	Pelaksanaan dilakukan di Triwulan II	kegiatan sudah terlaksana

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan SIPJAKI Daerah	Badan Usaha	64,059,271.00	0	500	500	16,929,637.00	0	0	20	0	0	4	SR	SR	-	500 badan usaha dari OSS. pelaksanaan survey yang dilaksanakan hingga saat ini 20 badan usaha. akan dilakukan perubahan target indikator
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	5,395,616.00	0	1	1	0	0	0	0.5	0	0	50	SR	SR	triwulan 3 baru terlaksana karena ada perbaikan sistem di pusat /kementrian	pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 3 (sudah mulai penginputan data)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	51,877,720.00	0	6	6	16,929,637.00	0	0	6	0	0	100	SR	ST	Pelaksanaan dilakukan di Triwulan II (aplikasi SIPJAKI dalam proses maintenance oleh kementrian PUPR	pelaksanaan Pengelola SIPJAKI sudah dilaksanakan secara online,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan	6,785,935.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	aplikasi SIPJAKI belum di update oleh kementrian PUPR	Tahapan pengumpulan data / survey SIPJAKI
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan	Persen	1,369,763,817.00	0	100	100	19,596,011.00	0	510,482,500.00	8	0	0	8	SR	SR		Realisasi target = 20 badan usaha yang diawasi dibagi jumlah badan usaha 250 dikali 100%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Badan Usaha	1,339,094,924.00	0	250	250	19,596,011.00	0	510,482,500.00	20	0	0	8	SR	SR		1. pelaksanaan pengawasan paket kegiatan/ proyek konstruksi yang sedang berjalan 20 badan usaha. terget indikator akan dirubah/penyesuaian 2. pelaksanaan sertifikasi 113 peserta
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Badan Usaha	19,645,753.00	0	250	250	0	0	0	20	0	0	8	SR	SR	mengikuti terselenggaranya pelaksanaan kegiatan/ proyek konstruksi dimana rata-rata baru berjalan diakhir triwulan ke2	pelaksanaan pengawasan paket kegiatan/ proyek konstruksi yang sedang berjalan 20 badan usaha. terget indikator akan dirubah/penyesuaian
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan	Dokumen	11,023,140.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	Pelaksanaan Kegiatan pada triwulan 3	Pelaksanaan Kegiatan pada triwulan 3

Ruang Kota		Produk Jasa Konstruksi	Produk Jasa Konstruksi yang Disusun															
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	Persen	1,224,300,776.00	0	89.6	89.6	26,976,527.00	94.17	38,215,500.00	94.17	0	0	52.55	SR	R		Jumlah bangunan ber – IMB (11616 unit) / Jumlah bangunan (24922 unit) X 100%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	koordinasi dan sinkronisasi	Persen	868,605,411.00	0	100	100	26,976,527.00	3	12,631,700.00	30	0	0	33	SR	SR		Pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan sampai Laporan Pendahuluan dan Laporan Fakta dan Analisi progres 33%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang	25,882,000.00	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	anggaran kas berada dibulan 6 maka kegiatan akan dilakukan di bulan 6	karena adanya efisiensi anggaran rencana kerja akan diperbaiki menunggu anggaran perubahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	806,147,423.00	0	2	2	26,976,527.00	30	12,631,700.00	30	0	0	100	SR	ST	Pelaksanaan kegiatan Laporan Pendahuluan di laksanakan pada Tri Wulan Ke - 2	Pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan sampai Laporan Pendahuluan dan Laporan Fakta dan Analisi, namun pengajuan Termin baru akan dilakukan di Bulan Juli 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen	36,575,988.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	sesuai anggaran kas akan dilakukan pada bulan 6	karena adanya efisiensi anggaran akan dilakukan setelah anggaran perubahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Singkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang Diterbitkan	KKPR	193,456,803.00	0	100	100	0	27	17,083,800.00	54	0	0	81	SR	T		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	103,464,803.00	0	100	100	0	27	17,083,800.00	54	0	0	81	SR	T	Kegiatan Survey dan Penerbitan Rekomendasi mulai berjalan	operasional Kegiatan Survey dan Penerbitan Rekomendasi sudah berjalan
Dinas Pekerjaan Umum dan	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi	Dokumen	89,992,000.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan	Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan

Penataan Ruang Kota			penyusunan RTRW															proses revisi RTRW.	proses revisi RTRW, anggaranakan dialihkan ke kegiatan lainnya di perubahan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pemanfaatan ruang	Rekomendasi	162,238,562.00	0	5	5	0	1	8,500,000.00	1	0	0	40	SR	SR		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus	33,888,502.00	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	Menunggu penyesuaian dalam Anggaran Perubahan untuk pelaksanaan kegiatan dimana akan dilebur pada kegiatan lain	Menunggu penyesuaian dalam Anggaran Perubahan untuk pelaksanaan kegiatan dimana akan dilebur pada kegiatan lain
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	24,385,180.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	Proses pengumpulan dan pemilahan data untuk di audit pemanfataan tata ruang (rencana pelaksanaan pada triwulan 3)	Proses pengumpulan dan pemilahan data untuk di audit pemanfataan tata ruang (rencana pelaksanaan pada triwulan 3)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	82,054,080.00	0	1	1	0	0	8,500,000.00	1	0	0	100	SR	ST	Kegiatan belum belum berjalan	Kegiatan FPR sudah berjalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	21,910,800.00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR		Anggaran masih kurang dan menunggu anggaran perubahan.

Adapun hasil telahaan evaluasi diatas belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan beberapa kegiatan masih dalam tahap proses lelang, proses pelaksanaan sehingga output kegiatan belum direalisasikan secara maksimal. Adapun penyelesaian pekerjaan ditargetkan selesai di Triwulan IV (Triwulan Empat).

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kota Bontang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)			Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	
1	Persentase penduduk berakses air minum layak	100%	-	83.12	85.72	88.39	85.72	88.39	88.40	
2	Persentase rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	-	96	96.50	97	96.02	96.26	97.50	
3	Persentase kapasitas unit embung/ penampung air/sumur air tanah/air baku	-	-	87	87	87	79.56	79.85	90	
	Persentase kapasitas aliran sungai		-	68	71	75.11	70.73	75.11	75.12	
	Persentase daya tampung danau/folder/kolam retensi		-	85.13	87	89.59	85.17	87.06	92	
4	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA / TPS-3R/TPS	-	-	44	38	31	41.88	34.24	24	

5	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	-	-	92.52	97.92	98.48	97.92	98.48	98.50	
6	Kesesuaian terhadap RTRW	-	-	88.90	94.17	94.17	94.17	94.17	94.18	
7	Persentase jalan dalam kondisi mantap	-	-	90.01	90.02	90.55	88.15	90.55	90.56	
	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik		-	92.81	94.11	-	94.11	94.68	-	
8	Persentase Penataan bangunan Gedung	-	-	63.93	60.81	63.51	57.35	61.64	81.97	
9	Persentase sempadan sungai yang tertata	-	-	12.46	15.61	18.78	15.61	18.78	21.46	
10	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	-	-	79.50	86.78	84.57	80.42	83.12	85.00	

BAB III

SASARAN DAN PRIORITAS PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja. Pada dasarnya pembangunan RPJMN 2025 - 2029 yang mengusung visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Kebijakan operasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2025-2029 dalam kaitannya dengan RPJMN 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
b. Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
c. Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merata dan berkeadilan dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kota dan desa, serta kawasan timur Indonesia.

   Infrastruktur Pekerjaan Umum (ke-PU-an) dalam dimensi pembangunan meliputi :

   a. Dimensi Sektor Unggulan

      Pembangunan pada dimensi ini menitikberatkan pada ketahanan pangan dengan sasaran berupa :
      - Pembangunan dan Peningkatan, Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa;
      - Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa;
      - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak;
      - Pembangunan waduk.

   b. Dimensi Pembangunan Manusia

      Pembangunan pada dimensi ini menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dasar dengan sasaran berupa :
      - Meningkatkan akses Air Minum Layak;
      - Meningkatkan akses Sanitasi Layak;
      - Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan.

   c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

      Pembangunan pada dimensi ini menitikberatkan pada konektivitas dengan sasaran berupa :
      - Meningkatkan Kondisi mantap jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
      - Pengembangan jalan nasional;

- Pembangunan jalan baru;
- Pengembangan jalan tol.

Penelaahan juga dilakukan dengan melihat arah dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang diarahkan pada :

- Pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- Penguatan daya saing usaha;
- Pembangunan rendah karbon serta transisi energi;
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- Percepatan pembangunan IKN.

Dari penjelasan tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tersebut serta penjabaran pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, OPD dapat menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun berikutnya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran rencana kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tahun 2026 didasarkan pada RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembangunan daerah yang bersesuaian dengan rencana pembangunan nasional serta turut membantu Walikota Bontang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota melalui hasil rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang Tahun 2025-2029 berdasarkan visi dan misi pembangunan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Terwujudnya Kota Bontang yang maju.
   Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur yang maju dan merata;
   Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air :

a. Menuntaskan penanganan normalisasi sungai.
b. Menuntaskan penanganan pengendalian banjir yang masih bersifat parsial.
c. Memanfaatkan air permukaan/*overflow* agar dapat meminimalisir potensi banjir.
d. Meningkatkan jumlah sumber air bersih.
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas air.

Bidang Bina Marga :
a. Meningkatkan rasio jaringan jalan agar sebanding dengan jumlah kendaraan, roda dua maupun roda empat.
b. Memperluas jaringan jalan sehingga dapat meminimalisir kemacetan lalu lintas.
c. Meningkatkan sarana pedestrian jalan.

Bidang Tata Ruang Dan Tata Bangunan :
a. Meningkatkan kebutuhan akan bangunan gedung umum dan pemerintahan.
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan permasalahan tata ruang
c. Memaksimalkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
d. Meningkatkan kualitas kawasan perkotaan.

Bidang Bina Konstruksi :
a. Meningkatkan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.
b. Menyediakan fasilitas sertifikasi untuk tenaga kerja terampil.

1.3 PRIORITAS PERUBAHAN RENCANA KERJA

Adapun prioritas perubahan rencana kerja Tahun 2025 ditujukan untuk penyelesaian kegiatan yang sedang berjalan, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi,

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Prioritas Perubahan RENJA Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan persentase penduduk berakses air minum layak. Kegiatan yang mendukung pembangunan dan perluasan SPAM jaringan perpipaan.
2. Meningkatkan persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Kegiatan yang mendukung Rehabilitasi dan peningkatan system pengolahan air limbah domestik.
3. Meningkatkan persentase kapasitas sumur tanah air baku, kapasitas aliran sungai dan daya tamping danau. Kegiatan yang mendukung pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi bangunan perkuatan tebing dan normalisasi sungai.
4. Meningkatkan persentase kapasitas TPA/TPS. Kegiatan yang mendukung peningkatan dan pembangunan TPA/TPS.
5. Meningkatkan persentase drainase dalam kondisi baik. Kegiatan yang mendukung pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi saluran drainase.
6. Meningkatkan persentase jalan dalam kondisi mantap dan drainase jalan dalam kondisi baik. Kegiatan yang mendukung pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
7. Meningkatkan persentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis. Kegiatan yang mendukung pembangunan, rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung dan penerbitan IMB, SLF, TABG, pendataan bangunan gedung dan implementasi SIMBG.
8. Meningkatkan persentase sempadan sungai yang tertata. Kegiatan yang mendukung pengawasan penataan bangunan & lingkungan dan penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya.
9. Meningkatkan persentase tenaga konstruksi yang bersertifikat. Kegiatan yang mendukung pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
10. Meningkatkan persentase kesesuaian tata ruang. Kegiatan yang mendukung koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah.

Pelaksanaan perubahan RENJA diperlukan penambahan anggaran guna terlaksananya program kegiatan TA. 2025 perubahan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA							**512,835,648,418.00**	**699,386,370,293.00**	**831,712,725,868.00**	**318,877,077,450.00**							**564,326,776,537.00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**512,835,648,418.00**	**699,386,370,293.00**	**831,712,725,868.00**	**318,877,077,450.00**							**564,326,776,537.00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**512,835,648,418.00**	**699,386,370,293.00**	**831,712,725,868.00**	**318,877,077,450.00**							**564,326,776,537.00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**-**	**100 %**	**33,084,107,592.00**	**40,503,940,903.00**	**39,018,962,390.00**	**-2,447,331,055.00**							**30,636,776,537.00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase administrasi perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan*				100 %	100 %	64,322,510.00	6,869,522.00	5,620,518.00	-58,701,992.00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DPUPR		50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	64,322,510.00	6,869,522.00	5,620,518.00	-58,701,992.00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Pemenuhan Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	22,199,311,215.00	23,724,171,793.00	23,723,547,291.00	1,524,236,076.00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	ASN DPUPR		22,902,884,369.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Orang/bulan	106 Org/bulan	22,196,813,207.00	23,721,673,785.00	23,721,673,785.00	1,524,860,578.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			22,899,884,369.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,498,008.00	2,498,008.00	1,873,506.00	-624,502.00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			3,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Administrasi Kepegawaian*				100 persen	100 persen	769,968,154.00	2,276,314,002.00	1,281,447,394.00	511,479,240.00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai DPUPR		1,900,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	399,291,592.00	240,280,002.00	236,871,394.00	-162,420,198.00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			350,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	85 Orang	270,677,000.00	1,951,532,000.00	975,257,000.00	704,580,000.00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			1,400,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			20 Orang	35 Orang	99,999,562.00	84,502,000.00	69,319,000.00	-30,680,562.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			150,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Pemenuhan Administrasi Umum*			100 persen	100 persen	1,239,864,612.00	1,795,062,558.00	1,308,824,159.00	68,959,547.00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DPUPR		1,860,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	9,356,903.00	208,146,965.00	178,870,638.00	169,513,735.00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			10,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	286,110,359.00	257,150,044.00	206,081,256.00	-80,029,103.00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			350,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30,801,215.00	51,668,309.00	48,822,421.00	18,021,206.00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	80,594,330.00	69,269,924.00	29,092,528.00	-51,501,802.00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			150,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72 Laporan	69 Laporan	581,853,000.00	921,878,000.00	484,008,000.00	-97,845,000.00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			1,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				350 Dokumen	350 Dokumen	251,148,805.00	286,949,316.00	361,949,316.00	110,800,511.00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyeleng			300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

															garaan tata kelola pemerintahan				
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*				100 persen	100 persen	6,210,439,067.00	183,872,412.00	183,872,412.00	-6,026,566,655.00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Barang Milik Daerah DPUPR		700,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	41,567,000.00	31,562,000.00	31,562,000.00	-10,005,000.00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			350,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	103,825,615.00	6,261,800.00	6,261,800.00	-97,563,815.00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			150,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	7 Unit	6,065,046,452.00	146,048,612.00	146,048,612.00	-5,918,997,840.00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyeleng			200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

																garaan tata kelola pemerintahan				
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Pemenuhan Administrasi Jasa Penunjang*				100 %	100 %	1,663,844,956.00	10,846,864,940.00	10,844,864,940.00	9,181,019,984.00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DPUPR		2,273,892,168.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	-2,000,000.00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			12,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	311,088,000.00	4,370,400,000.00	4,370,400,000.00	4,059,312,000.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			700,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				27 Laporan	114 Laporan	1,342,756,956.00	6,466,464,940.00	6,466,464,940.00	5,123,707,984.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			1,561,892,168.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*				100 %	100 %	936,357,078.00	1,670,785,676.00	1,670,785,676.00	734,428,598.00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Barang Milik Daerah DPUPR		950,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	701,834,678.00	698,233,480.00	698,233,480.00	-3,601,198.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			700,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				66 Unit	76 Unit	234,522,400.00	972,552,196.00	972,552,196.00	738,029,796.00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			250,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase kapasitas aliran sungai Persentase kapasitas unit embung/ penampung air/sumur air tanah/air baku Persentase daya tampung danau/folder/kolam retensi**				**7087 89,59 % % %**	**7087 89 ,59 % % %**	**253,810,039,400.00**	**189,603,016,636.00**	**255,926,732,838.00**	**-17,210,039,400.00**							**236,600,000,000.00**	

	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang turap dan tanggul yang telah dibangun / panjang keseluruhan sungai*				1233 meter	1233 meter	253,810,039,400.00	189,603,016,636.00	255,926,732,838.00	2,116,693,438.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat terdampak banjir		236,600,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir																		
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			5,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				13 KM	13 KM	7,850,828,640.00	5,184,753,256.00	4,879,826,093.00	-2,971,002,547.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengemba	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan			13,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

														DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	prasarana infrastruktur dasar.				
	1.03.02.2.01.0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan				5 Unit	6 Unit	100,000,000.00	200,071,020.00	193,071,020.00	93,071,020.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			600,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0,04 KM	0,13 KM	6,379,872,000.00	5,324,150,033.00	10,269,451,033.00	3,889,579,033.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			10,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																	
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,1 KM	1,985 KM	212,945,849,760.00	125,579,751,118.00	182,871,359,223.00	-30,074,490,537.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			100,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				12 Dokumen	16 Dokumen	954,635,000.00	5,174,512,050.00	9,383,098,240.00	8,428,463,240.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			5,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi																	

			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun			3 Unit	1 Unit	24,000,000,000.00	44,037,598,509.00	44,037,598,509.00	20,037,598,509.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			100,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																	
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun			1 Unit	4 Unit	285,400,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	514,600,000.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			1,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya			1 Dokumen	4 Dokumen	293,454,000.00	802,180,650.00	992,328,720.00	698,874,720.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengemba	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan			2,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

			yang Disusun												ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	prasarana infrastruk tur dasar.				
3 .	**1.03. 03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persenta se pendudu k berakses air minum layak**				**84.8 %**	**84 .8 %**	**38,439,164,380. 00**	**39,121,181,99 6.00**	**39,901,079,370. 00**	**-17,339,164,380.00**							**21,100,000, 000.00**	
	1.03.0 3.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sambung an rumah untuk rumah tangga*				0 SR	50 SR	38,439,164,380.0 0	39,121,181,99 6.00	39,901,079,370.0 0	1,461,914,990.00			-	Peningkat an infrastruk tur perkotaan dan pemantap an prasarana infrastruk tur dasar. Peningkat an infrastruk tur perkotaan dan pemantap an prasarana infrastruk tur dasar.	Masya rakat yang belum terlay ani SR air minu m		21,100,000, 000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.0 3.2.01 .0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan , Strategi dan Teknis Sistem Penyedia an Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	4 Do ku me n	111,818,000.00	814,220,000.0 0	800,220,000.00	688,402,000.00	Kota Bont ang, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkat an infrastruk tur perkotaan dan pemantap an prasarana infrastruk tur dasar. Peningkat an infrastruk tur perkotaan dan pemantap an prasarana infrastruk tur dasar.			600,000,000 .00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.0 3.2.01 .0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	

			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				25 Liter/Detik	50 Liter/Detik	29,986,260,000.00	28,795,640,996.00	29,628,730,370.00	-357,529,630.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			15,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	267,506,380.00	233,601,000.00	204,909,000.00	-62,597,380.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				25 SR	50 SR	8,073,580,000.00	9,277,720,000.00	9,267,220,000.00	1,193,640,000.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			5,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase pengembangan sistem dan**				**-**	**31 %**	**4,964,115,085.00**	**3,244,784,000.00**	**3,237,784,000.00**	**-964,115,085.00**							**4,000,000,000.00**	

			pengelolaan persampahan																
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS*			31 %	31 %	4,964,115,085.00	3,244,784,000.00	3,237,784,000.00	-1,726,331,085.00			-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	TPA/TPST/TPS-3R/TPS kewenangan Kabupaten/Kota		4,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun			5 Ton/hari	5 Ton/hari	2,943,020,000.00	2,401,083,000.00	2,401,083,000.00	-541,937,000.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			2,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan			5 Ton/hari	5 Ton/hari	1,323,496,085.00	0.00	0.00	-1,323,496,085.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			1,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																	

			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	3 Dokumen	697,599,000.00	843,701,000.00	836,701,000.00	139,102,000.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			1,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**				**-**	**97 %**	**8,594,043,599.00**	**6,793,972,565.00**	**6,601,663,469.00**	**-2,094,043,599.00**							**6,500,000,000.00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penduduk berakses air limbah domestik*				97 %	200 jiwa	8,594,043,599.00	6,793,972,565.00	6,601,663,469.00	-1,992,380,130.00			-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat yang belum terlayani pengelolaan air limbah		6,500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi				1 Unit	3 Unit	2,940,228,000.00	3,887,970,000.00	3,873,970,000.00	933,742,000.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			2,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																	
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				291 Rumah Tangga	291 Rumah Tangga	206,736,884.00	85,254,386.00	85,254,386.00	-121,482,498.00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				6 Unit	6 Unit	2,554,588,716.00	1,466,261,179.00	1,301,952,083.00	-1,252,636,633.00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			2,500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																	

			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				25 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	2,806,049,999.00	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	-1,644,549,999.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			1,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	3 Dokumen	86,440,000.00	192,987,000.00	178,987,000.00	92,547,000.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik**				**93.52 %**	**93.52 %**	**48,440,000,000.00**	**272,736,740,910.00**	**282,305,548,809.00**	**70,560,000,000.00**							**119,000,000,000.00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara*				1266 meter	1266 meter	48,440,000,000.00	272,736,740,910.00	282,305,548,809.00	233,865,548,809.00			-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat terdampak banjir		119,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		

			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				80 Sistem Drainase Perkotaan	3000 Sistem Drainase Perkotaan	6,209,845,000.00	181,051,144,361.00	181,218,446,361.00	175,008,601,361.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			8,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	345,670,000.00	709,450,000.00	695,450,000.00	349,780,000.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			1,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		

			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				80 Sistem Drainase Perkotaan	1750 Sistem Drainase Perkotaan	39,977,010,000.00	79,489,472,000.00	88,717,148,609.00	48,740,138,609.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			100,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				15 Dokumen	50 Dokumen	1,907,475,000.00	11,486,674,549.00	11,674,503,839.00	9,767,028,839.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			10,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis**				**-**	**63.51%**	**72,367,668,937.00**	**27,145,900,694.00**	**35,622,494,254.00**	**-68,417,668,937.00**								**3,950,000,000.00**	

	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah bangunan yang diberikanIMB/PBG dan sertifikat laik fungsi (SLF) Jumlah penyelenggaraan gedung negara*				77.05 %	15 Unit 45 unit	72,367,668,937.00	27,145,900,694.00	35,622,494,254.00	-36,745,174,683.00			-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah		3,950,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				2 Bangunan Gedung	5 Bangunan Gedung	570,769,900.00	7,270,022,800.00	8,528,896,699.00	7,958,126,799.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			1,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				4 Bangunan Gedung	7 Bangunan Gedung	4,956,055,024.00	1,352,818,663.00	2,391,461,765.00	-2,564,593,259.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			1,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	16 Dokumen	66,140,843,575.00	17,423,059,396.00	23,853,030,395.00	-42,287,813,180.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			1,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraanny a				75 Orang	75 Orang	62,465,006.00	62,449,006.00	44,192,286.00	-18,272,720.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			150,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim				50 Dokumen	50 Dokumen	637,535,432.00	1,037,550,829.00	804,913,109.00	167,377,677.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			800,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

			Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase sempadan sungai yang tertata**				**18.46 %**	**18.46 %**	**256,201,800.00**	**499,937,000.00**	**496,437,000.00**	**343,798,200.00**							**600,000,000.00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang sempadan sungai yang tertata*				50 meter	50 meter	256,201,800.00	499,937,000.00	496,437,000.00	240,235,200.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Masyarakat di Sempadan Sungai		600,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	28,180,000.00	47,724,000.00	44,224,000.00	16,044,000.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

														peran aktif koperasi.					
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																	
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	1 Kawasan	228,021,800.00	452,213,000.00	452,213,000.00	224,191,200.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan dalam kondisi mantap**				-	**86.44%**	**50,534,037,625.00**	**115,390,625,709.00**	**165,844,486,534.00**	**88,115,962,375.00**							**138,650,000,000.00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik*				90,03 % 92,83 %	52.07%	50,534,037,625.00	115,390,625,709.00	165,844,486,534.00	115,310,448,909.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	- -	Masyarakat Pengguna Jalan		138,650,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

															peran aktif koperasi.				
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				2 Dokumen	8 Dokumen	296,741,000.00	1,835,374,000.00	2,307,374,000.00	2,010,633,000.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																	
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				4.3 KM	9.2415 KM	1,560,489,000.00	4,709,053,000.00	6,396,530,000.00	4,836,041,000.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			1,700,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																	
			Panjang Jalan yang Dibangun				0.1 KM	2 KM	20,603,012,422.00	44,071,365,828.00	44,432,365,828.00	23,829,353,406.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			100,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				0.3 KM	1.010 KM	17,255,351,739.00	30,716,970,156.00	71,140,219,156.00	53,884,867,417.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SAWIT PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			20,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																	

			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1.8 KM	0 KM	227,999,316.00	364,500,000.00	336,500,000.00	108,500,684.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																	
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				0.7 KM	76,517 KM	200,017,808.00	383,498,964.00	245,881,822.00	45,864,014.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			250,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																	
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				1 Jembatan	0 Jembatan	227,999,316.00	0.00	0.00	-227,999,316.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengemba	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan			550,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

														ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	prasarana infrastruk tur dasar.				
	1.03.1 0.2.01 .0040	Pembangunan Jembatan																	
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	0 Je m ba ta n	6,391,654,000.00	0.00	2,817,616,000.00	-3,574,038,000.00	Kota Bont ang, Bont ang Utar a, Gun tung	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n pengemban gan infrastrukt ur dan meningkatk an lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengemba ngkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkat an infrastruk tur perkotaan dan pemantap an prasarana infrastruk tur dasar. Peningkat an infrastruk tur perkotaan dan pemantap an prasarana infrastruk tur dasar.			10,000,000, 000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.1 0.2.01 .0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan																	
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				1 Jembatan	1 Je m ba ta n	227,999,316.00	226,000,682.0 0	212,000,682.00	-15,998,634.00	Kota Bont ang, Sem ua Kec amat an, Sem ua Kel/ Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) OPSE N PKB	Melanjutka n pengemban gan infrastrukt ur dan meningkatk an lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengemba ngkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkat an infrastruk tur perkotaan dan pemantap an prasarana infrastruk tur dasar. Peningkat an infrastruk tur perkotaan dan pemantap an prasarana infrastruk tur dasar.			550,000,000 .00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			350 KM	76,517 KM	550,089,008.00	511,484,008.00	470,265,192.00	-79,823,816.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			600,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi			1.8 KM	5.84 KM	1,000,033,980.00	25,645,294,310.00	30,574,797,866.00	29,574,763,886.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			1,500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																	

			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0.7 KM	0.390 KM	1,992,650,720.00	6,927,084,761.00	6,910,935,988.00	4,918,285,268.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			2,500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat**				**-**	**84.57%**	**771,270,000.00**	**2,771,269,958.00**	**1,533,236,428.00**	**838,730,000.00**							**1,610,000,000.00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Data Tenaga Kerja Yang Bersertifikat*				1719 tenaga kerja	163 tenaga kerja	248,777,500.00	248,777,460.00	99,413,340.00	-149,364,160.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pekerja Konstruksi		560,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		

			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				50 Orang	50 Orang	198,777,500.00	198,777,460.00	99,413,340.00	-99,364,160.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			360,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				10 Orang	10 Orang	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Badan Usaha Yang Berizin*				250 Badan Usaha	250 Badan Usaha	120,000,000.00	119,969,240.00	64,059,271.00	-55,940,729.00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat Jasa Konstruksi		300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

															(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00	9,969,520.00	5,395,616.00	-4,604,384.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI																	
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Orang	6 Orang	100,000,000.00	100,000,000.00	51,877,720.00	-48,122,280.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

														g disabilitas.					
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																	
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan			5 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	10,000,000.00	9,999,720.00	6,785,935.00	-3,214,065.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase badan usaha jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan*			100 %	100 %	402,492,500.00	2,402,523,258.00	1,369,763,817.00	967,271,317.00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Masyarakat Jasa Konstruksi		750,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																	

			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				250 Lembaga	250 Lembaga	352,435,004.00	2,352,296,734.00	1,339,094,924.00	986,659,920.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				250 Badan Usaha	250 Badan Usaha	30,057,496.00	30,041,004.00	19,645,753.00	-10,411,743.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun				4 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000.00	20,185,520.00	11,023,140.00	-8,976,860.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kesesuaian tata ruang**				**89.6 %**	**89.6 %**	**1,575,000,000.00**	**1,574,999,922.00**	**1,224,300,776.00**	**105,000,000.00**							**1,680,000,000.00**	

	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	149,899,198.00	0.00	0.00	-149,899,198.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah DPUPR		300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																	
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	99,898,998.00	0.00	0.00	-99,898,998.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			150,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota																	
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,200.00	0.00	0.00	-50,000,200.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengemba	- -			150,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

													DANA BAGI HASIL (DBH)	ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW*				1 Dokumen	1 Dokumen	930,107,665.00	1,081,096,061.00	868,605,411.00	-61,502,254.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah DPUPR		400,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar																	
			Jumlah data SHP Peta Dasar				1 Peta	1 Peta	129,988,280.00	0.00	0.00	-129,988,280.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																	

			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				50 Orang	50 Orang	50,001,220.00	50,487,895.00	25,882,000.00	-24,119,220.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																	
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	691,228,012.00	971,922,425.00	806,147,423.00	114,919,411.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			150,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																	
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	1 Kegiatan	58,890,153.00	58,685,741.00	36,575,988.00	-22,314,165.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengemba	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan			100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

														DANA BAGI HASIL (DBH)	ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	prasarana infrastruk tur dasar.				
	1.03.1 2.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomen dasi Kesesuaia n Kegiatan Pemanfaa tan Ruang (PKKPR) yang diterbitka n*				100 PKKPR	10 0 PK KP R	284,963,410.00	284,184,995.0 0	193,456,803.00	-91,506,607.00			-	Peningkat an infrastruk tur perkotaan dan pemantap an prasarana infrastruk tur dasar. Peningkat an infrastruk tur perkotaan dan pemantap an prasarana infrastruk tur dasar.	Peran gkat Daera h DPUP R		480,000,000 .00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.1 2.2.03 .0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																	
			Jumlah layanan Persetuju an KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				100 Layanan	10 0 La ya na n	179,998,773.00	179,904,058.0 0	103,464,803.00	-76,533,970.00	Kota Bont ang, Sem ua Kec ama tan, Sem ua Kel/ Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) SISA LEBIH PERHI TUNG AN ANGG ARAN TAHU N SEBE LUMN YA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkat an infrastruk tur perkotaan dan pemantap an prasarana infrastruk tur dasar. Peningkat an infrastruk tur perkotaan dan pemantap an prasarana infrastruk tur dasar.			180,000,000 .00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.1 2.2.03 .0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																	

			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	104,964,637.00	104,280,937.00	89,992,000.00	-14,972,637.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rekomendasi atau pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang*				5 Rekomedasi	5 Rekomedasi	210,029,727.00	209,718,866.00	162,238,562.00	-47,791,165.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Perangkat Daerah DPUPR		500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang																	
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang				5 Kasus	5 Kasus	49,913,543.00	49,885,802.00	33,888,502.00	-16,025,041.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																	
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	30,067,780.00	30,034,682.00	24,385,180.00	-5,682,600.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	100,007,604.00	100,000,331.00	82,054,080.00	-17,953,524.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan																	

			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan			1 Dokumen	1 Dokumen	30,040,800.00	29,798,051.00	21,910,800.00	-8,130,000.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
	J U M L A H							**512,835,648,418.00**	**699,386,370,293.00**	**831,712,725,868.00**	**725,459,976,351.26**							**564,326,776,537.00**	

IV. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang telah memasuki triwulan II tahun 2025, realisasi hasil perencanaan baik fisik maupun keuangan sudah dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan sehubungan dengan pencapaian target dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.

Perubahan dan penyesuaian terhadap perencanaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan hingga akhir tahun tidak mengalami kendala yang belum diperkirakan saat penyusunan anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 perubahan Renja ini adalah perubahan terhadap Perangkat Daerah yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja tahun 2025 juga diperlukan untuk menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran Renstra dan RPJMD, khususnya terhadap sasaran dan indikator yang harus dicapai pada tahun 2025. Disamping itu perubahan Renja ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah Tentang rencana Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2025

Maksud dari Perubahan Renja tahun 2025 adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanaan 2025 dengan penyusunan penganggaran tahun 2025 dan menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran Renstra, serta dalam rangka menjamin sinergis pelaksanaan program dan kegiatan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan :
1. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini
2. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025
3. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang.
4. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, terget, lokasi dan pagu kegiatan
5. Menyediakan acuan penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2025.
6. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TRIWULAN II TAHUN 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian, dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam hal pelaksanaan Renja tahun 2025, hasil evaluasi hingga triwulan II merupakan salah satu input penting yang menjadi dasar dan pertimbangan perlunya penyesuaian atau perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi terhadap hasil rencana kerja juga bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian antara capaian kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025

Pada tahun 2025 terdapat 10 (sepuluh) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 42 (empat puluh satu) sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang. Secara keseluruhan capaian fisik program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang sampai dengan Juni 2025 mencapai 30,16% dengan realisasi keuangan 14,29%.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025 Triwulan II

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025 (Efisiensi/Pergeseran)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	
									I		II			
		5		6		7	7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11	
		K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**PERSENTASE PENANGANAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**100%**	**3.748.851.257**	**100%**	**1.491.822.877**	**999.338.730**	**100%**	**641.277.730**	**100%**	**494.031.112**	**100%**	**9.744.600**	**100%**	**503.775.712**
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan	57 dokumen	3.748.851.257	31 dokumen	1.491.822.877	999.338.730	8 dokumen	641.277.730	3 dokumen	494.031.112	2 dokumen	9.744.600	**5 dokumen**	503.775.712
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	57 dokumen	2.172.168.517	31 dokumen	754.989.481	177.704.000	8 dokumen	48.775.000	3 dokumen	12.056.400	2 dokumen	9.744.600	5 dokumen	21.801.000
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	57 berita acara	1.576.682.740	31 berita acara	736.833.396	821.634.730	8 berita acara	592.502.730	3 berita acara	481.974.712	2 berita acara	-	5 berita acara	481.974.712
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana**	**43%**	**26.302.678.796**	**100%**	**26.787.207.002**	**7.969.332.777**	**34%**	**7.751.395.533**	-	**606.688.850**	-	**1.213.513.486**	-	**1.820.202.336**
	Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	**57,5%**		**100%**			**45,50%**		-		-		-	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Jumlah dan jenis data rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi rumah program pemerintah	22 dokumen	2.209.734.100	4 dokumen	615.112.050	668.681.000	5 dokumen	668.681.000	-	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025 (Efisiensi/Pergeseran)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	
									I		II			
		5		6		7	7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11	
		K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Kabupaten/Kota														
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	6 dokumen	608.967.050	1 dokumen	106.014.050	133.736.200	1 dokumen	133.736.200	-	-	-	-		-
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-		-	133.736.200	1 dokumen	133.736.200	-	-	-	-		-
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabuoaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	5 dokumen	500.000.000	1 dokumen	152.008.000	133.736.200	1 dokumen	133.736.200	-	-	-	-		-
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	133.736.200	1 dokumen	133.736.200	-	-	-	-		-
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-	-	-	-	133.736.200	1 dokumen	133.736.200	-	-	-	-		-
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah unit rumah rehabilitasi korban bencana atau relokasi program pemerintah yang dibangun	10 unit rumah	5.947.807.680	6 unit rumah	712.985.000	1.082.608.766	13 unit rumah	1.069.208.766	-	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025 (Efisiensi/Pergeseran)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	
									I		II			
		5		6		7	7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11	
		K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kabupaten/Kota														
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 unit rumah	1.750.000.000	1 unit rumah	38.935.000	299.165.750	10 unit rumah	299.165.750	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	-	-	-	-	22.470.000	1 rumah tangga	15.770.000	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	-	-	-	-	22.470.000	1 rumah tangga	15.770.000	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun	-	-	-	-	738.503.016	3 unit rumah	738.503.016	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah RT, KK & jiwa penghuni rumah susun umum & rumah khusus yg dibina	406 KK	18.145.137.016	298 KK	25.459.109.952	6.218.043.011	406 KK	6.013.505.767	289 KK	606.688.850	298 KK	1.213.513.486	298 KK	1.820.202.336
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	24 laporan	14.474.165.203	16 laporan	19.587.752.032	5.752.540.736	4 laporan	5.617.249.876	4 laporan	600.988.850	4 laporan	978.840.986	4 laporan	1.579.829.836

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025 (Efisiensi/Pergeseran)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	
									I		II			
		5		6		7	7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11	
		K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	24 dokumen	3.670.971.813	16 dokumen	5.871.357.920	465.502.275	4 dokumen	396.255.891	4 dokumen	5.700.000	4 dokumen	234.672.500	4 dokumen	240.372.500
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani**	**100%**	**36.502.205.591**	**100%**	**34.638.039.535**	**10.374.590.484**	**100%**	**8.944.999.224**	**-**	**149.943.200**	**-**	**142.282.000**	**-**	292.225.200
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi izin pembangunan & pengembangan kawasan permukiman yg diterbitkan	5 dokumen	600.000.000	5 dokumen	1.054.769.739	160.897.000	1 dokumen	98.898.500	-	36.279.000	-	-	-	36.279.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 laporan	600.000.000	5 laporan	1.054.769.739	160.897.000	1 dokumen	98.898.500	-	36.279.000	-	-	-	36.279.000
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	11 dokumen	1.724.195.890	6 dokumen	2.716.048.676	2.775.414.500	2 dokumen	1.461.555.740	-	-	-	-	-	-
Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 dokumen	200.000.000	2 dokumen	1.417.228.153	996.073.000	1 dokumen	688.488.240	-	-	-	-		-
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 dokumen	724.195.890	2 dokumen	937.414.800	1.779.341.500	1 dokumen	773.067.500	-	-	-	-		-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025 (Efisiensi/Pergeseran)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	
									I		II			
		5		6		7	7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11	
		K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	7,41 Ha	34.178.009.701	7,41 Ha	30.867.221.120	7.438.278.984	7,41 Ha	7.384.544.984	-	113.664.200	-	142.282.000	-	255.946.200
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	280 unit rumah	6.400.000.000	314 unit rumah	14.406.151.150	1.339.259.000	35 unit rumah	1.339.259.000	-	95.300.000	-	95.300.000	-	190.600.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	5 laporan	600.000.000	3 laporan	290.955.674	112.760.000	1 laporan	59.026.000	-	18.364.200	-	8.116.900	-	26.481.100
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	7,41 Ha	20.550.954.000	7,41 Ha	10.077.627.323	5.986.259.984	7,41 Ha	5.986.259.984	-	-	-	38.865.100	-	38.865.100
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh**	**0%**	**7.339.256.841**	**0,37%**	**3.211.606.880**	**2.418.229.500**	**0,20%**	**2.418.229.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	190 unit rumah	7.339.256.841	88 unit rumah	3.211.606.880	2.418.229.500	114 unit rumah	2.418.229.500	-	-	-	-	-	-
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar	Jumlah rumah tidak layak huni untuk kan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar	190 unit rumah	7.339.256.841	88 unit rumah	3.211.606.880	2.418.229.500	114 unit rumah	2.418.229.500	-	-	-	-		-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025 (Efisiensi/Pergeseran)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	
									I		II			
		5		6		7	7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11	
		K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yg diperbaiki													
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik**	**99%**	**104.252.628.320**	**96,60%**	**164.992.263.330**	**35.887.762.619**	**98%**	**37.465.530.833**	**96,60%**	**157.328.375**	**96,60%**	**745.156.701**	**96,60%**	**902.485.076**
	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	**97%**		**95,02%**			**96%**		**95,02%**		**95,02%**		**95,02%**	
	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana TPU	**78%**		**60,90%**			**72%**		**60,90%**		**60,90%**		**60,90%**	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang jalan yang dibangun/direbah	12.000 m	104.252.628.320	24.392 m	164.992.263.330	35.887.762.619	2.000 m	37.465.530.833	-	157.328.375		745.156.701	-	902.485.076
	Panjang drainase yang dibangun/direhab	6.000 m		17.442 m			1.000 m		-				-	
	Jumlah sarana dan prasarana TPU	39 jenis		31			36 jenis		-				-	
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan yang di susun	15 dokumen	8.000.000.000	15 dokumen	4.063.152.000	1.000.000.000	15 dokumen	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	15 lokasi	95.002.628.320	15 lokasi	160.597.133.936	34.421.048.619	15 lokasi	36.249.195.833	-	157.328.375	14	683.098.294	-	840.426.669

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025 (Efisiensi/Pergeseran)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	
									I		II			
		5		6		7	7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11	
		K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 laporan	1.250.000.000	1 laporan	331.977.394	466.714.000	1 laporan	216.335.000	-	-	-	62.058.407	-	62.058.407
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**77.206.105.768**	**100%**	**54.044.760.216**	**19.775.871.857**	**100%**	**18.990.355.256**	**100%**	**4.444.418.727**	**100%**	**3.913.088.810**	**100%**	8.357.507.537
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	468.017.373	100%	131.594.400	283.997.535	100%	146.185.428	25%	-	50%	-	50%	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yg disusun	18 dokumen	335.770.368	9 dokumen	59.396.700	218.230.775	3 dokumen	110.564.620	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 laporan	132.247.005	4 laporan	72.197.700	65.766.760	1 dokumen	35.620.808	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100%	50.987.161.094	100%	30.371.613.012	12.422.174.856	100%	12.421.900.952	100%	2.687.859.898	100%	3.007.205.668	100%	5.695.065.566
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	47 orang	50.978.161.322	47 orang	30.365.894.837	12.420.805.336	47 orang	12.420.805.336	51 orang	2.687.859.898	51 orang	3.007.205.668	51 orang	5.695.065.566

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025 (Efisiensi/Pergeseran)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	
									I		II			
		5		6		7	7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11	
		K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	6 laporan	4.499.802	4 laporan	3.430.000	684.760	1 laporan	547.808	-	-	1 laporan	-	1 laporan	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yg disusun	6 dokumen	4.499.970	4 dokumen	2.288.175	684.760	1 dokumen	547.808	-	-	1 laporan	-	1 laporan	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100%	2.396.840.000	100%	4.162.054.577	273.680.000	100%	153.680.000	100%	124.750.000	100%	26.600.000	100%	151.350.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	12 paket	1.491.840.000	15 paket	1.570.045.525	28.680.000	1 paket	28.680.000	1 paket	-	-	26.600.000	-	26.600.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	200 orang	905.000.000	438 orang	2.592.009.052	245.000.000	25 orang	125.000.000	25 orang	124.750.000	-	-	-	124.750.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100%	10.165.716.471	100%	10.837.241.181	1.647.587.642	100%	1.120.157.052	100%	219.534.312	100%	271.211.001	100%	490.745.313
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 paket	3.582.115.898	47 paket	5.576.792.298	461.708.699	4 paket	425.512.346	-	-	2 paket	106.440.283	2 paket	106.440.283
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	1.323.246.837	13 paket	632.447.000	131.778.908	3 paket	131.778.908	3 paket	-	3 paket	115.937.200	3 paket	115.937.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	379.990.736	10 paket	412.635.436	66.460.035	2 paket	47.175.798	-	-		-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	510 laporan	4.697.099.000	855 laporan	4.196.316.447	987.640.000	166 laporan	515.690.000	62 laporan	219.534.312		48.833.518	62 laporan	268.367.830

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025 (Efisiensi/Pergeseran)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	
									I		II			
		5		6		7	7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11	
		K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100%	6.589.446.680	100%	4.178.586.468	4.030.222.820	100%	4.030.222.820	100%	1.091.828.701	100%	589.132.950	-	1.680.961.651
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	60.000.000	8 laporan	43.000.000	19.020.000	1 laporan	19.020.000	1 laporan	19.020.000	-	-	1 laporan	19.020.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	6.349.446.680	48 laporan	4.116.599.468	4.011.202.820	12 laporan	4.011.202.820	3 laporan	1.072.808.701	3 laporan	589.132.950	3 laporan	1.661.941.651
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	6.598.924.150	100%	3.707.013.578	1.118.209.004	100%	1.118.209.004	100%	320.445.816		18.939.191	100%	339.385.007
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	231 unit	4.907.676.400	176 unit	2.828.483.174	747.099.004	55 unit	747.099.004	55 unit	239.325.816		18.939.191	55 unit	258.265.007
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	96 unit	941.247.750	72 unit	625.596.550	371.110.000	211 unit	371.110.000	26 unit	81.120.000		-	23 unit	81.120.000
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**Persentase Tanah Kosong yang Dimanfaatkan**	**70%**	**295.000.000**	**52,50%**	**474.945.551**	**528.399.469**	**60%**	**463.227.469**	**50,20%**	**28.070.663**	**50,20%**	**14.568.615**	**50,20%**	42.639.278
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	100%	295.000.000	100%	474.945.551	528.399.469	100%	463.227.469	-	28.070.663	-	14.568.615	-	42.639.278
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dalam rangka penyelesaian tanah kosong	4 laporan	295.000.000	2 laporan	474.945.551	528.399.469	1 laporan	463.227.469	-	28.070.663	-	14.568.615	-	42.639.278

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025 (Efisiensi/Pergeseran)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	
									I		II			
		5		6		7	7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11	
		K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah**	**100%**	**3.669.984.999**	**100%**	**2.845.370.832**	**123.556.000**	**100%**	**102.663.000**	-	**14.626.225**	-	**1.772.400**	-	16.398.625
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen	3.669.984.999	4 dokumen	2.845.370.832	123.556.000	1 dokumen	102.663.000	-	14.626.225	-	1.772.400	-	16.398.625
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen	3.669.984.999	4 dokumen	2.845.370.832	123.556.000	1 dokumen	102.663.000	-	14.626.225	-	1.772.400	-	16.398.625
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	**Persentase penyediaan tanah untuk masyarakat**	**100%**	**526.593.881**	**100%**	**238.053.922**	**35.392.000**	**100%**	**18.760.000**	-	-	-	-	-	-
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah fasilitasi penerbitan izin membuka tanah	3 lokasi	526.593.881	3 lokasi	238.053.922	35.392.000	3 lokasi	18.760.000	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	5 dokumen	526.593.881	3 dokumen	238.053.922	35.392.000	1 dokumen	18.760.000	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Persentase penyediaan tanah untuk fasilitas publik**	**60%**	**306.593.881**	**33,33%**	**705.388.062**	**402.502.356**	**46,67%**	**261.002.156**	**33,33%**	**12.628.000**	**33,33%**	**23.224.250**	**33,33%**	35.852.250

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Tahun 2025 (Efisiensi/Pergeseran)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	
									I		II			
		5		6		7	7		8		9		12 = 8 + 9 + 10 + 11	
		K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Peta Zona Nilai Tanah	5 dokumen	306.593.881	4 dokumen	705.388.062	402.502.356	1 dokumen	261.002.156	-	12.628.000	-	23.224.250	-	35.852.250
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah sebagai dasar pelayanan informasi nilai tanah dan pelayanan pertanahan lainnya	5 dokumen	306.593.881	4 dokumen	705.388.062	402.502.356	1 dokumen	261.002.156	-	12.628.000	-	23.224.250	-	35.852.250
Rata-rata capaian kinerja (%)								77.057.440.701	10,72	5.907.735.152	19,66	6.063.350.862	30,38	11.971.086.014

Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja dalam Renstra periode sebelumnya. Selain itu, kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat sejauh mana serapan anggarannya seperti yang telah tertuang dalam tabel evaluasi Renja sebelumnya. Berikut rincian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sampai tahun 2026 :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bontang

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Renstra					Realisasi Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya layanan mediasi penanganan sengketa tanah garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	100	100	100	100	-	100	100	100	-	-
2	Menurunnya backlog hunian	Persentase backlog hunian	30,62	30,17	18,5	16	-	16	18,63	16,99	-	-
3	Menurunhnya luas kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang di tangani	26,99	40,49	72,06	97,3	-	25,24	56,82	100	-	-
4	Meningkatnya kualitas jalan lingkungan	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	92,38	92,8	94,89	98	-	92,47	94,76	96,60	-	-
5	Meningkatnya kualitas drainase lingkungan	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	92,14	92,86	93,63	96	-	91,83	93,48	95,02	-	-
6	Meningkatnya pemanfaatan tanah untuk pembangunan	Persentase tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan	10	10	28	60	-	22,50	24,70	52,50	-	-
7	Meningkatnya Pemanfaatan tanah kosong untuk RTH	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan menjadi RTH	-	-	10	55	-	45	45	50,20		

- **Inovasi/Rencana Aksi Perubahan**

Dalam pencapaian target indikator kinerja dan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menghadirkan beberapa inovasi pelayanan, dimana diharapkan dengan adanya inovasi tersebut capaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dan menjadi lebih baik.

Beberapa inovasi pelayanan yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain :

1. **Aparus** (Aplikasi Pembayaran, dan Aduan Rusunawa)
   Aparus adalah aplikasi bagi penghuni rusunawa yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi penghuni rusunawa dalam melakukan pembayaran uang sewa bulanan dan aduan terkait rusunawa kepada pihak pengelola melalui aplikasi yang bisa d akses oleh penghuni melalui media elektronik atau handphone. Aplikasi ini diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif bagi para penghuni Rusunawa. Aplikasi ini juga mempermudah admin dalam menginput dan menyajikan data informasi penghuni rusunawa, dan memudahkan instansi terkait dalam klarifikasi data penghuni rusun.
2. **Sipaman** (Sistem Informasi Pemakaman)
   Website ini di bangun untuk membantu pengelolaan data pemakaman berbasis website. Melalui sistem ini masyarakat akan lebih cepat dan mudah mengakses informasi terkait lokasi jenazah dimakamkan, pengajuan secata online, biodata petugas pemakaman, formulir permohonan, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku di pemakaman. Manfaat dari SiPaman antara lain, dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait lokasi pemakaman jenazah, mempermudah admin dalam menginput dan menyajikan data informasi pemakaman, dan memudahkan instansi terkait dalam klarifikasi data pemakaman.

- **Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Tahun Sebelumnya**

Pada tahun 2024 ada beberapa rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang dan, berikut matriks tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya :

NO	REKOMENDASI TAHUN 2024	TINDAK LANJUT TAHUN 2025
Sasaran : Meningkatnya layanan mediasi sengketa tanah garapan		
1	Melakukan Inventarisasi Sengketa/konflik tidak hanya berdasarkan aduan/laporan yang masuk tapi juga hasil pengukuran/pemetaan lahan	Penyelesaian masalah yaitu dengan lebih melibatkan peran perangkat daerah yang terkait serta mengajak masyarakat untuk dapat bekerjasama dalam memberikan informasi dan data khususnya pemilik tanah dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang
Sasaran: Menurunnya backlog hunian		
2	memberikan bantuan pembangunan PSU Perumahan	Peningkatan Jalan Perumahan Perbaikan Drainase, dan Pemeliharaan PSU Perumahan
Sasaran : Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh		
3	Melakukan Kolaborasi Pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota sesuai dengan kewenangannya	Penanganan kawasan kumuh dilakukan dengan anggaran APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota sesuai dengan kewenangannya

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pada dasarnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang merupakan implementasi dari Tupoksi dan kewenangan yang ada dengan mensinergikan pada Kebijakan Pembangunan Kota Bontang melalui capaian Visi dan Misi. Semua tujuan dan sasaran serta indikator kinerja program dan kegiatan diarahkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan masyarakat Kota Bontang secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang saja, tetapi perlu dukungan SKPD lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa tantangan dan peluang pengembangan dalam upaya peningkatan kinerja layanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai SKPD yang baru mempunyai peluang yang sangat besar untuk melakukan pengembangan pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Namun secara bersamaan banyak pula tantangan yang dihadapai untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal.

Berdasarkan Hasil Analisis atas Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bontang serta identifikasi internal, diidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan pelayanan SKPD sebagai berikut.

- Tantangan-tantangan :

1. Penataan kawasan permukiman belum optimal ditandai dengan masih adanya perumahan kumuh dan permukiman kumuh seluas 32,89 Ha, sedangkan untuk kawasan kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha masih tersisa 3,2 Ha.
2. Masih adanya backlog hunian sebanyak 9.569 unit rumah.
3. Belum semua penduduk mempunyai akses hunian yang layak dimana masih terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 406 unit rumah.
4. Belum tercapainya target pemenuhan kamar Rusunawa, dimana dari total 406 kamar yang ada di Rusunawa Api-Api, Loktuan, Guntung dan Rumah Khusus Nelayan, masih ada 89 kamar yang masih kosong atau belum berpenghuni.
5. Urbanisasi yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan tekanan terhadap pemenuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, limbah, dan permukiman kumuh)
6. Kecenderungan peningkatan kebutuhan penyediaan rumah layak huni di perkotaan yang semakin tinggi seiring semakin dominannya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan
7. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai
8. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan rumah sewa untuk kelompok MBR
9. Minimnya alokasi APBD untuk perumahan.
10. Komponen-komponen permukiman layak huni yang belum terpenuhi diantaranya adalah akses terhadap perumahan, sanitasi, jalan lingkungan dan PSU permukiman lainnya.
11. Masih terdapat permukiman kumuh dan masih terjadi banjir
12. Belum tersusunnya data base terkait pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman didalam akses website Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan pertanahan Kota Bontang

- Peluang-peluang ;

1. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan.
2. Adanya prioritas nasional dalam mengurangi kawasan kumuh menjadi nol persen yaitu : zero backlog rumah bagi MBR 3 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 4,88 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 1220 Triliun melalui 20-30% APBN/APBD dan 70-80% swasta/masyarakat.
3. Pemerintah memfasilitasi atau mendorong agar setiap keluarga khususnya yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menghuni rumah yang layak, baik dengan sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri maupun tinggal dirumah milik kerabat / keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya.
4. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni merupakan upaya pencapaian SDG's (Suistainable Development Goal's) yang ke-13 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan.
5. Program rumah sehat dan layak huni bagi penduduk miskin
6. Adanya kebijakan kepala daerah untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memberi pelatihan serta sertifikasi untuk tenaga ahli.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terealisasinya tujuan dan sasaran kegiatan yang dilaksanakan. Dinamika masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan lingkungan kerja yang ada menuntut percepatan dalam penyelesaian masalah yang cepat. Apabila faktor pengaruh dan permasalahan, baik internal maupun eksternal tidak teratasi akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan.

Beberapa permasalahan utama yang hadapi pada tahun 2024, antara lain:

1. Masih adanya backlog hunian sebanyak 10.514 unit rumah.

2. Belum semua penduduk mempunyai akses hunian yang layak dimana masih terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 207 unit rumah.

3. Belum tercapainya target pemenuhan kamar Rusunawa, dimana dari total 406 kamar yang ada di Rusunawa Api-Api, Loktuan, Guntung dan Rumah Khusus Nelayan, masih ada 89 kamar yang masih kosong atau belum berpenghuni.

4. Dalam pelaksanaan penataan pemakaman karena kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

6. Proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian sengketa dan ganti kerugian/santunan tanah memerlukan waktu penyelesaian relatif lama, bahkan dapat melebihi 1 tahun anggaran tergantung pada dinamika kesepakatan para pihak.

7. Belum terlaksananya penatagunaan tanah berupa pola pengelolaan tata guna tanah dalam rangka pemnfaatan ruang berdasarkan RTRW Kota Bontang, terutama bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal mutlak dilakukan secara sismatis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan maka strategi pemecahan masalah yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatnya kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui kolaborasi pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota sesuai dengan kewenangannya, dan mencegah tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh baru.
2. Menyediakan hunian yang layak huni dan terjangkau dengan pembangunan Rusunawa maupun rumah khusus.
3. Perbaikan terhadap rumah tidak layak huni yang ada melalui pendanaan APBD Kota, APBD Provinsi, APBN maupun program Tanggung Jawab Sosial dan laingkungan (TJSL) perusahaan
4. Meningkatkan sumber daya manusia dari sisi kualitas dan kuantitas.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional

6. Akselerasi program prioritas Pemerintah Kota Bontang dengan Provinsi dan Pusat.

7. Komitmen Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup, melalui sektor perumahan, pemakaman dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan Perubahan Renja 2025 ini menghimpun usulan-usulan program kegiatan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan melihat kegiatan yang telah berjalan dan disinergikan dengan kebutuhan pada Masyarakat yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan pada perubahan Renja 2025 ini. Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang telah masuk dalam RKPD Perubahan 2025:

Rekapitulasi Anggaran Perubahan 2025

PAGU ANGGARAN MURNI 2025			**78.514.975.792**
EFISIENSI ANGGARAN			- 3.457.510.231
			75.057.465.561
Tambahan Anggaran Pergeseran			2.000.000.000
1	Biaya Konstruksi/Fisik	1.583.744.680	
2	Biaya Perencanaan Pekerjaan	223.152.500	
3	Biaya Pengawasan Pekerjaan	108.988.000	
4	Biaya Administrasi	84.114.820	
PAGU ANGGARAN PERGESERAN 2025			**77.057.440.701**
	Usulan RKPD Perubahan 2025		
1	Pemetaan Kawasan Kumuh	500.000.000	
2	Pembuatan Parit dan Semenisasi Jalan di RT 1 Kel Kanaan	200.000.000	
3	Pembuatan Parit dan Semenisasi Jalan di RT 8 Kel.Kanaan	200.000.000	
4	Perbaikan Turap Penahan Longsoran	250.000.000	
5	Pembangunan Turap dan Drainase belakang samping gereja RT.19 Kelurahan Bontang Lestari	200.000.000	
	Total usulan RKPD Perubahan 2025		1.350.000.000
	Pengurangan Gaji		- 1.081.943.536
	Usulan Anggaran Perubahan 2025		
1	Pengadaam Gorden di Rusunawa Loktuan	160.000.000	
2	Pengadaan CCTV di Rusunawa Loktuan	160.000.000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan	100.000.000	

	relokasi permukiman di bantaran sungai Guntung		
4	Penyelesaian serah terima HOP 7	300.000.000	
5	Rehabilitasi Jalan dan Drainase Jalan Sukun Raya RT 18 Kelurahan Gunung Elai	320.000.000	
6	Kanopi Parkir rusunawa api-api	160.000.000	
7	Plafon rusunawa guntung	160.000.000	
8	Pemeliharaan/Rehab Septic tank Blok A Rusunawa	120.000.000	
9	Penambahan untuk outsourcing tenaga keamanan dan kebersihan	200.000.000	
10	Pembangunan/peningkatan atap Rusunawa api2 Blok A + perencanaan dan pengawasan	200.000.000	
11	Kajian ganti rugi bangunan di areal pelabuhan loktuan	100.000.000	
12	Pembuatan/Penurapan Dinding Penahan Jl. Taman Siswa RT. 5 Kelurahan Kanaan	200.000.000	
13	Semenisasi Gg. Trafo RT. 49 Kelurahan Belimbing	230.000.000	
	Total Usulan Anggaran Perubahan 2025		2.410.000.000
PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025			**79.735.497.165**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk mewujudkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih tahun 2021-2026 **"KOTA BONTANG LEBIH HEBAT DAN BERADAB"** melalui misi 1 ***"Kota Bontang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan"*** serta misi 2 ***"Kota Bontang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup"***, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di setiap misinya.

Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kondusifitas pengelolaan pertanahan
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni
3. Meningkatkan ketersediaan tanah yang mendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
4. Meningkatnya ketersediaan lahan yang siap guna dalam mendukung investasi

Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya layanan mediasi penanganan sengketa tanah garapan
2. Menurunnya backlog hunian
3. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh
4. Meningkatnya kualitas jalan lingkungan
5. Menurunnya kualitas drainase lingkungan
6. Meningkatnya pemanfaatan tanah kosong untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)
7. Meningkatnya pemanfaatan tanah untuk pembangunan

Tabel 3.1
Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Target Kinerja 2025
1	Meningkatkan kondusifitas pengelolaan pertanahan	Meningkatnya layanan mediasi penanganan sengketa tanah garapan	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	%	100
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni	Menurunnya backlog hunian	Persentase backlog hunian	%	16
		Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	%	97,3
		Meningkatnya kualitas jalan lingkungan	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	98
		Meningkatnya kualitas drainase lingkungan	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	%	96
3	Meningkatkan ketersediaan tanah yang mendukung IKLH	Meningkatnya pemanfaatan tanah kosong untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan menjadi RTH	%	55
4	Meningkatkan ketersediaaan lahan yang siap guna dalam mendukung investasi	Meningkatnya pemanfaatan tanah untuk pembangunan	Persentase tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan	%	60

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2025, tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tabel Indikator Kinerja UTAMA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025

NO	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Hitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Layanan Mediasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah}} \times 100$	Bidang Pertanahan	DPKP2
2	Menurunnya BackLog Hunian	Persentase Backlog Hunian	$\frac{\text{Jumlah Backlog Hunian}}{\text{Jumlah Kebutuhan Rumah}} \times 100$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UPT Rusunawa	DPKP2
3	Menurunnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	$\frac{\text{Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani}}{\text{Luas Seluruh Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha}} \times 100$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPKP2
4	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jalan Lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{Total Panjang Jalan Lingkungan}} \times 100$	Bidang Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum	DPKP2
5	Meningkatnya Kualitas Drainase Lingkungan	Persentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Drainase Lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{Total Panjang Drainase Lingkungan}} \times 100$	Bidang Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum	DPKP2
6	Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Tanah Kosong yang dimanfaatkan menjadi RTH	$\frac{\text{Luas Tanah Kosong yang dimanfaatkan menjadi RTH}}{\text{Total Luas RTH}} \times 100$	Bidang Pertanahan	DPKP2
7	Meningkatnya Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan	$\frac{\text{Luas Tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan}}{\text{Total Luas Tanah yang ditetapkan untuk pembangunan}} \times 100$	Bidang Pertanahan	DPKP2

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berikut Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja		Anggaran	
			sebelum perubahan	setelah perubahan	sebelum perubahan	setelah perubahan
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana**	**34%**	**34%**	**7.751.395.533**	**8.911.564.089**
		Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	**45,50%**	**45,50%**		
1.04.02.201	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis data rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi rumah program pemerintah	5 dokumen	5 dokumen	668.681.000	668.681.000
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 dokumen	1 dokumen	133.736.200	133.736.200
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	133.736.200	133.736.200
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabuoaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	133.736.200	133.736.200
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	133.736.200	133.736.200

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja		Anggaran	
			sebelum perubahan	setelah perubahan	sebelum perubahan	setelah perubahan
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	133.736.200	133.736.200
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah rehabilitasi korban bencana atau relokasi program pemerintah yang dibangun	13 unit rumah	13 unit rumah	1.069.208.766	1.069.208.766
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 unit rumah	10 unit rumah	299.165.750	299.165.750
1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	1 rumah tangga	1 rumah tangga	15.770.000	15.770.000
1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	1 rumah tangga	1 rumah tangga	15.770.000	15.770.000
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun	3 unit rumah	3 unit rumah	738.503.016	738.503.016
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah RT, KK & jiwa penghuni rumah susun umum & rumah khusus yg dibina	406 KK		6.013.505.767	7.173.674.323
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	4 laporan	4 laporan	5.617.249.876	6.570.443.305
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	4 dokumen	4 dokumen	396.255.891	603.231.018

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja		Anggaran	
			sebelum perubahan	setelah perubahan	sebelum perubahan	setelah perubahan
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani**	**100%**	**100%**	**8.944.999.224**	**9.144.999.224**
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi izin pembangunan & pengembangan kawasan permukiman yg diterbitkan	1 dokumen	1 dokumen	98.898.500	98.898.500
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 dokumen	1 dokumen	98.898.500	98.898.500
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2 dokumen	2 dokumen	1.461.555.740	1.961.555.740
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	688.488.240	688.488.240
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 dokumen	1 dokumen	773.067.500	1.273.067.500
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	7,41 Ha	7,41 Ha	7.384.544.984	7.084.544.984
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	35 unit rumah	35 unit rumah	1.339.259.000	1.039.259.000
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	1 laporan	1 laporan	59.026.000	59.026.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja		Anggaran	
			sebelum perubahan	setelah perubahan	sebelum perubahan	setelah perubahan
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	7,41 Ha	7,41 Ha	5.986.259.984	5.986.259.984
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh**	**0,20%**	**0,20%**	**2.418.229.500**	**2.718.229.500**
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	114 unit rumah	114 unit rumah	2.418.229.500	2.718.229.500
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk kan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yg diperbaiki	114 unit rumah	114 unit rumah	2.418.229.500	2.718.229.500
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik**	**98%**	**98%**	**37.465.530.833**	**39.066.721.952**
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	**96%**	**96%**		
		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana TPU	**72%**	**72%**		
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang jalan yang dibangun/direbah	2.000 m	2.000 m	37.465.530.833	39.066.721.952

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja		Anggaran	
			sebelum perubahan	setelah perubahan	sebelum perubahan	setelah perubahan
		Panjang drainase yang dibangun/direhab	1.000 m	1.000 m		
		Jumlah sarana dan prasarana TPU	36 jenis	36 jenis		
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan yang di susun	15 dokumen	15 dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	15 lokasi	15 lokasi	36.249.195.833	37.850.386.952
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 laporan	1 laporan	216.335.000	216.335.000
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**18.990.355.256**	**17.921.913.990**
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	100%	146.185.428	146.170.068
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yg disusun	3 dokumen	3 dokumen	110.564.620	101.369.260
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	35.620.808	44.800.808
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100%	100%	12.421.900.952	11.339.957.416

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja		Anggaran	
			sebelum perubahan	setelah perubahan	sebelum perubahan	setelah perubahan
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	47 orang	47 orang	12.420.805.336	11.338.861.800
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1 laporan	1 laporan	547.808	547.808
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yg disusun	1 dokumen	1 dokumen	547.808	547.808
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100%	100%	153.680.000	148.680.000
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	1 paket	28.680.000	28.680.000
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 orang	25 orang	125.000.000	120.000.000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.120.157.052	1.159.975.604
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	425.512.346	428.474.373
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	131.778.908	168.635.433
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	47.175.798	47.175.798
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166 laporan	166 laporan	515.690.000	515.690.000
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	1 unit	1 unit		5.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja		Anggaran	
			sebelum perubahan	setelah perubahan	sebelum perubahan	setelah perubahan
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit		5.000.000
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100%	100%	4.030.222.820	4.030.222.820
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	19.020.000	19.020.000
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	4.011.202.820	4.011.202.820
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.118.209.004	1.096.908.082
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	55 unit	55 unit	747.099.004	790.508.082
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	211 unit	211 unit	371.110.000	306.400.000
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**PERSENTASE PENANGANAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**100%**	**100%**	**641.277.730**	**634.430.442**
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan	8 dokumen	8 dokumen	641.277.730	634.430.442
2.10.04.2.01.0004	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	8 dokumen	8 dokumen	48.775.000	589.544.442
2.10.04.2.01.0005	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 berita acara	8 berita acara	592.502.730	44.886.000
2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Tanah Kosong yang Dimanfaatkan**	**60%**	**60%**	**463.227.469**	**838.074.141**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja		Anggaran	
			sebelum perubahan	setelah perubahan	sebelum perubahan	setelah perubahan
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	100%	100%	463.227.469	838.074.141
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dalam rangka penyelesaian tanah kosong	1 laporan	1 laporan	463.227.469	838.074.141
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Santunan Tanah**	**100%**	**100%**	**102.663.000**	**134.663.000**
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	102.663.000	134.663.000
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	102.663.000	134.663.000
2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Persentase penyediaan tanah untuk masyarakat**	**100%**	**100%**	**18.760.000**	**18.760.000**
2.10.08.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah fasilitasi penerbitan izin membuka tanah	3 lokasi	3 lokasi	18.760.000	18.760.000
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	1 dokumen	1 dokumen	18.760.000	18.760.000
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase penyediaan tanah untuk fasilitas publik**	**46,67%**	**46,67%**	**261.002.156**	**261.002.156**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja		Anggaran	
			sebelum perubahan	setelah perubahan	sebelum perubahan	setelah perubahan
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Peta Zona Nilai Tanah	1 dokumen	1 dokumen	261.002.156	261.002.156
2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah sebagai dasar pelayanan informasi nilai tanah dan pelayanan pertanahan lainnya	1 dokumen	1 dokumen	261.002.156	261.002.156
					77.057.440.701	**79.650.358.494**

V. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG

Ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kota Bontang sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah telah terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah Kota Bontang. Berdasarkan diktum kedua instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tersebut.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perancanaan lainnya, maka sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai koordinator tim penyusunan Renja Perubahan 2025, melakukan pembahasan yang mencakup :

E. Penentuan kegiatan prioritas yang disesuaikan dari Rencana Strategis 2021 – 2026;

F. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bontang Tahun 2024;

G. Rumusan-rumusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024;
H. Dokumen kebutuhan perencanaan lainnya.

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang Tahun 2025 merupakan penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan dari perkembangan situasi dan kondisi terkini yang dihadapi perangkat daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang diusulkan menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang Tahun 2025 adalah :

a) Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

e) dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
g) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
h) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;
i) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentan pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
j) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rpjmn Tahun 2020-2024;
k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;

n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
o) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
p) Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
q) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD) Kota Bontang Tahun 2005-2025;
r) Perda Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
s) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
t) Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
u) Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang Tahun 2021 – 2026.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Sedangkan Tujuannya adalah :

1. Sebagai acuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang sesuai Renstra perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang tahun 2025.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan.....4

1.4 Sistematika Penulisan.....5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....38

2.3 Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.....41

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....44

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 58

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....60

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....60

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....61

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....64

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif.....69

BAB V PENUTUP.....78

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang adalah Menegakkan Peraturan Daerah dan Meneyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas maka diperlukannya rencana kerja yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan serta Pagu Anggaran yang telah disusun didalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam merancang program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan ini, kinerja Rencana Kerja tahun 2025 wajib dievaluasi. Tujuannya adalah untuk menetapkan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas capaian kinerja Rencana Kerja 2024 (Tahun n-1) sebagaimana terlampir di Tabel 2.1.

2.1.1 Evaluasi Program Tahun 2023 dan 2024

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang sebagai pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang telah dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun 2023 sejumlah ***Rp. 17.600.944.604,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Rupiah)*** dari alokasi anggaran tersebut diatas telah terealisasi

sebesar ***Rp.* 15.757.275.625,00** ***(Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)*** yang terdiri dari 2 (Dua) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan.

Sedangkan Anggaran Tahun 2024 sejumlah **Rp 18.465.474. 742 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh lima ribu Empat Ratus tujuh Puluh Empat Rupiah yang** telah terealisasi sebesar **Rp 17.197.784.789 (Tujuh Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)** yang terdiri dari 2 (Dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 29 (Dua Puluh sembilan) Sub Kegiatan. Adapun rincian capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang tahun 2024 meliputi :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capain Kinerja	Outcome
1	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	499.920,00	498.000,00	99,62	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	499.920,00	498.000,00	99,62	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	499.920,00	498.000,00	99,62	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.391.269.381,00	6.900.306.935,00	93,36	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	499.920,00	498.000,00	99,62	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	499.920,00	498.000,00	99,62	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	438.198.375,00	168.023.500,00	38,34	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	127.100.000,00	7.500.000,00	5,90	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti

			Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Pendidikan dan Pelatihan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.468.740,00	8.018.000,00	59,53	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	754.833.553,00	347.773.540,00	46,07	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.349.143,00	37.647.750,00	88,90	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.819.187,00	42.880.689,00	82,75	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
			Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.101.347.000,00	1.055.393.575,00	95,83	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	1.134.490.000,00	1.123.370.000,00	99,02	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lapangan				Lapangan yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikas,Sumber Daya Air dan Listrik	152.800.000,00	130.097.175,00	85,14	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.249.540.000,00	4.217.690.375,00	99,25	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	875.105.550,00	736.823.008,00	84,20	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.840.000,00	2.825.000,00 9,47	9,47	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	149.896.900,00	102.709.900,00	68,52	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	15.410.000,00	15.410.000,00	30,73	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui

			Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAK Asasi Manusia	123.055.000,00	118.387.700,00	96,21	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	72.640.000,00	70.809.700,00	97,48	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
			Penyediaan Layanan dalam	11.269.360,00	5.480.000,00	48,63	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan

			rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada				Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	231.013.315,00	210.885.000,00	91,29	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	203.180.500,00	161.056.000,00	79,27	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			Penanganan Atas Pelanggaran	229.652.755	186.660.000	81,28 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan

			Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	42.750.000,00	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda

Capaian Kinerja Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2023 berdasarkan target tertuang dalam rencana kerja SKPD. Realisasi Program/kegiatan tahun 2023 sekitar 89,53 %, yaitu Permasalahan :

1. Pelatihan dan Pendidikan Pegawai berdasarkan Tupoksi dikarenakan Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Mengikuti Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dari Mendagri jadi anggaran dikembalikan.

2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, masih tersisa anggarannya dikarenakan salah Spesifikasi Pengadaan sehingga terjadi pengembalian barang.

3. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya dikarenakan Estimasi Waktu yang Cuma 2,5 bulan pada Anggaran Perubahan 2023.

4. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dikarenakan Jadwal Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Mengikuti Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dari Mendagri jadi anggaran dikembalikan.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capain Kinerja	Outcome
1	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	584.076,00	-		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	584.076,00	-		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	584.076,00	-		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.034.663.827,00	7.873.016.313,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	584.076,00	-		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	584.076,00	-		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	416.173.776,00	406.852.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.735.000,00	58.237.905,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.909.420,00	7.500.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	343.649.124,00	222.071.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.435.714,00	24.991.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.838.317,00	29.302.480,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
			Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.097.584.000,00	1.077.097.037,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikas,Sumber Daya Air dan Listrik	121.200.000,00	92.277.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

							Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.582.608.038,00	4.561.031.117,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.009.004.138,00	715.122.900,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.270.000,00	1.332.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.600.000,00	-		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	2.440.000	1.998.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang

			Kantor dan Bangunan lainnya				Dipelihara/Direhabilitasi
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	344.306.803,00	195.521.000,00		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	66.996.000,00	3.905.000,00		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan	390.368.084,00	386.272.503,00		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang

			perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAK Asasi Manusia				Ditingkatkan Kapasitasanya
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	110.457.748,00	81.470.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	9.324.966,00	2.191.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	557.656.372,00	478.178.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

		Bupati/Wali Kota					
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	815.667.600,00	763.739.266,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	332.850.435,00	205.679.268,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	32.815.000,00	-		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda

Capaian Kinerja Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2024 berdasarkan target tertuang dalam rencana kerja SKPD. Realisasi Program/kegiatan tahun 2024 sekitar 93,13 %, Permasalahannya yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Pagu Dana Sebesar Rp. 499.920 tidak ada terealisasi anggarannya ditahun ini akan tetapi sudah ada terealisasi fisiknya menggunakan Sub Kegiatan Cetak dan Penggandaan.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Nilai Pagu Dana Sebesar Rp. 499.920 tidak ada terealisasi anggarannya ditahun ini akan tetapi sudah ada terealisasi fisiknya menggunakan Sub Kegiatan Cetak dan Penggandaan.
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Nilai Pagu Dana Sebesar Rp. 499.920 tidak ada terealisasi anggarannya ditahun ini akan tetapi sudah ada terealisasi fisiknya menggunakan Sub Kegiatan Cetak dan Penggandaan.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Nilai Pagu Dana Sebesar Rp. 499.920 tidak ada terealisasi anggarannya ditahun ini akan tetapi sudah ada terealisasi fisiknya menggunakan Sub Kegiatan Cetak dan Penggandaan.
5. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan Nilai Pagu Dana Sebesar Rp. 499.920 tidak ada terealisasi anggarannya ditahun ini dikarenakan Prognosis Tahun Anggaran 2024 belum bisa dibuat arahan dari BPKAD.

6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sebesar Rp. 8.600.000 tidak ada terealisasi anggarannya ditahun ini dikarenakan pemeliharaan untuk sarana dan prasarana seperti Laptop dan Printer masih layak dipergunakan dan tidak ada pemeliharaan.
7. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan Nilai Pagu Dana Sebesar Rp. 32.815.000 belum ada terealisasi sama sekali hal ini disebabkan belum ada Jadwal Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS sehingga menjadi tertunda dan sebagai solusi dari permasalahan ini akan segera di Koordinasikan secepatnya ke OPD terkait penjadwalan hal tersebut.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024

KOTA BONTANG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (N-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (Satpol PP)**	**-**	**12.033.678.722**	**14.016.414.035**	**12.928.488.688**	**92,24%**	**15.805.031.734**	**15.080.828.752**	**95.42 %**

1	**5**	**1**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi (Nama perangkat Daerah)**						**1.752.228**	**0,00**	**0,00**
1	5	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						**584.076**	**0,00**	**0,00**
1	5	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						**584.076**	**0,00**	**0,00**
1	5	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						**584.076**	**0,00**	**0,00**

1	**5**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**6.250.732.356**	**7.184.674.198**	**6.503.113.143**	**90,51%**	**8.035.831.979**	**7.873.016.313,**	**97.97**%
1	5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		6.250.732.356	7.184.674.198	6.503.113.143	90,51%	**8.034.663.827**	**7.873.016.313**	**97.99**%
1	5	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						**584.076**	**0,00**	**0,00**
1	5	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						**584.076**	**0,00**	**0,00**
1	**5**	**1**	02.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**-**	**270.754.140**	**334.295.439**	**309.239.000**	**92,50%**	**506.908.776**	**465.089.905**	**91.75 %**
1	5	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		172.205.000	334.295.439	309.239.000	92,50%	**416.173.776**	**406.852.000**	**97.76**%

1	5	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		98.549.140	0,00	0,00	0%	**90.735.000**	**58.237.905**	64,18%
1	**5**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**-**	**1.523.590.391**	**1.036.807.048**	**8 918.253.439**	**88,57%**	**1.522.416.575**	**1.360.961.517**	**89,39**%
1	5	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2.972.200	22.026.910	11.749.350	53,34%	**8.909.420**	**7.500.000**	84,18%
1	5	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		564.212.600	338.184.440	284.115.639	84,01%	343.649.124	222.071.000	64,62%
1	5	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		310.968.590	85.688.911	72.673.183	84,81%	29.435.714	24.991.000	84,90%
1	5	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		47.376.780	58.748.707	24.122.298	41,06%	42.838.317	29.302.480	68.40%
1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		598.060.221	532.158.000	0 525.592.969	98,77%	1.097.584.000	1.077.097.037	98,13%

1	**5**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah**		**400.290.000**	**486.890.000**	**455.040.000**	**93,46%**	**-**	**-**	**-**
1	**5**	**1**	**02.07**	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		400.290.000	486.890.000	455.040.000	93,46%	-	-	-
1	**5**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**3.259.588.035**	**4.317.248.800**	**4.268.308.438**	**98,87%**	**4.178.118.112**	**1.747.598.576**	**41,83**%
1	5	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.000.000	10.000.000	10.000.000	100 %	10.000.000	10.000.000	100%
1	5	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		145.590.076	200.000.000	157.040.275	78,52 %	121.200.000	92.277.000	76,14%
1	5	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3.108.997.959	4.107.248.800	4.101.268163	99,85%	4.582.608.038	4.561.031.117	99,53%

1	**5**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Peningkatan Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**328.723.800**	**656.498.550**	**474.534.668**	**72,28%**	**698.685.500**	**324.580.250**	**42,67**
1	5	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		284.173.800	602.248.550	465.661.71	77,32%	1.009.004.138	715.122.900	70,87
1	5	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						4.270.000	1.332.000	31,19%
1	5	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						8.600.000	-	0,00
1	5	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		44.550.000	54.250.000	8.872.952	16,36%	2.440.000	1.998.000	81,89%
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan ; Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**-**	**637.689.400**	**1.254.746.565**	**1.108.062.580**	**88,31%**	**675.074.075**	**122.057.700**	**18,08%**

1	**5**	**2**	**02.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penanganan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Daera h**	**-**	**637.689.400**	**1.025.093.810**	**921.402.580**	**89,88%**	**332.405.260**	**110.340.200**	**33,19%**
1	5	2	02.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Trantibum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengaman dan Pengawalan		0,00	77.577.500	65.757.500	84,76%	**344.306.803**	**195.521.000**	56,79%
1	5	2	02.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		459.874.400	219.065.450	198.681.000	90,69%	**66.996.000**	**3.905.000**	5,83%
1	5	2	02.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

1	5	2	02.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0,00	0,00	0,00		390.368.084	386.272.503	98,95%
1	5	2	02.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		177.815.000	14.629.500	0,00		110.457.748	81.470.000	73,76%
1	5	2	02.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada		0,00	0,00	0,00		9.324.966	2.191.000	23,50%
1	**5**	**2**	**02.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota**	**-**	**0,00**	**229.652.755**	**186.660.000**	**81,28%**	**1.706.174.407,**	**1.447.596.534**	**84,84%**
1	5	2	02.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/		0,00	0,00	0,00		557.656.372	478.178.000	85,75%

1	5	2	02.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		0,00	0,00	0,00		815.667.600	763.739.266,	93.63%
1	5	2	02.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		0	229.652.755	186.660.000	81,28%	332.850.435	205.679.268	61.79
1	**5**	**2**	**02.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)** **Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)** **Kabupaten/Kota**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,000**		**32.815.000**	**0,00**	**0,00**

1	**5**	**2**	**02.03**	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada		0,00	0,00	0,00		32.815.000	0,00	0,00

Bontang, 22 Agustus 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,

H. Ahmad Yani Y.S.Sos M.Si

NIP. 198612311990031031

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATPOL PP

Penetapan Indikator Kinerja Pertama yaitu Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan yang tertuang didalam dokumen RENJA PD untuk tahun 2024 Target Kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100,00 % telah terealisasi sebesar 100,00% dengan Persentase Capaian Kinerja sebesar 100% yang dapat disimpulkan bahwa makin menurunnya persentase daerah rawan gangguan trantibum di beberapa kelurahan yang berdampak kepada meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Bontang. Hal ini dicapai dengan meningkatkan intensitas Patroli Wilayah serta Monitoring setiap hari pada Pagi, Siang dan Malam hari pada daerah - daerah yang teridentifikasi rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Perlu kami sampaikan ada beberapa kelurahan yang kami anggap sangat diperlukannya bukan hanya Patroli oleh SATPOL PP secara intensif tetapi juga peran serta aktif masyarakat yang berada di wilayah tersebut guna pencegahan gangguan trantibum sedini mungkin, di seluruh wilayah Kelurahan.

Untuk Indikator Kinerja Kedua yaitu Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang tertuang didalam dokumen RENJA PD untuk tahun 2024 telah ditetapkan Target Kinerja sebesar 100 % telah terealisasi sebesar 100 % dengan Persentase Capaian Kinerja sebesar 100 % telah mencapai keberhasilan dalam pencapaian target kinerjanya yang secara tidak langsung berdampak terhadap kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Perundangan serta Produk Hukum Daerah yang berlaku di Kota Bontang antara lain :

1. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ketentuan Tempat Penumpukan Barang dan Bahan Bangunan Dalam Kota Bontang,
2. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum,
3. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol,
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung,
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok,
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan,

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenanga Kerja,

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat,

9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

10. Peraturan Daerah Bontang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah,

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

12. Peraturan Walikota Bontang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara, Lokasi dan Perizinan Penyelenggaran Reklame,

13. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 tentang wajib belajar dari pukul 19.00 hingga 21.00,

14. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok,

15. Peraturan Walikota Bontang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran,

16. Surat Edaran Walikota Bontang Nomor 1886.65/857/BKPSDM/2022 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

T.C. 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BONTANG

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)			95,00	100,00	100,00	100,00	86,67	93,33	100,00	100,00	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 4 menyatakan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah Penegakan Perda dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dalam melaksanakan tugas yang dimaksud diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang mempunyai Fungsi antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban wilayah, masyarakat, penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu : perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban, perumusan, pembinaan, pelayanan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana yang telah di amanahkan dalam Pasal. 13 huruf (c), dan Pasal 148 serta 149, Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang perlu diberdayakan fungsinya dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu disamping unsur kepolisian dan aparat keamanan lainnya.

Oleh karenanya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja guna mendukung pemerintah dalam melaksanakan

Pembangunan Daerah masih terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hambatan dan Permasalahan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembinaaan dan Penindakan (Yustisi) terkait Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.

    a. Kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
    b. Kurangnya pengawasan Objek Produk Hukum Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi, Kecamatan dan Kelurahan.
    c. Tidak validnya data-data yang diperoleh dari masyarakat mengenai pelanggaran peraturan daerah
2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

    a. Belum maksimalnya pemanfaatan data yang terkait dalam urusan Trantibum.
    b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan operasional lapangan dan Administrasi untuk menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum ntuk meningkatkan kualitas SDM, diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Namun, sering kali fasilitas pelatihan, peralatan, dan teknologi yang tersedia tidak memadai, sehingga menghambat proses peningkatan kompetensi anggota Satpol PP.
3. Kurangnya mutu dan kualitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

    a. Jumlah Kuota yang terbatas pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kementrian Dalam Negeri yang dalam setahun anggaran hanya dibuka untuk 60 Peserta/tahun, untuk kewenangan pemanggilan Peserta menjadi kewenangan Penuh

dari Kementrian Dalam Negeri.

b. Berdasarkan Permendagri no 17 tahun 2019 pasal 16. Satuan Polisi Pamong Praja memerlukan peralatan yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas penegakan perda dan perkada. Salah satunya adalah pengamanan pileg dan pilkada yang dimana peralatan satpol pp kota bontang perlu peremajaan agar bias menjalankan kinerja dengan baik.
c. Berdasarkan Permendagri no 60 tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja pasal 11,standar jumlah pegawai satpol pp di kota bontang ialah berkisar 300 sedangkan saat ini anggota satpol pp hanya memiliki 130. Dengan demikian satpol pp kota bontang belum dapat menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal
d. Rasio Personil Satuan Polisi Pamong Praja belum mencukupi dengan jumlah penduduk di Kota Bontang dimana personil Satpol PP masih berada di angka 2,20 per 10.000 penduduk yang mana personil Satpol PP sebanyak 39 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 37 orang PNS dan 2 orang PPPK dan 82 orang Tenaga Kontrak Daerah (TKD) dibanding dengan penduduk di Kota Bontang sebanyak 191.811 (seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sebelas) orang;
e. Pendidikan dan Pelatihan yang Kurang Memadai: Banyak anggota Satpol PP yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Kurangnya program pelatihan berkelanjutan dan pendidikan formal yang relevan membuat anggota Satpol PP tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menghadapi berbagai situasi di lapangan

Setelah mengetahui permasalahan utama dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang yang telah diuraikan diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang menetapkan 7 (Tujuh) Kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan sosialisasi sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mentaati Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya.
2. Meningkatkan koordinasi kepada beberapa pihak dalam Penengakan Perda serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Melakukan validasi data/informasi yang diperoleh dari masyarakat, kecamatan dan kelurahan.
4. Mengusulkan tambahan Pagu Anggaran bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang
5. Mengusulkan fasilitas dan peremajaan peralatan yang digunakan sebagai penunjang pengamanan pemilihan legislative dan pemilihan kepala daerah.
6. Mengusulkan penambahan SDM Satuan Polisi Pamonh Praja kota Bontang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Ada beberapa catatan penting yang kami sampaikan dalam meriview RKPD Tahun 2024 dengan jumlah 2 Program, 9 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dimana catatan penting tersebut erat kaitannya dengan pencapaian kinerja yang telah kami targetkan dan yang akan kami capai di dalam pelaksanaan sebanyak 2 Program, 7 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan di Tahun Anggaran 2025 antara lain :

Tabel T-C. 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**15.933.553.400**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**15.933.553.400**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	SATPOL PP	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan	100 persen	**11.239.603.400**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	SATPOL PP	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan	100 persen	**11.239.603.400**	

	DAERAH KABUPATEN/KOTA		pemerintah daerah (Satpol PP)			**KABUPATEN/ KOTA**		pemerintah daerah (Satpol PP)			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SATPOL PP	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	**2.450.000**	**Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	SATPOL PP	Persentase Pelaksanaan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	**2.450.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SATPOL PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SATPOL PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SATPOL PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SATPOL PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	750.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SATPOL PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SATPOL PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	**6.393.600.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	**6.393.600.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SATPOL PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	6.392.100.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SATPOL PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	6.392.100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SATPOL PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SATPOL PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	750.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SATPOL PP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	2 Dokumen	750.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SATPOL PP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	2 Dokumen	750.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	**185.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	**185.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	SATPOL PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	110.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	SATPOL PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	110.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SATPOL PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SATPOL PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	75.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	**555.503.400**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	**555.503.400**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SATPOL PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	35.503.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SATPOL PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	35.503.400	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SATPOL PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SATPOL PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SATPOL PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SATPOL PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SATPOL PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	65.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SATPOL PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	65.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SATPOL PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	305.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SATPOL PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	305.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	**4.082.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	**4.082.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SATPOL PP	Jumlah Laporan Penyediaan	1 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SATPOL PP	Jumlah Laporan Penyediaan	1 Laporan	12.000.000	

			Jasa Surat Menyurat					Jasa Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SATPOL PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SATPOL PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SATPOL PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90 Laporan	3.970.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SATPOL PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90 Laporan	3.970.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	**240.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	**240.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	20 Unit	215.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	20 Unit	215.000.000	

			Pajak dan Perizinannya			Operasional atau Lapangan		Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SATPOL PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	25.000.000		SATPOL PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	25.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan ; Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 ; 80 Persen	**4.475.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	SATPOL PP	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan ; Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 ; 80 Persen	**4.475.000.000**	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Penanganan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Daerah	100 Persen	**4.050.000.000**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Penanganan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Daerah	100 Persen	**4.050.000.000**	

	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	SATPOL PP	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Trantibum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengaman dan Pengawalan	1200 Kasus	250.000.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	SATPOL PP	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Trantibum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengaman dan Pengawalan	1200 Kasus	250.000.000	
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	SATPOL PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	5 Kasus	250.000.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	SATPOL PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	5 Kasus	250.000.000	

	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	150.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	150.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	SATPOL PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300Orang	3.200.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	SATPOL PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300Orang	3.200.000.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 Unit	125.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 Unit	125.000.000	

	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	SATPOL PP	Jumlah layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	1 laporan	75.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	SATPOL PP	Jumlah layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	1 laporan	75.000.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota	100 Persen	**375.000.000**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 Persen	**375.000.000**	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	4 Laporan	150.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	4 Laporan	150.000.000	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap	18 Laporan	150.000.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan	18 Laporan	150.000.000	

			Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Bupati/Wali Kota		Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SATPOL PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	7 Laporan	75.000.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SATPOL PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	7 Laporan	75.000.000	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100 Persen	**50.000.000**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	SATPOL PP	Persentase Peningkatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	100 Persen	**50.000.000**	

	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	50.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	50.000.000	

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Pada pelaksanaan MUSRENBANGDA Kota Bontang Tahun 2025 bahwa tidak ada usulan masyarakat bagi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang.

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kota Bontang

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perpanjangan tangan Pemerintah dalam melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dimana hal tersebut tertuang didalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabilitas, Transparat dan Partisipatif.

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi aparatur pemerintah agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil sebagai pedoman pemerintah daerah dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketenteraman suasana batin dan ketertiban lingkungan di masyarakat yang mendorong untuk tertib hukum dan tertib sosial serta partisipasi masyarakat dalam penanganan kebencanaan/pemadaman kebakaran yang mandiri lingkungan di wilayahnya masing-masing;
2. Terwujudnya Polisi Pamong Praja dan PPNS yang profesional dan handal dalam pelaksanaan tugas;
3. Terwujudnya pengamanan di rumah dinas dan bangunan vital milik pemerintah daerah guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah, pimpinan nasional, pejabat pusat dan tamu negara;
4. Terwujudnya sistem kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan parat penegak hukum lainnya dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dibutuhkannya strategi – strategi dalam pencapaian kebijakan tersebut diatas. Strategi Nasional yang menjadi pedoman kami dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan fasilitas/sarana dan prasarana untuk satuan keamanan mengikuti gerak perkembangan/pemekaran wilayah.
2. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib di masyarakat.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas perlengkapan dan peralatan.
4. Penambahan sarana komunikasi dan tranportasi untuk mendukung tugas-tugas dilapangan.
5. Peningkatan pengamanan bangunan vital milik Pemda dan rumah dinas Pimpinan Daerah.
6. Menegakkan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya.
7. Pengembangan analisis dan rekomendasi dampak implementasi Perda.
8. Meningkatkan pengamanan pimpinan daerah, nasional, pejabat pusat dan tamu negara.
9. Peningkatan sosialisasi Perda dan Peraturan pelaksanaanya, serta implementasinya di lapangan.
10. Peningkatan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum.
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
12. Pengembangan kemitraan dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penegakan supremasi hukum.
13. Pengembangan prosedur kerja dan mekanisme kerja serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1. Tujuan

Dalam dokumen perencanaan RENJA PD Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahunan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yang melekatkan

kerangka prioritas untuk memfokuskan arah apa yang akan dicapai dan dihasilkan.

Pada dasarnya tujuan RENJA ialah Suatu kondisi yang ideal yang ingin dicapai/dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Tujuan RENJA Perangkat Daerah SATPOL PP sebagai berikut :

a. Menciptakan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kota Bontang.
b. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Warga Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Ketentuan Lainnya.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dan proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam waktu tertentu atau tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang sebagai berikut :

a. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Masyarakat.
b. Peningkatan Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah

Tujuan dan Sasaran serta Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	60,87	68,00	85,00	89,00	91,00

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang tertian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Bontang, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang adalah sebagai *penegak* setiap Peraturan Daerah kota Bontang dan Peraturan Walikota Bontang demi menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat kota Bontang.

Didalam usulan Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang mengusulkan Program yang kami katagorikan menjadi 2 (dua) yaitu Program Wajib dan Program Penunjang yaitu :

1. Program Wajib merupakan program yang hasil capaiannya menuju kepada Indikator Kinerja Sasaran yang tertuang didalam Dokumen RENSTRA dan RENJA PD terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan.
2. Program Penunjang merupakan program yang hasil capaiannya merupakan pendukung dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan.

Dalam melaksanakan *2 (dua) Program*, 9 (sembilan) *Kegiatan* dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan tersebut Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja telah mengusulkan Pagu Anggaran sebesar ***Rp. 19.409.621.335,- (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dula Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)*** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tabel T-C .33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kota Bontang

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							17.397.438.095,00	19.409.621.335,00	18.270.197.552,00	872.759.457,00							22.629.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.397.438.095,00	19.409.621.335,00	18.270.197.552,00	872.759.457,00							22.629.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA							17.397.438.095,00	19.409.621.335,00	18.270.197.552,00	872.759.457,00							22.629.000.000,00	

		PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**16.350.500.395,00**	**18.162.972.235,00**	**17.516.613.752,00**	**4.544.499.605,00**							**20.895.000.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.825.824,00	1.643.424,00	1.643.424,00	-182.400,00			-	- -	Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Satpol PP		1.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	608.608,00	547.808,00	547.808,00	-60.800,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	608.608,00	547.808,00	547.808,00	-60.800,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	608.608,00	547.808,00	547.808,00	-60.800,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	9.019.336.148,00	11.079.195.560,00	11.079.195.560,00	2.059.859.412,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparatur Sipil Negara Satpol PP		12.001.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang Menerima Gaji dan Tunjangan				39 Orang/bulan	63 Orang/bulan	9.018.118.932,00	11.078.099.944,00	11.078.099.944,00	2.059.981.012,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			12.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			A S N																
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	608.608,00	547.808,00	547.808,00	-60.800,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	608.608,00	547.808,00	547.808,00	-60.800,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	246.080.342,00	405.298.262,00	567.663.062,00	321.582.720,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Satpol PP		290.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	3 Paket	173.345.342,00	310.063.262,00	490.428.062,00	317.082.720,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	15 Orang	72.735.000,00	95.235.000,00	77.235.000,00	4.500.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PAGU INDIKATIF

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dimana SATPOL PP Kota Bontang untuk Tahun Anggaran 2024 telah menyusun Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Tahun Anggaran 2025. Dokumen RENJA Perangkat Daerah tersebut berisikan usulan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Usulan Program dan Kegiatan SATPOL PP sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu :
   1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu :
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu :
   1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
   2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu :
   1. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor
   2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
   4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu :
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan
   2. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.
   3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tugas dan fungsi operasional lapangan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah, masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan , peraturan daerah dan peraturan/keputusan Kepala Daerah , dengan kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum.
2. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada.
3. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
5. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan
6. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
7. Sub kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada

a. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

1. Sub Kegiatan Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

b. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Usulan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KOTA BONTANG

Nama Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							17.397.438.095,00	19.409.621.335,00	18.270.197.552,00	872.759.457,00							22.629.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.397.438.095,00	19.409.621.335,00	18.270.197.552,00	872.759.457,00							22.629.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							17.397.438.095,00	19.409.621.335,00	18.270.197.552,00	872.759.457,00							22.629.000.000,00	

1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**16.350.500.395,00**	**18.162.972.235,00**	**17.516.613.752,00**	**4.544.499.605,00**							**20.895.000.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.825.824,00	1.643.424,00	1.643.424,00	-182.400,00			-	- -	Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Satpol PP		1.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	608.608,00	547.808,00	547.808,00	-60.800,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	608.608,00	547.808,00	547.808,00	-60.800,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	608.608,00	547.808,00	547.808,00	-60.800,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	9.019.336.148,00	11.079.195.560,00	11.079.195.560,00	2.059.859.412,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Aparatur Sipil Negara Satpol PP		12.001.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan				39 Orang/bulan	63 Orang/bulan	9.018.118.932,00	11.078.099.944,00	11.078.099.944,00	2.059.981.012,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			12.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			j a n g a n A S N										KERJA						
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	608.608,00	547.808,00	547.808,00	-60.800,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	608.608,00	547.808,00	547.808,00	-60.800,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	- -			600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

															korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.				
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	246.080.342,00	405.298.262,00	567.663.062,00	321.582.720,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	- -	Pegawai Satpol PP		290.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	3 Paket	173.345.342,00	310.063.262,00	490.428.062,00	317.082.720,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelu dupan.	- -			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	15 Orang	72.735.000,00	95.235.000,00	77.235.000,00	4.500.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

VI. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2025 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan yang telah disesuaikan atau direvisi. Dokumen ini menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun KUA-PPAS Perubahan dan RKA Perubahan tahun 2025, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi kinerja.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah dan berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan. Sebagi perangkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang dengan ini Menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menyinergikan Asta Cita kedalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD tahun 2025

Dengan adanya amanat tersebut dan untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, serta merencanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang melaksanakan Penyusunan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025. Renja Perubahan ini juga menjadi dasar untuk memasukkan program/kegiatan ke dalam Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.

1.2 DASAR PENYUSUNAN

Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari sebagai berikut :

a. Kepala BPBD;
b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Kepala

Kepala BPBD dijabat secara rangkap *(ex-officio)* oleh Sekretaris Daerah.

Unsur Pengarah

Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 9 (Sembilan) anggota.

Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan dan mengoordinasikan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
6. Kelompok Jabatan Fungsional (JF); dan
7. Pelaksana.

Struktur organisasi BPBD Kota Bontang seperti tergambar pada Bagan Organisasi berikut:

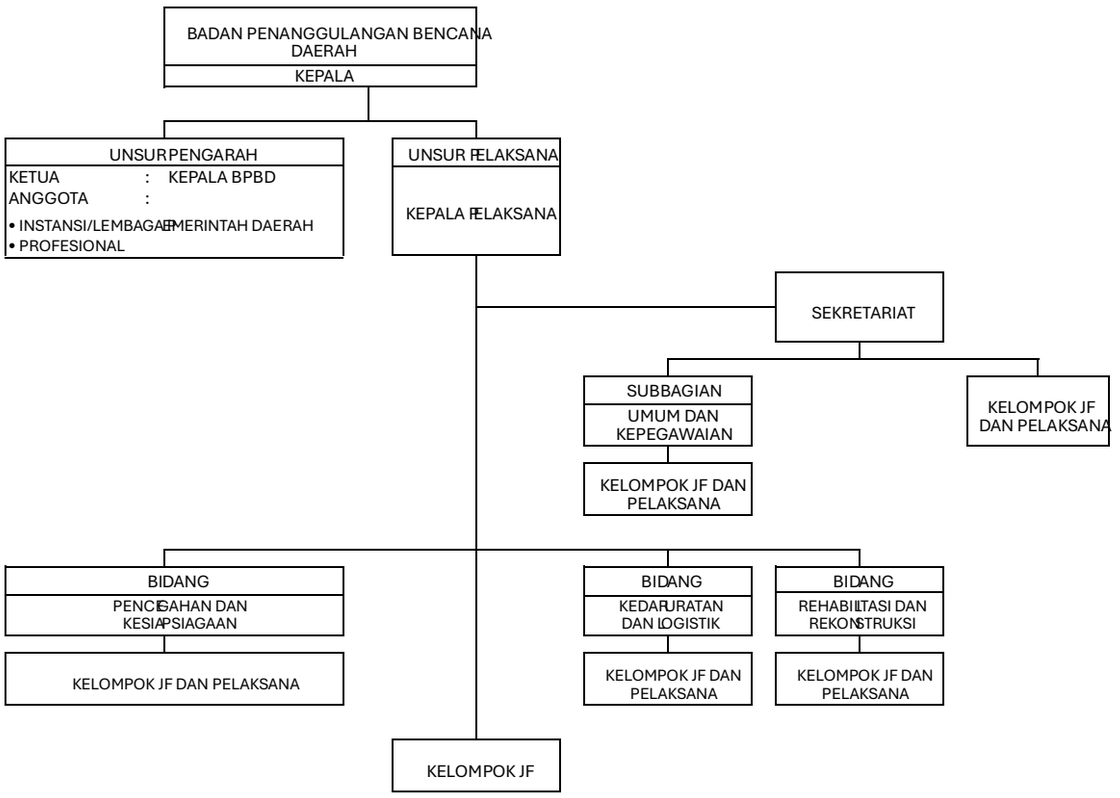

1.4. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang didukung dengan keberadaan pegawai sejumlah 51 (Lima Puluh Satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I

Kondisi Kepegawain Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS PEGAWAI	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	15	2	17
2	Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK)	32	3	35
3	Tenaga Kontrak Daerah (TKD)	1	1	2

JUMLAH	**48**	**6**	**54**

Berdasarkan jenjang pendidikan, kombinasi tingkat pendidikan pegawai negeri sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Kondisi Kepegawaian (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 2	3
2	Strata 1	7
3	D3	1
4	SLTA	42
5	SLTP	1
JUMLAH		**54**

Berdasarkan tingkat kepangkatan, pegawai negeri sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Kondisi Kepegawaian (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menurut Tingkat Kepangkatan, Golongan dan Ruang

NO	TINGKAT KEPANGKATAN	JUMLAH
1	Pembina Tingkat I / IV.b	1
2	Pembina / IV.a	4
3	Penata Tk.I/ III.d	1
4	Penata Muda Tingkat I/ III.b	1
5	Penata Muda/III.a	6
6	Pengatur/II c	2
7	Pengatur Muda / II.a	1
8	PPPK	35
9	TKD	2
JUMLAH		**54**

Berdasarkan tingkat diklat aparatur, pegawai negeri sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut :

Keadaan Perlengkapan

Sebagai unit kerja yang mengembang tugas dibidang penanggulangan bencana tentunya sangat banyak bersentuhan dengan masyarakat, sarana dan prasarana dalam menunjang operasional dilapangan manjadi sangat penting mendapatkan perhatian, karena keterbatasan sarana dan prasarana akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang menempati gedung kantor Ex. Kantor Satpol PP Kota Bontang yang sarana dan prasarana kelengkapan gedung belum cukup memadai. Utamanya belum mempunyai gudang yang cukup besar untuk menyimpan peralatan dan logistik penanggulangan bencana. Namun untuk sarana operasional sudah cukup memadai yang sebagian berasal dari hibah BNPB Pusat maupun dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Semuanya dapat dipergunakan untuk memaksimalkan daya kerja dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana guna membangun pencapaian Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.
Sarana dan Prasarana BPBD :

No.	Jenis Aset	Satuan	Volume
1.	Bangunan Gedung Kantor	unit	1
2.	Jalan dan Jembatan	unit	2
3.	Bangunan Air	unit	1
4.	Alat-Alat Besar (Water Treatmen, Mesin Pompa)	unit	51
5.	Alat-Alat Angkutan (Mobil Operasional, Mobil Rescue, Sepeda Motor, Speed Boat, Perahu Karet)	unit	68
6.	Alat Bengkel dan Alat Ukur (Mesin Potong, GPS)	Unit/buah	14
7.	Alat Kantor dan Rumah Tangga (Lemari, Kursi, Meja, Laptop, Printer, AC, Tabung dll)	Unit/buah	218
8.	Alat Studio dan Komunikasi (HT, Kamera, Infocus, Megapone, Radio SSB dll)	Unit/buah	109
9.	Alat Laboratorium (Alat selam, generator dll)	Unit/buah	10

10.	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan (Tabung Selam, Breating Aparatus dll)	Unit/buah	21
11.	Komputer	Unit/buah	56
12.	Alat Keselamatan Kerja	Unit/buah	93
13.	Peralatan Olah Raga	Buah/set	12
	Total		**656**

1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagaimana juga pada Perda Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana yang meliputi 3 (tiga) tahapan :

1. Prabencana
2. Saat tanggap darurat, dan
3. Pasca bencana

Dengan fungsi sebagai :

1. Pengoordinasian
2. Pengkomandoan, dan
3. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

BPBD mempunyai tugas :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang; dan
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BPBD mempunyai fungsi :

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

a. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang APBDP Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai landasan pembangunan tahunan Kota Bontang. Seiring dengan diterbitkannya undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi; prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

b. TUJUAN

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), tujuan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang adalah **Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh**". yaitu dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, meningkatkan sarana dan prasarana serta pelaksanaan koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana dan meminimalkan dampak (korban) akibat terjadinya bencana

c. SASARAN

Adapun sasaran yang sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang 5 (lima) tahun kedepan yaitu : "**Terwujudnya responsifitas yang terukur, cepat dan tepat dalam penanganan bencana**".

Tabel 2.1 Indikator tujuan dan sasaran renja perubahan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan
Meningkatnya penanganan bencana secara menyeluruh	Terwujudnya responsifitas yang terukur, cepat dan tepat dalam penanganan bencana	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
		Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administarasi Umum Perangkat Daerah

2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Review capaian Renja tahun berjalan dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya :

Tabel 2.2 Capaian kinerja Tahunan

No	Indikator Sasaran	2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	
2	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	2.49 %	100 %	3.82 %	100 %	11.35 %	15%	15%	15%	
3	Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	108 %	100 %	97.44 %	100 %	

Dari tabel diatas dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja pada indikator I dapat terlaksana 100% pada tiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai indikator tersebut dicapai dengan ketersediaan anggaran ataupun dengan strategi yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.
2. Realisasi kinerja pada indikator II terlaksana pada tahun 2021 sebesar 2.49%, pada tahun 2022 sebesar 3.82%, tahun 2023 sebesar 11.35% dan tahun 2024 sebesar 15% dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja

untuk indikator II pada tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik. Penentuan target pada tahun 2024 turun karena paktor pembagi dari rumus perhitungan indikator tersebut sangat tinggi dan tidak mungkin dapat tercapai dengan dukungan anggaran maupun non anggaran yg telah dilaksanakan. Maka penentuan tartarget 15% adalah di ukur dari kemampun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator tersebut. Perhituhan 15% tersebut dari jumlah warga yang berada di kawasan rawan bencana sebanyak 17142 sehingga jumlah 15% adalah sebanyak 2571. Sebagai tolok ukur indikator tersebut yaitu pada pelaksanaan sub kegiatan pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan dukungan budgeting sebesar Rp. 1.188.278.000. Pada tahun 2025 ini ditergetkan sama dengan tahun sebelumnya yakni 15% mengingat pada tahun 2025 dukungan anggaran tidak sebesar tahun sebelumnya yakni Rp. 260.349.452

3. Realisasi kinerja pada indikator III dapat terlaksana 100% pada tiap tahunnya, dapat disimpuklan bahwa dalam mencapai indikator tersebut dapat dicapai dengan ketersediaan anggaran ataupun dengan strategi yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan II Tahun 2025

Realisasi Anggaran BPBD Kota Bontang sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 5.452.692.502,00. Secara ringkas realisasi capaian kinerja dan anggaran BPBD Kota Bontang Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut:

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Data RKA Belanja: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TAHUN ANGGARAN 2025

(Periode : Januari 2025 s.d Juni 2025)

No	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Pagu Anggaran	Keuangan %				Fisik %		Sisa Pagu
					Target	Target %	Realisasi	Realisasi %	Target %	Realisasi %	
1	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	623.545.534,00	106.768.000,00	17,12	93.330.200,00	14,97	99,31	37,77	530.215.334,00
2	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	80.286.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	80.286.330,00
3	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	260.767.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	260.767.211,00
4	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	243.872.997,00	241.982.997,00	99,23	71.228.000,00	29,21	99,23	41,98	172.644.997,00
5	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	116.411.608,00	49.828.644,00	42,80	27.981.000,00	24,04	42,44	26,43	88.430.608,00
6	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	10.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790.000,00
7	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	83.127.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,00	83.127.550,00
8	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	245.377.705,00	44.744.679,00	18,24	29.607.500,00	12,07	20,18	12,92	215.770.205,00
9	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	260.349.452,00	258.459.452,00	99,27	0,00	0,00	99,27	0,00	260.349.452,00
10	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	96.879.805,00	34.070.700,00	35,17	4.830.000,00	4,99	35,92	38,17	92.049.805,00
11	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	437.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	437.319.000,00
12	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	56.093.210,00	39.107.000,00	69,72	15.831.400,00	28,22	100,00	52,29	40.261.810,00
13	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	106.861.568,00	3.382.568,00	3,17	0,00	0,00	49,65	48,17	106.861.568,00
14	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
15	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.733.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733.055,00
16	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.500.580.303,00	5.105.683.403,00	60,06	4.096.229.618,00	48,19	60,35	58,66	4.404.350.685,00
17	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.696.068,00	9.696.068,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	9.696.068,00
18	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.380.131,00	256.430.131,00	93,46	4.114.800,00	1,50	94,84	1,51	270.265.331,00
19	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.442.090,00	84.329.800,00	69,44	545.000,00	0,45	69,87	1,06	120.897.090,00
20	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.246.395,00	23.081.280,00	87,94	0,00	0,00	87,94	0,00	26.246.395,00
21	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	707.563.540,00	496.883.612,00	70,22	203.744.940,00	28,80	82,03	33,01	503.818.600,00
22	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	525.360.000,00	525.360.000,00	100,00	481.900.000,00	91,73	100,00	100,00	43.460.000,00
23	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	923.696.500,00	1.610.000,00	0,17	0,00	0,00	100,00	0,00	923.696.500,00
24	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.205.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.205.168,00
25	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.960.000,00
26	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00
27	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.600.000,00	77.842.301,00	41,06	54.110.360,00	28,54	54,38	53,11	135.489.640,00
28	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.303.840,00	134.911.724,00	48,48	96.174.040,00	34,56	55,32	49,26	182.129.800,00
29	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	951.630.043,00	489.243.758,00	51,41	268.065.644,00	28,17	57,93	28,36	683.564.399,00
30	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.890.000,00
			TOTAL RKA (30)	**15.382.859.103,00**	**7.988.416.117,00**	**51,93**	**5.452.692.502,00**	**35,45**	**68,08**	**44,15**	**9.930.166.601,00**

Pada Tabel diatas dapat di jelaskan bahwa keseluruhan kinerja telah mencapai 44,15%. Melihat capaian tersebut dapa disimpulkan bahwa kinerja masih belum optimal, namun dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tahap pergeseran terdapat efisiensi anggaran dari pagu semula Rp 17.154.080.442 menjadi Rp. 15.382.859.103 sehingga ada effisiensi sebesar Rp. 1.771.221.339. hal ini mengakibatkan adanya 2 sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan kegiatan telah diseuai jadwal dengan rencana anggaran kas.

Upaya yang dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor – faktor penghambat tersebut antara lain:

a. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
b. Dalam penyusunan jadwal kegiatan perlu memperhatikan faktor eksternal;
c. Perlu melakukan langkah – langkah koordinatif dan strategis dalam optimalisasi pagu anggaran agar dapat mendanai pencapaian target – target kinerja secara maksimal;
d. Dilakukan evaluasi setiap triwulan agar rencana yang dilakukan dapat dievaluasi secara berkala agar mencapai target yang ditentukan.
e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam internal BPBD

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangakat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

PEMERINTAH KOTA BONTANG

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN APBD KOTA BONTANG

TAHUN ANGGARAN 2025

(Periode : Triwulan I s/d Triwulan IV)

Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Prediksi		Catatan			
									Murni				Perubahan												
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
					Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (BPBD)	Persen	12.759.287.133,00	0,00	100,00	100,00	2.303.033.703,00	20,68	2.906.850.699,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	Persen	4.733.055,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4.733.055,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	8.500.580.303,00	0,00	100,00	100,00	1.953.763.884,00	25,34	2.142.465.734,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	8.500.580.303,00	0,00	48,00	48,00	1.953.763.884,00	48,00	2.142.465.734,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persen	1.139.328.224,00	0,00	100,00	100,00	110.428.612,00	9,69	97.976.128,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9.696.068,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	SR	ST				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	274.380.131,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4.114.800,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	SR	ST				

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	121.442.090,00	0,00	1,00	1,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	26.246.395,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	707.563.540,00	0,00	60,00	60,00	109.883.612,00	15,40	93.861.328,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	1.627.221.668,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	481.900.000,00	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	525.360.000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	481.900.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	SR	ST				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	923.696.500,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	38.205.168,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	139.960.000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	SR	ST				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	472.903.840,00	0,00	100,00	100,00	97.566.337,00	20,00	57.718.063,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5.000.000,00	0,00	1,00	1,00	5.000.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	SR	ST				

Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat		Catatan			
									Murni				Perubahan												
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
					Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	189.600.000,00	0,00	12,00	12,00	27.442.301,00	12,00	26.668.059,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	278.303.840,00	0,00	12,00	12,00	65.124.036,00	12,00	31.050.004,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Persen	1.014.520.043,00	0,00	100,00	100,00	141.274.870,00	23,83	126.790.774,00	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	951.630.043,00	0,00	54,00	54,00	141.274.870,00	54,00	126.790.774,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	62.890.000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase pemenuhan SPM bidang penanggulangan bencana	Persen	2.623.571.970,00	0,00	100,00	100,00	10.744.500,00	5,00	232.063.600,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	623.545.534,00	0,00	100,00	100,00	5.914.500,00	12,97	87.415.700,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	SR	SR				

Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Prediksi at		Catatan			
									Murni				Perubahan												
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
					Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	623.545.534,00	0,00	380,00	380,00	5.914.500,00	20,00	87.415.700,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	SR	R				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	1.300.982.853,00	0,00	100,00	100,00	0,00	10,00	128.816.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	80.286.330,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	260.767.211,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	243.872.997,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	71.228.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	SR	ST				

Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Prediksi at		Catatan			
									Murni				Perubahan												
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
					Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasankawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	116.411.608,00	0,00	10,00	10,00	0,00	1,00	27.981.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	10.790.000,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR	Sub. Kegiatan Mengalami Refocusing Anggaran Sehingga tidak dilaksanakan	Sub. Kegiatan Mengalami Refocusing Anggaran Sehingga tidak dilaksanakan	Sub. Kegiatan Mengalami Refocusing Anggaran Sehingga tidak dilaksanakan	Sub. Kegiatan Mengalami Refocusing Anggaran Sehingga tidak dilaksanakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	83.127.550,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	245.377.705,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	29.607.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	SR	ST				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	260.349.452,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	534.198.805,00	0,00	100,00	100,00	4.830.000,00	4,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	SR	SR				

Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Prediksi		Catatan			
									Murni				Perubahan												
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
					Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	96.879.805,00	0,00	100,00	100,00	4.830.000,00	4,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	437.319.000,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	SR	ST				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tingkat penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persen	164.844.778,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	15.831.400,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	56.093.210,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	15.831.400,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	106.861.568,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	SR	SR				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	1.890.000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR				

Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

1. Realisasi anggaran BPBD Kota Bontang hingga Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 5.452.692.502,00 Usulan untuk perubahan anggaran tahun 2025 sebagai berikut:
    a. Penambahan anggaran publikasi media online sebesar Rp. 125.000.000 dengan proyeksi penambahan anggaran penanyangan berita kebencanaan melalui media online.
    b. Pembagunan Pos Jaga, degan adanya pos jaga yang representatif diharapkan mampu menunjang pelaksanaan kesiapsiagaan petugas dalam penanggulangan bencana. Anggaran pendanaan ini menggunakan efisiensi dan efektifitas dari objek pekerjaan yang kurang menunjang pelaksanaan kesiapsiagaan dialihkan ke pembangunan Pos jaga/Pos siaga petugas.
    c. Penambahan petugas driver guna mendukung pelaksanaan tugas penanggulangan bencana dengan sistem outsorsing. Pendanaan untuk mendukung hal ini dialihkan dari anggaran honarium petugas kebencanaan yang telah diangkat menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perpangajangan Kontrak (PPPK)
2. Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

    Penanggulangan bencana merupakan sebuah isu yang tetap sentral ke depannya di Kota Bontang, hal ini mempertimbangkan letak geografis Kota Bontang yang cenderung rawan akan bencana banjir khususnya. Letak geografis Kota Bontang yang berada di pesisir laut dan dialiri oleh beberapa DAS yang hulunya melewati tengah kota hal ini menyebabkan Kota Bontang rentan akan bencana banjir. Kota Bontang juga berada dilikar garis equator memiliki iklim yang cenderung basah dan sangat kering sehingga karena konsentrasi awan memicu cuaca ekstrim dan ditambah lagi dengan perubahan iklim sehingga Kota Bontang juga rentan akan bencana hidrometeorologi. Kota Bontang yang berada di pesisir memiliki masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan pun sangat rentan dengan potensi kejadian di peraiaran laut. Hal lain Kota Bontang sebagai kota industri juga memiliki potensi bencana kegagalan teknologi. Selain itu ada di beberapa wilayah memiliki potensi rawan longsor.

    Oleh karena itu sudah semestinya setiap unsur dalam lapisan masyarakat menyadari akan hal ini dan bergerak bersama dalam konsep Pentahelix (Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Media Massa) untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya-upaya penanggulangan bencana dengan prioritas akan Pengurangan Risiko Bencana dalam dimensi Pembangunan Berkelanjutan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang. Adapun program dan kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah diuraikan sebagai berikut:

Dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan target, sasaran, input, output, hasil yang akan dicapai telah tergambar dengan jelas dan terukur serta penanggung jawab dan pelaksana kegiatan tersebut.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**15.767.943.513,00**	**17.154.080.442,00**	**15.507.859.103,00**	**-260.084.410,00**							**14.245.873.897,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.767.943.513,00**	**17.154.080.442,00**	**15.507.859.103,00**	**-260.084.410,00**							**14.245.873.897,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**15.767.943.513,00**	**17.154.080.442,00**	**15.507.859.103,00**	**-260.084.410,00**							**14.245.873.897,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**				**100 persen**	**100 persen**	**12.116.261.773,00**	**12.949.122.435,00**	**12.832.869.426,00**	**-3.146.882.452,00**							**8.969.379.321,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu*				100 persen	100 persen	4.733.055,00	4.733.055,00	4.733.055,00	0,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		135.429.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.733.055,00	4.733.055,00	4.733.055,00	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			135.429.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	7.945.145.891,00	8.500.580.303,00	8.500.580.303,00	555.434.412,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		4.114.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	47 Orang/bulan	7.945.145.891,00	8.500.580.303,00	8.500.580.303,00	555.434.412,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			4.114.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran*				100 persen	100 persen	1.108.287.589,00	1.329.163.526,00	1.156.159.636,00	47.872.047,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		678.324.691,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.696.068,00	9.696.068,00	9.696.068,00	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			10.402.271,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	127.132.249,00	300.210.903,00	397.179.083,00	270.046.834,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			43.923.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	148.122.090,00	121.442.090,00	121.442.090,00	-26.680.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			248.897.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	106.107.182,00	39.637.465,00	26.246.395,00	-79.860.787,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			111.564.420,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	717.230.000,00	858.177.000,00	601.596.000,00	-115.634.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			263.538.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*				100 persen	100 persen	1.539.700.214,00	1.627.221.668,00	1.879.201.668,00	339.501.454,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.548.225.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	660.917.000,00	525.360.000,00	525.360.000,00	-135.557.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			660.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	698.928.046,00	923.696.500,00	923.696.500,00	224.768.454,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	39.895.168,00	38.205.168,00	38.205.168,00	-1.690.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			73.205.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	139.960.000,00	139.960.000,00	391.940.000,00	251.980.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			115.020.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*				100 persen	100 persen	471.042.820,00	472.903.840,00	368.192.140,00	-102.850.680,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.334.966.380,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			7.466.910,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	188.890.000,00	189.600.000,00	146.500.000,00	-42.390.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			170.860.470,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	277.152.820,00	278.303.840,00	216.692.140,00	-60.460.680,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			1.156.639.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	1.047.352.204,00	1.014.520.043,00	924.002.624,00	-123.349.580,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.158.434.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				54 Unit	54 Unit	984.462.204,00	951.630.043,00	912.712.624,00	-71.749.580,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			1.083.434.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	62.890.000,00	62.890.000,00	11.290.000,00	-51.600.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan**				**100 persen**	**100 persen**	**3.651.681.740,00**	**4.204.958.007,00**	**2.674.989.677,00**	**1.624.812.836,00**							**5.276.494.576,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana*				100 persen	100 persen	210.361.262,00	687.101.534,00	747.776.407,00	537.415.145,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		67.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				380 Orang	380 Orang	210.361.262,00	687.101.534,00	747.776.407,00	537.415.145,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			67.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*				15 persen	15 persen	2.529.224.300,00	2.540.316.635,00	1.239.492.157,00	-1.289.732.143,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		3.221.475.243,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	73.486.330,00	80.286.330,00	80.286.330,00	6.800.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.				903.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				1 Unit	1 Unit	350.660.786,00	260.767.211,00	250.356.587,00	-100.304.199,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.				366.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	384.413.047,00	339.520.347,00	243.872.997,00	-140.540.050,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.				36.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				10 Kawasan	10 Kawasan	175.860.608,00	208.502.608,00	116.411.608,00	-59.449.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.				872.925.243,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				52 Orang	52 Orang	804.544.000,00	576.715.000,00	0,00	-804.544.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan				0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	153.927.800,00	118.797.550,00	42.925.750,00	-111.002.050,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			366.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	548.591.729,00	473.164.137,00	245.377.705,00	-303.214.024,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				15 Kawasan	15 Kawasan	37.740.000,00	482.563.452,00	260.261.180,00	222.521.180,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			175.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*				100 persen	100 persen	576.970.328,00	581.660.060,00	524.766.335,00	-52.203.993,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.344.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100 Orang	265.648.073,00	124.829.805,00	87.447.335,00	-178.200.738,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			1.344.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal				5 Dokumen	5 Dokumen	23.051.255,00	19.511.255,00	0,00	-23.051.255,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				51 Orang	51 Orang	288.271.000,00	437.319.000,00	437.319.000,00	149.048.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Tingkat layanan pemenuhan sistem dasar penanggulangan bencana*				100 persen	100 persen	335.125.850,00	395.879.778,00	162.954.778,00	-172.171.072,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		643.719.333,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				3 Dokumen	3 Dokumen	48.350.850,00	56.093.210,00	56.093.210,00	7.742.360,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				8 Dokumen	8 Dokumen	20.670.000,00	112.757.568,00	106.861.568,00	86.191.568,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			243.719.333,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				30 Orang	30 Orang	266.105.000,00	227.029.000,00	0,00	-266.105.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H								**15.767.943.513,00**	**17.154.080.442,00**	**15.507.859.103,00**	**-260.084.410,00**							**14.245.873.897,00**	

VII. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang, maka setiap tahunnya perlu disusun Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi "Renja OPD adalah merupakan penjabaran dari Renstra-OPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya".

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD definitif.Dalam prosesnya, penyusunan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Untuk itu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, diperlukan tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara sistematis, sinergis dan komprehensif yang mengarah pada pencapaian visi dan misi pemerintah kota Bontang.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sesuai dengan Pasal 7 Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja

OPD Perubahan adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dengan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan. Rencana kerja OPD Perubahan memuat pendanaan dan prakiraan maju dengan memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Disahkannya Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Merupakan sebuah terobosan baru dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan, masyarakat diberikan kesempatan lebih dalam mengusulkan aspirasinya. Serta proses pelaksanaan musrenbang yang tertata dan terstruktur, sehingga proses penyaringan aspirasi serta hasil skala prioritas usulan yang dibawa dalam musrenbang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Adapun tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

I.2. Landasan Hukum

a) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
i) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Keuangan Daerah;
j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

k) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;

l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

m) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

o) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2009 tentang organisasi Dinas daerah

p) Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

q) Peraturan Walikota Bontang No.39 tahun 2016 tentang Tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

s) Peraturan Wali Kota Bontang No. 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

t) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor.14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045.

II. 3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :

Menjadi acuan dalam menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan sinergitas dalam proses perencanaan program/kegiatan, serta indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD, Renstra dan RPJMD. Serta mewujudkan perencanaan program/kegiatan yang dilaksanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang yang terstruktur, terintegrasi dan mendukung pencapaian visi/misi RPJMD dan OPD.

II. 4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Hasil Renja PD , Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun berjalan dan capaian Renstra, Isu – isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi

Bab III Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025, Bab ini terdiri dari Tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan, Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang

Bab V Penutup, Bab ini Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2025 setelah pergeseran mendahului perubahan sebesar Rp 56,774,685,901,00 dengan 2 (Dua) Program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 32 (Tujuh Puluh Dua) Sub Kegiatan, Adapun capaian realisasi keuangan per 30 Juni 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Target dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Semester 1 Tahun 2025

Pagu Anggaran	**Realisasi**					
	Keuangan				**Fisik**	
	Target		**Realisasi**		**Target**	**Realisasi**
(Rp.)	*(Rp.)*	*(%)*	*(Rp.)*	*(%)*	*(%)*	*(%)*
56,774,685,901	46,779,823,196	**82.40**	34,827,523,859	61,34	84,52	66,92

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bulan Juni Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut diatas, Realisasi keuangan sampai dengan semester pertama 61,34 % atau Rp. 34,827,523,859 dari Total Anggaran Rp. 56,774,685,901 Adapun target realisasi keuangan pada semester I adalah **82,40** %. Yang meliputi realisasi belanja sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 24.042.094.409,00 atau sebesar 53,82%
2. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 10.785.429.450,00 atau sebesar 89,08%

Capaian pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat disampaikan pada tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Anggaran Efesiensi 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III & IV				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023 + 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun %	Unit P Da Pena Ja
					I		II							
3	4	7			8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100%	
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB KEBAKARAN		**100**	**%**	**56.774.685.901**	**19,52** **-%**	**11.497.737.115**	**41,09** **-%**	**23.329.786.744**	**61,34**	**34.827.523.859**				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (DPKP)**	**100**	**%**	**36.219.148.208**	**22,26** **%**	**8.204.102.219**	**23,25** **-%**	**8.419.713.745**		**16.623.815.964**				
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**9.074.706**						-				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	310.980						-				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.179.080						-				
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	7.584.646						-				
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**21.889.335.903**	**24,31** **%**	**5.320.731.062**	**100** **%**	**5.588.452.369**		**10.909.183.431**				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	Orang/ bulan	21.882.078.923	150 Orang/bulan	5.320.731.062	150 Orang/bulan	5.588.452.369		**10.909.183.431**				
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Keuangan dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	7.256.980						-				
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.817.278.561**	**0,00**	-		**245.139.000**		**245.139.000**				
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	282	Paket	1.817.278.561			60 Paket	245.139.000		**245.139.000**				
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.310.275.898**	**16,09**	**309.092.074**	**1.195**	**790.703.309**		**1.099.795.383**				
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	4	Paket	673.233.725	1 Paket	33.383.000	1 Paket	591.118.300		**624.501.300**				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	180.704.383		96.235.000		26.140.000		**122.375.000**				
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	35.210.790				32.947.200		**32.947.200**				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	421.127.000	1 Laporan	179.474.074	1 Laporan	140.497.809		**319.971.883**				

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara**	**100**	**%**	**931.643.540**	**0,00**	**%**	-	-	**%**	**25.700.000**		**25.700.000**		
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3	Unit	905.630.000								-		
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel Yang Disediakan	8	Unit	26.013.540				8	Unit	25.700.000		**25.700.000**		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan**	**100**	**%**	**8.022.099.600**	**25,85**	**%**	**2.073.937.143**	**1.706**	**%**	**1.214.893.735**		**3.288.830.878**		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	7.600.000								-		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	341.000.000	3	Laporan	61.687.902	3	Laporan	67.548.643		**129.236.545**		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	7.673.499.600	1	Laporan	2.012.249.241	1	Laporan	1.147.345.092		**3.159.594.333**		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**100**	**%**	**2.239.440.000**	**22,34**	**%**	**500.341.940**	**100**	**%**	**554.825.332**		**1.055.167.272**		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	71	Unit	1.455.629.200	71	Unit	300.093.600	71	Unit	341.557.983		**641.651.583**		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	Unit	51.600.000	9	Unit	5.639.040	9	Unit	18.970.496		**24.609.536**		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	638.270.800	1	Unit	184.857.950	1	Unit	185.716.553		**370.574.503**		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	125	Unit	93.940.000	9	unit	9.751.350	9	unit	8.580.300		**18.331.650**		

PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Persentase Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100**	**%**	**20.555.537.693**	**100**	**%**	**3.293.634.896**	**100**	**%**	**14.910.072.999**		**18.203.707.895**		
Kegiatan Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100**	**%**	**12.511.623.804**	**1,82**	**%**	**249.474.040**	**100**	**%**	**11.136.695.771**		**11.386.169.811**		
Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4	Dokumen	99.940								-		
Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	782.080.081	3	Laporan	44.852.540	3	Laporan	398.199.460		**443.052.000**		
Sub Kegiatan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12	Dokumen	524.059.719			-			72.328.915		**72.328.915**		
Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	16.416.550								-		
Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasana PencegahanPenanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasana PencegahanPenanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun)Sah dan Legal	2	Dokumen	78.069.800				1	Dokumen	38.912.946		**38.912.946**		
Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pekindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	105	Orang	590.175.000				33	orang	486.278.340		**486.278.340**		
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau	15	Desa/Keluaran	96.266								-		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pekindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	381	Unit	10.520.626.448	100	unit	204.621.500	281	unit	10.140.976.110		**10.345.597.610**		

Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Persentase Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran yang Dinilai Sesuai Standar**	**100**	**%**	**87.871.785**	**0,00**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**-**			
Sub Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	Dokumen	33.216.475								**-**			
Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	1	Dokumen	54.655.310								**-**			
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	**Persentase Layanan Pemadaman Kebakaran dalam Tingkat Waktu Tanggap oleh Relawan Kebakaran**	**100**	**%**	**7.956.042.104**	**37,13**	**%**	**3.044.160.856**		**%**	**3.773.377.228**		**6.817.538.084**			
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2.000	Orang	7.604.170.569	1.500	Orang	3.036.443.656	500	Orang	3.517.627.228		**6.554.070.884**			
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran Pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	15	Desa/Keluaran	313.007.200			7.717.200			255.750.000		**263.467.200**			
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1	Dokumen	38.864.335								**-**			
jumlah capaian kinerja				**56.774.685.901**			**11.497.737.115**			**23.329.786.744**		**34.827.523.859**			
capaian Keuanagan (%)							**20**								
capaian kinerja(%)												**-**			

Sumber : Evaluasi Renja Triwulan 2 Tahun 2025

II. 2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk menganalisa masalah berdasarkan tugas dan Fungsi yang ada Pada Dinas Pemadama Kebakaran dan Penyelamatan dengan menggunakan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dengan memperhatikan Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi warga kota. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin kompleks, peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang sebagai perangkat daerah yang termasuk dalam urusan ketentraman dan keamanan bagi penduduk Kota Bontang wajib mengayomi dan melayani masyarakat yang memiliki hak untuk dapat perlindungan.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, Isu strategi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Dalam upaya meningkatkan fungsi dan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota, maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dalam menyusun kebijakan, isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang yang diangkat dalam peraturan , yaitu :

1. Mengoptimalkan layanan Respon Cepat (Respon Time) Penanggulangan kejadian kebakaran;
2. Pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
3. Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi;
4. Pemberdayaan masyarakat / relawan kebakaran; dan
5. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
6. Penguatan Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Pemadam Kebakaran
   a. Diperlukan peningkatan kapasitas, kompetensi, dan jumlah personel untuk mewujudkan pelayanan damkar yang profesional dan tangguh.
   b. Perlunya pelatihan rutin, sertifikasi keahlian dan peningkatan profesionalisme.
7. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Modernisasi dan penambahan armada serta perlengkapan pemadam kebakaran untuk mendukung operasi di berbagai medan dan jenis kebakaran. (APD, alat penyelamatan di ketinggian)

8. Peningkatan Jangkauan dan Akses Layanan Perluasan jaringan pos damkar agar lebih dekat dengan masyarakat dan mampu menjangkau wilayah rawan secara cepat.
9. Penguatan Sistem Pencegahan Kebakaran Perlu pendekatan preventif yang lebih kuat melalui edukasi, inspeksi rutin bangunan, serta penerapan sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif.
10. Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi Lintas Sektor Isu kebakaran dan penyelamatan bersifat lintas sektor, sehingga diperlukan sinergi dengan BPBD, dinas perhubungan, kepolisian, rumah sakit, dan lembaga lain.
11. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Komando Insiden Untuk meningkatkan respons cepat dan akurat, perlu pengembangan sistem informasi pemadam kebakaran berbasis digital dan sistem komando terpadu saat tanggap darurat. (Sistem GIS Kebakaran)

Tabel 2. 3

Pemetaan Permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	Belum Tercapainya Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Layanan Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	**Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Belum Memadai**	Kurangnya Jumlah Pos Pemadam Kebakaran
			Kurangnya Armada Kendaraan Operasional
			Kurangnya Peralatan Dan Perlengkapan
			Alat Komunikasi Kurang Memadai
			Kurangnya Kuantitas Alat Perlindungan Diri (Apd)
			Belum Adanya Aplikasi Yang Mendukung
			Belum Tersedianya Alat-Alat Pengujian
			Kurangnya Sumber Air/Pasokan Air Bagi Armada Pemadaman
			Kurangnya Alat Investigasi

		Kurang Optimalnya Pengawasan Dan Pengendalian	Belum Adanya Regulasi Pengawasan Dan Pengendalian
			Kurangnya Kompetensi Pengujian
			Kurangnya Kompetensi Evakuasi
			Belum Optimalnya Balakar
			Kurangnya Sosialisasi Pada Masyarakat, Tingkat Smp Sma Dan Lingkungan Perangkat Daerah
		Terhambatnya Menuju Lokasi Kebakaran	Tidak Akurasinya Laporan Lokasi Kejadian Kebakaran
			Lebar Jalan Yang Kurang Memadai
			Belum Adanya Sistem Terpadu Tanggap Darurat
		Kurangnya Personil Yang Memenuhi Kualisifikasi	Kurangnya Diklat Internal
			Kurangnya Diklat Eksternal

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kementrian Dalam Negeri

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan di akselerasikan dengan Renstra Kemendagri tahun 2025-2029 tentang arah kebijakan dan strategi kementerian dalam negeri pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri 2025- 2029 yang sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, kementerian dalam negeri telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah melalui peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 program dan 75 kegiatan, salah satunya program yang berkaitan dengan bahaya kebakaran yaitu program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program untuk meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerja sama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan, dan batas antar negara; serta meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi tekhnis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun indikator kegiatan program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yaitu:

1. Presentase kinerja peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah.
3. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah.
4. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
5. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).
6. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, pemadam kebakaran merupakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum

serta perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan sub urusan kebakaran, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, kebakaran dalam daerah kabupaten/kota inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Jika dilihat dari jenisnya, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan termasuk dalam pelayanan jasa yang dibutuhkan publik. Pelayanan yang di sediakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari pelayanan pemadaman kebakaran, pelayanan penyelamatan, pelayanan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan proteksi bangunan gedung. Meningkatnya berbagai pelayanan tersebut akan berdampak pada bertambahnya tugas pokok dan fungsi serta peningkatan status kelembagaan di masa mendatang. Dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang, antara lain:

1. Adanya wilayah pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran;
2. Adanya pendidikan dan pelatihan aparatur pemadam kebakaran;
3. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten.

Berdasarkan analisis keterkaitan dengan perencanaan lain dan peraturan yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemadam kebakaran terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

III. 2. Sasaran Dan Prioritas Renja Tahun 2025

Pada bagian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan Kota Bontang memiliki satu tujuan yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penanganan kebakaran, penyelamatan dan non kebakaran. Satu Indikator tujuan adalah Persentase waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Sasaran dari tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Meningkatnya pelayanan pemadaman, Penyelamatan kebakaran dan non kebakaran. Indikator kinerja sasaran adalah Tingkat pengaduan masyarakat Terhadap layanan Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan non kebakaran yang tertangani.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA KE					TARGET AKHIR RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penanganan kebakaran, penyelamatan dan non kebakaran.	Indeks Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan	1. Tingkat Pelayanan Pemadaman Kebakaran dengan Waktu tanggap(reponse time Rate) Daerah layanan Wilayah Manejemen Kebakaran (WMK)	Persentase Pelayanan terhadap Korban Kebakaran	PERSEN (%)	100	100	100	100	100	100
			2.Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kejadian kebakaran dan non kebakaran	Tingkat layanan terhadap peristiwa yang menimpa, membahayakan dan atau mengancam keselamatan manuasia.	PERSEN (%)	100	100	100	100	100	100

Tujuan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan Kota Bontang yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran”. Peningkatan kualitas pencegahan dan penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dan penyelamatan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan, sehingga menurunnya jumlah kerugian dan korban jiwa akibat kebakaran dan bahaya lainnya sesuai dengan tugas yang harus diemban oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan Kota Bontang dalam pemahaman masyarakat, terhadap tindakan preventif yang dapat dilakukan pada saat kejadian kebakaran atau bahaya yang mengancam keselamatan manusia lainnya.

Ukuran yang digunakan dalam menilai kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merujuk kepada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2018, yang tertuang pada halaman 16 hurup e. (Teknis Penghitungan Pencapaian SPM). Sebagai berikut:

Teknis penghitungan capaian SPM sub urusan kebakaran dilihat dari dua indikator, yaitu indikator utama layanan SPM dan indikator penunjang layanan capaian SPM. Secara kuantitatif teknis perhitungan dituliskan sebagai berikut:

1. Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran
    a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan
        i. Rumus :

            Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan/Perangkat daerah

_____x 100 %

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X

ii. Pembilang :

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Penyelamatan/Perangkat daerah.

iii. Penyebut :

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X.

iv. Satuan Indikator Persentase (%).

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Tabel 4.1 Pagu Anggaran pada Sub Kegiatan pada Perubahan Renja 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BONTANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PERUBAHAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							38.688.567.940,00	58.916.890.970,00	57.374.584.495,00	18.686.016.555,00							63.669.961.262,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							38.688.567.940,00	58.916.890.970,00	57.374.584.495,00	18.686.016.555,00							63.669.961.262,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							38.688.567.940,00	58.916.890.970,00	57.374.584.495,00	18.686.016.555,00							63.669.961.262,00	
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DPKP)				-	100 Persen	31.611.041.341,00	38.847.755.844,00	39.819.046.802,00	7.410.558.659,00							59.022.500.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah Kabupaten/Kota				-	100 Persen	101.840.634,00	20.281.130,00	9.074.706,00	-92.774.028,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		23.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen (DPA, SKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	9.923.230,00	9.254.900,00	310.900,00	9.012.330,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen (RKA-SKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	30.066.296,00	2.423.000,00	1.179.000,00	28.887.166,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	61.040.150,00	9.003.230,00	7.564.646,00	54.255.512,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah					100 Persen	19.590.313.677,00	21.990.713.023,00	21.699.335.903,00	2.291.022.226,00				-			23.010.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				142 Orang/ Index	141 Orang/ Index	19.040.043.739,00	21.962.070.923,00	21.662.070.923,00	2.330.220.184,00	Kota Bontang, Rondang Dayo, Bontang Kuala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN PENDANAAN ALAIN PERUBAHAN PENGALIHAN PEMERINTAH PUSAT PERJANJIAN KERJA		-			23.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	52.889.930,00	8.854.900,00	7.298.980,00	-45.212.958,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				-	100 Persen	134.582.200,00	1.821.170.761,00	2.231.230.981,00	2.096.648.781,00			-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemerataan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemerataan prasarana infrastruktur dasar	-		1.900.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	282 Paket	134.582.200,00	1.821.170.761,00	2.231.230.981,00	2.096.648.781,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemerataan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemerataan prasarana infrastruktur dasar			1.900.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.06.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				-	100 Persen	1.661.826.466,00	1.920.810.980,00	1.467.290.972,00	-179.656.194,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		2.400.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.06.01.2.08.0032	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	287.707.107,00	714.126.460,00	845.188.099,00	557.480.992,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			900.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	282.336.076,00	205.478.270,00	180.704.383,00	-101.631.693,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	182.064.263,00	78.477.270,00	35.210.790,00	-146.853.493,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	909.718.000,00	922.429.000,00	421.127.000,00	-488.591.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			1.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan*				-	100 Persen	774.172.612,00	931.643.540,00	945.635.760,00	171.463.148,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		850.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	752.400.000,00	905.630.000,00	905.630.000,00	153.230.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			800.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	8 Unit	21.772.612,00	26.013.540,00	40.005.760,00	18.233.148,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan*				-	100 Persen	7.595.727.452,00	8.023.999.600,00	8.022.099.600,00	426.372.148,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		8.109.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9.500.000,00	9.500.000,00	7.600.000,00	-1.900.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			9.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	341.000.000,00	341.000.000,00	341.000.000,00	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			400.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				143 Laporan	143 Laporan	7.245.227.452,00	7.673.499.600,00	7.673.499.600,00	428.272.148,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			7.700.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*PPersentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*				-	100 Persen	1.745.470.300,00	2.239.440.000,00	2.239.440.000,00	493.969.700,00			-	- -	-		2.730.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	71 Unit	1.377.640.000,00	1.455.629.200,00	1.455.629.200,00	77.989.200,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	56 Unit	49.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	2.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	- -			60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				31 Unit	4 Unit	156.000.000,00	638.270.800,00	636.270.800,00	482.270.800,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastruktur dasar.			1.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				31 Unit	125 Unit	162.230.300,00	93.940.000,00	93.940.000,00	-68.290.300,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			170.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Capaian layanan Pemadaman , Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**				-	**100 Persen**	**7.076.626.599,00**	**22.068.931.128,00**	**20.555.637.693,00**	**17.570.834.663,00**							**24.647.461.262,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase layanan pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan*				-	100 Persen	2.904.786.249,00	13.743.238.354,00	12.511.623.804,00	9.606.837.555,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		13.467.461.262,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	4 Dokumen	99.940,00	6.799.940,00	99.940,00	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			6.799.940,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	938.501.404,00	1.017.966.081,00	782.080.081,00	-156.421.323,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			950.661.322,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	12 Dokumen	672.310.388,00	770.649.719,00	524.059.719,00	-148.250.669,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			680.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	17.225.810,00	32.833.100,00	16.416.550,00	-809.260,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun). Sah, dan Legal				1 Dokumen	1 Dokumen	162.783.256,00	138.351.800,00	78.069.800,00	-84.713.456,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				30 Orang	105 Orang	589.222.000,00	1.139.649.000,00	590.175.000,00	953.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			610.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	96.266,00	6.796.266,00	96.266,00	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				4 Unit	381 Unit	524.547.185,00	10.630.192.448,00	10.520.626.448,00	9.996.079.263,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			11.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Persentase sarana & prasarana proteksi kebakaran yg dinilai sesuai standar*				-	100 Persen	111.272.490,00	127.108.785,00	87.671.785,00	-23.400.705,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		130.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	19.970.160,00	33.216.475,00	33.216.475,00	13.246.295,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	91.302.310,00	93.892.310,00	54.655.310,00	-36.647.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Persentase layanan pemadaman kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran*				-	100 Persen	4.060.567.660,00	8.196.583.967,00	7.956.042.104,00	3.895.474.244,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-		11.050.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				750 Orang	2000 Orang	700.258.125,00	7.702.792.369,00	7.604.170.569,00	6.903.912.444,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			10.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				5 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	3.125.734.000,00	446.226.263,00	313.007.200,00	-2.812.726.800,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			1.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	334.575.735,00	49.565.335,00	38.564.335,00	-195.711.400,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	JUMLAH								**38.688.567.940,00**	**58.916.690.970,00**	**57.374.584.495,00**	**18.686.016.555,00**							**63.669.961.262,00**	

IX. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rancangan Renja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang memuat rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah khususnya Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, rencana kinerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang menyusun Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2025 yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rancangan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang mengacu pada beberapa regulasi sebagai berikut:

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
c. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
d. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
n. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
o. Peraturan Daerah Wali Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2016-2026;
p. Peraturan Daerah Wali Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
q. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2025 adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2025 dan sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2025 adalah untuk memasukkan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Rancangan Renja 2025 ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA_PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2025 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rancangan Renja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, fungsi Rancangan Renja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rancangan Renja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, keterkaitan Rancangan Renja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dengan RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Perubahan Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Renja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BONTANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

Memuat kajian *(review)* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu ada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan Renja

Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Sttandar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerj Kunci (IKK).

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan DSPM, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi, misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

3.2 Tujuan dan sasaran Rancangan Renja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

Berisi tujuan dan sasaran yang didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BONTANG

BAB V PENUTUP

Berisi uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BONTANG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum, tigas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kota Bontang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah disusun program dan kegiatan strategis untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis DSPM Tahun 2021-2026.

Alokasi anggaran belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang sesuai Perubahan Dokumen Pelarksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (DPPA) 2025 yang terdiri dari:

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Triwulan II Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Operasi			
	a. Belanja Pegawai	10.551.269.511,00	4.905.994.033,00	46,49
	b. Belanja Barang dan Jasa	11.966.945.674,00	3.833.830.005,00	32,45
	c. Belanja Hibah	790.000.000,00	40.000.000,00	5,06
	d. Belanja Bantuan Sosial	1.260.000.000,00	378.234.000,00	30,01
2	Belanja Modal			
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.353.362.379,00	568.630.800,00	42,01
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.220.000,00	00,00	0,00
Jumlah		**25.957.797.564,00**	**24.779.637.783,00**	**94.15**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2021-2026, dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang pada tahun 2025

melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 63 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2024 (Tahun Berjalan) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)x100%	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)x100%
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1**	**100**	**300**	**3**
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	**-**		**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**#DIV/0!**
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	49	36	32	32	1	49	117	2,39
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**-**	**2**	0	**2**	**2**	1		2	1
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	130	0	130	**130**	1	130	260	2
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	25	8	25	**25**	1	25	58	2,32
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**-**	**2**	**2**	**6**	**6**	1		8	4
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	15	9	**9**	1	9	33	3,67
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	5	6	**6**	1	6	17	2,83
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	5	4	5	**5**	1	5	14	2,8

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)x100%	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)x100%
						Penggandaan yang Disediakan									
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	125	71	125	**125**	1	125	321	2,57
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	**-**	**2**	**0**	**1**	**1**	1		1	0,5
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	**0**	2	**2**	1	2	4	2
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**-**	**2**	**0**	**3**	**3**	1		3	1,5
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	8	10	**10**	1	20	38	1,9
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	**12**	1	12	36	3
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	64	12	64	**64**	1	64	140	2,19
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**-**	**2**	**2**	**4**	**4**	1		6	3
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	32	37	**37**	1	38	107	2,82

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)x100%	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)x100%
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	2	21	**21**	1	23	46	2
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2		2	**2**	1	2	4	2
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	-	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	1		200	2
1	**06**	**02**	**2.02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	**-**	**2**	**0**	**1**	**1**	1		1	0,5
1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	12	0	12	**12**	1	12	24	2
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	-	**-**	**2**	**2**	**4**	**4**	1		6	3
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	63	65	63	**63**	1	63	191	3,03
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	3	4	**4**	1	4	11	2,75
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	5	4	0	**0**	#DIV/0!	5	9	1,8

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)x100%	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)x100%
					Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota										
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	35	0	30	**30**	1	35	65	1,86
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	133	119	133	**133**	1	133	385	2,89
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	-	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	1		200	2
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	-	**-**	**199**	**100**	**7**	**7**	1		107	0,54
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	88	4	**4**	1	100	192	1,92
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2		2	**2**	1	2	4	2
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu	Orang	5	84	8	**8**	1	5	97	19,4

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)x100%	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)x100%
						Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota									
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	17	30	**30**	1	30	77	2,57
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	8	12	**12**	1	10	30	3
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7		5	**5**	1	7	12	1,71
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5		0	**0**	#DIV/0!	5	5	1
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5		0	**0**	#DIV/0!	5	5	1

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)x100%	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)x100%
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5		0	**0**	#DIV/0!	5	5	1
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5		0	**0**	#DIV/0!	5	5	1
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5		0	**0**	#DIV/0!	5	5	1
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	12	20	**20**	1	20	52	2,6
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	-	**-**			**5**	**5**	1		5	#DIV/0!
1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5		0	**0**	#DIV/0!	5	5	1
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5		0	**0**	#DIV/0!	5	5	1
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai	Orang	15	1	15	**15**	1	15	31	2,07

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)x100%	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)x100%
						dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota									
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	4	12	**12**	1	12	28	2,33
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5		0	**0**	#DIV/0!	5	5	1,00
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	42	20	42	**42**	1	42	104	2,48
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5		5	**5**	1	5	10	2
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5		5	**5**	1	5	10	2
1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk,	Orang	5		0	**0**	#DIV/0!	5	5	1

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)x100%	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)x100%
						Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota									
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5		0	**0**	#DIV/0!	5	5	1
1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5		0	**0**	#DIV/0!	5	5	1
1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	26	35	26	**26**	1	26	87	3,35
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	15	15	**15**	1	15	45	3
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	1		0	**0**	#DIV/0!	1	1	1
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	-	**-**			**100**	**100**	1		100	#DIV/0!

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)x100%	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)x100%
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	-	**-**			**4**	**4**	1		4	#DIV/0!
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	8815	49914	8815	**8815**	1	8815	67544	7,66
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	4480	2957	4480	**4480**	1	4480	11917	2,66
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	15	2568	10	**10**	1	15	2593	172,87
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10		5	**5**	1	10	15	1,5
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	-	**-**			**100**	**100**	1		100	#DIV/0!
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	-	**-**			**4**	**4**	1		4	#DIV/0!
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	900	1000	1200	**1200**	1	900	3100	3,44
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia	Orang	400	5	450	**450**	1	400	855	2,1375

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)x100%	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)x100%
						pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota									
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100		50	**50**	1	100	150	1,5
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2		50	**50**	1	2	52	26
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	-	**-**			**1**	**1**	1		1	#DIV/0!
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1		0	**0**	#DIV/0!	1	1	1
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	32	33	33	**33**	1	32	98	3,0625
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**100**	**100**	1		100	#DIV/0!

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)x100%	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)x100%
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					**100**	**100**	1		100	#DIV/0!
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	-	**-**			**100**	**100**	1		100	#DIV/0!
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	**-**			**6**	**6**	1		6	#DIV/0!
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	4		4	**4**	1	4	8	2
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga	4	4	4	**4**	1	4	12	3

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Targer Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)/(7)x100%	(10)	(11)=(6)+(8)+(10)	(12)=(11)/(5)x100%
					Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya									
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	4	4	4	**4**	1	4	12	3
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	3	2	3	**3**	1	3	8	2,67
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1		1	**1**	1	1	2	2
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	50	1	50	**50**	1	50	101	2,02

Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025, pencapaian kegiatan dan sub kegiatan mencapai:

Tabel 2.3 Target dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2025

Pagu Anggaran	Realisasi					
	Keuangan				Fisik	
	Target		Realisasi		Target	Realisasi
(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(%)	(%)
25.957.797.564,00	17.848.216.652,00	68,90	11.848.216.652,00	45,64	69,56	59,37

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik DSPM Triwulan II Tahun 2024

Dari tablel di atas untuk realisasi keuangan ada deviasi sebesar -23,26%, hal ini ada beberapa Sub kegiatan dengan penyerapan sangat kecil. Sedangkan untuk realisasi fisik ada deviasi sebesar -13,73 %, capaian ini sudah dianggap dengan target, namun masih banyak yang harus diperbaiki dari sisi kualitas *output* dan hasil kegiatan,di antaranya:

- Keakuratan perencanaan dan penganggaran sehingga anggaran belum terserap secara optimal.
- Pemanfaatan dokumen-dokumen perencanaan dalam mendukung pencapaian target-target.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan urusan social dan pemberdayaan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut menjadi modal penting Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dalam menghadapi berbagai tugas berat dan perlu dipertahankan ke depan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang menangani satu urusan wajib pelayanan dasar, yaitu Urusan Sosial serta satu urusan wajib pelayanan non dasar yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berkewajiban memenuhi target capaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Gambaran kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dalam pencapaian target pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Table 2.5 berikut ini:

Tabel 2.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PEMBANGUNAN DI DALAM RPJMD	TARGET 2024	REALISASI 2024	2025
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Program Penanganan Bencana	100	100	100

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Nilai SAKIP			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB (96,73)	BB	BB	
2	Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					3	5	7			15,70			
3	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial			100	100	-	-	-	100	100	-			
4	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			100	100	-	-	-	100	100	-			
5	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif			100	100	-	-	-	100	100				
6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi			100	100	-	-	-	100	100	-			
7	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial			100	100	-	-	-	100	100	-			
8	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani			100	100	-	-	-	100	100				
9	Persentase Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan					100	100	100			100			
10	LMP Aktif			100	100	-	-	-	100	100	-			
11	PKK AKtif			100	100	-	-	-	100	100	-			
12	Posyandu Aktif			100	100	-	-	-	100	100	-			
13	Posyantek Aktif			100	100	-	-	-	100	100	-			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dimasa datang. Isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang meliputi:
   - Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti
   - Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
   - Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
   - Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
   - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
b. Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
c. Belum optimalnya peran/keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya kesejahteraan sosial
d. Kompleksnya permasalahan terkait Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
e. Belum optimalnya partisipasi/swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak baik terpisah dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kajian Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun 2025.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2025 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikator (Rp.)	Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikator (Rp.)
		Satuan	Capaian				Satuan	Capaian	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**Rp21.229.787.155,00**					**Rp25.604.127.805,00**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**Rp21.229.787.155,00**					**Rp25.604.127.805,00**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	**Rp15.954.951.605,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	**Rp17.005.881.605,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	**Rp60.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-	**Rp60.000.000,00**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	Rp30.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	Rp30.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp30.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp30.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	**Rp11.342.362.833,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	**Rp11.342.362.833,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	Rp11.287.362.833,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	Rp11.287.362.833,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp30.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	Rp30.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	Rp25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	0	Rp25.000.000,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikator (Rp.)**	**Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikator (Rp.)**
		Satuan	**Capaian**				**Satuan**	**Capaian**	
Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**-**	**-**	**-**	**Rp45.000.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**Rp45.000.000,00**
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	Rp25.000.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	Rp25.000.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	Rp20.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	Rp20.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**-**	**-**	**-**	**Rp177.500.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**Rp177.500.000,00**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	105	Rp97.500.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	120	Rp97.500.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	75	Rp80.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	120	Rp80.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**-**	**-**	**-**	**Rp576.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**Rp776.000.000,00**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	Rp91.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	Rp91.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	Rp60.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	Rp60.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Rp25.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	Rp25.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp400.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp600.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**-**	**-**	**-**	**Rp0,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**Rp700.000.000,00**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikator (Rp.)	Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikator (Rp.)
		Satuan	Capaian				Satuan	Capaian	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	Rp0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	16	Rp550.000.000,00
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0	Rp0,00	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0	Rp150.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	**Rp3.142.563.972,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	**Rp3.142.563.972,00**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	Rp5.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	Rp5.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Rp75.600.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Rp75.600.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Rp3.061.963.972,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Rp3.061.963.972,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	**Rp611.524.800,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	**Rp762.454.800,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	Rp513.524.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	Rp664.454.800,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	Rp38.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55	Rp38.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	Rp60.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	Rp60.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	-	**Rp1.201.525.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	-	-	-	**Rp854.510.000,00**
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	**Rp30.000.000,00**	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**Rp54.210.000,00**
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis	Dokumen	12	Rp30.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis	Dokumen	12	Rp54.210.000,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikator (Rp.)**	**Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikator (Rp.)**
		Satuan	**Capaian**				**Satuan**	**Capaian**	
Pengumpulan Uang atau Barang	Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				Pengumpulan Uang atau Barang	Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	**Rp1.171.525.000,00**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**Rp800.300.000,00**
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	Rp31.525.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	Rp58.440.000,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	Rp1.000.000.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	Rp375.000.000,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	0	Rp30.000.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	0	Rp225.000.000,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	30	Rp75.000.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	30	Rp87.000.000,00
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	50	Rp35.000.000,00	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	50	Rp54.860.000,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	-	**Rp2.822.242.350,00**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	-	-	-	**Rp4.380.268.000,00**
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	-	**Rp2.499.242.350,00**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	-	-	-	**Rp3.864.268.000,00**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikator (Rp.)	Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikator (Rp.)
		Satuan	Capaian				Satuan	Capaian	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	Rp2.076.742.350,00	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	Rp3.192.000.000,00
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	Rp22.500.000,00	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	Rp49.248.000,00
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	Rp100.000.000,00	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	Rp175.000.000,00
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13	Rp50.000.000,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13	Rp100.000.000,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33	Rp50.000.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33	Rp50.000.000,00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33	Rp35.000.000,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33	Rp50.000.000,00
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13	Rp20.000.000,00	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13	Rp20.000.000,00
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	Rp20.000.000,00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	Rp77.000.000,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikator (Rp.)**	**Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikator (Rp.)**
		Satuan	**Capaian**				**Satuan**	**Capaian**	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	280	Rp20.000.000,00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	280	Rp20.000.000,00
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	Rp20.000.000,00	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	Rp20.000.000,00
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13	Rp20.000.000,00	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13	Rp46.020.000,00
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp65.000.000,00	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp65.000.000,00
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**-**	**-**	**-**	**Rp323.000.000,00**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**-**	**-**	**-**	**Rp516.000.000,00**
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	Rp15.000.000,00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	Rp15.000.000,00
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	Rp15.000.000,00	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	Rp15.000.000,00
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp25.000.000,00	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp25.000.000,00
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp20.000.000,00	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp20.000.000,00
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan	Orang	5	Rp15.000.000,00	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan	Orang	5	Rp15.000.000,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikator (Rp.)	Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikator (Rp.)
		Satuan	Capaian				Satuan	Capaian	
	Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	42	Rp45.000.000,00	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	42	Rp45.000.000,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	Rp25.000.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	Rp62.000.000,00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	Rp25.000.000,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	Rp62.000.000,00
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	Rp15.000.000,00	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	Rp15.000.000,00
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	Rp15.000.000,00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	Rp15.000.000,00
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp15.000.000,00	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp15.000.000,00
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	26	Rp33.000.000,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	26	Rp52.000.000,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikator (Rp.)**	**Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikator (Rp.)**
		Satuan	**Capaian**				**Satuan**	**Capaian**	
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	Rp30.000.000,00	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	Rp30.000.000,00
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	12	Rp30.000.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	12	Rp130.000.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	-	**Rp714.508.000,00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	-	-	-	**Rp2.414.908.000,00**
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	**Rp714.508.000,00**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**Rp2.414.908.000,00**
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	47102	Rp250.000.000,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	47102	Rp500.000.000,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	1291	Rp200.000.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	1291	Rp200.000.000,00
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	500	Rp150.000.000,00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	500	Rp1.100.400.000,00
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	Rp114.508.000,00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	Rp614.508.000,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	-	**Rp536.560.200,00**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	-	-	-	**Rp948.560.200,00**
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	-	**Rp396.560.200,00**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	-	-	-	**Rp698.560.200,00**
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1000	Rp185.000.000,00	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1000	Rp385.000.000,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikator (Rp.)**	**Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikator (Rp.)**
		Satuan	**Capaian**				**Satuan**	**Capaian**	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp50.000.000,00	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp152.000.000,00
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75	Rp85.375.200,00	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75	Rp85.375.200,00
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp76.185.000,00	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp76.185.000,00
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**-**	**-**	**-**	**Rp140.000.000,00**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**Rp250.000.000,00**
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	0	Rp40.000.000,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	0	Rp150.000.000,00
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	Rp100.000.000,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	Rp100.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**Rp623.905.800,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**Rp2.171.400.000,00**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**Rp623.905.800,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**Rp2.171.400.000,00**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikator (Rp.)	Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikator (Rp.)
		Satuan	Capaian				Satuan	Capaian	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	-	**Rp623.905.800,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	-	-	-	**Rp2.171.400.000,00**
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	**Rp623.905.800,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**Rp2.171.400.000,00**
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	Rp20.000.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	Rp386.900.000,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	2	Rp40.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	2	Rp239.000.000,00
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	Unit	4	Rp40.000.000,00	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	Unit	4	Rp45.500.000,00

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikator (Rp.)**	**Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikator (Rp.)**
		Satuan	**Capaian**				**Satuan**	**Capaian**	
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	3	Rp150.000.000,00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	3	Rp300.000.000,00
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	Rp40.000.000,00	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	Rp350.000.000,00
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	6	Rp333.905.800,00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	6	Rp850.000.000,00
TOTAL				**Rp21.853.692.955,00**	**TOTAL**				**Rp27.775.527.805,00**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui forum Musrenbang RKPD Tahun 2025 tidak terdapat usulan yang mengarah kepada urusan sosial dan pemberdayaan Masyarakat. Arah kebijakan Pembangunan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 yang merupakan kewenangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2025 yaitu peningkatan jaminan dan rehabilitasi social Masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan Perangkat Dareah di Kabupaten/Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi yang berkaitan dengan sosial dan pemberdayaan masyarakat:

Tabel 3.1 Kebijakan Nasional/Provinsi

Strategi	Kebijakan
Urusan Sosial 1. Menguatkan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan	1. Peningkatan kualitas data kemiskinan 2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat tidak mampu 3. Pemetaan program penanggulangan kemiskinan menggunakan 1 basis data
2. Meningkatkan jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat	1. Peningkatan kualitas layanan jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat
Urusan Pemberdayaan Masyarakat 1. Meningkatkan kapasitas peran kelembagaan masyarakat	1. Memperluas akses program berbasis Masyarakat 2. Penyaluran Beras Miskin

Strategi	Kebijakan
	3. Fasilitasi Perbaikan Atap, Lantai dan Dinding Keluarga Misk

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025

Berdasarkan hasil *review* SAKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang terdapat beberapa indikator sasaran yang belum mencerminkan *level outcome*. Berdasarkan hasil review tersebut serta hasil analisis terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2025 dijelaskan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
						2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokramasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP	Nilai	BB (78,00)	A (81,00)	A (82,50)
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	3%	5%	7%
3.	Meningkatnya Peran Serta Partisipasi dan Swadaya Masyarakat/lembaga Secara Aktif dalam Proses Pembangunan	Indeks Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif	Meningkatnya Peran Serta danKeberdayaan Masyarakat/lembaga dalam Pembangunan Wilayah	LPM Aktif	Persen	100%	100%	100%

Bagan 3.1 Pohon Kinerja Dinas Sosial dan Pemebrdayaan Masyarakat

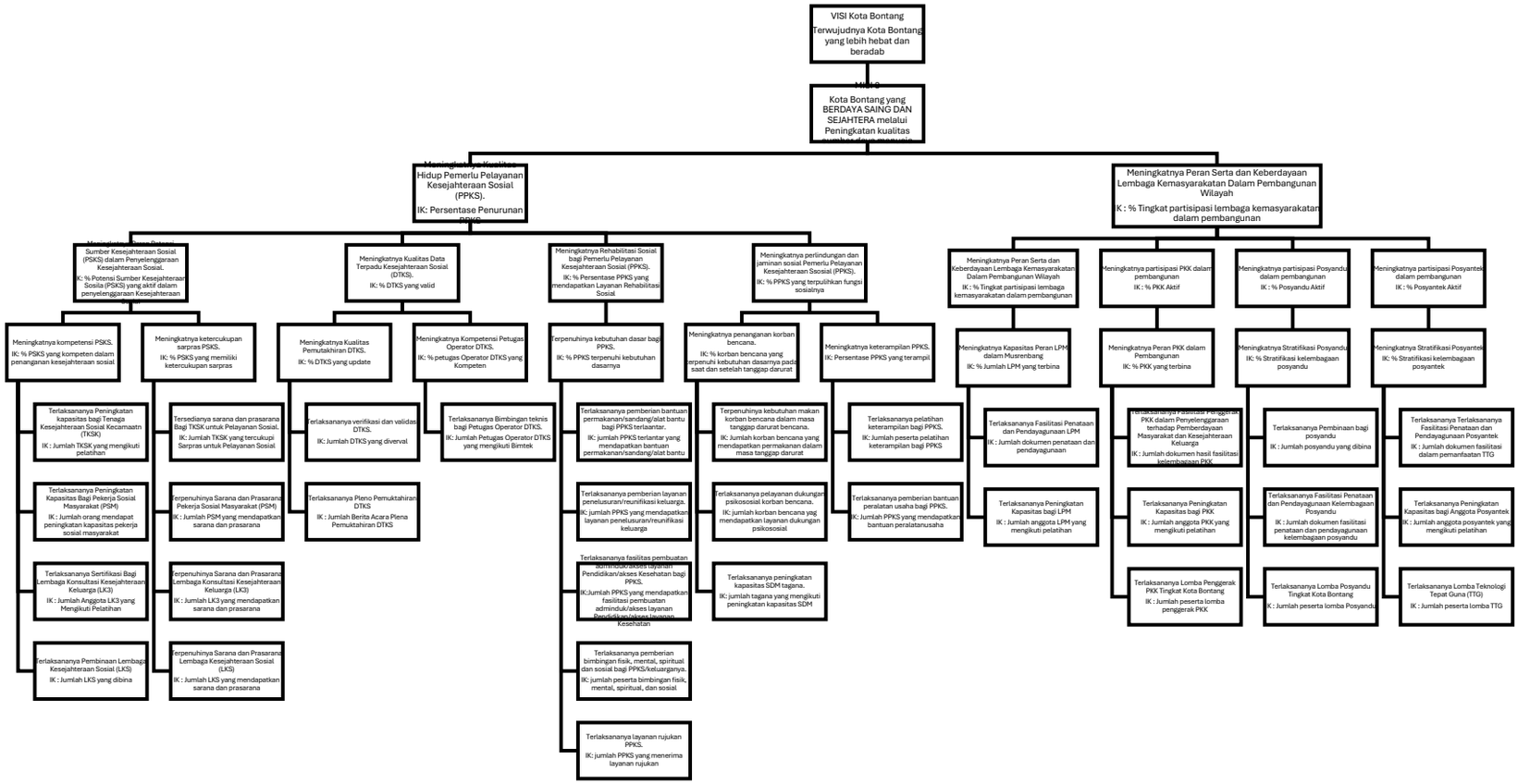

3.3 Program dan Kegiatan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang sebagai pedoman operasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rancangan Rencana kerja tersebut menggambarkan tentang program dan kegiatan, anggaran, sarana dan prasarana, tempat dan waktu kegiatan, serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana program, kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang periode 2025 selengkapnya dalam tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), INDIKATOR KEGIATAN (INTERMEDIATE OUSTCOME), INDIKATOR SUB KEGIATAN (OUTPUT)
Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Daerah	Angka Kemiskinan	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi	Nilai SAKIP	BB	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan paja dan perizinannya
					Pemeiharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	75	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	
					Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Daerah Kabupaten/Kota	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat

Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan/pengemis di Luar Panti Sosial	
Penyediaan permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota
Penyediaan sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kab/kota
Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kab/kota

Pemberian bimbingan fisik, mental, spritiual, dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kab/kota
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serat gelandangan pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan Masyarakat kewenangan kab/kota
Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kab/kota
Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan kab/kota
Pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kab/kota
Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran kelaurga kewenangan kab/kota
Pmberian layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kab/kota
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

Pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kab/kota
Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota
Penyedian permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota
Penyediaan sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kab/kota
Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota
Penyediaan perbekalan Kesehatan di luar panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan Kesehatan di luar panti kewenangan kab/kota
Pemberian bimbingan fisik, mental, spriritual, dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kab/kota
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya buka korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan kab/kota
Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Jumlah orang yang membutuhkan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau identitas anak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS kewenangan kab/kota

					Pemberian akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan kab/kota
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan keluarga kewenangan kab/kota
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kab/kota
					Pemberian layanan rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kab/kota
					Kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kab/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kab/kota
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah Kabupaten/kota	
					Pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang didata
					Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kab/kota
					Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kab/kota
					Fasilitas bantuan pengembangan ekonomi Masyarakat	Jumllah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi Masyarakat kewenangan kab/kota
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	

					Penyediaan makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kab/kota
					Penyediaan sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kab/kota
					Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kab/kota yaitu 75 orang
					Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencanayang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kab/kota
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Kabupaten/kota	
					Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana	Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kab/kota
					Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kab/kota
Meningkatnya Peran Serta Partisipasi dan Swadaya Masyarakat/Lembaga Secara Aktif dalam Proses Pembangunan	Indeks Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Aktif	Meningkatnya Peran Serta danKeberdayaan Masyarakat/lembaga dalam Pembangunan Wilayah	LPM Aktif	100%	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	
			PKK Aktif	100%	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan**	

					Lembaga Adat Tingkat Daerah Kebupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Posyandu Aktif	100%	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Posyantek Aktif	100%	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
					Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
					Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat Guna
					Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

					Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daserah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**		Kota Bontang		**25.604.127.805,00**	APBD		**28.164.540.585,50**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Kota Bontang		**17.005.881.605,00**	APBD		**18.706.469.765,50**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**Kota Bontang**		**60.000.000,00**			**66.000.000,00**
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD		33.000.000,00
1	06	01	2.01	0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	1 Laporan	30.000.000,00	APBD		33.000.000,00
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Kota Bontang		**11.342.362.833,00**	APBD		**12.476.599.116,30**
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	50 Orang	11.287.362.833,00	APBD		12.416.099.116,30
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang	0 laporan	30.000.000,00	APBD		33.000.000,00
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Kota Bontang	0 laporan	25.000.000,00	APBD		27.500.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daserah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	Kota Bontang		**45.000.000,00**			**49.500.000,00**
1	06	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bontang	0 laporan	25.000.000,00	APBD		27.500.000,00
1	06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bontang	0 laporan	20.000.000,00	APBD		22.000.000,00
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Kota Bontang		**177.500.000,00**	APBD		**195.250.000,00**
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Tingkat Pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	Kota Bontang	120 paket	97.500.000,00	APBD		107.250.000,00
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Bontang	120 orang	80.000.000,00	APBD		88.000.000,00
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Kota Bontang	**-**	**776.000.000,00**	APBD		**853.600.000,00**
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Bontang	25 paket	91.000.000,00	APBD		100.100.000,00
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Bontang	2 paket	60.000.000,00	APBD		66.000.000,00
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Bontang	3 paket	25.000.000,00	APBD		27.500.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daserah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kooordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Bontang	12 laporan	600.000.000,00	APBD		660.000.000,00
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**			**700.000.000,00**			**770.000.000,00**
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			550.000.000,00			605.000.000,00
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan			150.000.000,00			165.000.000,00
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Kota Bontang		**3.142.563.972,00**	APBD		**3.456.820.369,20**
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Bontang	510 Lembar	5.000.000,00	APBD		5.500.000,00
						Jumlah materai yang tersedia	Kota Bontang	8 lembar		APBD		
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listri yang disediakan	Kota Bontang	12 laporan	75.600.000,00	APBD		83.160.000,00
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Bontang	12 laporan	3.061.963.972,00	APBD		3.368.160.369,20
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Kota Bontang		**762.454.800,00**	APBD		**838.700.280,00**
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Bontang	50 unit	664.454.800,00	APBD		730.900.280,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daserah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Operasional atau Lapangan							
1	06	01	2.09	0006	Pemeiharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlahperalatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Bontang	55 unit	38.000.000,00	APBD		41.800.000,00
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bontang	2 unit	60.000.000,00	APBD		66.000.000,00
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		Kota Bontang		**854.510.000,00**	APBD		**939.961.000,00**
1	**06**	**02**			**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**			**54.210.000,00**			**59.631.000,00**
1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Kota Bontang	12 Dokumen	54.210.000,00	APBD		59.631.000,00
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Daerah Kabupaten/Kota**		Kota Bontang		**800.300.000,00**	APBD		**880.330.000,00**
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kota Bontang	63 Orang	58.440.000,00	APBD		64.284.000,00
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	Kota Bontang	3 Orang	375.000.000,00	APBD		412.500.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daserah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Kota Bontang	0 keluarga	225.000.000,00	APBD		247.500.000,00
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Kota Bontang	13 Lembaga	87.000.000,00	APBD		95.700.000,00
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan Sumber daya manusia dan LK3	Kota Bontang	20 Sertifikat	54.860.000,00	APBD		60.346.000,00
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		Kota Bontang		**4.380.268.000,00**	APBD		**4.818.294.800,00**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		Kota Bontang		**3.864.268.000,00**	APBD		**4.250.694.800,00**
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	150 Orang	3.192.000.000,00	APBD		3.511.200.000,00
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	Kota Bontang	20 Orang	49.248.000,00	APBD		54.172.800,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daserah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota						
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	50 Orang	175.000.000,00	APBD		192.500.000,00
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	30 Orang	100.000.000,00	APBD		110.000.000,00
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Binbingan Fisik, Mental Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,	Kota Bontang	30 Orang	50.000.000,00	APBD		55.000.000,00
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	30 Orang	50.000.000,00	APBD		55.000.000,00
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	50 Orang	2 0.000.000,00	APBD		22.000.000,00
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan	Kota Bontang	24 Orang	77.000.000,00	APBD		84.700.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daserah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota						
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kab/kota	Kota Bontang	280 Orang	20.000.000,00	APBD		22.000.000,00
1	06	04	2.01	0010	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	Kota Bontang	4 Orang	20.000.000,00	APBD		22.000.000,00
1	06	04	2.01	0011	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran kelaurga kewenangan kab/kota	Kota Bontang	13 Orang	46.020.000,00	APBD		50.622.000,00
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan	Kota Bontang	30 Orang	65.000.000,00	APBD		71.500.000,00
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		Kota Bontang		**516.000.000,00**	APBD		**567.600.000,00**
1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	20 Orang	15.000.000,00	APBD		16.500.000,00
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	20 orang	15.000.000,00	APBD		16.500.000,00
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	50 orang	25.000.000,00	APBD		27.500.000,00
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya	Kota Bontang	50 orang	20.000.000,00	APBD		22.000.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daserah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota						
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	5 orang	15.000.000,00	APBD		16.500.000,00
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	42 orang	45.000.000,00	APBD		49.500.000,00
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	5 orang	62.000.000,00	APBD		68.200.000,00
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	30 orang	62.000.000,00	APBD		68.200.000,00
1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	5 orang	15.000.000,00	APBD		16.500.000,00
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan	Kota Bontang	25 orang	15.000.000,00	APBD		16.500.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daserah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota						
1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	10 orang	15.000.000,00	APBD		16.500.000,00
1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	26 orang	52.000.000,00	APBD		57.200.000,00
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	15 orang	30.000.000,00	APBD		33.000.000,00
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Bontang	12 dokumen	130.000.000,00	APBD		143.000.000,00
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		Kota Bontang		**2.414.908.000,00**	APBD		**2.656.398.800,00**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		Kota Bontang		**2.414.908.000,00**	APBD		**2.656.398.800,00**
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	Kota Bontang	49914 Orang	500.000.000,00	APBD		550.000.000,00
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kota Bontang	90 Keluarga	200.000.000,00	APBD		220.000.000,00
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	500 Keluarga	1.100.400.000,00	APBD		1.210.440.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daserah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orag mendapatkan banuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kota Bontang	250 Orang	614.508.000,00	APBD		675.958.800,00
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		Kota Bontang		**948.560.200,00**	APBD		**1.043.416.220,00**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		Kota Bontang		**698.560.200,00**	APBD		**768.416.220,00**
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	500 Orang	385.000.000,00	APBD		423.500.000,00
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	500 Orang	152.000.000,00	APBD		167.200.000,00
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	75 orang	85.375.200,00	APBD		93.912.720,00
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	50 Orang	76.185.000,00	APBD		83.803.500,00
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		Kota Bontang		**250.000.000,00**	APBD		**275.000.000,00**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daserah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	0 kampung	150.000.000,00	APBD		165.000.000,00
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	30 orang	100.000.000,00	APBD		110.000.000,00
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	**13**				**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		Kota Bontang		**2.171.400.000,00**	APBD		**2.388.540.000,00**
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		Kota Bontang		**2.171.400.000,00**	APBD		**2.388.540.000,00**
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kebupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat**		Kota Bontang		**2.171.400.000,00**	APBD		**2.388.540.000,00**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daserah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		1 Dokumen	386.900.000,00			425.590.000,00
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Bontang	2 lembaga	239.000.000,00	APBD		262.900.000,00
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarkat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Bontang	4 unit	45.500.000,00	APBD		50.050.000,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daserah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat Guna	Kota Bontang	3 laporan	300.000.000,00	APBD		330.000.000,00
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Bontang	1 laporan	350.000.000,00	APBD		385.000.000,00
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Bontang	6 laporan	850.000.000,00	APBD		935.000.000,00
JUMLAH									**27.775.527.805,00**			**30.553.080.585,50**

BAB IV
RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanagan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait rancangan rencana kerja dan pendanaan dokumen rancangan rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2025.

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, pagu anggaran dan sumber dana yang disertai dengantugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dengan terbitnya Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka untuk Rancangan Rencana Kerja 2025 DSPM terdapat 6 program, 15 kegiatan dan 64 sub kegiatan dengan anggaran kegiatan sebesar Rp 25.745.334.805,-.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah tahun 2025 Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan/Sub kegiatan			Pagu Anggaran		Perkiraan Pagu Tahun 2026 (Rp.)	Unit Kerja
										Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)+((10)*10%)	(13)
Meningkatnya Efektivitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP	**1**	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**Kota Bontang**				**25.604.127.805,00**	**APBD**	**28.164.540.585,50**	**DSPM**
			1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bontang**				**17.005.881.605,00**	**APBD**	**18.706.469.765,50**	**DSPM**
			1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	-	**-**	**-**	**60.000.000,00**	**APBD**	**66.000.000,00**	**DSPM**
			1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	30.000.000,00	APBD	33.000.000,00	DSPM
			1	06	01	2.01	0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	30.000.000,00	APBD	33.000.000,00	DSPM
			1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**11.342.362.833,00**	**APBD**	**12.476.599.116,30**	**DSPM**
			1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	11.287.362.833,00	APBD	12.416.099.116,30	DSPM
			1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	30.000.000,00	APBD	33.000.000,00	DSPM
			1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	25.000.000,00	APBD	27.500.000,00	DSPM
			1	**06**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	-	**-**	**-**	**45.000.000,00**	**APBD**	**49.500.000,00**	**DSPM**
			1	06	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	25.000.000,00	APBD	27.500.000,00	DSPM
			1	06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	20.000.000,00	APBD	22.000.000,00	DSPM
			1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**177.500.000,00**	**APBD**	**195.250.000,00**	**DSPM**
			1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	Paket	120	97.500.000,00	APBD	107.250.000,00	DSPM
			1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	120	80.000.000,00	APBD	88.000.000,00	DSPM
			1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**776.000.000,00**	**APBD**	**853.600.000,00**	**DSPM**

			1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	25	91.000.000,00	APBD	100.100.000,00	DSPM
			1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	60.000.000,00	APBD	66.000.000,00	DSPM
			1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	3	25.000.000,00	APBD	27.500.000,00	DSPM
			1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kooordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	600.000.000,00	APBD	660.000.000,00	DSPM
			1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bontang**	-	**-**	**-**	**700.000.000,00**	**APBD**	**770.000.000,00**	**DSPM**
			1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	16	550.000.000,00	APBD	605.000.000,00	DSPM
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Kota Bontang	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	0	150.000.000,00	APBD	165.000.000,00	DSPM
		Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	**1**	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**3.142.563.972,00**	**APBD**	**3.456.820.369,20**	**DSPM**
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000,00	APBD	5.500.000,00	DSPM
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kessejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi							Kota Bontang	Jumlah materai yang tersedia	Laporan	12		APBD	-	DSPM
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listri yang disediakan	Laporan	12	75.600.000,00	APBD	83.160.000,00	DSPM
		Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	3.061.963.972,00	APBD	3.368.160.369,20	DSPM
			1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**762.454.800,00**	**APBD**	**838.700.280,00**	**DSPM**

1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	50	664.454.800,00	APBD	730.900.280,00	DSPM
1	06	01	2.09	0006	Pemeiharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlahperalatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	55	38.000.000,00	APBD	41.800.000,00	DSPM
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	60.000.000,00	APBD	66.000.000,00	DSPM
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**854.510.000,00**	**APBD**	**939.961.000,00**	**DSPM**
1	**06**	**02**			**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bontang**	-	**-**	**-**	**54.210.000,00**	**APBD**	**59.631.000,00**	**DSPM**
1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Bontang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Dokumen	12	54.210.000,00	APBD	59.631.000,00	DSPM
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**800.300.000,00**	**APBD**	**880.330.000,00**	**DSPM**
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Orang	30	58.440.000,00	APBD	64.284.000,00	DSPM
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	Orang	3	375.000.000,00	APBD	412.500.000,00	DSPM
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Keluarga	0	225.000.000,00	APBD	247.500.000,00	DSPM
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Lembaga	30	87.000.000,00	APBD	95.700.000,00	DSPM
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Bontang	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan Sumber daya manusia dan LK3	Sertifikat	50	54.860.000,00	APBD	60.346.000,00	DSPM
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**4.380.268.000,00**	**APBD**	**4.818.294.800,00**	**DSPM**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**3.864.268.000,00**	**APBD**	**4.250.694.800,00**	**DSPM**

1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	3.192.000.000,00	APBD	3.511.200.000,00	DSPM
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	49.248.000,00	APBD	54.172.800,00	DSPM
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	175.000.000,00	APBD	192.500.000,00	DSPM
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13	100.000.000,00	APBD	110.000.000,00	DSPM
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Binbingan Fisik, Mental Spiritual, dan Sosial	Kota Bontang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,	Orang	33	50.000.000,00	APBD	55.000.000,00	DSPM
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Bontang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33	50.000.000,00	APBD	55.000.000,00	DSPM
1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13	20.000.000,00	APBD	22.000.000,00	DSPM
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	77.000.000,00	APBD	84.700.000,00	DSPM
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Bontang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kab/kota	Orang	280	20.000.000,00	APBD	22.000.000,00	DSPM
1	06	04	2.01	0010	Pemberian layanan kedaruratan	Kota Bontang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	Orang	4	20.000.000,00	APBD	22.000.000,00	DSPM
1	06	04	2.01	0011	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Kota Bontang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran kelaurga kewenangan kab/kota	Orang	13	46.020.000,00	APBD	50.622.000,00	DSPM
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Bontang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan	Orang	10	65.000.000,00	APBD	71.500.000,00	DSPM
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**516.000.000,00**	**APBD**	**567.600.000,00**	**DSPM**

					NAPZA di Luar Panti Sosial								
1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	15.000.000,00	APBD	16.500.000,00	DSPM
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	15.000.000,00	APBD	16.500.000,00	DSPM
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	25.000.000,00	APBD	27.500.000,00	DSPM
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Kota Bontang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	20.000.000,00	APBD	22.000.000,00	DSPM
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	15.000.000,00	APBD	16.500.000,00	DSPM
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	42	45.000.000,00	APBD	49.500.000,00	DSPM
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Bontang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	62.000.000,00	APBD	68.200.000,00	DSPM
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Bontang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	62.000.000,00	APBD	68.200.000,00	DSPM
1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	15.000.000,00	APBD	16.500.000,00	DSPM
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	15.000.000,00	APBD	16.500.000,00	DSPM
1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	15.000.000,00	APBD	16.500.000,00	DSPM
1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	26	52.000.000,00	APBD	57.200.000,00	DSPM

			1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Bontang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	30.000.000,00	APBD	33.000.000,00	DSPM
			1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	12	130.000.000,00	APBD	143.000.000,00	DSPM
			1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**2.414.908.000,00**	**APBD**	**2.656.398.800,00**	**DSPM**
			1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**2.414.908.000,00**	**APBD**	**2.656.398.800,00**	**DSPM**
			1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	Orang	47102	500.000.000,00	APBD	550.000.000,00	DSPM
			1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	1291	200.000.000,00	APBD	220.000.000,00	DSPM
			1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Bontang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	500	1.100.400.000,00	APBD	1.210.440.000,00	DSPM
			1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang	Jumlah orag mendapatkan banuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Orang	250	614.508.000,00	APBD	675.958.800,00	DSPM
			1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**948.560.200,00**	**APBD**	**1.043.416.220,00**	**DSPM**
			1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**698.560.200,00**	**APBD**	**768.416.220,00**	**DSPM**
Meningkatnya Peran Serta Partisipasi dan Swadaya Masyarakat/lembaga Secara Aktif dalam Proses Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta danKeberdayaan Masyarakat/lembaga dalam Pembangunan Wilayah	LPM Aktif	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1000	385.000.000,00	APBD	423.500.000,00	DSPM
		PKK Aktif	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	152.000.000,00	APBD	167.200.000,00	DSPM
		Posyandu Aktif	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75	85.375.200,00	APBD	93.912.720,00	DSPM
		Posyantek Aktif	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Bontang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	76.185.000,00	APBD	83.803.500,00	DSPM
			1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**250.000.000,00**	**APBD**	**275.000.000,00**	**DSPM**

1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	0	150.000.000,00	APBD	165.000.000,00	DSPM
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	100.000.000,00	APBD	110.000.000,00	DSPM
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**Kota Bontang**					**APBD**		**DSPM**
2	**13**				**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**Kota Bontang**				**2.171.400.000,00**	**APBD**	**2.388.540.000,00**	**DSPM**
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**2.171.400.000,00**	**APBD**	**2.388.540.000,00**	**DSPM**
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kebupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Bontang**		**-**	**-**	**2.171.400.000,00**	**APBD**	**2.388.540.000,00**	**DSPM**
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	386.900.000,00	APBD	425.590.000,00	DSPM
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Bontang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	2	239.000.000,00	APBD	262.900.000,00	DSPM
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	Unit	4	45.500.000,00	APBD	50.050.000,00	DSPM

								Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarkat Hukum Adat		dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
			2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat Guna	Laporan	3	300.000.000,00	APBD	330.000.000,00	DSPM
			2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	350.000.000,00	APBD	385.000.000,00	DSPM
			2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Bontang	Jumlah Laporan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	6	850.000.000,00	APBD	935.000.000,00	DSPM
			TOTAL PAGU ANGGARAN										**27.775.527.805,00**		**30.553.080.585,50**	

X. DINAS KETENAGAKERJAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Perubahan Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RKPD. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Dengan adanya acuan di atas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kota Kota Bontang Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2025 adalah :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026;
c. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
d. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Adapun Tujuannya yaitu :

1. Acuan Dinas Ketenagakerjaan dalam mengoperasionalkan Perubahan RKPD Kota Bontang tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang.
2. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.
3. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan

Memuat evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan II pada tahun berkenan.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rangkaian rangkaian program dan kegiatan, indikator program dan kegiatan serta anggaran.

BAB IV Penutup

Memuat catatan penting dan kaidah pelaksanaan yang perlu mendapatkan perhatian pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenan

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) , yang mana setiap IKU memiliki target yang harus di capai pada tahun 2025. Target tersebut dituangkan di dalam Perjanjian Kerja (PK) Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang.

Berikut capaian perjanjian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 :

Tabel 2.1 Capaian Perjanjian Kinerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI S/D TRIWULAN II	CAPAIAN S/D TRIWULAN II
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	16 %	22,06 %	137,87%
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	40 %	20,10 %	50,25%
3	Meningkatnya perlindungan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	21 %	16,45%	78,33%

Sumber data : Dinas Ketenagkerjaan Kota Bontang

Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang hingga triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Sasaran I : Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
   Faktor pendorong :
   1. Tahun 2025, Dinas Ketenagakerjaan menargetkan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 1.297 orang peserta dengan 54 jenis pelatihan.
   2. Seluruh peserta pelatihan yang diselenggarakkan oleh Dinas Ketenagakerjaan mengikuti uji sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, hal ini dilakukan guna pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan dapat bersaing di dunia pasar kerja.
   3. Melakukan Kerjasama dengan Perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang dalam pelaksanaan pelatihan dan pemagangan bagi percari kerja
   4. Melakukan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Sawata agar meningkatkan kualitasnya sebagai Lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi dan berstandar nasional.
   5. Melakukan pengukuran produktivitas bagi perusahaan kecil di Kota Bontang, tujuannya untuk mengetahui Tingkat produktivitas tenaga kerja serta menjadi tolak ukur perusahaan untuk meningkatkan sumber daya guna meningkatkan produksinya.

   Faktor Penghambat :

   1. Jumlah pencari kerja yang terus meningkat sehingga kebutuhan masayarakat untuk mengikuti pelatihan kerja secara gratis cukup tinggi.
   2. Rendahnya kesadaran pencari kerja untuk mengikuti pelatihan kerja secara mandiri.
   3. Rendahnya kesadaran Perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja baik untuk *reskill* atau *upskill.*

b. Sasaran II : Meningkat nya penempatan tenaga kerja
   Faktor pendorong :
   1. Pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja baik secara manual ataupun online.
   2. Keterbukaan informasi pasar kerja secara luas dan merata melalui papan pengumuman, media social dan aplikasi berbasis web.
   3. Melaksanakan kegiatan *job fair* atau bursa kerja
   4. Melaksanakan kegiatan perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan tenaga kerja mandiri
   5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan calon pencari kerja guna mengetahui jenis jabatan pekerjaan sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya.

6. Melaksanakan kegiatan pelayanan antar kerja, baik melalui antar kerja local maupun antar kerja daerah.
7. Adanya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun

Faktor penghambat :

1. Jumlah pencari kerja yang terus bertambah setiap tahun baik dikarenakan pertambahan kelahiran penduduk maupun migrasi penduduk usia kerja. Tahun 2025 mengalami peningkatan sebanyak 646 orang dibanding tahun 2024.
2. Lowongan kerja yang terbatas. Tahun 2025 mengalami penurunan 775 lowongan kerja dibanding tahun 2024.
3. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun 2025 mengalami penurunan seiring penurunan lowongan kerja yakni sebanyak 424 orang dibanding tahun 2024.
4. Ketidaksesuaiannya kualifikasi kebutuhan pasar kerja dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja.
5. Rendahnya kesadaran pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan untuk melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan.
6. Masih terdapat Perusahaan yang tidak melaporkan kebutuhan dan penempatan tenaga kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan.

c. Sasaran III : Meningkat nya perlindungan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja

Faktor pendorong :

1. Adanya kegiatan pendataan sarana hubungan industrial ke Perusahaan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dengan sasaran pemberi kerja dan pekerja.
3. Pelaksanaan kegiatan deteksi dini guna mengindikasi terjadinya perselisihan hubungan industrial.
4. Pelaksanaan kegiatan batuan subsidi iuaran perlindungan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Faktor penghambat :

1. Tidak adanya kewenangan pengawasan hubungan industrial di Kabupaten/Kota
2. Tidak adanya peraturan yang memuat pemberian sanksi pelanggaran pemenuhan sarana hubungan industrial

Guna mencapai target perjanjian kinerja tersebut. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang melaksanakan 4 (Empat) Program dan 14 (Empat Belas) kegiatan serta 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.33.922.254.220,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

Total anggaran tersebut mengalami pengurangan sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dna Belanja Daerah Tahun 2025. Terdapat beberapa rekening belanja yeng mengalami pengurangan anggaran sehingga dari total anggaran sebesar Rp.33.922.254.220,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah mengalami efisiensi menjadi Rp.31.534.368.533,- (Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Rtaus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Tabel 2.2 Capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2025

No	Nama Program	Pagu Sebelum Efisiensi (Rp)	Pagu Setelah Efisiensi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	12.716.684.857	12.359.528.970	6.611.898.768	51,99
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	11.739.250.571	10.162.484.571	7.011.000.000	59,72
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	576.833.363	469.934.318	0	0
4	Program Hubungan Industrial	8.889.485.429	8.542.420.674	3.819.082.135	44,71

Sumber data : Dinas Ketenagkerjaan Kota Bontang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2.3 mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dapat disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Capaian Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah Tahun berjalan (Tahun n-1 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (akhir tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025. (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	8.596.942.817	100%	14.859.426.090	100%	12.359.528.970	25%	3.898.759.878	25%	2.713.138.890					50%	6.611.898.768	150%	21.471.324.858	150	249,76
		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	100.000.000			100%	57.692.510	25%		25%						50%	-	50%	-	50	0,00
		Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100.000.000			1 Dokumen	57.692.510										-	0%	-	0	0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100%	5.970.959.920	100%	6.524.371.430	100%	7.858.229.729	25%	2.024.260.853	25%	2.077.138.580					50%	4.101.399.433	150%	10.625.770.863	150	177,96
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	33 orang/ bulan	5.970.959.920	32 Orang/ Bulan	6.524.371.430	38 Orang	7.858.229.729	33 orang	2.024.260.853	38 orang	2.077.138.580					38 orang	4.101.399.433	33 orang	10.625.770.863	100	177,96
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100%	415.145.297	100%	3.731.377.907	100%	1.460.469.000	52%	1.037.546.937							52%	1.037.546.937	152%	4.768.924.844	152,27	1148,74
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Bersadarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	20.000.000	180 Orang	3.533.497.907	176 Orang	1.460.469.000	92 orang	1.037.546.937							92 orang	1.037.546.937	272 orang	4.571.044.844	6800	22855,22
		Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga dan Jumlah pakaian Dinas Harian	21 orang	103.500.000	69 paket	197.880.000												-	69 paket	197.880.000	328,5714	191,19

		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	68 orang	291.645.297													-	0%		0	0,00
		Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlahorang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-															-	0%	-	0	#DIV/0!
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100%	333.876.000	100%	1.458.535.137	100%	681.559.753	25%	248.356.038	25%	130.183.240					50%	378.539.278	150%	1.837.074.415	150	550,23
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan					1 Paket	9.352.942	1 paket	8.358.000							1 paket	8.358.000	1 paket	8.358.000	100%	100,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	35.000.000	11 Paket	131.980.500	4 Paket	59.497.570	4 paket	56.629.300		1.690.000					4 paket	58.319.300	15 paket	190.299.800	1500	543,71
		Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	1 paket	40.700.000	1 paket	37.106.000	1 Paket	40.722.403	1 paket	36.868.000		216.000					1 paket	37.084.000	2 paket	74.190.000	200	182,29
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jum lah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	35.000.000	5 paket	29.920.000	1 Paket	35.589.525		8.897.080		8.897.200						17.794.280	5 paket	47.714.280	#VALUE!	136,33
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 lapora	223.176.000	12 Laporan	1.259.528.637	12 Laporan	487.108.000	3 laporan	109.855.158	3 laporan	108.080.040					3 laporan	217.935.198	15 laporan	1.477.463.835	48,3871	662,02
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	49.289.313	1 dokumen	27.748.500		11.300.000					1 dokumen	39.048.500	1 dokum%	39.048.500	100	100,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	100%	100.000.000	100%	994.879.525	100%	273.841.902	50%	73.200.000	50%	184.669.250					100%	257.869.250	200%	1.252.748.775	200	1252,75
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	100.000.000	49 unit	653.009.525	26 Unit	273.841.902	13 unit	73.200.000	13 unit	184.669.250					26 Unit	257.869.250	62 Unit	910.878.775	1240	910,88

		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			3 unit	341.870.000											-	3 unit	341.870.000	100	100,00
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan															-	0%	-	0	0,00
		Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100%	1.494.361.600	100%	1.858.514.891	100%	1.746.136.076	25%	443.826.180	25%	271.780.180					50%	715.606.360	150%	2.574.121.251	150	172,26
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	1 laporan	4.000.000	2 laporan	7.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 laporan	4.000.000							1 laporan	4.000.000	4 laporan	11.000.000	400	275,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	48.000.000	12 laporan	38.692.383	12 Laporan	66.000.000	3 laporan	9.631.620	3 laporan	9.607.620					6 laporan	19.239.240	18 laporan	57.931.623	1800	120,69
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang Disedikan	36 laporan	1.442.361.600	12 laporan	1.812.822.508	12 Laporan	1.676.136.076	3 laporan	430.194.560	3 laporan	262.172.560					6 laporan	692.367.120	18 laporan	2.505.189.628	50	173,69
		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	182.600.000	100%	291.747.200	100%	281.600.000	25%	71.569.870	25%	49.367.640					50%	120.937.510	150%	412.684.710	150	226,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17 unit	170.000.000	13 unit	270.187.200	14 unit	262.100.000	14 unit	65.169.870	14 unit	42.967.640					14 unit	108.137.510	14 unit	378.324.710	82,35294	222,54
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	35 unit	12.600.000	34 unit	21.560.000	30 unit	19.500.000	10 unit	6.400.000	10 unit	6.400.000					20 unit	12.800.000	54 Unit	34.360.000	154,2857	272,70
		Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi															-	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!

		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Implementasi Kebijakan bidang Ketenagakerjaan	100%	125.000.000														-	0%	-	0	0,00
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tingkat Pemenuhan dokumen Rencana Tenaga Kerja	100%	125.000.000														-	0%	-	0	0,00
		Penyusunan Rencana tenaga kerja makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 dokume	125.000.000														-	0%	-	0	0,00
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih	5%	2.581.597.200	15%	10.030.323.698	5%	10.162.484.571	28,48%	2.163.000.000	22,06%	4.884.000.000						7.047.000.000	15%	17.077.323.698	271,1359	661,50
		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis unit komptetensi pada tahun n	100%	2.181.597.200	100%	9.337.517.600	100%	10.042.897.278	25%	2.163.000.000	25%	4.884.000.000					50%	7.047.000.000	150%	16.384.517.600	150	751,03
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	385 orang	2.181.597.200	1207 orang	9.337.517.600	1422 Orang	10.042.897.278	675 orang	2.163.000.000	382 orang	4.884.000.000					1057 orang	7.047.000.000	2264 orang	16.384.517.600	588,0519	751,03
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga kerja swasta yang dibina	100%	200.000.000	100%	630.958.098	100%	52.411.691		0								-	100%	630.958.098	100	315,48
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 lembaga	200.000.000	46 Lembaga	630.958.098	25 lembaga	52.411.691										-	46 Lembaga	630.958.098	230	315,48
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	100%	200.000.000	100%	61.848.000	100%	67.175.602		0								-	100%	61.848.000	100	30,92
		Pengukuran Komptetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja Di Tingkat Daerah	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	61.848.000	1 Dokumen	67.175.602										-	1 dokumen	61.848.000	100	30,92
		Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan Kecil yang mendapat konsultasi produktivitas								0								-	0%	-	0	0,00

		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan Kecil	jumlah Perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan Produktivitas															-	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	22%	450.000.000	36%	705.014.200	21%	469.934.318	15,19%	0	20,10%						20,10%	-	56%	705.014.200	255,6818	156,67
		Pelayanan Antar Kerja di daerah kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelayanan antar kerja di kabupaten/kota	100%	250.000.000	100%	516.619.400	100%	183.681.165		0								-	100%	516.619.400	100	206,65
		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2150 orar	25.000.000			200 Orang	20.853.395										-	0%	-	0	0,00
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	125 orang	125.000.000	500 orang	47.884.500	250 Orang	49.817.403										-	500 orang	47.884.500	400	38,31
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20 orang	100.000.000	20 orang	468.734.900	25 Orang	113.010.367										-	20 orang	468.734.900	100	468,73
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase data dan informasi pasar kerja yang dikelola	100%	200.000.000	100%	188.394.800	100%	286.253.153	25%	0							25%	-	125%	188.394.800	125	94,20
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online					1 Dokumen	113.890.000										-	0%	-	0	0,00
		Job fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 orang	200.000.000	97 orang	188.394.800	50 Orang	172.363.153										-	97 orang	188.394.800	194	94,20
		Pelayanan Penyediaan Informasi Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)																-	0%	-	0	0,00

3	Meningkatnya perlindungan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja	Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	3,55%	400.000.000	1,88%	9.963.259.314	4,43%	8.542.420.674	1,05%	1.850.553.600	1,53%	1.968.528.535					1,53%	3.819.082.135	3%	13.782.341.449	96,05634	3445,59
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengesahan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan dan menyusun pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) ndaerah	100%	40.000.000	100%	28.406.000	100%	24.739.780	25%	0							25%	-	125%	28.406.000	125	71,02
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi sarana Hubungan Industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah data dan Informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta jamsostek serta Pengupahan			1 Laporan	11.896.000	1 Laporan	24.739.780									-	1 Laporan	11.896.000	100	100,00
		Pengesahan peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online			28 perusahaan	16.510.000											-	28 perusahaan	16.510.000	100	100,00
		Pendaftaran bagi perjanjian kerjasama bagi perusahaan	jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	15 perusahaan	40.000.000													-	15 perusahaan	40.000.000	100	100,00
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah kabupaten /Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota yang dicegah dan diselesaikan	100%	360.000.000	100%	9.934.853.314	100%	8.517.680.894	25%	1.850.553.600	25%	1.968.528.535					25%	3.819.082.135	125%	13.753.935.449	125	3820,54

		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	30 perkara	45.000.000	47 perkara	1.922.276.253	40 Perkara	862.667.372	24 Perkara		19 perkara	152.952.535					43 perkara	152.952.535	90 perkara	2.075.228.788	300	4611,62
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	13 perkara	20.000.000	16 perkara	42.100.000	20 Perkara	10.080.000	9 perkara		4 perkara						13 perkara	-	29 perkara	42.100.000	223,0769	210,50
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	235.000.000	1 lembaga	725.785.190	1 Lembaga	200.734.502										-	1 lembaga	725.785.190	100	308,84
		Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja /serikat buruh serta non afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	45 asosiasi dan serikar pekerja	25.000.000														-		-	#VALUE!	0,00
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitas Kesejahteraan Pekerja	30 orang	35.000.000	36777	7.244.691.871	36777 Orang	7.444.199.020	36777 orang	1.850.553.600	36777 orang	1.815.576.000						3.666.129.600	36777 orang	10.910.821.471	#VALUE!	31173,78
									Rata-rata capaian Kinerja (%)	25%	7.912.313.478	25%	9.565.667.425					25%	17.477.980.903				

Sumber data : Dinas Ketenagkerjaan Kota Bontang

Dari tabel 2.3 di atas dapat diketahui bahwa anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2025 sebesar Rp. 31.534.368.533,- (Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Rtaus Tiga Puluh Tiga Rupiah) telah terealisasi hingga triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 17.441.980.903,- (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) atau 55,31 persen. Sedangkan pencapaian realisasi fisik sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebesar 62,93 persen.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Rumusan Perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2025 direncanakan mengalami penambahan anggaran yakni Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) menjadi Rp. 32.534.368.533,- (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Penambahan Anggaran tersebut akan mengakomodir Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja khususnya kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi. Sedangakan program kegiatan lainnya mengalami perubahan pagu anggaran yang berasal dari pergeseran pagu anggaran antar program, kegiatan dan sub kegiatan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan skema pelaksanaan kegiatan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pada kode rekening tertentu sehingga mempengaruhi skema pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain ini aka nada penambahan pagu anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN dikarenakan ada mutasi ASN dari OPD lain sehingga beban belanja pegawai beratambah.

Pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa ada pengurangan sebesar 1.387.885.687 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah). Hal ini dikarenakan pengurangan pagu yang digunakan Adalah pagu awal bukan pagu pergeseran pasca efisiensi anggaran sehingga walaupun ada penambahan pagu anggaran tidak terlihat bertambah dikarenakan efisiensi anggaran lebih besar dibanding penambahan pagu pada perubahan APBD Tahun 2025. Untuk

selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (12-11)
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	8	9	11	12	13
		DINAS KETENAGAKERJAAN				**33.922.254.220,00**	**32.534.368.533,00**	**-1.387.885.687,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**33.922.254.220,00**	**32.534.368.533,00**	**-1.387.885.687,00**
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**33.922.254.220,00**	**32.534.368.533,00**	**-1.387.885.687,00**
1,	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**12.716.684.857,00**	**12.603.849.703,00**	**-112.835.154,00**
	2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu***	**100 persen**	**100 persen**	**57.692.510,00**	**40.702.574,00**	**-16.989.936,00**
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	57.692.510,00	40.702.574,00	-16.989.936,00
	2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah***	**100 persen**	**100 persen**	**7.858.229.729,00**	**7.858.229.729,00**	**0,00**
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	32 Orang/bulan	7.858.229.729,00	7.858.229.729,00	0,00
	2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian***	**100 persen**	**100 persen**	**1.704.012.000,00**	**1.336.899.000,00**	**-367.113.000,00**
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	72 Paket	0,00	236.430.000,00	236.430.000,00
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	104 Orang	1.704.012.000,00	1.100.469.000,00	-603.543.000,00
	2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran***	**100 persen**	**100 persen**	**785.947.640,00**	**704.299.753,00**	**-81.647.887,00**
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.352.942,00	9.352.942,00	0,00

	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	68.930.457,00	59.497.570,00	-9.432.887,00
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.722.403,00	40.722.403,00	0,00
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.589.525,00	35.589.525,00	0,00
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	582.063.000,00	509.848.000,00	-72.215.000,00
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	49.289.313,00	49.289.313,00	0,00
	2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah***	**100 persen**	**100 persen**	**273.841.902,00**	**635.982.571,00**	**362.140.669,00**
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	0,00	0,00
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	114 Unit	273.841.902,00	635.982.571,00	362.140.669,00
	2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran***	**100 persen**	**100 persen**	**1.755.361.076,00**	**1.746.136.076,00**	**-9.225.000,00**
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.685.361.076,00	1.676.136.076,00	-9.225.000,00
	2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	***Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik***	**100 persen**	**100 persen**	**281.600.000,00**	**281.600.000,00**	**0,00**
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	14 Unit	262.100.000,00	262.100.000,00	0,00
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00

2,	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase produktifitas tenaga kerja ; Persentase pencari kerja yang dilatih**	**1,10 ; 5,37 persen**	**1,10 ; 5,37 persen**	**11.739.250.571,00**	**11.161.620.871,00**	**-577.629.700,00**
	2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	***Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi pada Tahun n***	**100 persen**	**100 persen**	**11.336.105.278,00**	**11.039.897.278,00**	**-296.208.000,00**
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	497 Orang	1415 Orang	11.336.105.278,00	11.039.897.278,00	-296.208.000,00
	2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	***Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina***	**100 persen**	**100 persen**	**330.631.691,00**	**54.547.991,00**	**-276.083.700,00**
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	23 Lembaga	35 Lembaga	330.631.691,00	54.547.991,00	-276.083.700,00
	2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Terpenuhi Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**100 persen**	**100 persen**	**72.513.602,00**	**67.175.602,00**	**-5.338.000,00**
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	72.513.602,00	67.175.602,00	-5.338.000,00
3,	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**22 persen**	**22 persen**	**576.833.363,00**	**467.798.018,00**	**-109.035.345,00**
	2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase tenaga kerja/pencari kerja yang mendapat pelayanan antar kerja di kabupaten/kota***	**100 persen**	**100 persen**	**233.363.017,00**	**181.544.865,00**	**-51.818.152,00**
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja						
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200 Orang	100 Orang	39.689.395,00	18.717.095,00	-20.972.300,00
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan	250 Orang	100 Orang	79.323.255,00	49.817.403,00	-29.505.852,00
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	25 Orang	25 Orang	114.350.367,00	113.010.367,00	-1.340.000,00
	2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	***Persentase data dan informasi pasar kerja yang dikelola***	**100 persen**	**100 persen**	**343.470.346,00**	**286.253.153,00**	**-57.217.193,00**
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online						
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	113.890.000,00	113.890.000,00	0,00
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job	50 Orang	50 Orang	229.580.346,00	172.363.153,00	-57.217.193,00

4,	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun**	**3,55 persen**	**3,55 persen**	**8.889.485.429,00**	**8.301.099.941,00**	**-588.385.488,00**
	2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Perusahaan Yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Menyusun Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	**100 persen**	**100 persen**	**24.739.780,00**	**4.690.000,00**	**-20.049.780,00**
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	24.739.780,00	4.690.000,00	-20.049.780,00
	2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah**	***Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah***	**100 persen**	**100 persen**	**8.864.745.649,00**	**8.296.409.941,00**	**-568.335.708,00**
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	40 Perkara	1.202.202.127,00	641.396.419,00	-560.805.708,00
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	20 Perkara	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	200.734.502,00	200.734.502,00	0,00
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	34782 Orang	36777 Orang	7.451.729.020,00	7.444.199.020,00	-7.530.000,00
	J U M L A H					**33.922.254.220,00**	**32.534.368.533,00**	**-1.387.885.687,00**

Sumber data : Aplikasi SIPD

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja dari hasil capaian perjanjian kinerja target sasaran strategis triwulan II pada tabel 2.1 dan rancangan perubahan rencana pendanaan program dan kegiatan pada tabel 3.1 maka terdapat satu sasaran yakni meningkatkan penempatan tenaga kerja akan dilakukan rencana perubahan target perjanjian kinerja sasaran strategis tahun 2025. Berikut rencana perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025 :

Tabel 3.2 Rancangan Perubahan Target Indikator Kinerja Utama

Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	
			SEMULA	MENJADI
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	16 %	16 %
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	40 %	36,76 %
3	Meningkatnya perlindungan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	21 %	21 %

Sumber data : Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang

Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa ada penurunan target pada sasaran kedua hal ini disebabkan :

1. Jika dibandingkan dengan capaian target kinerja triwulan II terjadi penurunan pada triwulan II tahun 2025 yakni :
   - Jumlah pencari kerja tahun 2025 mengalami peningkatan sebanyak 646 orang dibanding tahun 2024.
   - Lowongan kerja pada tahun 2025 mengalami penurunan 775 lowongan kerja dibanding tahun 2024.
   - Jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun 2025 mengalami penurunan seiring penurunan lowongan kerja yakni sebanyak 424 orang dibanding tahun 2024
2. Adanya efisiensi anggaran pada program dan kegiatan yang mendukung sasaran kedua.
3. Kota Bontang merupakan kota industri, hal ini dikarenakan terdapat perusahaan industri pengolahan skala nasional dan internasional yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar global yang saat ini tidak menentu yang secara tidak langsung akan

berdampak pada perusahaan-perusahan kecil yang berkerjasama dengan perusahaan tersebut, dan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja.

4. Menurut data BPS Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada triwulan II tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar 2,15%, kontraksi ini terutama disebabkan oleh penurunan pada sektor industri pengolahan dan pertambangan. Penurunan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi produktivitas tenaga keja serta kebutuhan tenaga kerja sehingga membuat lapangan kerja yang terbatas dan pemutusan hubungan kerja.

XI. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam melaksanakan Pembangunan di Daerah

Didalam RENSTRA Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) Tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta kebijakan Perangkat Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Perintah Daerah yang termuat didalam dokumen RPJMD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan Dokumen Perencanaan 1 (satu) Tahunan yang merupakan penjabaran atau Rencana Kerja Operasional dari dokumen RENSTRA Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan serta Pagu Anggaran dalam pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA PD. Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah menyusun rancangan awal RENJA PD Tahun 2025 yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana operasional 1 (satu) Tahunan sebagai penjabaran RPJMD.

Untuk memudahkan teknis pelaksanaan RENSTRA PD dijabarkanlah ke dalam RENJA PD yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun berikutnya. Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana telah menyusun RENJA

PD yang telah diselaraskan dengan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2025. Dokumen tersebut selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan dari hasil forum SKPD dan Musrenbang. RKPD Kota Bontang Tahun 2025 merupakan acuan dalam menyusun Rancangan Awal RENJA PD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2025.

Dengan demikian program/kegiatannya diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD, Program dan Kegiatan prioritas yang disertai Pagu Indikatif dalam RENJA PD tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun 2025.

LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun 2025 adalah :

a. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
e. Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
j. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
k. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang.
l. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun 2021 – 2026.

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan yang memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai dengan Indikator Kinerja dan Pendanaan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah bertujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Transparansi, Efektif, Efisien dan Partisipatif dengan meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kota Bontang.

SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian dokumen Rencana Kerja (RENJA) sekurang - kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun - tahun sebelumnya.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3.ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals)*;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
   - Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan
e.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun 2021-2026, Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang berdasarkan. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar azas desentraliasi dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kota Bontang pada tahun 2023 melaksanakan 10 program, 22 kegiatan dan 48 sub-kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 7
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TRIWULAN II TAHUN 2025 KOTA BONTANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah kota Tahun Lalu (2021-2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Triwulan I & II (2025)				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022 s.d 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Kota Bontang Tahun s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II								
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,0	Persen	36.289.365.349	100	Persen	31.118.078.361			15.431.922.201		4.130.831.113		2.133.701.382	-	23.415.450.633	#VALUE!	54.533.528.994	#VALUE!	150,3	DP3AKB
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100	Persen	1.285.685	100	Persen	1.240.000	100	Persen	1.873.506	25	0,00	25	0,00	50	0	150,0	1.240.000	150,00	96,4	DP3AKB
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Dokumen	1.285.685	1	Dokumen	1.240.000	1	Dokumen	1.873.506	0,25	0,00	0,25	0,00	1	0	1	1.240.000	5,00	96,4	DP3AKB
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100,0	Persen	28.250.750.000	100	Persen	20.867.356.469	100	Persen	10.590.517.956	25	2.429.246.684	25	1.269.836.397	50	20.867.356.469	150,0	41.734.712.938	150,00	147,7	DP3AKB
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	Orang/Bulan	28.250.750.000	37	Orang/Bulan	20.867.356.469	43	Orang	10.590.517.956	43	2.429.246.684	43	1.269.836.397	43	20.867.356.469	80	20.867.356.469	250,00	73,9	DP3AKB
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian			0	100	Persen	732.264.546	100	%	357.852.260	25	299.352.100	25	0,00	50	299.352.100	150,0	1.031.616.646	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang		10	Orang	732.264.546	20	Orang	357.852.260	20	299.352.100	0	0,00	20	299.352.100	30	1.031.616.646	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100,0	Persen	1.728.104.864	100	Persen	4.285.443.671	100	%	966.479.715	25	508.038.604	25	129.264.200	50	619.947.554	150,0	4.905.391.225	150,00	283,9	DP3AKB
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	40.000.000	11	Paket	1.390.609.096	15	Paket	489.878.945	4	267.006.453	3	107.930.000	7	374.936.453	15	1.765.545.549	75,00	4413,9	DP3AKB

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah kota Tahun Lalu (2021-2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Triwulan I & II (2025)				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022 s.d 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Kota Bontang Tahun s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II								
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	Paket	590.000.000	3	Paket	72.952.990	3	Paket	18.379.210	2	17.355.250	0	0	2	0	5	72.952.990	33,33	12,4	DP3AKB
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	132.602.756	2	Paket	101.898.682	1	Paket	17.756.560	-	0,00	1	6.501.800	1	6.501.800	2	108.400.482	10,00	81,7	DP3AKB
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280	Laporan	965.502.108	12	Laporan	2.719.982.903	12	Laporan	440.465.000	3	223.676.901	3	14.832.400	6	238.509.301	15	2.958.492.204	5,36	306,4	DP3AKB
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah**			**0**	**100**	**Persen**	**0**	**100**	**Persen**	**907.950.000**	**25**	**342.000.000**	**25**	**492.500.000**	**50**	**834.500.000**	**150,0**	**834.500.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**DP3AKB**
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					-		3	Unit	907.950.000	1	342.000.000	1	492.500.000	2	834.500.000	2,0	834.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran**	**100,0**	**Persen**	**4.793.088.000**		**Persen**	**3.612.407.095**	**100**	**%**	**1.576.113.700**	**25**	**357.624.525**	**25**	**76.585.885**	**50**	**434.210.410**	**50,0**	**4.046.617.505**	**50,00**	**84,4**	**DP3AKB**
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30	Laporan	4.793.088.000		Laporan	3.612.407.095	12	Laporan	1.576.113.700	3	357.624.525	3	76.585.885	6	434.210.410	3	4.046.617.505	10,00	84,4	DP3AKB
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**			**1.516.136.800**		**-**	**1.619.366.580**	**100**	**Persen**	**1.031.135.064**	**25**	**194.569.200**	**25**	**165.514.900**	**50**	**360.084.100**	**50,0**	**1.979.450.680**	**#DIV/0!**	**130,6**	**DP3AKB**
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59,0	Unit	1.396.136.800	36	Unit	1.550.972.830	38	Unit	884.138.564	38	194.569.200	38	165.514.900	38	360.084.100	74	1.911.056.930	125,42	136,9	DP3AKB
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	120.000.000	22	Unit	68.393.750	35	Unit	45.420.000	-	0,00	-	0,00	-	-	22	68.393.750	137,50	57,0	DP3AKB

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah kota Tahun Lalu (2021-2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Triwulan I & II (2025)				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022 s.d 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Kota Bontang Tahun s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp		K	Rp		K	Rp	I		II								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					-		1	Unit	101.576.500	-	0,00	-	0,00	-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**-**									**-**	**0**	**-**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**DP3AKB**
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD**			838.297.645		-	4.347.122.200			745.584.540		152.219.300			-	200.530.500	-	4.547.652.700	#DIV/0!	542,5	DP3AKB
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**			**838.297.645**		**-**	**4.347.122.200**	**100**	**Persen**	**230.963.400**	**25**	**152.219.300**	**25**		**50**	**153.919.300**	**50,0**	**4.501.041.500**	**#DIV/0!**	**536,9**	**DP3AKB**
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	124	Dokumen	838.297.645	11	Dokumen	4.347.122.200	1	Dokumen	230.963.400	0,25	152.219.300	0,25	1.700.000	1	153.919.300	11	4.501.041.500	9,07	536,9	DP3AKB
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Tingkat Partisipasi Organisasi perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi**			**0**		**-**	**0**	**100**	**Persen**	**514.621.140**		**-**		**46.611.200**	**-**	**46.611.200**	**-**	**46.611.200**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**DP3AKB**
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					-		3	Organisasi	514.621.140	-	0,00	-	46.611.200	-	46.611.200	-	46.611.200	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan**			**1.464.118.903**		**-**	**4.942.775.362**	**100**	**Persen**	**1.139.800.802**	**100**	**454.087.942**	**100**	**26.744.529**	**100**	**526.644.389**	**100,0**	**5.469.419.751**	**#DIV/0!**	**373,6**	**DP3AKB**
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Tercapainya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			**71.330.000**		**-**	**725.881.874**	**100**	**Persen**	**270.694.035**	**25**	**14.265.965**	**25**	**26.744.529**	**50**	**41.010.494**	**50,0**	**766.892.368**	**#REF!**	**1075,1**	**DP3AKB**
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	71.330.000	1	Dokumen	614.613.474	1	Dokumen	126.974.382	0,25	14.265.965	0,25	10.982.129	0,50	25.248.094	1	639.861.568	25,00	897,0	DP3AKB

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah kota Tahun Lalu (2021-2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Triwulan I & II (2025)				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022 s.d 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Kota Bontang Tahun s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II								
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				16	OPD	111.268.400	3	Perangkat Daerah	143.719.653	-	0,00	1	15762400,00	1	15.762.400	16	127.030.800	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Layanan UPTD PPA**			**1.392.788.903**	**50**	**Persen**	**3.419.806.712**	**100**	**Persen**	**869.106.767**	**100,0**	**439.821.977**	**100**		**100**	**485.633.895**	**100,0**	**3.905.440.607**	**#DIV/0!**	**280,4**	**DP3AKB**
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan Layanan	200	Orang	852.576.420	41	Orang	2.680.646.422	50	Orang	869.106.767	7	439.821.977	11	45.811.918	18	485.633.895	48	3.166.280.317	24,00	371,4	DP3AKB
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga**			**1.183.850.994**		**-**	**1.127.496.924**	**100**	**Persen**	**238.772.528**	**25,0**	**3.460.000**	**25**	**5.592.400**	**50**	**9.052.400**	**50,0**	**1.136.549.324**	**#DIV/0!**	**96,0**	**DP3AKB**
2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)**			**640.485.173**		**-**	**330.410.148**	**100**	**Persen**	**238.772.528**	**25,0**	**3.460.000**	**25**	**5.592.400**	**50**	**9.052.400**	**50,0**	**339.462.548**	**#DIV/0!**	**53,0**	**DP3AKB**
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	Layanan	640.485.173	42	Layanan	330.410.148	3	Layanan	238.772.528	3	3.460.000	**3**	5.592.400	6	9.052.400	45	339.462.548	45,00	53,0	DP3AKB
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan data gender dan anak terpadu**			**232.050.000**		**-**	**233.776.022**	**100**	**Persen**	**6.836.952**	**25,0**	**0,00**	**25**	**0,00**	**50**	**0**	**50,0**	**233.776.022**	**#DIV/0!**	**100,7**	**DP3AKB**
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya data gender dan anak terpadu**			**232.050.000**		**-**	**233.776.022**	**100**	**Persen**	**6.836.952**	**25**	**0,00**	**25**	**0,00**	**50**	**0**	**50,0**	**233.776.022**	**#DIV/0!**	**100,7**	**DP3AKB**
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	Dokumen	232.050.000	2	Dokumen	233.776.022	1	Dokumen	6.836.952	0,25	0,00	0,25	0,00	1	0	2	233.776.022	56,25	100,7	DP3AKB
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Predikat Kota Layak Anak**			578.237.924		-	778.328.460			389.151.260		19.656.324			-	29.471.124	-	807.799.584	#DIV/0!	139,7	DP3AKB

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah kota Tahun Lalu (2021-2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Triwulan I & II (2025)				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022 s.d 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Kota Bontang Tahun s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K			K			K		I		II									
					Rp			Rp			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang telah mendapatkan Pelembagaan PHA**			**578.237.924**		**-**	**778.328.460**			**389.151.260**		**19.656.324**		**9814800,00**	**-**	**29.471.124**	**-**	**807.799.584**	**#DIV/0!**	**139,7**	**DP3AKB**
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	200	Organisasi	365.835.109	61	Organisasi	543.247.187	100	Organisasi	266.495.159	70	13.070.000	9	9.814.800	79	22.884.800	131	566.131.987	65,50	154,8	DP3AKB
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19	Dokumen	212.402.815	3	Dokumen	235.081.273	45	Dokumen	122.656.101	45	6.586.324	0	0	45	6.586.324	48	241.667.597	252,63	113,8	DP3AKB
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus**			**187.000.000**		**-**	**1.157.736.151**			**1.035.101.483**		**32.439.705**			**-**	**122.941.505**	**-**	**1.280.677.656**	**#DIV/0!**	**684,9**	**DP3AKB**
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Kasus yang masuk**			**0**		**-**	**457.242.732**			**410.692.451**		**8.279.000**		**13.462.000**	**-**	**21.741.000**	**-**	**478.983.732**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**DP3AKB**
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				43	Orang	279.801.527	60	Orang	410.692.451	60	8.279.000	0	13.462.000	60	21.741.000	103	301.542.527	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus**			**0**		**-**	**0**			**624.409.032**		**24.160.705**		**77.039.800**	**-**	**101.200.505**	**-**	**101.200.505**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**DP3AKB**
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK					-		3	Kegiatan	142.041.300	1	0,00	1	6.274.800	2	6.274.800	2,0	6.274.800	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak					-		2	Dokumen	482.367.732	0,50	24.160.705	1	70.765.000	2	94.925.705	1,5	94.925.705	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						-									-	0	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah kota Tahun Lalu (2021-2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Triwulan I & II (2025)				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022 s.d 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Kota Bontang Tahun s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II								
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Rata-rata jumlah anak per keluarga**			**935.841.900**		**-**	**3.231.454.947**			**717.652.364**	**1,48**	**102.409.785**	**1,48**	**117.836.480**	**3**	**220.246.265**	**3,0**	**#REF!**	**#DIV/0!**	**#REF!**	**DP3AKB**
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Tercapainya pengendalian kuantitas penduduk**			**517.841.188**		**-**	**1.590.981.512**	**61**	**Persen**	**319.678.767**		**66.968.980**		**106.395.280**	**-**	**173.364.260**	**-**	**1.764.345.772**	**#DIV/0!**	**340,7**	**DP3AKB**
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	517.841.188	1	Dokumen	436.585.941	1	Dokumen	181.960.560	0,25	21.705.380	0,25	88.404.200	1	110.109.580	1	546.695.521	125,00	105,6	DP3AKB
2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota					-		1	Dokumen	71.592.207	0,25	0,00	0,25	14.688.680	1	14.688.680	0,5	14.688.680	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				3	Laporan	631.954.885	12	Kegiatan	66.126.000	1	45.263.600	1,0	3.302.400	2	48.566.000	4	680.520.885	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpetakannya Perkiraan Pengendalian Penduduk**			**418.000.712**		**-**	**1.640.473.435**			**397.973.597**		**35.440.805**		**11.441.200**	**-**	**46.882.005**	**-**	**#REF!**	**#DIV/0!**	**#REF!**	**DP3AKB**
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1	Laporan	101.300.000	1	Laporan	188.438.000	0,25	6.415.700	0,25	4.691.200	1	11.106.900	1	112.406.900	125,00	111,0	DP3AKB
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				8	Rumah Data	306.248.785	15	Unit	43.895.984	4	8.067.060	2	6.750.000	6	14.817.060	12	321.065.845	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				1	Laporan	526.932.612	1	Laporan	165.639.613	0,25	20.958.045	0,25	0	1	20.958.045	1	547.890.657	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Akseptor KB**			**120.000.000**		**-**	**7.871.361.697**			**1.511.662.880**		**106.507.155**			**-**	**144.269.925**	**-**	**6.667.558.257**	**#DIV/0!**	**5556,3**	**DP3AKB**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah kota Tahun Lalu (2021-2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Triwulan I & II (2025)				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022 s.d 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Kota Bontang Tahun s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II								
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Pelaksanan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB (Monev)**			**0**		**-**	**3.782.267.762**	**100**	**Persen**	**332.099.302**	**25,0**	**25.064.480**	**25,0**	**38.796.530**	**50**	**41.939.760**	**50,0**	**2.476.134.157**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**DP3AKB**
2.14.03.2.01.0006	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1	Laporan	178.916.000	3	Laporan	233.093.038	3	30.981.250	3	21.921.250	6	52.902.500	4				
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1	Dokumen	968.546.120	2	Dokumen	332.099.302	1	25.064.480,00	1	16.875.280	2	41.939.760	2	1.010.485.880	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			**0**		**-**	**469.943.000**			**173.461.600**		**14.106.565**		**25.886.800**	**-**	**39.993.365**	**-**	**509.936.365**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**DP3AKB**
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				30	Orang	147.000.000	65	Kader	102.817.500	65	14.106.565	65	25.886.800	130	39.993.365	95	186.993.365	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1	Laporan	312.943.000	1	Laporan	70.644.100	-	0,00	-	0,00	-	0	1	312.943.000	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terkendalinya dan terdistribusinya Alat, Obat Kontrasepsi dan Pelayanan KB**			**120.000.000**		**-**	**3.168.409.378**	**100**	**Persen**	**900.225.959**	**25,0**	**34.213.710**	**25,0**	**19.273.010**	**50**	**8.172.000**	**50,0**	**3.176.581.378**	**#DIV/0!**	**2647,2**	**DP3AKB**
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				4	Unit	1.053.437.513	5	Unit	55.331.169	2	5.110.000	1	3.062.000	3	8.172.000	6	1.061.609.513	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi					-		20	Orang	324.167.255	-	0,00	3	4.714.500	3	4.714.500	-	4.714.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1	Laporan	638.814.917	1	Laporam	462.885.916	0,25	11.895.455	0,25	11.496.510	1	23.391.965	1	662.206.882	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah kota Tahun Lalu (2021-2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Triwulan I & II (2025)				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022 s.d 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Kota Bontang Tahun s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp		K	Rp		K	Rp	I		II								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp					
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				120	Orang	71.596.980	120	Orang	27.823.674	-	0,00	0	0	-	0	120	71.596.980	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				38	Orang	24.076.900	75	Orang	30.017.945	25	17.208.255	50	0	75	17.208.255	63	41.285.155	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Terlaksanannya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**			**0**		**-**	**450.741.557**	**100**	**Persen**	**105.876.019**	**25,0**	**33.122.400**	**25,0**	**21.042.400**	**50**	**54.164.800**	**50,0**	**504.906.357**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**DP3AKB**
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					-		15	Kampung KB	105.876.019	15	33.122.400	15	21.042.400	30	54.164.800	30,0	54.164.800	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga yang berpartisipasi dalam Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**957.000.000**		**-**	**6.177.187.183**	**100**	**Persen**	**2.110.397.811**	**25,0**	**65.231.960**	**25,0**		**50**	**574.520.710**	**50,0**	**6.751.707.893**	**#DIV/0!**	**705,5**	**DP3AKB**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Kelompok Kegiatan yang Melaksanakan Edukasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**507.000.000**		**-**	**3.861.511.344**	**100**	**Persen**	**557.811.255**	**25,0**	**41.705.580**	**25,0**	**42.901.000**	**50**	**84.606.580**	**50,0**	**3.946.117.924**	**#DIV/0!**	**778,3**	**DP3AKB**
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) **(STUNTING)**	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	5	Laporan	507.000.000	1	Laporan	417.916.766	2	Laporan	153.387.008	2	32.101.500	2,0	31.130.000,00	4	63.231.500	3	481.148.266	60,00	94,9	DP3AKB
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) **(STUNTING)**	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1	Laporan	308.573.872	1	Laporan	191.180.597	0,25	0,00	0,25	0,00	1	0	1	308.573.872	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				36	Orang	190.159.026	216	Orang	112.804.800	1	6.205.080	-	1.440.000,00	1	7.645.080	37	197.804.106	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1	Laporan	76.989.500	2	Laporan	100.438.850	0,50	3.399.000	0,50	10.331.000,00	1	13.730.000	2	90.719.500	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Kota Bontang Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah kota Tahun Lalu (2021-2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Triwulan I & II (2025)				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan dievaluasi (tahun 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022 s.d 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Kota Bontang Tahun s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II								
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Tersedianya kelompok Tribina dan UPPKS yang dibina dan dibentuk**			**450.000.000**		**-**	**2.315.675.839**	**100**	**Persen**	**1.552.586.556**	**25,0**	**23.526.380**	**25**	**466.387.750**	**50**	**489.914.130**	**50,0**	**2.805.589.969**	**#DIV/0!**	**623,5**	**DP3AKB**
2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) **(STUNTING)**	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1	Organisasi	106.639.133	1	Organisasi	19.280.000	-	0,00	1,0	2.000.000,00	1	2.000.000	1	108.639.133	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	24	Laporan	450.000.000	2	Laporan	682.147.513	3	Laporan	340.484.528	1,00	18.033.000	-	74.387.750,00	1	92.420.750	3	774.568.263	12,50	172,1	DP3AKB
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				2	Laporan	1.035.223.693	4	Laporan	1.192.822.028	1,0	5.493.380	1,0	390.000.000,00	2	395.493.380	3	1.430.717.073	#DIV/0!	#DIV/0!	DP3AKB
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																						

Sumber : E-Smart Monitoring Fisik dan Keuangan serta Kinerja Triwulan II 2025

1.1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang menangani satu urusan wajib yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam kaitan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkewajiban memenuhi target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dalam pencapaian target pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

TABEL 2. 8
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BONTANG

NO.	INDIKATOR KINERJA	Kondisi pada awal periode RENSTRA	REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI RENSTRA PD	PROYEKSI AKHIR PERIODE RENSTRA	Catatan Analisis
			2022	2023	2024	Triwulan II 2025	2025		
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	56,36%	53,71%	53,71%	57,30%	57,30%	57%	60%	Perubahan Target dari Hasil Capaian pada Triwulan II Tahun 2025
2	Persentase Anggaran Gender pada Belanja Langsung APBD	0,02%	0,03%	0,03%	0,63%	0,63%	0,5%	25%	-
3	Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
4	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	80%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	Perubahan Target dari Hasil Capaian pada Triwulan II Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	Kondisi pada awal periode RENSTRA	REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI RENSTRA PD	PROYEKSI AKHIR PERIODE RENSTRA	Catatan Analisis
			2022	2023	2024	Triwulan II 2025	2025		
5	Persentase Data Gender dan Anak Terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
6	Predikat Hasil Evaluasi Kabupatan/Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya (790)	Utama (790)	Utama (859)	Utama (800)	Utama (800)	-
7	Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
8	Rata-Rata Anak dalam Keluarga	1,66	0,97	0,97	1,48	1,48	1,45	1,5	Perubahan Target dari Hasil Capaian pada Triwulan II Tahun 2025
9	Persentase Akseptor (Peserta KB Aktif)	71,87%	67%	67,37%	77,13%	77,82%	75%	75%	Perubahan Target dari Hasil Capaian pada Triwulan II Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	Kondisi pada awal periode RENSTRA	REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI RENSTRA PD	PROYEKSI AKHIR PERIODE RENSTRA	Catatan Analisis
			2022	2023	2024	Triwulan II 2025	2025		
10	Persentase pemberdayaan Kelompok Kegiatan Bangga Kencana	91,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perubahan Target dari Hasil Capaian pada Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan Hasil analisis capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap target RENSTRA 2021-2026 (target Awal) menunjukkan beberapa indikator telah melampaui target. Berdasarkan realisasi tersebut, target kinerja disesuaikan sebagaimana terinci di bawah ini :

- Indikator "**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**" target awal (47,85%) telah terlampaui oleh realisasi Triwulan II Tahun 2025 sebesar (56,30%). Oleh karenanya, target disesuaikan menjadi **57%**.
- Indikator "**Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga**" target awal (80%) telah terlampaui oleh realisasi Triwulan II Tahun 2025 sebesar (100%). Oleh karenanya, target disesuaikan menjadi **100%**.
- Indikator " **Rata-Rata Anak dalam Keluarga**" target awal (Rasio 1,9) telah terlampaui oleh realisasi Triwulan II Tahun 2025 sebesar (Rasio 1,48). Oleh karenanya, target disesuaikan menjadi Rasio **1,5**.
- Indikator "**Persentase Akseptor (Peserta KB Aktif)**" target awal (71,5%) telah terlampaui oleh realisasi Triwulan II Tahun 2025 sebesar (77,83%). Oleh karenanya, target disesuaikan menjadi **75%**, penetapan target ini merupakan target optimal dari capaian Peserta KB aktif dan dengan pertimbangan diakibatkan terjadi penurunan capaian pada Triwulan I (78,54%) sebanyak 0,72%
- Indikator " **Persentase pemberdayaan Kelompok Kegiatan Bangga Kencana**" target awal (79%) telah terlampaui oleh realisasi Triwulan II Tahun 2025 sebesar (100%). Oleh karenanya, target disesuaikan menjadi **100%**.
-

1.2. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

1. Data Peran Aktif Perempuan
   Dalam perkembangan sistem tata kelola peran aktif perempuan diberbagai sektor masih belum cukup akurat, masih terindikasi adanya pengelolaan yang belum memadai sesuai dengan tuntutan perubahan dan perkembangan yang terjadi saat ini begitu cepat di Kota Bontang, hal ini menyebabkan pelayanan peran aktif perempuan secara faktual belum mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan contoh keterlibatan perempuan dalam politik sebanyak 30% di

parlemen belum terpenuhi. Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya peran aktif perempuan di berbagai sektor pembangunan antara lain bidang eksekutif, legislatif, yudikatif dan di dunia usaha dan industri.

2. Perlindungan Perempuan dan Anak
   Perlindungan perempuan dan anak pada hakekatnya merupakan Hak Azasi Manusia yang telah diatur oleh undang-undang dan berdasarkan ratifikasi piagam PBB tentang hak-hak perempuan dan anak dalam obyek dan subyek pembangunan.
   Dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak, masalah yang dihadapi sering terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan baik di rumahtangga, lingkungan sekitarnya, tempat pendidikan, lokasi kerja, dan tidak ditunjang dengan dokumen data lain. Akibat dari permasalahan ini, data permasalahan tindakan perlindungan perempuan dan anak menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya.
3. Keluarga Berencana
   Program Keluarga Berencana adalah pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas memiliki peran sangat penting dalam mencapai peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pengendalian kuantitas penduduk merupakan salah satu prioritas pembangunan karena akan dapat menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang di masa yang akan datang. Pengendalian kuantitas penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatakan kualitas keluarga kecil yang yang dilaksanakan melalui pembangunan Keluarga Berencana dan berbagai pembangunan lainnya.

Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan keluarga berencana adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya kegagalan program KB. Rendahnya pelaporan kegagalan program KB disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kegagalan program KB. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kegagalan program KB belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

1.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada. Review terhadap

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang terlihat pada Tabel Berikut :

TABEL 2. 9
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL
KOTA BONTANG TAHUN 2025

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Penyelengaraan Urusan Pemerintahan dan Layanan Kantor**	**100**	**%**	**7.678.733.105**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Penyelengaraan Urusan Pemerintahan dan Layanan Kantor**	**100**	**%**	**15.282.071.727**
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPPKB**	**100**	**%**	**-**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPPKB**	**100**	**%**	**1.580.794**
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Dokumen	0,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	1.580.794
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Keuangan**	**100**	**%**	**5.650.750.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Administrasi Keuangan**	**100**	**%**	**10.590.517.956**
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	38	Orang	5.650.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	43	Orang	10.590.517.956
2.08.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1	Laporan	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	-	Laporan	0,00
2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Kepegawaian**	**100**	**%**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kinerja Kepegawaian**	**100**	**%**	**357.852.260**

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek	2	Orang	0,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek	20	Orang	357.852.260
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Urusan Administrasi Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**465.176.905**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Urusan Administrasi Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**996.201.053**
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	506.243.338
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	31.736.155
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	36.301.378	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	17.756.560
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	Laporan	218.875.527	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	Laporan	440.465.000
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatanya Sarana Penunjang di DPPKB**	**100**	**%**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatanya Sarana Penunjang di DPPKB**		**%**	**907.950.000**
2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit	0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	907.950.000
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	0,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Unit	0,00
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan di DPPKB**	**100**	**%**	**1.216.272.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan di DPPKB**	**100**	**%**	**1.415.331.200**
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Laporan	0,00

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Laporan	0,00
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.198.272.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.415.331.200
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**346.534.200**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.012.638.464**
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59	Unit	316.534.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38	Unit	860.322.564
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit	45.420.000
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	106.895.900
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**47,78**	**%**	**619.300.300**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**	**47,78**	**%**	**689.206.452**
		Persentase Anggaran Gender pada Belanja Langsung APBD	**0,412**	**%**			**Persentase Anggaran Gender pada Belanja Langsung APBD**	**0,412**	**%**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**100**	**%**	**619.300.300**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**100**	**%**	**232.820.162**

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	31	Dokumen	219.300.300	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	32	Dokumen	232.820.162
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG dan PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi	31	Perangkat Daerah	400.000.000	Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG dan PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi	30	Perangkat Daerah	0,00
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**100**	**%**	**-**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**100**	**%**	**456.386.290**
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	-	Organisasi	0,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	3	Organisasi	456.386.290
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan**	**100**	**%**	**368.726.930**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan**	**100**	**%**	**1.195.203.030**
2.08.03.2.01	**Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilingkup daerah kab/kota**	**Tercapainya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**59.229.500**	**Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilingkup daerah kab/kota**	**Tercapainya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**270.802.433**
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	-	Dokumen	0,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	126.954.382

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	Perangkat Daerah	59.229.500	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	Perangkat Daerah	143.848.051
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya layanan UPTD PPA**	**100**	**%**	**309.497.430**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya layanan UPTD PPA**	**100**	**%**	**924.400.597**
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	40	Orang	201.247.200	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	40	Orang	869.091.753
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	4	Layanan	108.250.230	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	-	Layanan	55.308.844
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga**	**60**	**%**	**270.113.140**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga**	**40**	**%**	**238.768.889**
2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota**	**Terlaksananya layanan Puspaga, SDM, Jejaring antar lembaga penyedia layanan**	**100**	**%**	**132.879.140**	**Penguatan dan Pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota**	**Terlaksananya layanan Puspaga, SDM, Jejaring antar lembaga penyedia layanan**	**100**	**%**	**0**
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	15	Orang	132.879.140	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Orang	0,00

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG**	**100**	**%**	**137.234.000**	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG**	**100**	**%**	**238.768.889**
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	20	Layanan	137.234.000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	20	Layanan	238.768.889
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan Data Gender dan Anak Terpadu**	**100**	**%**	**60.500.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan Data Gender dan Anak Terpadu**	**100**	**%**	**63.212.852**
2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Pelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Data Gender dan Anak**	**100**	**%**	**60.500.000**	**Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Pelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Data Gender dan Anak**	**100**	**%**	**63.212.852**
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dokumen	60.500.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dokumen	63.212.852
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Predikat Kota Layak Anak**	**Nindya**	**Predikat**	**150.000.000**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Predikat Kota Layak Anak**	**Nindya**	**Predikat**	**367.091.392**
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha kewenangan Kab/Kota**	**Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha yang telah mendapatkan pelembagaan PHA**	**35**	**Lembaga**	**124.070.023**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha kewenangan Kab/Kota**	**Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha yang telah mendapatkan pelembagaan PHA**	**35**	**Lembaga**	**367.091.392**
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi	40	Organisasi	76.620.524	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi	100	Organisasi	244.462.291

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	3	Dokumen	47.449.499	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	2	Dokumen	122.629.101
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**100**	**%**	**295.000.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**100**	**%**	**1.340.555.838**
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Tercapainya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**98.000.000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Tercapainya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**129.995.000**
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50	Orang	0,00	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50	Orang	129.995.000
2.08.07.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	10	Perangkat Daerah	33.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	-	Perangkat Daerah	0,00
2.08.07.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Dokumen	65.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten Kota.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0,00
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/kota**	**Persentase Penyelesaian Kasus Masuk**	**100**	**%**	**165.000.000**	**Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/kota**	**Persentase Penyelesaian Kasus Masuk**	**100**	**%**	**716.156.112**

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.07.2.02.0003	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE	1	Dokumen	35.000.000	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE	-	Dokumen	0,00
2.08.07.2.02.0001	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	80	Orang	130.000.000	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	Orang	0,00
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	-	Orang	0,00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	60	Orang	484.175.012
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	-	Layanan	0,00	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	85	Layanan	231.981.100
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terselesaikannya Kegiatan Pengembangan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**100**	**%**	**32.000.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terselesaikannya Kegiatan Pengembangan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**100**	**%**	**494.404.726**
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1	Dokumen	32.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1	Dokumen	0

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Dokumen	0,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0,00
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	-	Kegiatan	0,00	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	3	Kegiatan	142.019.100
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan	-	Orang	0,00	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan	2	Orang	88.399.820
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	-	Dokumen	0,00	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1	Dokumen	263.985.806
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Rata-rata jumlah anak per keluarga**	**2**	**Rasio**	**200.739.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Rata-rata jumlah anak per keluarga**	**2**	**Rasio**	**728.933.142**
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Tercapainya Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**51,05**	**%**	**118.739.000**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Tercapainya Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**100**	**%**	**314.867.000**

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1	Dokumen	118.739.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1	Dokumen	178.802.000
2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	-	Dokumen	0,00	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	69.939.000
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan	-	Satuan Pendidikan	0,00	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan	5	Satuan Pendidikan	0,00
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan	-	Dokumen	0,00	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan	1	Dokumen	66.126.000
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpetakannya perkiraan pengendalian penduduk**	**100**	**%**	**82.000.000**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpetakannya perkiraan pengendalian penduduk**	**100**	**%**	**414.066.142**
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1	Laporan	0,00	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1	Laporan	38.999.940
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	Laporan	0,00	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	Laporan	163.901.345

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2	Dokumen	5.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	Dokumen	30.800.000
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	-	Unit	0,00	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	15	Unit	43.885.984
2.14.02.2.02.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	2	Laporan	77.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	-	Laporan	0,00
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	-	Laporan	0,00	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1	Laporan	136.478.873
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Rasio Akseptor**	**75**	**%**	**80.824.975**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Rasio Akseptor**	**70,5**	**%**	**1.866.746.108**
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Pelaksanan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB (Monev)**	**-**	**%**	**0,00**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Pelaksanan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB (Monev)**	**85**	**%**	**688.576.439**

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.03.2.01.0001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana	-	Organisasi	0,00	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana	0	Organisasi	0,00
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3	Laporan	0,00	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3	Laporan	233.090.764
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokalkarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana	-	Laporan	0,00	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokalkarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana	3	Laporan	61.088.000
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga	-	Dokumen	0,00	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga	2	Dokumen	24.250.000
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana	-	Dokumen	0,00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana	2	Dokumen	307.892.675
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	Organisasi	0,00	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	**11**	Organisasi	62.255.000

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB**	**4**	**Kegiatan**	**14.000.000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Terkendalinya dan terdistribusinya Alat, Obat Kontrasepsi dan Pelayanan KB**	**100**	**%**	**173.404.139**
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader IMP	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	Orang	14.000.000	Penggerakan Kader IMP	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	65	Orang	102.794.139
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	Laporan	0,00	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	Laporan	70.610.000
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terkendalinya dan terdistribusinya Alat, Obat Kontrasepsi dan Pelayanan KB**	**100**	**%**	**66.824.975**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Terkendalinya dan terdistribusinya Alat, Obat Kontrasepsi dan Pelayanan KB**		**%**	**898.918.461**
2.14.03.2.03.001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	Laporan	0,00	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringan	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringan		Laporan	0,00
2.14.03.2.03.002	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	43	Orang	0,00	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	Orang	0

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	Orang	0,00	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20	Orang	320.247.275
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3	Unit	21.824.975,00	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5	Unit	57.628.724
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	42	Laporan	30.000.000,00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	Laporan	2.700.000
2.14.03.2.03.0009	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	50	Orang	15.000.000,00	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	-	Orang	0,00
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga	-	Orang	0,00	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga	20	Orang	325.171.255
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	-	Laporan	0,00	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1	Laporan	130.298.152
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaraan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	-	Orang	0,00	Peningkatan Kesertaraan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	70	Orang	45.664.800
2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kesertaan organisasi masyarakat dalam Program Bangga Kencana	-	persen	0,00	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kesertaan organisasi masyarakat dalam Program Bangga Kencana	75	Orang	17.208.255

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**jumlah kesertaan organisasi masyarakat dalam Program Bangga Kencana**	**100**	**%**	-	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**jumlah kesertaan organisasi masyarakat dalam Program Bangga Kencana**	**100**	**%**	**105.847.069**
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	Kampung KB	0,00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15	Kampung KB	105.847.069
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase pemberdayaan Kelompok Kegiatan Bangga Kencana**	**75**	**%**	**1.040.400.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase pemberdayaan Kelompok Kegiatan Bangga Kencana**	**75**	**%**	**1.988.186.429**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam ketahanan dan kesejahteraan Keluarga**	**100**	**%**	**688.000.000**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam ketahanan dan kesejahteraan Keluarga**	**100**	**%**	**587.902.523**
2.14.04.2.01.002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	15	Unit	24.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	Unit	0,00
2.14.04.2.01.003	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2	Laporan	118.000.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	Laporan	0,00

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.04.2.01.0004	Orientasi/PelatihanTeknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan emberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	413	Orang	175.000.000	Orientasi/PelatihanTeknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan emberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	Orang	0,00
2.14.04.2.01.0005	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	Orang	0	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	Orang	0,00
2.14.04.2.01.0006	Penyediaan Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	153	Kelompok	90.000.000	Penyediaan Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	Kelompok	0,00
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	Laporan	128.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2	Laporan	145.328.158
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	Laporan	153.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	Laporan	202.862.378

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	-	Unit	0,00	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1	Unit	13.482.500
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	Orang	0,00	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	216	Orang	89.880.215
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	-	Laporan	0,00	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2	Laporan	136.349.272

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Tersedianya kelompok Tribina dan UPPKS yang dibina dan dibentuk**	**75**	**%**	**352.400.000**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Tersedianya kelompok Tribina dan UPPKS yang dibina dan dibentuk**	**75**	**%**	**1.400.283.906**
2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah	4	Organisasi	135.000.000	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah	1	Organisasi	58.980.000
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan	6	Laporan	115.000.000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan	3	Laporan	356.763.452
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	3	Laporan	102.400.000	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4	Laporan	438.784.000
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	Laporan	0,00	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1	Laporan	213.056.454

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	Laporan	0,00	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1	Laporan	332.700.000
JUMLAH					**10.764.337.450**					**23.759.975.859**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Bontang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Bontang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Bontang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Bontang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Bontang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"**MEWUJUDKAN KOTA BONTANG SEBAGAI KOTA INDUSTRI DAN JASA YANG MAJU, CERDAS, BERKELANJUTAN, EKONOMI DINAMIS, DAN SEJAHTERA SEBAGAI DAERAH MITRA IKN BARU"**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah "**Meningkatnya Ketahanan Keluarga"**

Tabel 3. 5
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
RPJMD KOTA BONTANG 2025-2029

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN
T2.	Terwujudnya Kota Bontang yang Sejahtera	Angka Kemiskinan	S11	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Indeks pembangunan keluarga

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam dokumen perencanaan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahunan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yang melekatkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah apa yang akan dicapai dan dihasilkan.

Pada dasarnya tujuan RENJA ialah Suatu kondisi yang ideal yang ingin dicapai/dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) Tahun, Tujuan dan Saaran RENJA Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang :

Tujuan : Mewujudkan keluarga yang berkualitas, peran aktif perempuan dalam pembangunan, perlindungan terhadap perempuan dan anak menuju keluarga yang sejahtera.

Sasaran : Meningkatnya Akses Pemberdayaan yang Responsif Gender dan Layanan Kesehatan Keluarga Berencana

Tujuan dan Sasaran serta Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3. 6
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BONTANG TAHUN 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Mewujudkan keluarga yang berkualitas, peran aktif perempuan dalam pembangunan, perlindungan terhadap perempuan dan anak menuju keluarga yang sejahtera.	Meningkatnya Akses Pemberdayaan yang Responsif Gender dan Layanan Kesehatan Keluarga Berencana	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
			Persentase Anggaran Gender pada Belanja Langsung APBD
			Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga
			Persentase Data Gender dan Anak Terpadu
			Predikat Hasil Evaluasi Kabupatan/Kota Layak Anak
			Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus
			Rata-Rata Anak dalam Keluarga
			Persentase Akseptor (Peserta KB Aktif
			Persentase pemberdayaan Kelompok Kegiatan Bangga Kencana

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang.

Penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana serta pembangunan keluarga , dilaksanakan melalui program "**Mewujudkan keluarga yang berkualitas, peran aktif perempuan dalam pembangunan, perlindungan terhadap perempuan dan anak menuju keluarga yang sejahtera.**"

Dalam melaksanakan 10 program, 24 kegiatan dan 47 sub-kegiatan tersebut Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang telah mengusulkan Pagu Anggaran sebesar ***Rp. 23.759.975.859,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah)*** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang dimana DP3AKB Kota Bontang untuk Tahun Anggaran 2025 telah menyusun Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Tahun Anggaran 2025. Dokumen RENJA Perangkat Daerah tersebut berisikan usulan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Usulan Program dan Kegiatan OPD DP3AKB sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Program ini Memiliki kegiatan antara lain :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :

      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :

      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :

      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :

      - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

   e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :

      - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :

      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Program ini Memiliki kegiatan antara lain :
a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Program ini Memiliki kegiatan antara lain :
a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan

bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
   Program ini Memiliki kegiatan antara lain :
   a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
      - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   b. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
      - Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
   Program ini Memiliki kegiatan antara lain :
   a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
      - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
   Program ini Memiliki kegiatan antara lain :
   a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
      - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
   Program ini Memiliki kegiatan antara lain :
   a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
   - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota

8. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
   Program ini Memiliki kegiatan antara lain :
   a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
      - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
      - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
      - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal
      - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal

   b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
      - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
      - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

- Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
- Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

9. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
   Program ini Memiliki kegiatan antara lain :
   a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
      - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
      - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal

   b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
      - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
      - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

   c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
      - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
      - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
      - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
      - Peningkatan Kesertaraan KB Pria
      - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
      - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan

   d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
      Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :
      - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

10. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Program ini Memiliki kegiatan antara lain :

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :

- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
- Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kegiatan ini Memiliki Sub Kegiatan :

- Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja

Usulan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4. 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025 SERTA PERKIRAAN MAJU 2026
KOTA BONTANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				**26.994.616.521,00**	**23.759.975.859,00**	**1.632.219.446,00**				**18.697.390.706,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**26.994.616.521,00**	**23.759.975.859,00**	**1.632.219.446,00**				**18.697.390.706,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**21.218.265.751,00**	**19.176.110.180,00**	**813.955.629,00**				**15.851.367.733,00**	
1,	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Penyelengaraan Urusan Pemerintahan dan Layanan Kantor**	**100 Persen**	**100 Persen**	**16.098.671.685,00**	**15.282.071.727,00**	**-1.367.444.435,00**				**12.837.517.433,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	1.873.506,00	1.580.794,00	-292.712,00				1.971.285,00	DP3AKB
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	1.873.506,00	1.580.794,00	-292.712,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	DANA BAGI HASIL (DBH)		1.971.285,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah ASN dan PPPK DP3AKB*	43 Orang	43 Orang	10.590.517.956,00	10.590.517.956,00	35.396.826,00				9.500.000.000,00	DP3AKB
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	10.590.517.956,00	10.590.517.956,00	35.396.826,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9.500.000.000,00	DP3AKB
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kinerja Kepegawaian*	100 Persen	100 Persen	389.876.000,00	357.852.260,00	267.852.260,00				200.000.000,00	DP3AKB
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	389.876.000,00	357.852.260,00	267.852.260,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		200.000.000,00	DP3AKB
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Urusan administrasi perangkat daerah*	100 Persen	100 Persen	1.579.796.259,00	996.201.053,00	189.498.625,00				758.740.460,00	DP3AKB
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	557.540.269,00	506.243.338,00	302.124.296,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	DANA BAGI HASIL (DBH)		200.000.000,00	DP3AKB
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	18.379.210,00	31.736.155,00	13.356.945,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	DANA BAGI HASIL (DBH)		35.000.000,00	DP3AKB
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.272.780,00	17.756.560,00	-5.919.616,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	DANA BAGI HASIL (DBH)		23.740.460,00	DP3AKB
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	972.604.000,00	440.465.000,00	-120.063.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)		500.000.000,00	DP3AKB
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya sarana penunjang di DP3AKB*	100 Persen	100 Persen	907.950.000,00	907.950.000,00	451.996.000,00				0,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	907.950.000,00	907.950.000,00	451.996.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		0,00	DP3AKB
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya sarana penunjang di DP3AKB*	100 Persen	100 Persen	1.576.113.700,00	1.415.331.200,00	281.402.960,00				1.556.805.688,00	DP3AKB
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		250.000.000,00	DP3AKB
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.576.113.700,00	1.415.331.200,00	281.402.960,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)		1.306.805.688,00	DP3AKB
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya sarana penunjang di DP3AKB*	100 Persen	100 Persen	1.052.544.264,00	1.012.638.464,00	-148.744.100,00				820.000.000,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	38 Unit	884.138.564,00	860.322.564,00	-110.840.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR		800.000.000,00	DP3AKB
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit	45.420.000,00	45.420.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	DANA BAGI HASIL (DBH)		20.000.000,00	DP3AKB
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	122.985.700,00	106.895.900,00	-37.904.100,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		0,00	DP3AKB
2,	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Gender Pada Belanja Langsung APBD Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	**0,499 47,85 Persen Persen**	**0,499 47,85 Persen Persen**	**1.138.356.662,00**	**689.206.452,00**	**-463.063.171,00**				**719.300.300,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi yang responsif Gender di Lembaga Pemerintah dan Swasta*	10 Organisasi	10 Organisasi	249.155.400,00	232.820.162,00	-29.240.838,00				219.300.300,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	249.155.400,00	232.820.162,00	-29.240.838,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		219.300.300,00	DP3AKB
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	*Jumlah Organisasi Yang responsif Gender di Lembaga Pemerintah dan Swasta*	10 organisasi	10 organisasi	889.201.262,00	456.386.290,00	-463.916.181,00				500.000.000,00	DP3AKB
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi											
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang	3 Organisasi	3 Organisasi	889.201.262,00	456.386.290,00	-463.916.181,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		500.000.000,00	DP3AKB
3,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.639.233.310,00**	**1.195.203.030,00**	**-296.659.950,00**				**756.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Tercapainya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	100 Persen	100 Persen	386.171.152,00	270.802.433,00	-128.395.435,00				356.000.000,00	DP3AKB
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	1 Dokumen	1 Dokumen	146.964.660,00	126.954.382,00	-28.509.633,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		300.000.000,00	DP3AKB
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	239.206.492,00	143.848.051,00	-99.885.802,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		56.000.000,00	DP3AKB
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	1.253.062.158,00	924.400.597,00	270.938.515,00				400.000.000,00	DP3AKB
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	-	48 Layanan	0,00	0,00	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		50.000.000,00	DP3AKB
4,	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga**	**100 Persen**	**100 Persen**	**321.176.101,00**	**238.768.889,00**	**-229.991.098,00**				**100.000.000,00**	
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender*	100 Persen	100 Persen	321.176.101,00	238.768.889,00	-91.222.209,00				100.000.000,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang	60 Layanan	3 Layanan	321.176.101,00	238.768.889,00	-91.222.209,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		100.000.000,00	DP3AKB
5,	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan data gender dan anak terpadu**	**100 Persen**	**100 Persen**	**10.403.952,00**	**63.212.852,00**	**-33.438.495,00**				**66.550.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Data Gender dan Anak*	100 Persen	100 Persen	10.403.952,00	63.212.852,00	-36.775.643,00				66.550.000,00	DP3AKB
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	10.403.952,00	63.212.852,00	-36.775.643,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		66.550.000,00	DP3AKB
6,	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Predikat Kota Layak Anak**	**Utama Predikat**	**Utama Predikat**	**746.226.900,00**	**367.091.392,00**	**-197.913.572,00**				**401.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha yang telah mendapatkan pelembagaan PHA*	45 Lembaga	45 Lembaga	746.226.900,00	367.091.392,00	-231.822.180,00				401.000.000,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan	45 Organisasi	100 Organisasi	575.741.799,00	244.462.291,00	-133.679.963,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		341.000.000,00	DP3AKB
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Dokumen	2 Dokumen	170.485.101,00	122.629.101,00	-98.142.217,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000,00	DP3AKB
7,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**	**-**	**-**	**1.264.197.141,00**	**1.340.555.838,00**	**77.723.903,00**				**971.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	129.995.000,00	129.995.000,00				50.000.000,00	DP3AKB
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA											
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	-	50 Orang	0,00	129.995.000,00	129.995.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		50.000.000,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	484.010.660,00	716.156.112,00	396.036.252,00				329.000.000,00	DP3AKB
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK											
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	-	103 Layanan	0,00	0,00	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		0,00	DP3AKB
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Penurunan tingkat kekerasan terhadap anak*	20 Persen	20 Persen	780.186.481,00	494.404.726,00	-78.751.511,00				592.000.000,00	DP3AKB
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota											
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	3 Kegiatan	3 Kegiatan	175.437.130,00	142.019.100,00	-33.619.097,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		400.000.000,00	DP3AKB
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/											
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-	2 Orang	0,00	88.399.820,00	88.399.820,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		100.000.000,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota											
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2 Dokumen	2 Dokumen	604.749.351,00	263.985.806,00	-133.532.234,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		92.000.000,00	DP3AKB
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**5.776.350.770,00**	**4.583.865.679,00**	**818.263.817,00**				**2.846.022.973,00**	
1,	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Rata-rata Jumlah anak per Keluarga**	**1,9 Rasio**	**1,9 Rasio**	**1.002.233.504,00**	**728.933.142,00**	**-288.345.052,00**				**543.812.900,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Tercapainya Pengendalian kualitas Penduduk*	61,75 Persen	61,75 Persen	475.533.607,00	314.867.000,00	-50.232.959,00				191.812.900,00	DP3AKB
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	280.857.400,00	178.802.000,00	-41.329.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)		138.812.900,00	DP3AKB
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	106.443.207,00	69.939.000,00	17.644.256,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		16.000.000,00	DP3AKB
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal											
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	12 Kegiatan	12 Kegiatan	88.233.000,00	66.126.000,00	-26.548.215,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		37.000.000,00	DP3AKB
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terpetakannya perkiraan pengendalian penduduk*	0,001 Persen	0,001 Persen	526.699.897,00	414.066.142,00	-52.991.851,00				352.000.000,00	DP3AKB
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga											
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	1 Laporan	0,00	38.999.940,00	38.999.940,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		0,00	DP3AKB
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga											
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	244.910.000,00	163.901.345,00	-5.993.825,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		165.000.000,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB											
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	1 Dokumen	0,00	30.800.000,00	30.800.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		100.000.000,00	DP3AKB
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain											
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	15 Unit	15 Unit	67.318.984,00	43.885.984,00	-26.079.977,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	DP3AKB
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana											
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan	1 Laporan	214.470.913,00	136.478.873,00	-90.717.989,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOKB-KB		77.000.000,00	DP3AKB
2,	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Rasio akseptor**	**71,5 Persen**	**71,5,5 Persen**	**2.188.457.314,00**	**1.866.746.108,00**	**-673.781.300,00**				**1.279.810.073,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah Pelaksanan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB (Monev)*	3 Kegiatan	3 Kegiatan	742.162.986,00	688.576.439,00	109.995.945,00				508.802.600,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana											
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	3 Laporan	3 Laporan	310.120.804,00	233.090.764,00	47.772.268,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOKB-KB		200.000.000,00	DP3AKB
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)											
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	3 Laporan	0,00	61.088.000,00	61.088.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		70.000.000,00	DP3AKB
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang											
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak	-	2 Dokumen	0,00	24.250.000,00	24.250.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		48.802.600,00	DP3AKB
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal											
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Dokumen	2 Dokumen	432.042.182,00	307.892.675,00	-85.369.323,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		100.000.000,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja											
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	11 Organisasi	0,00	62.255.000,00	62.255.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		90.000.000,00	DP3AKB
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB*	4 Kegiatan	4 Kegiatan	258.861.400,00	173.404.139,00	-235.818.861,00				25.000.000,00	DP3AKB
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)											
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	65 Orang	65 Orang	138.143.000,00	102.794.139,00	-111.223.861,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		15.000.000,00	DP3AKB
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)											
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana	1 Laporan	1 Laporan	120.718.400,00	70.610.000,00	-124.595.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		10.000.000,00	DP3AKB
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Terkendalinya dan terdistribusinya Alat, Obat Kontrasepsi dan Pelayanan KB*	100 Persen	100 Persen	1.041.858.859,00	898.918.461,00	167.099.704,00				546.007.473,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	0 0	0,00	320.247.275,00	320.247.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB		100.000.000,00	DP3AKB
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB											
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	5 Unit	58.195.169,00	57.628.724,00	30.093.555,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		20.907.473,00	DP3AKB
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	-	1 Laporan	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		100.000,00	DP3AKB
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi											
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	20 Orang	20 Orang	387.771.255,00	325.171.255,00	-72.909.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		100.000.000,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak											
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	1 Laporan	505.781.856,00	130.298.152,00	-106.754.602,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		250.000.000,00	DP3AKB
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria											
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	120 Orang	120 Orang	47.415.324,00	45.664.800,00	-2.080.524,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		50.000.000,00	DP3AKB
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan											
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	75 Orang	75 Orang	42.695.255,00	17.208.255,00	-4.197.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		25.000.000,00	DP3AKB
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*jumlah kesertaan organisasi masyarakat dalam Program Bangga Kencana*	25 Persen	25 Persen	145.574.069,00	105.847.069,00	-128.122.053,00				200.000.000,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas											
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	15 Kampung	15 Kampung	145.574.069,00	105.847.069,00	-128.122.053,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		200.000.000,00	DP3AKB
3,	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Tersedianya kelompok Tribina dan UPPKS yang dibina dan dibentuk**	**79 Persen**	**79 Persen**	**2.585.659.952,00**	**1.988.186.429,00**	**42.547.463,00**				**1.022.400.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Tersedianya kelompok Tribina dan UPPKS yang dibina dan dibentuk*	100 Persen	100 Persen	671.398.673,00	587.902.523,00	2.457.402,00				546.000.000,00	DP3AKB
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)											
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,	2 Laporan	2 Laporan	160.554.608,00	145.328.158,00	20.429.046,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		100.000.000,00	DP3AKB
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))											
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	1 Laporan	1 Laporan	267.948.597,00	202.862.378,00	-11.262.579,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		115.000.000,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	-	1 Unit	0,00	13.482.500,00	13.482.500,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		75.000.000,00	DP3AKB
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	241 Orang	216 Orang	137.074.920,00	89.880.215,00	-62.580.352,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		162.000.000,00	DP3AKB
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,	2 Laporan	2 Laporan	105.820.548,00	136.349.272,00	42.388.787,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		94.000.000,00	DP3AKB
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Tersedianya kelompok Tribina dan UPPKS yang dibina dan dibentuk*	100 Persen	100 Persen	1.914.261.279,00	1.400.283.906,00	1.005.876.490,00				476.400.000,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	26.414.000,00	58.980.000,00	-44.666.790,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		134.000.000,00	DP3AKB
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program	3 Laporan	3 Laporan	528.784.251,00	356.763.452,00	168.402.488,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		115.000.000,00	DP3AKB
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja											
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	4 Laporan	4 Laporan	1.359.063.028,00	438.784.000,00	336.384.338,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOKB-KB		102.400.000,00	DP3AKB
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)											
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	-	1 laporan	0,00	213.056.454,00	213.056.454,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		50.000.000,00	DP3AKB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	19	20	21
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)											
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang	-	1 laporan	0,00	332.700.000,00	332.700.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		75.000.000,00	DP3AKB
		UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK				**26.994.616.521,00**	**23.759.975.859,00**	**1.632.219.446,00**				**18.697.390.706,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**26.994.616.521,00**	**23.759.975.859,00**	**1.632.219.446,00**				**18.697.390.706,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**21.218.265.751,00**	**19.176.110.180,00**	**813.955.629,00**				**15.851.367.733,00**	
1,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap perempuan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.639.233.310,00**	**1.195.203.030,00**	**-296.659.950,00**				**756.000.000,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*tersedianya layanan UPT PPA*	100 Persen	100 Persen	1.253.062.158,00	924.400.597,00	270.938.515,00				400.000.000,00	DP3AKB
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	50 Orang	1.253.062.158,00	869.091.753,00	215.629.671,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)		350.000.000,00	DP3AKB

XII. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIAKANAN DAN PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyesuaian Rencana Kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, khususnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang tahun 2025 tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Bontang Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perubahan SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan

Pertanian Kota Bontang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang tahun 2025. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Bontang tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025-2029 yaitu: **"TERWUJUDNYA KOTA BONTANG YANG LEBIH HEBAT DAN BERADAB"** dengan 3 misi yakni ***Harmoni, Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Sejahtera*** yang dicapai diantaranya melalui bidang ketahanan pangan, perikanan dan pertanian.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245: Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31: Tambahan Lembaran Negara 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesaia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
20. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang;
2. Untuk Merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kota Bontang selama tahun 2025;
3. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan;
4. Menyediakan satu pedoman jangka pendek untuk menentukan arah kebijakan pengawasan dengan berdasarkan pada kondisi riil dan proyeksi masa yang akan datang;
5. Menyediakan satu materi kemudahan bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan strategi lima tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan;
6. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hubungan dalam pelaksanaan tugas-tugas;

7. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang Kota.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Tahun 2025 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas itu sendiri merupakan suatu bentuk wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku maupun indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.1.1 Evaluasi Program Tahun 2024 dan 2025

Anggaran tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang sebesar **Rp 45.060.407.594,00** (termasuk perubahan) dengan 12 program, 27 kegiatan dan 47 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar **Rp43.489.504.337,00** dengan presentasi keuangan sebesar 96,51%.

Sedangkan, pada anggaran tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang sebesar **Rp37.936.810.559,00** (pergeseran efisiensi) dengan 12 program, 27 kegiatan dan 50 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut, hingga Triwulan III ini dana yang terealisasi sebesar **Rp20.338.377.469,00** dengan presentasi keuangan sebesar **53,61%** dari target di Triwulan I yaitu **Rp.9.720.527.295,00** sebesar **23,48**%.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 pelaksanaan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian ditunjang dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi
   Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar **Rp42.825.330.724,00** dan realisasi hingga akhir tahun sebesar **Rp41.352.429.519,00** atau sebesar 96,56%.

B. Belanja Modal
   Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp2.235.076.870,00** dan realisasi hingga akhir tahun sebesar **Rp2.137.074.818,00** atau sebesar 95,62%.

Sedangkan, pada tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 pelaksanaan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian ditunjang dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi
   Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp34.115.471.320,00** dan realisasi hingga Triwulan III sebesar **Rp19.241.514.694,00** atau sebesar 56,40%.

B. Belanja Modal
   Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp3.821.339.239,00** dan realisasi hingga Triwulan I sebesar **Rp210.354.700,00** atau sebesar 5,50%.

2.1.2 Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025

Perkiraan pencapaian untuk anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang Tahun 2025 diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2024, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
2. Perlunya pemahaman untuk memedomani indikator kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*

Provinsi/Kabupaten/Kota Bontang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	CapaiaPerkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**										
2	**09**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**0**	**-**	**100**	**100**	**100**
2	09	01	2.01	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	1	0	-	1	1	100

2	09	01	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	1	0	-	1	1	100
2	09	01	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	1	0	-	1	1	100
2	09	01	2.01		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	1	0	-	1	1	100
2	09	01	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	1	0	-	1	1	100
2	09	01	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	0	0	-	1	1	100
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	Orang/ Bulan		54	54	100	57	111	195
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	0	0	-	1	1	100
2	**09**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
2	09	01			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	128	Paket		128	128	100	128	256	200

2	09	01			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57	Orang		0	0	-	57	57	100
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Admnistrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	2	2	100	2	4	200
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	12	36	36	100	6	42	350
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	10	10	100	2	12	600
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	5	10	10	100	5	15	300
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	5	5	5	100	5	10	200
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	0		-	12	12	100
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	Laporan		30	30	100	40	70	88
2	09	01	2.06		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen		0	0	-	0	0	-
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Bangunan**		**Kegiatan**		**0**		**-**	**3**	**3**	**-**

2	09	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	unit		0	0	-		0	-
2	09	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit		0	0	-	0	0	-
2	09	01	2.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit		0	0	-	3	3	-
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan		12	12	100	12	24	200
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		12	12	100	12	24	200
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	71	Laporan		71	71	100	71	142	200
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	Unit		30	30	100	45	75	136
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit		15	15	100	7	22	88
2	**09**	**03**				**Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)**	**90**	**Nilai**		**86,4 (2019)**			**87**	**87**	**88**

					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**Ketersediaan Energi dan Protein**	**AKE= 2.400 kkal/ kapita/ hari AKP = 63 gram/ kapita/ hari**	**AKE = kkal AKP = gram**		**AKE= 2.400 kkal/ kapita/ hari AKP = 63 gram/ kapita/ hari**			**AKE = 2.400 kkal/kapita/ hari AKP = 63 gram/kapita/ hari**		
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**5**	**Dokumen**	**5**	**5**	**5**	**100**	**5**	**10**	**200**
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	5	Laporan	5	5	5	100	5	10	200
2	**09**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota**	**100**	**Ton**		**100**	**0**	**-**	**50**	**50**	**50**
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Ton		100	0	-	50	50	50
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Persentase Tingkat Konsumsi Energi (%TKE) dan Protein (%TKP) terhadap target 2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari (WNPG tahun 2012)**	**2150 kkal/kap/ hari dan protein 57 gram/kap/hari**	**Kkal/kap/hari dan gram/kap/hari**		**2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari**			**2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari**	**0**	**-**

2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Buku (Buku PPH Konsumsi dan Buku AKI dan Buku RADPG)	Dokumen		1	1	100	3 Buku (Buku PPH Konsumsi dan Buku AKI dan Buku RADPG)	0	-
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Target 21 Klp P2L dan 610 Peserta	Laporan		2	2	100	Target 17 Klp P2L dan 100 Peserta	0	-
2	**09**	**04**			**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita**	**100**	**Persen**	**100**	**100**		**-**	**100**	**100**	**100**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan**	**3**	**Dokumen**	**3**	**1**		**-**	**3**	**3**	**100**
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	3	Dokumen	3	1	1	100	3	4	133
2	**09**	**05**			**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan**	**100**	**Persen**	**100**	**100**		**-**	**100**	**100**	**100**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Fungsi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan**	**100**	**Persen**	**100**	**100**		**-**	**100**	**100**	**100**
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen		10	10	100	3	13	433
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN**										
3	**25**	**03**			**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Produksi Perikanan Tangkap**	**22134.8**	**Ton**		**20336**		**-**	**19743.7**	**19743.7**	**89**

3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Produksi Perikanan Tangkap**	**22134.8**	**Ton**		**20336**		**-**	**19743.7**	**19743.7**	**89**
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	40	Unit		5	5	100	40	45	113
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kelompok Nelayan yang Dibina**	**10**	**Kelompok**		**10**		**-**	**10**	**10**	**100**
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	160	Orang		8	8	100	100	108	68
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	16	Kelompok		1	1	100	10	11	69
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Terlaksananya Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5000	Layanan		5	5	100	5000	5005	100
3	**25**	**04**			**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**3600**	**Ton**		**3848**		**-**	**3000**	**3000**	**83**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Dibina**	**12**	**Kelompok**		**12**	**12**	**100**	**10**	**22**	**183**
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	13	Kelompok		1	1	100	10	11	85

3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15	Kelompok		50	50	100	10	60	400
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang Disediakan**	**17**	**Jenis**		**17**	**17**	**100**	**17**	**34**	**200**
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen		1	1	100	1	2	200
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	Unit		1	1	100	10	11	110
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	200	Orang		30	30	100	200	230	115
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	**Cakupan Pengawasan Usaha Perikanan**	**0**	**Persen**		**33%**	**33%**	**99**	**0**	**0.33**	**-**
					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**	**0**	**Dokumen**		**33%**	**33%**	**99**	**0**	**0.33**	**-**
					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	0	Dokumen		1	1	100	0	1	-

3	**25**	**06**			**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Persentase Peningkatan Produktifitas Pengelolaan Hasil Perikanan**	**37**	**Persen**	**37**	**25**	**25**	**100**	**22**	**47**	**127**
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Sektor Perikanan**	**10**	**Unit Usaha**		**25**	**25**	**100**	**10**	**35**	**350**
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	10	Unit Usaha		90	90	100	10	100	1,000
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Peningkatan Produktifitas Pengelolaan Hasil Perikanan**	**37**	**Persen**	**37**	**25**	**25**	**100**	**22**	**47**	**127**
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1000	Ton		1	1	100	700	701	70
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	16	Pelaku Usaha		1	1	100	10	11	69
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										
3	**27**	**07**			**Program Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Presentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**

3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30	Unit		3	3	100	20	23	77
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	10	Unit		5	5	100	10	15	150
3	**27**	**02**			**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian**	**100**	**Persen**	**100**	**40**	**40**	**100**	**40**	**80**	**80**
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**100**	**Persen**	**100**	**50**	**50**	**100**	**60**	**110**	**110**
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	100	Laporan		15	15	100	3	18	18
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100	Laporan		10	10	100	3	13	13
3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kelompok**	**20**	**Kelompok**		**10**	**10**	**100**	**10**	**20**	**100**
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	7	Ton		140	140	100	7	147	2,100
3	**27**	**02**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Penambahan Jumlah Populasi Ternak di Kelompok**	**500**	**Ekor**		**55**	**55**	**100**	**100**	**155**	**31**

3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	500	Ekor		55	55	100	100	155	31
3	**27**	**03**			**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian Unit Pelayanan**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase Prasarana Pertanian dan Peternakan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit		1	1	100	1	2	200
3	27	03	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	Unit		1	1	100	6	7	233
3	**27**	**04**			**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Cakupan Wilayah Pengendalian Kesehatan Hewan**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**		**100**	**200**	
						Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Olahan Peternakan	**100**	**Persen**	**100**				**53.33**	**53.33**	
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penjaminan Kesehatan Hewan**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12	Laporan		3000	3000	100	12	3012	25,100
3	**27**	**04**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaku Usaha Olahan Produk Peternakan Pangan dan Non Pangan**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**

3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	2	Laporan		1	1	100	2	3	150
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Tersediaanya Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan**	**100**	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan		0	0	12	12	12	100
3	**27**	**05**			**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Cakupan wilayah yang terkendali dari bencana pertanian**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**100**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**	**200**
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	30	Ha		1	1	100	20	21	70
3	27	05	2.01		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	5	Ha		0	0	0	0	0	-

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Bontang.

Adapun susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, meliputi 1 (satu) sub bagian dan Jabatan Fungsional:
   - Sub Bagian Umum
   - Jabatan Fungsional
3. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, meliputi :
   - Jabatan Fungsional
4. Bidang Ketahanan Pangan, meliputi:
   - Jabatan Fungsional
5. Bidang Pertanian, meliputi:
   - Jabatan Fungsional
6. Bidang Peternakan, meliputi:
   - Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis, meliputi 3 (tiga) UPT:
   - UPT. Rumah Potong Hewan
   - UPT. Tempat Pelelangan Ikan
   - UPT. Balai Benih Ikan
8. Jabatan Fungsional

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Provinsi/Kabupaten/Kota Bontang

NO	Indikator (2016-2021)	Indikator (2022-2026)	SPM/stan dar nasional	IKK (2016-2021)	IKK (2022-2026)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan, Distribusi, Akses, Diversifikasi dan Keamanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat		Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	-	90	-	-	-	90,5	-	-			
				% Cadangan Pangan	Persentase Penguatan	60	60%	60%	60%	0	21,9	37,6	60%	60%	

NO	Indikator (2016-2021)	Indikator (2022-2026)	SPM/standar nasional	IKK (2016-2021)	IKK (2022-2026)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
				Pemerintah	Cadangan Pangan										
				% Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah jumlah daerah rawan pangan yang ditangani terhadap jumlah daerah rawan pangan	60	100%	100%	100%	100	100	100	100%	100%	
				% Stabilitas Harga dan	-	90	-	-	-	100	-	-	-	-	

NO	Indikator (2016-2021)	Indikator (2022-2026)	SPM/stan dar nasional	IKK (2016-2021)	IKK (2022-2026)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
				Pasokan Pangan											
				% Ketersediaan Informasi Harga	-	90	-	-	-	100	-	-	-	-	
				% Pangan Aman di Konsumsi	-	80	-	-	-	100	-	-	-	-	
2	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	-		Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (skor)	90	87	88	89	87,4	89,8	88,5	89	90	
3	Meningkatnya Tingkat Pendapatan Nelayan dan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha		Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	24.149,8	19.743,20 Ton	20.315,70 Ton	20.904,80 Ton	26196,34	21915,8	21.709,0	20.904,80	21.511,00	

NO	Indikator (2016-2021)	Indikator (2022-2026)	SPM/stan dar nasional	IKK (2016-2021)	IKK (2022-2026)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	Pembudidaya	Perikanan, Pertanian dan Peternakan		Perikanan Tangkap dan Budidaya											
					Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	-	3000 Ton	3.15 Ton	3.300 Ton	-	3471,45	3.562.23	3.300	3450	
					Produktivitas Pengolahan Usaha Perikanan	-	22 Kelompok	26 Kelompok	29 Kelompok	-	483,30	433,95	441	463	
					Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Pertanian	-	42 Kelompok	48 Kelompok	44 Kelompok	-	186	89	297	306	

NO	Indikator (2016-2021)	Indikator (2022-2026)	SPM/stan dar nasional	IKK (2016-2021)	IKK (2022-2026)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
					Meningkatnya Produktivitas Usaha Peternakan	-	42 Kelompok	48 Kelompok	44 Kelompok	-	2112	1275	1336	1456	
4	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Peternakan	-		Intensifikasi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura		306	-	-	-	214	-	-	-	-	
				Intensifikasi budidaya peternakan dan produksi peternakan		1096	-	-	-	1480	-	-	-	-	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana penunjang. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain:

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, maupun pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bidang perencanaan sehingga dapat menghasilkan aparatur perencanaan yang kreatif dan inovatif;
2. Menerapkan *Right Man on the Right Place* dalam penempatan/perekrutan aparatur. Hal ini berdampak pada ketepatan dan keakuratan perencanaan, mengingat aparatur yang dimiliki lebih responsif terhadap perkembangan kebijakan provinsi dan nasional serta menghasilkan perencanaan yang akuntabel;
3. Mengembangkan teknologi informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam pendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
4. Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang.

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota Kota Bontang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bontang	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	11,595,709,656	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Bontang	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	27,466,094,172	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	30,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	1,095,616	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pernagkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pernagkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	547,808	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	547,808	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	6,633,423,484	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	21,613,313,784	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	Orang/Bulan	6,613,423,484	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99	Orang/Bulan	21,612,765,976	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	547,808	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	300,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	420,187,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	Paket	–	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	157	Paket	182,490,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57	Orang	300,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32	Orang	237,697,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	1,258,750,153	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	1,010,510,004	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	7,988,604	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	300,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	369,362,383	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	49,306,266	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	87,834,153	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	63,722,245	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	1,716,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	1,716,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bontang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	4,200,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bontang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	17,520,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	Laporan	800,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170	Laporan	496,964,000	
	Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	5,000,000	Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	3,930,506	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	2,863,859,136	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	2,951,527,760	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	13,720,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	14,550,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	Laporan	13,700,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	Laporan	26,400,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
			dan Listrik yang Disediakan						dan Listrik yang Disediakan				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	71	Laporan	2,836,439,136	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	58	Laporan	2,910,577,760	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	509,676,883	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	811,454,008	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	Unit	463,102,883	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	Unit	744,584,008	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	46,574,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99	Unit	66,870,000	
2	**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	Kota Bontang	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	90	Nilai	1,612,432,547	**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	Kota Bontang	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	90	Nilai	1,558,514,595	
			Ketersediaan Energi dan Protein	AKE= 2.400 kkal/kapita/hari AKP = 63 gram/kapita/hari	AKE=kkal/ AKP=gram				Ketersediaan Energi dan Protein	AKE= 2.400 kkal/kapita/hari AKP = 63 gram/kapita/hari	AKE=kkal/ AKP=gram		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Bontang	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	5	Dokumen	155,406,531	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Bontang	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	5	Dokumen	228,989,511	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan	Kota Bontang	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	5	Laporan	155,406,531	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan	Kota Bontang	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	5	Laporan	228,989,511	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80	Ton	566,468,865	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80	Ton	215,236,372	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80	Ton	566,468,865	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10	Ton	215,236,372	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kota Bontang	Persentase Tingkat Konsumsi Energi (%TKE) dan Protein (%TKP) terhadap target 2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari WNPG tahun 2012	2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari	Kkal/kap/hari dan gram/kap/hari	890,557,151	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kota Bontang	Persentase Tingkat Konsumsi Energi (%TKE) dan Protein (%TKP) terhadap target 2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari WNPG tahun 2012	2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari	Kkal/kap/hari dan gram/kap/hari	1,114,288,712	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kota Bontang	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3	Dokumen	384,752,236	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kota Bontang	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3	Dokumen	194,825,341	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Bontang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	17	Laporan	505,804,915	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Bontang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	17	Laporan	919,463,371	
3	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	Kota Bontang	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	100	Persen	181,500,000	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	Kota Bontang	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	100	Persen	96,124,853	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Bontang	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	3	Dokumen	181,500,000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Bontang	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	3	Dokumen	96,124,853	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Bontang	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	3	Dokumen	181,500,000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Bontang	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	3	Dokumen	96,124,853	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
4	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	Kota Bontang	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100	Persen	252,637,110	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	Kota Bontang	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100	Persen	154,984,910	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Terlaksananya Fungsi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	100	Persen	252,637,110	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Terlaksananya Fungsi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	100	Persen	154,984,910	
	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen	252,637,110	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen	154,984,910	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN**						
5	**Program Pengelolaan**	Kota Bontang	Produksi perikanan tangkap	21.511	Ton	805,000,000	**Program Pengelolaan**	Kota Bontang	Produksi perikanan tangkap	21.511	Ton	1,553,086,301	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Perikanan Tangkap						**Perikanan Tangkap**						
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah kelompok nelayan yang dibina	10	Kelompok	600,000,000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah kelompok nelayan yang dibina	14	Kelompok	1,349,840,666	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Bontang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	140	Orang	350,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Bontang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100	Orang	1,268,497,896	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kota Bontang	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	14	Kelompok	250,000,000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kota Bontang	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	14	Kelompok	81,342,770	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Bontang	Terlaksananya Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100	Persen	205,000,000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Bontang	Terlaksananya Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100	Persen	203,245,635	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Bontang	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5000	Layanan	205,000,000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Bontang	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5000	Layanan	203,245,635	
6	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	Kota Bontang	Produksi perikanan budidaya	3450	Ton	1,550,000,000	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	Kota Bontang	Produksi perikanan budidaya	3450	Ton	1,023,337,629	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bontang	Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang di bina	12	Kelompok	700,000,000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bontang	Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang di bina	15	Kelompok	450,234,325	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bontang	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	12	Kelompok	400,000,000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bontang	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	12	Kelompok	345,879,170	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan	Kota Bontang	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	15	Kelompok	300,000,000	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan	Kota Bontang	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	15	Kelompok	104,355,155	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Pendidikan dan Pelatihan		Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				Pendidikan dan Pelatihan		Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Bontang	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang disediakan	17	Jenis	850,000,000	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Bontang	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang disediakan	17	Jenis	573,103,304	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	150,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen	58,759,860	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	Unit	500,000,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	Unit	440,041,604	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Bontang	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	200	Orang	200,000,000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Bontang	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	200	Unit	74,301,840	
7	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	Kota Bontang	Cakupan pengawasan usaha perikanan	-	Persen	-	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	Kota Bontang	Cakupan pengawasan usaha perikanan	-	Persen	-	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-	Dokumen	-	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-	Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-	Dokumen	-	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	-	Dokumen	-	
8	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	Kota Bontang	Persentase Peningkatan Produktifitas Pengelolaan Hasil Perikanan	33	Persen	250,000,000	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	Kota Bontang	Persentase Peningkatan Produktifitas Pengelolaan Hasil Perikanan	33	Persen	1,016,585,610	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Bontang	Jumlah usaha mikro dan kecil sektor perikanan	10	Unit Usaha	100,000,000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Bontang	Jumlah usaha mikro dan kecil sektor perikanan	10	Unit Usaha	55,297,604	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Bontang	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	10	Unit Usaha	75,000,000	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Bontang	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	10	Unit Usaha	55,297,604	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bontang	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	33	Persen	150,000,000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bontang	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	33	Persen	961,288,006	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam	Kota Bontang	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha	1000	Ton	45,000,000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam	Kota Bontang	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha	1000	Ton	84,942,072	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	14	Pelaku Usaha	105,000,000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	14	Pelaku Usaha	876,345,934	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						
9	**Program Penyuluhan Pertanian**	Kota Bontang	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian	100	Persen	423,500,000	**Program Penyuluhan Pertanian**	Kota Bontang	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian	100	Persen	707,125,463	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kota Bontang	Presentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100	Persen	423,500,000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kota Bontang	Presentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100	Persen	707,125,463	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Bontang	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25	Unit	343,500,000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Bontang	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11	Unit	450,489,139	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Bontang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	10	Unit	80,000,000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Bontang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	10	Unit	256,636,324	
10	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	Kota Bontang	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	100	Persen	1,546,710,264	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	Kota Bontang	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	100	Persen	1,035,092,401	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kota Bontang	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100	Persen	660,000,000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kota Bontang	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100	Persen	705,672,902	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Bontang	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3	Laporan	400,000,000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Bontang	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4	Laporan	50,208,944	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Bontang	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3	Laporan	260,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Bontang	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4	Laporan	655,463,958	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Kelompok	20	Jenis/Kelompok	300,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Kelompok	20	Kelompok	125,074,598	
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak	Kota Bontang	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan	7	Ton	300,000,000	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak	Kota Bontang	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan	2	Laporan	125,074,598	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	dan Hijauan Pakan Ternak		Ternak yang Tersedia				dan Hijauan Pakan Ternak		Ternak yang Tersedia				
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Bontang	Penambahan Jumlah Populasi Ternak di Kelompok	500	Ekor	586,710,264	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Bontang	Penambahan Jumlah Populasi Ternak di Kelompok	500	Ekor	204,344,901	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Bontang	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	500	Ekor	586,710,264	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Bontang	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1000	Ekor	204,344,901	
11	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	Kota Bontang	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian Unit Pelayanan	100	Persen	1,000,000,000	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	Kota Bontang	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian Unit Pelayanan	100	Persen	1,000,000,000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kota Bontang	Persentase Prasarana Pertanian dan Peternakan yang	100	Persen	1,000,000,000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kota Bontang	Persentase Prasarana Pertanian dan Peternakan yang	100	Persen	2,883,106,833	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
			Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara						Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kota Bontang	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi	1	Unit	500,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kota Bontang	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi	1	Unit	140,499,280	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6	Unit	500,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Unit	2,742,607,553	
12	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Kota Bontang	Cakupan Wilayah Pengendalian Kesehatan Hewan	100	Persen	700,000,000	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Kota Bontang	Cakupan Wilayah Pengendalian Kesehatan Hewan	100	Persen	350,002,283	
			Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Olahan Peternakan	93	Persen				Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Olahan Peternakan	93	Persen		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Cakupan Penjaminan Kesehatan Hewan	100	Persen	300,000,000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Cakupan Penjaminan Kesehatan Hewan	100	Persen	101,382,308	
	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kota Bontang	Jumlah Kejadian Penyakit yang Ditindaklanjuti dengan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	2000	Kasus	300,000,000	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kota Bontang	Jumlah Kejadian Penyakit yang Ditindaklanjuti dengan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	2000	Kasus	101,382,308	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Pelaku Usaha Olahan Produk Peternakan Pangan dan Non Pangan	100	Persen	300,000,000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Pelaku Usaha Olahan Produk Peternakan Pangan dan Non Pangan	100	Persen	150,791,650	
	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Kota Bontang	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan	2	Laporan	300,000,000	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Kota Bontang	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan	2	Laporan	150,791,650	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Presentase Tersediaanya Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan	100	Persen	100,000,000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Presentase Tersediaanya Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan	100	Persen	97,828,325	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Bontang	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	100,000,000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Bontang	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	97,828,325	
13	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	Kota Bontang	Cakupan Wilayah yang Terkendali dari Bencana Pertanian	100	Persen	181,500,000	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	Kota Bontang	Cakupan Wilayah yang Terkendali dari Bencana Pertanian	100	Persen	92,755,509	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100	Persen	181,500,000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100	Persen	92,755,509	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	Kota Bontang	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	33	Ha	181,500,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	Kota Bontang	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	33	Ha	92,755,509	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	2	3	4	5		6	12
	Hortikultura, dan Perkebunan		Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				Hortikultura, dan Perkebunan		Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota Kota Bontang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	Kota Bontang	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	-	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Terlaksananya Fungsi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	-	
	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN				
2	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	Kota Bontang	Produksi perikanan tangkap	-	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah kelompok nelayan yang dibina	-	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Bontang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-	

	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kota Bontang	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Bontang	Terlaksananya Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Bontang	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	
3	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	Kota Bontang	Produksi perikanan budidaya	-	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bontang	Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang dibina	-	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bontang	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Bontang	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang disediakan	-	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	
4	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	Kota Bontang	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	-	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bontang	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	-	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala	Kota Bontang	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu)	-	

	Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
5	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	Kota Bontang	Persentase pemenuhan sarana pertanian	-	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kota Bontang	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Bontang	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Bontang	Penambahan jumlah populasi ternak di kelompok	-	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Bontang	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	
6	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Kota Bontang	Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan	-	
		Kota Bontang	Cakupan pembinaan pelaku usaha olahan peternakan		
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	Cakupan penjaminan kesehatan hewan	-	
	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kota Bontang	Jumlah Kejadian Penyakit yang Ditindaklanjuti dengan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	-	

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema dan Arah Kebijakan dalam RPJMN Teknokratik Tahun 2025–2029 terdapat **5 Penguatan Fondasi Transformasi** diantaranya yaitu:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi.

Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game* Changers) dari 5 Penguatan Fondasi Transformasi yaitu:

1. Transformasi Sosial
   - Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra–sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
   - Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
   - Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis dan tenaga kesehatan;
   - Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: Tuberkolosis dan kusta);
   - Penuntasan kemiskinan dengan satu system Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi
   - Peningkatan anggaran IPTEKIN Nasional menuju komersialisasi oleh industri;
   - Industrialisasi: Hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
   - Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
   - *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
   - Integrasi insfrastruktur konektivitas dengan Kawasan pertumbuhan ekonomi;
   - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
3. Transformasi Tata Kelola
   - Pembentukan Lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
   - Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
- Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
- Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta tranformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
- Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi
   - Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
   - Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
   - Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

A. TRANSFORMASI SOSIAL

Isu Strategis:

- **Kesehatan untuk Semua**: Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan pemerataan kapasitas dan *responsiveness* sitem kesehatan di seluruh wilayah.
- **Pendidikan Berkualitas yang Merata**: Pembangunan pendiikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sukber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.
- **Perlindungan Sosial yang Adaptif**: Perlindungan Sosial yang adaptif ditujukan untukpercepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

B. TRANSFORMASI EKONOMI

Isu Strategis:

- **Industri**: Deindustrialisasi dini; rendahnya produktivitas tenaga kerja; kompleksitas dan daya saing produk; adopsi teknologi kian masif; Mismatched produksi dengan permintaan global; rendahnya kemampuan inovasi; serta tuntutan energi hijau semakin besar.
- **Pariwisata**: Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal; terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan; pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman; rendahnya pengeluaran wisatawan;

serta kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata.

- **Ekonomi Kreatif**: Ekonomi kekayaan intelektual yang belum optimal; ketersediaan data ekonomi kreatif yang sangat terbatas; kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal; daya saing SDM Ekonomi kreatif yang rendah; serta rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal.
- **Ekonomi Biru**: Rendahnya produktivitas ekonomi di sektor perairan; biaya lingkungan perairan yang belum terkuantifikasi; prevalensi kemiskinan yang tinggi di masyarakat pesisir; serta tuntutan pembangunan berkelanjutan.
- **UMKM dan Koperasi**: Rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi dan inovasi usaha. Sementara itu, jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil masih rendah.
- **Ketenagakerjaan**: Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia (berada di bawah rata–rata negara Kawasan ASEAN).
- **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**: Kinerja BUMN masih rendah; daya saing BUMN; serta peran BUMN sebagai Agen Pembangunan.
- **Percepatan Transisi Energi**: Ketergantungan terhadap energi fosil; emisi GRK sektor energi yang cukup tinggi; potensi energi terbarukan yang sangat besar namun pemanfaatan masih sangat kecil; kualitas infrastruktur yang belum memadai; serta ketergantungan pada produksi impor.
- **Ekonomi Sirkular Industri**: Rendahnya kapasitas pengolahan limbah; ketergantungan terhadap bahan baku kritis industri; industri yang menerapkan standar industri hijau masih terbatas; serta tata kelola terkait ekonomi sirkular masih belum optimal.
- **Tenaga Kerja Hijau**: Rendahnya pemahaman mengenai pekerjaan hijau (*green jobs*); belum terintegrasinya kebijakan dan peraturan terkait pekerjaan hijau; serta terbatasnya panduan dan model pengembangan pekerjaan hijau baik di tingkat nasional maupun daerah.
- **Pengelolaan Hutan Lestari**: Kontribusi sektor kehutanan masih rendah; belum berkembangnya Bioekonomi Sektor Kehutanan; proses transaksi izin dan persetujuan bisnis yang belum efektif; serta keterlibatan para pihak/multisektor yang belum optimal.
- **Digital**: Belum optimalnya kontribusi ekonomi perkotaan terhadap nasional; digitalisasi sektor strategis; serta aspek pendukung dan akselerator transformasi digital.
- **Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**: Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas; perdagangan antar wilayah dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global masih belum optimal; belum optimalnya penguatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global; serta daya dukung yang perlu diperkuat.

- **Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**: Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas; pemenuhan layanan perkotaan yang belum memadai dan inklusif; tata Kelola yang belum terpadu, inovatif dan kolaboratif; masalah sosial–ekonomi di masyarakat perkotaan; pola pengembangan perkotaan yang menyerak; serta degradasi lingkungan perkotaan dan rendahnya ketangguhan bencana.

C. TRANSFORMASI TAT KELOLA

Isu Strategis:

- **Integritas Partai Politik**: Integritas Partai Politik belum tercapai karena biaya politik tinggi, pendanaan parpol dari negara belum memadai, dan tata Kelola parpol belum optimal.
- **Sistem Penggajian Tunggal**: Belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak dan kompetitif.
- **Kualitas Regulasi**: Hiper regulasi; kewenangan regulasi yang tersebar; belum memadai SDM regulasi; serta partisipasi yang belum optimal.
- **Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan**: Belum atau tidak adanya sistem penilaian oleh Kementrian/Lembaga/Daerah terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran dan integritas.
- **Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik**: Belum meratanya akses pelayanan public bagi masyarakat.
- **Manajemen Talenta**: Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D (Isu Transformasi Manajemen ASN).
- **Integrasi Proses Bisnis**: Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi.

D. SUREMASI HUKUM, STABILITAS DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA

Isu Strategis:

- **Stabilitas Makro**: Risiko *climate action*; Deglobalisasi; krisis lapangan pekerjaan; krisis utang dan konfrontasi geoekonomi; inflasi masih tinggi; transisi demografi; perubahan iklim; rendahnya penerimaan perpajakan; masih terbatasnya belanja negara; serta imbal hasil obligasi yang tinggi.
- **Politik Luar Negeri**: Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri; disrupsi rantai pasok global dan tren global *economic decoupling*; belum terselesaikannya perundingan batas wilayah; serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia.
- **Keamanan**: Insurgensi; konflik internal termasuk konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran batas wilayah dan kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran

hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; serta perlindungan IIVN dari serangan *cyber*.

- **Pertahanan**: Dampak konflik hegemoni; serta perubahan tipologi perang yang semakin kompleks dan sarat penggunaan senjata *Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear and High Yield Explosive* (CBRN) termasuk respon negara di dunia untuk memperkuat industri pertahanannya.
- **Hukum**: Praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien dan berlandaskan HAM; rendahnya kepatutan hukum masyarakat; keterbatasan akses terhadap keadilan; serta Kelembagaan penegak hukum yang belum professional.
- **Demokrasi**: Demokrasi masih prosedural dengan ciri: 1) Kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; 2) Belum terjaminnya kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; 3) Informasi dan komunikasi publik belum merata; 4) Permasalahan politik electoral seperti politik uang dan politisasi isu SARA; 5) Fungsi–fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; 6) Nilai–nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi.

E. KETAHANAN SOSIAL, EKONOMI DAN EKOLOGI

Isu Strategis:

- **Isu Agama**: Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja–kerja pembangunan yang membawa kebaikan Bersama; wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kebidupan beragama dan berbudaya yang inklusif; serta beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan.
- **Isu Budaya**: Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negative budaya global; Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat.
- **Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**: Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan anacaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda; pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal; ketimpangan gender yang masih tinggi; serta kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit terwujud.
- **Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati**: Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun; peningkatan kontaminasi limbah yang cukup signifikan akibat pembuangan limbah secara ilegal; TPA yang sudah melebihi kapasitas daya tampungnya; serta laju kepunahan spesies global yang semakin cepat.

- **Energi**: Akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah; pangsa pemanfaatan energi baru–terbarukan dalam bauran energi nasional yang masih kecil; efisiensi pengusahaan dan pemanfaatan energi yang belum berjalan baik; kurangnya eksplorasi; serta institusi pengelolaan energi yang belum efisien.
- **Pangan**: Peningkatan kebutuhan ketersediaan pangan; peningkatan kualitas pangan yang dikonsumsi; rendahnya keterjangkauan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan; tingginya fluktuasi harga pangan antarwaktu dan antarwilayah; serta rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan penyedia komoditas pangan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang Tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang Tahun 2021-2026 untuk program dan kegiatan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi, tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan, pada kurun waktu tertentu. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produksi Dan Produktifitas Perikanan Dan Pertanian;
2. Meningkatkan Ketersediaan Pangan Kota Bontang.

Dari tujuan tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang merumuskan beberapa sasaran untuk mewujudkan Kota Bontang yang lebih Hebat dan Beradab melalui pembangunan ketahanan pangan, perikanan dan pertanian.

Adapun sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan pertanian Kota Bontang adalah :

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Perikanan, Pertanian dan Peternakan;
2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Akhir
		2025
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Perikanan, Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	21.511,00 Ton
	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3.450 Ton
	Produktivitas Pengolahan Usaha Perikanan	463 Ton
	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Usaha Pertanian	306 Ton
	Meningkatnya Produktivitas Usaha Peternakan	1.456 Ekor
Meningkatnya ketahanan pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (skor)	90 Skor
	Persentase penguatan cadangan pangan	60%
	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah jumlah daerah rawan pangan yang ditangani terhadap jumlah daerah rawan pangan	100%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah

yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Bontang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Bontang, pada dasarnya kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang adalah sebagai *"pengarah"* setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya.

Sejalan dengan Visi Kota Bontang tahun 2021–2026 yaitu "**TERWUJUDNYA KOTA BONTANG YANG LEBIH HEBAT DAN BERADAB**" dengan 3 Misi yakni ***Harmoni, Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Sejahtera*** yang dicapai diantaranya melalui bidang ketahanan pangan, perikanan dan pertanian serta melalui keterpaduan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang antarwilayah (Nasional, Provinsi maupun Kota), dan antar kawasan (lindung dan budidaya). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang tahun 2025 terdiri dari lihat pada tabel:

Tabel 3.2.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Provinsi/Kabupaten/Kota Kota Bontang

Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian		Pagu indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
2	09				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**										
2	09	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	100	Persen	11,595,709,656	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	12,290,820,169
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	100	Persen	30,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	30,000,000

2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	1	Dokumen	5,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	5,000,000
2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bontang	1	Dokumen	5,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	5,000,000
2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bontang	1	Dokumen	5,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	5,000,000
2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bontang	1	Dokumen	5,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	5,000,000
2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bontang	1	Dokumen	5,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	5,000,000
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	1	Laporan	5,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	5,000,000

2	**09**	**01**	**2.02**		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	100	Persen	6,633,423,484	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	7,144,283,997
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	57	Orang/ Bulan	6,613,423,484	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	7,124,283,997
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang	1	Laporan	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	20,000,000
2	**09**	**01**	**2.05**		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	100	Persen	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	484,250,000
2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang	0	Paket	–	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	184,250,000
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bontang	57	Orang	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	300,000,000
2	**09**	**01**	**2.06**		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	100	Persen	1,258,750,153	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	1,258,750,153
2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kota Bontang	2	Paket	10,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	10,000,000

						Bangunan Kantor yang Disediakan									
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bontang	12	Paket	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	300,000,000
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	2	Paket	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	50,000,000
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bontang	5	Paket	87,834,153	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	87,834,153
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bontang	5	Dokumen	1,716,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	1,716,000
2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bontang	12	Laporan	4,200,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	4,200,000
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	80	Laporan	800,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	800,000,000
2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bontang	12	Dokumen	5,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	5,000,000

2	**09**	**01**	**2.08**		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	100	Persen	2,863,859,136	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	2,863,859,136
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	12	Laporan	13,720,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	13,720,000
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bontang	12	Laporan	13,700,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	13,700,000
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	71	Laporan	2,836,439,136	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	2,836,439,136
2	**09**	**01**	**2.09**		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	100	Persen	509,676,883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	509,676,883
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bontang	55	Unit	463,102,883	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	463,102,883
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bontang	25	Unit	46,574,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	46,574,000

2	**09**	**03**			**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	Kota Bontang	90	Nilai	1,612,432,547	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	1,644,681,198
						Ketersediaan Energi dan Protein	Kota Bontang	AKE= 2.400 kkal/ kapita /hari AKP = 63 gram/ kapita /hari	AKE=kkal / AKP=gram				100	Persen	
2	**09**	**03**	**2.01**		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Bontang	5	Dokumen	155,406,531	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	158,514,661
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	5	Laporan	155,406,531	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	158,514,661
2	**09**	**03**	**2.02**		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	80	Ton	566,468,865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	577,798,242
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	80	Ton	566,468,865	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	577,798,242

2	**09**	**03**	**2.04**		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tingkat Konsumsi Energi (%TKE) dan Protein (%TKP) terhadap target 2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari WNPG tahun 2012	Kota Bontang	2150 kkal/ kap/ hari dan protein 57 gram/ kap/ hari	Kkal/kap /hari dan gram/kap /hari	890,557,151	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	908,368,294
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kota Bontang	3	Dokumen	384,752,236	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	392,447,280
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Bontang	17	Laporan	505,804,915	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	515,921,014
2	**09**	**04**			**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Kota Bontang	100	Persen	181,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	199,650,000
2	**09**	**04**	**2.01**		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Kota Bontang	3	Dokumen	181,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	199,650,000
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Kota Bontang	3	Dokumen	181,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	199,650,000

2	**09**	**05**			**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kota Bontang	100	Persen	252,637,110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	277,900,821
2	**09**	**05**	**2.01**		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fungsi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kota Bontang	100	Persen	252,637,110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	277,900,821
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	3	Dokumen	252,637,110	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	277,900,821
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN**		Kota Bontang				Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	
3	**25**	**03**			**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	Produksi Perikanan Tangkap	Kota Bontang	21.511	Ton	805,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	875,000,000
3	**25**	**03**	**2.02**		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan yang Dibina	Kota Bontang	10	Kelompok	600,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	650,000,000
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kota Bontang	140	Orang	350,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	375,000,000
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kota Bontang	14	Kelompok	250,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	275,000,000

3	**25**	**03**	**2.03**		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Bontang	100	Persen	205,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	225,000,000
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Bontang	5000	Layanan	205,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	225,000,000
3	**25**	**04**			**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	Produksi Perikanan Budidaya	Kota Bontang	3450	Ton	1,550,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	1,400,000,000
3	**25**	**04**	**2.02**		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Dibina	Kota Bontang	12	Kelompok	700,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	650,000,000
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kota Bontang	12	Kelompok	400,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	350,000,000
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bontang	15	Kelompok	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	300,000,000
3	**25**	**04**	**2.04**		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang Disediakan	Kota Bontang	17	Jenis	850,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	750,000,000

3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	1	Dokumen	150,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	150,000,000
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	10	Unit	500,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	400,000,000
3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Bontang	200	Orang	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	200,000,000
3	**25**	**06**			**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	Persentase Peningkatan Produktifitas Pengelolaan Hasil Perikanan	Kota Bontang	33	Persen	250,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	300,000,000
3	**25**	**06**	**2.02**		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Sektor Perikanan	Kota Bontang	10	Unit Usaha	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	125,000,000
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Kota Bontang	10	Unit Usaha	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	125,000,000

						Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko										
3	**25**	**06**	**2.03**		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Produktifitas Pengelolaan Hasil Perikanan	Kota Bontang	33	Persen	150,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	175,000,000
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang	1000	Ton	45,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	55,000,000
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kota Bontang	14	Pelaku Usaha	105,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	120,000,000
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		Kota Bontang				Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	
3	**27**	**07**			**Program Penyuluhan Pertanian**	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian	Kota Bontang	100	Persen	423,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	465,850,000
3	**27**	**07**	**2.01**		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Presentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kota Bontang	100	Persen	423,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	465,850,000

3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Bontang	25	Unit	343,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	365,850,000
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Bontang	10	Unit	80,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	100,000,000
3	**27**	**02**			**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	Kota Bontang	100	Persen	1,546,710,264	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	1,400,000,000
3	**27**	**02**	**2.01**		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kota Bontang	100	Persen	660,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	800,000,000
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Bontang	3	Laporan	400,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	500,000,000
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Bontang	3	Laporan	260,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	300,000,000
3	**27**	**02**	**2.05**		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok	Kota Bontang	20	Jenis/Kelompok	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	300,000,000
3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan	Kota Bontang	7	Ton	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	300,000,000

						Pakan Ternak yang Tersedia											
3	**27**	**02**	**2.06**		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penambahan Jumlah Populasi Ternak di Kelompok	Kota Bontang	500	Ekor	586,710,264	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	300,000,000
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Bontang	500	Ekor	586,710,264	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	300,000,000
3	**27**	**03**			**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian Unit Pelayanan	Kota Bontang	100	Persen	1,000,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	300,000,000
3	**27**	**03**	**2.02**		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian dan Peternakan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Bontang	100	Persen	1,000,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	300,000,000
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi	Kota Bontang	1	Unit	500,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	150,000,000
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Bontang	6	Unit	500,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	150,000,000
3	**27**	**04**			**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Cakupan Wilayah Pengendalian Kesehatan Hewan	Kota Bontang	100	Persen	700,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	770,000,000

						Cakupan Pembinaan Pelaku Usaha Olahan Peternakan	Kota Bontang	93	Persen				100	Persen	
3	**27**	**04**	**2.01**		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penjaminan Kesehatan Hewan	Kota Bontang	100	Persen	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	320,000,000
3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah Kejadian Penyakit yang Ditindaklanjuti dengan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kota Bontang	2000	Kasus	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	320,000,000
3	**27**	**04**	**2.02**		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Olahan Produk Peternakan Pangan dan Non Pangan	Kota Bontang	100	Persen	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	350,000,000
3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Kota Bontang	2	Laporan	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	350,000,000
3	**27**	**04**	**2.03**		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tersediaanya Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan	Kota Bontang	100	Persen	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	100,000,000
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Bontang	12	Laporan	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	100,000,000
3	**27**	**05**			**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	Cakupan Wilayah yang Terkendali dari Bencana Pertanian	Kota Bontang	100	Persen	181,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	199,650,000

3	**27**	**05**	**2.01**		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kota Bontang	100	Persen	181,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	199,650,000
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kota Bontang	33	Ha	181,500,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100	Persen	199,650,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 4.1

Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang

Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
						Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian							41.403.162.922,00	37.936.810.559,00						34.660.677.909,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							31.284.223.210,00	29.276.239.690,00						28.950.177.909,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							31.284.223.210,00	29.276.239.690,00						28.950.177.909,00	
1	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	28.290.797.017,00	27.463.628.936,00						26.827.945.891,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.369.520,00	1.369.520,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Penyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dinas Ketahanan, Pangan Perikanan dan Pertanian	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	684.760,00	547.808,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	684.760,00	547.808,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	21.613.450.736,00	21.613.450.736,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	20.610.272.002,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				91 Orang/bulan	99 Orang/bulan	21.612.765.976,00	21.612.765.976,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		20.590.272.002,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Laporan	1 Laporan	684.760,00	547.808,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								Semua Kel/Desa		n bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				PERTANIAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	533.667.000,00	533.667.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	440.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				160 Paket	157 Paket	182.490.000,00	182.490.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				31 Orang	32 Orang	351.177.000,00	188.447.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.718.471.993,00	1.718.471.993,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	1.258.750.153,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.989.928,00	7.988.604,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	398.853.683,00	380.012.507,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49.306.266,00	49.306.266,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	79.357.084,00	63.722.245,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		87.834.153,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.716.000,00	1.716.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		1.716.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	35.160.000,00	17.520.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		4.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170 Laporan	170 Laporan	1.139.104.000,00	529.264.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.985.032,00	7.765.146,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	-			-	100 persen	658.006.000,00	658.006.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	723.849.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	hijau, dan ekonomi biru				
	2	09	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	524.960.000,00	524.960.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
	2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	4 Unit	133.046.000,00	133.046.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		123.849.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.954.377.760,00	2.954.377.760,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	2.838.500.736,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	17.400.000,00	14.550.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		13.720.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.400.000,00	26.400.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		27.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	58 Laporan	2.910.577.760,00	2.910.577.760,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	-		2.797.780.736,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	811.454.008,00	811.454.008,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	946.574.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				55 Unit	55 Unit	744.584.008,00	744.584.008,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				99 Unit	99 Unit	66.870.000,00	66.870.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		46.574.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
2	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi dan Protein Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)				2400 dan 63 90 AKE dan AKP Nilai	2400 dan 63 90 AKE dan AKP Nilai	2.606.667.276,00	1.558.628.031,00						1.644.681.197,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-			5 Dokumen	5 Dokumen	294.560.096,00	294.560.096,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas Terkait dan Masyarakat	158.514.661,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	ekonomi biru				
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota															
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	294.560.096,00	229.043.051,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		158.514.661,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-			80 Ton	80 Ton	282.211.215,00	282.211.215,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas dan Masyarakat	577.798.242,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
								Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	10 Ton	282.211.215,00	215.296.372,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		577.798.242,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tingkat Konsumsi Energi (%TKE) dan Protein (%TKP) terhadap target 2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari WNPG tahun 2012	-			2150 Kkal/kap/hari 57 Gram/kap/hari	2150 Kkal/kap/hari 57 Gram/kap/hari	2.029.895.965,00	2.029.895.965,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas Terkait dan Masyarakat	908.368.294,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun															
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				3 Dokumen	3 Dokumen	336.774.784,00	194.825.329,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		392.447.280,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																Hasil (DBH)	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal															
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				7 Laporan	7 Laporan	1.693.121.181,00	919.463.279,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		515.921.014,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
3	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita				100 Persen	100 Persen	171.169.480,00	95.998.173,00						199.650.000,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	-			3 Dokumen	3 Dokumen	171.169.480,00	171.169.480,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas dan Instansi Terkait	199.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				3 Dokumen	3 Dokumen	171.169.480,00	95.998.173,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		199.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
4	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan				100 Persen	100 Persen	215.589.437,00	157.984.550,00						277.900.821,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fungsi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	-			100 Persen	100 Persen	215.589.437,00	215.589.437,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas terkait dan Masyarakat	277.900.821,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				3 Dokumen	3 Dokumen	215.589.437,00	157.984.550,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		277.900.821,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																Hasil (DBH)	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							10.118.939.712,00	8.660.570.869,00						5.710.500.000,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							4.195.905.284,00	3.592.488.380,00						2.575.000.000,00	
5	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap				21511 Ton	21511 Ton	1.784.365.692,00	1.650.892.224,00						875.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan yang Dibina	-			10 Kelompok	14 Kelompok	1.535.585.989,00	1.535.585.989,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Nelayan Skala Kecil	650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil															
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	1.390.092.851,00	875.277.696,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		375.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																Hasil (DBH)	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil															
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				14 Kelompok	14 Kelompok	145.493.138,00	81.342.770,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
6	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya				3450 Ton	3450 Ton	1.318.646.210,00	1.023.336.937,00						1.400.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang dibina	-			12 Kelompok	15 Kelompok	586.991.165,00	586.991.165,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Pembudidaya Ikan	650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan															
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraa				15 Kelompok	15 Kelompok	187.864.983,00	104.355.025,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							n Pendidikan dan Pelatihan										ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang Disediakan	-			17 Jenis	17 Jenis	731.655.045,00	731.655.045,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Pembudidaya Ikan	750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	12 Dokumen	95.554.283,00	58.759.860,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit	10 Unit	494.805.164,00	440.041.042,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																Hasil (DBH)	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat															
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				200 Unit	200 Unit	141.295.598,00	74.301.840,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
7	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan				33 Persen	33 Persen	1.092.893.382,00	918.259.219,00						300.000.000,00	
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Sektor Perikanan	-			10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	96.003.776,00	96.003.776,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	96.003.776,00	55.297.604,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	-			33 Persen	33 Persen	996.889.606,00	996.889.606,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1000 Ton	1000 Ton	92.316.992,00	81.375.072,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				14 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	904.572.614,00	781.586.543,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							5.923.034.428,00	5.068.082.489,00						3.135.500.000,00	
8	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian				100 Persen	100 Persen	1.313.362.357,00	1.035.092.401,00						1.400.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-			100 Persen	100 Persen	844.003.854,00	844.003.854,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Tani dan Masyarakat	800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4 Laporan	4 Laporan	97.979.136,00	50.208.944,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian															
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	4 Laporan	746.024.718,00	655.463.958,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																Hasil (DBH)	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok	-			20 Kelompok	20 Kelompok	199.999.597,00	199.999.597,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Peternak	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				2 Laporan	2 Laporan	199.999.597,00	125.074.598,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penambahan jumlah populasi ternak di kelompok	-			500 Ekor	1000 Ekor	269.358.906,00	269.358.906,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Tani/Ternak	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	hijau, dan ekonomi biru				
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain															
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				500 Ekor	1000 Ekor	269.358.906,00	204.344.901,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
9	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan				100 Persen	100 Persen	3.011.837.811,00	2.883.106.833,00						300.000.000,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dan peternakan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-			100 Persen	100 Persen	3.011.837.811,00	3.011.837.811,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Dinas dan Masyarakat	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	2 Unit	2.813.628.145,00	2.742.607.553,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
10	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan Cakupan pembinaan pelaku usaha olahan peternakan				100 93 Persen Persen	100 93 Persen Persen	498.167.570,00	350.002.283,00						770.000.000,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan	Cakupan penjaminan	-			100 Persen	100 Persen	166.775.455,00	166.775.455,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan	-	Masyarakat	320.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
						Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	kesehatan hewan										negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan															
							Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				2000 Kasus	2000 Kasus	166.775.455,00	101.382.308,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan	-		320.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	ekonomi biru				
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Olahan Produk Peternakan Pangan dan Non Pangan	-			100 Persen	100 Persen	199.999.790,00	199.999.790,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat dan Pelaku Usaha Peternakan	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				2 Laporan	2 Laporan	199.999.790,00	150.791.650,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya operasional pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan	-			100 Persen	100 Persen	131.392.325,00	131.392.325,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Masyarakat	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	hijau, dan ekonomi biru				
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner															
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	131.392.325,00	97.828.325,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	ekonomi biru				
11	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan wilayah yang terkendali dari bencana pertanian				100 Persen	100 Persen	138.311.065,00	92.755.509,00						199.650.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-			100 Persen	100 Persen	138.311.065,00	138.311.065,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Tani	199.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	ekonomi hijau, dan ekonomi biru				
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan															
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				33 Ha	33 Ha	138.311.065,00	92.755.509,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		199.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
																	ekonomi biru				
12	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian				100 Persen	100 Persen	961.355.625,00	707.125.463,00						465.850.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-			100 Persen	100 Persen	961.355.625,00	961.355.625,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Kelompok Tani dan Masyarakat Tani	465.850.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Unit	11 Unit	693.748.110,00	450.489.139,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM		365.850.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				10 Unit	10 Unit	267.607.515,00	256.636.324,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
						UPT Tempat Pelelangan Ikan							41.403.162.922,00	37.936.810.559,00						34.660.677.909,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							10.118.939.712,00	8.660.570.869,00						5.710.500.000,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							4.195.905.284,00	3.592.488.380,00						2.575.000.000,00	
13	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN	Produksi perikanan tangkap				21511 Ton	21511 Ton	1.784.365.692,00	1.650.892.224,00						875.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
						PERIKANAN TANGKAP															
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-			100 Persen	100 Persen	248.779.703,00	248.779.703,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat Nelayan	225.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				5000 Layanan	5000 Layanan	248.779.703,00	694.271.758,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		225.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
						UPT Rumah Potong Hewan							41.403.162.922,00	37.936.810.559,00						34.660.677.909,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							10.118.939.712,00	8.660.570.869,00						5.710.500.000,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							5.923.034.428,00	5.068.082.489,00						3.135.500.000,00	
14	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA	Persentse pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan				100 Persen	100 Persen	3.011.837.811,00	2.883.106.833,00						300.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
						N PRASARANA PERTANIAN															
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dan peternakan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-			100 Persen	100 Persen	3.011.837.811,00	3.011.837.811,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	198.209.666,00	140.499.280,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
						UPT Balai Benih Ikan							41.403.162.922,00	37.936.810.559,00						34.660.677.909,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							10.118.939.712,00	8.660.570.869,00						5.710.500.000,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							4.195.905.284,00	3.592.488.380,00						2.575.000.000,00	
15	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya				3450 Ton	3450 Ton	1.318.646.210,00	1.023.336.937,00						1.400.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Operasional Balai Benih Ikan	-			12 Bulan	12 Bulan	586.991.165,00	586.991.165,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Pembudidaya Ikan	650.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	20
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				12 Kelompok	12 Kelompok	399.126.182,00	345.879.170,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
								JUMLAH	**41.403.162.922,00**	**37.936.810.559,00**						**34.660.677.909,00**	

XIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) disusun berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsi suatu Perangkat Daerah serta mengacu pada Rencana Strategsi dan RPJMD.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangka Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Kota Bontang 2021-2026 dan RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

12) Peraturan Walikota No.2 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang

1.3. Maksud Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 yaitu memberikan pedoman untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang di Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026.

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 yaitu :

- Memenuhi ketentuan peraturan perundangan dimana OPD memiliki kewajiban untuk membuat Renja
- Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
- Memudahkan dalam melaksanakan perencanaan program dan kegiatan
- Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
- Memastikan konsistensi penyusunan program dan kegiatan antara Renja dengan Renstra
- Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan

1.4. Sistematika dan Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan 2025 ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan tujuan

1.4. Sistematika penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung.

IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

1.1. Evaluasi Kinerja Sasaran

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Untuk mengetahui pencapaian sasaran, program dan kegiatan perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 yang tercantum pada Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.2

Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja DLH Kota Bontang Tahun 2024

Sasaran DLH	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Keterangan
Meningkatnyan Pengendalian Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	53,63	55,56	capaian sebesar 103,6%
Meningkatnya Pengendalian Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	86,44	87,54	capaian sebesar 101,3%
Meningkatknya Pengendalian Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	51,32	51,89	capaian sebesar 101,1%
Cakupan pengelolaan sampah	Persentase Penanganan Sampah	99%	99,68%	capaian sebesar 100,7%

Sumber : Laporan Capaian IKLH Tahun 2024

Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang pada tahun 2025 ada 10 program dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1.2 Capaian Program DLH Kota Bontang Kerja 2024 dan Target 2025

Program DLH	Indikator Sasaran Program DLH	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
Program Perencanaan Lingkungan Hidup					
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan	87%	99,41%	91%	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan KEHATI	64%	44%	76%	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya & beracun dan limbah bahan berbahaya & beracun	100%	100%	100%	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	96%	96,15%	96%	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	100%	100%	100%	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan perhargaan lingkungan hidup	100%	100%	100%	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan penanganan pengaduan	100%	100%	100%	
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	99%	99,68	99%	

1.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Adapun evaluasi sampai dengan TW II (30 Juni 2025) yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Tabel Anggaran & Capaian Realisasi Keuangan & Fisik

No.	Program | Kegiatan | Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Sisa (Rp.)
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	75.429.084.542	25.037.263.660	33,19	43,19	50.391.820.882
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	60.146.289.528	10.664.416.209		43,37	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.660.706			16,7	
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	585.181	0	0	0	585.181
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.463.520	0	0	0	1.463.520
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	728.584	0	0	0	728.584
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	579.095	0	0	0	579.095
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.220.667.131	3.750.378.031		50,13	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.220.667.131	7.242.076.647	50,93	62,23	7.106.106.055
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.922.992	0	0	0	2.922.992
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	290.576	0	0	0	290.576
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.476.650	0	0	0	1.476.650
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.353.455.900	171.500.000		100	
1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	216.455.900	0	0	57,57	204.037.500
1.3.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	568.160.000	888.130.000	77,19	78,47	262.484.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.781.260.389	221.731.200		100	
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.570.737	135.200.000	57,39	72,13	100.370.737
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.208.285	10.395.000	92,74	100	813.285
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.465.796	36.672.000	88,44	100	4.793.796
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.528.201	0	0	0	40.528.201

No.	Program | Kegiatan | Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Sisa (Rp.)
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	546.568.000	121.501.676	22,23	27,34	425.066.324
1.4.5	Penatausahaan Arsip Dinamin pada SKPD	290.793.831	78.500.000	27	34,73	212.293.831
1.5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	11.691.511.461	1.023.720.000		20	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.028.290.000	1.019.700.000	99,16	99,78	8.590.000
1.5.2	Pengadaan mebel	96.734.526	0	0	0	96.734.526
1.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.566.486.935	4.020.000	0,04	0,16	10.562.466.935
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.430.246.296	4.626.502.910		53,57	
1.6.1	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500.000	7.500.000	100	100	0
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.000.000	36.322.520	23,28	50,01	119.677.480
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.266.746.296	9.867.989.022	44,32	52,97	12.398.757.274
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.657.620.600	870.584.068		66,67	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.536.364.600	2.550.876.674	29,88	41,06	5.985.487.926
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.400.000	0	0	0	30.400.000
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.256.000	1.967.385	2,36	9,71	81.288.615
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	823.063.664	290.550.780,00	29,53	29,53	
2.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	893.456.365	275.500.780	30,84	29	
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	101.093.285	0	0	2,8	101.093.285
2.1.2	Koordinasi,sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	138.746.008	52.972.600	38,18	55,93	85.773.408
2.1.3	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	391.647.500	116.828.180	29,83	49,06	274.819.320
2.1.4	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	261.969.572	105.700.000	40,35	73,84	156.269.572
2.2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	90.582.335	15.050.000	16,61	55,14	

No.	Program | Kegiatan | Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Sisa (Rp.)
2.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	90.582.335	15.050.000	16,61	55,14	75.532.335
3.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					
3.1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					
3.1.1	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	323.304.128	0	0	16,57	323.304.128
3.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10.929.856	1.452.000		100	
3.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	8.849.904	1.452.000		100	
3.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.610.952	1.452.000	90,13	91,5	158.9524
3.1.2	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	7.238.952	0	0	0	7.238.952
3.2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.079.952	0		100	
3.2.1	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	2.079.952	0	0	0	2.079.952
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	7.738.000	0	0	0	
4.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	7.738.000	0	0	**0**	
4.1.1	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	7.738.000	0	0	0	7.738.000
5.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	281.255.981	0	0		281.255.981
5.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	281.255.981	0	0	100	281.255.981
5.1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	10.356.952	0	0	0	10.356.952
5.1.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	85.683.029	0	0	6,96	85.683.029

No.	Program | Kegiatan | Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Sisa (Rp.)
5.1.3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	185.216.000	0	0	26,83	185.216.000
6	PROGRAM PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	374.425.390	0	0	66,67	374.425.390
6.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	374.425.390	0	0	66,7	374.425.390
6.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	374.425.390	0	0	1,99	239.022.656
7.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	39.963.500	7.749.640	19,39	100	32.213.860
7.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	39.963.500	7.749.640	19,39	100	32.213.860
7.1.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	23.942.000	7.749.640	32,37	33,21	16.192.360
7.1.2	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	16.021.500	0	0	0	16.021.500
8	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	7.010.457.105	1.422.357.216,00	20,29	53,93	
8.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	7.010.457.105	1.422.357.216,00	20,29	100	
8.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.214.676.229	323.116.145	14,59	80,71	1.891.560.084
8.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan keanekaragaman Hayati	1.097.350.100	1.013.141.071	92,33	92,34	84.209.029
8.1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	3.651.681.801	85.100.000	2,36	20,26	3.565.581.801
8.1.4	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya	46.748.975	0	0	41,68	46.748.975
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.444.560.386,00	2.030.933.100,00	27,28	27,28	5.413.627.286,00
9.1	Pengelolaan Sampah	7.444.560.386,00	2.030.933.100,00	27,28	27,28	5.413.627.286,00
9.1.1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	659.102.945	450.548.200	68,36	69,49	208.554.745
9.1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.111.290.100	906.610.000	42,94	51,55	1.204.680.100
9.1.3	Penanganan sampah melalui pengangkutan	599.585.066	62.649.000	10,45	60,65	536.936.066
9.1.4	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	48.825.161	0	0	23,82	48.825.161
9.1.5	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	980.360.220	251.923.900	25,7	36,81	728.436.320

No.	Program | Kegiatan | Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Sisa (Rp.)
9.1.6	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	236.320.000	16.935.000	7,17	11,85	219.385.000
9.1.7	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1.783.145.900	5.200.000	0,29	3,15	1.777.945.900
9.1.8	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	53.344.684	1.460.000	2,74	3,8	51.884.684
9.1.9	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	972.586.310	335.607.000	34,51	56,89	636.979.310

Dari hasil evaluasi kinerja DLH Triwulan 2 (Januari-Juni 2025), anggaran total DLH pada bulan Juni 2025 sebesar Rp.75.429.084.542 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.037.263.660 atau mencapai 33,19%. Sedangkan realisasi fisik mencapai 43,19%. Terdapat deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan, sehingga dalam pelaksanaan bulan berikutnya perlu kecermatan dan penataan kembali baik target output di sub kegiatan maupun target anggaran pada tiap bulan.

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada laporan Evaluasi RENJA pada Tabel 2.1.3 sebagai berikut :

TABEL 2.1.3

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang

Triwulan II tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K		Rp	I		II			III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp							
3	4	7			8		9			10		11		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				78.816.191.060		12.651.659.220		12.385.604.440												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	persen	60.146.289.528	23,18	10.619.804.715	43,37	10.664.416.209						67	21.284.220.924	167	59.892.533.096	66,55	35	Dinas Lingkungan Hidup
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi	6	Jenis	5.660.706	30	-	0							30	-	42	15.013.968	500	-	Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	730.414	1	-								1	-	7	3.450.000	50	-	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	1.826.035	1	-								1	-	3	1.150.000	100	-	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	913.015		-								0	-	2	1.150.000	0	-	Dinas Lingkungan Hidup

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	laporan	730.414	1	-							1	-	13	5.265.734	33,3333	-	Dinas Lingkungan Hidup
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	laporan	1.460.828		-													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100	persen	14.226.534.176	50.06	3.491.698.616	0.07	3.750.378.031					60	7.242.076.647	60	36.128.933.873	60	51	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82	Orang	14.220.667.131	82	3.491.698.616	82	3.750.378.031					60	7.242.076.647	60	36.124.403.873	73,1707	51	Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12	dokumen	3.652.070		-													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	365.207	1	-							1	-	2	1.035.000	100	-	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17	laporan	1.849.768	4	-							4	-	17	1.495.000	23,5294	-	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pengelolan admnistrasi kepegawaian	100	persen	1.353.455.900	0	-	100	171.500.000					100	171.500.000	200	2.568.249.710	100	13	Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	81	paket	216.455.900		-	81	171.500.000					81	171.500.000	162	1.213.102.000	100	79	Dinas Lingkungan Hidup
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	81	orang	1.137.000.000		-							0	-	0	898.805	0	-	Dinas Lingkungan Hidup

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0			0	-								0	-	0	898.905	0	-	Dinas Lingkungan Hidup
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0			0	-								0	-	25	1.131.850.000	0	-	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pengelolan admnistrasi umum	100	persen	1.781.260.389	100	160.537.476	100	221.731.200						200	382.268.676	299	7.193.882.739	200	21	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16	paket	249.372.767		-	2	135.200.000						2	135.200.000	36	3.148.976.832	12,5	54	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	paket	15.006.435		-	1	10.395.000						1	10.395.000	1	10.395.000	20	69	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	paket	41.465.796		-	5	36.672.000						5	36.672.000	20	129.603.168	100	88	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	50.763.294		-		-						0	-	6	206.338.180	0	-	Dinas Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	1.125.658.000	3	82.037.476	3	39.464.200						6	121.501.676	36	3.620.069.559	50	11	Dinas Lingkungan Hidup
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	298.994.097	1	78.500.000		-						1	78.500.000	1	78.500.000	100	26	Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100	persen	11.691.511.461	0	-	20	1.023.720.000						20	1.023.720.000	120	3.292.568.000	20	9	Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	unit	1.028.290.000		0	3	1019700000						3	1.019.700.000	17	2.181.490.000	100	99	Dinas Lingkungan Hidup

Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	unit	96.734.526		-		-					0	-	2	583.308.000	0	-	Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1	unit	10.566.486.935		-		4.020.000											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan jasa penunjang	100	persen	22.430.246.296	28,57	5.285.308.632	25	4.626.502.910					54	9.911.811.542		13.195.023.963	53,57	44	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	laporan	7.500.000	1	7.500.000		-					1	7.500.000	4	30.000.000	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	laporan	156.000.000		14.906.108	0,5	21.416.412					1	36.322.520	3	250.411.560	50	23	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	22.266.746.296	3	5.262.902.524	3	4.605.086.498					6	9.867.989.022	39	12.914.612.403	50	44	Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	8.657.620.600	0	1.682.259.991	66,67	870.584.068					67	2.552.844.059	0	16.963.938.527	66,67		Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	33	unit	8.536.364.600		1.680.670.006	33	870.206.668					33	2.550.876.674	58	16.089.919.313	100	30	Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	38.000.000		-		-					0	-	2	425.544.700	0	-	Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	83.256.000		1.589.985	4	377.400					4	1.967.385	12	448.474.514	400	2	Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**100**	persen	452.461.160	0	-	0												
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	**Jumlah penyelenggaraan kajian KLHS**	1	Dokumen	452.461.160	0	-	0												
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	**Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang**	1	Dokumen	452.461.160	0	-	0												
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**96**	persen	1.176.283.509	**15**	22.572.940	28	267.977.840						43	290.550.780	**142**	1.092.344.494	44,7917	25	Dinas Lingkungan Hidup
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	prosentase pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan	**97**	persen	1.029.427.174	**14,5**	22.572.940	29	252.927.840						44	275.500.780	**143**	1.765.529.004	44,8454	27	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	Dokumen	123.683.870	0	-	0	-						0	-	3	702.482.903	0	-	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	206.363.510		14.136.600	38,18	38.836.000						38	52.972.600	40	235.347.600	3818	26	Dinas Lingkungan Hidup
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	*Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan*	1	Paket	416.821.000	**0,25**	8.436.340	0.5	108.391.840											
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	Dokumen	282.558.794	1	-	2	105.700.000						3	105.700.000	60	706.673.821	300	37	Dinas Lingkungan Hidup

Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan pemantauan kualitas lingkungan hidup	97	persen	146.856.335		-		15.050.000						0	15.050.000	100	247.956.662	0	10	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	Dokumen	146.856.335		-	16,61	15.050.000						17	15.050.000	19	247.956.662	1661	10	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KEHATI	**Cakupan pengelolaan Kehati**	85	%	7.897.301.351	53,93	1.068.742.065	53,93	353.615.151						108	1.422.357.216	189	28.068.689.286	126,894	18	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas pengelolaan Kehati	50,56	Ha	7.897.301.351	8729,4	1.068.742.065	8729,4	353.615.151						17459	1.422.357.216	175005	42.941.474.613	34530,9	18	Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				0	-	0	-						0	-	95	295.590.420	0	-	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	49,56	Ha	2.917.848.875	50,56	71.321.194	50,56	251.794.951						49,56	323.116.145	49,56	38.820.324.101	100	11	Dinas Lingkungan Hidup
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2	Orang	1.187.517.000	78	997.420.871	0	15.720.200						78	1.013.141.071	162	1.662.248.702	3900	85	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3	unit	3.687.068.426		-	0	86.100.000						0	86.100.000	30	1.855.838.030	0	2	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	unit	104.867.050	9	-	9	-						18	-	88	148.065.000	1800	-	Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B3 DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LIMBAH B3	**Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)**	100	persen	15.561.712	0	-	100	1.452.000					100	1.452.000	200	24.798.200	100	9	Dinas Lingkungan Hidup
Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan pengelolaan limbah B3 dari kantor dan oli bekas	1	laporan	12.607.808	0	-	1	1.452.000					1	1.452.000	3	30.714.200	100	12	Dinas Lingkungan Hidup
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	2.283.904		-	1	1.452.000					1	1.452.000	3	9.521.200	100	64	Dinas Lingkungan Hidup
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	laporan	10.323.904		-	0	-					0	-	1	21.193.000	0	-	Dinas Lingkungan Hidup
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.953.904		-		-											
Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di Kabupaten/Kota	*jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina*	3	Usaha	2.953.904		-	156												

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PPLH	**Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH**	96	persen	14.806.000	90	-	100							190	-	286	720.000	197,917	-	Dinas Lingkungan Hidup
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pembinaan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan	2	jenis	14.806.000	90	-	100							190	-	286	5.730.000	9500	-	Dinas Lingkungan Hidup
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan					-								0	-	15	3.450.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20	Badan Usaha	14.806.000	9	-	9							18	-	20	2.280.000	90	-	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan**	60	persen	437.744.607	16	-	72							88	-	148	120.833.701	146,667	-	Dinas Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis diklat dan penyuluhan	2	Jenis	437.744.607	1	-	2							3	-	5	144.193.701	150	-	Dinas Lingkungan Hidup
Pendampingan Gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	1	dokumen	14.873.904		-														
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	75	orang	110.708.703		-								0	-	0	-	0	-	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1	lembaga	312.162.000	1	-	1							2	-	31	125.993.701	200	-	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Cakupan penghargaan lingkungan hidup**	100	persen	407.080.995		-								0	-	100	608.276.394	0	-	Dinas Lingkungan Hidup
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan yang diberikan	4	Jenis	407.080.995	0	-	2							2	-	10	625.496.394	50	-	Dinas Lingkungan Hidup
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3	Entitas	407.080.995	0	-	3							3	-	9	625.496.394	100	-	Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Cakupan penanganan pengaduan**	100	persen	57.993.000	100	-	0	7.749.640						100	7.749.640	200	39.268.795	100	13	Dinas Lingkungan Hidup
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yg diselesaikan	100	persen	57.993.000	1	-	0	7.749.640						1	7.749.640	101	43.904.795	1	13	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	1	pengaduan	32.174.000		-		7.749.640						0	7.749.640	1	43.904.795	0	24	Dinas Lingkungan Hidup
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	perkara	25.819.000		-								0	-	0	-	0	-	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase penanganan sampah**	71	persen	8.210.669.198		940.539.500		1.090.393.600						0	2.030.933.100	70	53.697.442.278	0	25	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase pengurangan sampah	29	persen																	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Sampah	Prosentase dukungan pengelolaan sampah	100	persen	8.210.669.198		940.539.500		1.090.393.600						0	2.030.933.100	382011	63.979.842.385	0	25	Dinas Lingkungan Hidup
														0		383114				Dinas Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	16	kelompok	669.225.243	7,00	22.976.000	17,00	427.572.200						24	450.548.200	131	868.427.790	150	67	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*	19	unit	2.111.290.100	1	906.610.000	1	-						2	906.610.000	2	908.560.000	10,5263	43	Dinas Lingkungan Hidup
Penanganan sampah melalui pengangkutan	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan*	15.834	ton	696.250.195	7650,71	-	7210,51	62.649.000						14861	62.649.000	26174	11.768.045.223	93,8564	9	Dinas Lingkungan Hidup
Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	*Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali*	50000	ton	48.825.161	99.005	-	101.025	-						200030	-	2001122	1.071.101.366	4000,6	-	Dinas Lingkungan Hidup
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	*Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik*	1	unit	982.405.380	0	750.000	18	251.173.900						18	251.923.900	40	38.232.835.279	1800	26	Dinas Lingkungan Hidup
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan*	50000	ton	236.320.000	121,196	-	266822	16.935.000						266943	16.935.000	266959	10.788.605.727	5338,86	7	
Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	*Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah*	1	laporan	2.436.668.125	0	5.200.000	0	-												

Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	*Jumlah sampah yang terdaur ulang*	2000	ton	57.098.684	0	-		1.460.000											
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	*jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional*	43.076	ton	972.586.310		5.003.500		330.603.500											
Jumlah				78.816.191.060		12.651.659.220		12.385.604.440						25.037.263.660		143.544.906.244			

BAB III

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Renja Perubahan Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja 2025 dan adanya transisi RPJMD 2021-2026 menjadi RPJMD 2025-2029. Penyusunan Renja Perubahan tahun 2025 memasukkan target-target kerja sebagian mengacu pada indikator yang ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029. Berikut disajikan Tabel Renja Perubahan 2025.

XIV. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyesuaian Rencana Kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, khususnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2023 tersebut tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2021-2026 sebagai implementasi visi Pemerintah Kota Bontang yaitu :

”Terwujudnya Kota Bontang yang lebih HEBAT dan BERADAB”

Penjelasan visi dalam konsep “Hebat dan Beradab” merupakan tujuan akhir pembangunan Kota Bontang, yaitu mewujudkan masyarakat kota Bontang yang harmoni melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan mengacu pada amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan yang salah satunya diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang mulai tahun 2013 menjalankan amanat UU No 24. Tahun 2013 Pasal 79 tentang Pengurusan dan Penertiban Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (gratis). Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen secara keseluruhan bahwa disemua area kantor dinas, kecamatan hingga kelurahan tidak pernah melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada masyarakat. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 38 Tahun 2019 tentang

Penetapan Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan standar pelayanan melingkupi ruang lingkup pelayanan bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Target capaian pembangunan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang relevan dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, berdasarkan matrik penjabaran visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah **Misi yaitu: "Kota Bontang Yang Lebih Hebat dan Beradab"**. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Tujuan : mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi.
- Sasaran : terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
- Indikator Kinerja Sasaran : kelengkapan data administrasi kependudukan yang selalu di *update* dan berbasis teknologi.
- Program : penataan administrasi kependudukan.
- Penanggung jawab : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pendukung : Kecamatan dan Kelurahan

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2024 adalah :

1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7) Undang Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan); Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10) Peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 dan perubahannya Nomor : 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan KTP;

11) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
17) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang Tahun 2011-2016; Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
18) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026;
19) Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20) Peraturan Walikota Bontang Nomor 62 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang;
21) Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2021-2026;
22) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2023.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2023 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan SKPD yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuan rencana kerja tersebut menjadi acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi SKPD.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan

Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah**.**

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PERANGKAT DAERAH Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan

fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PERANGKAT DAERAH

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi PERANGKAT DAERAH yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PERANGKAT DAERAH

3.3. Program dan Kegiatan,

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya :
   - Pencapaian visi dan misi kepala daerah
   - Pencapaian SDGs
   - Pengentasan kemiskinan
   - Pencapaian NSPK dan SPM
   - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
   - Pengembangan daerah terisolir, dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Program Tahun 2023

Pagu anggaran murni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang pada tahun 2023 sebesar ***Rp. 14.243.875.859,00 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).*** Adapun anggaran perubahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 mengalami kenaikan pagu anggaran menjadi **16.533.962.515*,00 (Enam Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah)*** atau sebesar ***16.08 % (Enam Belas koma Delapan persen)*** dengan **5** (***lima***) Program, **12 (dua belas)** Kegiatan dan ***24 (Dua Puluh Empat)*** Sub Kegiatan. Dari jumlah dana belanja tersebut terealisasi sebesar ***Rp* 15.538.808.881,00 *(Lima Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)*** atau sekitar **93,98%** ***(Delapan puluh enam koma tiga puluh satu persen)*** dengan saldo anggaran yang telah disetorkan kembali ke kas daerah sebesar ***Rp.* 995.153.634 *(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).***

Untuk **Tahun 2024** Pagu anggaran murni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebesar ***Rp. 16.733.787.016,00 (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh***

Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Belas Rupiah). Pagu Anggaran Perubahan 2024 menjadi ***Rp. 20.706.684.234,00 (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)***. Dari jumlah dana belanja tersebut yang terealisasi pada akhir tahun sebesar ***Rp 19.989.693.017,00 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Belas Rupiah)*** atau sekitar **96,54%** ***(Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Empat Persen)*** dengan **5** (***Lima***) Program, **12** ***(dua belas)*** Kegiatan dan ***24 (Dua Puluh empat)*** Sub Kegiatan.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, Tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Hasil Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun			Realisasi Kinerja SKPD Tahun Berjalan (2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Cat
					Target 2023	Realisasi Keuangan 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi 2024 (%)	Realisasi Keuangan 2024	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100 %									
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**	100 %									
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	-	-	-	-	87,51	212.560.790	100%	100	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 %									
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	92,88	100 %	6.993.662.250	92,88	98,58	8.438.922.313	100%	100%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Hasil Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun			Realisasi Kinerja SKPD Tahun Berjalan (2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Cat
					Target 2023	Realisasi Keuangan 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi 2024 (%)	Realisasi Keuangan 2024	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.01. 2.05	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%									
2.12.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	98,76	100 %	491.020.000	98,76	98,08	257.500.000	100%	100%	
2.12.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	100%	92,21	100 %	47.315300	92,21	64,73	45.914.300	100%	100%	
2.12. 01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%									
2.12.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	82,50	100 %	4.971.690	82,50	84,19	4.811.000	100%	100%	
2.12.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	88,31	100 %	177.167.600	88,31	90,98	487.605.855	100%	100%	
2.12.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	100%	85,33	100 %	56.827.000	85,33	83,32	14.637.750	100%	100%	
2.12.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan	100%	62,40	100 %	60.102.137	62,40	62,07	604.41.250	100%	100%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Hasil Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun			Realisasi Kinerja SKPD Tahun Berjalan (2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Cat
					Target 2023	Realisasi Keuangan 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi 2024 (%)	Realisasi Keuangan 2024	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penggandaan Yang Disediakan										
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100%	100,00	100 %	491.433.000	100,00	99,66	941.039.624	100%	100%	
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%									
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	100%	-	-	-	-	91,5	207.720.000	100%	100%	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	100%	93,10	100 %	58.025.000	93,10	97,45	528.220.000	100%	100%	
2.12.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	46,10	100 %	1.465.200	46,10	95,36	5.775.000	100%	100%	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**									
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	100%	59,22	100 %	11.370.500	59,22	70,86	16.652.000	100%	100%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Hasil Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun			Realisasi Kinerja SKPD Tahun Berjalan (2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Cat
					Target 2023	Realisasi Keuangan 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi 2024 (%)	Realisasi Keuangan 2024	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Menyurat										
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	100%	87,48	100 %	212.049.130	87,48	79,99	251.499.405	100%	100%	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	90,63	100 %	808.272.136	90,63	97,35	1.174.091.536	100%	100%	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**									
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	100%	89,53	100 %	307.738.600	89,53	74,65	329.919.400	100%	100%	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	100%	51,65	100 %	10.909.727	50,30	39,29	10.694.868	100%	100%	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang	100%	61,84	100 %	41.391.900	61,84	36,88	29.964.450	100%	100%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Hasil Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun			Realisasi Kinerja SKPD Tahun Berjalan (2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Cat
					Target 2023	Realisasi Keuangan 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi 2024 (%)	Realisasi Keuangan 2024	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dipelihara										
2.12.01. 2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	99,25	100 %	32.751.575	99,25	99,21	465.700.464	100%	100%	
2.12.01. 2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	-	-	-	-	11,09	550.000	100%	100%	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk**	**0,99**									
2.12. 02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	100%									
2.12.02. 2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan Dan Penertiban Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	100%	96,31	100 %	1.191.042.500	96,31	95,47	513.905.000	100%	100%	
2.12.02. 2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	96,51	100 %	364.146.296	96,51	34,16	50.754.996	100%	100%	
2.12. 02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan**	**100%**									

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Hasil Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun			Realisasi Kinerja SKPD Tahun Berjalan (2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Cat
					Target 2023	Realisasi Keuangan 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi 2024 (%)	Realisasi Keuangan 2024	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk										
2.12.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah Di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non-Pemerintah Di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	97,86	100 %	237.469.058	97,86	99,02	582.497.196	100%	100%	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rasio Anak Berakte Kelahiran, Rasio Pasangan Berakte Nikah, Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian**	**0,96 % 0,66 % 76 %**									
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	100%									
2.12.03.2.01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang Ditingkatkan	100%	96,53	100 %	2.833.628.302	96,53	98,06	3.247.091.168	100%	100%	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Cakupan Pengelolaan Informasi Adminduk**	**100%**									
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan**	**100%**									

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Akhir Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Hasil Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun			Realisasi Kinerja SKPD Tahun Berjalan (2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Cat
					Target 2023	Realisasi Keuangan 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi 2024 (%)	Realisasi Keuangan 2024	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyajian Database Kependudukan										
2.12.04.2.01.01	Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Diolah Dan Disajikan	100%	95,90	100 %	74.656.850	95,90	97,4	407.012.576	100%	100%	
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**									
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	99,09	100 %	1.016.753.130	99,09	99,19	1.751.037.072	100%	100%	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Presentase Penyampaian Data Profil Kependudukan**	**100%**									
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**	**100%**									
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain Yang Tersusun	100%	98,37	100 %	14.640.000	98,37	96,1	3.930.000	100%	100%	

Pencapaian Tahun Anggaran 2024

Untuk Tahun Anggaran 2024 (Perubahan) dengan usulan belanja langsung sebesar ***Rp. 20.706.684.234,00 (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).*** Pencapaian semua program dan kegiatan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100% terutama untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

a. Pendanaan Program Administrasi Kependudukan dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2024 masih dianggarkan dalam APBD, dimana pada tahun sebelumnya 2021 masih ada anggaran dari dana DAK
b. Pemerintah pusat belum memberikan sepenuhnya kewenangannya kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten / kota, sehingga masing – masing daerah kabupaten / kota masih melakukan koordinasi ke pusat yang seharusnya cukup ke pemerintah provinsi;
c. Dibatasinya permintaan blanko KTP- el (KTP Elektronik)
d. Belum sinkronnya pelaksanaan tugas antar lembaga
e. Masih kurangnya sarana transportasi untuk kegiatan lapangan (baik di wilayah darat maupun wilayah pesisir)
f. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Adminduk Pengelolaan Pelaporan SKPD

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam pelaksanaan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal

yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2021–2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pengakurasian data base kependudukan
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan untuk peningkatan pelayanan/ pengelolaan Adminduk dan pelaporan SKPD
4. Mempertahankan capaian pelayanan Adminduk di level 4
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan KPUD kota bontang untuk pemilu,serta perkaman e-Ktp bagi pemilih pemula

Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keakurasian dan kevalidasian data base kependudukan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memenuhi prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
3. Melaksanakan pengelolaan dan evaluasi E- KTP secara reguler

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan

Walikota Bontang Nomor 62 Tahun 2019. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional, struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang mengalami penyederhanaan birokrasi seperti tergambar di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA BONTANG

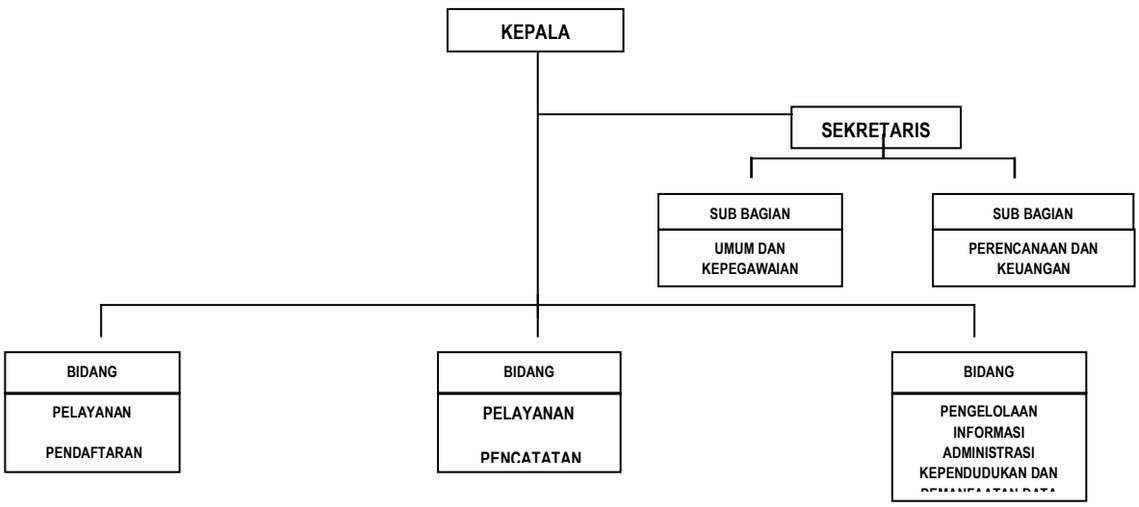

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang kondisi tiga tahun terakhir sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum menimbang bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan peraturaan perundang-undangan yang mengamanahkan penghapusan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu menghapus retribusi dimaksud antara lain :

1. KTP WNI;
2. KTP WNA;
3. SKTT;
4. Akta Perkawinan;
5. Akta Perkawinan yang terlambat pelaporan;
6. Akta Perceraian;
7. Akta Perceraian yang terlambat pelaporan;
8. Kutipan Kedua Akta Perkawinan;
9. Kutipan Kedua Akta Perceraian;
10. Surat Keterangan Pindah;
11. Akta Pengakuan Anak;
12. Akta Pengesahan Anak;
13. Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak;
14. Kutipan Kedua Akta Pengesahan Anak;
15. Akta Pengangkatan Anak;
16. Akta Pengangkatan Anak yang melebihi waktu pelaporan;
17. Surat Keterangan Perubahan Nama;
18. Salinan Akta Perkawinan;
19. Salinan Akta Perceraian;
20. Salinan Akta Kematian;
21. Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
22. Surat Keterangan Pelaporan dan Tanda Bukti pelaporan mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian , Kematian yang terjadi di luar negeri;

23. Surat Keterangan Kependudukan;

Berdasarkan kinerja pelayanan yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang berjalan sangat baik. Semua layanan yang diberikan pada tahun ketiga telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan masuk kategori level 4. Ini merupakan modal berharga dalam upaya melaksanakan kinerja pembangunan pada periode lima tahun mendatang.

Pelayanan yang baik seperti ditunjukkan di atas didukung oleh penyediaan dana yang relatif rasional. Peningkatan rasionalisasi dukungan pendanaan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pelayanan yang harus dilakukan.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang digunakan Standar Pelayanan. Adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat disampaikan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat.
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
A	**Pelayanan Dokumen Kependudukan**											
1	Akta Kelahiran	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Akta Kematian	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Akta Perkawinan	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Perceraian	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Pengakuan Anak	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Kartu Keluarga	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Kartu Tanda Penduduk	1 hari	1 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Surat Keterangan Pindah	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Surat Keterangan Pindah Datang	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Surat Keterangan ke Luar Negeri	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Surat Keterangan Datang ke Luar Negeri	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Surat Keterangan Kelahiran	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Surat Keterangan Lahir Mati	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat.
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
15	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Surat Keterangan Pembatan Perceraian	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Surat Keterangan Perceraian	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	Surat Keterangan Pengangkatan Anak	2 hari	2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu-isu penting yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dinas sebagai berikut :

Tabel 2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

No	ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kab/Kota
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Penerapan E-KTP Nasional	Penerapan E-KTP Nasional	Penerapan E-KTP Nasional Berbasis NIK
2.	Pelayanan pendaftaran	Koordinasi, Supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan	Cakupan registrasi

No	ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kab/Kota
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	penduduk dan pencatatan sipil	pelayanan administrasi kependudukan	penduduk dan pencatatan sipil
3.	Pembentukan database kependudukan	Pelaporan data hasil SIAK dan data registrasi	Ketersediaan pengembangan infrastruktur SIAK dan database kependudukan yang valid dan akurat
4.	Pelayanan Administrasi Kependudukan tidak dipungut biaya	Pelayanan Administrasi Kependudukan tidak dipungut biaya	Pelayanan Administrasi Kependudukan tidak dipungut biaya.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang adalah dengan membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**12.330.107.027**					**21.975.278.866**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bontang**	**Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**11.432.817.286**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kota Bontang**	**Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**17.650.124.482**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**50.646.882**	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Persentase Terlaksana-nya Kegiatan Perencanaan Penganggar-an, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**50.646.882**	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.646.882	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.646.882	
2.12.01.2.02	**Administrasi keuangan perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**8.840.583.944**	**Administrasi keuangan perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Persentase Terlaksana-nya egiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**10.521.620.201**	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	44 Orang/ Bulan	8.840.583.994	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	44 orang/ bulan	10.521.620.201	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**11.303.010**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Persentase Terlaksana-nya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**309.436.000**	
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan-nya	Kota Bontang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	125.380.000	
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 orang	10.303.010	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 orang	184.056.000	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**476.314.384**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Persentase Terlaksana-Nya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**2.278.864.764**	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	5.747.116	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	6.311.448	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	8 Paket	23.851.072	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	8 paket	832.483.572	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	36.460.697	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	35.136.570	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	94.992.880	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	194.755.174	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggara-an Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggara-an Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	315.262.619	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelengga-raan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.210.178.000	
2.12.01.2.07	**Pengadaan barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bontang**	**Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**5.038.107**	**Pengadaan barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bontang**	**Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**2.053.372.186**	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			penunjang urusan pemerintah daerah					**penunjang urusan pemerintah daerah**			
2.12.0001.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	500.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	1.642.362.000	
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	455.585	Pengadaan mebel	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	398.898.600	
2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	2 Unit	4.082.522	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	2 unit	12.111.586	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bontang**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.490.680.908**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bontang**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.941.000.000**	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	47.000.000	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	314.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	628.800.000	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.171.280.908	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.265.200.000	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bontang**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**558.250.051**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bontang**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.421.456.984**	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit	528.769.992	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan	19 Unit	1.061.719.984	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Dibayarkan Pajaknya			
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	19 Unit	500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	19 Unit	54.437.000	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	4 Unit	28.480.059	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	4 Unit	162.500.000	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	500.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	142.800.000	
2.12.02	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Kota Bontang**	**Rasio Penduduk Berktp Per Satuan Penduduk**	**0,99**	**153.060.400**	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Kota Bontang**	**Persentase kepemilikan identitas kependudukan**	**100%**	**1.331.141.782**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kota Bontang**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**100 %**	**153.060.400**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kota Bontang**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**100 %**	**1.331.141.782**	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan Dan Penertiban Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	142.959.400	Pencatatan, Penatausahaan Dan Penertiban Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	974.748.782	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	10.101.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	356.393.000	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kota Bontang	**Rasio Anak Berakte Kelahiran, Rasio Pasangan Berakte Nikah, Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian**	0,96 0,66 76%	**183.158.000**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kota Bontang	**Persentase cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil**	100%	**964.619.195**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kota Bontang	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	100%	**183.158.000**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kota Bontang	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	100%	**964.619.195**	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bontang	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang Ditingkatkan	6 Layanan	183.158.000	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bontang	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang Ditingkatkan	6 Layanan	964.619.195	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kota Bontang	**Cakupan Pengelolaan Informasi Adminduk**	100%	**555.071.341**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kota Bontang	**Cakupan Pengelolaan Informasi Adminduk**	100%	**1.103.120.872**	
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependuduk-An**	Kota Bontang	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan**	100%	**543.427.850**	**Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan**	Kota Bontang	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependuduk-an Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependuduk-an**	100%	**600.000.000**	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan Dan Penyajian Data Kependuduk-an	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Diolah Dan Disajikan	2 Dokumen	543.427.850	Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Diolah Dan Disajikan	2 Dokumen	600.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk-An**	Kota Bontang	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	100%	**11.643.491**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kota Bontang	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk-an**	100%	**482.896.647**	
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk-an	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	11.643.491	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk-an	4 Laporan	482.896.647	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Kota Bontang	**Presentase Penyampaian Data Profil Kependudukan**	100%	**6.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Kota Bontang	**Presentase Penyampai-an Data Profil Kependuduk-An**	100%	**20.224.225**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Kota Bontang**	**Persentase terlaksananya kegiatan penyusunan profil kependudukan**	**100%**	**6.000.000**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Kota Bontang**	**Persentase terlaksananya kegiatan penyusunan profil kependuduk-an**	**100%**	**20.224.225**	
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependuduk-an Serta Kebutuhan Yang Lain	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain Yang Tersusun	1 Dokumen	6.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembang-an Dan Proyeksi Kependuduk-an Serta Kebutuhan Yang Lain Yang Tersusun	1 Dokumen	20.224.225	

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang mengakomodir kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha meningkatkan pelayanan yang lebih baik, cepat dan tidak dipungut biaya. Pelayanan kependudukan dan pencatan sipil untuk rakyat tersebut diwujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, penerbitan Kartu Keluarga, serta semua pengurusan dokumen kependudukan terus ditingkatkan. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, pelayanan tarif gratis, dan kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi serta penerapan teknologi berbasis elektronik. Salah satu pelayanan yang dilakukan adalah adanya pelayanan jemput bola yaitu perekaman KTP untuk lansia, disabiltas dan anak usia 16 tahun KTP Pemula. Pelayanan juga sangat terbantu dengan adanya bantuan mesin Anjungan Disdukcapil Mandiri (ADM) dari pemerintah pusat yang saat ini ditempatkan di Kecamatan Bontang Selatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha selalu meningkatkan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu pelayanan prima.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tindak lanjut untuk menjabarkan visi dan misi dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan memecahkan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Rumusan tujuan dinyatakan dalam bentuk kualitatif, sedangkan sasaran lebih bersifat kuantitatif dan terukur. Sehingga, sasaran dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat keberhasilan atau capaian pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2021 – 2026 untuk program dan kegiatan di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur terhadap kebutuhan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

   Tujuan :

   a. Peningkatan kecepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
   b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

   Sasaran :

a. Penduduk Kota Bontang memiliki KTP dan KK (Kartu Keluarga)
b. Setiap anak yang lahir di Kota Bontang memiliki Akte Kelahiran
c. Setiap pasangan yang menikah di Kota Bontang memiliki Akte Nikah
d. Cakupan kepemilikan akta perceraian untuk pasangan yang telah bercerai
e. Cakupan buku pencatatan kematian (akta kematian)

2. Meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

   Tujuan :

   a. Pelayanan menggunakan teknologi SIAK.
   b. Peningkatan *skill* sumber daya manusia dalam pengelolaan SIAK

   Sasaran :

   Terwujudnya database kependudukan dengan program SIAK yang mutakhir dan akurat, sesuai parameter yang dibutuhkan.

3. Meningkatkan penyebarluasan informasi, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

   Tujuan :

   a. Menyelenggarakann sosialisasi tentang pentingnya data kependudukan kepada masyarakat.
   b. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam membangun data kependudukan

   Sasaran :

   Masyarakat aktif memproses kepemilikan seluruh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dibutuhkan.

4. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap instansi terkait, institusi sosial dan institusi keagamaan.

   Tujuan :

   a. Peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait
   b. Meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat melalui institusi sosial dan keagamaan

   Sasaran :

   Meningkatkan koordinasi antara beberapa instansi terkait untuk meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap data kependudukan

5. Melaksanakan dan mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan administrasi secara profesional dan transparan dengan didukung oleh sarana prasarana yang memadai

   Tujuan :

   a. Peningkatan prasarana dan sarana perkantoran tersedia
   b. Peningkatan kualitas pelaksanaan administrasi internal SKPD
   c. Pelaporan data dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat

   Sasaran :

   a. Tersedianya sarana dan prasarana yang optimal guna memperlancar kegiatan SKPD
   b. Kegiatan administrasi internal SKPD dapat berjalan lancar dan tertib
   c. Tupoksi Dinas Dukcapil dalam mendukung pembangunan daerah berjalan lancar

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sejalan dengan Visi Kota Bontang tahun 2021 – 2026 yaitu **”Terwujudnya Kota Bontang yang lebih HEBAT dan BERADAB”**, maka target capaian pembangunan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang relevan dengan tugas

dan fungsi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, berdasarkan matrik penjabaran visi misi Walikota dan Wakil Walikota adalah **Misi 1 yaitu: "Kota Bontang yang Harmoni Melalui Pemantapan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan"** Misi Kota Bontang tahun 2021-2026 tersebut mengandung 2 (dua) hal yang menjadi komitmen Pemerintah Kota Bontang kedepan yakni, Bontang Lebih Hebat dan Bontang Beradab. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Harmoni, Bersih, Adil, Amanah dan Bertanggung Jawab.
- Sasaran : Terciptanya penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.
- Indikator Kinerja Sasaran :
  - Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk
  - Rasio anak berakte kelahiran
  - Rasio pasangan berakte nikah
  - Cakupan kepemilikan akta perceraian
- Program:
  - Program penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
  - Program pendaftaran penduduk
  - Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- Penanggung jawab : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pendukung : Kecamatan, Kelurahan.

Program dan kegiatan administrasi kependudukan sesuai dengan Surat Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan Kepmen–PPN/Bappenas Nomor 06801/PP.04.01/D.21810612021 dan Surat Deputi Bidang Pembangunan Regional Kemen-PPN/Bappenas Nomor 06802/PP.04.01/D.4/B/06/2021 tanggal 8 Juni 2021 Hal Penyampaian Tanggapan DAK Non Fisik Dana

Pelayanan Adminduk serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/11932/dukcapil tanggal 7 september 2021 Hal Pendanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2022 maka Pendanaan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kependudukan Tahun Anggaran 2022 tidak lagi mendapat bantuan anggaran dari pusat (DAK).

Adapun Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Terdiri dari ***5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan***.

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain :

   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan :

1. Pelayanan Pencatatan Sipil
   - Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan peningkatan disiplin aparat dalam capaian kinerja program dan kegiatan, dengan kegiatan :

1. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
   - Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   - Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan peningkatan disiplin aparat dalam capaian kinerja program dan kegiatan, dengan kegiatan :

1. Penyusunan Profil Kependudukan
    - Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain.

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

dan Perkiraan Maju 2026

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**21.975.278.866**				**21.975.278.866**
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bontang**	**100%**	**17.650.124.482**	**APBD**		**100%**	**17.650.124.482**
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**100%**	**50.646.882**	**APBD**		**100%**	**50.646.882**
X.XX. 01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	1 Laporan	50.646.882	APBD		**100%**	50.646.882
2.12.01.2.02	**Administrasi keuangan perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**100%**	**10.521.620.201**	**APBD**		**100%**	**10.521.620.201**
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Bontang	43 Orang/ bulan	10.521.620.201	APBD		**100%**	10.521.620.201
2.12.01.2.05	**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**100%**	**309.436.000**	**APBD**		**100%**	**309.436.000**
2.12.01 .2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang	1 Paket	125.380.000	APBD		**100%**	125.380.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.01. 2.05.0009	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Kota Bontang	11 Orang	184.056.000	APBD		**100%**	184.056.000
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**100%**	**2.278.864.764**	**APBD**		**100%**	**2.278.864.764**
2.12.01. 2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	Kota Bontang	4 item	6.311.448	APBD		**100%**	6.311.448
2.12.01. 2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kota Bontang	9 Paket	832.483.572	APBD		**100%**	832.483.572
2.12.01. 2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Junlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kota Bontang	3 Paket	35.136.570	APBD		**100%**	35.136.570
2.12.01. 2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Kota Bontang	3 Paket	194.755.174	APBD		**100%**	194.755.174
2.12.01. 2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	43 Orang/ Kegiatan	1.210.178.000	APBD		**100%**	1.210.178.000
2.12.01.2.07	**Pengadaan barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Kota Bontang**	**100%**	**2.053.372.186**	APBD		**100%**	**2.053.372.186**
2.12.01. 2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Bontang	4 Unit	1.642.362.000	APBD		100%	1.642.362.000
2.12.01. 2.07.0005	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Bontang	4 unit	398.898.600	APBD		**100%**	398.898.600
2.12.01. 2.07.0011	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Kota Bontang	2 Unit	12.111.586	APBD		**100%**	12.111.586
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bontang**	**100%**	**1.941.000.000**	**APBD**		**100%**	**1.941.000.000**
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	12 laporan	47.000.000	APBD		100%	47.000.000
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Kota Bontang	12 Laporan	628.800.000	APBD		100%	628.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kota Bontang	12 laporan	1.265.200.000	APBD		100%	1.265.200.000
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Kota Bontang**	**100%**	**1.421.456.984**	APBD		**100%**	**1.421.456.984**
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya Yang Dipelihara	Kota Bontang	19 Unit	1.061.719.984	APBD		100%	1.061.719.984
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajak Dan Perijinannya	Kota Bontang	19 Unit	54.437.000	APBD		100%	54.437.000
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kota Bontang	9 unit	162.500.000	APBD		100%	162.500.000
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bontang	1 unit	142.800.000	APBD		100%	142.800.000
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rasio Penduduk Berktp Per Satuan Penduduk**	**Kota Bontang**	**0,99 Rasio**	**1.331.141.782**	**APBD**		**100%**	**1.331.141.782**
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kota Bontang**	**100%**	**1.331.141.782**	**APBD**		**100%**	**1.331.141.782**
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan Dan Penertiban Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumenn Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Bontang	12 Dokumen	974.748.782	APBD		100%	974.748.782
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Penduduk	Kota Bontang	12 Laporan	356.393.000	APBD		100%	356.393.000
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rasio Anak Berakte Kelahiran, Rasio Pasangan Berakte Nikah, Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian**	**Kota Bontang**	**0,96 0,66 76%**	**964.619.195**	**APBD**		**100%**	**964.619.195**
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kota Bontang**	**100%**	**964.619.195**	**APBD**		**100%**	**964.619.195**
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang Ditingkatkan	Kota Bontang	6 layanan	964.619.195	APBD		100%	964.619.195
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Cakupan Pengelolaan Informasi Adminduk**	**Kota Bontang**	**100%**	**1.103.120.872**	**APBD**		**100%**	**1.103.120.872**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan**	**Kota Bontang**	**100%**	**600.000.000**	**APBD**		**100%**	**600.000.000**
2.12.04. 2.01.0001	Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Diolah Dan Disajikan	Kota Bontang	4 Dokumen	600.000.000	APBD		100%	600.000.000
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kota Bontang**	**100%**	**482.896.647**	**APBD**		**100%**	**482.896.647**
2.12.04. 2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bontang	4 Laporan	482.896.647	APBD		100%	482.896.647
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Presentase penyampaian data profil kependudukan**	**Kota Bontang**	**100%**	**20.224.225**	**APBD**		**100%**	**20.224.225**
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**	**Kota Bontang**	**100%**	**20.224.225**	**APBD**		**100%**	**20.224.225**
2.12.05. 2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain	Kota Bontang	1 Dokumen	20.224.225	APBD		100%	20.224.225

XV. DINAS PERHUBUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa azas dan tujuannya adalah :

1) Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional;
2) Perencanaan Pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan;
3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Azas Umum Penyelenggaraan Negara;
4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :
   a) Mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan;
   b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar pusat dan daerah;
   c) Menjamin keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
   d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
   e) Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026, Dinas Perhubungan Kota Bontang telah menyusun dokumen Rencana Stategis (Renstra).

Dimana dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Dinas Perhubungan yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka tersusunnya program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Renstra tersebut dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan. Perubahan Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Dinas Perhubungan Kota Bontang untuk tahun berikutnya.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan sebelumnya dibuat dan telah diselaraskan dengan Renstra Dinas Perhubungan dan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2025. Dokumen tersebut selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan dari hasil forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Bontang Tahun 2025 dan menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025.

Dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja, Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan diselaraskan dengan RPJM Daerah atau RENSTRA Daerah sebagai bahan masukan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) untuk pedoman penyusunan RAPBD dan RAPBN Tahun Anggaran 2025 pada Musrenbang Tahun 2025.

Berdasarkan azas, tujuan dan tahapan perencanaan pembangunan tersebut diatas Dinas Perhubungan menyusun Perubahan Renja SKPD Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Perubahan Renja SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2025, di samping usulan bidang teknis Perhubungan berdasarkan dengan Tupoksi

Dinas Perhubungan (Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan). Renja ini merupakan realisasi dari usulan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang Kota Bontang.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perhubungan disusun atas dasar landasan dan sejumlah peraturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kebandaraan;
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
28. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan;
29. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Bontang;
30. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
31. Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bontang 2025 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan dalam menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Dan pada khususnya yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RKA, sebagai bahan tersusunnya DPA yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Perhubungan dalam rangka untuk terlaksananya RKPD Kota Bontang tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang.
2. Untuk merumuskan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bontang selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perhubungan Kota Bontang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Perhubungan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II **Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024,** Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Isu–isu Strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan,** Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan, yaitu : Telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan, serta Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, Bab ini terdiri rencana kerja Dinas Perhubungan tahun yang akan datang yaitu tahun 2025.

Bab V **Penutup,** Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Rencana Kerja, kaidah–kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan (Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Triwulan I)

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bontang adalah merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan Perhubungan. Adapun capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan di Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Bontang

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 76,23% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
2) Evaluasi Kinerja Kerja Perangkat Daerah 71,11% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 94,83% dengan realisasi fisik mencapai 100%;
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6,99% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;

5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 49,54% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran mencapai 19,62% dengan realisasi fisik 100%;
7) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya realisasi anggaran 98,17% dengan realisasi fisik 100%;
8) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 96,45% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 99,5% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 96,53% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
11) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 94,28% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
12) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69,34% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
13) Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 82,27% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
14) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 96,35% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
15) Pengadaan Mebel 98,77% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
16) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 90,58% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik mencapai 100%;

17) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 69,64% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
18) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 98,11% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
19) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 98,43% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik mencapai 100%;
20) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 84,2% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
21) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 98,32% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik mencapai 100%.

b. Sub Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 99,57% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
2) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 88,83% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
3) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 97,01% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 82,05% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mencapai 94,24% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik mencapai 100%.

6) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 99,26% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
7) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4,31% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
8) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 0%;
9) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 99,24% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
10) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor 99,73% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
11) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 55,74% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
12) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 94,89% dari anggaran yang dialokasikan dengan realiasasi fisk 100%;
13) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang/dan atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 94,14% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
14) Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 0%;

c. Sub Kegiatan di Bidang Prasarana dan Keselamatan

1) Koordinasi dan Sikronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 82,61% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
2) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 97,96% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
3) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 58,24% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
4) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal 99,21% dari anggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%;
5) Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal 100% dari aggaran yang dialokasikan dengan realisasi fisik 100%.

Anggaran Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Bontang sebesar **Rp.49.800.401.218; (Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Juta Empat Ratus Satu Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah)** dengan 3 (Tiga) program,15 (Lima Belas) kegiatan dan 40 (Empat Puluh) Sub Kegiatan dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.46.262.330.577; (Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92,90%.

Untuk Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025,
Dinas Perhubungan Kota Bontang akan melaksanakan 3 (Tiga) program 14 (Empat Belas) kegiatan dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar *Rp.62.768.855.644;*.
Diproyeksikan bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 90% terutama untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan sebagai berikut :

g. Belum maksimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga jadwal dan semua tahapan-tahapannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
h. Belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Kementerian Perhubungan dalam urusan Perhubungan yang menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi urusan Perhubungan;
i. Belum adanya fasilitas ATCS (Automatic Traffic Control System)
j. Perlunya peningkatan sumber daya manusia di bidang Perhubungan melalui diklat sertifikasi Kementrian Perhubungan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan urusan wajib Perhubungan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut menjadi modal penting Dinas Perhubungan Kota Bontang dalam menghadapi berbagai macam tugas-tugas berat dan perlu dipertahankan ke depan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bontang Periode Tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perhubungan Kota Bontang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan arah kebijakan :
   a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional untuk menunjang pelaksanaan tupoksi Perhubungan dengan arah kebijakan :
   a. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana operasional dalam mendukung pelayanan Bidang Perhubungan.
3. Strategi Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan arah kebijakan :
   a. Mengajukan bantuan dana melalui Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur.
4. Meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan arah kebijakan :
   a. Mengadakan serta memelihara fasilitas lalu lintas jalan.
5. Meningkatkan Pelayanan Angkutan untuk menunjang keselamatan transportasi dengan arah kebijakan :
   a. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang.
   b. Melaksanakan pembinaan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan.
   c. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
   d. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

6. Meningkatkan disiplin aparatur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
   a. Peningkatan disiplin aparatur.
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja program dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
   a. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bontang dapat dilihat dari hasil evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024. Adapun hasil evaluasi Indikator Kinerka Utama (IKU) tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1.	Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas	Tingkat kecelakaan lalu lintas yang menurun	Mengukur efektivitas sarana dan prasarana perhubungan	$f(x) = \frac{\Sigma \text{ Kecelakaan Tahun n}}{\Sigma \text{ Kecelakaan Tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Data Sarana Prasarana Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.	Meningkatnya kualitas transportasi yang memenuhi standar keselamatan	Persentase sarana prasarana angkutan yang memenuhi standar keselamatan	Mengukur efektivitas sarana dan prasarana perhubungan	$f(x) = \frac{\Sigma \text{ Sarana \& Prasarana angkutan yang memenuhi Persyaratan}}{\Sigma \text{ Sarana \& Prasarana angkutan yang tersedia}} \times 100\%$	Data Sarana Angkutan di Kota Bontang	Bidang Prasarana dan Keselamatan

3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Baik di bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap (IKM)	Mengukur Kinerja Pelayanan dibidang Perhubungan	Hasil Perhitungan Bagian Organisasi Setda Kota Bontang	Hasil Penilaian SKM	Bidang Sekretariat

3 (tiga) Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Bontang tahun 2024 telah memenuhi target, adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum sesuai target adalah indikator kinerja tentang Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi. Belum tercapainya target pada tahun 2024 dikarenakan :

1. Belum optimalnya fasilitas gedung pengujian kendaraan bermotor.

Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bontang dalam meningkatkan rasio pengurusan ijin trayek yaitu :

1. Meningkatkan fasilitas pelayanan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor beserta peralatan penunjang;
2. Program Pengujian Kendaraan Bermotor Gratis bagi kendaraan angkutan.

Adapun Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Rasio Kendaraan Bermotor Laik Jalan yang menjadi prioritas Dinas Perhubungan Kota Bontang adalah :

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Seiring dan sejalan dengan otonomi daerah yang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota begitu cepat ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk akibat migrasi begitu tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan membawa dampak perubahan yang begitu cepat terhadap gaya hidup dan pola hidup masyarakat. Hal ini jelas membawa dampak terhadap pola pergerakan baik orang maupun barang dan berkomunikasi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Bontang perlu terus menerus meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana Perhubungan. Dengan meningkatnya sarana dan prasarana Perhubungan diharapkan dapat melaksanakan misi yang diemban yaitu menciptakan situasi dan kondisi yang tertib, lancar, aman dan nyaman serta terkendali bagi seluruh masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan dan kegiatan perhubungan.

Untuk itu maka perlu di imbangi dengan manajemen dan penanganan transportasi yang signifikan diantaranya :

1. *Bidang Lalu Lintas dan Angkutan*

   Untuk memperlancar arus lalu lintas dan menciptakan kenyamanan serta keselamatan pengguna jasa perhubungan darat dan transportasi darat baik dalam kota maupun luar kota dan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang perhubungan darat sehingga dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat di dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang, maka ditetapkanlah skenario sektoral pembangunan Perhubungan sebagai berikut :

   a. Melengkapi fasilitas lalu lintas seperti Automatic Traffic Control System (ATCS), lampu penerangan jalan umum,

traffic light, warning light, marka jalan, zebra cross, shelter/halte dan rambu lalu lintas seperti rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, rambu petunjuk dan RPPJ;

b. Melakukan perawatan fasilitas lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas;
c. Meningkatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
d. Melakukan pembinaan dan pembenahan terhadap sistem operasi angkutan kota baik yang plat kuning maupun plat hitam;
e. Melakukan pengaturan kembali terhadap rute trayek dalam Kota;
f. Melakukan penataan kembali sistem parkir yang lebih terpadu dan terkontrol;
g. Melengkapi sistem kontrol lalu lintas baik yang berbentuk informasi (rambu, tanda-tanda, marka, sinyal) maupun kelengkapan lain seperti guard raill, patok pengaman (deliniator), pembatas dimensi kendaraan (lebar dan tinggi) dan lain-lain;
h. Melengkapi fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, fasilitas penyeberangan misalnya zebra cross, jembatan penyeberangan dan sinyal khusus bagi pejalan kaki yang diatur dengan lampu lalu lintas (traffic light);
i. Pengadaan Kendaraan Operasional Perawatan Fasilitas LLAJ;
j. Melengkapi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
k. Mengikutsertakan diklat teknis staf Perhubungan di bidang transportasi;
l. Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Se - Kalimantan Timur.

2. *Bidang Prasarana dan Keselamatan*

Untuk ketertiban dan kelancaran serta untuk menunjang proses perijinan maka ditetapkalah skenario dalam sektor pembangunan perhubungan sebagai berikut :

a. Sosialisasi/Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan;
b. Melaksanakan monitoring dan pengawasan penataan parkir;
c. Melaksanakan pekan keselamatan transportasi darat;
d. Melaksanakan monitoring, analisis dan evaluasi angkutan lebaran;
e. Mengikutsertakan diklat teknis staf Perhubungan di bidang Transportasi.

2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Kota Bontang akan mengkaji dan menambah usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bontang, bukan hanya sebagai perwujudan nyata tanggung jawab dan peran serta pemerintah dalam urusan wajibnya. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Maka tugas Dinas Perhubungan bertambah, yaitu perumusan kebijakan teknis lingkup bidang Perhubungan Darat untuk keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pembentukan dan penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan. Selain itu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ juga mengamanatkan Pemerintah (Dinas Perhubungan) untuk

melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor dan meningkatkan pengawasan kendaraan Over Dimensi & Over Load (ODOL). Selain itu Dinas Perhubungan juga melaksanakan aspirasi masyarakat yang terangkum pada Musrenbang tingkat Kota, menjadi acuan selama usulan tersebut sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Bontang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Perhubungan sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air dan antar negara, oleh karena itu

kebijakan pembangunan Perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional, maka kebijakan pembangunan perhubungan ke depan selain berpengaruh terhadap prospek perekonomian nasional dipengaruhi pula oleh kondisi eksternal dan internal, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai serta kebijakan strategis yang ditempuh selama ini.

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan kesinambungan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 disusun atas dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 yang selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 sampai tahun 2024.

Secara umum Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor Perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan Perhubungan, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan.

Sasaran pembangunan transportasi nasional adalah :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
4. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
5. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
6. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance;*
7. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
8. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sector transportasi;
9. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance;*
10. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antar moda dan multimoda;
11. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
12. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
13. Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan system manajemen transportasi perkotaan.

Terkait dengan agenda pembangunan transportasi nasional, kebijakan pembangunan Kota Bontang pada tahun 2025 yang menekankan Kota Bontang yang Berkelanjutan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

Sesuai dengan misi Kota Bontang tersebut Dinas Perhubungan melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2025, ***Misi pertama yaitu Menyediakan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Misi Kedua yaitu Berkurangnya polusi udara dari kendaraan bermotor.***

Untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai sesuai dengan perkembangan kota, dengan tujuan akhir yaitu ***"Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi".***

Dalam upaya mencapai sasarannya yaitu meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi Perhubungan tersebut, kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah "Membangun dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan dengan memperhatikan perkembangan wilayah dan tata ruang".

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program-program pembangunan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Program Pengelolaan Pelayaran.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Bontang

A. Tujuan Perubahan Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bontang Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan perencanaan program dan kegiatan tahun 2025, maka Renja ini dengan maksud sebagai berikut :

- Sebagai perumusan kebijakan teknis lingkup Bidang Perhubungan dan pengkoordinasian, pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja Dinas dan hubungan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak lain.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan tahun 2025, sama dengan tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kota Bontang 2021–2026, yaitu berpedoman pada faktor-faktor kunci keberhasilan serta melihat keterkaitan dan implementasi

dengan misi yang ada, maka Dinas Perhubungan Kota Bontang menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan SDM aparatur dan tenaga fungsional;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana Perhubungan;
3. Menciptakan usaha yang kondusif di bidang Perhubungan;
4. Meningkatnya standar pelayanan minimal bagi pengguna jasa dan pengusaha jasa di bidang Perhubungan;
5. Meningkatnya manajemen Perhubungan.

B. Sasaran Perubahan Renja

Dinas Perhubungan Kota Bontang dalam penyusunan renja ini mempunyai sasaran :

1. Tercapainya pelayanan kebutuhan masyarakat barang dan jasa yang efisien dan berkualitas.
2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang di sektor Perhubungan.
3. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi tugas dan keahliannya.
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam Renja ini, adalah demi pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan OPD. Selain itu

faktor penunjang lainnya pencapaian target renstra OPD dan wujud nyata pengimplementasikan tupoksi OPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2021-2026 merupakan penjabaran dan implementasi dari program Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang 2021-2024. Untuk itu dalam rangka mewujudkan visi-misi, Dinas Perhubungan Kota Bontang menetapkan tujuan, sasaran dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada dalam visi-misi Kota Bontang terutama pada Misi kedua yaitu "**Kota Bontang yang berkelanjutan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur serta pemantapan ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan**". Serta Tujuan 2 RPJMD Kota Bontang 2021-2026.

Selanjutnya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan itu sendiri harus merupakan penjabaran secara spesifik dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan Pemerintah Kota Bontang yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026

Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan perkotaan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan yang ditandai :

1. ***Tersedianya sarana gedung pengujian kendaraan bermotor;***
2. ***Berkurangnya tingkat kecelakaan lalu lintas;***
3. ***Tersedianya ATMS;***
4. ***Tersedianya fasilitas lalu lintas.***

Pada dasarnya penyusunan program Dinas Perhubungan berpedoman pada Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Adapun program-program dan kegiatan

pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan pada Tahun 2025 dengan rencana anggaran sebesar ***Rp. 49.800.401.218; (Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Juta Empat Ratus Satu Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah)*** yang terdiri dari :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel,dengan kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
      - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SPD;
      - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
      - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
      - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   - Pengadaan Mebel.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan;
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. *Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)*
   Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya dukung insfrastruktur jalan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

   a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
      - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
      - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
      - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
      - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

b. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor;
   - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
   - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
   - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota;
   - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota;
   - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

e. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
   - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota;

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. *Program Pengelolaan Pelayaran*

   Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen keselamatan, pelayanan dan ketertiban angkutan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

   a. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
      - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;

XVI. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I.
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap PD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan renja PD dibahas pada forum PD yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida), dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, penyelarasan program

dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Renja PD ditetapkan melalui Keputusan Walikota yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kota Bontang. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

I.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA–PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 5)
15. Peraturan Walikota Bontang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang.

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan misi dan tujuan dalam rangka perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan 2, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang melaksanakan 3 urusan, 5 program, 10 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan nilai pagu Rp 58.112.395.369 dan realisasi anggaran Rp 8.563.192.375 sebesar 14,74%, adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 171.721.429,00 (95,13%)

2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp5.952.805.590,00 (51,11%)

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 11.691.416,00 (27,22%)

c) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran memiliki nilai realisasi sebesar Rp 38.050.150,00 (59,77%)

3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (0,00%).

4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (0,00%)
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 16.317.000,00 (0,85%)
c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (0,00 %)
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (0,00%)
e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 544.000,00 (13,95%)
f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 120.625.748,00 (35,93%)

5. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (0,00%)

6. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 3.280.000,00 (22,21%)
b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber DAya Air dan Listrik memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 63.298.282,00 (20,35%)
c) Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 610.974.000,00 (37,06%)

7. ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 20.570.000,00 (55,83%)

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 131.488.928,00 (58,48%)

c) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya memiliki nilai realisasi anggaran Rp. 0,00 (0,00)

d) Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (0,00%)

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. ***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***

a) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 2.900.000,00 (0,29%)

b) Relasi Media memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (0,00%)

c) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 104.382.000,00 (18,24%)

d) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (48,50%)

e) Pelayanan Informasi Publik memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 60.831.855,00 (36,07%)

f) Pengelolaan Media Komunikasi Publik memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 50.170.305, 00 (22,38%)

g) Penyusunan Konten memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (0,00%)

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. *Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

a) Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (79,75%)

b) Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 86.885.898,00 (11,63%)

c) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (0,00%)

d) Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional memiliki nilai realisasi anggaran Rp 61.410.664,00 (3,44%)

e) Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi memiliki nilai realisasi anggaran Rp 0,00 (0,00%)

f) Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 198.000.000,00 (44,49%).

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. *Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota*

a) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia memilki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (0,00%)

b) Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 5.098.000,00 (18,75%)

c) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 15.509.000,00 (62,78%)

d) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 (0,00%)

e) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 5.733.000,00 (22,81%)

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 67.445.308,00 (20,38%)

b) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 110.565.307,00 (50,33%).

Tabel II-1

Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Nama PD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.005.347.758**	**7.141.366.543**	**41,99**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**180.508.080**	**171.721.429**	**95,13**	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180.508.080	171.721.429	95,13	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.647.019.165**	**6.002.547.156**	**51,07**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	11.647.019.165	5.952.805.590	51,11	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.957.416	11.691.416	27,22	
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	63.661.416	38.050.150	59,77	
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17.500.000**	**0**	**0,00**	
2.16.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
2.16.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17.500.000	0	0,00	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
2.02.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.519.087.291**	**137.486.748**	**5,46**	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7.010.628	0	0,00	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1.924.838.808	16.317.000	0,85	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	166.486.626	0	0,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Abrang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	81.113.229	0	0,00	
2.16.01.2.02.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	3.900.000	544.000	13,95	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.738.000	120.625.748	35,93	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.974.623.600**	**677.552.282**	**34,31**	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.770.000	3.280.000	22,21	
2.16.01.2.08.0002	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		311.110.000	63.298.282	20,35	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor yang diesdiakan	1.648.743.600	610.974.000	37,06	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diesdiakan**	**222.824.000**	**0**	**0,00**	
2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diesdiakan	222.824.000	0	0,00	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**337.166.790**	**152.058.928**	**45,10**	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	36.845.665	20.570.000	55,83	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	224.836.325	131.488.928	58,48	
2.16.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/ direhabilitasi	37.520.000	0	0,00	
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	37.520.000	0	0,00	
2.16.02	**PROGRAM KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK**	**Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**5.728.055.518**	**218.284.160**	**3,81**	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**5.728.055.518**	**218.284.160**	**3,81**	
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	992.012.535	2.900.000	0,29	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.508.484.971	0	0,00	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Infromasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan Informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	572.398.833	104.382.000	18,24	
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Infromasi kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang berkembang dan usulan agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	45.885.725	0	0,00	
2.16.02.01.0017	Pelayanan Infromasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang siselesaikan sesuai peraturan perundang undangan	168.653.000	60.831.855	36,07	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
2.16.02.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis	224.187.000	50.170.305	22,38	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	216.433.454	0	0,00	
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi** **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**32.705.615.581**	**346.296.562**	**1,06**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-Government Dilingkup pemerintah daerah Kabupaten/ Kota**	**Terkelolanya E-Government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**32.705.615.581**	**346.296.562**		
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan peta Rencana SPBE pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang di bangun/ atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	1.811.472.500	0	0,00	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi Penyelenggaran SPBE di Lingkungan pemrintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	746.786.173	86.885.898	11,63	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/ Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/ Kota	9.521.089.770	0	0,00	
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1.784.785.038	61.410.664	3,44	
2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Infromasi	Jumlah data dan Informasi yang dipetakan Berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	1.784.785.038	61.410.664	3,44	
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	18.782.625.500	198.000.000	1,05	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun**	**217.912.198**	**83.510.688**	**38,32**	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
		Perencanaan Pembangunan Daerah				
2.20.02.02.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/ Kota**	**217.912.198**	**83.510.688**	**38,32**	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelatihan di Bidang Statistik	126.313.639	0	0,00	
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan penyusunan kebijakan	27.192.000	5.098.000	18,75	
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	24.705.000	15.509.000	62.78	
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah di Lengkapi Metadata	193.858.535	0	0,00	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sketoral	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina Data Statistik	25.130.000	5.733.000	0,00	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFOPRMASI**	**Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah**	**2.276.177.338**	**830.905.110**	**36,50**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**2.276.177.338**	**830.905.110**	**36,50**	
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Peneglolaan Sumber Daya Keamanan Informasi pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1.175.395.099	479.131.810	40,76	
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1.100.782.239	351.773.300	31,96	
	TOTAL		**58.112.395.369**	**8.291.896.597**	**14,26**	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang memuat pergeseran antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2025 yang di danai oleh APBD Perubahan Kota Bontang Tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan ini mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui Belanja Operasi dan Belanja Modal. Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan rancangan perubahan renja tahun 2025 antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Baperida Kota Bontang, disetujui 3 Urusan 5 program, 11 kegiatan dan 38 sub kegiatan serta mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 14.633.2333.691,00 dari Rp 43.479.161.676 ,00 pada Renja Perubahan Tahun 2024 menjadi sebesar Rp 39.664.845.878,00. Rincian program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III-1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)		Bertambah/ Berkurang	Ket.
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**43.479.161.676**	**58.112.395.369**	**14.633.233.691**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**41.151.322.958**	**55.439.018.857**	**14.287.895.899**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**14.195.154.324**	**17.005.347.758**	**1.628.282.686**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**104.755.192**	**180.508.080**	**75.752.888**	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)		Bertambah/ Berkurang	Ket.
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.755.192	180.508.080	75.752.888	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.455.355.181**	**11.753.637.997**	**296.282.816**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	11.416.645.461	11.647.019.185	230.373.704	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.197.360	42.957.416	22.760.058	
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18.512.360	63.681.416	45.149.058	
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**35.000.000**	**17.500.000**	**(17.500.000)**	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)		Bertambah/ Berkurang	Ket.
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35.000.000	17.500.000	(17.500.000)	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**946.502.121**	**2.519.087.291**	**1.572.686.170**	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7.010.628	7.010.628	0	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	198.136.303	1.924.639.808	1.728.702.505	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	171.909.550	166.485.825	(5.422.924)	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Abrang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Abrang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	50.497.640	81.113.229	30.615.589	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)		Bertambah/ Berkurang	Ket.
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunndang undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunndang undangan yang disediakan	3.900.000	3.900.000	0	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	515.048.000	335.738.000	(179.310.000)	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan yang disediakan**	**Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan yang disediakan**	**159.508.000**	**222.824.000**	**63.316.000**	
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disedikan		129.508.000	222.824.000	63.316.000	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.115.219.040**	**1.974.623.600**	**859.404.560**	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	14.770.000	9.770.000	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)		Bertambah/ Berkurang	Ket.
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor yang diesdiakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor yang diesdiakan	1.109.719.040	1.648.743.600	310.610.000	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Komponen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Komponen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	500.000	311.110.000	539.024.560	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**378.814.790**	**337.166.790**	**(41.648.000)**	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	33.856.000	36.845.565	2.989.665	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	258.273.990	224.836.325	(33.437.665)	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)		Bertambah/ Berkurang	Ket.
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rahabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Liannya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Liannya yang dipelihara/ direhabilitasi	37.964.800	37.964.800	0	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	48.720.000	37.520.000	(11.200.000)	
2.16.02	**PROGRAM KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK**	**Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**6.319.653.613**	**5.728.055.518**	**(591.598.095)**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**6.319.653.613**	**5.726.055.518**	**(5913598.095)**	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi	Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi	299.969.000	3.508.484.971	3.208.515.971	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)		Bertambah/ Berkurang	Ket.
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
		Kriteria berikut: 1. Terverifikasi Dewan pers 2. Terdaftar, 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media	Kriteria berikut: 1. Terverifikasi Dewan pers 2. Terdaftar, 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media				
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi MAsyarakat	Jumlah Komunikasi Informasi yang aktif mendiseminasikan Informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Jumlah Komunikasi Informasi yang aktif mendiseminasikan Informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	244.996.887	572.398.833	327.401.946	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan Perundangan	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan Perundangan	144.980.480	168.663.000	23.572.520	
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Infromasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi terhadap Isu Publik yang berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi Komunikasi terhadap Isu Publik yang berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	49.972.265	45.885.725	(4.093.561)	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan	5.324.972.000	224.187.000	(5.100.785.000)	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)		Bertambah/ Berkurang	Ket.
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
		media berbayar sesuai kriteria/ juknis	media berbayar sesuai kriteria/ juknis				
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Jumlah Konten Informasi Publik	224.993.960	216.433.454	(8.560.505)	
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti Bimtek/ pelatihan	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti Bimtek/ pelatihan	29.762.000	992.012.535	962.250.535	
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi** **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi** **Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**20.636.515.021**	**32.705.615.581**	**12.069.100.560**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-Government Dilingkup pemerintah daerah Kabupaten/ Kota**	**Terkelolanya E-Government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terkelolanya E-Government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**20.636.516.021**	**32.705.615.581**	**12.069.100.560**	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)		Bertambah/ Berkurang	Ket.
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah di tempatkan di pusat data nasional		2.088.554.752	1.784.785.038	(303.769.714)	
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	2.312.890.658	746.788.173	(1.566.104.485)	
2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Infromasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Data dan Infromasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	109.919.200	58.855.600	(51.052.600)	
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/ atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/ atau di kembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemrintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/ atau di kembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemrintah daerah	1.199.178.600	1.811.472.500	612.293.900	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/ kota yang terhubung dengan jaringan Intra	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/ kota yang terhubung dengan jaringan Intra	3.819.667.936	9.521.089.770	5.701.421.834	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)		Bertambah/ Berkurang	Ket.
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
		Pemerintah Daerah kab/ Kota	Pemerintah Daerah kab/ Kota				
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk perangkat Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	11.106.303.875	18.782.625.500	7.676.321.625	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah**	**649.519.894**	**397.198.174**	**(243.320.720)**	
2.20.02.02.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terselenggaranya Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/ Kota**	**640.519.894**	**397.199.174**	**(243.320.720)**	
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelatihan di Bidang Statistik	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelatihan di Bidang Statistik	117.282.000	193.858.535	76.576.535	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)		Bertambah/ Berkurang	Ket.
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap sistem statistik nasional	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan penyusunan kebijakan	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan penyusunan kebijakan	27.203.584	27.192.000	(11.584)	
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas data statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	131.034.035	24.705.000	(106.329.035)	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah di Lengkapi Metadata	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah di Lengkapi Metadata	283.840.035	126.313.839	(157.526.396)	
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina Data Statistik	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina Data Statistik	61.160.240	25.130.000	(56.030.240)	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFOPRMASI**	**Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah**	**Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah**	**1.687.318.825**	**2.276.177.338**	**588.856.512**	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)		Bertambah/ Berkurang	Ket.
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**1.687.318.825**	**2.276.177.338**	**588.856.512**	
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Peneglolaan Sumber Daya Keamanan Informasi pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Peneglolaan Sumber Daya Keamanan Informasi pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	496.562.309	1.175.395.099	679.832.790	
.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1.191.756.517	1.191.739.517	(90.974.278)	

XVII. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan telah memasuki triwulan kedua tahun 2025 realisasi hasil perencanaan baik fisik maupun keuangan sudah dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan sehubungan dengan pencapaian target dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bontang.

Perubahan dan penyesuaian terhadap perencanaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan masing masing program dan kegiatan hingga akhir tahun tidak mengalami kendala yang belum diperkirakan saat penyusunan anggaran. Disamping itu perubahan RKPD menjadi acuan dan pedoman perubahan renja pada dasarnya subordinary kebijakan pemerintah sehingga perubahan dan penyesuaian perencanaan juga dapat atau perlu dilakukan jika terdapat kebijakan pemerintah yang diterbitkan setelah renja selesai dibuat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 perubahan renja ini adalah perubahan terhadap RKPD yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan. Penyusunan perubahan renja tahun 2025 juga diperlukan untuk menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran renstra dan RPJMD, khususnya terhadap sasaran dan indikator yang harus dicapai pada tahun 2025. Disamping itu perubahan Renja ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bontang.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2024

tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bontang

1. Maksud

Maksud dari perubahan Rencana Kerja 2025 adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanaan 2025 dengan penyusunan penganggaran tahun 2025 dan menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran Renstra, serta dalam rangka menjamin sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini
b. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan
c. Menyediakan acuan penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan tahun Anggaran 2025.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam hal pelaksanaan Renja tahun 2025, hasil evaluasi hingga triwulan II merupakan salah satu input penting yang menjadi dasar dan pertimbangan perlunya penyesuaian atau perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi terhadap hasil rencana kerja juga bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian antara capaian kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025

Pelaksanaan Program/ kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan hingga semester I tahun 2025 terdiri dari 16 program, 25 kegiatan dan 54 sub kegiatan dengan realisasi sebesar **Rp.19.198.373.364,00** atau 38, 28 % dan realisasi fisik sebesar 55,50% dengan total pagu belanja **Rp.50.156.347.384,00** sisa Anggaran **Rp.30.957.974.020,00.**

Berdasarkan Realisasi pelaksanaan program/ kegiatan, terlihat bahwa realisasi fisik lebih besar dibandingkan dengan realisasi keuangan. Hal tersebut disebabkan oleh administrasi kegiatan berupa SPJ terlambat atau belum lengkap sehingga belum bisa diinput ke dalam sistem esmart menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran dan pencairan anggaran.

Secara ringkas evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 berdasarkan pada tabel 2.1 berikut :

tabel 2.1
Evaluasi Hasil Rencana Kerja DKUMPP Tahun 2025 Semester 1

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO															
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam**	19,74	%	4,5	4,5	4,945	4,945	4,945		4,945		Terdapat 46 koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam	"1. aturan permenkop no 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam koperasi yaitu pemenuhan persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam yang masih berat dipenuhi oleh koperasi misalnya persayaratan Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi pengurus koperasi, modal minimal 500 juta surat dari pengadilan niaga	1. melaksanakan upaya pendampingan serta bimbingan terkait kendala yang dihadapi dan memperbanyak ruang diskusi	1. telah dilakukan upaya penampingan serta bimbingan terkait kendala yang dihadapi dan memperbanyak ruang diskusi dengan pihak koperasi. 2. telah mendorong koperasi untuk melakukan rapat anggota

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%	25	25	25	25	25		25		Sudah ada upaya koordinasi terkait dengan rencana beberapa koperasi untuk mengajukan SIUSP	serta surat dari OJK 2. Terdapat sebagian koperasi yang belum merespon upaya yang telah dilakukan DKUKMP baik melalui himbauan, peringatan dan penyampaian informasi secara berkala. "	dengan pihak koperasi. 2. mendorong koperasi untuk melakukan rapat anggota untuk pemenuhan modal awal yang sudah ditetapkan berdsarkan aturan 3. menghimbau koperasi untuk mengurus ijin usaha simpan pinjam	untuk pemenuhan modal awal yang sudah ditetapkan berdsarkan aturan
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	-	-	-	-	-		1					

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase koperasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian**	**8,97**	**%**	0,97	0,97	2,99	37,58	2,99		2,02		terdapat penambahan sebanyak 15 koperasi aktif di triwulan ke 2 yang merupakan koperasi merah putih	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang berbentuk kegiatan pertemuan masih terkendala oleh proses efisiensi anggaran	1. menghimbau koperasi agar segera melaksanakan RAT 2. merilis program Teras (temu rutin koperasi) yg merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap bulan melalui media daring dengan tema dan narasu	telah rutin menghimbau koperasi agar segera melaksanakan RAT
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	100	%	10	10	30	30	30		30		Pengawasan dapat dilakukan secara daring maupun luring. pengawasan secara daring dilakukan melalui zoom meeting yang dapat lebih fleksibel	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang berbentuk kegiatan pertemuan masih terkendala oleh proses efisiensi anggaran		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30	Unit Usaha	-	5	10	10	10		10		Pengawasan dapat dilakukan secara daring maupun luring. pengawasan secara daring dilakukan melalui zoom meeting yang dapat lebih fleksibel	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang berbentuk kegiatan pertemuan masih terkendala oleh proses efisiensi anggaran	mber yang berbeda sesuai dengan kebutuhan koperasi	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya**	**61,79**	**%**	1,79	-	20	22	20		20		Pada Triwulan 2 tercatat sebanyak 32 koperasi telah melaksanakan RAT	Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi dilaksanakan berdasarkan angka pelaksanaan Rapat Aggota Tahunan yang dilaksanakan oleh Koperasi	1. menghimbau koperasi agar segera melaksanakan RAT 2. melanjutkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan koperasi bagi koperasi yang telah melaksa	telah rutin menghimbau koperasi agar segera melaksanakan RAT
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dilakukan penilaian	30	%	5	-	5	10	10		10		Terdapat 83 koperasi aktif dan 18 koperasi tidak aktif			

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30	Unit Usaha	-	-	10	15	10		10		pada triwulan ke 2, jumlah koperasi yang sudah melaksanakan RAT meningkat		nakan RAT	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase kapasitas SDM koperasi**	**19,23**	**%**	4,23	-	5	5	5		5		terbentuk 15 koperasi baru yang wajib diberikan fasilitasi peningkatan pemahaman koperasi	Pelaksanaan peningkatan pemahaman perkoperasian yang berbentuk kegiatan pertemuan masih terkendala oleh proses efisiensi anggaran	akan mengajukan penambahan anggaran di perubahan 2025	DPA pergesaran 2025 telah ditindaklanjuti
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentasi pengurus dan pengawas koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	76,92	%	16,92	-	20	20	20		20					
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100	Orang	-	-	40	40	40		20					

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	**52,01**	**%**	13	-	13	3,23	13		13,01		fokus pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dipeningkatan SDM danbantuan fasilitasi permodalan bagi umkm	Beberapa rekening belanja perlu disesuaikan dengan kegiatan	Akan dilakukan penyesuaian beberapa belanja pada anggaran perubahan	DPA pergesaran 2025 telah ditindaklanjuti dan akan kembali disesuaikan di Perubahan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang bermitra dengan pasar rental modern	**1,72**	**%**	0,43	-	0,43	0,67	0,43		0,43		adanya Permendag Nomor 18 tahun 2022 tentang pedoman pengembangan, penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang memberikan ruang promosi untuk UMKM sebesar 30% dari luas swalayan	Susahnya Pelaku UMKM untuk memenuhi syarat kemitraan dengan swalayan	Memfasilitasi pemenuhan persyaratan untuk kemitraan pelaku UMKM dengan swalayan	Memfasilitasi pemenuhan persyaratan untuk kemitraan pelaku UMKM dengan swalayan belum terlaksanaakan dilakukan di TW berikutnya

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2,19	%	0,54	-	0,55	0,67	0,55		0,55		fokus pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dipeningkatan SDM	Beberapa rekening belanja perlu disesuaikan dengan kegiatan	Akan dilakukan penyesuaian beberapa belanja pada anggaran perubahan	DPA pergesaran 2025 telah ditindaklanjuti dan akan kembali disesuaikan di Perubahan
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	140	unit usaha	35	-	35	151	35		35		adanya ukm center membantu memfasilitasi ruang promosi bagi usaha mikro	Susahnya Pelaku UMKM untuk memenuhi syarat kemitraan dengan swalayan	Memfasilitasi pemenuhan persyaratan untuk kemitraan pelaku UMKM dengan swalayan	Memfasilitasi pemenuhan persyaratan untuk kemitraan pelaku UMKM dengan swalayan belum terlaksanaakan dilakukan di TW berikutnya

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	7.580	Unit Usaha	1895	-	1895	510	1895		1895		Kemudahan perizinan melalui OSS	data pertumbuhan UMKM terdapat di PTSP	Menyurat ke PTSP untuk mendapatkan data Pertumbuhan UMKM berdasarkan NIB	telah mendapatkan data pertambahan umkm dari PTSp per tiga bulan
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100	Unit Usaha	25	-	25	733	25		25		kemudahan akses pembinaan melalui UKM Center	Beberapa rekening belanja perlu disesuaikan dengan kegiatan	Akan dilakukan penyesuaian beberapa belanja pada anggaran pergeseran	Akan dilakukan penyesuaian beberapa belanja pada anggaran perubahan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	3	Orang	3			3					kebutuhan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah Pusat dapat dilakukan via daring	adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas	koordinasi tetap berjalan melalui daring namun tetap memerlukan koordinasi langsung	koordinasi dilakukan ditingkat provinsi dengan Universitas Negeri mengenai pelaksanaan validasi data umkm
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	3.003	Unit Usaha	751		751	22182	751		750		dibantu seluruh staf bidang koperasi dan usaha mikro	pendataan menggunakan media telepon dan pesan	pelaksanaan kegiatan pendataan dilaksanakan di bulan Juni dan Juli	telah dilakukan pendataan umkm melalui media telepon dan pesan
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	240	Orang	60		60	40	60		60		pelaksanaan 2 kegiatan telah dilaksanakan	Beberapa rekening belanja perlu disesuaikan dengan kegiatan	beberapa kegiatan telah dilaksanakan akan dilanjut	Akan dilakukan penyesuaian beberapa belanja pada anggaran perubahan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
melalui Pendidikan dan Pelatihan														kan di tw berikutnya	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro**	**0,5**	**%**	0,13	2,31	0,13	2,25	0,12		0,12		Kemudahan perizinan melalui OSS	data pertumbuhan UMKM terdapat di PTSP	Menyurat ke PTSP untuk mendapatkan data Pertumbuhan UMKM berdasarkan NIB	telah mendapatkan data pertambahan umkm dari PTSp per tiga bulan
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Prosentase capaian atas peningkatan asset dan omset pelaku usaha mikro	5	%	1,3		1,3		1,2		1,2		pelaksanaan pensusunan basis data meliputi pendataan aset omset	terlaksananya pendataan di bulan Juni dan Juli namun datanya belum diolah	pelaksanaan kegiatan pendataan telah dilaksanakan dan akan diolah sesuai kebutuhan data	pelaksanaan kegiatan pendataan telah dilaksanakan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	27	Unit Usaha	7		7		7		6		fokus pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dipeningkatan SDM	Beberapa rekening belanja perlu disesuaikan dengan kegiatan	Akan dilakukan penyesuaian beberapa belanja pada anggaran perubahan	DPA pergesaran 2025 telah ditindaklanjuti dan akan kembali disesuaikan di Perubahan
BIDANG PERDAGANGAN															
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase perusahaan yang terdaftar dan memenuhi regulasi perijinan**	**34,78**	**%**			10	76,36	24,78				lancarnya kegiatan selama pendataan dari pelaku usaha swalayan	masih ada beberapa pelaku usaha yang belum mengetahui pentingnya memiliki ijin usaha	akan dilakukan monitoring dan himbauan ke pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha	belum dilaksanakan karena baru terlaksana di tw 2

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	Jumlah persentase pembinaan dan fasililitasi pelaku usaha toko swalayan dan pusat perbelanjaan berijin Nomor Induk Berusaha	100	%			30	70	70				lancarnya kegiatan selama pendataan dari pelaku usaha swalayan	masih ada beberapa pelaku usaha yang belum mengetahui pentingnya memiliki ijin usaha	akan dilakukan monitoring dan himbauan ke pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha	belum dilaksanakan karena baru terlaksana di tw 2
Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	3	Laporan			1	1	2				lancarnya kegiatan selama pendataan dari pelaku usaha swalayan	masih ada beberapa pelaku usaha yang belum mengetahui pentingnya memiliki ijin usaha	akan dilakukan monitoring dan himbauan ke pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha	belum dilaksanakan karena baru terlaksana di tw 2

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Presentase SKA yang diterbitkan dengan jumlah permohonan SKA yang masuk	100	%	100%	100%	100%	100	100%	-	100%	-	didukung oleh E-SKA dan ketersedian form SKA	jaringan internet sering mengalami gangguan	- menggunakan jaringan paket data mandiri - rutin membuat laporan penerbitan SKA tiap bulan melalui aplikasi e-SKA '- telah dilakukan sosialisasi terkait peraturan penerbitan SKA	- telah rutin membuat laporan penerbitan SKA tiap bulan melalui aplikasi e-SKA
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan SKA	12	dokumen	3	3	3	3	3		3		didukung oleh E-SKA dan ketersedian form SKA	jaringan internet sering mengalami gangguan	- menggunakan jaringan paket data mandiri - rutin membuat laporan penerbitan SKA tiap bulan melalui aplikasi e-SKA - telah dilakukan sosialisasi terkait peraturan penerbitan SKA	- telah rutin membuat laporan penerbitan SKA tiap bulan melalui aplikasi e-SKA

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase ketersediaan informasi dan barang kebutuhan pokok/barang penting**	**100**	**%**	100%	100%	100%	100	100%		100%		dilakukan monitoring harga bapokting di 3 pasar tiap minggu dan terkait ketersedian bapokting dilakukan monitoring tiap bulan	- masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan LPG 3kg (bersubsidi) yang seharsunya diperuntukan untuk warga miskin- pihkan pangkalan masih ada yang menjual tabung gas 3 kg diatas HET (harga eceran tertinggi)	melakukan sosialisasi dan himbauan ke masyarakat dan pangkalan terkait peruntukan tabung gas 3 kg melalui kegiatan wartekin	tiap bulan telah dilakukan monitoring terkait ketersediaan dan harga bapokting tiap bulannya

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting	12	Laporan	3	3	3	3	3		3		telah dilakukan monitoring rutin terkait ketersediaan bapokting tiap bulannya	- masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan LPG 3kg (bersubsidi) yang seharsunya diperuntukan untuk warga miskin - pihkan pangkalan masih ada yang menjual tabung gas 3 kg diatas HET (harga eceran tertinggi)	melakukan sosialisasi dan himbauan ke masyarakat dan pangkalan terkait peruntukan tabung gas 3 kg melalui kegiatan wartekin	tiap bulan telah dilakukan monitoring terkait ketersediaan dan harga bapokting tiap bulannya

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	48	Laporan	12	12	12	12	12		12		telah dilakukan monitoring rutin terkait ketersediaan bapokting tiap bulannya	- masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan LPG 3kg (bersubsidi) yang seharsunya diperuntukan untuk warga miskin - pihkan pangkalan masih ada yang menjual tabung gas 3 kg diatas HET (harga eceran tertinggi)	mengajukan penambahan anggaran perubahan tahuan 2025 untuk dapat mengakomodir sarana prasarana kegiatan wartekin di dareah pesisir	tiap bulan telah dilakukan monitoring terkait ketersediaan dan harga bapokting tiap bulannya

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jenis komoditi bahan pokok dan barang penting yang dipantau stabilitasnya	23	jenis	23	23	23	23	23		23		Data monitoring harga bapokting lengkap	- masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan LPG 3kg (bersubsidi) yang seharsunya diperuntukan untuk warga miskin- pihkan pangkalan masih ada yang menjual tabung gas 3 kg diatas HET (harga eceran tertinggi)	mengajukan penambahan anggaran perubahan tahuan 2025 untuk dapat mengakomodir sarana prasarana kegiatan wartekin di dareah pesisir	tiap bulan telah dilakukan monitoring terkait ketersediaan dan harga bapokting tiap bulannya
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	1	-	-	-		-		Antusias masyarakat dalam pelaksanaan operasi pasar sangat baik			kegiatan sudah selesai dilaksanakan

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Persentase pertumbuhan nilai ekspor migas dan non migas**	**0,5**	**persen**	0,1	-39,59	0,2	-30,61	0,3		0,5			- DKUMPP tidak bisa mengintervensi perusahaan ekspor untuk meningkatkan ekspornya - kurangnya daya beli dari luar luar negeri menjadi penyebab turunnya nilai ekspor - cadangan gas PT Badak menurun sehingga menurunkan angka produksi - turunnya harga komoditi methanol untuk ekspor	akan dilakukan monitoring kembali ke perusahaan penggunan form SKA pada semester ke 2	telah dilakukan monitoring ke perusahaan pengguna forma SKA pada semester pertama

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	4	Pelaku Usaha	-	-	-		-		4		tersedianya anggaran untuk memfasilitasi calon eksportir dan eksportir untuk mendapatkan akses pasar ekspor	adanya efisensi anggaran sehingga berdampak pada jumlah pelaku usaha yg dapat di fasilitasi hanya 1 pelaku usaha saja	- akan mengajukan penambahan anggaran di perubahan 2025- direncanakan akan mengikuti Pameran trade expo indonesia dilaksanakan pada bulan Oktober 2025	-

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4	Pelaku Usaha	-	-	-		-		4		tersedianya anggaran untuk memfasilitasi calon eksportir dan eksportir untuk mendapatkan akses pasar ekspor	adanya efisensi anggaran sehingga berdampak pada jumlah pelaku usaha yg dapat di fasilitasi hanya 1 pelaku usaha saja	- akan mengajukan penambahan anggaran di perubahan 2025 - direncanakan akan mengikuti Pameran trade expo indonesia dilaksanakan pada bulan Oktober 2025	-
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	9	Pelaku Usaha	-	-	9		-		-			adanya efisensi anggaran sehingga berdampak kegiatan untuk bimtek bagi pelaku usaha tidak bisa dilaksanakan	akan dialihkan untuk pengembangan aparatur di triwulan ke 3	-

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6	Produk	6	6	-		-		-		sudah terlaksana		akan diajukan anggaran untuk kegiatan tersebut pada anggaran murni tahun 2026	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase produk dalam negeri yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran**	**100**	**%**			100							adanya efisensi anggaran sehingga berdampak pada jumlah pelaku usaha yg dapat di fasilitasi hanya 3 pelaku usaha saja, dan jadwal pelaksanaan fasilitasi dalam promosi dan pemasaran di undur pada bulan Oktober 2025	akan mengajukan penambahan anggaran pada perubahan 2025	hasil tindak lanjut sebelumnya belum bisa terlaksana karena dampat dari efisiensi anggaran

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkatKabupaten/ Kota	**10**	**UMKM**	-	-	10		-		-			adanya efisensi anggaran sehingga berdampak pada jumlah pelaku usaha yg dapat di fasilitasi hanya 3 pelaku usaha saja, dan jadwal pelaksanaan fasilitasi dalam promosi dan pemasaran di undur pada bulan Oktober 2025	akan mengajukan penambahan anggaran pada perubahan 2025	hasil tindak lanjut sebelumnya belum bisa terlaksana karena dampat dari efisiensi anggaran

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri diTingkat Kabupaten/Kota	**10**	**UMKM**	-	-	10		-		-			adanya efisensi anggaran sehingga berdampak pada jumlah pelaku usaha yg dapat di fasilitasi hanya 3 pelaku usaha saja, dan jadwal pelaksanaan fasilitasi dalam promosi dan pemasaran di undur pada bulan Oktober 2025	akan mengajukan penambahan anggaran pada perubahan 2025	hasil tindak lanjut sebelumnya belum bisa terlaksana karena dampat dari efisiensi anggaran

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase penataan sarana distribusi perdagangan**	**100**	**%**	25	25	25	25	25		25		penataan sarana distribusi perdagangan yang sudah selesai adalah fasilitasi berupa penyediaan tenda untuk kegiatan pasar ramadan bagi pedagang dan pekerjaan kanopi di pasar rawa indah sedang proses pekerjaan	untuk kegiatan fisik dalam penataan sarana distribusi perdagangan masih dalam tahap SPK berupa perencanaan pembuatan kanopi	akan dilakukan pekerjaan fisik berupa pembuatan kanopi dan pekerjaan fisik lainnya sambil terus berkoordinasi degan PPBJ	pekerjaan fisik berupa pembuatan kanopi sudah selesai
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	3	unit	3	3	3		3		3		penataan sarana distribusi perdagangan yang sudah selesai adalah fasilitasi berupa penyediaan tenda untuk kegiatan pasar ramadan bagi pedagang	- Beberapa rekening belanja perlu disesuaikan dengan kegiatan- untuk kegiatan fisik dalam penataan sarana distribusi perdagangan masih dalam tahap SPK berupa perencanaan pembuatan kanopi	- Akan dilakukan penyesuaian beberapa belanja pada anggaran pergeseran-akan dilakukan pekerjaan fisik berupa	- telah dilakukan penyesuaian beberapa belanja pada anggaran pergeseran

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
														pembuatan kanopi dan pekerjaan fisik lainnya sambil terus berkoordinasi degan PPBJ	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3	Unit	3	3	3	3	3		3		- pemasangan portal di 3 pasar (tw 2) sudah selesai - kanopi pasar rawa indah (tw2) sudah selesai - perencanaan atap pasar telihan - pemeliharaan pasar rawa indah sedang berlangsung pekerjaan fisiknya	ketersediaan material yang tidak ada di kota Bontang	- melaksanakan pekerjaan fisik pemasangan atap pasar telihan - melanjutkan pekerjaan pemeliharaan pasar rawa indah - akan memesan material diluar kota Bontang	- pekerjaan fisik berupa pembuatan kanopi telah selesai
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3	Unit	3	3	3	0	0		0		anggaran tersedia untuk	pihak penyedia berencana untuk mengundur jadwal pelaksanaan festival kuliner	akan dilaksanakan festival kuliner jajanan tradisional dan modern pada	fasilitasi berupa pasar ramadhan di 3 pasar telah dilaksanakan pada triwulan ke 1

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
														triwulan ke 3	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang mengikuti pembinaan	80	orang	20	235	20	58	20		20			terdapat kegiatan yang sudah terlaksana tapi tidak bisa dicairkan karena terkena dampak efisiensi di pergeseran 2025	- kegiatan yang terdampak efisiensi akan diajukan lagi di anggaran perubahan - akan dilaksanakan bimtek selanjutnya pada tw 3	telah dilakukan penyesuaian beberapa belanja pada anggaran pergeseran

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5	Dokumen	1	3	1	1	2		1		- antusiasme para pedagang untuk mengikuti pembinaan'- telah dilaksanakan sosialisasi pasar sehat yang melibatkan 165 pedagang- telah dilakukan bimtek peningkatan SDM peran pedagang pasar dalam pertumbuhan ekonomi anggota melibatkan sebanyak 43 pedagang- telah dilakukan bimtek manajemen usaha bagi pedagang pasar tardisional dan umkm digital sebanyak 17 pedagang (tw2)- telah dilakukan pelatihan UMKM sebanyak 28 pedagang (tw2)- telah dilakukan bimtek pelatihan peningkatan daya saing dan peran pedagang pasar dalam perekonomian daera melalui pembangunan digitalisasi (UPT) sebanyak 13 pedagang (tw2)- telah dilakukan bimtek perwakilan pedagang pasar rawa indah, telihan, dan loktuan, UPT Pasar melibatkan 27 pedagang	terdapat kegiatan yang sudah terlaksana tapi tidak bisa dicairkan karena terkena dampak efisiensi di pergeseran 2025	- kegiatan yang terdampak efisiensi akan diajukan lagi di anggaran perubahan- akan dilaksanakan bimtek selanjutnya pada tw 3	telah dilakukan penyesuaian beberapa belanja pada anggaran pergeseran

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase penerapan standardisasi dan perlindungan konsumen**	**80**	**%**	**10**	**13**	**20**	**39,78**	**30**		**20**		Peralatan Standar yang dimiliki UPT Metrologi Legal untuk penerapan standarisasi dan perlindungan konsumen sudah cukup memadai	Masih ada pemilik UTTP/ wajib tera yang belum sepenuhnya paham dengan pentingnya tera/ tera ulang, sehingga masih terjadi di lapangan reaksi negatif ketika UTTP-nya mau ditera/ tera ulang	Pelaksanaan Edukasi dan sosialisasi 3M (Masyarakat Melek Metrologi) perlu ditingkatkan lagi	Edukasi dan sosialisasi 3M (Masyarakat Melek Metrologi) telah dilakukan pada saat melaksanakan metrologi legal
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan pengawasan alat UTTP	80	%	10	13	20	15,73	30		20		Respon pelaku usaha saat dilakukan pengawasan terhadap uttp dan atau produknya adalah positif	Data alamat Pelaku usaha ada beberapa yang tidak sesuai sehingga kesulitan mencari lokasinya	Pembaharuan data Pelaku Usaha di bidang Metrologi yang dibina	Pembaharuan data Pelaku Usaha di bidang Metrologi yang dibina sedang dilakukan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	900	unit	230	235	260	726	260		150		UPT Metrologi Legal memiliki timbangan pegas standar untuk dipinjamkan sementara timbangan wajib tera diuji (sidang tera ulang dengan sistem jemput bola)	Wajib tera yang memakai timbangan elektronik dalam berjualan tidak mau ditukar sementara dengan timbangan pegas standar milik UPT Metrologi Legal	Akan diajukan pengadaan timbangan elektronik standar pada tahun anggaran 2026	tindak lajut belum terlaksana di tahun 2025, karena terdampak efisiensi anggran
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	60	Orang	25	42	15	197	15		5		Pelaksanaan Edukasi dan sosialisasi 3M (Masyarakat Melek Metrologi) pada tahun sebelumnya	Keterbatasan SDM dan finansial untuk melakukan pembinaan, berdampak pada minimnya sosialisasi dan informasi mengenai kebijakan metrologi legal kepada pelaku usaha	akan diajukan peningkatan SDM bagi asn jafung pengamat tera dan pengawas kemetrologian di tahun anggaran 2026	tindak lajut belum terlaksana di tahun 2025, karena terdampak efisiensi anggran
BIDANG PERINDUSTRIAN															

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Presentase pertumbuhan industri non migas**	**1**	**%**	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3		0,3		Sumber daya non migas dapat dikatakan melimpah	Masyarakat lebih tertarik menjadi karyawan perusahaan daripada menjadi pelaku industri pengolahan non migas	Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang keunggulan usaha industri pengolahan non migas	Telah diberikan wawasan kepada masyarakat tentang keunggulan usaha industri pengolahan non migas

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
	Persentase penerapan standarisasi Industri	50	**%**	12	35,97	12	39,41	13		13		adanya kesadaran pelaku IKM terkait pentingnya standarisasi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk	- IKM masih kurang memahami langkah-langkah pengurusan standarisasi industri - IKM yang sudah didampingi belum melakukan perbaikan syarat-syarat standarisasi - IKM tidak memprioritaskan terbitnya sertifikat standar selama usaha mereka masih berjalan lancar	Mendorong dan memfasilitasi pelaku IKM dalam bentuk pendampingan dan bimtek agar melakukan standarisasi industri	Telah mendorong dan memfasilitasi pelaku IKM dalam bentuk pendampingan dan bimtek agar melakukan standarisasi industri
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	-	Dokumen	0	0	0	0	0		1		dokumen RPIK sudah jadi sehingga tinggal menjalankan evaluasi	Kegiatan baru berjalan tiga bulan	Terus mengamati hal-hal yang bisa menjadi evaluasi dalam penerapan RPIK yang sudah jadi	Telah mengamati hal-hal yang bisa menjadi evaluasi dalam penerapan RPIK yang sudah jadi

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	-	Dokumen	0	0	0	0	0		1		dokumen RPIK sudah jadi sehingga tinggal menjalankan evaluasi	Kegiatan baru berjalan tiga bulan	Terus mengamati hal-hal yang bisa menjadi evaluasi dalam penerapan RPIK yang sudah jadi	Telah mengamati hal-hal yang bisa menjadi evaluasi dalam penerapan RPIK yang sudah jadi
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1	Dokumen	0	0	0	0	0		1		antusias masyarakat untuk mengikuti pelatihan yang menjadi kegiatan pembangunan sumber daya industri cukup tinggi	beberapa masyarakat yang sudah diikutkan pelatihan tidak melanjutkan/menerapkan hasil pelatihan	melakukan evaluasi pasca pelatihan	telah melakukan evaluasi pasca pelatihan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	0	0	0	0	0		1		Pemprov Kaltim dan OPD Pemkot terbukat untuk koordinasi dan sinkronisasi terkait pembangunan sarana prasarana industri terutama rencana pembangunan sentra	Ketersediaan lahan untuk pembangunan sentra belum ada	Fokus pada organisasi / kelompok industri kecil sebagai sentra alami	telah fokus pada organisasi / kelompok industri kecil sebagai sentra alami

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1	Dokumen	0	0	0	0	0		1		Antusias masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan terkait industri kecil cukup tinggi	Pengusaha industri yang terlibat itu-itu saja	Mengevaluasi agar pengusaha industri yang sudah pernah terlibat untuk memberi kesempatan pada yang belum	telah mengevaluasi agar pengusaha industri yang sudah pernah terlibat untuk memberi kesempatan pada yang belum
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	0	0	0	0	0		1		dokumen RPIK sudah jadi sehingga tinggal menjalankan evaluasi	Kegiatan baru berjalan tiga bulan	Terus mengamati hal-hal yang bisa menjadi evaluasi dalam penerapan RPIK yang sudah jadi	telah mengamati hal-hal yang bisa menjadi evaluasi dalam penerapan RPIK yang sudah jadi

Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasika	1	Dokumen	0	0	0	0	0		1		- Antusiasme pengusaha industri untuk mendapatkan sertifikat halal tinggi- Terdapat fasilitasi gratis halal self-declare gratis dari berbagai instansi (BPJPH, Pemprov, Pemkot)	- Belum mampu mengcover kebutuhan sertifikasi halal reguler yang juga banyak dibutuhkan pengusaha industri- Membludaknya fasilitasi menyebabkan antrian fatwa halal di pusat menjadi panjang sehingga sertifikat halal lama terbitnya- Kurangnya tenaga pendamping halal dari DKUMPP dibandingkan permintaan sertifikasi halal menyebabkan antrian panjang	- Mengarahkan pelaku usaha untuk melakukan konsultasi kepada lembaga yang menangani sertifikat halal reguler (misal: Sucofindo, BPJPH, UNMUL)- Memberi pengarahan kepada pengusaha indusri terkait alasan mengapa sertifikat halal terbit lebih lama dari seharusnya- Mengarahkan staf untuk mengikuti pelatihan pendam	- Telah mengarahkan pelaku usaha untuk melakukan konsultasi kepada lembaga yang menangani sertifikat halal reguler (misal: Sucofindo, BPJPH, UNMUL)- Telah memberi pengarahan kepada pengusaha indusri terkait alasan mengapa sertifikat halal terbit lebih lama dari seharusnya- Telah mengarahkan staf untuk mengikuti pelatihan pendamping halal dan menunggu aktivasi akun pendamping

														ping halal	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**Persentase IKM yang memiliki izin usaha**	**3**	**%**	0,75	0,1	0,75	0,2	0,75		0,75		anggaran tersedia antusias pelaku IKM tinggi untuk mengajukan perijinan berupa sertifikat halal dan merk	tertundanya pelaksanaan kegiatan karena efisiensi anggaran	paling cepat akan dilaksanakan pada triwulan ke 2	telah terlaksana sosialisasi halal pada triwulan 2
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang memenuhi persyaratan perizinan	45	**IKM**	2	2	15	3	15		13		Syarat perizinan untuk IKM kewenangan kabupaten/kota cukup mudah	IKM tidak kunjung melakukan perbaikan sesuai standar kegiatan usaha	Follow up ke IKM untuk melakukan perbaikan dan memenuhi persyaratan standar kegiatan usaha industri	telah follow up ke IKM untuk melakukan perbaikan dan memenuhi persyaratan standar kegiatan usaha industri

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Dokumen	0	0	0	0	0		1		IKM terbuka untuk dilakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor industri kecil	Setelah dilakukan pengawasan, beberapa pengusaha industri tidak melakukan perbaikan dari yang telah disarankan (misal: menghapus KBLI apabila kegiatan tidak lagi beroperasi)	Follow up ke IKM untuk melakukan perbaikan dan melengkapi perizinan yang perlu diipenuhi	telah follow up ke IKM untuk melakukan perbaikan dan melengkapi perizinan yang perlu diipenuhi

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	dokumen	0	0	0	0	0		1		IKM terbuka untuk dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan. standar kegiatan usaha sektor perindustrian	Sebagian besar hasil verififkasi tidak dapat diterbitkan rekomendasi karena beberapa kendala seperti: KBLI yang tercantum pada NIB tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya di lapangan, IKM tidak kunjung melakukan perbaikan sesuai standar kegiatan usaha	Follow up ke IKM untuk melakukan perbaikan dan memenuhi persyaratan standar kegiatan usaha industri	telah follow up ke IKM untuk melakukan perbaikan dan memenuhi persyaratan standar kegiatan usaha industri

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase IKM yang memanfaatkan SIINAS**	**2,5**	**%**	1	0,86	0,5	1,05	0,5		0,5		Antusiasme IKM untuk dapat memiliki akun SIINas cukup tinggi	IKM masih perlu didampingi secara intensif untuk memanfaatkan SIINas. Kurangnya tenaga sdm yang memahami pengoprasian SIINas	IKM akan didampingi dalam pemanfaatan SIINas	Telah dilakukan pendampingan pemanfaatan SIINas dan akan menjadi agenda rutin triwulanan
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri yang memanfaatkan SIINas	5	IKM	1	13	1	16	1		2		IKM antusias untuk mendapatkan akun SIINas agar dapat memanfaatkan fasilitas dari Kemenperin	IKM kurang familiar dengan teknologi dan aplikasi sehingga harus didampingi secara intensif	IKM didampingi secara intensif agar dapat mendaftar dan memanfaatkan akun SIINas	telah melakukan pendampingan terhadap IKM secara intensif agar dapat mendaftar dan memanfaatkan akun SIINas
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	0	0	0	0	0		1		IKM antusias untuk mendapatkan akun SIINas agar dapat memanfaatkan fasilitas dari Kemenperin	IKM kurang familiar dengan teknologi dan aplikasi sehingga harus didampingi secara intensif	IKM didampingi secara intensif agar dapat mendaftar dan memanfaatkan akun SIINas	telah melakukan pendampingan terhadap IKM secara intensif agar dapat mendaftar dan memanfaatkan akun SIINas

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	Dokumen	0	0	0	0	0		1		IKM antusias untuk mendapatkan akun SIINas agar dapat memanfaatkan fasilitas dari Kemenperin	IKM kurang familiar dengan teknologi dan aplikasi sehingga harus didampingi secara intensif	IKM didampingi secara intensif agar dapat mendaftar dan memanfaatkan akun SIINas	telah melakukan pendampingan terhadap IKM secara intensif agar dapat mendaftar dan memanfaatkan akun SIINas
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Daerah (DKUMPP)**	**100**	**%**	100	100	100	100	100		100		pemenuhan layanan penunjang pelaksanaan urusan DKUMPP berjalan lancar		pemenuhan layanan penunjang pelaksanaan urusan DKUMPP akan tetap rutin dilaksanakan sesuai perencanaan	evaluasi kinerja tw 1 sudah dilakukan
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persentase pemenuhan penyampaian laporan kinerja SKPD	100	%	25	25	25	25	25		25		lancarnya koordinasi bersama bidang terkait progres kinerja DKUMPP tiap triwulan		evaluasi kinerja akan rutin dilaksanakan per	evaluasi kinerja tw 1 sudah dilakukan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
														triwulan	
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Laporan	-	-	-		-		1		lancarnya koordinasi bersama bidang terkait progres kinerja DKUMPP tiap triwulan		evaluasi kinerja akan rutin dilaksanakan per triwulan	evaluasi kinerja tw 1 sudah dilakukan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi laporan yang disusun sesuai ketentuan	100	%	100	100	100		100		100		lancarnya layanan administrasi keuangan		layanan adminis trasi keuang an akan dilaksa nakan dengan tertib adminis trasi agar layanan tersebut tetap berjalan lancar	layanan administrasi keuangan telah dilaksanakan dengan tertib administrasi agar layanan tersebut tetap berjalan lancar

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72	orang/bulan	72	72	72		72		72		rekapan gaji dan tunjangan ASN terbit tepat waktu		selalu berkoordinasi dengan BKPSDM untuk kelancaran terbitnya rekapan tunjangan ASN	selalu berkoordinasi dengan BKPSDM untuk kelancaran terbitnya rekapan tunjangan ASN
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi	1	Laporan	-	-	-		-		1					
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	12	Laporan	3	3	3		3		3		lancarnya proses penginputan jurnal		penginputan akan selalu rutin dilakukan tepat waktu	telah dilakukan penginputan jurnal tiap bulannya
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	-	-	-		1		-		lancarnya proses penginputan jurnal		penginputan akan selalu rutin dilakuk	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
														an tepat waktu	
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian DKUMPP	100	%	100	100	100		100		100		lancarnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	-	-	1	1	-		-		batik dan jaket PDL sudah terealisasi		akan diajukan kembali pada anggaran tahun depan	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	15		15	30	-		-		bimtek untuk aparatur sudah terlaksana	efisiensi biaya	akan diajukan kembali pada anggaran perubahan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	100	100	100	100		100		lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran		kegiatan penunjang tetap rutin	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
														dilaksanakan	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	0		1		-		-		lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	masih proses pengadaan	pengadaan akan diselesaikan	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	paket	0		3	3	3		-		atk, tinta printer, fumigasi, sewa alat reproduksi sudah terealisasi		proses pengadaan lampu led, kursi sofa	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket			1		-		-		rencana pengadaan alat kebersihan	prosesnya lama	akan menyelesaikan rencana pengadaan alat kebersihan	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	paket	0		1	2	1		-		sudah selesai		kegiatan penunjang akan tetap rutin dilaksanakan	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	1	1	1		-		-		cetak spanduk sudah teralisasi		proses cetak karcis dan retribusi	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	3	3	3	3	3		3		lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran		kegiatan penunjang akan tetap rutin dilaksanakan	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang DI sediakan	1	unit	-	-	0		1		-		proses pengadaan motor 1 unit		akan menyelasiakan proses pengadaan motor 1 unit	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	-	-	0		1		-		proses pengadaan motor 1 unit		akan menyelasiakan proses pengadaan motor 1 unit	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan DKUMPP	12	bulan	3	3	3		3		3		berjalan lancar sesuai dengan jadwal pelaksanaan		kegiatan penunjang akan tetap	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
														rutin dilaksanakan	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	3	3	3		3		3		berjalan lancar sesuai dengan jadwal pelaksanaan		kegiatan penunjang akan tetap rutin dilaksanakan	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3	3	3		3		3		berjalan lancar sesuai dengan jadwal pelaksanaan		kegiatan penunjang akan tetap rutin dilaksanakan	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3	3	3		3		3		berjalan lancar sesuai dengan jadwal pelaksanaan		kegiatan penunjang akan tetap rutin dilaksanakan	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DKUKMP	12	bulan	3	3	3		3		3		lancarnya pemeliharaan BUMD penunjang DKUMPP		akan rutin dilaksanakan pemleiharaan BUMD	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja 1 tahun	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut Sebelumnya
				Target	Realisasi	target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
														penunjang DKUMPP	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	unit	12	12	12	12	12		12		lancarnya pemeliharaan kendaraan dinas		akan rutin dilakukan pemeliharaan kendaraan dinas	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	18	unit	6	6	4	4	4		4		pelaksanaan pemeliharaan BUMD berjalan lancar, suku cadang terealisasi, sp sudah seesai semua		kegiatan penunjang akan tetap rutin dilaksanakan	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	unit	-	-	1	0	-		-		sedang proses pembangunan di umkm center, target agustus selesai		kegiatan penunjang akan tetap rutin dilaksanakan	kegiatan penunjang tetap rutin dilaksanakan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bontang

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bontang yang tercantum pada RPJMD 2021-2026 ada 24 (dua puluh empat) indikator, pada bagian ini ditampilkan pencapaian kinerja pelayanan kondisi akhir tahun 2024

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan DKUMPP Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja 2023	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja 2024
	KOPERASI & UKM				
1	Persentase koperasi aktif	Persen	81,17	96,15	78,82
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP)	Unit	19.467	92.10	21.670
3	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	Persen	38,83	19,74	12,5
4	Persentase koperasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	Persen	47	8,97	56,72
5	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Persen	66,6	7,5	66,67
6	Jumlah BPR/LKM (hanya BPR)	Unit	4	4	4
7	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	Persen	2,10	0,5	11,31
8	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan	Persen	3,30	2	101,82
9	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persen	3,06	0,34	13,23

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja 2023	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja 2024
10	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang bermitra dg pasar rental modern	Persen	3,06	1,38	433,01
11	Persentase kapasitas kelembagaan koperasi	Persen	51,12	19,23	44,7
12	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persen	27,79	7,5	85,88
	PERDAGANGAN				
13	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan MIGAS	Persen	3,39	3,6	3,57
14	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tanpa MIGAS	Persen	5,61	6,77	5,79
15	Ekspor Bersih Perdagangan (Million $)	Juta $	Menurun	Meningkat	Menurun
16	Persentase perusahaan yang terdaftar	Persen	-	37,5	36,8
17	Persentase eksportir yang aktif menggunakan SKA	Persen	100	100	100
18	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan	Persen	100	100	100
19	Persentase pembinaan terhadap pengelola pasar	Persen	92,22	18	87,8
	PERINDUSTRIAN				
20	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan MIGAS	Persen	78,36	69,4	77,77

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja 2023	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja 2024
21	Persentase pertumbuhan Industri kecil menengah	Persen	1,01	1	1,13
22	Pesentase IKM yang menerapkan sistem managemen produk	Persen	5,58	1,52	1,65
23	Persentase IKM yang memiliki izin usaha	Persen	0,47	2	3,04
24	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINAS	Persen	0,74	0,55	5,14

2.3. **Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Berdasarkan evaluasi hasil renja hingga semester I tahun 2025 sebagaimana telah dijelaskan diatas, beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan dan pencapaian target kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

Permasalahan Eksternal :

1. Pengurus dan pengawas koperasi bukan merupakan profesi utama sehingga seringkali dikesampingkan dalam melaksanakan RAT
2. Keterbatasan SDM pengurus koperasi terutama dalam hal pelaporan keuangan
3. Pelaku IKM masih kurang memahami langkah-langkah pengurusan standarisasi industri
4. Pelaku IKM tidak memprioritaskan terbitnya sertifikat standar selama usaha mereka masih berjalan lancar
5. IKM masih perlu didampingi secara intensif untuk memanfaatkan SIINas. Kurangnya tenaga sdm yang memahami pengoprasian SIINas
6. Menurunnya nilai ekspor karena menurunnya permintaan dari luar negeri, dan pihak DKUMPP tidak bisa mengintervensi perusahaan ekspor agar dapat meningkatkan nilai ekspornya
7. Masih terbatasnya jumlah partisipasi distributor yang ikut dalam kegiatan wartek in

Permasalahan Internal **:**

1. SDM aparatur untuk di lapangan masih terbatas
2. Adanya efisiensi anggaran sehingga berdampak pada menurunnya target kinerja
3. Terdapat kegiatan yang proses belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuknya pada tahapan kegiatannya.
4. Program/ kegiatan dikerjakan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan.

2.4. **Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025**

RKPD Perubahan adalah salah satu acuan bagi setiap perangkat daerah dalam penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi

pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan kemudian mereview rancangan awal Perubahan RKPD yang disandingkan dengan kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam Perubahan Renja DKUMPP sudah tercantum semua dalam rancangan Perubahan RKPD Kota Bontang

Pada Perubahan Rencana Kerja DKUMPP Tahun 2025 ini telah disusun sesuai dengan analisa kebutuhan yang ada dan tentu tidak luput dari beberapa pergeseran maupun perubahan angka pagu indikatif. Tetapi untuk usulan program dan kegiatan secara keseluruhan tidak berubah.

2.5. **Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan**

Pada penyusunan Perubahan Renja tahun 2025 terdapat program Pemerintah Kota Bontang melalui kebijakan yang diakomodir oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Bontang

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Nama Usulan	Besaran / Volume	Bidang
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Bontang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Perencanaan Penataan Seafood Court Rawa Indah		UPT Pasar
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Kota Bontang	Jumlah dokumen hasil koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Pelaksanaan Kegiatan Dekranasda		Perindustrian
3	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kab/Kota	Kota Bontang	Jumlah Koperasi yang di fasilitasi	Biaya Notaris Pembentukan Koperasi Merah Putih		Koperasi
4	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Bontang	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan seragam PDL, Jas hujan dan sepatu untuk UPT Pasar		UPT Pasar
5	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Bontang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kajian pengembangan lahan pasar loktuan	Unit	UPT Pasar
6	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Bontang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Pengadaan CCTV di seluruh pasar / UPT	Unit	UPT Pasar

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Nama Usulan	Besaran / Volume	Bidang
7	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bontang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Pelaksanaan kegiatan Gebyar UMKM Berbenah	orang	Koperasi dan Usaha Mikro
8	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Bontang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Pemeliharaan Kantor UPT Metrologi	Unit	UPT Metrologi Legal
9	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Bontang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Pengadaan lahan parkir Pasar Citra Mas Loktuan	Unit	UPT Pasar
10	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bontang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Penyediaan jasa publikasi (media kaltim)	orang	Koperasi dan Usaha Mikro
11	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kota Bontang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Pelatihan HKI tingkat pemula bagi aparatur	orang	Koperasi dan Usaha Mikro

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Nama Usulan	Besaran / Volume	Bidang
	Melalui Pendidikan dan Pelatihan					

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN ANGGARANNYA

Berikut adalah tabel perubahan rencana kerja perubahan tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 3.1

Rencana Kinerja DKUMPP Kota Bontang Tahun 2025

No	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Target Tahun 2025
1	Peningkatan kinerja kelembagaan koperasi dan usaha mikro	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	59%
		Persentase fasilitasi pemberdayaan koperasi	86%
		Persentase pelaku usaha mikro yang difasilitasi	14%
2	Peningkatan efisiensi sistem distribusi perdagangan dan ekspor non migas	Persentase stabilitas harga komoditas bahan pokok	70%
		Persentase bagi perusahaan yang difasilitasi dalam penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) pada sektor non migas	100%
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera SAH yang berlaku	88%
3	Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan non migas	Persentase pertumbuhan industri non migas	1,15%
		Persentase penerapan standarisasi industri	33%
		Persentase IKM yang Terdaftar di Sistem Informasi Nasional (SIINas)	5,5%

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Perubahan Program dan kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan							47.003.920.715,00	55.199.890.989,00	51.443.847.384,00							40.435.523.141,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							41.104.102.701,00	43.694.179.094,00	41.108.429.980,00							37.373.489.611,00	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							41.104.102.701,00	43.694.179.094,00	41.108.429.980,00							37.373.489.611,00	
1	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (DKUKMP)				100 Persen	100 Persen	34.153.512.883,00	35.754.762.180,00	34.776.624.398,00							32.872.751.710,00	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyampaian laporan kinerja OPD	-			100 %	100 %	525.895,00	525.895,00	525.895,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Aparatur		500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	525.895,00	525.895,00	525.895,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan	-			100 %	100 %	15.534.932.386,00	15.323.319.813,00	15.323.319.813,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Aparatur		15.094.493.822,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/ bulan	72 Orang/ bulan	15.533.354.701,00	15.321.742.128,00	15.321.742.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Dana Bagi Hasil (DBH)Dana Alokasi Umum (DAU)DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			15.092.993.822,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	525.895,00	525.895,00	525.895,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	525.895,00	525.895,00	525.895,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	525.895,00	525.895,00	525.895,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian DKUKMP	-			100 %	100 %	1.662.416.610,00	2.414.566.830,00	2.414.566.830,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Aparatur		1.507.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	682.361.610,00	1.055.751.830,00	1.556.902.048,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			568.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	980.055.000,00	1.358.815.000,00	512.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			939.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	-			100 %	100 %	1.877.506.472,00	2.175.903.804,00	2.175.903.804,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Aparatur		1.565.379.977,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	134.995.553,00	1.015.345,00	1.015.345,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	189.685.715,00	1.030.447.886,00	1.030.447.886,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			91.562.171,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.990.217,00	50.003.719,00	50.003.719,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	145.946.485,00	71.992.790,00	71.992.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			176.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	199.108.502,00	84.732.064,00	84.732.064,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			195.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.157.780.000,00	937.712.000,00	304.583.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			987.017.806,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang DI sediakan	-			2 Unit	1 Unit	42.217.000,00	31.562.000,00	31.562.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Aparatur		148.970.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	42.217.000,00	31.562.000,00	31.562.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			148.970.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan DKUKMP	-			12 Bulan	12 Bulan	14.218.588.520,00	14.749.992.800,00	14.749.992.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Aparatur		13.517.763.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	21.440.000,00	12.870.000,00	12.870.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			21.440.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.572.800.000,00	2.500.800.000,00	2.500.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			2.572.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.624.348.520,00	12.236.322.800,00	12.236.322.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			10.923.523.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DKUKMP	-			12 Bulan	12 Bulan	817.326.000,00	1.058.891.038,00	1.058.891.038,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Aparatur		1.038.644.211,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	48 Unit	758.646.000,00	566.485.118,00	566.485.118,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			763.644.211,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	57.680.000,00	30.940.000,00	30.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	461.465.920,00	461.465.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam				19,74 persen	19,74 persen	10.980.713,00	10.969.000,00	7.657.000,00							10.980.750,00	
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan pemenuhan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	10.980.713,00	10.969.000,00	10.969.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Koperasi		10.980.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	10.980.713,00	10.969.000,00	7.657.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			10.980.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koprasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian				100 8,97 Persen persen	8,97 persen	29.157.307,00	29.156.888,00	16.360.327,00							29.157.669,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	-			100 %	100 %	29.157.307,00	29.156.888,00	29.156.888,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Koperasi		29.157.669,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	29.157.307,00	29.156.888,00	16.360.327,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			29.157.669,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya				7,50 %	61,79 %	15.233.583,00	15.232.058,00	12.139.063,00							15.233.960,00	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dilakukan penilaian	-			30 %	30 %	15.233.583,00	15.232.058,00	15.232.058,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Koperasi		15.233.960,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	15.233.583,00	15.232.058,00	12.139.063,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			15.233.960,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase kapasitas kelembagaan koperas				19,23 %	19,23 %	585.365.181,00	585.287.569,00	415.376.552,00							185.365.522,00	
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Pengurus dan Pengawas Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			76.92 %	76.92 %	585.365.181,00	585.287.569,00	585.287.569,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Koperasi		185.365.522,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																	
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				100 Orang	100 Orang	585.365.181,00	585.287.569,00	415.376.552,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			185.365.522,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi				-	87 %	0,00	0,00	37.500.000,00							450.000.000,00	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi	-			-	100 %	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Koperasi		450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				-	15 Unit Usaha	0,00	0,00	37.500.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang bermitra dg pasar rental modern Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)				1,72 52,01 % %	1,72 52,01 % %	6.289.853.092,00	5.689.591.844,00	4.604.702.085,00							3.790.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-			2.19 %	2.19 %	6.289.853.092,00	5.689.591.844,00	5.689.591.844,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	UMKM		3.790.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																	
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				140 Unit Usaha	140 Unit Usaha	399.999.903,00	399.997.678,00	237.320.959,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																	
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				7580 Unit Usaha	7580 Unit Usaha	16.999.872,00	16.994.000,00	9.147.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			17.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	149.999.776,00	649.992.825,00	572.142.785,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																	
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				3 Orang	3 Orang	17.999.776,00	17.999.000,00	9.865.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun SebelumnyaDana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			18.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																	
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				3003 Unit Usaha	3003 Unit Usaha	99.999.897,00	99.702.000,00	66.141.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				20 Orang	240 Orang	5.604.853.868,00	4.504.906.341,00	3.710.085.341,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			3.105.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro				0,50 %	0,50 %	19.999.942,00	1.609.179.555,00	1.238.070.555,00							20.000.000,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Prosentase capaian atas peningkatan asset dan omset pelaku usaha mikro	-			5 %	5 %	19.999.942,00	1.609.179.555,00	1.609.179.555,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	UMKM		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																	
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				5 Unit Usaha	27 Unit Usaha	19.999.942,00	1.609.179.555,00	1.238.070.555,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.899.818.014,00	11.505.711.895,00	10.335.417.404,00							3.062.033.530,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							5.124.223.222,00	9.682.883.693,00	8.336.525.331,00							2.486.408.530,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan yang terdaftar dan memenuhi regulasi perijinan				34,78 %	34,78 %	104.984.525,00	104.761.625,00	65.282.625,00							105.000.000,00	
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah presentase pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha toko swalayan dan pusat perbelanjaan berijin Nomor Induk Berusaha	-			100 %	100 %	9.990.000,00	9.986.000,00	9.986.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Distributor, Agen, Grosir/Perkulakan dan Toko Swalayan		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.01	0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik																	
							Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				12 laporan	3 laporan	9.990.000,00	9.986.000,00	7.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase SKA yang diterbitkan dengan jumlah permohonan SKA yang masuk	-			100 %	100 %	94.994.525,00	94.775.625,00	94.775.625,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Surat Keterangan Asal		95.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	2.07	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				12 Dokumen	12 Dokumen	94.994.525,00	94.775.625,00	57.982.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			95.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
10	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan				100 %	100 %	2.487.130.730,00	7.795.583.435,00	7.079.782.076,00							887.608.530,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	-			3 Unit	3 Unit	1.187.492.809,00	5.036.960.657,00	5.036.960.657,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Sarana Dan Prasarana Pasar		787.608.530,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	3 Unit	1.087.496.409,00	4.538.417.272,00	4.787.393.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			687.608.530,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	3 Unit	99.996.400,00	498.543.385,00	479.515.385,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang mengikuti pembinaan	-			20 Orang	80 Orang	1.299.637.921,00	2.758.622.778,00	2.758.622.778,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Sarana Dan Prasarana Pasar		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				10 Dokumen	5 Dokumen	1.299.637.921,00	2.758.622.778,00	1.812.873.419,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
11	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan informasi dan barang kebutuhan pokok/barang penting				100 %	100 %	494.852.303,00	493.350.610,00	271.305.010,00							495.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan ketersediaan bahan pokok dan barang penting	-			12 Laporan	12 Laporan	79.967.000,00	78.491.000,00	78.491.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Stabilisasi Harga Barang Pokok		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																	
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				48 Laporan	48 Laporan	79.967.000,00	78.491.000,00	30.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jenis komoditi bahan pokok dan barang penting yang dipantau stabilitasnya	-			23 Jenis	23 Jenis	414.885.303,00	414.859.610,00	414.859.610,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Stabilisasi Harga Barang Pokok		415.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	414.885.303,00	414.859.610,00	240.617.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			415.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
12	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor migas dan non migas				0.5 %	0.5 %	1.317.376.240,00	415.005.000,00	214.439.000,00							428.500.000,00	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang)	-			20 Orang	4 Orang	1.317.376.240,00	415.005.000,00	415.005.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pelaku Usaha		428.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				9 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	179.566.000,00	178.716.000,00	116.852.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			180.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				9 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	193.093.740,00	193.067.000,00	82.933.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			193.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																	
							Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				6 Produk	6 Produk	944.716.500,00	43.222.000,00	14.654.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penerapan standardisasi dan perlindungan konsumen				80 %	80 %	470.300.000,00	625.358.894,00	568.494.491,00							320.300.000,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan pengawasan alat UTTP	-			80 %	80 %	470.300.000,00	625.358.894,00	625.358.894,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pemangku UTTP dan Masyarakat		320.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				900 Unit	900 Unit	200.000.000,00	355.294.491,00	314.745.532,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																	
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				60 Orang	60 Orang	270.300.000,00	270.064.403,00	253.748.959,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			120.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
14	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk dalam negeri yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran				100 %	100 %	249.579.424,00	248.824.129,00	137.222.129,00							250.000.000,00	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/ Kota	-			10 UMKM	2 UMKM	249.579.424,00	248.824.129,00	248.824.129,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	UMKM		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				10 UMKM	2 UMKM	249.579.424,00	248.824.129,00	137.222.129,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							775.594.792,00	1.822.828.202,00	1.998.892.073,00							575.625.000,00	
15	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Non MigasPersentase Penerapan Standarisasi Industri				1.87 %	150 %%	530.599.342,00	1.669.471.897,00	1.893.262.444,00							330.625.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	-			1 Dokumen	1 Dokumen	530.599.342,00	1.669.471.897,00	1.669.471.897,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	IKM		330.625.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	120.624.580,00	312.251,00	312.251,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			120.625.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	241.699.524,00	1.035.088.040,00	924.780.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			41.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	41.699.819,00	6.352.502,00	3.176.251,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnyadana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			41.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	101.600.000,00	435.150.697,00	847.989.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			101.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	4.994.000,00	110.505.509,00	56.844.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota																	
							- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.981.419,00	82.062.898,00	60.160.303,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
16	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki izin usaha				3 %	3 %	139.998.738,00	48.216.991,00	33.055.055,00							140.000.000,00	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang memenuhi persyaratan perizinan	-			3 %	3 %	139.998.738,00	48.216.991,00	48.216.991,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	IKM		140.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	69.998.940,00	40.644.740,00	27.963.055,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	69.999.798,00	7.572.251,00	5.092.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun SebelumnyaDana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
17	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINAS				0,83 %	2,5 %	104.996.712,00	105.139.314,00	72.574.574,00							105.000.000,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri yang memanfaatkan SIINas	-			5 IKM	5 IKM	104.996.712,00	105.139.314,00	105.139.314,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	IKM		105.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	79.996.992,00	104.827.063,00	72.262.323,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.720,00	312.251,00	312.251,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H												47.003.920.715,00	55.199.890.989,00	51.443.847.384,00							40.435.523.141,00	

XVIII. DINAS PENENANANAMAN MODALDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam melaksanakan Pembangunan di Daerah

Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) Tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta kebijakan Perangkat Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Perintah Daerah yang termuat didalam dokumen RPJMD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan Dokumen Perencanaan 1 (satu) Tahunan yang merupakan penjabaran atau Rencana Kerja Operasional dari dokumen RENSTRA Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan serta Pagu Anggaran dalam pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA PD. Maka dari itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah menyusun rancangan awal RENJA PD Tahun 2025 yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana operasional 1 (satu) Tahunan sebagai penjabaran RPJMD.

Untuk memudahkan teknis pelaksanaan RENSTRA PD dijabarkanlah ke dalam RENJA PD yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun berikutnya. Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang telah menyusun RENJA PD yang telah diselaraskan dengan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2025. Dokumen tersebut selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan dari hasil forum SKPD dan Musrenbang. RKPD Kota Bontang Tahun 2025 merupakan acuan dalam menyusun Rancangan Awal RENJA PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2025.

Dengan demikian program/kegiatannya diarahkan untuk mewujudkan target indikator capaian RKPD, Program dan Kegiatan prioritas yang disertai Pagu Indikatif dalam RENJA PD tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2025.

Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perancanaan lainnya, maka sub bagian perencanaan dan keuangan beserta bidang-bidang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang melakukan pembahasan yang mencakup:

I. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang; dan
J. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Kota Bontang dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko secara Elektronik;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitasi Penanaman Modal;
25. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019–2039;
26. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021 – 2026;
27. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2025.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2025 bertujuan :

5. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dpmptsp Tahun Anggaran 2025;
6. Menyediakan sarana pengendalian atas program dan kegiatan Tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang secara sistematis dan terorganisir;
7. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
8. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2025; dan
9. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dan dipelajari dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian secara ringkas tentang Rencana Kerja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2025.

1.4. Sistematikan Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA (II) TA. 2025

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang

sampai dengan Triwulan Kedua (II) dan Capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

,berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan, dimana pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan

menyesuaikan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Sasaran dan Prioritas Rencana Kerja TA. 2025

Menjelaskan tentang Sasaran dan Indikator beserta Target Perubahan IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang tahun 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dpmptsp TA. 2025

Menjelaskan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 beserta Pagu Anggaran Perubahannya.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPMPTSP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN ANGGARAN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dpmptsp sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka DPMPTSP mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan pencapaian Rencana Strategis adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang sudah merencanakan untuk melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan Pagu Anggaran Belanja Daerah Murni sebesar **Rp.36.662.437.968,00** *(Tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)* yang terdiri dari Anggaran Pendapatan sebesar **Rp.350.000.000,00** *(Tiga ratus lima puluh juta rupiah)* dan Anggaran Belanja Daerah sebesar **Rp. 36.312.437.968,00** *(Tiga puluh enam milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)* yang akan diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatan pada Triwulan Kedua (II) telah dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100% terutama untuk realisasi fisiknya. Kemudian dilakukan efisiensi APBD TA. 2025 sebesar **Rp. 5.277.338.332,*00*** *(Lima milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah),* sehingga Jumlah Pagu Anggaran Pergeseran 1 APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar **Rp. 31.035.099.636,00** *(Tiga Puluh satu milyar tiga puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).* Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD terkait dengan hal-hal apa saja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota.

Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya, namun untuk pencapaian kinerja tahun 2025 tidak memungkinkan optimalisasi pelayanan baik perijinan maupun

penanaman modal dengan anggaran yang ada, maka diharapkan pada tahun 2026 Anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang menyangkut pelayanan perizinan dan nonperizinan maupun penanaman modal.

Adapun Gambaran Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang sampai dengan Triwulan Kedua (II) Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening							Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (TA. 2024)		Target Kinerja dan Anggaran DPMPTSP Tahun Berjalan yang dievaluasi (TA. 2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TA. 2025 TW. 2)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra PD s/d 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja TA. 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I (Satu)		II (Dua)								
										K	(Rp.)	K	(Rp.)	Target	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	K	(Rp.)	
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		10 = (8) + (9)		11 = (6) + (10)		12 = (11)/(5) *100%		(13)
2							URUSAN																			
2	18						URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL				12.888.467.149,00		26.857.006.655,00		31.035.099.636,00		6.346.972.182,00		10.516.960.142,00		16.856.932.324,00		43.713.938.979,00		3,39		
2	18	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	10.976.194.899,00	100 %	15.895.103.365,00	100%	19.063.887.177,00	100%	4.302.281.234,00	100%	3.966.381.620,00	43,34 %	8.261.662.854,00	100%	24.156.766.219,00	100%	2,20	DPMPTSP
2	18	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	8	13.000.000,00		6.670.000,00		-		-		-		-		6.670.000,00	0	0,51	

2	18	01	2	01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.500.000,00	100	1.130.000,00	-	-		-		-		-		1.130.000,00	0	0,21	
2	18	01	2	01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	500.000,00	1	260.000,00	-	-		-		-		-		260.000,00	0	0,52	
2	18	01	2	01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	500.000,00	1	520.000,00	-	-		-		-		-		520.000,00	0	1,04	
2	18	01	2	01	0004		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	500.000,00	1	260.000,00	-	-		-		-		-		260.000,00	0	0,52	
2	18	01	2	01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	500.000,00	1	-	-	-		-		-		-		-	0	-	
2	18	01	2	01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.500.000,00	2	4.500.000,00	-	-		-		-		-		4.500.000,00	0	0,82	
2	**18**	**01**	**2**	**02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**1**	**7.841.078.349,00**		**6.918.186.640,00**		**8.694.575.643,00**	**1**	**1.801.568.517,00**	**1**	**2.163.108.955,00**		**3.964.677.472,00**		**10.882.864.112,00**	**0**	**1,39**	
2	18	01	2	02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	7.841.078.349,00	32	6.918.186.640,00	37	8.694.575.643,00		1.801.568.517,00		2.163.108.955,00		3.964.677.472,00		10.882.864.112,00	0	1,39	

2	**18**	**01**	**2**	**05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**2**	**179.357.414,00**		**78.458.553,00**		**1.039.700.000,00**	**2**	**390.500.000,00**	**2**	**174.950.000,00**		**558.450.000,00**		**636.908.553,00**	**0**	**3,55**	
2	18	01	2	05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	68	104.357.414,00	-		10	376.420.000,00	1	-	2	174.950.000,00	3	174.950.000,00	5	174.950.000,00	0,07	1,68	
2	18	01	2	05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	75.000.000,00	6	78.458.553,00	15	663.280.000,00	40	390.500.000,00	0	-	40	383.500.000,00	40	461.958.553,00	5,71	6,16	
2	**18**	**01**	**2**	**06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**6**	**425.000.000,00**		**6.802.999.238,00**		**4.795.415.122,00**	**6**	**534.335.756,00**	**6**	**1.183.057.220,00**		**1.717.392.976,00**	0	**8.520.392.214,00**	**0**	**20,05**	
2	18	01	2	06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	75.000.000,00	9	5.888.324.950,00	9	3.612.063.152,00	5	115.868.000,00	4	989.400.000,00	9	1.105.268.000,00	13	6.993.592.950,00	1,44	93,25	
2	18	01	2	06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	90.000.000,00	10	35.950.000,00	9	25.259.454,00	3	23.359.734,00	0	-	3	23.359.734,00	3	59.309.734,00	0,3	0,66	
2	18	01	2	06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	50.000.000,00	6	47.912.600,00	6	59.559.284,00	1	-	1	-	2	-	3	47.912.600,00	0,5	0,96	
2	18	01	2	06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	10.000.000,00	2	6.736.000,00	12	203.280.000,00	0	-	1	-	1	-	2	6.736.000,00	100	0,67	
2	18	01	2	06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	100.000.000,00	15	824.075.688,00	12	797.066.000,00	8	395.108.022,00	7	172.990.220,00	15	568.098.242,00	22	1.392.173.930,00	1,47	13,92	
2	18	01	2	06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	1	100.00	1	-	1	98.187	0	-	1	20.667	1	20.667	2	20.667	2	0,21	

										0.000,00				.232,00				.000,00		.000,00		.000,00			
2	**18**	**01**	**2**	**07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Unit**	**5**	**100.000.000,00**		**-**		**1.101.930.000,00**	**5**	**1.040.000.000,00**	**0**	**2.590.000,00**	0	**1.042.590.000,00**	0	**1.042.590.000,00**	**0**	**10,43**	
2	18	01	2	07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Roda 2)	Unit	5	100.000.000,00	3	-		1.101.930.000,00		1.040.000.000,00	0	2.590.000,00	0	1.042.590.000,00	0	1.042.590.000,00	0	10,43	
2	**18**	**01**	**2**	**08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**2.042.759.136,00**	100	**1.640.709.094,00**		**3.024.276.412,00**	**100**	**469.627.561,00**	**100**	**377.628.215,00**	0	**847.255.776,00**	0	**2.487.964.870,00**	**0**	**1,22**	
2	18	01	2	08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.930.000,00	12	12.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	0	-	12	5.000.000,00	12	17.000.000,00	1	2,45	
2	18	01	2	08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik yang disediakan	Laporan	12	470.400.000,00	12	385.512.012,00	12	1.305.375.332,00	3	86.911.480,00	3	79.127.407,00	6	166.038.887,00	9	551.550.899,00	0,75	1,17	
2	18	01	2	08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	17	1.565.429.136,00	19	1.243.197.082,00	22	1.713.901.080,00	19	377.716.081,00	15	298.500.808,00	34	676.216.889,00	49	1.919.413.971,00	2,88	1,23	
2	**18**	**01**	**2**	**09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Unit**	**48**	**375.000.000,00**		**448.079.840,00**		**407.990.000,00**	**22**	**66.249.400,00**	**22**	**65.047.230,00**	0	**131.296.630,00**	0	**579.376.470,00**	0	**1,55**	
2	18	01	2	09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	200.000.000,00	22	366.192.340,00	22	352.120.000,00	22	66.249.400,00	22	65.047.230,00	44	131.296.630,00	66	497.488.970,00	2,44	2,49	

							Dinas/Operasional atau Lapangan																	
2	18	01	2	09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	75.000.000,00	20	81.887.500,00	20	55.870.000,00	5	-	5	-	10	-	15	81.887.500,00	0,75	1,09	
2	18	01	2	09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diperbaiki	Unit	1	100.000.000,00	1	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
2	**18**	**02**					**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai Realisasi Investasi**		**4.680.000.000.000**	**382.454.450,00**	**2,7T**	**1.055.576.502,00**	**2.500.000.000.000**	**1.034.685.981.719.438**	**484.981.719.438**	**41.930.600,00**	**589.636.237.323**	**19.411.600,00**	**1.074.617.956.761**	**61.342.200,00**	**1.664.254.194.084**	**1.116.918.702,00**	**0,36**	**2,92**	**DPMPTSP**
2	18	02	2	01			**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun**	**Dokumen**	**1**	**262.454.450,00**		**100.498.100,00**		**430.310.968,00**	0	**10.306.000,00**	**0**	**4.602.400,00**	**0**	**14.908.400,00**	**0**	**115.406.500,00**	**0**	**0,44**	
2	18	02	2	01	0001		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	262.454.450,00	1	100.498.100,00	1	429.303.968,00	1	10.306.000,00	1	4.602.400,00	2	14.908.400,00	3	115.406.500,00	3	0,44	
2	18	02	2	01	0002		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

2	18	02	2	01	0003		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	1	-	0	-	1	1.007.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	
2	**18**	**02**	**2**	**02**			**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		**Dokumen**	**1**	**120.000.000,00**	**1**	**955.078.402,00**		**604.375.012,00**		**31.624.600,00**		**14.809.200,00**	**0**	**46.433.800,00**	**0**	**1.001.512.202,00**	**0**	**8,35**	
2	18	02	2	02	0001		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Perda	1	70.000.000,00	-	192.613.200,00	1	604.347.212,00	1	31.624.600,00	1	14.809.200,00	2	46.433.800,00	3	239.047.000,00	3	3,41	
2	18	02	2	02	0002		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000,00	1	762.465.202,00	1	24.000,00	0	-	0	-	0	-	0	762.465.202,00	0	15,25	
2	18	02	2	02	0003		Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Data	1	-	-	-	1	3.800,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	
2	**18**	**03**					**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Peningkatan Jumlah Investor**		**2**	**546.363.500,00**	**189**	**4.154.674.224,00**		**6.317.242.100,00**	**198**	**-**	**206**	**5.321.800.000,00**	0	**5.321.800.000,00**	0	**9.476.474.224,00**	**0**	**17,34**	**DPMPTSP**
2	18	03	2	01			**Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota**			**546.363.500,00**		**4.154.674.224,00**		**6.317.242.100,00**		**-**		**5.321.800.000,00**	0	**5.321.800.000,00**	0	**9.476.474.224,00**	**#DIV/0!**	**17,34**	

2	18	03	2	01	0001		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	147.518.145,00	-	598.386.192,00	1	2.864.000,00		-		-	0	-	0	598.386.192,00	0	4,06	
2	18	03	2	01	0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	398.845.355,00	6	3.556.288.032,00	2	6.314.378.100,00		-		5.321.800.000,00	0	5.321.800.000,00	0	8.878.088.032,00	0	22,26	
2	**18**	**04**					**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Nilai**	**91.30**	**437.090.800,00**	**92.01**	**1.011.604.756,00**		**1.099.797.886,00**	**93.53**	**42.001.894,00**	**93.18**	**517.895.700,00**	0	**559.897.594,00**	0	**1.571.502.350,00**	#VALUE!	**3,60**	**DPMPTSP**
2	18	04	2	01			**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**			**437.090.800,00**		**1.011.604.756,00**		**1.099.797.886,00**		**42.001.894,00**		**517.895.700,00**	0	**559.897.594,00**	0	**1.571.502.350,00**	**#DIV/0!**	**3,60**	
2	18	04	2	01	0001		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	125	125.663.605,00	100	768.296.033,00	200	298.069.000,00	100	8.426.600,00	100	155.157.100,00	200	163.583.700,00	300	931.879.733,00	2,40	7,42	
2	18	04	2	01	0002		Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	30	142.500.000,00	10	107.076.633,00	10	653.189.102,00	25	16.848.994,00	25	274.538.600,00	50	291.387.594,00	75	398.464.227,00	2,50	2,80	

2	18	04	2	01	0003		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	20	168.927.195,00	17	136.232.090,00	20	147.532.784,00	25	16.726.300,00	30	88.200.000,00	55	104.926.300,00	85	241.158.390,00	4,25	1,43	
2	18	04	2	01	0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Usaha	40	-	-		1	1.007.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	#DIV/0!	
2	**18**	**05**					**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal**		**58%**	**218.545.400,00**	**36,87%**	**808.029.530,00**		**609.875.867,00**	**38,89**	**17.533.300,00**	**43,69**	**29.133.600,00**	0	**46.666.900,00**	0	**854.696.430,00**	**0**	**3,91**	**DPMPTSP**
2	18	05	2	01			**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang ada**			**218.545.400,00**		**808.029.530,00**		**609.875.867,00**		**17.533.300,00**		**29.133.600,00**	0	**46.666.900,00**	0	**854.696.430,00**	#DIV/0!	**3,91**	
2	18	05	2	01	0001		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Pelaku Usaha	40	75.797.700,00	24	114.552.100,00	10	38.115.501,00	5	3.613.300,00	0	6.516.000,00	5	10.129.300,00	5	124.681.400,00	0,125	1,64	
2	18	05	2	01	0002		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	300	96.397.700,00	280	563.517.630,00	100	319.210.558,00	0	13.920.000,00	0	19.215.200,00	0	33.135.200,00	0	596.652.830,00	0	6,19	

2	18	05	2	01	0003		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	40	46.350.000,00	30	129.959.800,00	5	252.549.808,00	7	-	6	3.402.400,00	13	3.402.400,00	19	133.362.200,00	0,48	2,88	
2	**18**	**06**					**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Ketersediaan Data yang diolah/disajikan**		**100 %**	**327.818.100,00**	**100 %**	**3.932.018.278,00**	**100%**	**2.909.610.626,00**	**100%**	**1.943.225.154,00**	**100%**	**662.337.622,00**	**100%**	**2.605.562.776,00**	**100%**	**6.537.581.054,00**	**100%**	**19,94**	**DPMPTSP**
2	**18**	**06**	**2**	**01**			**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah data perizinan dan non perizinan yang diolah/disajikan**	Data Izin	**560**	**327.818.100,00**	**1269**	**3.932.018.278,00**	**570**	**2.909.610.626,00**	**262**	**1.943.225.154,00**	**128**	**662.337.622,00**	**390**	**2.605.562.776,00**	**518**	**6.537.581.054,00**	**0,93**	**19,94**	
2	18	06	2	01	0001		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	327.818.100,00	1	3.932.018.278,00	1	2.909.610.626,00	1	1.943.225.154,00	1	662.337.622,00	2	2.605.562.776,00	3	6.537.581.054,00	3	19,94	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Durasi penyampaian LKPM lebih lama dari tanggal 1 sampai dengan 12 Juli 2025 dan Pemberian Sanksi bagi Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan LKPM Nya.																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Sebagian besar pelaku usaha belum mengetahui tentang prosedur, tata cara dan sanksi terkait penyampaian LKPM																									

Tindak Lanjut yang diperlukan pada Triwulan Berikutnya *) : Pembinaan Penanaman Modal melalui Sosialisasi LKPM, Bimtek LKPM dan Fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi pelaku usaha; Peningkatan pengawasan Penanaman Modal; dan Membuka Layanan Konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
Tindak Lanjut yang diperlukan pada Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berikutnya **) : Melakukan Kegiatan Pembinaan, Sosialisasi dan Bimtek LKPM bagi Pelaku Usaha

Gambaran Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Sampai dengan Semester 1 Tahun anggaran 2025, dapat dijelaskan dalam Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Semester 1 Tahun 2025

Pagu Anggaran	Realisasi					
	Keuangan				Fisik	
	Target		Realisasi		Target	Realisasi
(Rp.)	*(Rp.)*	*(%)*	*(Rp.)*	*(%)*	*(%)*	*(%)*
31.035.099.636,00	20.204.703.825,00	65,10	16.856.932.324,00	54,32	65,80	69,10

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Dpmptsp Bulan Juni Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut diatas, Realisasi keuangan sampai dengan semester pertama 54,32% atau Rp. 16.856.932.324,- dari Total Anggaran sebesar Rp. 31.035.099.636,-. Adapun target realisasi keuangan pada semester I adalah 65,10%. Dengan demikian ada **deviasi capaian relaisasi keuangan sebesar -10,78%,** sedangkan untuk capaian realisasi fisik sampai dengan semester pertama sebesar 69,10 % dengan target 65,80 %, ada **deviasi capaian relaisasi fisik sebesar 3,30 %**

Dari hasil monitoring realiasasi fisik dan keuangan sampai dengan semester I Tahun 2025, dapat disamapaikan dalam tabel 2.3 tentang Data Monitoring Realisasi Fisik dan Keuangan Sub Kegiatan Dpmptsp per 30 Juni 2025.

Tabel 2.3

Data Monitoring dan Evaluasi Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dpmptsp

Tahun Anggaran 2025 (Semester I)

Kode Rekening	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Hasil Efisiensi	Keuangan			Fisik	Kendala/Hambatan	Solusi	Waktu Penyelesaian	Bidang Penanggungjawab
			Realisasi		Sisa Anggaran	Realisasi				
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%				
2.18.02	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**19.063.887.177,00**	**8.261.662.854,00**	**43,34**	**10.802.224.323,00**	**367,92**				**BIDANG SEKERTARIAT**
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**0**	**-**	**0**				
2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan pengumpulan data statistik Sektoral Daerah	-	-	0	-	0	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0	-	0	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	-	0	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	-	-	0	-	0	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.694.575.643,00**	**3.964.677.472,00**	**45,60**	**4.729.898.171,00**	**52,43**				
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.694.575.643,00	3.964.677.472,00	45,60	4.729.898.171,00	52,43				
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	0	-	0	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	-	-	0	-	0	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		

2.18.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**0**	**-**	**0**				
2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	0	-	0	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.039.700.000,00**	**558.450.000,00**	**53,71**	**481.250.000,00**	**80,85**				
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	376.420.000,00	174.950.000,00	46,48	201.470.000,00	49,98				
2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	-	-	-	-	-	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	663.280.000,00	383.500.000,00	57,82	279.780.000,00	61,74				
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.795.415.122,00**	**1.717.392.976,00**	**35,81**	**3.078.022.146,00**	**75,00**				
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	3.612.063.152,00	1.105.268.000,00	30,60	2.506.795.152,00	65,84				
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.259.454,00	23.359.734,00	92,48	1.899.720,00	100,00				
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.559.284,00	-	-	59.559.284,00	48,58				
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	203.280.000,00	-	-	203.280.000,00	75,00				
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	797.066.000,00	568.098.242,00	71,27	228.967.758,00	75,32				
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	98.187.232,00	20.667.000,00	21,05	77.520.232,00	93,83				
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.101.930.000,00**	**1.042.590.000,00**	**94,61**	**59.340.000,00**	**100,00**				

2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	Efisiensi APBD 2025			
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.101.930.000,00	1.042.590.000,00	94,61	59.340.000,00	100,00				
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.024.276.412,00**	**847.255.776,00**	**28,02**	**2.177.020.636,00**	**50,00**				
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-	100,00				
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.305.375.332,00	166.038.887,00	12,72	1.139.336.445,00	46,88				
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.713.901.080,00	676.216.889,00	39,45	1.037.684.191,00	55,93				
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah**	**407.990.000,00**	**131.296.630,00**	**32,18**	**276.693.370,00**	**77,16**				
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	352.120.000,00	131.296.630,00	37,29	220.823.370,00	48,43	Efisiensi APBD 2025			
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	-	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.870.000,00	-	-	55.870.000,00	57,45				
2,18.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		

2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**1.034.685.980,00**	**61.342.200,00**	**5,93**	**973.343.780,00**	**73,33**				**BIDANG PENANAMAN MODAL**
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**430.310.968,00**	**14.908.400,00**	**3,46**	**415.402.568,00**	**73,33**				
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	429.303.968,00	14.908.400,00	3,47	414.395.568,00	73,33				
2.18.02.2.01.0003	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota	1.007.000,00	-	-	1.007.000,00	-	Pagu Anggaran minim (kecil)	Akan diakomodir di APBD P 2025		
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharminisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	-	-	-	-	-	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**604.375.012,00**	**46.433.800,00**	**7,68**	**557.941.212,00**	**37,52**				
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	604.347.212,00	46.433.800,00	7,68	557.913.412,00	37,52				
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	3.800,00	-	-	3.800,00	-	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	24.000,00	-	-	24.000,00	-	Kegiatan sudah terlaksana di TA. 2024			
2.18.02.4.03	**Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**				
2.18.02.4.03.0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	0	-	0	-	0	Kegiatan belum berjalan			

2.18.02.4.04	**Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
2.18.02.4.04.0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	0	-	0	-		Kegiatan belum berjalan			
2.18.02.4.06	**Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
2.18.02.4.06.0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	0	-	0	-	0	Kegiatan belum berjalan			
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**6.317.242.100,00**	**5.321.800.000,00**	**84,24**	**995.442.100,00**	**89,50**				**BIDANG PENANAMAN MODAL**
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**6.317.242.100,00**	**5.321.800.000,00**	**84,24**	**995.442.100,00**	**89,50**				
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	6.314.378.100,00	5.321.800.000,00	84,28	992.578.100,00	89,50				
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.864.000,00	-	-	2.864.000,00	-	Pagu Anggaran minim (kecil)	Akan diakomodir di APBD P 2025		
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**1.099.797.886,00**	**559.897.594,00**	**50,91**	**539.900.292,00**	**100,00**				**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.099.797.886,00**	**559.897.594,00**	**50,91**	**539.900.292,00**	**100,00**				

2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	1.007.000,00	-	-	1.007.000,00	-	Kegiatan belum berjalan	Baru akan dilaksanakan di TA. 2026		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	298.069.000,00	163.583.700,00	54,88	134.485.300,00	97,75				
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	147.532.784,00	104.926.300,00	71,12	42.606.484,00	83,35				
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	653.189.102,00	291.387.594,00	44,61	361.801.508,00	78,61				
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**609.875.867,00**	**46.666.900,00**	**7,65**	**563.208.967,00**	**92,07**				**BIDANG PENANAMAN MODAL**
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**609.875.867,00**	**46.666.900,00**	**7,65**	**563.208.967,00**	**92,07**				
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	38.115.501,00	10.129.300,00	26,58	27.986.201,00	29,05				
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	319.210.558,00	33.135.200,00	10,38	286.075.358,00	11,19				
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	252.549.808,00	3.402.400,00	1,35	249.147.408,00	51,83				
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**2.909.610.626,00**	**2.605.562.776,00**	**89,55**	**304.047.850,00**	**97,38**				**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.909.610.626,00**	**2.605.562.776,00**	**89,55**	**304.047.850,00**	**97,38**				

2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.909.610.626,00	2.605.562.776,00	89,55	304.047.850,00	97,38				
TOTAL		**31.035.099.636,00**	**16.856.932.324,00**		**14.178.167.312,00**	**69,10**				

Sumber Data : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dpmptsp Semester Pertama Tahun 2025 melalui Aplikasi eSMART

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas, dapat diuraian Hasil Pelaksanaan program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang yang sudah terlaksana Sampai dengan Triwulan Kedua (II) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja per sasaran program Perangkat Daerah Tahun 2025, bahwa pagu anggaran sebesar **Rp. 19.063.887.177,00** sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar **Rp. 8.261.662.854,00** dengan prosentase capaian sebesar **43,34%.** Keberhasilan program internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dalam memberikan pelayanan internal OPD didukung dengan oleh Kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai dari anggaran APBD. Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan.

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Realisasi Investasi. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal. Adapun Pagu Anggaran Pergeseran 1 APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 1.034.685.980,00** sampai dengan Triwulan Kedua (II) sudah terealisasi sebesar **Rp. 61.342.200,00** dengan prosentase capaian sebesar **5,93%.**

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kegiatan fasilitasi pendampingan proses perizinan berusaha OSS, dilaksanakan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha OSS dan pemantauan perizinan berusaha OSS RBA, sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Dokumen Perda Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang masih dalam proses pembahasan dengan DPRD Kota Bontang.

C. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan dengan indikator, yaitu Peningkatan Jumlah Investor PMDN dan PMA, dengan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan Adapun jumlah Pagu Anggaran Pergeseran 1 APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 6.317.242.100,00** sampai dengan Triwulan Kedua (II) sudah terealisasi sebesar **Rp. 5.321.800.000,00** dengan prosentase capaian sebesar **84,24%.**

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Optimalisasi Promosi Penanaman Modal melalui berbagai metode promosi serta adanya Efektifitas layanan melalui Mall Pelayanan Publik dan Digitalisasi Perizinan melalui OSS dan Perizinan Digital (PD), Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Gambaran Kawasan Industri Kota Bontang belum diperbaharui termasuk Kawasan Industri Bontang Lestari yang baru dimulai.

D. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Prosentase Ketersediaan Data Perizinan dan Non Perizinan. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Target Nilai IKM

yang akan dicapai pada Tahun 2025 yaitu **92.01** dengan capaian realisasi Nilai IKM sampai dengan Semester I 2025 sebesar **92.18**

Program ini dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Total Pagu Anggaran Pergeseran 1 APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 1.099.797.886,00** sampai dengan Triwulan Kedua (II) sudah terealisasi sebesar **Rp. 559.897.594,00** dengan prosentase capaian sebesar **50,91%.**

Adapun faktor pendorong keberhasilan program ini adalah sarana pengaduan sudah tersedia melalui surat langsung ke OPD, email, WA, Kotak Pengaduan, sehingga masarakat/pemohon dapat melakukan konsultasi pengaduan melalui berbagai sarana yang telah disediakan. Disamping itu meningkatnya pengguna Aplikasi Layanan Perizinan Digital serta Kegiatan Sosialisasi yang sudah berjalan dengan efektif. Sedangkan faktor penghambat adalah belum adanya Anggaran untuk penilaian SKM Mandiri.

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dengan 5 (enam) indikator sasaran, yaitu Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN), Jumlah nilai investasi berskala asing (PMA), Jumlah nilai investasi PMDN dan PMA, Nilai realisasi investasi PMDN dan PMA, Serta Prosentase Ketaatan Perusahaan terhadap Aturan Penanaman Modal.

Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penanaman Modal dengan Total Pagu Anggaran Pergeseran 1 APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 609.875.867,00** dengan capaian realisasi sampai dengan Triwulan Kedua (II) sebesar **Rp. 46.666.900,00** dengan prosentase capaian sebesar **7,65%.** Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya koordinasi internal dan bidang tentang pelaporan LKPM, diselenggarakannya kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat tentang Tata Cara pengisian Form LKPM melalui Aplikasi OSS, serta adanya pendampingan, pengawasan dan pembinaan kepada pihak investor. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dilapangan dalam pelaksanaan program ini adalah Menu/Konten yang ada pada Aplikasi OSS untuk menu pelaporan LKPM UMK sedang dalam pengembangan oleh Kementerian Investasi (BKPM), sehingga Pelaku Usaha UMK nilai investasi belum masuk rilis BKPM dan berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian LKPM oleh Pelaku Usaha.

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Prosentase Ketersediaan Data Perizinan dan Nonperizinan. Program ini dilaksanakan oleh Kelompok Subtansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan. Target program pada Tahun 2025 adalah 100% dengan Jumlah izin terbit sebanyak 570 izin.

Jumlah Pagu Anggaran Pergeseran 1 APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 2.909.610.626,00** sampai dengan Triwulan Kedua (II) sudah terealisasi sebesar **Rp. 2.605.562.776,00** dengan prosentase capaian sebesar **89,55%.**

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah adanya kebutuhan akan sistem pengelolaan arsip, proses pencarian arsip perizinan yang membutuhkan waktu cukup lama dan adanya tujuan pelayanan lebih maksimal dan mempercepat kinerja. Sedangkan faktor penghambat yang

masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah masih menunggu proses koordinasi instansi terkait, dikarenakan adanya sistem yang belum terintegrasi menunggu tindak lanjut dari pembagian kewenangan antara provinsi dan Pemerintah Kota dan mulai Tahun 2023 sesuai rekomendasi KPK untuk pengembangan sistem informasi anggaran dipindahkan ke Kominfo tetapi pada pelaksanannya tetap di DPMPTSP sehingga masih menunggu koordinasi lebih lanjut terkait tugas dan kewenangannya. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

A. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dpmptsp

Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standard yang telah ditetapkan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu digunakan Standar Pelayanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dapat juga dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu

Tahun Anggaran 2021 s/d 2025 (Triwulan II)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	*) 2025 (s/d TW.2)	2021	2022	2023	2024	2025 (TW.2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	AspekPelayanan Umum																		
A	FokusLayananUrusan Wajib Non Dasar																		
	Penanaman Modal																		
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA	Jumlah	✓		91	97	102	107	117	12	55	285	189	**206 (Nilai s/d TW.2)**	13,19%	56,70%	279,41%	185,98%	176,06%
2.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN (dalam Rupiah)	Nilai	✓		1.641.909.000.000	1.724.004.000.000	6.048.832.075.0000	6.653.715.282.500	5.853.576.158.851	896.767.211.699	5.498.938.256.441	8.001.159.248.456	6.638.006.941.600	**1.053.542.597.618**	54,62%	318,96%	132,28%	99,76%	17,99%

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	*) 2025 (s/d TW.2)	2021	2022	2023	2024	2025 (TW.2)
3.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMA (dalam Rupiah)	Nilai	✓		3.413.880.000.000	3.630.089.000.000	3.680.029.921.000	4.048.032.913.000	4.020.299.713.481	497.789.935.831	184.703.277.631	898.950.931.747	937.645.646.199	**21.075.359.143**	14,58%	5,09%	24,43%	23,16%	0,52%
4.	Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA (dalam Rupiah)	Nilai	✓		4.149.796.000.000	4.150.000.000.000	2.090.320.580.102	2.299.352.638.113	2.500.000.000.000	1.394.557.147.530	1.900.291.436.457	2.427.547.315.302	2.710.576.684.007	**1.074.617.956.761**	33,61%	45,79%	116,13%	117,88%	42,98%
5.	Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	Persen	✓		35,34	37,50	44,44	50	55	0	55	87,65	36,87	**43,69 (Nilai TW.2)**	0	146,66%	197,23%	73,74%	79,43%
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	✓		86.30	87.50	88.31	89.30	90.30	81.12	87.40	87.57	92.01	**93.18 (Nilai TW.2)**	94,00%	99,89%	99,16%	103,03%	103,18%

Sumber Data : Rencana Staregis DPMPTSP Kota Bontang Tahun 2021 s/d 2026
*Keterangan : *) Nilai Realisasi sampai dengan semester 1 (1 Januari s/d 30 Juni 2025)*

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, bahwa Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pada indikator Sasaran 1 terlihat ada penurunan jumlah investor PMDN dan PMA sebesar **30,17%** dari Tahun 2024 sebanyak 199 dan Tahun 2023 sebanyak 285, ini diperoleh berdasarkan data jumlah investor skala menengah dan besar Non UMK dari bulan Januari s/d Desember 2023 dan 2024;
2) Pada Indikator Sasaran 2 untuk Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN mengalami penurunan drastis sebesar **17,03%** dengan Capaian Nilai Investasi PMDN pada Tahun 2024 sebesar **Rp 6.638.006.941.600,00** sedangkan Capaian Nilai Investasi PMDN pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 8.001.159.248.456,00** dari Target Investasi PMDN yang sudah ditetapkan sebesar **Rp. 6.048.832.082.085,10** ini diperoleh berdasarkan Nilai Realisasi Investasi PMDN Status bulan Januari s/d Desember 2024 data KBLI dari Aplikasi OSS RBA;
3) Pada Indikator Sasaran 3 terlihat Capaian Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan data Nilai Investasi OSS RBA mengalami peningkatan sebesar **4,30%** dari Tahun 2023, dimana perolehan Nilai Investasi PMA pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 937.645.646.199,00** sedangkan Capaian Nilai Investasi PMA pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 898.950.931.747,00**, ini diperoleh berdasarkan Data Capaian Nilai Investasi PMA Status bulan Januari s/d Desember 2023 dan 2024 Data KBLI dari Aplikasi OSS RBA;
4) Pada Indikator Sasaran 4 terlihat Capaian Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar **12,97%** dari Tahun 2023, dimana Capaian Nilai Realisasi Investasi pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 2.710.576.684.007,00** dan Tahun 2023 yang hanya mencapai Nilai Realisasi Investasi sebesar **Rp.2.399.291.197.875,00**, hal ini diperoleh berdasarkan data dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh Pelaku Usaha Per Triwulan;
5) Pada Indikator Sasaran 7 terlihat juga adanya peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **5,07%** dari Tahun 2023 dengan perolehan senilai **87.57** meningkat pada Tahun 2024 senilai **92.01** dari Target **89.30,** ini diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian responden terhadap 34 jenis pelayanan di DPMPTSP.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah DPMPTSP

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengadakan perubahan bentuk layanan kepada masyarakat dengan diterapkannya layanan perizinan satu pintu serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.

Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana penunjang. Adapun isu - isu penting yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu Kota Bontang, yaitu :

1) Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus serta bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bidang Perencanaan, sehingga dapat menghasilkan Aparatur perencanaan yang kreatif dan inovatif;
2) Menerapkan *Right Man on the Right Place* dalam penempatan/perekrutan aparatur. Hal ini berdampak pada ketepatan dan keakuratan perencanaan, mengingat aparatur yang dimiliki lebih responsif terhadap perkembangan kebijakan provinsi dan nasional serta menghasilkan aparatur perencanaan yang akuntabel dan transparan;
3) Mengembangkan teknologi informasi sebagai salah satu media layanan di DPMPTSP serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan; serta
4) Optimalisasi atas perlengkapan dan peralatan yang memadai guna untuk memenuhi standar kelayakan dalam bekerja.

Adapun Kegiatan Strategis Tahun 2025 yang berkaitan dengan Prioritas Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yaitu :

1) Pameran Promosi Investasi
2) Penyusunan Regulasi terkait RUPM Tahun 2025 - 2030;
3) Pembuatan Website Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID);
4) Penyusunan Pra FS IPRO (Investment Project Ready to Offer);
5) Penyusunan Naskah Penjelas dan Perwali Mall Pelayanan Publik (MPP);
6) Penyusunan Naskah Penjelas dan Perwali Tentang Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
7) Penetapan Kawasan Peruntukan Industri Bontang Lestari;
8) Pelatihan Promosi Penanaman Modal;
9) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
10) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
11) Monitoring dan Pengawasan Pemantauan Perizinan;
12) Sarana dan Prasarana MPP;
13) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Forum Konsultasi Publik (FKP); dan Reviu Standar Pelayanan;
14) Pengembangan SDM dan Pengembangan Aplikasi Digital;
15) Penyusunan Regulasi terkait Perizinan; dan
16) Sosialisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dari 16 (enam belas) Usulan Kegiatan Prioritas pembangunan tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang akan berupaya untuk menindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan program-program kegiatan yang mengarah khususnya menciptakan iklim investasi dan nilai realisasi investasi yang kondusif sesuai tugas dan fungsi.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan dan mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat maka dihimpun usulan-usulan kerja dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik.

Kondisi diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam membantu Walikota Bontang terkait Pelayanan Publik dan Investasi serta Pengendalian, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.
Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

<u>Bidang Penanaman Modal :</u>

1. Penanaman Modal / Investor yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Online Submission (OSS) belum semua melaporkan realisasi investasinya;
2. Ada beberapa perusahaan yang belum menyesuaikan dengan sistem OSS RBA, sehingga nilai realisasi investasi tidak terlihat;
3. Adanya kesalahan dalam proses pengisian Form LKPM, sehingga laporan yang disampaikan perlu ada perbaikan;
4. Aplikasi yang digunakan untuk mengakses LKPM saat ini masih menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat (BKPM);
5. Pelaku usaha belum menyampaikan LKPM, karena ketidakpatuhan pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian LKPM secara berkala;
6. Penyusunan laporan atas kegiatan pemberian insentif dan kemudahan berusaha belum terlaksana karena dasar hukumnya masih dalam proses pembahasan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
7. Perizinan berusaha melalui Aplikasi OSS RBA masih dirasa sulit bagi masyarakat terutama pelaku usaha mikro;
8. Optimalisasi pelayanan publik masih terhambat dengan adanya pergantian sistem aplikasi dari OSS ke OSS RBA;
9. Minimnya Anggaran untuk mendukung kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan kepada Pelaku Usaha; dan
10. Kurangnya dukungan APBD yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Organisasi yang melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.

<u>Bidang Pelayanan Perizinan :</u>

1) Adanya kebijakan pelimpahan kewenangan tentang pembangunan dan pengembangan sistem informasi perizinan dan non perizinan;
2) Belum adanya Surat Keputusan atas Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tingkat Kota;
3) Belum ada Anggaran untuk penilaian Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh DPMPTSP Per Triwulan;
4) Adanya peralihan sistem OSS ke OSS RBA, dimana kurangnya sosialisasi ke pelayanan perizinan dan masyarakat pengguna;
5) Adanya banyak sistem perizinan dan nonperizinan yang baru di Kementerian/Lembaga, Contohnya : simbg.go.id
6) Sistem perizinan online dari pusat banyak mengalami kendala teknis dan masih banyak perbaikan;
7) Banyaknya regulasi baru, sehingga harus dipenuhi oleh masyarakat yang dianggap membebani; serta
8) Belum terbitnya Peraturan Walikota Bontang tentang Perizinan dan Nonperizinan terkait Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan urusan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun.

Hal tersebut menjadi modal penting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dalam menghadapi tugas-tugas berat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah sebagai berikut :

1) Pengembangan Mall Pelayanan Publik Kota Bontang melalui kerjasama dengan instansi, lembaga, BUMN, BUMD dan pihak swasta yang memberikan pelayanan publik bagi masyarakat dan pengenbangan Sistem Informasi MPP Digital masih terkendala anggaran;
2) Penyusunan Peraturan Walikota Bontang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha belum disahkan;
3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan,

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha;

4) Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal, penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan, serta penyusunan Master Plan Kawasan Peruntukan Industri Kota Bontang;
5) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan inspeksi Pengawasan Perizinan Berusaha secara terintegrasi dengan melibatkan Perangkat Daerah Teknis untuk memastikan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha;
6) Integrasi sistem dan data antar Perangkat Daerah Kota Bontang yang tergabung dalam Print From Home dan Mal Pelayanan Publik;
7) Adanya alih Media Arsip Fisik IMB menjadi Arsip Digital; serta
8) Pengembangan sistem yang sudah berjalan agar memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan :

1. Selalu melakukan koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder terkait;
2. Adanya dukungan anggaran APBD untuk mendukung kelancaran proses kegiatan agar tepat sasaran;
3. Adanya komitmen SDM yang tersedia untuk mampu melaksanakan tugasnya dengan baik;
4. Terbentuknya Mal Pelayanan Publik sebagai pusat pelayanan administrasi publik di Kota Bontang; serta
5. Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun dunia usaha / mitra kerja untuk berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, dapat diformulasikan isu - isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, sebagai berikut :

1) Memberikan pelayanan prima di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat di Kota Bontang;
2) Meningkatkan upaya pemberian informasi serta penanganan konsultasi dan pengaduan terhadap izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang;
3) Melakukan kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, sehingga diharapkan semua izin sudah ada regulasinya dan untuk memacu perkembangan potensi investasi melalui kemudahan berusaha; Serta

4) Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait promosi kegiatan festival, kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kota Bontang.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2025

3.1 Sasaran dan Prioritas Renja Tahun 2025

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Dpmptsp Tahun 2021-2026, sasaran strategis Dpmptsp Kota Bontang beserta indikator kinerja dan target tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya Nilai Investasi (PMDN/PMA)	1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) (dalam rupiah	Rp. 5.853.576.158.851,00
		2. Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMA) (dalam rupiah)	Rp. 4.020.299.713.481,00
		3. Nilai Realisasi Investasi (PMDN) dan (PMA)	Rp. 2.500.000.000.000,00
		4. Jumlah Investor PMDN dan PMA	189
		5. Prosentase Ketaatan Perusahaan terhadap Aturan Penanaman Modal	36,87%
2	Meningkatnya Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92.10

Sumber: SK Penetapan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2021-2026

Berdasarkan sasaran tersebut, prioritas program ditetapkan sebagai berikut:

1) Program pengembangan iklim penanaman modal.
2) Program promosi penanaman modal.
3) Program pelayanan penanaman modal.
4) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
5) Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal,

3. 2 Perubahan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dpmptsp Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dpmptsp Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, hasil analisis isu-isu strategis, dan mengacu pada sasaran dan prioritas Renja Tahun 2025, maka program dan kegiatan pada perubahan Renja Dpmptsp Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Seluruh program yang telah direncanakan dalam Renja 2025 sebanyak 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan akan tetap dilaksanakan pada Perubahan Renja 2025.
2) Adanya Perkiraan Penambahan Pagu Anggaran Perubahan sebesar **Rp.5.384.912.172,00** atau **14,83%** dari Pagu Anggaran efisiensi belanja APBD sebesar **Rp.31.035.099.636,00** sehingga Total Pagu Anggaran perubahan menjadi **Rp. 36.420.011.808,00**, adapaun rincian penambahannya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Data Pagu Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Rencana Kerja Perubahan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tolok Ukur				Pagu Anggaran			Alasan Penambahan dan Pengurangan Anggaran	Bidang Penanggungjawab
		Indikator Program,Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Murni	Perubahan	Pagu Pergeseran Anggaran Hasil Efisiensi	Perubahan	Bertambah/Berkurang		
				(K)	(K)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9) = (8) - (7)*	*(10)*	*(11)*
2.18.02	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**		**19.063.887.177,00**	**20.104.118.949,00**	**1.040.231.772,00**		**BIDANG SEKERTARIAT**
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Dokumen**			**-**	**-**	-		
2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan pengumpulan data statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0		-	-	-		
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0		-	-	-		
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2		-	-	-		
2.18.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	0		-	-	-		
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah**	**Dokumen**			**8.694.575.643,00**	**8.001.704.483,00**	**- 692.871.160,00**		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	43		8.694.575.643,00	8.001.704.483,00	- 692.871.160,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu	

									APBD Perubahan 2025	
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	1		-	-		
2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0		-	-	-		
2.18.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0**		**-**	**-**	-		
2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah	0		-	-	-		
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**			**1.039.700.000,00**	**1.090.550.000,00**	**50.850.000,00**		
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	48 paket		376.420.000,00	376.420.000,00	-		
2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0		-	-	-		
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	15 orang		663.280.000,00	714.130.000,00	50.850.000,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**			**4.795.415.122,00**	**6.224.644.221,00**	**1.429.229.099,00**		
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0		-	-	-		
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9 paket		3.612.063.152,00	5.045.268.251,00	1.433.205.099,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9 paket		25.259.454,00	25.259.454,00	-		
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6 paket		59.559.284,00	59.559.284,00	-		

2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 dok		203.280.000,00	199.500.000,00	- 3.780.000,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 laporan		797.066.000,00	796.870.000,00	- 196.000,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1 dokumen		98.187.232,00	98.187.232,00	-		
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**			**1.101.930.000,00**	**1.101.930.000,00**	**-**		
2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0		-	-	-		
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6 unit		1.101.930.000,00	1.101.930.000,00	-		
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0		-	-	-		
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		-	-	-		
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**			**3.024.276.412,00**	**3.277.300.245,00**	**253.023.833,00**		
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 laporan		5.000.000,00	8.780.000,00	3.780.000,00		
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 laporan		1.305.375.332,00	1.554.619.165,00	249.243.833,00	Adanya penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16 laporan		1.713.901.080,00	1.713.901.080,00	-		

2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**			**407.990.000,00**	**407.990.000,00**	**-**		
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	22 unit		352.120.000,00	352.120.000,00	-		
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0		-	-	-		
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0		-	-	-		
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20 unit		55.870.000,00	55.870.000,00	-		
2,18.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0		-	-	-		
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0		-	-	-		
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Realisasi Total yang dicapai terhadap Target Realisasi Investasi**	**%**	**100**		**1.034.685.980,00**	**2.707.903.782,00**	**1.673.217.802,00**		**BIDANG PENANAMAN MODAL**
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah regulasi/kebijakan penanaman modal**	**Regulasi/kebijakan**	**1**		**430.310.968,00**	**829.311.668,00**	**399.000.700,00**		
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2		429.303.968,00	828.304.668,00	399.000.700,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	1		1.007.000,00	1.007.000,00	-		
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharminisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen	0		-	-	-		

2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Potensi Investasi**	**Data**	**5**		**604.375.012,00**	**1.878.592.114,00**	**1.274.217.102,00**		
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1		604.347.212,00	778.347.212,00	174.000.000,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah	3		3.800,00	250.380.902,00	250.377.102,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1		24.000,00	849.864.000,00	849.840.000,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.02.4.03	**Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur**	**Jumlah Fasilitasi**	**Laporan**	**0**		**-**	**-**	**-**		
2.18.02.4.03.0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam		0	0		-	-	-		
2.18.02.4.04	**Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitasi**	**Laporan**	**0**		**-**	**-**	**-**		
2.18.02.4.04.0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota		0	0		-	-	-		
2.18.02.4.06	**Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.**	**Jumlah Koordinasi**	**Laporan**	**0**		**-**	**-**	**-**		
2.18.02.4.06.0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	0	0		-	-	-		

2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi (Berdasarkan pertambahan jumlah pelaku usaha Non UMK/Usaha Besar dan Menengah)**	**%**	**5**		**6.317.242.100,00**	**7.145.173.700,00**	**827.931.600,00**		**BIDANG PENANAMAN MODAL**
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Event Promosi Investasi yang terlaksana**	**Laporan**	**7**		**6.317.242.100,00**	**7.145.173.700,00**	**827.931.600,00**		
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	6		6.314.378.100,00	7.043.309.700,00	728.931.600,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1		2.864.000,00	101.864.000,00	99.000.000,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan**	**Persen**	**100%**		**1.099.797.886,00**	**1.871.515.886,00**	**771.718.000,00**		**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					**1.099.797.886,00**	**1.871.515.886,00**	**771.718.000,00**		
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1 dok		1.007.000,00	1.007.000,00	-		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	100		298.069.000,00	571.069.000,00	273.000.000,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	30		147.532.784,00	347.032.784,00	199.500.000,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah	Kegiatan Usaha	10		653.189.102,00	952.407.102,00	299.218.000,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu	

		Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha							APBD Perubahan 2025	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM**	**Laporan**	**39%**		**609.875.867,00**	**1.132.688.865,00**	**522.812.998,00**		**BIDANG PENANAMAN MODAL**
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal**	**Persen**	**38,87%**		**609.875.867,00**	**1.132.688.865,00**	**522.812.998,00**		
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	10		38.115.501,00	38.075.501,00	- 40.000,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	80		319.210.558,00	743.063.556,00	423.852.998,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; sertaDilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	35		252.549.808,00	351.549.808,00	99.000.000,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**Persen**	**100**		**2.909.610.626,00**	**3.458.610.626,00**	**549.000.000,00**		**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan**	**Data**	**1.269**		**2.909.610.626,00**	**3.458.610.626,00**	**549.000.000,00**		
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Data	1.269		2.909.610.626,00	3.458.610.626,00	549.000.000,00	Adanya Penyesuaian Perkiraan Pagu APBD Perubahan 2025	
						31.035.099.636,00	**36.420.011.808,00**	**5.384.912.172,00**		

Sumber Data : Aplikasi SIPD RI Perubahan Rencana Kerja Dpmptsp Tahun Anggaran 2025

3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Walikota. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakanpenyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan, serta pengaduan, pengendalian, kebijakan dan pelaporan pelayanan. Untuk itu, disusun tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Adapun tujuan yang akan dicapai untuk melaksanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang di Tahun Anggaran 2021 s/d 2026, yaitu :

Tujuan : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif;

Sasaran : 1). Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN;
2). Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasana Masyarakat

Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk Tabel 3.2 Terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 s/d 2030 dan Tabel 3.3 Terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 s/d 2026

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang

Tahun Anggaran 2025 s/d 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Terwujudnya Iklim Investasi yang Ramah dan Kompetitif	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Realisasi Total yang dicapai terhadap Target Realisasi Investasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah Realisasi Tahun (N) / Target realisasi Tahun (N) x 100%
			Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi (Berdasarkan pertambahan jumlah pelaku usaha Non UMK/Usaha Besar dan Menengah)	Persen	5%	5%	5%	5%	5%	5%	((Jumlah Investor Tahun ini - Tahun Sebelumnya) / Tahun Sebelumnya) x 100%
			Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan izin / Jumlah Pelaku Usaha yang beroperasi X 100%
			Persentase Tingkat Kepatuhan Perusahaan	laporan	38%	40%	42%	44%	46%	48%	Rata-rata Jumlah pelaku usaha non UMK yang menyampaikan LKPM Pada Tahun N / Rata-rata

			dalam menyampaikan LKPM								jumlah pelaku usaha non umk yang beroperasi pada tahun N x 100
		Meningkatnya Kemudahan Pelayanan PerizinanYang Prima	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah izin terbit pada Tahun (n) / Jumlah keseluruhan izin yang beroperasi X 100%

Sumber Data : Rancangan Akhir RPJMD Kota Bontang Tahun 2025 s/d 2030

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terapdu Satu Pintu Kota Bontang

Periode 2021 - 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2021	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN :					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1). Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif	1). Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif di Kota Bontang	1). Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA	1). Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN Rp.x (000.000,00)	Triliyun (Rp.)	1.641.909	1.724.004	1.810.205	1.900.715	1.995.751	2.095.538	2.095.538
			2). Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMA $.x (000,00)	Dollar ($)	227.592	250.351	275.386	302.295	333.217	366.539	366.539
			3). Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMA Rp.x (000,00)	Triliyun (Rp.)	3.300 T	3.630 T	3.993 T	4.383 T	4.831 T	5.314 T	5.314 T
			4). Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA	Triliyun (Rp.)	4.941 T	5.354 T	5.803 T	6.283 T	6.827 T	7.410 T	7.410 T
			5). Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Triliyun (Rp.)	4.149 T	4.357 T	4.575 T	4.803 T	5.044 T	5.296 T	5.296 T
			6). Prosentase Ketaatan Perusahaan terhadap Aturan Penanaman Modal	Persen (%)	35,34	37,50	44,44	50	55	57	57

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2021	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2). Meningkatnya Jumlah Investor PMDN dan PMA	7). Peningkatan Jumlah Investor PMDN dan PMA	Investor PMDN	90	95	100	105	110	115	115
				Investor PMA	1	2	2	2	2	2	2
2). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2). Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3). Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	8). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86.30	87.50	88.31	89.30	90.30	91.30	91.30
			9). Prosentase Ketersediaan data Perizinan dan Non Perizinan	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bidang Penanaman Modal dan PTSP Kota Bontang

3.4 Program dan Kegiatan

Adapun usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang adalah sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan Sub Kegiatan antara lain :

✧ Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :

h. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
j. Penyusunan Arsip Dinamis SKPD;
k. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
l. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
m. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
n. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; serta
p. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

✧ Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; dan
g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Proses penyusunan produk hukum daerah harus sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Ini dapat diimplementasikan dalam Kegiatan :

1). Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota, yang diwujudkan dalam Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
Pada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada Sub Kegiatan ini, yaitu :
1) Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; dan
2) Penyusunan Naskah Penjelas tentang Peraturan Walikota
b. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

2). Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, yang diwujudkan dalam Sub Kegiatan :
- PenyusunanRencana Penanaman Modal Daerah (RUPM) Kabupaten/Kota;
- Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem Potensi Investasi Regional (PIR); dan
- Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

3. Program Pelayanan Penananam Modal

Untuk mendukung kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kedepan, perlu lebih ditingkatkan lagi proses pengendalian, khususnya bidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diwujudkan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
Ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada sub kegiatan ini, yaitu :
1. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Penyusunan Regulasi terkait Perizinan;
3. Penyusunan Dokumen Reviu Standar Pelayanan;
4. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP);
5. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP); serta
6. Sosialisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, baik untuk masyarakat maupun Pihak Perusahaan.

B. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, terdiri dari kegiatan-kegiatan :
1. Monitoring Lapangan terkait Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kepada Pelaku Usaha;
2. Pemantauan atas Layanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Pemantauan terhadap Pelaku Usaha yang memiliki Resiko Tinggi, Menengah dan Rendah; serta
4. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) terhadap Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat dan Instansi Teknis.

C. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, terdiri dari kegiatan-kegiatan :
   1) Monitoring dan Evaluasi atas Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tinggi, Menengah dan Rendah;
   2) Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik;
   3) Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan Pelaku Usaha, Masyarakat, Akademisi dan Pihak Perusahaan (BUMN); serta
   4) Laporan Kegiatan Hasil Koordinasi bidang Perizinan ke Provinsi dan Kementerian Investasi (BKPM).

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dalam upaya mendorong pertumbuhan daerah, setiap daerah harus menjaga dan memperbaiki Iklim Invetsasi. Hal ini bisa diimplementasikan dalam berbagai Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya, terdiri dari kegiatan :
   1. Pengolahan data dan informasi pemantauan serta pengawasan Penanaman Modal berbasis WEB;
   2. Kegiatan Workshop pengolahan data dan informasi Penanaman Modal.

b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, terdiri dari kegiatan – kegiatan :
   1) Sosialisasi, Workshop dan Bimtek kepada Pelaku Usaha;
   2) Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dalan proses pengisian Form LKPM sesuai Aplikasi OSS RBA.

c. Pengawasan Penanaman Modal
   Pada sub kegiatan pengawasan Penanaman Modal terdiri dari kegiatan - kegiatan :

   1) Pelaksanaan Inspeksi ke Lapangan;
   2) Analisa dan Verifikasi Data Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha; serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha.

5. Program Promosi Penanaman Modal

Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan, Pemerintah gencar melakukan promosi daerah karena promosi diharapkan dapat menarik penanam modal *(investor),* pebisnis *(traders),* dan wisatawan *(tourists).* Program ini dapat diimplementasikan melalui Sub Kegiatan:

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota, yang diwujudkan dengan Kegiatan :
   1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota;

2) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini di maksudkan untuk memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sub Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut, antara lain:

a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, terdiri dari kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
   1) Sosialisasi terkait penggunaan Aplikasi Simbg bagi pengguna Layanan;
   2) Pembuatan Aplikasi berbasis Website tentang Peta Potensi BARISTA (Bontang Ramah Investasi untuk semua);
   3) Pembuatan Aplikasi berbasis Website tentang Layanan Perizinan;
   4) Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
   5) Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; serta
   3) Pengembangan Sistem Aplikasi OSS RBA dan Perizinan Digital untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang untuk Tahun Anggaran 2025 telah menyusun Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Tahun Anggaran 2025. Dokumen RENJA Perangkat Daerah tersebut berisikan usulan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Secara rinci, rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 akan dijabarkan dalam bentuk Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Anggaran Perubahan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD 2025			Pagu Anggaran		Perkiraan Pagu Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Unit Kerja
						Indikator Program,Kegiatan dan sub kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	Sumber dana		
							Satuan	Capaian				
Terwujudnya iklim investasi yang ramah dan kompetitif	Meningkatkan nilai investasi PMDN dan PMA	Persentase Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	**2.18.02**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**DPMPTSP Bontang**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**19.063.887.177**	APBD KOTA BONTANG	**20.104.118.949,-**	**BIDANG SEKERTARIAT**
	Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan yang prima	Persentase rata-rata lama perizinan	**2.18.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Dokumen**	**0**	**0,00**	APBD KOTA BONTANG	**0,00**	
			2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan pengumpulan data statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	-	APBD KOTA BONTANG	0,00	
			2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	-	APBD KOTA BONTANG	0,00	
			2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	-	APBD KOTA BONTANG	0,00	
			2.18.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	0	-	APBD KOTA BONTANG	0,00	

			2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah**	**Dokumen**	**1**	**8.694.575.643,-**	APBD KOTA BONTANG	**8.001.704.483,-**	
			2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	43	8.694.575.643,-	APBD KOTA BONTANG	8.001.704.483,-	
			2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			APBD KOTA BONTANG	0,00	
			2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	-	APBD KOTA BONTANG	0,00	
			2.18.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0**	**-**	APBD KOTA BONTANG	**0,00**	
			2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah	0	-	APBD KOTA BONTANG	0,00	
			2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**2**	**1.039.700.000**	APBD KOTA BONTANG	**1.090.550.000,-**	
			2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	48 paket	376.420.000	APBD KOTA BONTANG	376.420.000,-	
			2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	-	APBD KOTA BONTANG	0,00	
			2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	15 orang	663.280.000	APBD KOTA BONTANG	714.130.000,-	
			2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**6**	**4.795.415.122**	APBD KOTA BONTANG	**6.224.644.221,-**	

			2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	-	APBD KOTA BONTANG	0,00	
			2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9 paket	3.612.063.152	APBD KOTA BONTANG	5.045.268.251,-	
			2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9 paket	25.259.454	APBD KOTA BONTANG	25.259.454,-	
			2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6 paket	59.559.284	APBD KOTA BONTANG	59.559.284,-	
			2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 dok	203.280.000	APBD KOTA BONTANG	199.500.000,-	
			2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 laporan	797.066.000	APBD KOTA BONTANG	796.870.000,-	
			2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1 dokumen	98.187.232	APBD KOTA BONTANG	98.187.232,-	
			2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**1**	**1.101.930.000**	APBD KOTA BONTANG	**1.101.930.000**	
			2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	-	APBD KOTA BONTANG	0,00	
			2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6 unit	1.101.930.000	APBD KOTA BONTANG	1.101.930.000	

			2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	-	APBD KOTA BONTANG	0,00	
			2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	APBD KOTA BONTANG	0,00	
			2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**12**	**3.024.276.412**	APBD KOTA BONTANG	**3.277.300.245**	
			2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 laporan	5.000.000	APBD KOTA BONTANG	8.780.000	
			2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 laporan	1.305.375.332	APBD KOTA BONTANG	1.554.619.165	
			2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16 laporan	1.713.901.080	APBD KOTA BONTANG	1.713.901.080	
			2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**2**	**407.990.000**	APBD KOTA BONTANG	**407.990.000**	
			2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	22 unit	352.120.000	APBD KOTA BONTANG	352.120.000	
			2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	-	APBD KOTA BONTANG	0,00	

			2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	-	APBD KOTA BONTANG	0,00	
			2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20 unit	55.870.000	APBD KOTA BONTANG	55.870.000	
			2,18.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	APBD KOTA BONTANG	0,00	
			2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	APBD KOTA BONTANG	0,00	
			2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP Bontang**	**Realisasi Total yang dicapai terhadap Target Realisasi Investasi**	**%**	**100**	**1.034.685.980**	APBD KOTA BONTANG	**2.707.903.782,-**	**BIDANG PENANAMAN MODAL**
			2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah regulasi/kebijakan penanaman modal**	**Regulasi/kebijakan**	**1**	**430.310.968**	APBD KOTA BONTANG	**829.311.668,-**	
			2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	429.303.968	APBD KOTA BONTANG	828.304.668,-	
			2.18.02.2.01.0003	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	1	1.007.000	APBD KOTA BONTANG	1.007.000,-	
			2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharminisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait	Dokumen	0	-	APBD KOTA BONTANG	0,00	

						Perizinan Berusaha Berbasis Resiko						
			2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		**Jumlah Potensi Investasi**	**Data**	**5**	**604.375.012**	APBD KOTA BONTANG	**1.878.592.114,-**	
			2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	604.347.212	APBD KOTA BONTANG	778.347.212,-	
			2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)		Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah	3	3.800	APBD KOTA BONTANG	250.380.902,-	
			2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kab/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	24.000	APBD KOTA BONTANG	849.864.000,-	
			2.18.02.4.03	**Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur**		**Jumlah Fasilitasi**	**Laporan**	**0**	**-**	APBD KOTA BONTANG	**0.00**	
			2.18.02.4.03.0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam			0	0	-	APBD KOTA BONTANG	-	
			2.18.02.4.04	**Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Fasilitasi**	**Laporan**	**0**	**-**	APBD KOTA BONTANG	**-**	
			2.18.02.4.04.0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota			0	0	-	APBD KOTA BONTANG	-	

			2.18.02.4.06	**Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.**		**Jumlah Koordinasi**	**Laporan**	**0**	**-**	APBD KOTA BONTANG	**0.00**	
			2.18.02.4.06.0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.		Terlaksananya koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	0	0	-	APBD KOTA BONTANG	-	
			2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP Bontang**	**Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi (Berdasarkan pertambahan jumlah pelaku usaha Non UMK/Usaha Besar dan Menengah)**	**%**	**5**	**6.317.242.100**	APBD KOTA BONTANG	**7.145.173.700,-**	**BIDANG PENANAMAN MODAL**
			2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Event Promosi Investasi yang terlaksana**	**Laporan**	**7**	**6.317.242.100**	APBD KOTA BONTANG	**7.145.173.700,-**	
			2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	6	6.314.378.100	APBD KOTA BONTANG	7.043.309.700,-	
			2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	2.864.000	APBD KOTA BONTANG	101.864.000,-	
			2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP Bontang**	**Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan**	**Persen**	**100%**	**1.099.797.886**	APBD KOTA BONTANG	**1.871.515.886,-**	**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**

			2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					**1.099.797.886**	APBD KOTA BONTANG	**1.871.515.886,-**	
			2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1 dok	1.007.000,-	APBD KOTA BONTANG	1.007.000,-	
			2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	100	298.069.000,-	APBD KOTA BONTANG	571.069.000,-	
			2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	30	147.532.784,-	APBD KOTA BONTANG	347.032.784,-	
			2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	10	653.189.102	APBD KOTA BONTANG	952.407.102,-	
			2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP Bontang**	**Persentase Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM**	**Laporan**	**38,87%**	**609.875.867**	APBD KOTA BONTANG	**1.132.688.865,-**	**BIDANG PENANAMAN MODAL**

			2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal**	**Persen**	**38,87%**	**609.875.867**	APBD KOTA BONTANG	**1.132.688.865,-**	
			2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	10	38.115.501	APBD KOTA BONTANG	38.075.501,-	
			2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	80	319.210.558	APBD KOTA BONTANG	743.063.556,-	
			2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	35	252.549.808	APBD KOTA BONTANG	351.549.808,-	
			2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP Bontang**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**Persen**	**100**	**2.909.610.626**	APBD KOTA BONTANG	**3.458.610.626,-**	**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**
			2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang**	**Data**	**1.269**	**2.909.610.626**	APBD KOTA BONTANG	**3.458.610.626,-**	

						Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan						
			2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Data	1.269	2.909.610.626	APBD KOTA BONTANG	3.458.610.626,-	
TOTAL PAGU ANGGARAN BELANJA 2025									**31.035.099.636**		**36.420.011.808,-**	

XIX. DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RKPD Perubahan Kota Bontang dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang dalam satu tahun anggaran. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya SKPD menyusunan Renja Perubahan SKPD dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Sebagai tindak lanjut meningkatkan keterapaduan dan keselarasan antar Renstra KEMENPORA dan KEMNPAR dengan program-program Pemerintah Kota Bontang, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintahan Kota Bontang dalam menyusun Renja Perubahan SKPD memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Rencana Kerja Perubahan SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan sebagai dokumen perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di perangkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Rencana Kerja Perubahan SKPD berfungsi langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepda masyarakat penggunanya.

Rencana kerja disusun dengan merangkum kebutuhan serta perkembangan dari bidang-bidang di bawah naungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai kondisi terkini, selain itu perencanaan juga

melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan dengan memberi kesempatan pada masyarakat dalam mengusulkan aspirasinya. Aspirasi dari masyarakat diproses melalui pelaksanaan musrenbang yang tertata dan terstruktur, sehingga proses penyaringan aspirasi serta hasil skala prioritas usulan yang dibawa dalam musrenbang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang tahun 2025 adalah;

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286.
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.
6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124.
11. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
12. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
13. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan.

14. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
16. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
17. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
18. Peraturan Presiden No. 22 tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam negeri No. 59 tahun 2007 dan perubahan kedua sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018.
24. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025.
25. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025

merupakan amanat dari UU No.10/Th.2009 tentang kepariwisataan yang mengatur pembangunan kepariwisataan Indonesia dalam jangka panjang.

27. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan.
28. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelengaraan Kepariwisataan.
29. Peraturan Walikota Bontang Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
31. Peraturan Mentri Dalam Negeri Mapping Nomor 1317 Tahun 2023 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
32. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2026;
33. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;
34. Peraturan Walikota Bontang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
35. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja Perubahan adalah untuk merumuskan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang tahun 2025 di antaranya:

1. Sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan;
2. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diindentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategis penyelenggaraan pelayanan bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang berorientasi pada hasil;
3. Sebagai instrumen bagi masyarakat dan stakeholder dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB 2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025 Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2025 Triwulan 2

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang

Berisikan gambaran rencana prioritas kegiatan Dinas Pendidikan dan Kota Bontang yang dilaksanakan pada anggaran perubahan Tahun 2025.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD, dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata s.d Triwulan II tahun 2025

Evaluasi Renja 2025 bertujuan untuk menindaklanjuti capaian program dan kegiatan yang dilakukan, dengan disesuaikan pada kondisi aktual daerah. Selain itu evaluasi juga bertujuan untuk menilai dan memastikan pencapaian pada target rencana program dan kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien.

Melalui proses evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat keberhasilan, kendala, maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dalam hal penyerapan anggaran, kualitas keluaran (output), dan manfaat bagi masyarakat (outcome). Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, sehingga dapat dilakukan perbaikan, penyempurnaan, serta penyesuaian prioritas pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.

Evaluasi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan Renja, serta mendorong peningkatan koordinasi antar-perangkat daerah, pihak terkait, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepemudaan, keolahragaan, serta kepariwisataan dapat terus ditingkatkan kualitasnya untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kota Bontang yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Tabel 2.1

Realisasi Capaian Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang s.d Triwulan II Tahun 2025

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Anggaran RP	Realisasi RP	Keterangan
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan daerah**	**100**	**Persen**	**50**	**Persen**	**21.536.235.229**	**9.697.860.430**	
01.02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan**	**100**	**Persen**	**50**	**Persen**	**10.312.585.028**	**5.424.408.531**	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	Persen	51	Persen	10.312.585.028	5.424.408.531	
01.02.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan barang dan jasa untuk menunjang pelayanan perangkat daerah**	**3**	**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**797.834.320**	**647.512.900**	
01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	4	Paket	335.820.320	298.194.000	

01.02.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39	Orang	25	Orang	462.014.000	349.318.900	
01.02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Untuk Menunjang Pelayanan Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**6**	**Bulan**	**1.006.556.054**	**291.535.146**	
01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	0	Paket	14.282.444	-	Menunggu Proses Pengadaan
01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26	Paket	0	Paket	271.736.165	-	Menunggu Proses Pengadaan
01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14	Paket	0	Paket	55.146.725	-	Menunggu Proses Pengadaan
01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Paket	0	Paket	135.361.515	-	Menunggu Proses Pengadaan
01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	6	Paket	2	Paket	139.074.325	46.700.000	

		Penggandaan yang Disediakan							
01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Dokumen	10	Dokumen	343.368.000	200.805.146	
01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	47.586.880	44.030.000	
01.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penyediaan kebutuhan pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah**	**1**	**Unit**	**1**	**Unit**	**344.090.000**	**342.000.000**	
01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	344.090.000	342.000.000	
01.02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana OPD Untuk Menunjang Pelayanan Perangkat Daerah**	**16**	**Laporan**	**11**	**Laporan**	**8.087.694.040**	**2.544.727.755**	
01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2	Laporan	24.000.000	11.000.000	

01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	6	Laporan	3.484.603.840	720.178.902	
01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	6	Laporan	4.579.090.200	1.813.548.853	
01.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Barang yang dipelihara Oleh Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**37**	**Unit**	**29**	**Unit**	**987.475.787**	**447.676.098**	
01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29	Unit	29	Unit	631.181.487	447.676.098	
01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	0	Unit	206.294.300	-	
01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	Unit	150.000.000	-	

2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Presentase pembinaan dan pengembangan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)**	**100**	**Persen**	**4,94**	**Persen**	**3.770.213.767**	**873.915.681**	
02.02.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemuda yang Berprestasi**	**90**	**Orang**	**3**	**Orang**	**3.513.712.480**	**873.915.681**	
02.02.01.10	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	2	Dokumen	50%	Dokumen	263.360.988	28.433.440	
02.02.01.11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	83	Orang	63	Orang	1.316.203.390	448.418.546	

02.02.01.12	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	50	Orang	0	Orang	339.479.000	81.951.205	Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam kategori anggaran efisiensi.
02.02.01.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5	Kegiatan	2	Kegiatan	723.736.442	301.732.250	
02.02.01.15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	150	Orang	0	Orang	870.932.660	13.380.240	Pekan Wisata Budaya dan Kreasi Milenial Nusantara (pelaksanaan menyesuaikan arahan Kepala Daerah dan agenda Kota Bontang)
02.02.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemuda pelopor dan jumlah wirausaha muda yang dibina**	**100**	**Orang**	**0**	**Orang**	**256.501.287**	**-**	
02.02.02.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1	Organisasi	0	Organisasi	256.501.287	-	Pelaksanaan Seminar Daerah Himpunan Mahasiswa

		kepemudaan tingkat kabupaten/kota							Bontang pada Triwulan III
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase atlit yang berprestasi**	**80**	**Persen**	**73**	**Persen**	**26.467.485.352**	**1.883.376.363**	
03.02.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Prestasi Olahraga**	**6**	**Unit**	**2**	**Unit**	**5.027.547.522**	**156.961.300**	
03.02.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kab/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6	Unit	2	Unit	5.027.547.522	156.961.300	
03.02.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Atlet Yang Memperoleh Medali**	**250**	**Orang**	**66**	**Orang**	**7.521.515.208**	**1.271.395.346**	
03.02.02.04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	18	Dokumen	7	Dokumen	4.392.628.970	340.650.000	
03.02.02.06	Keikutsertaan anggota kontingen kab/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan	412	Orang	145	Orang	3.128.886.238	930.745.346	

		Penyelenggaraan Kejuaraan							
03.02.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Prestasi Atlet Olahraga Tingkat Provinsi**	**200**	**Medali**	**23**	**Medali**	**682.217.301**	**-**	
03.02.03.07	Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	25	Orang	0	Orang	651.610.000	-	Pengajuan Standar Harga Satuan (SHS) atas belanja pemberian penghargaan kepada atlet
03.02.03.08	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1	Orang	0	Orang	30.607.301	-	Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam kategori anggaran efisiensi.
03.02.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**5**	**Organisasi**	**0**	**Organisasi**	**13.077.608.901**	**455.019.717**	
03.02.04.05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	4	Dokumen	2	Dokumen	1.130.748.901	455.019.717	

03.02.04.06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	0	Dokumen	11.946.860.000	-	Pencairan dana hibah tidak dapat dilakukan akibat kekurangan kelengkapan administrasi verifikasi, dan menunggu arahan Pimpinan
03.02.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1	Kegiatan	1	Kegiatan	158.596.420	-	
03.02.05.06	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreas	1	Dokumen	1	Dokumen	158.596.420	-	
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan**	**100**	Persen	0,01	Persen	**1.956.460.446**	**253.902.423**	
04.02.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah anggota organisasi kepramukaan**	**2.840**	**Orang**	**20**	**Orang**	**1.956.460.446**	**253.902.423**	

04.02.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	Organisasi	0	Organisasi	1.001.610.000	-	Pencairan dana hibah tidak dapat dilakukan akibat kekurangan kelengkapan administrasi verifikasi, dan menunggu arahan Pimpinan
04.02.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	**3**	Laporan	1	Laporan	954.850.446	253.902.423	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
2	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Presentase objek daya tarik wisata yang representatif**	**85**	Persen	0	Persen	**8.257.092.270**	**126.630.600**	
02.02.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah kawasan Strategis yang di kelola oleh kab / kota**	**1**	**ODTW**	**0**	**ODTW**	**6.440.198.000**	**106.234.000**	
02.02.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam	7	Unit	0	Unit	6.433.498.000	106.234.000	Menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan

	Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							
02.02.02.09	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Laporan	2	Laporan	6.700.000	-	
02.02.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Destinasi yang Dikelola Kabupaten / Kota**	**3**	**ODTW**	**3**	**ODTW**	**1.816.894.270**	**20.396.600**	
02.02.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	7	Unit	7	Unit	1.776.644.270	13.396.600	
02.02.03.10	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	Laporan	2	Laporan	40.250.000	7.000.000	
3	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah kunjungan wisata**	**425.295**	**Orang**	**47.421**	**Orang**	**1.509.533.037**	**239.135.492**	
03.02.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan**	**Jumlah Kunjungan Wisatawan**	**425.295**	**Orang**	**47.421**	**Orang**	**1.509.533.037**	**239.135.492**	

	Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
03.03.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2	Dokumen	1	Dokumen	431.140.156	239.135.492	
03.03.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	Dokumen	1	Dokumen	6.700.000	-	
03.03.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	Kegiatan	0	Kegiatan	864.747.504	-	Penyesuaian jadwal dengan agenda sekolah, khususnya jadwal ujian, terkait pelaksanaan pemilihan Putra Putri Pariwisata.
03.03.01.07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	Dokumen	0	Dokumen	206.945.377	-	Proses Kontrak sedang Berjalan

4	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif**	**60**	**Persen**	**0,19**	**Persen**	**2.044.156.746**	**1.314.180.000**	
04.02.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kratif**	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**2.044.036.746**	**1.314.180.000**	
04.02.02.17	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	3	Promosi	3	Promosi	432.303.846	174.240.000	
04.02.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1	Dokumen	1	Dokumen	1.000.472.760	948.700.000	
04.02.02.22	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	200	Produk	2	Produk	113.333.475	-	

04.02.02.13	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah	1	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	120.000	-	Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam kategori anggaran efisiensi.
04.02.02.16	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1	Dokumen	0	Dokumen	120.000	-	Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam kategori anggaran efisiensi.
04.02.02.20	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	Laporan	1	Laporan	497.686.665	191.240.000	
04.02.01	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kab/Kota**	**Jumlah perlengkapan prasarana zona kreatif**	**70**	**Persen**	**0**	**Persen**	**120.000**	**-**	
04.02.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1	Unit	0	Unit	120.000	-	Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam kategori anggaran efisiensi.

5	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Presentase Sumber daya Pariwisata yang di kembangkan** **Presentase Sumber daya Ekonomi Kreatif yang di kembangkan**	**88** **30**	**Persen**	**13** **127**	**Persen**	**6.472.177.016**	**4.080.952.753**	
05.02.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang di tingkatkan kapasitasnya**	**89**	**Orang**	**89**	**Orang**	**6.098.295.378**	**3.829.248.332**	
05.02.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreati	1	Laporan	1	Laporan	67.476.000	21.726.400	
05.02.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	89	Orang	89	Orang	2.463.558.000	1.816.190.623	
05.02.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi,	3	Laporan	3	Laporan	3.274.658.378	1.887.587.729	

		dan Konservasi Ekonomi Kreatif							
05.02.01.09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	20	Orang	20	Orang	292.603.000	103.743.580	
05.02.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan**	**50**	**Orang**	**46**	**Orang**	**373.881.638**	**251.704.421**	
05.02.02.07	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	12	Orang	12	Orang	201.426.000	156.032.421	
05.02.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	34	Orang	34	Orang	172.455.638	95.672.000	
TOTAL							**72.013.353.863**	**18.469.953.742**	

Tabel 2.2
Kinerja Keuangan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025
Semester 1

No.	Uraian	Anggaran RP	Realisasi RP	%
1	**Rencana Kerja Urusan Pemuda dan Olahraga**	**53.730.394.794**	**12.709.054.897**	**24%**
a	Sekretariat	21.536.235.229	9.697.860.430	45%
b	Pemuda	5.726.674.213	1.127.818.104	20%
c	Olahraga	26.467.485.352	1.883.376.363	7%
2	**Rencana Kerja Urusan Pariwisata**	**18.282.959.069**	**5.760.898.845**	**32%**
a	Pariwisata	10.059.228.307	469.509.672	5%
b	Ekraf	8.223.730.762	5.291.389.173	64%
TOTAL		**72.013.353.863**	**18.469.953.742**	**26%**

Sumber data: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Tahun 2025 Dinas pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang memiliki 8 Program, dan 17 Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan:
   a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
   a) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
   b) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
   a) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
   a) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   b) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   c) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
   d) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
   e) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreas
5. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
   a) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
   b) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
   a) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
7. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL

a) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

8. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
   a) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
   b) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

2.2 Faktor-Faktor Penyebab Program dan Kegiatan tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan s.d triwulan II

Dari 8 program dan 17 kegiatan Tahun 2025 belum ada yang memenuhi target Kinerja yang telah ditetapkan dengan sebab sebagai berikut:

1. **Belanja Hibah belum dapat dicairkan,** karena masih terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dan proses verifikasi yang belum terpenuhi, sehingga menghampat penyaluran dana kepada penerima Hibah.

2 **Proses pekerjaan fisik di Bid. Pariwisata masih berjalan,** di mana pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana pariwisata memerlukan waktu tambahan untuk penyelesaian pekerjaan, termasuk proses leleang, persiapan teknis, serta koordinasi dengan pihak terkait.

3 **Menunggu penetapan jadwal dari Pemerintah Provinsi dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan,** terutama kegiatan yang sifatnya bersinergi atau berkoordinasi lintas wilayah, sehingga harus menyesuaikan dengan agenda dan kebijakan pemerintah provinsi, serta memastikan ketersediaan waktu pelaksanaan yang tidak berbenturan dengan agenda lainnya.

4 **Proses Pengadaan barang yang masih berlangsung,** mengingat tahapan pengadaan barang dan jasa harus memenuhi ketentuan regulasi, sehingga memerlukan waktu

untuk penyelesaian administrasi, evaluasi penawaran, hingga penetapan pemenang.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah percepatan dan penyesuaian strategi pelaksanaan pada triwulan berikutnya agar target kinerja program dan kegiatan tetap dapat tercapai sesuai sasaran pembangunan daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu faktual yang berkembang ke arah perubahan dari analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai di masa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis). Secara detail, upaya penyediaan layanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.1

Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2025 (Perubahan)
		Jumlah Pemuda yang Berorganisasi	Jumlah	6.507	1.518	6.507

1	Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan Dalam Pembangunan	Jumlah Pemuda Mandiri	Jumlah	179	189	189
		Jumlah Pemuda Berprestasi	Jumlah	110	25	110
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali Emas	40	1	40
		Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah	155	60	155
3	Meningkatnya Potensi Destinasi Pariwisata	Angka Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Jumlah	386.636	425.295	425.295
		Angka PAD Sektor Pariwisata	Angka	23.699.000.800	15.417.769.867	23.699.000.800
4	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Karya Ekraf yang Mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Jumlah	20/59	25/69	25/69
		Jumlah Karya Ekraf	Jumlah	11	10	11

Pada Rencana Kerja Perubahan 2025 ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang melakukan penyesuaian target berdasarkan realisasi di tahun sebelumnya, diperoleh hasil pada tahun 2024 terdapat 6 indikator memiliki capaian lebih tinggi dari target yang ditentukan, yaitu :

1) Jumlah Pemuda yang Berorganisasi
2) Jumlah Pemuda Berprestasi
3) Jumlah Prestasi Olahraga
4) Jumlah Atlet Berprestasi
5) Angka PAD Sektor Pariwisata
6) Jumlah Karya Ekraf

Terdapat pula penyesuaian pada 3 indikator yang targetnya disesuikan dengan target tahun 2025, yaitu :

1) Jumlah Pemuda Mandiri
2) Angka Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional
3) Jumlah Karya Ekraf yang Mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perubahan RKPD Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2025, dilatar belakangi oleh adanya penambahan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan:

1. Penambahan alokasi anggaran terhadap usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang sebelumnya mengalami efisiensi atau rasionalisasi, namun perlu dikembalikan untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati.
2. Rehabilitasi GOR Taman Lestari, Kegiatan ini menjadi prioritas karena GOR akan difungsikan sebagai kantor Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Diperlukan perbaikan fisik bangunan agar layak dan aman digunakan sebagai ruang kerja.
3. Pembangunan pagar Tongkonan Kanaan, guna menjaga keamanan dan keindahan destinasi wisata budaya serta mendukung pengembangan kawasan wisata tematik berbasis kearifan lokal.
4. Perbaikan instalasi listrik di panel utama kantor, akibat kerusakan atau kebakaran yang mengganggu operasional dan pelayanan administrasi perkantoran.
5. Alokasi Anggaran untuk Program Prioritas Kepala Daerah.
6. Penyesuaian Kebutuhan mendesak lainnya,

Ringakasan pagu anggaran yang tertuang di dalam Perubahan RKPD 2025 bersifat indikatif, sehingga seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen Perubahan RKPD merupakan indikasi yang ingin dicapai.

Tabel 3.2

Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BONTANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA							**74.360.268.236,00**	**102.446.562.454,00**	**71.102.058.845,00**	**-3.258.209.391,00**							**55.030.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**54.276.600.337,00**	**66.376.345.070,00**	**51.370.665.776,00**	**-2.905.934.561,00**							**42.230.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**54.276.600.337,00**	**66.376.345.070,00**	**51.370.665.776,00**	**-2.905.934.561,00**							**42.230.000.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan daerah**				**100 %**	**100 %**	**23.000.190.306,00**	**23.190.262.292,00**	**24.280.539.819,00**	**+4.570.190.306,00**							**18.430.000.000,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen OPD*				4 Dokumen	4 Dokumen	135.019.350,00	5.258.950,00	3.155.370,00	-131.863.980,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi DISPOPAR Kota Bontang		70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	117.589.875,00	2.629.475,00	1.577.685,00	-116.012.190,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2 Laporan	17.429.475,00	2.629.475,00	1.577.685,00	-15.851.790,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan layanan keuangan*				100 Persen	100 Persen	10.599.050.332,00	10.317.843.978,00	10.315.740.398,00	-283.309.934,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	ASN dan PPPK		9.510.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	10.593.791.382,00	10.312.585.028,00	10.312.585.028,00	-281.206.354,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			9.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.629.475,00	2.629.475,00	2.103.580,00	-525.895,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			8.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.629.475,00	2.629.475,00	1.051.790,00	-1.577.685,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			2.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan barang dan jasa untuk menunjang pelayanan perangkat daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.138.994.507,00	1.091.066.320,00	754.049.320,00	-384.945.187,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DISPOPAREKRAF		400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	5 Paket	162.449.507,00	335.820.320,00	335.820.320,00	173.370.813,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				85 Orang	39 Orang	976.545.000,00	755.246.000,00	418.229.000,00	-558.316.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			300.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah bulan kebutuhan barang dan jasa untuk Menunjang Pelayanan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.105.005.131,00	1.939.973.775,00	1.006.556.054,00	-98.449.077,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DISPOPAREKRAF		1.050.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	11.252.235,00	16.157.170,00	14.282.444,00	3.030.209,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	27 Paket	138.203.916,00	503.621.293,00	271.736.165,00	133.532.249,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	14 Paket	52.433.180,00	90.012.820,00	55.146.725,00	2.713.545,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	9 Paket	57.009.415,00	135.361.515,00	135.361.515,00	78.352.100,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	6 Paket	38.581.745,00	163.377.877,00	139.074.325,00	100.492.580,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	15 Laporan	780.256.000,00	924.285.000,00	343.368.000,00	-436.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			650.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.268.640,00	107.158.100,00	47.586.880,00	20.318.240,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah penyediaan kebutuhan pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah*				5 Unit	1 Unit	2.281.956.929,00	645.002.442,00	3.148.390.000,00	866.433.071,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD DISPOPAREKRAF		1.150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	378.290.000,00	344.090.000,00	344.090.000,00	-34.200.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				200 Unit	0 Unit	156.551.400,00	179.922.060,00	0,00	-156.551.400,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				41 Unit	3 Unit	1.747.115.529,00	120.990.382,00	2.804.300.000,00	1.057.184.471,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Untuk Menunjang Pelayanan Perangkat Daerah*				16 Laporan	15 Laporan	6.720.934.160,00	8.203.641.040,00	8.047.694.040,00	1.326.759.880,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah DISPOPAREKRAF		5.125.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.160.000.000,00	3.594.550.840,00	3.444.603.840,00	1.284.603.840,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			1.300.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.540.934.160,00	4.579.090.200,00	4.579.090.200,00	38.156.040,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			3.800.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit barang yang di pelihara oleh milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah*				37 Unit	36 Unit	1.019.229.897,00	987.475.787,00	1.004.954.637,00	-14.275.260,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	BMD Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang		1.125.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				37 Unit	29 Unit	688.909.897,00	631.181.487,00	631.181.487,00	-57.728.410,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			650.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	- Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			75.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	6 Unit	150.320.000,00	206.294.300,00	223.773.150,00	73.453.150,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Presentase pembinaan dan pengembangan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.759.026.252,00**	**11.597.744.132,00**	**4.260.232.767,00**	**690.973.748,00**							**3.450.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemuda Yang Berprestasi*				90 Orang	90 Orang	2.746.660.252,00	10.601.971.257,00	4.013.712.480,00	1.267.052.228,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pemuda Yang Berprestasi		2.650.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	2 Dokumen	148.820.688,00	364.729.788,00	263.360.988,00	114.540.300,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				77 Orang	63 Orang	749.542.000,00	6.586.974.389,00	1.316.203.390,00	566.661.390,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				100 Orang	50 Orang	599.976.564,00	596.397.564,00	339.479.000,00	-260.497.564,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			300.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				3 Kegiatan	5 Kegiatan	643.355.000,00	1.657.627.246,00	723.736.442,00	80.381.442,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				70 Orang	150 Orang	600.000.000,00	1.396.242.270,00	1.370.932.660,00	770.932.660,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			650.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	4.966.000,00	0,00	0,00	-4.966.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemuda Pelopor dan Jumlah Wirausaha muda yang di bina*				190 orang	100 orang 100 Orang	12.366.000,00	995.772.875,00	266.520.287,00	254.154.287,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pemuda Berorganisasi yang di Bina		800.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 0	1 0	7.400.000,00	995.772.875,00	256.501.287,00	249.101.287,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				10 Orang	10 Orang	4.966.000,00	0,00	10.019.000,00	5.053.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase atlit yang berprestasi**				**29 Persen**	**80 Persen**	**27.418.748.779,00**	**28.877.253.657,00**	**21.082.132.744,00**	**-9.268.748.779,00**							**18.150.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana dan prasarana untuk Prestasi Olahraga*				6 Sapras	6 Sapras	7.416.516.932,00	2.681.794.752,00	6.467.381.322,00	-949.135.610,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pelaku Olahraga		1.200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				6 Unit	6 Unit	7.416.516.932,00	2.681.794.752,00	6.467.381.322,00	-949.135.610,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			1.200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Atlit Yang Memperoleh Medali*				800 Medali	250 Orang	4.391.844.847,00	9.375.087.135,00	8.365.300.208,00	3.973.455.361,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Atlet yang Memperoleh Medali		6.600.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				4 Kegiatan	20 Kegiatan	1.097.778.886,00	5.126.335.097,00	5.192.628.970,00	4.094.850.084,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			1.600.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				200 Orang	412 Orang	3.294.065.961,00	4.248.752.038,00	3.172.671.238,00	-121.394.723,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			5.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Prestasi Atlit Olahraga yang di laksanakan di Tingkat Provinsi*				100 Persen	200 medali	1.145.906.000,00	863.117.795,00	682.217.301,00	-463.688.699,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Atlit Daerah		4.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				250 Orang	- Orang	479.070.000,00	0,00	0,00	-479.070.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			700.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				15 Orang	25 Orang	210.000.000,00	651.610.000,00	651.610.000,00	441.610.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				1 Pelatda	- Pelatda	300.000.000,00	211.507.795,00	30.607.301,00	-269.392.699,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				10 Orang	10 Orang	4.966.000,00	0,00	0,00	-4.966.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	151.870.000,00	0,00	0,00	-151.870.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan*				4 Organisasi	5 Organisasi	14.316.688.000,00	15.707.864.652,00	5.404.337.493,00	-8.912.350.507,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Organisasi		6.200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																		
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				7 Dokumen	4 Dokumen	2.369.828.000,00	3.761.004.652,00	1.130.748.901,00	-1.239.079.099,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	4 Dokumen	11.946.860.000,00	11.946.860.000,00	4.273.588.592,00	-7.673.271.408,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			6.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah penyelenggaraan olahraga rekreasi yang di kembangkan*				6 Kegiatan	1 Kegiatan	147.793.000,00	249.389.323,00	162.896.420,00	15.103.420,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pelaku Olahraga Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	1 Laporan	140.393.000,00	0,00	4.300.000,00	-136.093.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			75.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000,00	249.389.323,00	158.596.420,00	151.196.420,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			75.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.098.635.000,00**	**2.711.084.989,00**	**1.727.760.446,00**	**1.101.365.000,00**							**2.200.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah anggota gudep di kota bontang yang aktif*				2840 Orang	2840 Orang	1.098.635.000,00	2.711.084.989,00	1.727.760.446,00	629.125.446,00			-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Pembinanaan Pramuka		2.200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	1.001.910.000,00	1.001.610.000,00	772.910.000,00	-229.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	3 Laporan	96.725.000,00	1.709.474.989,00	954.850.446,00	858.125.446,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.083.667.899,00**	**36.070.217.384,00**	**19.731.393.069,00**	**-352.274.830,00**							**12.800.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**20.083.667.899,00**	**36.070.217.384,00**	**19.731.393.069,00**	**-352.274.830,00**							**12.800.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Presentase objek daya tarik wisata yang representatif**				**85 %**	**85 %**	**8.734.772.973,00**	**8.702.880.270,00**	**8.457.772.270,00**	**-5.934.772.973,00**							**2.800.000.000,00**	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah kawasan Strategis yang d kelola oleh kab / kota*				1 ODTW	1 ODTW	7.332.758.712,00	6.798.651.000,00	6.440.198.000,00	-892.560.712,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	3 ODWT		1.750.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Unit	7 Unit	7.304.238.712,00	6.788.601.000,00	6.433.498.000,00	-870.740.712,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			1.700.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	1 Laporan	28.520.000,00	10.050.000,00	6.700.000,00	-21.820.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Presentase objek daya tarik wisata yang representatif*				2 ODTW	3 ODTW	1.402.014.261,00	1.904.229.270,00	2.017.574.270,00	615.560.009,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	4 ODTW		1.050.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	7 Unit	1.352.124.261,00	1.853.929.270,00	1.977.324.270,00	625.200.009,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	1 Laporan	49.890.000,00	50.300.000,00	40.250.000,00	-9.640.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Kunjungan Wisata**				**425.295 orang**	**425.295 orang**	**6.772.492.463,00**	**1.707.879.641,00**	**1.657.433.037,00**	**-5.122.492.463,00**							**1.650.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*jumlah kunjungan wisatawan*				425.295 orang	425.295 orang	6.772.492.463,00	1.707.879.641,00	1.657.433.037,00	-5.115.059.426,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	kunjungan wisatawan		1.650.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	497.577.156,00	435.688.156,00	431.140.156,00	-66.437.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	4.966.000,00	10.050.000,00	6.700.000,00	1.734.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	1 Kegiatan	1.199.475.907,00	1.053.736.108,00	864.747.504,00	-334.728.403,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Promosi	1 Promosi	5.070.473.400,00	208.405.377,00	354.845.377,00	-4.715.628.023,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif**				**70 Persen**	**70 Persen**	**247.120.895,00**	**2.504.917.864,00**	**2.044.156.746,00**	**702.879.105,00**							**950.000.000,00**	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinterakasi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah perlengkapan prasarana zona kreatif*				70 Persen	30 Persen	10.000.000,00	120.000,00	120.000,00	-9.880.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	pelaku ekraf		200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	120.000,00	120.000,00	-9.880.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kratif*				1 Dokumen	1 Dokumen	237.120.895,00	2.504.797.864,00	2.044.036.746,00	1.806.915.851,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas	Ekonomi Kreatif		750.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1.350.245.403,00	1.000.472.760,00	990.472.760,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0013	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	10.000.000,00	120.000,00	120.000,00	-9.880.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah																		
			Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				- Dokumen	- Dokumen	10.000.000,00	120.000,00	120.000,00	-9.880.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah terlaksanakannya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif				1 Promosi	3 Promosi	102.579.470,00	501.567.846,00	432.303.846,00	329.724.376,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	497.686.665,00	497.686.665,00	487.686.665,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				20 Produk	200 Produk	94.541.425,00	155.057.950,00	113.333.475,00	18.792.050,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Sumber daya Ekraf yang di kembangkan**				**88 %**	**88 %**	**4.329.281.568,00**	**23.154.539.609,00**	**7.572.031.016,00**	**3.070.718.432,00**							**7.400.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di tingkatkan Kapasitasnya*				489 Orang	89 Orang	3.714.779.568,00	21.559.889.377,00	6.998.259.378,00	3.283.479.810,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pelaku SDM Pariwisata dan Ekraf		6.700.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				3 Laporan	3 Laporan	3.206.460.000,00	13.209.000.052,00	3.774.622.378,00	568.162.378,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			6.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				15 Orang	89 Orang	101.806.000,00	6.924.181.000,00	2.863.558.000,00	2.761.752.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				32 Orang	20 Orang	396.513.568,00	1.352.532.325,00	292.603.000,00	-103.910.568,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	74.176.000,00	67.476.000,00	57.476.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan*				50 Orang	50 Orang	614.502.000,00	1.594.650.232,00	573.771.638,00	-40.730.362,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM	Pelaku Ekonomi Kreatif		700.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				52 Orang	44 Orang	604.502.000,00	1.393.224.232,00	372.345.638,00	-232.156.362,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				10 Orang	12 Orang	10.000.000,00	201.426.000,00	201.426.000,00	191.426.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisata dan UMKM			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	J U M L A H								**74.360.268.236,00**	**102.446.562.454,00**	**71.102.058.845,00**	**725.459.976.351,26**							**55.030.000.000,00**	

XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menyesuaikan target, program, kegiatan, dan subkegiatan dengan perkembangan kebijakan, prioritas pembangunan, dan kondisi aktual pada tahun berjalan. Renja Perubahan ini berfungsi sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021–2026, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bontang, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

A. Tugas Pokok

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Prinsip-prinsip Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2025 antara lain:

1. Substansi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan RKPD;

2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, serta total dana yang diperlukan;
4. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang merupakan dokumen resmi program dan kegiatan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana, serta menjadi acuan dalam penyusunan RKA perangkat daerah setelah memperhatikan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Renja Perubahan dilakukan sebagai tindak lanjut dari dinamika yang terjadi, seperti penyesuaian kebijakan pemerintah, perubahan pagu anggaran, hasil evaluasi kinerja, maupun adanya kebutuhan strategis baru yang belum tercantum dalam Renja awal. Dengan adanya Renja Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat lebih adaptif, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Proses penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan Penyusunan, meliputi pengumpulan data, telaah kebijakan, dan pembentukan tim penyusun;
2. Penyusunan Rancangan Awal, berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja awal dan analisis kebutuhan penyesuaian program/kegiatan;
3. Penyusunan Rancangan, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif, dan masukan teknis dari unit kerja terkait;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagai wadah sinkronisasi dan penjaringan aspirasi dari para pemangku kepentingan;
5. Perumusan Rancangan Akhir, yang memuat hasil penyempurnaan berdasarkan masukan dari forum perangkat daerah serta koordinasi lintas sektor; dan
6. Penetapan, yaitu pengesahan Renja Perubahan Tahun 2025 sebagai pedoman resmi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang pada Tahun 2025 dapat berjalan optimal, terukur, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan di Kota Bontang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang adalah :

32. Landasan Idiil : Pancasila
33. Landasan Konstitusional : UUD 1945
34. Landasan Filosofis : Bhineka Tunggal Ika
35. Landasan Visional : Negara Kesatuan Republik Indonesia
36. Landasan Operasional : menyangkut peraturan perundangan yaitu:
    1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
    2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
    3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
    5. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrenbang (Lampiran VI, Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah);
    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD,, RPJMD dan RKPD;
    9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
    10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Bontang Tahun 2011 – 2016;
13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Bontang Nomor 55 Tahun 2010 sebagai perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang;
16. Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang;
17. Peraturan Kepala Daerah Nomor 16 tahun 2024 tanggal 5 Juli 2024 Tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025
18. Peraturan Kepala Daerah Nomor 19 Tahun 2024 tanggal 12 Juli 2024 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :

1. Menjadi acuan dan dasar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang dalam menyusun RKA Perubahan 2025.
2. Memberikan koridor perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman pada RKPD Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2025.

B. TUJUAN

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2022-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RAPBD.

B. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan .

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, pencapaian IKU antara Walikota dengan Kepala Dinas seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

D. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kota Bontang.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup di antaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Tahun 2026 diperlukan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas itu sendiri merupakan suatu bentuk wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja
   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku maupun indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indicator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
   Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.1.1 Evaluasi Program Tahun 2024 dan 2025

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang mempunyai Dari 2 (dua) urusan wajib pemerintahan yang difungsikan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang yakni urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan, pada Tahun 2025 untuk urusan Kearsipan ada 3 (tiga) program dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, sedangkan untuk urusan Perpustakaan ada 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan. Sedangkan pada Tahun 2024 untuk urusan Kearsipan ada 3 (tiga) program dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, sedangkan untuk urusan Perpustakaan ada 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan. Bila dibandingkan tahun 2023–2024 dari segi ketersediaan anggaran, Tahun 2024 jumlah pagu anggaran lebih besar bila di bandingkan dengan tahun 2023 karena pada tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang menerima bantuan dana DAK dari pemerintah pusat sebesar Rp. 5.499.920.000,00 (lima milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), apabila kita lihat dari anggaran yang berasal dari APBD, pada tahun 2024 anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengalami kenaikan sebesar Rp.24.696.468.989,00 (dua puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) bila dibandingkan dengan jumlah anggaran pada Tahun 2023, karena pada anggaran tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak mendapatkan dana DAK, untuk total anggarannya sebesar Rp.16.299.631.106,00, (enam belas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu serratus enam rupiah).

Untuk realisasi per program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini, dan untuk Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2024 dapat dilihat pada halaman lampiran.

Tabel 2. 10 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10 / 4)	12
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	47 orang	34 orang	36 orang	36 orang	100%	34 orang	104 orang	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 paket	-	-	-	0,00%	3 paket	3 paket	75%	
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	45 orang	10 orang	10 orang	100%	30 orang	85 orang	100%	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi Umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	75%	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	75%	
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	1 Paket	4 paket	100%	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis logistik kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	2 paket	8 paket	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.23.01..2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	75%	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	9 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	33 laporan	100%	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang pemerintah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.23.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	-	-	-	0,00%	1 unit	1 unit	25%	
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	12 unit	16 unit	100,00%	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa urusan pemerintah yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	75%	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	9 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	33 laporan	100%	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	12 laporan	44 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	68 laporan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang pemerintah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dan dibayarkan	19 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit	60 unit	100%	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	10 unit	30 unit	30 unit	100%	20 unit	60 unit	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	75%	statis
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pemustaka perpusda	51243 orang		38.500 Org dan 32 perpustakaan	79.462 Orang dan 50 Perpustakaan	206%	42350 Orang	79.462 Orang dan 50 Perpustakaan	79.462 Orang dan 50 Perpustakaan	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	30-100 jumlah perpustakaan, jumlah peserta	9 Bahan	4 layanan	6 layanan	150%	11 Bahan Pustaka	26	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK Berbasis ISO20000(ITSM : Information Technology Servece Management)	1 perpustakaan	12 layanan	12 layanan	1 layanan	8,33%	14 layanan	27 layanan	100%	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah kabupaten/kota sesuai kewenangan	129 perpustakaan	75 perpustakaan	85 perpustakaan	121 Perpustakaan	142,35%	11 perpustakaan	207 perpustakaan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat kabupaten/kota yang dikembangkan	1 eksemplar	-	3 eksemplar	3 Koleksi	100%	1 eksemplar	4 koleksi	100%	
2.23.02.2.01004	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1 perpustakaan	11 perpustakaan	15 perpustakaan	24 Perpustakaan	160%	11 perpustakaan	46 perpustakaan	100%	
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	20 perpustakaan	-	3 perpustakaan	4 Perpustakaan	133%	9 perpustakaan	13 perpustakaan	75%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenagaperpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	244 orang	150 orang	25 orang	311 Orang	1244%	150 orang	611 orang	100%	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	5 layanan	3 layanan	4 layanan	6 layanan	150%	5 layanan	14 layanan	100%	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustaaan tercetak yang dicetak dan diadakan	12 eksemplar		10 eksemplar	10 eksemplar	1	1000 eksemplar	1010 eksemplar	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	3032 eksemplar	10 eksemplar	10 eksemplar	10 eksemplar	100%	1000 eksemplar	1020 eksemplar	100%	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	30 dokumen	42 dokumen	100%	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota	5 kegiatan		1 orang	3 orang	300%	2 lokus			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	100 lokus	-	3 lokus	4 lokus	133%	2 lokus	6 lokus	100%	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 perpustakaan	11 perpustakaan	0	0	0,00%	14 perpustakaan	25 perpustakaan	100%	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota	24 orang	9 orang	7 orang	27 orang	385,71 %	3 orang	39 orang	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	1 perpustakaan	-	1 perpustakaan	1 perpustakaan	100%	1 perpustakaan	2 perpustakaan	100%	
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah duta baca tingkat daerah kabupaten/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	6 orang	-	1 orang	3 Orang	300%	1 orang	4 orang	100%	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	100%		75%	76,67%	102%	75%	75%	100,00%	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	5 perangkat daerah		5 berkas	5 berkas	100%	5 perangkat daerah	10 PD	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	5 berkas	3 berkas	5 berkas	5 berkas	100%	5 berkas	13 berkas	100%	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	1 berkas	2 berkas	2 berkas	2 berkas	100%	2 berkas	6 berkas	100%	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan arsip dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	6 laporan	-	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	12 laporan	100%	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah melakukan akuisisi, pengolahan , preservasi dan akses arsip statis	1 arsip		2 arsip	2 arsip	100%	1 perangkat daerah			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, pengolahan, Presrvasi dan Akses arisp satatis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan , preservasi dan akses arsip statis	1 arsip	1 arsip	2 arsip	2 arsip	100%	1 arsip	4 arsip	100%	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN arsip ke masyarakat	2 arsip		250 pengguna	250 pengguna	100%	30 perangkat daerah			
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan layanan kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanana kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	100 pengguna	200 pengguna	250 pengguna	250 pengguna	100%	275 pengguna	725 pengguna	1,85%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota	3 laporan	4 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	16 laporan	29,67%	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	70%		13 Persen	16,67 persen	128%	18%		50%	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan	100 berkas		1 berkas	1 berkas	100%	1 perangkat daerah	2 PD	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	100 berkas	-	1 berkas	1 berkas	100%	1 berkas	2 berkas	50%	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip perangkat daerah kabupaten/kota	100 berkas		5 daftar	5 daftar	100%	500 arsip		100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.24.03.2.03.01	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah	3 daftar	-	5 daftar	5 daftar	100%	500 arsip	505 arsip	100%	
2.24.03.2.03.02	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah	3 arsip	-	5 daftar	0	0	500 arsip	500 arsip	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	1 arsip		6 arsip	6 arsip	100%	3 perangkat daerah			
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjamin keabsahan arsip	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjamin keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	3 arsip	900 arsip	6 arsip	6 arsip	100%	700 arsip	1606 arsip	100%	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Daftar arsip dan SOP arsip	1 laporan		20 Persen	30 Persen	150%	100%			
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	2 arsip		1 SOP	3 SOP	300%	2 arsip			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	2 SOP	-	1 SOP	3 SOP	300%	2 SOP	5 SOP	100%	
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	1 arsip	-	1 Arsip	1 Arsip	100%	2 arsip	3 arsip	100%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang sebagai perangkat daerah teknis memiliki tugas pokok menyusun kebijakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan, dengan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan optimal, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana, serta sarana prasarana secara efisien dan efektif.

Sejalan dengan **visi pembangunan Kota Bontang Tahun 2025–2030, yaitu *"Terwujudnya Kota Bontang sebagai Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan sebagai Daerah Mitra IKN"***, maka arah kebijakan pembangunan daerah mengalami penyesuaian. Kondisi ini berimplikasi pada perubahan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada Renja Perubahan Tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak lagi menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun Standar Nasional, melainkan hanya menggunakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai tolok ukur pencapaian kinerja pelayanan.

Penyesuaian ini dituangkan dalam **Anggaran Perubahan Tahun 2025**, di mana Indikator Kinerja Utama (IKU) diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam **Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2025–2029**. Sebelumnya, IKU terdiri atas enam indikator, yaitu:

1. Persentase pemustaka perpustakaan umum daerah;
2. Persentase perpustakaan binaan yang telah memenuhi standar pengelolaan perpustakaan yang baik;
3. Persentase tata kelola kearsipan perangkat daerah yang baik;
4. Persentase jumlah perangkat daerah yang menyerahkan arsip statis;
5. Nilai survei kepuasan masyarakat pada pelayanan perpustakaan umum daerah;
6. Hasil penilaian Zona Integritas.

Dalam Renja Perubahan, IKU kemudian disesuaikan menjadi lima indikator yang lebih strategis, yaitu:

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM);
2. Nilai Tingkat Gemar Membaca;
3. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan;
4. Nilai Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI);

5. Nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE).

Perubahan IKU ini dilakukan untuk memperkuat fokus pengukuran kinerja pada indikator yang lebih strategis, terukur, dan relevan dengan arah kebijakan jangka menengah daerah, sekaligus mendukung terwujudnya visi Kota Bontang sebagai kota industri dan jasa yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai mitra IKN.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, aparatur, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan layanan perpustakaan maupun layanan kearsipan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang
Propinsi Kalimantan Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase pemustaka perpustakaan umum daerah	23%	42,39%	25%	26%	42,39	98,94%	25%	26%	
2	Presentase Perpustakaan binaan yang telah memenuhi standar pengelolaan Perpustakaan yang baik	22%	39,20	24%	25%	47,40	106,12%	24%	25%	
3	Persentase tata kelola Kearsipan Perangkat Daerah yang Baik	54%	76,67%	60%	62%	96,33	104,34	60%	62%	
4	Persentase Jumlah perangkat daerah yang menyerahkan arsip statis	15%	18%	21%	24%	15,33	129,63	21%	24%	
5	Nilai Survey kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Perpustakaan umum daerah	85,9	100	86,1	86,20%	100	98,14	86,1	86,20%	
6	Hasil Penilaian Zona Integritas	85,85	86,28	85,95	86	86,28	NA	85,95	86	Zona Integritas hanya OPD Kesehatan yang ditinjau tahun 2024

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Hasil analisis capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.2 menunjukkan bahwa issue utama dalam pencapaian

kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang adalah peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya antara lain :

1. Pengelolaan arsip statis berbasis teknologi belum sepenuhnya optimal, mengingat masih terbatasnya sistem digitalisasi dan infrastruktur pendukung di sejumlah perangkat daerahRendahnya pemanfaatan arsip oleh Masyarakat
2. Pemanfaatan arsip oleh masyarakat masih tergolong rendah, baik karena kurangnya sosialisasi maupun keterbatasan akses terhadap arsip yang tersedia
3. Terdapat tantangan dalam menjaga keamanan dan aksesibilitas arsip, terutama dalam menjamin perlindungan data arsip dari risiko kerusakan, kehilangan, maupun penyalahgunaan, sambil tetap memastikan arsip dapat diakses secara tepat oleh pihak yang berwenang
4. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang kearsipan, belum semua Perangkat Daerah memiliki tenaga arsiparis, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kearsipan di sejumlah perangkat daerah masih belum memadai.
5. Jumlah kunjungan ke perpustakaan belum optimal.
6. Penyelengaraan Perpustakaan yang belum merata.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Rencana Kerja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan beberapa kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD berisikan mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPK Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	15.459.667.994	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPK Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	15.459.667.994	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPK Kota Bontang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	10.069.408.362	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPK Kota Bontang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	10.069.408.362	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPK Kota Bontang	Gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	47 orang	10.069.408.362	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPK Kota Bontang	Gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	47 orang	10.069.408.362	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPK Kota Bontang	Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	148.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPK Kota Bontang	Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	148.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DPK Kota Bontang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	12 paket	70.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DPK Kota Bontang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	12 paket	70.000.000	
3	Pendidikan dan Pelatihan Formal berdasarkan tupoksi	DPK Kota Bontang	Jumlah peagawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 orang	78.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal berdasarkan tupoksi	DPK Kota Bontang	Jumlah peagawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 orang	78.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**DPK Kota Bontang**	**Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**865.364.925**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**DPK Kota Bontang**	**Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**865.364.925**	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPK Kota Bontang	Jumlah paket Komponen instalasi listrik yang disediakan	1 paket	33.977.621	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPK Kota Bontang	Jumlah paket Komponen instalasi listrik yang disediakan	1 paket	33.977.621	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPK Kota Bontang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	308.018.339	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPK Kota Bontang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	308.018.339	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPK Kota Bontang	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	24.190.035	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPK Kota Bontang	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	24.190.035	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPK Kota Bontang	Jenis logistik kantor yang disediakan	3 paket	39.976.532	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPK Kota Bontang	Jenis logistik kantor yang disediakan	3 paket	39.976.532	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPK Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	3 paket	33.044.398	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPK Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	3 paket	33.044.398	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPK Kota Bontang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	426.158.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPK Kota Bontang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	426.158.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**DPK Kota Bontang**	**Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**100%**	**553.104.870**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**DPK Kota Bontang**	**Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**100%**	**553.104.870**	
10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	DPK Kota Bontang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	3 unit	531.056.728	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	DPK Kota Bontang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	3 unit	531.056.728	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
11	Pengadaan Mebeleur	DPK Kota Bontang	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	22.048.142	Pengadaan Mebeleur	DPK Kota Bontang	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	22.048.142	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**DPK Kota Bontang**	**Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran**	**100%**	**3.075.217.280**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPK Kota Bontang**	**Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran**	**100%**	**3.075.217.280**	
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPK Kota Bontang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	10.910.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPK Kota Bontang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	10.910.000	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPK Kota Bontang	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	739.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPK Kota Bontang	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	739.000.000	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	12 laporan	2.325.307.280	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	12 laporan	2.325.307.280	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**DPK Kota Bontang**	**Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**748.072.557**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**DPK Kota Bontang**	**Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**748.072.557**	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPK Kota Bontang	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dan dibayarkan	19 unit	468.493.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPK Kota Bontang	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dan dibayarkan	19 unit	468.493.000	
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK Kota Bontang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	44.990.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK Kota Bontang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	44.990.000	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPK Kota Bontang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	234.589.557	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPK Kota Bontang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	234.589.557	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah pemustaka perpusda**	**51243 orang**	**2.821.632.616**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah pemustaka perpusda**	**51243 orang**	**2.821.632.616**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**30-100 jumlah perpustakaan, jumlah peserta**	**2.063.045.477**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**30-100 jumlah perpustakaan, jumlah peserta**	**2.063.045.477**	
18	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	DPK Kota Bontang	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK Berbasis ISO20000(ITSM : Information Technology Servece Management)	1 perpustakaan	243.826.145	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	DPK Kota Bontang	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK Berbasis ISO20000(ITSM : Information Technology Servece Management)	1 perpustakaan	243.826.145	
19	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah kabupaten/kota sesuai kewenangan	129 perpustakaan	130.160.917	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah kabupaten/kota sesuai kewenangan	129 perpustakaan	130.160.917	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
20	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat kabupaten/kota yang dikembangkan	1 eksemplar	54.980.902	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat kabupaten/kota yang dikembangkan	1 eksemplar	54.980.902	
21	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	DPK Kota Bontang	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1 perpustakaan	137.319.112	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	DPK Kota Bontang	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1 perpustakaan	137.319.112	
22	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	20 perpustakaan	65.938.000	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	20 perpustakaan	65.938.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
23	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenagaperpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	244 orang	362.104.801	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenagaperpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	244 orang	362.104.801	
24	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	5 layanan	40.961.380	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	5 layanan	40.961.380	
25	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	DPK Kota Bontang	Jumlah bahan perpustaaan tercetak yang dicetak dan diadakan	12 eksemplar	179.450.000	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	DPK Kota Bontang	Jumlah bahan perpustaaan tercetak yang dicetak dan diadakan	12 eksemplar	179.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
26	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	DPK Kota Bontang	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	3032 eksemplar	770.313.177	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	DPK Kota Bontang	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	3032 eksemplar	770.313.177	
27	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 dokumen	77.991.043	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 dokumen	77.991.043	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca**	**5 kegiatan**	**758.587.139**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca**	**5 kegiatan**	**758.587.139**	
28	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	DPK Kota Bontang	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	100 lokus	58.088.824	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	DPK Kota Bontang	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	100 lokus	58.088.824	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
29	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 perpustakaan	71.195.808	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 perpustakaan	71.195.808	
30	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	DPK Kota Bontang	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota	24 orang	219.434.067	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	DPK Kota Bontang	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota	24 orang	219.434.067	
31	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	DPK Kota Bontang	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	1 perpustakaan	320.720.936	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	DPK Kota Bontang	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	1 perpustakaan	320.720.936	
32	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	DPK Kota Bontang	Jumlah duta baca tingkat daerah kabupaten/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	6 orang	89.147.504	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	DPK Kota Bontang	Jumlah duta baca tingkat daerah kabupaten/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	6 orang	89.147.504	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**DPK Kota Bontang**	**persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik**	**100%**	**1.080.531.854**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**DPK Kota Bontang**	**persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik**	**100%**	**1.080.531.854**	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip dinamis**	**5 perangkat daerah**	**327.708.000**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip dinamis**	**5 perangkat daerah**	**327.708.000**	
33	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	DPK Kota Bontang	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	5 berkas	162.750.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	DPK Kota Bontang	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	5 berkas	162.750.000	
34	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	DPK Kota Bontang	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	1 berkas	82.458.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	DPK Kota Bontang	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	1 berkas	82.458.000	
35	Pengawasan arsip dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	6 laporan	82.500.000	Pengawasan arsip dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	6 laporan	82.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan , preservasi dan akses arsip statis**	**1 arsip**	**164.986.408**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan , preservasi dan akses arsip statis**	**1 arsip**	**164.986.408**	
36	Akuisisi, pengolahan, Presrvasi dan Akses arisp satatis	DPK Kota Bontang	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan , preservasi dan akses arsip statis	1 arsip	164.986.408	Akuisisi, pengolahan, Presrvasi dan Akses arisp satatis	DPK Kota Bontang	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan , preservasi dan akses arsip statis	1 arsip	164.986.408	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah arsip yang diinput pada sistem**	**2 arsip**	**587.837.446**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah arsip yang diinput pada sistem**	**2 arsip**	**587.837.446**	
37	Penyediaan Informasi, Akses dan layanan kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	DPK Kota Bontang	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanana kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	100 pengguna	197.837.446	Penyediaan Informasi, Akses dan layanan kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	DPK Kota Bontang	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanana kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	100 pengguna	197.837.446	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
38	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota	3 laporan	390.000.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota	3 laporan	390.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**DPK Kota Bontang**	**Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan**	**70%**	**84.859.326**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**DPK Kota Bontang**	**Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan**	**70%**	**84.859.326**	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah arsip yang dimusnahkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bawah Retensi 10 tahun**	**100 berkas**	**29.979.536**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah arsip yang dimusnahkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bawah Retensi 10 tahun**	**100 berkas**	**29.979.536**	
39	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	DPK Kota Bontang	Jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	100 berkas	29.979.536	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	DPK Kota Bontang	Jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	100 berkas	29.979.536	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah Penyelamatan arsip pada perangkat daerah**	**100 berkas**	**29.938.082**	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah Penyelamatan arsip pada perangkat daerah**	**100 berkas**	**29.938.082**	
40	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah	3 daftar	24.980.082	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah	3 daftar	24.980.082	
41	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah	3 arsip	4.958.000	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	Jumlah arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah	3 arsip	4.958.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah arsip statis hasil alih media Kabupaten/Kota yang diautentikasi**	**1 arsip**	**24.941.708**	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah arsip statis hasil alih media Kabupaten/Kota yang diautentikasi**	**1 arsip**	**24.941.708**	
42	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjamin keabsahan arsip	DPK Kota Bontang	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjamin keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	3 arsip	24.941.708	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjamin keabsahan arsip	DPK Kota Bontang	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjamin keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	3 arsip	24.941.708	
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**DPK Kota Bontang**	**Pengguna perizinan arsip yang bersifat tertutup**	**1 laporan**	**99.965.882**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**DPK Kota Bontang**	**Pengguna perizinan arsip yang bersifat tertutup**	**1 laporan**	**99.965.882**	
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan**	**2 arsip**	**99.965.882**	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**DPK Kota Bontang**	**Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan**	**2 arsip**	**99.965.882**	
43	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	DPK Kota Bontang	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	2 SOP	49.989.848	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	DPK Kota Bontang	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	2 SOP	49.989.848	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
44	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	DPK Kota Bontang	Jumlah daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	1 arsip	49.976.034	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	DPK Kota Bontang	Jumlah daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	1 arsip	49.976.034	
Total Pagu Indikatif					19.546.657.672	Total Pagu yang dibutuhkan				19.546.657.672	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan. Dalam hal ini tidak ada usulan masyarakat yang disampaikan melalui forum Musrenbang (Partisipatif) yang masuk untuk Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang pada Tahun 2025.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Propinsi Kalimantan Timur Kota Bontang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan berdasarkan Renstra Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2017-2023, Target kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Perpustakaan Nasional merupakan kondisi yang akan dicapai dan diharapkan membawa pengaruh atau dampak (outcome/impact) bagi pencapaian tujuan pembangunan perpustakaan yaitu penguatan budaya literasi dilihat dari Perspektif Pemangku Kepentingan (&akeholders Perspective), dengan indikator keberhasilan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 7
Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Perspectiæ)

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS: Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	55,3	59,3	63,3	67,3	71,3
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0

Sumber : https://www.perpusnas.go.id/webforms/uploads/files/210405020143O9U6RM03Fy.pdf

Target Kinerja Sasaran Program

Target kinerja Sasaran Program yang telah ditetapkan Perpustakaan Nasional RI merupakan kondisi yang akan dicapai dan diharapkan dalam mendukung keberhasilan target kinerja sasaran strategis yang membawa pengaruh atau dampak

(outcome/impact) dalam mewujudkan pembangunan literasi masyarakat dan kegemaran membaca di lihat dari Customers Perspectitæ dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Target Kinerja Sasaran Strategis Program Perpustakaan dan Literasi (Customers Perspectite)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SPI: Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1:16	1:15	1:14	1:13	1:12
	Rasio ketercukupan perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1 : 20.000	1 : 19.000	1 : 18.000	1 : 17.000	16.000
	peningkatan perpustakaan sesuai standar		19,48	20,45	21,42	22,39	23,36
	Tingkat Kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat			1,25	1,50	1,75	2,00
SP2: Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian,	Kepatuhan Standard Pelayanan Publik		75,5	78,5	80,0	82,0	85,0

Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan di PERPUSNAS		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
	Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Menjadi Koleksi Nasional		5	5	5	5	5
	Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah kuno		18,43	18,43	19,79	21,18	22,57

Sumber : https://www.perpusnas.go.id/webforms/uploads/files/210405020143O9U6RM03Fy.pdf

Tabel 3.1.2
Target Kinerja Sasaran Strategis Program Dukungan Manajemen
(Customers PerspectitE)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP3: Tetwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Perpustakaan	Indeks Reformasi Birokrasi PERPUSNAS	Indeks	75		85		95
	Indeks SPBE	Indeks	3,06	3,20	3,34	3,48	3,62

Nasional Yang Baik dan Handal	Opini BPK atas Laporan Keuangan PERPUSNAS						
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1

Sumber : https://www.perpusnas.go.id/webforms/uploads/files/210405020143O9U6RM03Fy.pdf

Adapun telaahan terhadap kebijakan nasional yang di lakukan oleh ANRI dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, secara spesifik dijabarkan dalam tabel Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1.3 Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2020-2024

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024
Tujuan ANRI: Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh	Indeks Pemanfaatan Arsip	60
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan	73
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	80
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI	Indeks Reformasi Birokrasi	BB

Tabel 3.1.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Program ANRI Tahun 2020-2024

PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL		
Sasaran Program 1: Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan	75
Sasaran Program 2: Peningkatan kapabilitas penyelenggara kearsipan	Indeks Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan	B

PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2024
Sasaran Program 3: Peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan	Indeks Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	B
Sasaran Program 4: Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	BB
Sasaran Program 5: Peningkatan ketersediaan arsip secara nasional	Indeks Ketersediaan Arsip	80
Sasaran Program 6: Peningkatan pelayanan informasi kearsipan	Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan	70
2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
Sasaran Program: Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	Kategori Nilai SAKIP	BB
	Opini atas Laporan Keuangan	WTP
	Indeks Layanan Publik	A
	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
	Indeks Sistem Merit	B
	Indeks SPBE	B

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengertian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SPKD untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang 2021 — 2026 mencakup substansi yang mendasar terkait dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD). Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang tahun 2021 - 2026 ini didasarkan dan tetap mengacu kepada visi dan misi Walikota terpilih pada pilkada 2021. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan teknis oleh Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kota Bontang melalui penyusunan rencana kerja selama periode 2021-2026.

Memperhatikan evaluasi kinerja dan Isu-Isu Stategis yang sudah ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Aspek Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mendukung Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Bontang Tahun 2022 – 2026 adalah :

STRATEGI ARAH DAN KEBIJAKAN

Visi Kota Bontang :"Terwujudnya Kota Bontang Yang Lebih Hebat Dan Beradab"

Misi 3 Kota Bontang yang Berdaya Saing dan Sejahtera melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia							
No.	**Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**
1	Meningkatkan budaya Literasi masyarakat Kota Bontang	1.1	Meningkatnya Jumlah pemustaka Perpustakaan Umum Daerah	1.1.1	Peningkatan budaya gemar membaca	1.1.1.1	Pembudayaan Gemar membaca Kota Bontang
		1.2	Meningkatnya perpustakaan binaan yang telah memenuhi standar pengelolaan Perpustakaan yang baik	1.2.1	Pembinaan Perpustakaan	1.2.1.1	Pengelolaan Perpustakaan Binaan Kota Bontang
Misi 1 Kota Bontang yang Harmoni melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan							
2	Meningkatkan Tata Kelola arsip Pemerintah Kota Bontang	2.1	Meningkatnya Tata kelola arsip Pemerintah	2.1.1	Pengelolaan arsip dinamis	2.1.1.1	Pengelolaan arsip Dinamis, arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional
				2.1.2	perlindungan dan penyelamatan arsip	2.1.2.1	Autetifikasi arsip statis dan Arsip hasil alih media
		3.1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang profesional dan kualitas tata kelola organisasi yang modern	3.1.1	Peningkatan pelayanan sebagai Nilai survey kepuasan masyarakat	3.1.1.1	Peningkatan pelayanan sebagai Nilai survey kepuasan masyarakat

				3.1.2	Peningkatan pelayanan sesuai dengan ZI	3.1.1.2	Hasil Evaluasi Pemkot

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Perputakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2025 sesuai dengan Renstra mencakup 5 program yang terdiri dari 14 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

Urusan Pemerintah Bidang perpustakaan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

7. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

3. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

9. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
10. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
11. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

12. Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun
13. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
14. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

15. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan telah sesuai dengan RKPD akhir Tahun 2025 oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3. 9 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang (sesuai Renstra)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**DPK Kota Bontang**						
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	**DPK Kota Bontang**	**100%**	**10.069.408.362**	**APBD**		**100%**	**5.466.567.275**
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	DPK Kota Bontang	47 orang	10.069.408.362	APBD		36 orang	5.466.567.275
2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**DPK Kota Bontang**	**100%**	**148.500.000**	**APBD**		**100%**	**249.000.000**
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	DPK Kota Bontang	12 paket	70.000.000	APBD		12 paket	70.000.000
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal berdasarkan tupoksi	Jumlah peagawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	DPK Kota Bontang	12 orang	78.500.000	APBD		12 orang	179.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**	**DPK Kota Bontang**	**100%**	**865.364.925**	**APBD**		**100%**	**288.000.000**
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik yang disediakan	DPK Kota Bontang	1 paket	33.977.621	APBD		1 paket	34.000.000
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DPK Kota Bontang	3 paket	308.018.339	APBD		3 paket	70.000.000
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	DPK Kota Bontang	1 Paket	24.190.035	APBD		1 Paket	12.000.000
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis logistik kantor yang disediakan	DPK Kota Bontang	3 paket	39.976.532	APBD		3 paket	40.000.000
2.23.01..2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	DPK Kota Bontang	3 paket	33.044.398	APBD		3 paket	32.000.000
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPK Kota Bontang	12 laporan	426.158.000	APBD		12 laporan	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**DPK Kota Bontang**	**100%**	**553.104.870**	**APBD**		**100%**	**45.000.000**
2.23.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	DPK Kota Bontang	3 unit	531.056.728	APBD		3 unit	20.000.000
2.23.01.2.07.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah paket mebel yang disediakan	DPK Kota Bontang	3 unit	22.048.142	APBD		3 unit	25.000.000
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran**	**DPK Kota Bontang**	**100%**	**3.075.217.280**	**APBD**		**100%**	**2.038.500.000**
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	DPK Kota Bontang	1 laporan	10.910.000	APBD		1 laporan	4.500.000
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	DPK Kota Bontang	12 laporan	739.000.000	APBD		12 laporan	366.000.000
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DPK Kota Bontang	12 laporan	2.325.307.280	APBD		12 laporan	1.668.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**DPK Kota Bontang**	**100%**	**748.072.557**	**APBD**		**100%**	**206.995.811**
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dan dibayarkan	DPK Kota Bontang	19 unit	468.493.000	APBD		20 unit	98.995.811
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	DPK Kota Bontang	12 unit	44.990.000	APBD		20 unit	45.000.000
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPK Kota Bontang	1 unit	234.589.557	APBD		1 unit	63.000.000
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Jumlah pemustaka perpusda**	**DPK Kota Bontang**	**51243 orang**	**2.821.632.616**	**APBD**		**42350 Orang**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**DPK Kota Bontang**	**30-100 jumlah perpustakaan, jumlah peserta**	**2.063.045.477**	**APBD**		**30-100 jumlah perpustakaan, jumlah peserta**	**2.231.764.664**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK Berbasis ISO20000(ITSM : Information Technology Servece Management)	DPK Kota Bontang	1 perpustakaan	243.826.145	APBD		14 layanan	324.579.768
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah kabupaten/kota sesuai standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	DPK Kota Bontang	129 perpustakaan	130.160.917	APBD		11 perpustakaan	141.051.000
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat kabupaten/kota yang dikembangkan	DPK Kota Bontang	1 eksemplar	54.980.902	APBD		1 eksemplar	80.525.500
2.23.02.2.0104	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	DPK Kota Bontang	1 perpustakaan	137.319.112	APBD		11 perpustakaan	151.012.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan kabupaten/kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	DPK Kota Bontang	20 perpustakaan	65.938.000	APBD		9 perpustakaan	87.846.000
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenagaperpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	244 orang	362.104.801	APBD		150 orang	443.153.000
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	DPK Kota Bontang	5 layanan	40.961.380	APBD		5 layanan	52.765.396
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka (Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat)	Jumlah bahan perpustaaan tercetak yang dicetak dan diadakan	DPK Kota Bontang	12 eksemplar	179.450.000	APBD		1000 eksemplar	653.255.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	DPK Kota Bontang	3032 eksemplar	770.313.177	APBD		1000 eksemplar	198.576.500
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	30 dokumen	77.991.043	APBD		30 dokumen	99.000.000
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca**	**DPK Kota Bontang**	**5 kegiatan**	**758.587.139**	**APBD**		**2 lokus**	**838.235.336**
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	DPK Kota Bontang	100 lokus	58.088.824	APBD		2 lokus	70.525.500
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	DPK Kota Bontang	1 perpustakaan	71.195.808	APBD		14 perpustakaan	92.020.090

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota	DPK Kota Bontang	24 orang	219.434.067	APBD		3 orang	230.062.246
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	DPK Kota Bontang	1 perpustakaan	320.720.936	APBD		1 perpustakaan	350.627.500
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah duta baca tingkat daerah kabupaten/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	DPK Kota Bontang	6 orang	89.147.504	APBD		1 orang	95.000.000
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik**	**DPK Kota Bontang**	**100%**	**1.080.531.854**	**APBD**		**75%**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip dinamis**	**DPK Kota Bontang**	**5 perangkat daerah**	**327.708.000**	**APBD**		**5 perangkat daerah**	**395.000.000**
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	DPK Kota Bontang	5 berkas	162.750.000	APBD		5 berkas	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	DPK Kota Bontang	1 berkas	82.458.000	APBD		2 berkas	97.500.000
2.24.02.2.01.03	Pengawasan arsip dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	DPK Kota Bontang	6 laporan	82.500.000	APBD		6 laporan	97.500.000
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan , preservasi dan akses arsip statis**	**DPK Kota Bontang**	**1 arsip**	**164.986.408**	**APBD**		**1 perangkat daerah**	**185.000.000**
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, pengolahan, Presrvasi dan Akses arisp satatis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan , preservasi dan akses arsip statis	DPK Kota Bontang	1 arsip	164.986.408	APBD		1 arsip	185.000.000
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah arsip yang diinput pada sistem**	**DPK Kota Bontang**	**2 arsip**	**587.837.446**	**APBD**		**30 perangkat daerah**	**735.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan layanan kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanana kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	DPK Kota Bontang	100 pengguna	197.837.446	APBD		275 pengguna	375.000.000
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota	DPK Kota Bontang	3 laporan	390.000.000	APBD		6 laporan	360.000.000
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase berkas arsip yang dilindungi dan diselamatkan**	**DPK Kota Bontang**	**70%**	**84.859.326**	**APBD**		**18%**	
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Jumlah arsip yang dimusnahkan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bawah Retensi 10 tahun**	**DPK Kota Bontang**	**100 berkas**	**29.979.536**	**APBD**		**1 perangkat daerah**	**40.000.000**
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	DPK Kota Bontang	100 berkas	29.979.536	APBD		1 berkas	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.24.03.2.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Jumlah Penyelamatan arsip pada perangkat daerah**	**DPK Kota Bontang**	**100 berkas**	**29.938.082**	**APBD**		**500 arsip**	**60.000.000**
2.24.03.2.03.01	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah	DPK Kota Bontang	3 daftar	24.980.082	APBD		500 arsip	30.000.000
2.24.03.2.03.02	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah	DPK Kota Bontang	3 arsip	4.958.000	APBD		500 arsip	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.24.03.2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Jumlah arsip statis hasil alih media Kabupaten/Kota yang diautentikasi**	**DPK Kota Bontang**	**1 arsip**	**24.941.708**	**APBD**		**3 perangkat daerah**	**25.000.000**
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjamin keabsahan arsip	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjamin keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	DPK Kota Bontang	3 arsip	24.941.708	APBD		700 arsip	25.000.000
2.24.04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Pengguna perizinan arsip yang bersifat tertutup**	**DPK Kota Bontang**	**1 laporan**	**99.965.882**	**APBD**		**100%**	
2.24.04.2.01	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan**	**DPK Kota Bontang**	**2 arsip**	**99.965.882**	**APBD**		**2 arsip**	**125.000.000**
2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	DPK Kota Bontang	2 SOP	49.989.848	APBD		2 SOP	62.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	DPK Kota Bontang	1 arsip	49.976.034	APBD		2 arsip	62.500.000
Total Anggaran					**19.546.657.672**				**12.929.063.086**

XXI. SEKRETARIAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II.

Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bontang terdiri atas:

1. Penyajian rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:

I. Pendahuluan
II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
IV. Penutup

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Peresidan Republik Indonesi Nomor 59 tahun 17 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencangan peraturan Daerah Tentan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 90 Tahun 2019. Tentang Klasifikasi,Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Prencenaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kota Bontang tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangkah Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan perkembangan keadaan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Bontang dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Bontang sampai dengan triwulan I

Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Bontang tahun 2025 dapat dicapai.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan;
1.4 Sistematik Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

SampaiDengan Triwulan I Tahun 2025;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah;

2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Sasaran dan Prioritas Rencana Kerja Tahun 2025;
4.2 Perubahan Rencana dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dimana Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Instansi Daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Bontang sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2025, dapat di sampaiakan sebagai berikut :

PEMERINTAH KOTA BONTANG

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN APBD KOTA BONTANG

TAHUN ANGGARAN 2025

(Periode : Triwulan I)

Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat		Catatan			
									Murni				Perubahan												
									Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV										
					Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Sekretariat Daerah	04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	90.185.225.882,00	0	88	88	19.067.595.789,00	10			0	0	0	0	0	0	28,41	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	Persen	233.886.958,00	0	100	100	13.481.100,00	20			0	0	0	0	0	0	10	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	233.886.958,00	0	5	5	13.481.100,00	1			0	0	0	0	0	0	40	SR	SR	Pencapaian kinerja terealisasi 1 Dokumen yaitu RENJA			

																						Murni 2025			
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Orang	39.600.049.806,00	0	128	128	8.472.805.310,00	163			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST	Realisasi kinerja Penyediaan gaji dan tunjangan ASN melebihi target, karena ada penambahan P3K pada bulan Maret			
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	39.600.049.806,00	0	128	128	8.472.805.310,00	163			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST	Realisasi kinerja Penyediaan gaji dan tunjangan ASN melebihi target, karena ada penambahan P3K pada bulan Maret			
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	Orang	578.439.000,00	0	250	250	481.709.403,00	51			0	0	0	0	0	0	44,4	SR	SR	Capaian pelaksanaan kinerja dengan capaian Tinggi di TW I,			
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	15.000.000,00	0	1	1	0	0			0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	Capaian realisasi kinerja belum tercapai			

																					, dikarenakan adanya perubahan peruntukan untuk penggunaan pakaian KDH/WKDH			
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	563.439.000,00	0	98	98	481.709.403,00	51			0	0	0	0	0	0	67,35	SR	S	Capaian pelaksanaan kinerja dengan capaian Tinggi di TW I,			
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	Layanan	6.131.195.389,00	0	50	50	774.774.349,00	10			0	0	0	0	0	0	42	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	159.782.848,00	0	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	nan	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1.216.270.622,00	0	37	0	139.010.900,00	5			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	178.493.000,00	0	12	12	31.262.000,00	3			0	0	0	0	0	0	50	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	79.090.419,00	0	2	0	0	0			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				

Sekretariat Daerah	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1.006.425.500,00	0	4	0	204.092.500,00	1			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3.491.133.000,00	0	12	0	400.408.949,00	1			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Jenis	195.574.114,00	0	14	14	0	0			0	0	0	0	0	0	3,57	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	195.574.114,00	0	25	0	0	0			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	29.415.354.440,00	0	8	8	5.265.344.152,00	8			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2.745.000,00	0	12	12	0	3			0	0	0	0	0	0	50	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5.556.000.000,00	0	12	12	970.100.800,00	3			0	0	0	0	0	0	50	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	23.856.609.440,00	0	12	0	4.295.243.352,00	3			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	Jenis	4.030.378.400,00	0	60	60	1.109.260.805,00	15			0	0	0	0	0	0	12,5	SR	SR				

Sekretariat Daerah	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	776.624.000,00	0	2	0	252.450.000,00	0			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1.864.663.000,00	0	160	0	513.746.126,00	0			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	833.399.400,00	0	122	0	37.932.179,00	0			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	555.692.000,00	0	5	5	305.132.500,00	2			0	0	0	0	0	0	40	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Orang/Bulan	1.150.529.094,00	0	2	2	192.467.359,00	2			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	906.639.094,00	0	2	2	192.467.359,00	2			0	0	0	0	0	0	50	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	Paket	200.890.000,00	0	2	2	0	2			0	0	0	0	0	0	50	SR	SR				

		dan Wakil Kepala Daerah	dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan																					
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	43.000.000,00	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jenis	2.348.239.020,00	0	33	33	97.967.412,00	5			0	0	0	0	0	0	27,27	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1.258.481.568,00	0	25	25	62.055.444,00	3			0	0	0	0	0	0	20	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1.089.757.452,00	0	24	0	35.911.968,00	2			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah kegiatan penataan organisasi	Kegiatan	1.241.448.241,00	0	12	12	149.368.908,00	1			0	0	0	0	0	0	50	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	330.960.040,00	0	6	0	46.241.412,00	0			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	422.880.591,00	0	4	0	41.342.500,00	0			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan	Dokumen	487.607.610,00	0	3	0	61.784.996,00	1			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				

			Reformasi Birokrasi																					
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kegiatan	5.260.131.420,00	0	831	831	2.510.416.991,00	0			0	0	0	0	0	0	0	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	1.623.806.000,00	0	4	0	241.242.561,00	1			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	579.441.914,00	0	2	0	334.363.830,00	1			0	0	0	0	0	0	0	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	3.056.883.506,00	0	4	0	1.934.810.600,00	1			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan	Persen	53.847.681.956,00	0	100	100	12.653.196.099,00	15			0	0	0	0	0	0	35	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan	Persen	1.250.494.207,00	0	100	100	180.240.366,00	25			0	0	0	0	0	0	50	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	357.304.357,00	0	5	5	28.181.800,00	1			0	0	0	0	0	0	40	SR	SR	Untuk Triwulan I sudah tercapai 1 Dokumen Kegiatan Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			

Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	676.390.259,00	0	5	5	27.335.267,00	1			0	0	0	0	0	0	40	SR	SR	Untuk Triwulan I sudah tercapai 1 Dokumen kegiatan Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	216.799.591,00	0	4	4	124.723.299,00	1			0	0	0	0	0	0	50	SR	SR	Untuk Triwulan I sudah tercapai 1 Dokumen sesuai target yaitu kegiatan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	48.440.535.052,00	0	8	8	11.612.844.213,00	2			0	0	0	0	0	0	25	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	2.424.773.688,00	0	5	0	83.407.365,00	1			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST	Target triwulan pertama sudah terlaksana sesuai			

																						dengan jadwal			
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	326.425.440,00	0	4	0	0	0			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST	Target kinerja di Triwulan I yang sudah ditargetkan tidak terlaksana dikarenakan belum melakukan monev lapangan			
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	190.557.224,00	0	2	0	4.000.000,00	1			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST	Target Triwulan I Terlaksana dengan pengajuan usulan perubahan perwali Beasiswa			
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja	Presentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan;	Persen	40.773.074.100,00	0	100	100	11.411.924.006,00	25			0	0	0	0	0	0	50	SR	SR				

		Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	presentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat																						
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	4.725.704.600,00	0	369	0	113.512.842,00	0			0	0	0	0	0	0	0	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kebijakan prodak hukum yang diharmonisasi	Persen	2.711.968.827,00	0	100	100	740.297.620,00	11,5			0	0	0	0	0	0	25	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	689.344.903,00	0	38	38	91.491.240,00	4			0	0	0	0	0	0	26,32	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	1.884.483.000,00	0	13	13	620.556.700,00	6			0	0	0	0	0	0	76,92	SR	T				
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	138.140.924,00	0	75	75	28.249.680,00	5			0	0	0	0	0	0	16	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerja sama daerah	MoU	1.444.683.870,00	0	10	10	119.813.900,00	3			0	0	0	0	0	0	70	SR	S				
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja	Dokumen	1.357.701.870,00	0	7	0	116.411.500,00	1			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST	untuk Triwulan I sudah tercapai			

			Sama Dalam Negeri																			1 Dokumen Kegiatan Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			
Sekretariat Daerah	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	86.982.000,00	0	10	0	3.402.400,00	2			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST	Untuk Triwulan I Sudah tercapai 2 Laporan Kegiatan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			
Sekretariat Daerah	04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian	Persen	4.525.320.706,00	0	100	100	2.020.255.906,00	15			0	0	0	0	0	0	40	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan	Persen	2.139.788.714,00	0	100	100	1.759.575.701,00	60			0	0	0	0	0	0	80	SR	T	Untuk Triwulan 1 sudah tercapai 1 Laporan masing-masing sesuai target yaitu Kegiatan Rapat Koordinasi Inflasi bersama OPD terkait dan			

																							Kemendagri melalui Virtual, Kegiatan HBKN IDUL FITRI dan Kegiatan Monitoring Evaluasi Barang Bersubsidi dan Non Subsidi. untuk Kuota Kota Bontang, contoh (LPG 3 Kg dan BBM)			
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1.325.233.470,00	0	12	12	1.243.831.750,00	4			0	0	0	0	0	0	66,67	SR	S	Untuk Triwulan 1 sudah tercapai 1 Laporan sesuai target yaitu Kegiatan HLM TPAKD			
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	634.423.676,00	0	12	12	505.067.091,00	4			0	0	0	0	0	0	66,67	SR	S	Untuk Triwulan 1 sudah tercapai 4 Laporan sesuai target			

																						yaitu Kegiatan HLM TPAKD dan INFLASI			
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	180.131.568,00	0	3	3	10.676.860,00	0			0	0	0	0	0	0	33,33	SR	SR	untuk Triwulan 1 dalam proses masing-masing 1 kegiatan Rapat Koordinasi dengan PDAM , AUJ, mengenai Koordinasi dan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Implementasi Program Prioritas Pembangunan	Dokumen	1.031.297.809,00	0	16	16	75.796.827,00	2			0	0	0	0	0	0	31,25	SR	SR				
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	529.000.244,00	0	2	0	75.796.827,00	0			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				

Sekretariat Daerah	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	111.400.000,00	0	4	0	0	1			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	390.897.565,00	0	4	0	0	1			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST				
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	Persen	921.220.163,00	0	100	100	160.340.642,00	40			0	0	0	0	0	0	70	SR	S	- Realisasi indikator disesuaikan dengan pelaksanaan proses pemilihan penyedia berdasarkan usulan perangkat daerah yang masuk pada aplikasi Simbaja - karena ada aplikasi baru yaitu inaproc untuk ekatalog V6, jd pelaku pengadaan harus			

																				melakukan pendaftaran baru - realisasi kinerja pembinaan dan advokasi PBJ melebihi target karena memberikan penyedia turut diundang dalam kegiatan sosialisasi ekatalog v6			
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	245.696.693,00	0	185	185	35.660.608,00	81			0	0	0	0	0	0	85,95	SR	T	Realisasi indikator disesuaikan dengan pelaksanaan proses pemilihan penyedia berdasarkan usulan perangkat daerah yang masuk pada			

																						aplikasi Simbaja			
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	135.925.722,00	0	1.000,00	1.000,00	31.322.000,00	424			0	0	0	0	0	0	66,4	SR	S	karena ada aplikasi baru yaitu inaproc untuk ekatalog V6, jd pelaku pengadaan harus melakukan pendaftaran baru			
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	539.597.748,00	0	200	200	93.358.034,00	422			0	0	0	0	0	0	100	SR	ST	realisasi kinerja pembinaan dan advokasi PBJ melebihi target karena memberikan penyedia turut diundang dalam kegiatan sosialisasi ekatalog v6			
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Penyusunan dan Pemantauan Kebijakan dibidang SDA	Persen	433.014.020,00	0	100	100	24.542.736,00	25			0	0	0	0	0	0	50	SR	SR				

Sekretariat Daerah	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	77.060.392,00	0	4	4	0	0			0	0	0	0	0	0	50	SR	SR	belum ada capaian			
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	94.279.094,00	0	4	4	18.628.236,00	1			0	0	0	0	0	0	50	SR	SR	Untuk Triwulan 1 sudah tercapai : 1 Dokumen hasil Rapat Koordinasi Dampak Aktivitas Galian C di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat 1 Dokumen hasil Kegiatan Pendampingan Aktivitas Tambang			

| | | |

																						(Persero da) di Samarinda			
Sekretariat Daerah	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	261.674.534,00	0	4	4	5.914.500,00	1			0	0	0	0	0	0	50	SR	SR	Untuk Triwulan 1 sudah tercapai : 1 Dokumen hasil Rapat Evaluasi Jejak Minat Studi Kelayakan Program Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) APBN oleh Tim Ditjen Migas Kementerian ESDM RI dan LEMTEK Universitas Indonesia serta telah			

| | | |

| | | |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan dengan Triwulan I 2025 dapat di jelaskan secara berikut:

a. Dari 52 Sub kegiatan, sebanyak 8 sub kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
4. Pengadaan Mebel;
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
6. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepal;
7. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial;
8. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.

b. Terdapat 11 sub kegiatan yang belum terealisasi sampai dengan akhir triwulan I yaitu :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
4. Pengadaan Mebel;
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
6. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepal;
8. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial;
9. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
10. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;.
11. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Kegiatan – kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV.

c. Sedangkan sub kegiatan yang tersisa telah berjalan sesuai dengan target periodiknya.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan yang dimaksud merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pada Sekretariat

Daerah Kota Bontang, standar pelayanan minimal/standar nasional tidak ditetapkan. Oleh karena itu analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bontang tidak disajikan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2021-2026, bahwa Sekretariat Daerah merupakan suatu wadah organisasi publik yang memiliki tujuan memberikan pelayanan prima kepada seluruh steakholder dalam rangka pelaksanaan roda organisasinya. Disamping peran dan kewenangan yang dimiliki serta berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan, Sekretariat Daerah juga menghadapi berbagai permasalahan baik secara internal mapun eksternal sesuai kewenangannya.

Dalam suatu perencanaan strartegis mengetahui isu strategis merupakan suatu hal pokok, karena dengan terindentifikasinya isu strategis secara benar dan tepat, dapat menentukan strategi atau kebijakan yang akan diambil dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi. Isu-isu strategis bersifat kompleks diantara berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Diantara nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi kemampuan organisasi mencapai sasaran masa depan yang diinginkan.

Isu-isu strategis Sekretariat Daerah mencakup beberapa hal berikut;

a. Meningkatkan SDM aparatur Sekretariat Daerah yang profesional, disiplin dan penuh tanggung jawab;
b. Mewujudkan pelayanan umum masyarakat yang prima dan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
c. Meningkatkan system informasi yang menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah;
d. Mewujudkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat;
e. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan internal Sekretariat Daerah dan kebutuhan masyarakat secara luas.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 SASARAN DAN PRIORITAS RENJA TAHUN 2025

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Sekretariat Daerah untuk tahun 2021 – 2026 mempunyai 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan sasaran tersebut, prioritas program ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

3.2 PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

Program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kota Bontang untuk Renja Perubahan tahun 2025 yaitu 3 Program dengan jumlah 19 kegiatan dan 52 sub kegiatan pada perubahan renja, pagu anggaran sekretariat daerah setelah perubahan sebesar : Rp 189.052.421.544,00

Perubahan Renja Sekretariat Daerah 2025 selengkapnya dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Bontang
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPDP 2025				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		SEKRETARIAT DAERAH							**134.540.280.476,00**	**151.874.119.802,00**	**189.052.421.544,00**	**54.512.141.068,00**					
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**134.540.280.476,00**	**151.874.119.802,00**	**189.052.421.544,00**	**54.512.141.068,00**					
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**134.540.280.476,00**	**151.874.119.802,00**	**189.052.421.544,00**	**54.512.141.068,00**					
A	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**81.459.445.318,00**	**92.280.606.713,00**	**110.337.199.882,00**	**-7.111.306.817,00**					
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu*				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	401.898.715,00	237.817.808,00	137.817.808,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola	Sekretariat Daerah

															pemerintahan	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	401.898.715,00	237.817.808,00	137.817.808,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah*			140 Orang	140 Orang	35.897.140.455,00	39.600.049.806,00	39.600.049.806,00	3.702.909.351,00			-	- -	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				122 Orang / bulan	139 Orang / bulan	35.897.140.455,00	39.600.049.806,00	39.600.049.806,00	3.702.909.351,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian*				200 Orang	200 Orang	1.295.440.000,00	824.013.000,00	578.439.000,00	-717.001.000,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	98 Orang	1.280.440.000,00	809.013.000,00	563.439.000,00	-717.001.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran*				50 Layanan	50 Layanan	4.297.228.714,00	7.498.159.696,00	16.392.204.629,00	12.094.975.915,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola	Sekretariat Daerah

															pemerintahan	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	202.574.623,00	159.782.848,00	39.782.848,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	25 Paket	500.000.000,00	1.354.188.245,00	11.077.365.862,00	10.577.365.862,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	178.498.194,00	178.493.000,00	178.493.000,00	-5.194,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	98.898.020,00	98.870.328,00	79.090.419,00	-19.807.601,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	357.000.000,00	1.006.425.500,00	1.156.375.500,00	799.375.500,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata	

												Desa			kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	3.042.832.500,00	4.657.608.000,00	3.741.097.000,00	698.264.500,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*			15 Jenis	15 Jenis	56.796.175,00	195.574.114,00	2.890.999.924,00	2.834.203.749,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	2.369.574.000,00	2.359.574.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				59 Unit	16 Unit	46.796.175,00	195.574.114,00	521.425.924,00	474.629.749,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*				8 Jenis	8 Jenis	29.226.103.127,00	29.447.354.440,00	29.512.084.040,00	285.980.913,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola	Sekretariat Daerah

																pemeri ntahan	
	4.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Lapor an	12 Lapora n	2.783.261,0 0	2.745.000,0 0	2.745.000,0 0	-38.261,00	Kota Bont ang, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningk atan penyele nggaraa n tata kelola pemeri ntahan Peningk atan penyele nggaraa n tata kelola pemeri ntahan	
	4.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lapor an	12 Lapora n	8.500.000.0 00,00	5.556.000.0 00,00	5.556.000.0 00,00	-2.944.000.000,00	Kota Bont ang, Sem ua Keca mat an, Sem ua Kel/ Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningk atan penyele nggaraa n tata kelola pemeri ntahan Peningk atan penyele nggaraa n tata kelola pemeri ntahan	
	4.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.723.319.866,00	23.888.609.440,00	23.953.339.040,00	3.230.019.174,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*				60 Jenis	60 Jenis	3.378.758.537,00	4.030.378.400,00	5.930.378.400,00	2.551.619.863,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	800.000.000,00	776.624.000,00	776.624.000,00	-23.376.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola	

															pemeri ntahan	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				94 Unit	64 Unit	1.828.758.537,00	1.864.663.000,00	2.164.663.000,00	335.904.463,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	80 Unit	700.000.000,00	833.399.400,00	833.399.400,00	133.399.400,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8 Unit	50.000.000,00	555.692.000,00	2.155.692.000,00	2.105.692.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan layanan administrasi keuangan*				2 Orang	2 Orang	1.075.930.094,00	1.150.529.094,00	1.150.529.094,00	74.599.000,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	852.039.094,00	906.639.094,00	906.639.094,00	54.600.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola	

															pemeri ntahan	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	180.000.000,00	200.890.000,00	200.890.000,00	20.890.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang	2 Orang	43.891.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	-891.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	

	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*				49 Jenis	49 Jenis	2.096.375.716,00	2.348.239.020,00	7.548.239.020,00	5.451.863.304,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	1.048.187.858,00	1.258.481.568,00	2.358.481.568,00	1.310.293.710,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	1.048.187.858,00	1.089.757.452,00	5.189.757.452,00	4.141.569.594,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata	

												Desa			kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah kegiatan Kegiatan penataan organisasi*				13 Kegiatan	13 Kegiatan	1.300.000.000,00	1.449.784.781,00	1.241.448.241,00	-58.551.759,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan															
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	5 Dokumen	400.000.000,00	399.081.810,00	330.960.040,00	-69.039.960,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana															

			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	3 Laporan	480.000.000,00	478.535.361,00	422.880.591,00	-57.119.409,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi															
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	420.000.000,00	572.167.610,00	487.607.610,00	67.607.610,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*				851 Kegiatan	851 Kegiatan	2.735.672.500,00	5.334.625.647,00	5.255.009.920,00	2.519.337.420,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola	Sekretariat Daerah

															pemerintahan	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			12 Laporan	12 Laporan	1.635.672.500,00	1.623.806.000,00	1.623.806.000,00	-11.866.500,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	599.947.776,00	579.441.914,00	-20.558.086,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														

			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	3.110.871.871,00	3.051.762.006,00	2.551.762.006,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
B	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan ; Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakat**				**100 Persen**	**100 Persen**	**50.945.889.164,00**	**54.566.293.598,00**	**74.089.900.956,00**	**-7.845.251.543,00**					
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan*				1 Kebijakan	1 Kebijakan	1.338.397.187,00	1.332.259.767,00	1.750.494.207,00	412.097.020,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan															

			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				5 Dokumen	5 Dokumen	400.698.074,00	397.735.727,00	357.304.357,00	-43.393.717,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				5 Dokumen	5 Dokumen	705.657.660,00	705.590.449,00	1.176.390.259,00	470.732.599,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	232.041.453,00	228.933.591,00	216.799.591,00	-15.241.862,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata	

												Desa			kelola pemerintahan	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*				5 Kebijakan	5 Kebijakan	46.577.653.021,00	48.752.362.043,00	67.682.754.052,00	21.105.101.031,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				12 Dokumen	12 Dokumen	41.154.862.625,00	2.589.259.731,00	2.424.773.688,00	-38.730.088.937,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial															

			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	734.658.267,00	375.511.800,00	326.425.440,00	-408.232.827,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,				12 Dokumen	12 Dokumen	4.688.132.129,00	234.866.412,00	1.190.557.224,00	-3.497.574.905,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	

			Trantibum Linmas													
	4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				-	2439 Keluarga	0,00	40.773.187.500,00	47.335.293.100,00	47.335.293.100,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				-	369 Keluarga	0,00	4.779.536.600,00	16.405.704.600,00	16.405.704.600,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	

	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah kebijakan prodak hukum yang ditetapkan*				49 Kebijakan	33 Kebijakan	1.479.838.956,00	2.929.361.948,00	3.211.968.827,00	1.732.129.871,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah															
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				33 Dokumen	33 Dokumen	700.000.000,00	758.040.741,00	689.344.903,00	-10.655.097,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum															
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	22 Kasus	600.000.000,00	1.998.930.000,00	2.384.483.000,00	1.784.483.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata	

												Desa			kelola pemerintahan	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			49 Dokumen	49 Dokumen	179.838.956,00	172.391.207,00	138.140.924,00	-41.698.032,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah kerja sama daerah*			10 MOU	10 MOU	1.550.000.000,00	1.552.309.840,00	1.444.683.870,00	-105.316.130,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				7 Dokumen	7 Dokumen	1.400.000.000,00	1.443.549.840,00	1.357.701.870,00	-42.298.130,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama															
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				10 Laporan	10 Laporan	150.000.000,00	108.760.000,00	86.982.000,00	-63.018.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
C	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Presentase peningkatan implementasi kebijakan bidang perekonomian; Persentase peningkatan implementasi kebijakan bidang pembangunan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.134.945.994,00**	**5.027.219.491,00**	**4.625.320.706,00**	**-473.739.218,00**					

	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan*				3 Kebijakan	3 Kebijakan	425.249.840,00	2.275.753.657,00	2.139.788.714,00	1.714.538.874,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	104.140.240,00	1.402.504.950,00	1.325.233.470,00	1.221.093.230,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil															
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				12 Dokumen	12 Dokumen	139.879.200,00	692.578.095,00	634.423.676,00	494.544.476,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata	

												Desa			kelola pemerintahan	
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			3 Dokumen	3 Dokumen	181.230.400,00	180.670.612,00	180.131.568,00	-1.098.832,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah Implementasi Program Pembangunan*			160 Program Prioritas	160 Program Prioritas	827.521.620,00	1.121.422.259,00	1.131.297.809,00	303.776.189,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	579.100.000,00	579.036.694,00	529.000.244,00	-50.099.756,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	126.582.399,00	126.519.000,00	111.400.000,00	-15.182.399,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan															
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	121.839.221,00	415.866.565,00	490.897.565,00	369.058.344,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata	

												Desa			kelola pemerintahan	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa*				4 Layanan	4 Layanan	513.288.258,00	1.153.355.163,00	921.220.163,00	407.931.905,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa															
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				185 Dokumen	185 Dokumen	300.000.000,00	299.498.693,00	245.696.693,00	-54.303.307,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik															

			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1000 Dokumen	1000 Dokumen	114.838.776,00	157.065.722,00	135.925.722,00	21.086.946,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				200 Orang	200 Orang	98.449.482,00	696.790.748,00	539.597.748,00	441.148.266,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Penyusunan dan Pemantauan Kebijakan dibidang SDA*				3 Kebijakan	3 Kebijakan	368.886.276,00	476.688.412,00	433.014.020,00	64.127.744,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola	Sekretariat Daerah

																pemerintahan	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				4 Dokumen	4 Dokumen	83.853.622,00	83.620.392,00	77.060.392,00	-6.793.230,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				4 Dokumen	4 Dokumen	101.912.654,00	101.788.628,00	94.279.094,00	-7.633.560,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	

	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				4 Dokumen	4 Dokumen	183.120.000,00	291.279.392,00	261.674.534,00	78.554.534,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	J U M L A H								**134.540.280.476,00**	**151.874.119.802,00**	**189.052.421.544,00**	**54.512.141.068,00**					

XXII. SEKRETARIAT DPRD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah. Bahwa setiap pengelola pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD setiap Tahunnya.

Sekretariat DPRD Kota Bontang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan rakyat yaitu fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Segala sesuatu terkait kebutuhan pelayanan tersebut telah terangkum dalam dokumen Renja Sekretariat DPRD.

RENJA Perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tetap mengacu pada RKPD Kota Bontang tahun 2025 dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bontang 2021-2026. Oleh karena itu secara subtansial tujuan, sasaran dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh subtansi dokumen Renja Sekretariat DPRD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 202 adalah :

r. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

s. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
t. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224);
u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
v. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
z. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025;
aa. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
bb. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat

DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD. Disamping itu, penyusunan Renja sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk tahun 2025 dalam pencapaian Visi Misi dan Program serta Tolak ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir Tahun Anggaran. Sedangkan tujuan penyusunan RENJA, antara lain sebagai berikut:

1. Tersusunnya instrumen rencana kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang
2. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
3. Tersusunnya program-program pembangunan dan rencana kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kota Bontang.
4. Tersusunnya kegiatan dan alokasi anggaran dalam kurun waktu 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Rentra OPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kajian (review) terhadap Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) serta kesesuaian capaian Renja terhadap Renstra.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan subkegiatan proritas Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2025.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra OPD dan tingkat kerja yang dicapai oleh OPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Berisikan kajian terhadap program, kegiatan dan subkegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan OPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tujuan, sasaran dan program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dicapai dan dilaksanakan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dicapai dan dilaksanakan.

4.1. Program, Kegiatan dan Pendanaan Pada Rencana Kerja

Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan, uraian secara garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan subkegiatan

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini dijelaskan mengenai catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya maupun kaidah-kaidah pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SEKRETARIAT DPRD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 di tuangkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-OPD) tahun 2024. Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Bontang telah melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah menunjang tugas dan fungsinya. Adapun realisasi tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a. **Belanja Operasi**

   Belanja operasi adalah belanja yang diperuntukkan Belanja Pegawai yang dibayarkan pada PNS di lingkup Sekretariat DPRD, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang dianggarkan sebesar **Rp101,158,232,266.00** dan terealisasi sebesar **Rp91,657,599,711.00** atau **90,61%.**

b. **Belanja Modal**

   Belanja modal adalah belanja yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi. Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2024 melaksanakan 2 program, 17 kegiatan, 62 subkegiatan. Alokasi dana yang dianggarkan sebesar **Rp13,835,407,909.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp13,076,928,663.00** atau **94,52%.** Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bontang meliputi:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   Terlaksananya persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah dengan 9 kegiatan dan 36 subkegiatan. Alokasi dana yang dianggarkan sebesar **Rp77,814,241,133.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp73,544,346,515.00** atau **94,51%.**
2. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**
   Terlaksananya cakupan layanan tugas fungsi anggaran, layanan tugas fungsi legislasi dan layanan tugas fungsi pengawasan dengan 8 kegiatan dan 26 subkegiatan. Alokasi dana yang dianggarkan sebesar **Rp37,179,399,042.00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp31,190,181,859.00** atau **83,89%.**

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)

Kota Bontang

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4*100%)	(12)
4	**02**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
4	**02**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**			
4	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	0 Dokumen	0	Penyelesaian Renja 2026 dan Renja Perubahan 2025
4	02	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	50,00	Terlaksana sesuai jadwal kegiatan
4	02	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	54,29	Terlaksana sesuai jadwal kegiatan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4*100%)	(12)
4	**02**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**			
4	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ Bulan	34 Orang/ Bulan	44 Orang/ Bulan	44 Orang/ Bulan	100	48 Orang/ Bulan	48 Orang/ Bulan	70,03	Realisasi sesuai dengan jumlah pegawai yang ada
4	02	01	2	02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	100,00	Sudah terlaksana 100 persen
4	02	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	100,00	Sudah terlaksana 100 persen
4	02	01	2	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	100,00	Sudah terlaksana 100 persen
4	**02**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**			
4	02	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	11 Paket	7 Paket	7 Paket	100	5 Paket	3 Paket	98,71	
4	02	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	115 Orang	269 Orang	159 Orang	159 Orang	100	160 Orang	150 Orang	94,05	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4*100%)	(12)
4	02	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	115 Orang	0 Orang	125 Orang	125 Orang	100	32 Orang	20 Orang	70,92	
4	**02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**			
4	02	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	0 Paket	0,00	Dalam tahap penyelesaian kelengkapan pembayaran berupa invoice
4	02	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	31 Paket	19 Paket	19 Paket	100	14 Paket	13 Paket	95,72	
4	02	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	1 Paket	46,94	Pengadaan paket Peralatan Rumah tangga 1 paket terlaksana
4	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	2 Paket	64,21	
4	02	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8 Paket	9 Paket	9 Paket	100	9 Paket	6 Paket	60,00	
4	02	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	90,00	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4*100%)	(12)
4	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	92,24	Kegiatan berjalan sesuai dengan agenda
4	**02**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**			
4	02	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	99,81	Kegiatan sudah selesai
4	02	01	2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	12 Unit	2 Unit	2 Unit	100	5 Unit	5 Unit	99,15	Kegiatan sudah selesai
4	02	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	210 Unit	100 Unit	100 Unit	100	100 Unit	50 Unit	49,13	
4	02	01	2	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100,00	Kegiatan terlaksana sesuai jadwal
4	**02**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**			
4	02	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	100,00	Berjalan sesuai jadwal kegiatan rutin tiap bulan
4	02	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	59,86	Berjalan sesuai jadwal kegiatan rutin tiap bulan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4*100%)	(12)
							Air dan Listrik yang Disediakan									
4	02	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	2 Laporan	48,13	
4	02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	55,54	
4	**02**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**99.26**	**100%**			
4	02	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	26,18	
4	02	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	43 Unit	40 Unit	40 Unit	99,97	40 Unit	25 Unit	50,96	
4	02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	1 Unit	90,85	
4	02	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	98,15	3 Unit	1 Unit	36,27	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4*100%)	(12)
							yang Dipelihara/Direhabilitasi									
4	02	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	3 Unit	84,30	
4	**02**	**01**	**2**	**15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Tingkat Pemenuhan Layananan Administrasi Keuangan DPRD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**99.78**	**100%**			
4	02	01	2	15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/ Bulan	25 Orang/Bulan	25 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan	100	25 Orang/ Bulan	25 Orang/Bulan	67,97	
4	02	01	2	15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	6 Paket	6 Paket	100	6 Paket	6 Paket	97,61	
4	02	01	2	15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	2 Orang	25 Orang	25 Orang	45,73	25 Orang	2 Orang	39,47	
4	**02**	**01**	**2**	**16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**			
4	02	01	2	16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00	
4	02	01	2	16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	48,73	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4*100%)	(12)
4	02	01	2	16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	2 Paket	8 Paket	5 Paket	5 Paket	100	5 Paket	4 Paket	53,20	
4	**02**	**02**				**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Cakupan Layanan Tugas Fungsi Anggaran**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**			
							Cakupan Layanan Tugas Fungsi Legislasi	**100%**	**89 %**	**100 %**	**51 %**	**51**	**100 %**			
							Cakupan Layanan Tugas Fungsi Pengawasan	**100%**	**100 %**	**100 %**	**72 %**	**72**	**100 %**			
4	**02**	**02**	**2**	**01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Tercapainya Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**99.39**	**100%**			
4	02	02	2	01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program PembentukanPeraturan Daerah	1 Dokumen	15 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	57,64	Kegiatan terlaksana sesuai jadwal
4	02	02	2	01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	26,19	Kegiatan terlaksana sesuai jadwal
4	02	02	2	01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Dalam proses pelaksanaan kegiatan
4	02	02	2	01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,01	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Dalam proses pelaksanaan kegiatan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4*100%)	(12)
4	02	02	2	01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	
4	**02**	**02**	**2**	**02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Tercapainya Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**			
4	02	02	2	02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Estimasi pelaksanaan Bulan September
4	02	02	2	02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Estimasi Pelaksanaan Bulan November
4	02	02	2	02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	
4	02	02	2	02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	48,17	
4	**02**	**02**	**2**	**03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Cakupan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**85,61**	**100%**			
4	02	02	2	03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	12 Laporan	6 Laporan	80,00	
4	02	02	2	03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	33,77	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4*100%)	(12)
4	02	02	2	03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	0 Laporan	0,00	
4	02	02	2	03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	25,00	
4	02	02	2	03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	72,00	
4	02	02	2	03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Tim pengawas menunggu agenda dari Pimpinan DPRD dalam rangka membahas LHP
4	02	02	2	03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	11,36	Menyesuaikan jadwal pembahasan oleh DPRD
4	**02**	**02**	**2**	**04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Tersedianya Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**			
4	02	02	2	04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	15 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	45,79	Terlaksana sesuai dengan agenda kerja alat kelengkapan yang berhubungan pendalaman tugas
4	02	02	2	04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	100	6 Orang	6 Orang	47,73	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4*100%)	(12)
4	02	02	2	04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100	5 Orang	5 Orang	47,09	
4	02	02	2	04	0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	29,91	
4	**02**	**02**	**2**	**05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Cakupan Aspirasi Masyarakat yang Dihimpun**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**			
4	02	02	2	05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Dalam proses penyelesaian administrasi keuangan
4	02	02	2	05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	1 Dokumen	30,70	
4	**02**	**02**	**2**	**06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Capaian Pengawasan Kode Etik DPRD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**			
4	02	02	2	06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0 Laporan	0,00	Sudah berjalan dalam bentuk koordinasi secara non budgeting
4	**02**	**02**	**2**	**07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Capaian Kerja Sama Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**71,81**	**100%**			
4	02	02	2	07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	65,13	1 Dokumen	0 Dokumen	5,44	Dalam tahap persiapan kegiatan untuk antisipasi kerjasama dg pihak instansi vertikal

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra PD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		Keterangan
										Target Renja PD Tahun (2024)	Realisasi Renja PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6x100%)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4*100%)	(12)
4	02	02	2	07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	100,00	
4	**02**	**02**	**2**	**08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Capaian Pelaksanaan Tugas DPRD Dalam Memberi Fasilitasi Pelayanan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**90,12**	**100%**			
4	02	02	2	08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90,12	1 Dokumen	0 Dokumen	59,95	Terlaksana sesuai agenda kerja alat kelengkapan setiap bulan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kota Bontang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Penyelenggaraan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bontang mengacu pada Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD memiliki sejumlah fungsi, di antaranya adalah:Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi, yaitu :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

   Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD sebagai perencanaan dan penyusunan legislasi daerah, fungsi pengawasan serta tugastugas dan fungsi DPRD lainnya.

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

   Sekretariat DPRD memfasilitasi perencanaan kebutuhan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD.

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

   Sekretariat DPRD mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat DPRD yang terdiri dari Rapat-rapat komisi, Rapat Bamus, Rapat Banggar, Rapat Bapemperda, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus, Rapat Pimpinan, Rapat Paripurna, Hearing.

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Bontang dalam menyusun program kegiatan mengacu pada RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk urusan-urusan yang diampu Sekretariat DPRD Kota Bontang, dalam hal ini Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sudah tertuang dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolak ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Kota Bontang terdapat dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2025
Kota Bontang

No	Indikator Kinerja	SPM/ NSPK	IKK	Target Renstra PD (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025*	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Peningkatan Predikat RB		100%	B	B	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	
2	Persentase Layanan Tugas Fungsi Anggaran		100%	100	100	100	100	100	38.67	-	-	
3	Persentase Layanan Tugas Fungsi Legislasi		100%	100	100	100	100	51	0	-	-	
4	Persentase Layanan Tugas Fungsi Pengawasan		100%	100	100	100	100	72	6.25	-	-	

Sumber data: Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

**data Triwulan II*

Penjelasan:

- Peningkatan Predikat RB

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui RPJMD Kota Bontang dan Indikator Kinerja Utama PD Tahun 2021-2026. Namun, dalam perjalanannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Penilaian Reformasi Birokrasi hanya dilakukan di tingkat Kota. Sehingga, peningkatan predikat Reformasi Birokrasi (RB) tidak lagi menjadi target indikator kinerja Sekretariat DPRD sejak tahun 2023, sebagaimana dilaporkan dalam pelaporan kinerja tahun 2024.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja Anggota DPRD dalam melakukan pengawasan pembangunan di daerah, maka dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD Kota Bontang diperlukan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada sekretariat DPRD yang antara lain misalnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sekretariat, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Permasalahan-permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan formal, diklat dan bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
2. Ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
4. Peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan legal drafting Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, dan Keputusan DPRD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Memperhatikan Rencana kerja (Renja) Tahun 2025 Sekretariat DPRD dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka review Renja Tahun 2025 Sekretariat DPRD sudah tercermin dalam Visi dan Misi Sekretariat DPRD, dengan demikian diharapkan bahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah dibuat untuk dapat direalisasikan sesuai dengan pedoman kerja yang sudah ada.

Rencana kerja Perubahan Tahun 2025 yang telah disusun pada Sekretariat DPRD telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Sekretariat. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bontang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bontang.

Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, subkegiatan serta

kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kota Bontang.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Sekretariat DPRD Kota Bontang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bontang**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**41.678.341,844**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bontang**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**48.595.570.455**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu**	**100%**	**103.482.500**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu**	**100%**	**83.857.320**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.253.088	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	2.272.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan	12.358.808	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 Laporan	1.210.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 Laporan	45.245.424	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**7.509.395.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**10.690.804.304**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/ Bulan	7.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/ Bulan	10.653.964.880	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.272.500	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	12.358.808	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.578.808	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.122.500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	9.901.808	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**759.590.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**392.952.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	512.480.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	195.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	129 Orang	190.952.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Orang	97.110.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	7.000.000	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan**	**100%**	**2.419.774.904**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**4.708.703.178**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Administrasi Perkantoran								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	190.884.004	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.619.595	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	500.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	499.974.255	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	105.220.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	109.667.750	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	207.986.446	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	207.280.471	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	285.597.054	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	294.617.107	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	130.086.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.040.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.000.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.570.504.000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bontang**	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**92.050.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bontang**	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**167.457.341**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	39.877.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	39.877.000	
	Pengadaan Mebel	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	53.100.000	Pengadaan Mebel	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	4.334.981	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	38.950.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	83.368.360	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bontang**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran**	**100%**	**9.904.321.986**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bontang**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran**	**100%**	**10.202.602.779**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.734.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.740.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	260.264.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	40.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.905.057.986	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.417.152.779	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bontang**	**Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**100%**	**1.357.612.183**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Bontang**	**Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**100%**	**1.545.501.421**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	136.510.733	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	943.362.183	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	959.782.688	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	102.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			yang Dipelihara/ Direhabilitasi					yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	56.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	164.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	290.358.000	
8	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Kota Bontang**	**Tingkat Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100%**	**17.932.115.271**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Kota Bontang**	**Tingkat Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100%**	**18.604.730.468**	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Bontang	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/ Bulan	17.554.015.271	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Bontang	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/ Bulan	18.177.261.293	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Bontang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan	6 Paket	302.090.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Bontang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	343.750.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Atribut DPRD yang Disediakan								
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	76.010.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	83.719.175	
9	**Layanan Administrasi DPRD**	**Kota Bontang**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD**	**100%**	**1.600.000.000**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Kota Bontang**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD**	**100%**	**2.198.961.644**	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	44.580.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	993.904	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	584.420.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	954.500.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kota Bontang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	5 Paket	971.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kota Bontang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	1.243.467.740	
II	**PROGRAM DUKUNGAN**	**Kota Bontang**	**Cakupan layanan tugas fungsi anggaran**	**100%**	**10.907.303.400**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN**	**Kota Bontang**	**Cakupan layanan tugas fungsi anggaran**	**100%**	**20.200.184.465**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		**Cakupan layanan tugas fungsi legislasi** **Cakupan layanan tugas fungsi pengawasan**			**TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**Cakupan layanan tugas fungsi legislasi** **Cakupan layanan tugas fungsi pengawasan**			
10	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Kota Bontang**	**Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**100%**	**1.066.860.000**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Kota Bontang**	**Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**100%**	**934.413.190**	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	291.560.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	92,500,000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	350.000.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	221.000.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	12.650.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	14.800.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau	1 Dokumen	400.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteranga	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan	2 Dokumen	595.013.190	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan/atau Naskah Akademik		Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			n dan/atau Naskah Akademik		dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	12.650.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	11.100.000	
11	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Kota Bontang**	**Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Dibahas**	**100%**	**369.520.000**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Kota Bontang**	**Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Dibahas**	**100%**	**495.822.000**	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	200.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	90.683.000	
	Pembahasan APBD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	64.940.000	Pembahasan APBD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	148.613.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	64.940.000	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	148.613.000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	39.640.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	107.913.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Kota Bontang**	**Terpenuhinya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100%**	**285.000.000**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Kota Bontang**	**Terpenuhinya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100%**	**196,460,000**	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	70.812.500	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	21,600,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	118.450.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	70,800,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	31.625.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	30,000,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	31.625.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	30,000,000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan	12 Laporan	15.812.500	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	12 Laporan	30,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Bidang Sumber Daya Alam					Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	14.410.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	7,030,000	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	2.265.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	7,030,000	
13	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Kota Bontang**	**Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100%**	**1.172.740.000**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Kota Bontang**	**Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100%**	**4.481.775.000**	
	Pendalaman Tugas DPRD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	250.000.000	Pendalaman Tugas DPRD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	515.000.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Bontang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	300.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Bontang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	564.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Bontang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	259.555.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Bontang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	427.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	363.185.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	2.975.775.000	
14	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Kota Bontang**	**Terpenuhinya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100%**	**960.683.400**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Kota Bontang**	**Terpenuhinya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100%**	**3.066.715.275**	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	210.683.400	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	16,650,000	
	Pelaksanaan Reses	Kota Bontang	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	750.000.000	Pelaksanaan Reses	Kota Bontang	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.050.065.275	
15	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Kota Bontang**	**Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**100%**	**12.500.000**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Kota Bontang**	**Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**100%**	**3,330,000**	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Bontang	Jumlah Laporan HasilPengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	12.500.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Bontang	Jumlah Laporan HasilPengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	3,330,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Kota Bontang**	**Terpenuhinya Fasilitasi Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**100%**	**40.000.000**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Kota Bontang**	**Terpenuhinya Fasilitasi Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**100%**	**20.321.000**	
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	18.187.500	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	15.141.000	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	21.812.500	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	5.180.000	
17	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Kota Bontang**	**Terpenuhinya Tugas DPRD yang Difasilitasi**	**100%**	**7.000.000.000**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Kota Bontang**	**Terpenuhinya Tugas DPRD yang Difasilitasi**	**100%**	**11.001.348.000**	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	7.000.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	11.001.348.000	
	Total Kebutuhan Anggaran				**52.585.645.244**	**Total Kebutuhan Anggaran**				**68.795.754.920**	

Sumber data: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) (SIPD)

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam penyusunannya Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bontang mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021–2026 dengan tetap memperhatikan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas dalam dokumen RKPD Kota Bontang Tahun 2025. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Sekretariat DPRD Kota Bontang juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen–dokumen perencanaan yang ada renja perubahan Sekretariat DPRD Kota Bontang juga disusun berdasarkan kajian usulan program, kegiatan dan subkegiatan yang merupakan bagian dari terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bontang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kota Bontang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Bontang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi "Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", visi tersebut akan diwujudkan melalui 9 misi pembangunan yang dikenal dengan Nawacita kedua, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Kota Bontang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 telah menetapkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menjadi rujukan dalam melaksanakan pembangunan Kota Bontang. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Bontang mempunyai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran penting untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bontang. Pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang berjalan dengan baik akan berdampak pada perwujudan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bontang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

3.3. Dengan mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun mendatang. Adapun tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bontang untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10

Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja (Renstr			
			2022	2023	2024	202
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
eningkatnya mplementasi eformasi irokrasi		Nilai Reformasi Birokrasi				
	Meningkatnya Pelayanan Teknis dan Administratif Untuk Mendukung Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Serta Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	Peningkatan Predikat RB	A	N/A	N/A	N/A

eningkatkan elayanan epada Lembaga PRD Kota ontang		Cakupan Layanan Tugas Fungsi Anggaran, Legislasi, dan Pengawasan				
	Optimalisasi Layanan Tugas Fungsi Anggaran, Legislasi dan Pengawasan DPRD	Persentase Layanan Tugas Fungsi Anggaran	100%	100%	100%	100
		Persentase Layanan Tugas Fungsi Legislasi	100%	100%	100%	100
		Persentase Layanan Tugas Fungsi Pengawasan	100%	100%	100%	100

ata: Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Penjelasan:

- Peningkatan Predikat Reformasi Birokrasi tidak dilakukan penilaian karena penilaian RB hanya dilakukan pada tingkat kota sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokasi 2020-2024.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD

4.1. Program dan Kegiatan dan Pendanaan Pada Rencana Kerja

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk menjalankan misi yang dilakukan oleh suatu organisasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Bontang. Sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Bontang tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   Program ini dilaksanakan guna mendukung persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang mencakup berbagai kegiatan terkait dengan kelancaran penunjang urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari 9 jenis kegiatan dan 36 subkegiatan.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
   Program ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung cakupan layanan tugas fungsi anggaran, layanan tugas fungsi legislasi dan layanan tugas fungsi pengawasan sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dapat berjalan optimal. Program ini mencakup 8 jenis kegiatan dan 26 subkegiatan.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4. 4

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kota Bontang

Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemda Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD	Anggaran Murni 2025				Catatan Penting	Anggaran Perubahan 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	**02**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Bontang**	**100%**	**63,911,930,859**	**APBD**		**100%**	**67,986,930,859**
4	**02**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu**	**Kota Bontang**	**100%**	26,328,000	**APBD**		**100%**	**26,328,000**
4	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	2 Dokumen	7,587,000	APBD		2 Dokumen	7,587,000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemda Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD	Anggaran Murni 2025				Catatan Penting	Anggaran Perubahan 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)
4	02	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	1 Laporan	0	APBD		1 Laporan	0
4	02	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kota Bontang	1 Laporan	18,741,000	APBD		1 Laporan	18,741,000
4	**02**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Bontang**	**100%**	11,400,985,119	**APBD**		**100%**	**11,400,985,119**
4	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	43 Orang/ Bulan	11,393,851,119	APBD		41 Orang/ Bulan	11,393,851,119
4	02	01	2	02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Bontang	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	0
4	02	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang	1 Laporan	3,567,000	APBD		1 Laporan	3,567,000
4	02	01	2	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	1 Dokumen	3,567,000	APBD		1 Dokumen	3,567,000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemda Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD	Anggaran Murni 2025				Catatan Penting	Anggaran Perubahan 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)
4	**02**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Kota Bontang**	**100%**	2,981,195,811	**APBD**		**100%**	**2,981,195,811**
4	02	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bontang	5 Paket	485,854,000	APBD		1 Paket	485,854,000
4	02	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bontang	160 Orang	760,893,000	APBD		129 Orang	760,893,000
4	02	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang	32 Orang	1,734,448,811	APBD		43 Orang	1,734,448,811
4	**02**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Bontang**	**100%**	9,797,857,874	**APBD**		**100%**	**10,434,408,694**
4	02	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	1 Paket	24,194,028	APBD		1 Paket	24,194,028
4	02	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	14 Paket	5,693,638,669	APBD		6 Paket	6,330,189,489

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemda Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD	Anggaran Murni 2025				Catatan Penting	Anggaran Perubahan 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)
4	02	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bontang	3 Paket	66,588,940	APBD		3 Paket	66,588,940
4	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	3 Paket	218,300,794	APBD		3 Paket	218,300,794
4	02	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bontang	9 Paket	308,706,443	APBD		6 Paket	308,706,443
4	02	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bontang	12 Dokumen	10,040,000	APBD		12 Dokumen	10,040,000
4	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	12 Laporan	3,476,389,000	APBD		12 Laporan	3,476,389,000
4	**02**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Kota Bontang**	**100%**	2,083,585,960	**APBD**		**100%**	**3,308,730,650**
4	02	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Bontang	1 Unit	1,377,908,800	APBD		1 Unit	1,377,908,800

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemda Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD	Anggaran Murni 2025				Catatan Penting	Anggaran Perubahan 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)
4	02	01	2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bontang	5 Unit	221,910,000	APBD		1 Unit	221,910,000
4	02	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bontang	100 Unit	398,708,800	APBD		1 Unit	1,623,853,490
4	02	01	2	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bontang	2 Unit	85,058,360	APBD		1 Unit	85,058,360
4	**02**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran**	**Kota Bontang**	**100%**	12,136,687,676	**APBD**		**100%**	**12,136,687,676**
4	02	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	12 Laporan	4,995,000	APBD		12 Laporan	4,995,000
4	02	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bontang	12 Laporan	2,429,730,000	APBD		12 Laporan	2,429,730,000
4	02	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	4 Laporan	348,890,800	APBD		4 Laporan	348,890,800

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemda Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD	Anggaran Murni 2025				Catatan Penting	Anggaran Perubahan 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)
4	02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	12 Laporan	9,353,071,876	APBD		12 Laporan	9,353,071,876
4	**02**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**Kota Bontang**	**100%**	4,903,722,050	**APBD**		**100%**	**7,115,623,650**
4	02	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Bontang	1 Unit	119,565,988	APBD		1 Unit	119,565,988
4	02	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bontang	48 Unit	941,675,710	APBD		48 Unit	941,675,710
4	02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bontang	2 Unit	1,807,144,424	APBD		2 Unit	1,807,144,424

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemda Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD	Anggaran Murni 2025				Catatan Penting	Anggaran Perubahan 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)
4	02	01	2	09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bontang	3 Unit	1,207,062,728	APBD		3 Unit	3,418,964,328
4	02	01	2	09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bontang	3 Unit	828,273,200	APBD		3 Unit	828,273,200
4	**02**	**01**	**2**	**15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Tingkat Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Kota Bontang**	**100%**	19,201,066,304	**APBD**		**100%**	**19,202,469,194**
4	02	01	2	15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Bontang	25 Orang/ Bulan	18,862,636,304	APBD		25 Orang/ Bulan	18,864,039,194
4	02	01	2	15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kota Bontang	6 Paket	262,520,000	APBD		4 Paket	262,520,000
4	02	01	2	15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kota Bontang	25 Orang	75,910,000	APBD		25 Orang	75,910,000
4	**02**	**01**	**2**	**16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD**	**Kota Bontang**	**100%**	1,380,502,065	**APBD**		**100%**	**1,380,502,065**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemda Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD	Anggaran Murni 2025				Catatan Penting	Anggaran Perubahan 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)
4	02	01	2	16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Bontang	1 Dokumen	645,000	APBD		12 Dokumen	645,000
4	02	01	2	16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Bontang	12 Laporan	451,740,000	APBD		12 Laporan	451,740,000
4	02	01	2	16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Kota Bontang	5 Paket	928,117,065	APBD		4 Paket	928,117,065
4	**02**	**02**				**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	**Cakupan Layanan Tugas Fungsi Anggaran**	**Kota Bontang**	**100%**	**21,614,410,697**	**APBD**		**100%**	**21,614,410,697**
							Cakupan Layanan Tugas Fungsi Legislasi	**Kota Bontang**	**100%**		**APBD**		**100%**	
							Cakupan Layanan Tugas Fungsi Pengawasan	**Kota Bontang**	**100%**		**APBD**		**100%**	
4	**02**	**02**	**2**	**01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Kota Bontang**	**100%**	**969,713,190**	**APBD**		**100%**	**969,713,190**
4	02	02	2	01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program PembentukanPeraturan Daerah	Kota Bontang	2 Dokumen	142,120,000	APBD		2 Dokumen	142,120,000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemda Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD	Anggaran Murni 2025				Catatan Penting	Anggaran Perubahan 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)
4	02	02	2	01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Bontang	8 Dokumen	291,635,000	APBD		8 Dokumen	291,635,000
4	02	02	2	01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kota Bontang	1 Dokumen	8,040,000	APBD		1 Dokumen	8,040,000
4	02	02	2	01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kota Bontang	2 Dokumen	508,823,190	APBD		2 Dokumen	508,823,190
4	02	02	2	01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Kota Bontang	1 Dokumen	19,095,000	APBD		1 Dokumen	19,095,000
4	**02**	**02**	**2**	**02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Dibahas**	**Kota Bontang**	**100%**	**544,536,776**	**APBD**		**100%**	**544,536,776**
4	02	02	2	02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Bontang	2 Dokumen	93,952,944	APBD		2 Dokumen	93,952,944
4	02	02	2	02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Bontang	1 Dokumen	140,207,944	APBD		1 Dokumen	140,207,944
4	02	02	2	02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Bontang	1 Dokumen	140,207,944	APBD		1 Dokumen	140,207,944

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemda Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD	Anggaran Murni 2025				Catatan Penting	Anggaran Perubahan 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)
4	02	02	2	02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Bontang	2 Dokumen	170,167,944	APBD		2 Dokumen	170,167,944
4	**02**	**02**	**2**	**03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Terpenuhinya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Kota Bontang**	**100%**	**161,606,000**	**APBD**		**100%**	**161,606,000**
4	02	02	2	03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Bontang	12 Laporan	12,642,000	APBD		12 Laporan	12,642,000
4	02	02	2	03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Bontang	12 Laporan	48,130,000	APBD		12 Laporan	48,130,000
4	02	02	2	03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Bontang	12 Laporan	17,673,000	APBD		12 Laporan	17,673,000
4	02	02	2	03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Bontang	12 Laporan	17,673,000	APBD		12 Laporan	17,673,000
4	02	02	2	03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kota Bontang	12 Laporan	17,673,000	APBD		12 Laporan	17,673,000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemda Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD	Anggaran Murni 2025				Catatan Penting	Anggaran Perubahan 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)
4	02	02	2	03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Bontang	1 Dokumen	4,020,000	APBD		1 Dokumen	4,020,000
4	02	02	2	03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Bontang	1 Dokumen	43,795,000	APBD		1 Dokumen	43,795,000
4	**02**	**02**	**2**	**04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Kota Bontang**	**100%**	**5,079,105,000**	**APBD**		**100%**	**5,079,105,000**
4	02	02	2	04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kota Bontang	2 Dokumen	769,830,000	APBD		2 Dokumen	769,830,000
4	02	02	2	04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Bontang	6 Orang	874,830,000	APBD		6 Orang	874,830,000
4	02	02	2	04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Bontang	5 Orang	496,950,000	APBD		5 Orang	496,950,000
4	02	02	2	04	0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Bontang	1 Dokumen	2,937,495,000	APBD		1 Dokumen	2,937,495,000
4	**02**	**02**	**2**	**05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Terpenuhinya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Kota Bontang**	**100%**	**3,587,230,731**	**APBD**		**100%**	**3,587,230,731**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemda Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD	Anggaran Murni 2025				Catatan Penting	Anggaran Perubahan 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)
4	02	02	2	05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Kota Bontang	1 Dokumen	9,045,000	APBD		1 Dokumen	9,045,000
4	02	02	2	05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Bontang	3 Dokumen	3,578,185,731	APBD		3 Dokumen	3,578,185,731
4	**02**	**02**	**2**	**06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Kota Bontang**	**100%**	**1,608,000**	**APBD**		**100%**	**1,608,000**
4	02	02	2	06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan HasilPengawasan Kode Etik DPRD	Kota Bontang	1 Laporan	1,608,000	APBD		1 Laporan	1,608,000
4	**02**	**02**	**2**	**07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Terpenuhinya Fasilitasi Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Kota Bontang**	**100%**	**266,531,000**	**APBD**		**100%**	**266,531,000**
4	02	02	2	07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kota Bontang	1 Dokumen	264,521,000	APBD		1 Dokumen	264,521,000
4	02	02	2	07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Kota Bontang	1 Dokumen	2,010,000	APBD		1 Dokumen	2,010,000
4	**02**	**02**	**2**	**08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Terpenuhinya Tugas DPRD yang Difasilitasi**	**Kota Bontang**	**100%**	**11,004,080,000**	**APBD**		**100%**	**11,004,080,000**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemda Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan PD	Anggaran Murni 2025				Catatan Penting	Anggaran Perubahan 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp 000,-)
4	02	02	2	08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Bontang	1 Dokumen	11,004,080,000	APBD		1 Dokumen	11,004,080,000
Total										**85,526,341,556**				**89,601,341,556**

Sumber data: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) (SIPD) TA 2025

XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) pada adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja PD merupakan wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja PD mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada dokumen Rencana Stategis (Renstra) PD. Renja PD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan tahun berikutnya.

Sejalan dengan pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025, telah terjadi perubahan yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renja Tahun 2025.

Faktor internal yang mendorong perlunya dilakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2025 terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi perubahan kebutuhan. maupun pagu anggaran.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang Tahun 2025.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang Tahun 2025 adalah :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025;
i. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026;
j. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
k. Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

II. 3. Tujuan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah:

K. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.

L. Menjadi dasar perubahan target, dan perubahan pagu anggaran.

II. 4 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Dasar pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Bapperida Tahun 2025 mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Adanya kebutuhan penambahan pagu anggaran dan tuntutan pelayanan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPERIDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka BAPPERIDA mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan Pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bapperida menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan tugasnya, pelaksanaan tugas dan dukungan teknis sesuai dengan lingkup dan tugasnya, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup dan tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bapperida Kota Bontang telah menyusun program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian pelaksanaan Rencana Kerja Bapperida sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan pada tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (TA 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I (Satu)		II (Dua)									
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(12) = (8)+(9)+(10)+(11)		(13) = (6)+(12)		(14) = (13)/(5)*100 %		(15)
02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah**	**persen**	**100**	**4.606.040.221,00**	**86**	**4.331.246.302**	**88**	**5.955.708.912**	**100,00**	**196.450.000**	**100,00**	**207.740.907**	**200**	**404.190.907**	286	**4.735.437.209**	**286,00**	**102,81**	**Kepala Bapperida**
02 2,01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen perencanaan yang disusun**	**Dokumen**	**15**	**2.972.449.355,00**	**4**	**2.805.897.436**	**3**	**3.412.228.390**	**-**	**96.341.100**	-	**132.615.821**	**-**	**228.956.921**	4	**3.034.854.357**	**26,67**	**102,10**	**Kepala Bidang P2EPD**
02 2,01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	10	91.700.000,00	2	14.200.000,00	2	74.906.000	-	-	-	-	-	-	2	14.200.000	20,00	15,49	
02 2,01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	5	62.281.355,00	1	36.775.000	1	149.969.000	1	3.600.000	-	-	1	3.600.000	2	40.375.000	40,00	64,83	
02 2,01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	5	94.775.000,00	1	11.431.000	1	11.913.000	-	-		-	-	-	1	11.431.000	20,00	12,06	
02 2,01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	15	656.045.000,00	3	112.844.880	3	456.853.710	-	7.000.000		33.412.100	-	40.412.100	3	153.256.980	20,00	23,36	
02 2,01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	1500	43.330.000,00	300	7.100.000	300	7.695.000	300	-	-	-	300	-	600	7.100.000	40,00	16,39	
02 2,01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	10	2.031.121.000,00	4	2.623.546.556	3	2.710.891.680	-	85.741.100	-	99.203.721	-	184.944.821	4	2.808.491.377	40,00	138,27	
02 2,02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan**	**Dokumen**	**16000**	**766.398.226,00**	3200	**368.119.695**	**3**	**1.093.055.807**	**-**	**27.197.800**	3	**4.922.400**	**3**	**32.120.200**	3.203	**400.239.895**	**20,02**	**52,22**	**Kepala Bidang P2EPD**
02 2.03 01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen	16000	270.816.000,00	60	51.464.812	2	179.420.760	-	9.750.000	3	1.950.000	3	11.700.000	63	63.164.812	0,39	23,32	
02 2,02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah data dan informasi	Orang	155	113.743.000,00	31	231.002.880	40	683.785.307	40	17.447.800	-	2.972.400	40	20.420.200	71	251.423.080	45,81	221,04	
02 2,02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi	Buku	5	381.839.226,00	1	85.652.003	1	229.849.740	-	-	-	-	-	-	1	85.652.003	20,00	22,43	
02 2,03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi**	**Dokumen**	25	**867.192.640,00**	5	**1.157.229.171**	**5**	**1.450.424.715**	**1**	**72.911.100**	1	**70.202.686**	**2**	**143.113.786**	7	**1.300.342.957**	**28,00**	**149,95**	**Kepala Bidang P2EPD**
02 2,03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	406.765.000,00	3	526.724.990	3	903.474.675	1	54.967.900	-	22.737.976	1	77.705.876	4	604.430.866	80,00	148,59	
02 2,03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	20	460.427.640,00	4	630.504.181	5	546.950.040	1	17.943.200	1	47.464.710	2	65.407.910	6	695.912.091	30,00	151,14	
03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Implementasi perencanaan dalam penganggaran**	**persen**	**100,00**	**1.668.245.072,00**	**94,00**	**3.439.781.211**	96	**3.295.960.547**	**100,00**	**267.257.149**	**100**	**439.947.492**	**200**	**707.204.641**	**294**	**4.146.985.852**	**294,00**	**248,58**	**Kepala Bapperida**
03 2,01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun**	**Dokumen**	**2,00**	**731.176.878,00**	**2,00**	**594.486.895**	**2**	**760.780.590**	**-**	**102.195.177**	-	**58.526.056**	**-**	**160.721.233**	**2**	**755.208.128**	**100,00**	**103,29**	**Kepala Bidang PMPAKes**
03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	10	108.326.000,00	2	60.001.610	1	52.187.395	-	-	-	8.319.800	-	8.319.800	2	68.321.410	20,00	63,07	
03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan	65	108.326.000,00	13	7.665.000	2	22.399.502	-	-	-	-	-	-	13	7.665.000	20,00	7,08	
03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	20	108.326.000,00	4	23.959.270	1	22.415.251	-	-	-	-	-	-	4	23.959.270	20,00	22,12	
03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	5	81.245.000,00	1	283.730.061	1	314.893.895	-	40.037.400	-	18.630.700	-	58.668.100	1	342.398.161	20,00	421,44	

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (TA 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I (Satu)		II (Dua)								
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(12) = (8)+(9)+(10)+(11)		(13) = (6)+(12)		(14) = (13)/(5)*100 %		(15)
03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	10	81.245.000,00	2	73.455.934	2	32.705.502	-	11.707.220	-	4.225.000	-	15.932.220	2	89.388.154	20,00	110,02	
03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	30	81.245.000,00	6	17.739.000	6	32.828.753	-	6.695.000	-	-	6	6.695.000	12	24.434.000	40,00	30,07	
03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	30	81.245.000,00	6	17.303.830	9	31.574.502	-	-	-	-	6	-	12	17.303.830	40,00	21,30	
03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5	81.218.878,00	1	110.632.190	1	251.775.790	-	43.755.557	-	27.350.556	-	71.106.113	1	181.738.303	20,00	223,76	
03 2,02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun**	**Dokemen**	2	**568.713.000,00**	2	**853.575.586**	3	**1.268.150.539**		**96.378.084**	-	**308.286.859**	**-**	**404.664.943**	2	**1.258.240.529**	**100,00**	**221,24**	**Kepala Bidang PPIKa**
03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	10	108.326.000,00	2	59.746.851	3	47.700.502	-	9.285.700	-	14.647.200	-	23.932.900	2	83.679.751	20,00	77,25	
03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	65	108.326.000,00	6	5.840.000	4	12.349.502	-	-	2	-	6	-	12	5.840.000	18,46	5,39	
03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	20	108.326.000,00	2	30.947.000	4	20.844.502	1	-	1	-	2	-	4	30.947.000	20,00	28,57	
03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	5	81.245.000,00	1	120.799.415	4	453.422.067	-	63.201.790	1	276.222.089	1	339.423.879	2	460.223.294	40,00	566,46	
03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	10	81.245.000,00	2	4.080.000	2	50.686.753	-	-	-	-	-	-	2	4.080.000	20,00	5,02	
03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	30	81.245.000,00	5	5.645.000	5	14.336.753	1	-	-	-	1	-	6	5.645.000	20,00	6,95	
03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	30	81.245.000,00	5	17.313.000	4	14.336.753	1	-	1	1.300.000	2	1.300.000	7	18.613.000	23,33	22,91	
03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	5	81.218.878,00	1	609.204.320	1	654.473.707	-	23.890.594	-	16.117.570	-	40.008.164	1	649.212.484	20,00	799,34	
03 2,03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun**	**Dokemen**	10	**368.355.194,00**	2	**1.991.718.730**	3	**1.267.029.418**		**68.683.888**	-	**73.134.577**	**-**	**141.818.465**	2	**2.133.537.195**	20,00	**579,21**	**Kepala Bidang PPIKa**
03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	10	64.996.200,00	2	17.519.000	3	33.726.753	-	1.300.000	-	10.680.800	-	11.980.800	2	29.499.800	20,00	45,39	
03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	30	64.995.200,00	4	1.980.000	3	10.986.753	-	-	-	-	6	-	10	1.980.000	33,33	3,05	

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (TA 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I (Satu)		II (Dua)								
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(12) = (8)+(9)+(10)+(11)		(13) = (6)+(12)		(14) = (13)/(5)*100 %		(15)
03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	10	64.995.000,00	1	9.265.000	2	13.116.753	-	-	-	-	-	-	1	9.265.000	10,00	14,25	
03 2.03 03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	5	64.995.200,00	3	1.326.694.770	1	419.977.924		43.496.088	-	26.957.761	-	70.453.849	3	1.397.148.619	60,00	2149,62	
03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	10	27.081.000,00	2	33.946.900	1	47.449.753	-	8.612.800	-	1.625.000	-	10.237.800	2	44.184.700	20,00	163,16	
03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	25	27.081.000,00	4	1.628.905	4	14.336.753	4	2.275.000	4	-	8	2.275.000	12	3.903.905	48,00	14,42	
03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	20	27.081.000,00	4	3.088.905	4	14.336.753	1	-	1	-	2	-	6	3.088.905	30,00	11,41	
03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	5	27.130.594,00	1	597.595.250	1	713.097.976	-	13.000.000	-	33.871.016	-	46.871.016	1	644.466.266	20,00	2375,42	
02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan**	**Persen**	100	**13.839.770.000,00**	78,57	**3.102.537.057**	**80,80**	**3.598.502.155**	**-**	**78.634.316**	-	**162.611.364**	**-**	**244.648.080**	79	**3.347.185.137**	78,57	**21,36**	**Kepala Bapperida**
02 201	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan**	**Kegiatan Kelitbangan**	20	**13.839.770.000,00**	4	**2.018.460.612**	**4**	**2.637.907.834**	**-**	**75.034.316**	-	**138.748.064**	**-**	**213.782.380**	4	**2.232.242.992**	20,00	**16,13**	**Kepala Bidang RIDA**
02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	5	1.075.190.000,00	1	316.844.746	1	256.864.369	-	-	-	37.793.564	-	37.793.564	1	354.638.310	20,00	32,98	
02 2.01 04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	5	1.075.190.000,00	1	518.840.647	2	508.622.048	-	2.700.000	-	2.700.000	-	5.400.000	1	524.240.647	20,00	48,76	
02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan Baik	Laporan	5	35.190.000,00	1	3.420.000			-	-		-	-	-	1	3.420.000	20,00	9,72	
02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	5	11.654.200.000,00	6	1.179.355.219	3	1.872.421.417	-	72.334.316	1	98.254.500	1	170.588.816	7	1.349.944.035	140,00	11,58	
02 2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian da**	**dokumen**		**N/A**	**1**	**370.336.576**	**1**	**13.601.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	1	**-**	0,00	**0,00**	**Kepala Bidang RIDA**
02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	dokumen		N/A	1	370.336.576,00	1	13.601.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
		Persentase keberlanjutan inovasi daerah	**Persen**	**100**	**1.831.446.000,00**	**91,17**	**713.739.869**	**92,21**		**-**		**-**								**Kepala Bapperida**
02 2,04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah inovasi daerah**	**inovasi**	750	**1.831.446.000,00**	**150**	**713.739.869**	**150**	**946.993.321**	**5**	**3.600.000**	12	**23.863.300**	**17**	**30.865.700**	167	**744.605.569**	22,27	**40,66**	**Kepala Bidang RIDA**
02 2,04 01	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	N/A	N/A	0	-	1	120.452.539	-	-	-	3.402.400	-	3.402.400	-	3.402.400	0,00		
02 2,04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah kegiatan kelitbangan	Dokumen		30.953.140,00	1	5.963.000,00	1	20.002.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	5	418.530.000,00	1	120.203.948	1	169.607.600	-	3.600.000	-	3.600.000	-	-	1	120.203.948	20,00	28,72	
02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	5	1.333.680.000,00	1	570.772.721	2	614.569.182	-	-	-	27.463.300	-	27.463.300	1	598.236.021	20,00	44,86	
02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Laporan	5	79.236.000,00	1	16.800.200	1	22.362.000	-	-	-	-	-	-	1	16.800.200	20,00	21,20	

Kode Rekening	Uraian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (TA 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Bapelitbang Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I (Satu)		II (Dua)								
				Target	(Rp.)	Capaian Kinerja (%)	(Rp.)	Target	(Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja	Keuangan (Rp.)	Capaian Kinerja (%)	Keuangan	Capaian Kinerja (%)	Keuangan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(12) = (8)+(9)+(10)+(11)		(13) = (6)+(12)		(14) = (13)/(5)*100 %		(15)
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**persen**	**100**	**15.268.613.326,00**	**100**	**13.301.374.373**	**100**	**15.268.852.064**	**100**	**3.583.081.211**	**100**	**3.079.301.413**	**432**	**6.662.382.624,00**	**876,00**	**19.146.755.482,00**		**290,74**	**Kepala Bapperida**
01 2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah**	**Orang/bulan**	**179**		**35**	**8.427.182.135**	**42**	**10.905.641.604**	**47**	**2.458.373.981**	**47**	**2.740.282.816**	**90**	**5.198.656.797**	**125,00**	**13.625.838.932,00**		**34,90**	**Sekretaris**
01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	179	39.043.760.000,00	35	8.427.182.135	37	10.905.641.604	43	2.458.373.981	47	2.740.282.816	90	5.198.656.797	125	13.625.838.932	69,83	34,90	
01 2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian**	**Persen**	**1**	**325.000.000,00**	**100**	**431.509.255**	**100**	**805.360.200**	**3,00**	**83.600.000**	**25**	**-**	**28**	**83.600.000**	**128**	**515.109.255**	12800,00	**158,50**	**Sekretaris**
		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	**Layanan**	**1**		**32**		**1**					**-**							Sekretariat
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	15	360.000.000,00	2	192.170.000	2	251.257.200	1	69.600.000	-	-	1	69.600.000	3	261.770.000	20,00	72,71	
01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	145	325.000.000,00	110	239.339.255	84	554.103.000	2	14.000.000	-	-	2	14.000.000	112	253.339.255	77,24	77,95	
01 2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**	**Persen**	**6**	**8.960.735.967,00**	**100**	**3.040.728.423**	**100**	**2.280.082.605**	**74,00**	**787.408.553**	**100**	**167.868.082**	**174**	**955.276.635**	**274**	**3.246.273.543**	4566,67	**36,23**	**Sekretaris**
01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	15	27.045.967,00	1	19.958.000	8	21.365.282	8	21.215.000	-	-	8	21.215.000	9	41.173.000	60,00	152,23	
01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	25	2.118.904.000,00	9	926.940.912	2	484.845.353	2	432.920.000	-	-	2	432.920.000	11	1.359.860.912	44,00	64,18	
01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	60	328.138.000,00	2	113.772.500	14	147.448.940	10	114.140.000	13	-	23	114.140.000	25	227.912.500	41,67	69,46	
01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	85	460.399.000,00	2	28.131.750	17	85.198.030	12	56.600.000	5	8.270.000	17	64.870.000	19	93.001.750	22,35	20,20	
01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	81.249.000,00	2	21.824.504	1	16.872.000	-	-	-	-	-	-	2	21.824.504	40,00	26,86	
01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	943	5.945.000.000,00	12	1.930.100.757	1	1.524.353.000	-	162.533.553	-	159.598.082	-	322.131.635	12	2.252.232.392	1,27	37,88	
01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**2**	**163.590.000,00**	**100**	**67.270.000**	**100**	**348.270.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**67.270.000**	**5000,00**	**41,12**	**Sekretaris**
		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	**Unit**	**2**		**9**		**6**					**-**							**Sekretariat**
01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	163.590.000,00	1	67.270.000	1	348.270.000	-	-	-	-	-	-	1	67.270.000	50,00	41,12	
01 2,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran**	**Persen**	**2**	**3.511.400.000,00**	**100**	**635.381.059**	**100**	**478.189.200**	**25**	**139.010.960**	**50**	**66.534.160**	**75**	**205.545.120**	**175**	**840.926.179**	8750,00	**23,95**	**Sekretaris**
		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	**Jenis Jasa Penunjang**	**2**		**8**		**2**					**-**							Sekretariat
01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	5	47.000.000,00	1	9.500.000	1	11.040.000	1	11.040.000	-	-	1	11.040.000	2	20.540.000	40,00	43,70	
01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60	3.464.400.000,00	12	625.881.059	12	467.149.200	3	127.970.960	3	66.534.160	6	194.505.120	18	820.386.179	30,00	23,68	
01 2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**Persen**	**120**	**2.471.477.359,00**	**109**	**699.303.501**	**100**	**451.308.455**	**100**	**114.687.717**	**100**	**104.616.355**	**65**	**219.304.072**	**174**	**918.607.573**	145,00	**37,17**	**Sekretaris**
		Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	**Unit**	**120**		**109**		**38**					**-**							Sekretariat
01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	110	2.281.906.359,00	22	507.940.776	30	427.902.000	30	114.687.717	30	95.074.900	60	209.762.617	82	717.703.393	74,55	31,45	
01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	189.571.000,00	50	13.545.975	48	23.406.455	-	-	5	9.541.455	5	9.541.455	55	23.087.430	550,00	12,18	
JUMLAH					**37.214.114.619**		**24.174.938.943**		**28.119.023.678**		**4.125.422.676**		**3.889.601.176**		**8.018.426.252**		**31.376.363.680**			

Sampai dengan semesteran 1 Tahun anggaran 2025, pencapaian kegiatan dan sub kegiatan mencapai :

Tabel 2.2.

Target dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Semester 1 Tahun 2025

Pagu Anggaran	Realisasi					
	Keuangan				Fisik	
	Target		Realisasi		Target	Realisasi
(Rp.)	*(Rp.)*	*(%)*	*(Rp.)*	*(%)*	*(%)*	*(%)*
22.299.131.128	13.509.888.842	**60,58**	8.018.426.252	35,96	62,75	47,43

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bapperida Bulan Juni Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut diatas, Realisasi keuangan sampai dengan semester pertama 35,96 % atau Rp. 8.018.426.252,- dari Total Anggaran Rp. 22.299.131.128,-. Adapun target realisasi keuangan pada semester I adalah **60,58** %. Dengan demikian ada **deviasi capaian relaisasi keuangan sebesar** --**24,63**%, sedangkan utuk capaian realisasi fisk sampai dengan semester pertama sebesar 47,43 % dengan target 62,75 %, ada **deviasi capaian relaisasi fisik sebesar -15,32 %**

Dari hasil monitoring realiasasi keuangan dan fisik sampai dengan semester I Tahun 2025,disamapaikan dalam tabel 2.3 Data Monitoring Realisasi Keuangan dan Fisik Sub Kegiatan Bapperida per 30 Juni 2025.

Tabel 2.3

Data Monitoring Realisasi Keuangan dan Fisik Sub Kegiatan Bapperida per 30 Juni 2025.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Hasil Efesiensi	Keuangan			Fisik	Kendala/hambatan	Solusi	Waktu Penyelesaian	Keterangan
		Realisasi		Sisa Anggaran	Realisasi				
	(Rp.)	*(Rp.)*	%	*(Rp.)*	%				
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**3.831.168.889**	**404.190.907**	**10,55**	**3.426.977.982**	**32,01**				
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**2.236.802.240**	**228.956.921**	**10,24**	**2.007.845.319**	**50,52**				
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	70.149.000	-	0,00	70.149.000	50,00				
Pelaksanaan Konsultasi Publik	50.429.000	3.600.000	7,14	46.829.000	63,27				
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	8.352.000	-	0,00	8.352.000	50,00				
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	240.562.520	40.412.100	16,80	200.150.420	46,57				
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	5.398.000	-	0,00	5.398.000	40,00				
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.861.911.720	184.944.821	9,93	1.676.966.899	53,27				
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**712.355.065**	**32.120.200**	**4,51**	**680.234.865**	**23,30**	**Jadwal pengerjaan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, P-RKPD) menghabiskan seluruh waktu termasuk waktu lembur**	**Pemberian waktu untuk pengerjaan kegiatan urusan data. Support dari organisasi untuk keberahasilan program**		
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	56.266.808	11.700.000	20,79	44.566.808	24,51				
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	454.657.307	20.420.200	4,49	434.237.107	21,66				
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	201.430.950	-	0,00	201.430.950	23,74				
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**882.011.584**	**143.113.786**	**16,23**	**738.897.798**	**22,20**				
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	570.278.552	77.705.876	13,63	492.572.676	19,30				
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	311.733.032	65.407.910	20,98	246.325.122	25,09				
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**2.010.558.848**	**707.204.641**	**35,17**	**1.303.354.207**	**49,42**				
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**413.448.401**	**160.721.233**	**38,87**	**252.727.168**	**49,42**				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.683.000	8.319.800	29,01	20.363.200	34,59	1. Adanya kegiatan lain yang lebih prioritas 2. Data yang dibutuhkan tidak memadai	Mengkoordinasikan dan mendokumentasikan dengan baik setiap kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	Minggu ke 3 Bulan Juli	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	18.914.251	-	0,00	18.914.251	67,00				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	16.140.000	-	0,00	16.140.000	9,13				

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Hasil Efesiensi	Keuangan			Fisik	Kendala/hambatan	Solusi	Waktu Penyelesaian	Keterangan
		Realisasi		Sisa Anggaran	Realisasi				
	(Rp.)	*(Rp.)*	%	*(Rp.)*	%				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	148.054.000	58.668.100	39,63	89.385.900	40,77				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26.435.251	15.932.220	60,27	10.503.031	66,69	- Adanya kegiatan lain skala kota yang lebih prioritas, diantaranya penyusunan dokumen perencanaan (waktunya bersamaan dengan jadwal pelaksaaan kegiatan di Bidang). '- Pada saat kegiatan asistensi kepada Perangkat Daerah, perwakilan dari OPD yang menghadiri acara asistensi kurang menguasai materi dan tidak membawa kelengkapan data yang dibutuhkan	- Melakukan review dan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan Perencanaan dengan jadwa lpelaksaaan kegiatan di Bidang PM dan Kesra. - Membuat surat kepada Perangkat Daerah bahwa pada saat kegiatan asistensi agar menugaskan bidang terkait yang menguasai materi serta membawa kelengkapan data yang dibutuhkan.	Minggu ke 3 Bulan Juli	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	27.418.502	6.695.000	24,42	20.723.502	67,00				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	21.792.502	-	0,00	21.792.502	50,64				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	126.010.895	71.106.113	56,43	54.904.782	59,50				
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**847.355.579**	**404.664.943**	**47,76**	**442.690.636**	**57,95**				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26.589.251	23.932.900	90,01	2.656.351	90,57	Jadwal pelaksanaan kegiatan yang bersamaan dan padat antara agenda yang sudah di susun dengan arahan prioritas baik pusat, provinsi dan daerah sehingga menyulitkan untuk dapat fokus pada penyelesaian pekerjaan	penyusunan agenda/ rencana kerja kembali agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lebih maksmial	Minggu ke 3 Bulan Juli	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.486.251	-	0,00	8.486.251	67,00				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	15.306.251	-	0,00	15.306.251	10,00				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	381.457.613	339.423.879	88,98	42.033.734	89,04				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.220.502	-	0,00	18.220.502	43,92				
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.004.502	-	0,00	10.004.502	67,00				

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Hasil Efesiensi	Keuangan			Fisik	Kendala/hambatan	Solusi	Waktu Penyelesaian	Keterangan
		Realisasi		Sisa Anggaran	Realisasi				
	(Rp.)	*(Rp.)*	%	*(Rp.)*	%				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.004.502	1.300.000	12,99	8.704.502	49,38				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	377.286.707	40.008.164	10,60	337.278.543	46,66	Rencana kerjasama penyusunan RAD Iklim yang awalnya dijajaki bersama IPB ternyata tidak bisa, sehigga perlu mencari mitra lain atau secara swakelola	membentuk pokja perubahan iklim tingkat kota dan bersama-sama menyusun RAD iklim	Bulan Agustus	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**749.754.868**	**141.818.465**	**18,92**	**607.936.403**	**40,89**				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.067.753	11.980.800	70,20	5.086.953	75,61				
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.971.753	-	0,00	7.971.753	67,00				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.302.753	-	0,00	10.302.753	10,00				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	221.913.374	70.453.849	31,75	151.459.525	35,81				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.027.753	10.237.800	46,48	11.789.953	48,90	Terdapat perubahan agenda/jadwal karena penyesuaian terhadap pergeseran dan fokus RPJMD	menyusun ulang agenda kerja dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan	Triwulan 3	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.316.753	2.275.000	22,05	8.041.753	67,00				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.316.753	-	0,00	10.316.753	11,37				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	449.837.976	46.871.016	10,42	402.966.960	11,46				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**2.460.368.942**	**244.648.080**	**9,94**	**2.215.720.862**	**22,65**				
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**1.823.472.422**	**213.782.380**	**11,72**	**1.609.690.042**	**20,62**	**1. tidak Sinkronnya timline antar dua lembaga penyelenggara dan penerima swakelola/kegiatan. 2. tidak tepat waktu Pengumpulan data sekunder dalam pengisian kuisioner dilakukan**	**1. saling menginatkan, menginformasi dan komitmen antara kedua lembaga untuk mengikuti jadwal/timeline yang telah disepakati, 2. mengingatkan, konfirmasi PD terkait dalam pengisian kuisioner guna pemenuhan data sekunder tersebut**	**Triwulan 3**	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	193.130.684	37.793.564	19,57	155.337.120	27,83				
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	383.825.570	5.400.000	1,41	378.425.570	10,53				
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1.246.516.168	170.588.816	13,69	1.075.927.352	23,49				

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Hasil Efesiensi	Keuangan			Fisik	Kendala/hambatan	Solusi	Waktu Penyelesaian	Keterangan
		Realisasi		Sisa Anggaran	Realisasi				
	(Rp.)	*(Rp.)*	%	*(Rp.)*	%				
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**9.519.000**	**-**	**0,00**	**9.519.000**	**30,00**	**1. tidak Sinkronnya timline antar dua lembaga penyelenggara dan penerima swakelola/kegiatan. 2. tidak tepat waktu Pengumpulan data sekunder dalam pengisian kuisioner dilakukan**	**1. saling menginatkan, menginformasi dan komitmen antara kedua lembaga untuk mengikuti jadwal/timeline yang telah disepakati, 2. mengingatkan, konfirmasi PD terkait dalam pengisian kuisioner guna pemenuhan data sekunder tersebut**	**Triwulan 3**	
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	9.519.000	-	0,00	9.519.000	30,00				
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**627.377.520**	**30.865.700**	**4,92**	**596.511.820**	**17,33**	*** Kerjasama dengan Kemenkum Kanwil Prov. Kaltim belum terlaksana * Belum terpetakannya usulan inovasi yang akan di HKI kan * Keengganan ASN untuk berinovasi karena padatnya pekerjaan rutin dan minimnya reward perorangan yang diberikan**	*** Segera melakukan kerjasama dengan Kemenkum Kanwil Prov. Kaltim * Segera memetakan Inovasi yang akan di HKI kan * Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terutama perusahaan besar dalam membangun ekosistem inovasi Kota Bontang**	**Triwulan 3**	
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	82.875.141	3.402.400	4,11	79.472.741	6,36				
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	17.858.000	-	0,00	17.858.000	2,00				
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	60.200.000	-	0,00	60.200.000	26,45				
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	453.624.379	27.463.300	6,05	426.161.079	20,32				
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	12.820.000	-	0,00	12.820.000	20,53				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**13.997.034.449**	**6.662.382.624**	**47,60**	**7.334.651.825**	**43,88**				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**10.905.641.604**	**5.198.656.797**	**47,67**	**5.706.984.807**	**56,00**				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.905.641.604	5.198.656.797	47,67	5.706.984.807	56,00				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**483.133.200**	**83.600.000**	**17,30**	**399.533.200**	**18,52**				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	251.257.200	69.600.000	27,70	181.657.200	30,88				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	231.876.000	14.000.000	6,04	217.876.000	6,16	adanya pembatasan Bimtek			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.330.491.990**	**955.276.635**	**71,80**	**375.215.355**	**68,26**				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.365.282	21.215.000	99,30	150.282	100,00				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	445.834.788	432.920.000	97,10	12.914.788	98,77				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.448.940	114.140.000	77,41	33.308.940	79,67				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	83.565.980	64.870.000	77,63	18.695.980	78,40				
Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.856.000	-	0,00	11.856.000	0,00	Capaian fisik Nol, hal ini dikarenakan belum ada kunjungan tamu yang disediakan Makanan			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	620.421.000	322.131.635	51,92	298.289.365	52,70				

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Hasil Efesiensi	Keuangan			Fisik	Kendala/hambatan	Solusi	Waktu Penyelesaian	Keterangan
		Realisasi		Sisa Anggaran	Realisasi				
	(Rp.)	*(Rp.)*	%	*(Rp.)*	%				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**348.270.000**	**-**	**0,00**	**348.270.000**	**0,00**				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	348.270.000	-	0,00	348.270.000	0,00	pengadaan kendaraan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025		Minggu 3 bulan Agustus	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**478.189.200**	**205.545.120**	**42,98**	**272.644.080**	**75,00**				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.040.000	11.040.000	100,00	-	100,00				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	467.149.200	194.505.120	41,64	272.644.080	50,00				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**451.308.455**	**219.304.072**	**48,59**	**232.004.383**	**45,50**				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	427.902.000	209.762.617	49,02	218.139.383	49,77				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.406.455	9.541.455	40,76	13.865.000	41,23				
	22.299.131.128	**8.018.426.252**	**35,96**	**14.280.704.876**	**47,43**				

Sumber : Laporan Monitoring Realisasi Keuangan dan Fisik Bapperida Bulan Juni Tahun 2025

Isu-isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida pada tahun 2024 adalah:

a. Kemampuan keuangan daerah
   Kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini naik dibandingakan dengan tahun tahun sebelumnya, dan adanya kebijakan dari pusat terkait efesiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Nomor NOMOR B/100.3.4.3/265/BPKAD/2025 tentang Penyesuaian Pendapatan, Efisiensi Belanja dan Tata Cara Pergeseran Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, yang berdampak keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk cermat dalam merencanakan dan menentukan prioritas sehingga tujuan dan sasaran tetap dapat tercapai.
b. Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas
   Ketersediaan data yang aktual dan akurat amat dibutuhkan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka menentukan perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Tanpa data yang akurat dan terkini, hasil evaluasi dan perencanaan akan menghasilkan data ataupun informasi yang keliru. Hal ini akan mengakibatkan salahnya perencanaan maupun pengalokasian anggaran pembangunan untuk tahun berikutnya.
c. Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah
   Isu penting yang perlu diperhatikan adalah keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Selain itu juga antara aspek perencanaan dengan penganggaran, dan antar satuan unit kerja. Hal ini sangat penting karena target capaian suatu program dan kegiatan dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar perangkat daerah. Idealnya, perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten, dan sinkron antara tahap satu dengan yang lain, karena penganggaran merupakan modal awal untuk mewujudkan target-target kinerja yang direncanakan.
d. Efektivitas pengendalian dan evaluasi
   Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan melalui kegiatan-kegiatan koreksi, evaluasi, dan penyesuaian selama pelaksanaan program/kerja oleh Perangkat Daerah. Ketidakefektifan sistem pengendalian dan evaluasi, baik secara metodologi, pelaksanaan, maupun penggunaannya merupakan salah satu ciri dari penyusunan perencanaan yang tidak tepat. Pengendalian dimaksudkan

untuk menjamin agar suatu program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian kegiatan antara realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan capaian perencanaan dalam pelaksanaan setiap periode pembangunan daerah.

e. Optimalisasi penelitian dan pengembangan

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peratuaran daerah ini menjadikan Bapperida menjadi Tipe A yang sebelumnya Tipe B. pada Tipe A Bapperida menambah 1 bidang yaitu Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Dan sesuai Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka BAPPERIDA mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan Pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, mempunyai dampak pada perubahan nomenklatur dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. dan penambahan satu bidang yaitu Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila

Tabel 3.2. Pagu Anggaran pada Sub Kegiatan pada Perubahan Renja 2025

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tolak Ukur				Pagu Anggaran				Alasan Penambahan/Pengurangan anggaran
		Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Satuan	Murni	Perubahan	Pergeseran/ Hasil Efesiensi	Perubahan	Bertambah/Berkurang		
						(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	
5.01.02.2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah**	**persen**	**100**	**100**	**3.831.168.889**	**3.717.578.206**	**-113.590.683**	**-2,96**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen perencanaan yang disusun**	**Dokumen**	**4**	**3**	**2.236.802.240**	**2.304.138.240**	**67.336.000**	**3,01**	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan	Dokumen	2	2	70.149.000	70.149.000	0	0,00	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	50.429.000	50.429.000	0	0,00	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	8.352.000	8.352.000	0	0,00	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	3	4	240.562.520	240.562.520	0	0,00	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	300	300	5.398.000	5.398.000	0	0,00	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	3	1.861.911.720	1.929.247.720	67.336.000	3,62	Penambahan anggaran untuk: 1. Belanja makan minum rapat 2. Honorarium Tim Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Tahun 2025-2029
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan yang disediakan**	**Dokumen**	**3**	**3**	**712.355.065**	**707.625.346**	**-4.729.719**	**-0,66**	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen	3	3	56.266.808	93.301.000	37.034.192	65,82	Penambahan anggaran untuk Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah data dan informasi	Orang	30	40	454.657.307	412.893.396	-41.763.911	-9,19	pengurangan anggaran pada belanja perjalanan dinas
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi	Buku	1	1	201.430.950	201.430.950	0	0,00	kegiatan ini tidak termasuk dalam kegiatan skala prioritas
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi**	**dokumen**	**5**	**5**	**882.011.584**	**705.814.620**	**-176.196.964**	**-19,98**	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	3	570.278.552	316.943.576	-253.334.976	-44,42	pengurangan anggaran pada : 1. Belanaj makan minum rapat 2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3. Tenaga Ahli Non Konstruksi 4. Belanaj perjalanan dinas
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	5	311.733.032	388.871.044	77.138.012	24,74	Penambahana anggaran untuk: 1. Belanja Makan minum kegiatan 2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
5.01.03.2	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Implementasi perencanaan dalam penganggaran**	**Persen**	**100**	**100**	**2.010.558.848**	**1.918.749.127**	**-91.809.721**	**-4,57**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun**	**Dokumen**	**2**	**3**	**413.448.401**	**413.448.401**	**0**	**0,00**	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	1	28.683.000	28.683.000	0	0,00	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Laporan	13	2	18.914.251	18.914.251	0	0,00	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	4	1	16.140.000	16.140.000	0	0,00	

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tolak Ukur				Pagu Anggaran				Alasan Penambahan/Pengurangan anggaran
		Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Satuan	Murni	Perubahan	Pergeseran/ Hasil Efesiensi	Perubahan	Bertambah/Berkurang		
						(Rp.)	(Rp.)	*(Rp.)*	*(%)*	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	148.054.000	148.054.000	0	0,00	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	3	26.435.251	26.435.251	0	0,00	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	6	27.418.502	27.418.502	0	0,00	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	9	21.792.502	21.792.502	0	0,00	-
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	1	126.010.895	126.010.895	0	0,00	
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disusun**	**Dokemen**	**2**	**3**	**847.355.579**	**847.355.579**	**0**	**0,00**	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	3	26.589.251	26.187.251	-402.000	-1,51	Pengurangan anggaran pada belanja cetak
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	6	4	8.486.251	8.888.251	402.000	4,74	Penambahan untuk belanja makan minum
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	2	4	15.306.251	15.306.251	0	0,00	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	4	381.457.613	381.457.613	0	0,00	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	3	18.220.502	18.220.502	0	0,00	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	5	5	10.004.502	10.004.502	0	0,00	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	5	4	10.004.502	10.004.502	0	0,00	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	1	377.286.707	377.286.707	0	0,00	Penambahan anggaran untuk belanja : 1. Belanja makan minum kegiatan, 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 Orang
5.01.03.2.03.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun**	**Dokemen**	**2**	**3**	**749.754.868**	**657.945.147**	**-91.809.721**	**-12,25**	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	3	17.067.753	15.392.753	-1.675.000	-9,81	pengurangan anggaran untuk belanja makan minum kegiatan
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	4	3	7.971.753	9.646.753	1.675.000	21,01	penambahan anggaran untuk belanja makan minum kegiatan
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	1	3	10.302.753	10.302.753	0	0,00	

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tolak Ukur				Pagu Anggaran				Alasan Penambahan/Pengurangan anggaran
		Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Satuan	Murni	Perubahan	Pergeseran/ Hasil Efesiensi	Perubahan	Bertambah/Berkurang		
						(Rp.)	(Rp.)	*(Rp.)*	*(%)*	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	1	221.913.374	166.435.646	-55.477.728	-25,00	pengurangan anggaran pada belanja perjalanan dinas
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	3	22.027.753	19.347.753	-2.680.000	-12,17	pengurangan anggaran untuk belanja makan minum kegiatan
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	4	4	10.316.753	7.636.753	-2.680.000	-25,98	pengurangan anggaran untuk belanja makan minum kegiatan
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	4	4	10.316.753	7.636.753	-2.680.000	-25,98	pengurangan anggaran untuk belanja makan minum kegiatan
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	1	449.837.976	421.545.983	-28.291.993	-6,29	pengurangan anggaran pada belanja perjalanan dinas
5.05.02.2	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan**	**Persen**	**80,8**	**80,8**	**2.460.368.942**	**3.096.699.036**	**636.330.094**	**25,86**	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan**	**Kegiatan Kelitbangan**	**4**	**6**	**1.823.472.422**	**2.382.189.109**	**558.716.687**	**30,64**	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	1	193.130.684	193.130.684	0	0,00	
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	2	383.825.570	242.542.401	-141.283.169	-36,81	pengurangan anggaran pada belanja perjalanan dinas
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	6	3	1.246.516.168	1.946.516.024	699.999.856	56,16	Kajian Budidaya dan Pengembangan Hewan Ternak Domba
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kajian dan Rekomendasi bidang ekonomi dan Pembangunan**	**dokumen**	**1**	**1**	**9.519.000**	**9.519.000**	**0**	**0,00**	
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	dokumen	1	1	9.519.000	9.519.000	0	0,00	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah inovasi daerah**	**inovasi**	**150**	**150**	**627.377.520**	**704.990.927**	**77.613.407**	**12,37**	
5.05.02.2.04.01	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	1	82.875.141	98.477.639	15.602.498	18,83	Penambahan anggaran untuk belanja : 1. Belanja makan minum kegiatan, 2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah kegiatan kelitbangan	Dokumen	1	1	17.858.000	17.858.000	0	0,00	
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	1	60.200.000	69.383.000	9.183.000	15,25	Penambahan anggaran untuk belanja : 1. Belanja makan minum kegiatan, 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tolak Ukur				Pagu Anggaran				Alasan Penambahan/Pengurangan anggaran
		Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Satuan	Murni	Perubahan	Pergeseran/ Hasil Efesiensi	Perubahan	Bertambah/Berkurang		
						(Rp.)	(Rp.)	*(Rp.)*	*(%)*	
5.01.01.2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**persen**	**100**	**100**	**13.997.034.449**	**14.500.911.109**	**503.876.660**	**3,60**	**0**
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah**	**Orang/bulan**	**35**	**47**	**10.905.641.604**	**10.905.644.437**	**2.833**	**0,00**	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	35	47	10.905.641.604	10.905.644.437	2.833	0,00	
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian**	**Persen**	**1**	**100**	**483.133.200**	**453.633.200**	**- 29.500.000**	**-6,11**	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	2	2	251.257.200	232.257.200	-19.000.000	-7,56	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	84	84	231.876.000	221.376.000	-10.500.000	-4,53	pengurangan pada belanja kontribusi
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**	**Persen**	**6**	**100**	**1.330.491.990**	**1.825.711.817**	**495.219.827**	**37,22**	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3	21.365.282	21.365.282	0	0,00	Penambahan Belanja instalasi listrik pada ruang Rapat Pangripta
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	9	6	445.834.788	940.877.615	495.042.827	111,04	Penambahan Belanja : 1. Laptop 10 unit
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	2	147.448.940	147.448.940	0	0,00	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	83.565.980	83.565.980	0	0,00	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	11.856.000	11.856.000	0	0,00	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	1	620.421.000	620.598.000	177.000	0,03	penambahan pada belanja makan minum
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**4**	**100**	**348.270.000**	**348.270.000**	**-**	**0,00**	
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	348.270.000	348.270.000	0	0,00	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**	**Persen**	**2**	**100**	**478.189.200**	**478.189.200**	**0**	**0,00**	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	11.040.000	11.040.000	0	0,00	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	467.149.200	467.149.200	0	0,00	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran**	**Persen**	**38**	**100**	**451.308.455**	**489.462.455**	**38.154.000**	**8,92**	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30	30	427.902.000	466.056.000	38.154.000	8,92	Penambahan untuk belanja Bahan bakar minyak
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	48	48	23.406.455	23.406.455	0	0,00	
						22.299.131.128	**23.233.937.478**	**934.806.350**	**4,19**	

XXIV. BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebuah dokumen resmi menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Tahun 2021-2026. Renja Perangkat Daerah tahun 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah Kembali dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan subpengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana Kerja Bapenda merupakan dokumen perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah Daerah dalam satu tahun, maka dokumen ini disusun mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Bontang khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang disusun berlandaskan pada :

1) Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38396) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025 Kota Bontang;

10) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor Tahun 2018 Nomor 5);
11) Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 50).
12) Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Pembangunan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Bapenda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjadi dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan sebagai bahan pengendalian kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2025;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2025;
3. Merumuskan rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2025.

1.4 Sistematika dan Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Menjelaskan latar belakang penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025.
1.2 Landasan Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang dijadikan pedoman penyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025.
1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025.
1.4 Sistematika Penulisan
Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN LALU

2.1 Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu di Tahun 2023 (n-2) dan perkiraan capaian di tahun berjalan di tahun 2024 (n-1). Selanjutnya dikaitkan

dengan Rencana Strategis Bapenda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bapenda di tahun-tahun sebelumnya. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan renja Bapenda di tahun lalu, menjelaskan realisasi program/kegiatan yang tidak, telah terpenuhi dan melebihi pencapaian target serta menjelaskan faktor-faktor juga kebijakan/tindakan penyebabnya serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, menjelaskan mengenai capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, menjelaskan mengenai tingkat capaian kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan telaahaan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bapenda dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bapenda.

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bapenda.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan kinerja serta indikator sub kegiatan dilakukan penyesuaian berdasarkan KEPMENDAGRI nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 desember 2021 tentang verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Capaian kinerja Renja Bapenda, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Bapenda. Target kinerja yang dimaksud merupakan sasaran dengan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan/ subkegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan,

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada Tahun Anggaran berjalan yaitu di tahun 2024 dan di tahun-tahun sebelumnya mempunyai 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan 8 Kegiatan diantaranya yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan
8. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan berdasarkan capaian renstra (2021 sd 2026) yaitu sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah target kinerja akhir tahun 2026 sebesar 100 persen, realisasi indikator kinerja pada tahun 2022, 2023 dan target di tahun 2024 yaitu 100 persen sehingga tingkat perkiraan capaian realisasi target renstra pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, hal ini diterangkan bahwa tujuh kegiatan dalam pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Daerah telah terlaksana berdasarkan target yang telah ditentukan sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100 persen.
2. Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja persentase capaian pendapatan asli daerah target kinerja akhir tahun 2026 sebesar 100 persen, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023, 2024 telah melebihi dari

target yang ditentukan dan target di tahun 2025 yaitu 100 persen sehingga tingkat perkiraan capaian realisasi target renstra pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, hal ini diterangkan bahwa satu kegiatan dalam pencapaian pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah telah terlaksana berdasarkan target yang telah ditentukan sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100 persen. Capaian nilai pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.11
Capaian nilai pendapatan asli daerah

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)
2023	208.097.914.195,00	264.421.428.875,68	127,07%
2024	296.329.967.393,00	329.657.276.433,99	111,25%
2025	382.140.309.374,00		

3. Capaian realisasi target renstra di tahun 2026 dengan tiga puluh tiga sub yang mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022, 2023 dan 2024 mempunyai nilai capaian dengan persentase yang sangat fluktuatif dimana pada sub kegiatan yang bersifat wajib dan rutin rata-rata realisasi belanja pada tahun 2023 mencapai 93.72 persen, sedangkan pada sub kegiatan teknis yang mendukung kegiatan pelayanan pendapatan asli daerah rata-rata capaian realisasinya adalah sebesar 65,40 persen dimana
4. Terdapat 2 (dua) subkegiatan yang capaian realisasi belanjanya berada dibawah 50 % yaitu Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
5. Faktor penyebab tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi target kinerja program/kegiatan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12
Faktor penyebab tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi target kinerja program/kegiatan

Sub Kegiatan	Persentase Tingkat Capaian Realisasi	Capaian >50%	Keterangan Faktor Penyebab
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.89%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	Dilaksanakan pada tahun 2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.47%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93,89 %	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	Dilaksanakan pada tahun 2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	Dilaksanakan pada tahun 2024
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97.49%	>50%	Terlaksana secara maksimal

Sub Kegiatan	Persentase Tingkat Capaian Realisasi	Capaian >50%	Keterangan Faktor Penyebab
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.89%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
			sesuai kebutuhan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.97%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	92,24%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.49%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.16%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.32%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00%	<50%	Pengadaan koran/majalah berlangganan tidak dilaksanakan

Sub Kegiatan	Persentase Tingkat Capaian Realisasi	Capaian >50%	Keterangan Faktor Penyebab
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.89%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.50%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Pengadaan Mebel	98.53%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.87%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.52%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.87%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan

Sub Kegiatan	Persentase Tingkat Capaian Realisasi	Capaian >50%	Keterangan Faktor Penyebab
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.89%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.07	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.73%	>50%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.10%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	Dilaksanakan pada tahun 2024
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	84.62%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	78.28%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	94.90%	>50%	Terlaksana secara maksimal

Sub Kegiatan	Persentase Tingkat Capaian Realisasi	Capaian >50%	Keterangan Faktor Penyebab
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.89%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
			sesuai kebutuhan
Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	54.79%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)	4.43%	<50%	Realisasi kegiatan validasi data wajib pajak tidak mencapai target
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	86.27%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	88.90%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penagihan Pajak Daerah	86.95%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan

Sub Kegiatan	Persentase Tingkat Capaian Realisasi	Capaian >50%	Keterangan Faktor Penyebab
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.89%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	33.02%	<50%	Realisasi kegiatan pengendalian serta pengawasan kepatuhan wajib pajak tidak mencapai target
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	78.40%	>50%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan

6. Implikasi serta kebijakan dalam mengatasi faktor-faktor penyebab target kinerja yang direncanakan tidak tercapai adalah sebagai berikut:

   - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan terus menerus terkait pencapaian kinerja keuangan, baik belanja maupun pendapatan, sehingga kinerja keuangan dapat termonitor dengan baik sehingga risiko-risiko yang ada dapat diantisipasi dengan baik.
   - Pelaksanaan pemetaan potensi pendapatan yang lebih realistis untuk mendukung optimalisasi penerimaan pendapatan, dalam hal ini pajak daerah. Karena, trend penerimaan pajak daerah yang cenderung sluktuatif setiap bulannya
   - Pelaksanaan pemantauan terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja instansi, dalam hal ini monitoring terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak, penjaringan terhadap potensi wajib pajak baru, serta kegiatan validasi data wajib pajak

Hasil evaluasi pelaksanaan renja dan capaian renstra Bapenda Kota Bontang disajikan pada tabel 2.3 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis
Badan Pendapatan Daerah s.d Tahun 2024 Kota Bontang

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) sd 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%			9	10 = 5 + 7 + 9		11 = 10/4 x 100%
xx	xx	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
x	xx	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	25	dokumen	10	Dokumen	5	dokumen	6	dokumen	120%	6	dokumen	22	Persen	400%
x	xx	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dokumen	4	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100%	3	dokumen	10	dokumen	143%
x	xx	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	4	dokumen	67%
x	xx	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6	dokumen	2	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	1	dokumen	3	dokumen	50%
x	xx	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	2	dokumen	1	dokumen	2	dokumen	200%	1	dokumen	5	dokumen	83%
x	xx	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	84	dokumen	43	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100%	3	dokumen	49	Persen	119%
x	xx	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	dokumen	42	orang/bulan	41	orang/bulan	41	orang/bulan	100%	43	orang/bulan	126	orang/bulan	175%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) sd 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9		10 = 5 + 7 + 9		11 = 10/4 x 100%
x	xx	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	4	laporan	67%
		01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	laporan	-	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	-	laporan	1	laporan	-
x	xx	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	dokumen	2	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	1	dokumen	3	dokumen	50%
x	xx	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	100%
x	xx	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	283	stell	-	stell	245	paket	245	paket	100%	1	paket	246	paket	87%
x	xx	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49	orang	12	orang	42	orang	42	orang	100%	12	orang	66	orang	135%
x	xx	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	12	Bulan	12	Bulan	100	Persen	83	Persen	83%	100	Persen	195	Persen	833%
x	xx	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	item	5	item	1	paket	1	paket	100%	1	paket	7	paket	175%
x	xx	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	jenis	4	jenis	9	paket	9	paket	100%	5	paket	18	paket	200%
x	xx	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	item	4	item	10	paket	10	paket	100%	1	paket	15	paket	150%
x	xx	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	item	4	item	2	paket	2	paket	100%	1	paket	7	paket	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) sd 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9		10 = 5 + 7 + 9		11 = 10/4 x 100%
x	xx	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8700	eksemplar	1.200	eksemplar	1	dokumen	-	dokumen	-	1	dokumen	1.201	dokumen	14%
x	xx	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordiansi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331	kali	88	kali	210	laporan	210	laporan	100%	120	laporan	418	laporan	126%
x	xx	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan	3	item	3	paket	100	persen	100	persen	100%	100	persen	203	persen	3333%
x	xx	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	item	3	paket	31	unit	31	unit	100%	1	unit	35	unit	1167%
x	xx	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	12	Bulan	12	Bulan	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	212	Persen	833%
x	xx	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4500	lembar	1.200	lembar	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1.202	laporan	27%
x	xx	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12	bulan	24	bulan	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	48	laporan	400%
x	xx	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	282	orang	114	orang	53	laporan	53	laporan	100%	53	laporan	220	laporan	78%
x	xx	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan BMD	12	Bulan	12	Bulan	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	212	Persen	833%
		01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	unit	-	unit	13	unit	13	unit	100%	-	unit	13	unit	-
x	xx	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	unit	33	unit	20	unit	20	unit	100%	34	unit	87	unit	264%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) sd 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9		10 = 5 + 7 + 9		11 = 10/4 x 100%
x	xx	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	jenis	2	jenis	25	unit	25	unit	100%	30	unit	57	unit	1140%
x	xx	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	gedung	1	gedung	1	unit	1	unit	100%	1	unit	3	unit	300%
x	xx	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100	persen	100	persen	113,23	persen	113,23	persen	100%	100	persen	313	persen	100%
x	xx	04	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12	bulan	12	bulan	113,23	persen	113,23	persen	100%	100	persen	225	persen	833%
x	xx	04	2	01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	1	dokumen	1	dokumen	20%
x	xx	04	2	01	02	Analisa dan Pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100%	2	dokumen	14	dokumen	280%
x	xx	04	2	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7	laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	2	laporan	10	laporan	143%
x	xx	04	2	01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6	Sarana dan prasarana	4	Sarana dan prasarana	14	unit	14	unit	100%	14	unit	32	unit	533%
x	xx	04	2	01	06	Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	laporan	2	laporan	3	laporan	3	laporan	100%	3	laporan	8	laporan	200%
x	xx	04	2	01	07	Penilaian Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	12.000	WP	4.000	WP	8.800	obyek pajak	2.000	obyek pajak	23%	8.800	obyek pajak	14.800	obyek pajak	123%
x	xx	04	2	01	09	Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10	laporan	4	laporan	11	layanan	11	layanan	100%	11	layanan	26	layanan	260%
x	xx	04	2	01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8	dokumen	4	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	8	dokumen	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) sd 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9		10 = 5 + 7 + 9		11 = 10/4 x 100%
x	xx	04	2	01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	4	dokumen	80%
x	xx	04	2	01	13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	4	dokumen	400%
x	xx	04	2	01	15	Elektronifikasi Transaksi pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	laporan	-	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	2	laporan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subpengelolaa pendapatan daerah. Dasar pembentukan pelaksanaan adalah Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bontang No. 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Bapenda dalam melaksanakan tugasnya di bidang keuangan subpengelolaan pendapatan, menyelenggarakan fungsi sebagai penyusun kebijakan teknis di bidang keuangan subpengelolaan pendapatan daerah; pelaksana tugas dukungan teknis di bidang keuangan subpengelolaan pendapatan daerah; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan subpengelolaan pendapatan daerah; pembinaan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi Bapenda.

Secara tupoksi dan struktur birokrasi dalam sistem pemerintahan, Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang berkorelasi dengan tupoksi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Keuangan. Dalam menetapkan programnya, Badan Pendapatan Daerah mengacu kepada program yang ditetapkan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026. Korelasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah, khususnya terhadap tugas pokok dan fungsi Bapenda sebagai koordinator bidang pendapatan daerah.

Bapenda memiliki indikator tujuan Kategori Kapasitas Fiskal yang diperoleh dengan rumusan dari Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, indikator kinerja utama Bapenda yaitu :

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra, disajikan pada tabel, 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.14

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kategori Kapasitas Fiskal (Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah)	-	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3,23%	3,29%	-5.93%	13,59%	3,29%	3,53%	(Realisasi PAD tahun (n) – Realisasi PAD tahun (n-1)) : Realisasi PAD tahun (n-1)
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	80	87	84,7	81	82	Nilai IKM dari penilaian survey dari Pemerintah Kota Bontang terhadap Pelayanan Bapenda

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa target persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan nilai indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun diproyeksikan terus meningkat. Realisasi capaian IKU 1 (persentase peningkatan PAD) pada tahun 2022 bernilai – (minus) hal ini disebabkan karena Persentase peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun berkenaan dipengaruhi oleh realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021.

Pada Tahun 2022 realisasi pendapatan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2021, hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian yang masih dalam tahap penataan kembali pasca covid-19, dimana kondisi ekonomi di Kota Bontang khususnya sudah mulai berkembang dan menunjukkan trend yang positif. Realisasi capaian IKU 1 (persentase peningkatan PAD) pada tahun 2023 juga terus berada pada kondisi yang prima dimana capaian persentase peningkatan PAD adalah sebesar 13,59% dengan nominal capaian pendapatan asli daerah sebesar Rp 262.783.368.861,61 dengan jumlah realisasi pajak daerah sebesar 118.218.692.064,81 atau 44,99% dari jumlah keseluruhan pendapatan asli daerah.

Sedangkan untuk realisasi capaian IKU 2 (nilai IKM) pada tahun 2023 adalah sebesar 84,7 dari target renstra dengan nilai 80, penilaian indeks kepuasan masyarakat tingkat kota belum dilaksanakan sehingga realisasi nilai IKM untuk tahun 2024 belum dapat dijelaskan pada Renja ini.

Untuk proyeksi di tahun 2025 dan 2026 direncanakan terus meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya agar kinerja dari Badan Pendapatan Daerah dapat terus berada pada tingkat yang baik, dan juga sebagai pecutan terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah agar dapat terus melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Sebagai perangkat daerah yang kinerja utamanya menunjang kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah, Bapenda sejak awal ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dihadapkan pada isu rendahnya Tingkat kemandirian fiskal daerah yang ditandai oleh proporsi PAD terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah masih dibawah 15 persen, bahkan dalam kurun waktu 2013-2023 cenderung mengalami penurunan, meskipun tetap mengalami peningkatan berdasarkan nilai absolut.

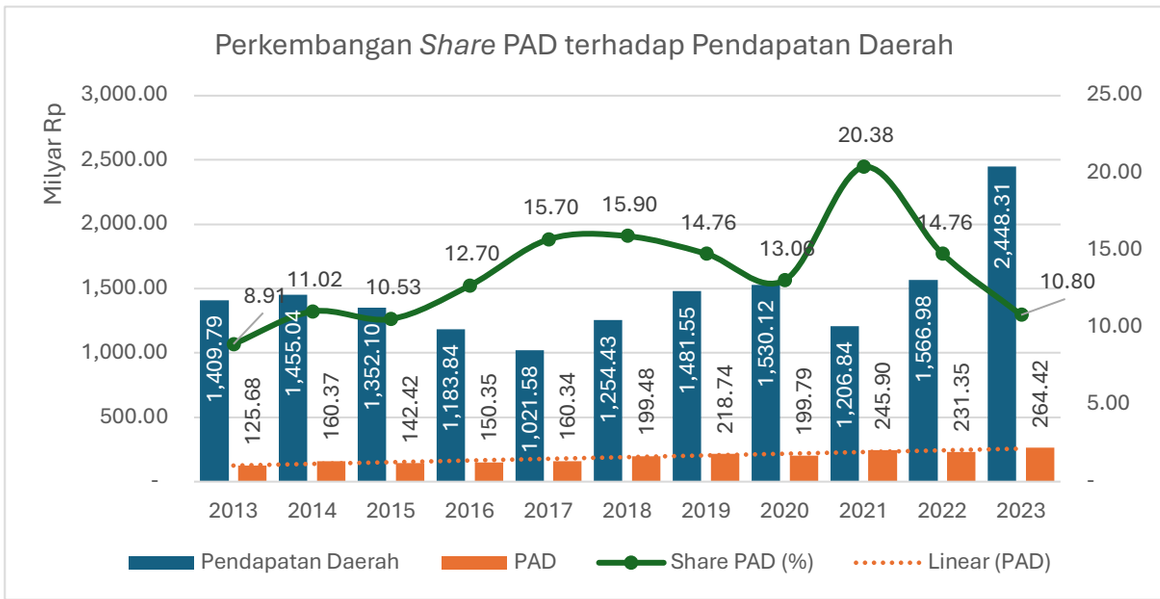

Sejalan dengan isu kemandirian fiskal yang masih rendah tersebut, sebagai perangkat daerah yang secara teknis melaksanakan tugas pengelolaan dan penatausahaan perpajakan daerah, Bapenda masih dihadapkan pula pada belum optimalnya penerimaan pajak daerah. Meskipun realisasi Pajak daerah menunjukkan tren yang meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, namun peningkatan tersebut belum signifikan menopang peningkatan PAD sebagai indikator utama kemandirian pembiayaan Pembangunan daerah.

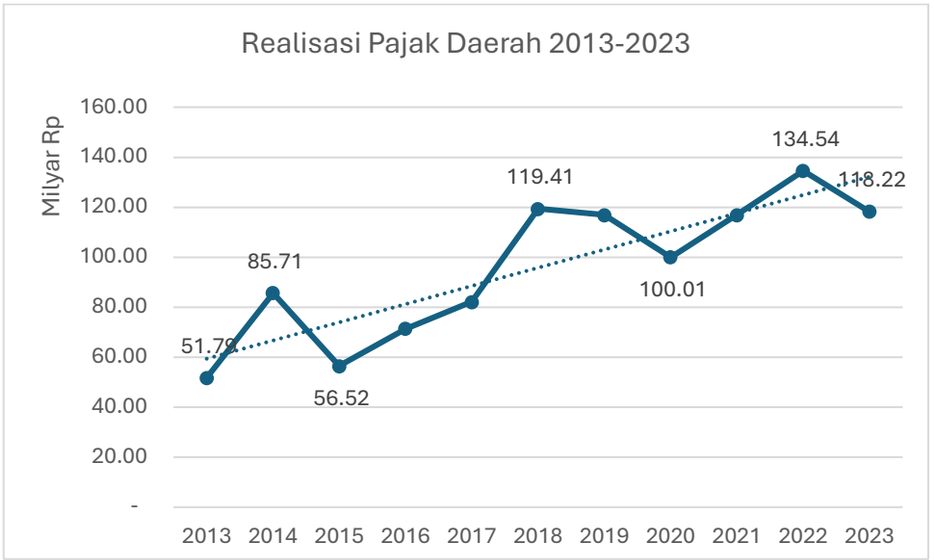

Realisasi sumber pendapatan dari Pajak Daerah dalam periode 2013-2023 relatif berfluktuasi, namun menunjukkan tren peningkatan. Realisasi penerimaan Pajak Daerah ini bersumber dari 11 (sebelas) sumber jenis pajak yang dihimpun dari wajib pajak, dengan pendapatan terbesar bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dengan kontribusi mencapai 47 persen, Pajak Restoran 17 persen dan Penerangan Jalan 14 persen. Secara keseluruhan distribusi sebelas sumber Pajak Daerah selengkapnya ditampilkan pada gambar berikut:

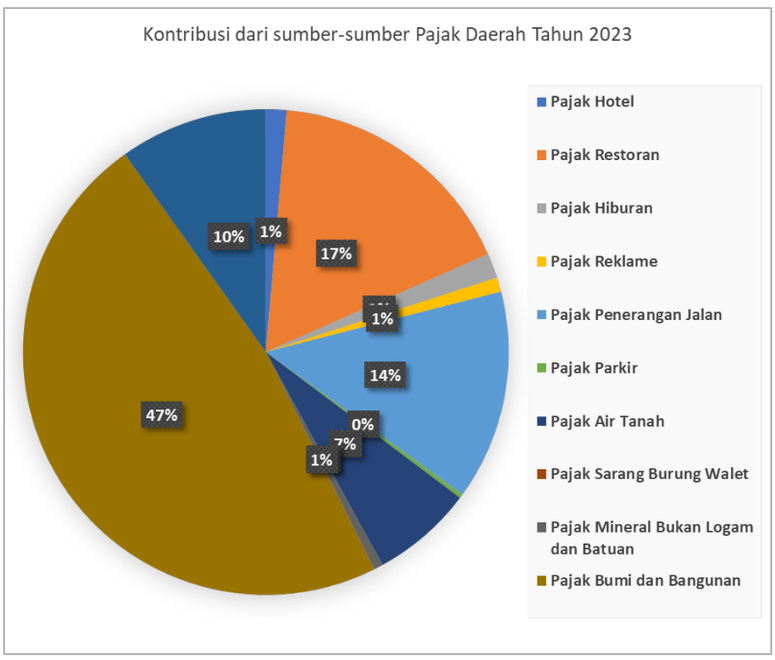

Terlepas dari distribusi dan fluktuasi realisasi penerimaan Pajak Daerah tersebut, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan nilai pajak yang tertunggak

dengan jumlah wajib pajak yang menunggak meningkat pula. Secara akumulatif nilai tunggakan yang menjadi piutang PBB hingga tahun 2023 telah mencapai Rp53,4 Milyar. Adapun perkembangan Penetapan, Pembayaran, dan Tunggakan PBB secara tahunan selama lima tahun terakhir 2019-2023 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.15
Perkembangan Pembayaran dan Tunggakan PBB Tahun 2019-2023

Tahun	SPPT Terbit	Nilai Penetapan	Nilai Pembayaran PBB	Nilai Tunggakan PBB	Persen
2019	45.898	42.102.683.121,00	37.001.663.143,00	5.101.019.978,00	12,12
2020	46.364	45.331.166.591,00	37.558.848.481,00	7.772.318.110,00	17,15
2021	46.749	45.219.264.685,00	37.663.565.672,00	7.555.699.013,00	16,71
2022	46.910	45.974.222.644,00	37.636.596.389,00	8.359.924.205,00	18,18
2023	47.622	61.433.754.028,00	53.517.019.995,00	7.916.734.033,00	12,89

Dari perspektif nilai penetapan PBB sesuai SPPT yang diterbitkan, rata-rata nilai tunggakan setiap tahunnya selama tahun 2019-2023 mencapai 15,4 persen dengan tren yang menunjukkan peningkatan. Demikian pula memperhatikan jumlah SPPT dengan kategori menunggak atau tidak dilakukan pembayaran oleh wajib pajak PBB. Jumlahnya juga menunjukkan peningkatan. Dengan membandingkan antara jumlah SPPT yang diterbitkan dengan jumlah SPPT yang dibayarkan oleh WP PBB, maka dapat dilihat tren kepatuhannya menunjukkan penurunan dari 45% pada tahun 2015, menjadi 40 persen pada tahun 2023.

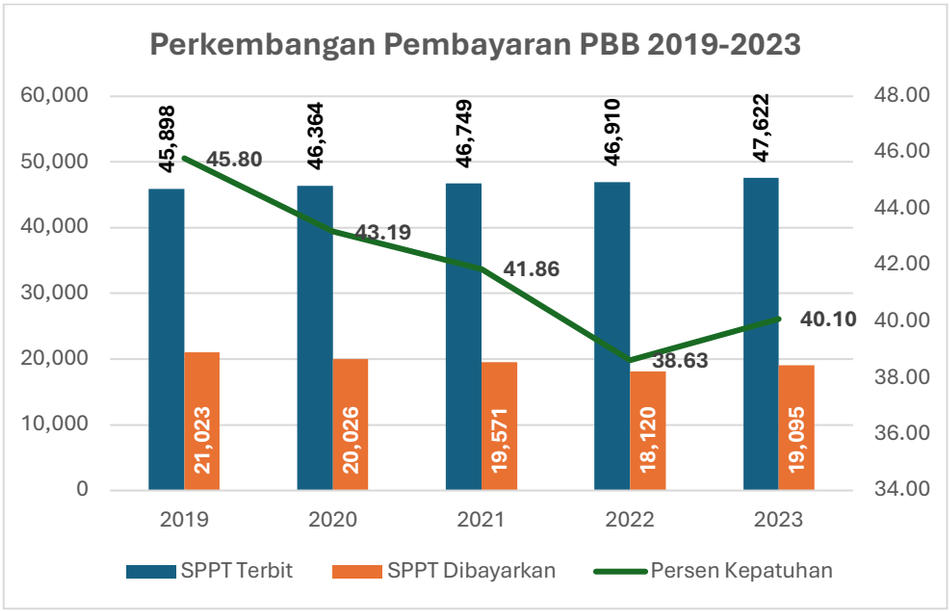

Pada kelompok Pajak Daerah lainnya, permasalahan tunggakan pajak juga menunjukkan peningkatan. Namun demikian secara persentase nilai tunggakannya relatif lebih kecil. Terjadi peningkatan tunggakan pajak-pajak daerah Non PBB dan BPHTB pada tahun 2023 baik pada aspek jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun nilai pajaknya jika dibandingkan realisasi tahun 2022. Hal ini seharusnya menjadi perhatian dan menjadi bahan evaluasi agar peningkatan tunggakan dan selanjutnya menjadi piutang ini tidak berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya sebagaimana terjadi pada objek pajak PBB dan BPHTB.

Tabel 2.16
Perkembangan Penetapan SKPD dan Tunggakan Pajak Non PBB dan BPHTB Tahun 2021-2023

Tahun	Penerbitan SKPD	Nilai Ketetapan SKPD	SKPD Menunggak	Nilai SKPD Menunggak	Persen
2021	6.244	57.552.845.914,10	25	33.817.598,00	0,06
2022	7.592	52.296.428.081,74	75	65.407.527,00	0,13
2023	9.509	50.162.060.190,42	276	591.575.809,00	1,18

Tren meningkatnya tunggakan dan piutang pajak, menjadi salah satu permasalahan prioritas sehubungan dengan isu strategis masih rendahnya kemandirian fiscal Kota Bontang. Oleh karena itu menjadi sangat penting dan strategis bagi Bapenda menyusun strategi dan kebijakan intervensi dengan pendekatan dan terobosan yang tepat agar secara efektif dapat menjadi solusi atas tren peningkatan tunggakan dan piutang pajak daerah ini. Selanjutnya dalam jangka

Panjang dapat menjadi stimulasi peningkatan pendapatan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber untuk menopang kemandirian fiskal daerah.

Sejalan dengan analisis isu strategis diatas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah juga menghadapi isu-isu penting sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai kontribusi pajak daerah terhadap kualitas pembangunan yang dilaksanakan, efek langsung apa yang akan dirasakan masyarakat ketika mereka telah membayar pajak, serta apresiasi sebesar-besarnya terhadap seluruh masyarakat yang dengan taat dan sadar telah membayar pajak.
2. Penguatan dasar hukum atau peraturan yang mendukung langsung pelayanan pajak dan retribusi daerah. Dasar hukum atau peraturan menjadi syarat utama agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilaksanakan setiap tahunnya, implementasi atas sisdur pemungutan pajak dan retribusi daerah harus dijalankan dengan dasar yang kuat untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi dimasa mendatang
3. Kerjasama antar instansi yang mendukung optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Komponen pendapatan asli daerah yang beragam serta tidak hanya berada pada satu instansi saja membutuhkan kerjasama yang apik antar instansi-intansi tersebut, Badan Pendapatan Daerah berusaha terus menjembatani instansi-instansi lain yang bergerak dibidang pendapatan asli daerah untuk sama-sama memaksimalkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah yang ada serta terus mempertahankan trend pendapatan asli daerah yang terus naik dengan positif.
4. Pelaksanaan kegiatan validasi data pajak daerah. Selain melakukan upaya pengecekan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data wajib pajak yang valid, Badan Pendapatan Daerah juga melaksanakan upaya validasi data secara besar-besaran dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju, bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Pendapatan Daerah memanfaatkan Lidar untuk penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar data yang dihasilkan dapat dijamin keakuratannya.
5. Implementasi program E-BPHTB sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelayanan pajak secara online yang diharapkan dengan adanya program E-

BPHTB ini pelayanan pajak daerah dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan lebih transparan. Monitoring terhadap implementasi penggunaan E-BPHTB ini akan terus dilakukan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban administrasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah

6. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan pajak daerah. Terbatasnya loket pembayaran serta ruang tunggu antrian pelayanan pajak daerah memaksa Badan Pendapatan Daerah untuk terus melakukan optimalisasi kegiatan pelayanan dalam kondisi yang terbatas, hal ini tentunya akan menimbulkan risiko berkepanjangan apabila tidak segera ditemukan solusi yang pasti. Akan tetapi Badan Pendapatan Daerah terus melakukan upaya-upaya yang nyata agar masyarakat bisa membayar pajak daerah tanpa harus menguras tenaga, salah satu upayanya adalah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dimana pembayaran pajak daerah dapat dilakukan dari rumah melalui channel pembayaran yang ada, selain itu Badan Pendapatan Daerah juga melaksanakan kegiatan Jemput Bola langsung kepada masyarakat yang berlokasi di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bontang.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

Identifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah anatara lain :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pelaksanaan pengendalian serta pengawasan yang belum berjalan dengan optimal pada tahun 2023 membuat Badan Pendapatan Daerah harus melakukan kegiatan yang sama dengan target serta jangkauan yang lebih luas dengan dukungan anggaran yang tentunya terbatas. Selain itu, kurang adanya keterbukaan dari wajib pajak utamanya yang menjalankan mekanisme *self assessment* terkait omset bulanan/tahunan mereka juga ikut mempengaruhi tingkat capaian realisasi pajak daerah
2. Kurang validnya data yang ada pada database saat ini utamanya data wajib pajak PBBP2. Besarnya

jumlah wajib pajak PBBP2 tidak sebanding dengan jumlah petugas lapangan yang ada sehingga kegiatan pengecekan langsung ke lapangan hanya akan dilakukan ketika wajib pajak mengajukan permohonan untuk peninjauan ulang terhadap aset yang mereka miliki. Hal inilah yang menjadi kendala Badan Pendapatan Daerah hingga saat ini.

3. Perumusan potensi pendapatan asli daerah yang kurang realistis sehingga penentuan target pendapatan asli daerah, utamanya pajak daerah masih dirasa kurang maksimal.
4. Realisasi fisik dan belanja Badan Pendapatan Daerah yang masih dibawah target yang ditentukan, pada triwulan II tahun 2024 yang seharusnya target realisasi keuangan dan fisik mencapai 50%, namun realisasi fisik dan keuangan Badan Pendapatan Dearah masih berada pada kisaran angka 40%. Hal ini tentu mempengaruhi kinerja Badan Pendapatan Daerah secara keseluruhan, dimana seharusnya kondisi seperti ini harus dapat diantisipasi agar tidak terjadi.

2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam pencapaian kinerja pada indikator dalam peningkatan PAD, alternatif yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan kajian terkait kebijakan regulasi terbaru.
2. Memberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya pajak daerah serta melakukan jemput bola langsung ke masyarakat atau wajib pajak
3. Melakukan peningkatan sosialisasi melalui media elektronik maupun masyarakat terkait perpajakan
4. Dilaksanakan validasi atau pemutakhiran data wajib pajak.
5. Mendorong adanya inovasi yang mendukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah

2.3.3 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan pada Tahun yang Direncanakan.

Langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan pada Tahun yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis yang membidangi terkait pendapatan asli daerah lainnya dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan terkait pengelolaan pendapatan daerah.
3. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Membuat kebijakan terkait dengan perpajakan maupun penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak.
5. Mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan bagi peningkatan pendapatan daerah.
6. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.
7. Melaksanakan pemutakhiran data wajib pajak untuk PBB-P2 dan pajak daerah lainnya.
8. Melaksanakan dan merealisasikan penghapusan piutang pajak berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
9. Membuat inovasi dalam pengembangan sistem pelayanan pajak daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut

Tabel 2.17
Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bontang	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	14.451.042.368	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bontang	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	22.675.793.871	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	28.374.897	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	547.808	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	12.977.250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	136.952	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.737.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	136.952	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1.737.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	136.952	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.922.647	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	136.952	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	100 Persen	11.437.858.959	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	14 Dokumen	16.674.820.566	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	11.364.806.400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	16.674.546.662	

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	68.091.059	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhit tahun SKPD	1 Laporan	136.952	
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.961.500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	136.952	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	100 persen	46.404.850	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	100 persen	161.854.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	46.404.850	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	161.854.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan administrasi perkantoran	100 persen	679.175.845	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan administrasi perkantoran	12 Bulan	1.328.419.292	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.270.527	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	438.926.788	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	69.792.426	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.938.584	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	52.053.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	122.423.393	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.450.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.770.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordiansi dan konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 Laporan	437.880.119	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	724.090.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Daerah	100 persen	23.992.083	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Daerah	100 persen	320.792.986	

1	Pengadaan Mebel	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 paket	23.992.083	Pengadaan Mebel	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit	320.792.986	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100 persen	2.165.542.029	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100 persen	3.052.622.440	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.950.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	283.445.971	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	360.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.874.096.058	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	46 Laporan	2.687.672.440	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 persen	69.693.705	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 persen	1.136.736.779	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 unit	39.918.849	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 unit	576.386.779	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Bontang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	29.774.856	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 Unit	110.350.000	
3						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	450.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 persen	2.598.583.992	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 persen	4.329.428.055	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen	2.598.583.992	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen	4.329.428.055	

1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	200.000.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	40.565.429	
2	Analisa dan Pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 dokumen	273.740.116	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	438.796.504	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	170.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	411.011.725	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 unit	281.168.205	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Unit	175.074.837	
5	Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	417.759.606	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	159.820.800	
6	Penilaian Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	18000 objek pajak	500.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Bea perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	23750 objek pajak	2.496.651.428	
7	Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	62.622.873	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	36.890.180	
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	11 Dokumen	382.758.032	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	1 Dokumen	8.810.000	
9	Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	32.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	304.526.040	
10	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	178.535.160	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	141.782.112	

11	Elektronifikasi Transaksi pemerintah Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Tarnsaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	100.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Tarnsaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	115.499.000	
					17.049.626.360	**TOTAL**				**27.005.221.926**	

Berdasarkan tabel 2.3 review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah yaitu dengan 2 (dua) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan pada rancangan awal RKPD pagu indikatif sebesar Rp. 17.049.626.360,- (Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), sedangkan kebutuhan dana sebesar Rp. 27.005.221.926,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah). Dengan rincian penambahan sebagai berikut :

a. Penyesuaian jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN
b. Penyesuaian jumlah belanja wajib bersifat rutin seperti pembayaran listrik, pembayaran internet, pembayaran air, pemeliharaan kendaraan, belanja bbm, pemeliharaan peralatan kantor
c. Pemeliharaan aplikasi yang ada pada Badan Pendapatan Daerah
d. Pelaksanaan kegiatan lanjutan pasca kegiatan pemetaan menggunakan lidar
e. Pelaksanaan kegiatan validasi data pajak daerah
f. Pelaksanaan sosialisasi mengenai regulasi pajak daerah, serta mengenai pajak daerah secara khusus
g. Pelaksanaan kegiatan rutin pelayanan serta penagihan pajak daerah
h. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan pajak daerah
i. Penyusunan kajian mengenai potensi pendapatan asli daerah
j. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi petugas pelayanan pajak daerah
k. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli daerah
l. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi-instansi terkait lainnya

BAB III
TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian, kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, yang memuat 7 (tujuh) Program Nasional meliputi :

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.;
b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar ;
f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkann ketahanan bencana, perubahan iklim;
g. Meningkatkan stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Kebijakan keuangan daerah sebagai salah satu kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendesain dan mengarahkan kebijakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah, karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Bapenda Kota Bontang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan memberikan jaminan ketersediaan anggaran melalui realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah mengacu pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis

dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2024 adalah Meningkatnya Kemandirian Fiskal di Daerah. Dengan indikator tujuannya, yaitu “Kategori Kapasitas Fiskal (Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah)”.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2025 adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda tahun 2025 dan sejalan dengan isu strategis sebagaimana dijelaskan pada Bab II, dalam Renja tahun 2025 Bapenda melaksanakan inovasi dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya terkait dengan upaya meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan melalui program BAPENDA MENGAJAR dengan sasaran para pelajar SMA/MA/SMK dan juga menyelenggarakan bimbingan teknis bagi wajib pajak. Inovasi juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpajakan daerah melalui program pelayanan pajak keliling di setiap kelurahan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Penyusunan Program /kegiatan/ sub kegiatan dan kinerja serta indikator sub kegiatan telah dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 desember 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel 4.5
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Persen	Rp22.675.793.871,00	Dana Umum (APBD)		100%	18.524.000.000,00
x	xx	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kota Bontang	Dokumen	Rp547.808,00	Dana Umum (APBD)		19 Dokumen	35.000.000,00
x	xx	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Dokumen	Rp136.952,00	Dana Umum (APBD)		7 Dokumen	15.000.000,00
x	xx	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bontang	Dokumen	Rp136.952,00	Dana Umum (APBD)		6 Dokumen	2.500.000,00
x	xx	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Bontang	Dokumen	Rp136.952,00	Dana Umum (APBD)		-	2.500.000,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Laporan	Rp136.952,00	Dana Umum (APBD)		6 Dokumen	15.000.000,00
x	xx	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Kota Bontang	Dokumen	Rp16.674.820.566,00	Dana Umum (APBD)		78 Dokumen	15.076.000.000,00
x	xx	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Orang/Bulan	Rp16.674.546.662,00	Dana Umum (APBD)		72 Dokumen	15.000.000.000,00
x	xx	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang	Laporan	Rp136.952,00	Dana Umum (APBD)		6 Laporan	70.000.000,00
x	xx	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	Dokumen	Rp136.952,00	Dana Umum (APBD)		-	6.000.000,00
x	xx	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Bontang	Persen	Rp161.854.000,00	Dana Umum (APBD)		1	50.000.000,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bontang	Orang	Rp161.854.000,00	Dana Umum (APBD)		49 Orang	50.000.000,00
x	xx	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Bontang	Persen	Rp1.328.419.292,00	Dana Umum (APBD)		1	782.000.000,00
x	xx	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	Paket	Rp14.270.527,00	Dana Umum (APBD)		4 Item	15.000.000,00
x	xx	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	Paket	Rp438.926.788,00	Dana Umum (APBD)		9 Jenis	120.000.000,00
x	xx	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	Paket	Rp20.938.584,00	Dana Umum (APBD)		10 Item	75.000.000,00
x	xx	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bontang	Paket	Rp122.423.393,00	Dana Umum (APBD)		7 Item	60.000.000,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bontang	Dokumen	Rp7.770.000,00	Dana Umum (APBD)		8700 Eksemplar	12.000.000,00
x	xx	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Laporan	Rp724.090.000,00	Dana Umum (APBD)		331 Kali	500.000.000,00
x	xx	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan	Kota Bontang	Persen	Rp320.792.986,00	Dana Umum (APBD)		100%	30.000.000,00
x	xx	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Bontang	Unit	Rp320.792.986,00	Dana Umum (APBD)		3 Item	30.000.000,00
x	xx	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Bontang	Persen	Rp3.052.622.440,00	Dana Umum (APBD)		100%	2.209.000.000,00
x	xx	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Laporan	Rp4.950.000,00	Dana Umum (APBD)		4500 Lembar	9.000.000,00
x	xx	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Kota Bontang	Laporan	Rp360.000.000,00	Dana Umum (APBD)		12 Bulan	300.000.000,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	Laporan	Rp2.687.672.440,00	Dana Umum (APBD)		282 Orang	1.900.000.000,00
x	xx	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan BMD	Kota Bontang	Persen	Rp1.136.736.779,00	Dana Umum (APBD)		100%	342.000.000,00
x	xx	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bontang	Unit	Rp576.386.779,00	Dana Umum (APBD)		33 Unit	300.000.000,00
x	xx	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bontang	Unit	Rp110.350.000,00	Dana Umum (APBD)		5 Unit	42.000.000,00
x	xx	01	2	09				Kota Bontang	Unit	Rp450.000.000,000	Dana Umum (APBD)			
x	xx	04				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	Kota Bontang	Persen	Rp4.329.428,055,00	Dana Umum (APBD)		100%	2.920.000.000,00
x	xx	04	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bontang	Persen	Rp4.329.428.055,00	Dana Umum (APBD)		100%	2.920.000.000,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	04	2	01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang	Dokumen	Rp40.565.429,00	Dana Umum (APBD)		5 Dokumen	250.000.000,00
x	xx	04	2	01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang	Dokumen	Rp438.796.504,00	Dana Umum (APBD)		15 Dokumen	300.000.000,00
x	xx	04	2	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang	Laporan	Rp411.011.725,00	Dana Umum (APBD)		7 Laporan	200.000.000,00
x	xx	04	2	01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang	Unit	Rp175.074.837,00	Dana Umum (APBD)		6 Sarana dan Prasarana	300.000.000,00
x	xx	04	2	01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Bontang	Laporan	Rp159.820.800,00	Dana Umum (APBD)		4 Laporan	450.000.000,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	04	2	01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	Kota Bontang	Obyek Pajak	Rp2.496.651.428,00	Dana Umum (APBD)		12000 WP	550.000.000,00
x	xx	04	2	01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang	Layanan	Rp36.890.800,00	Dana Umum (APBD)		10 Laporan	70.000.000,00
x	xx	04	2	01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kota Bontang	Dokumen	Rp8.810.000,00	Dana Umum (APBD)		8 Dokumen	400.000.000,00
x	xx	04	2	01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang	Dokumen	Rp304.526.040,00	Dana Umum (APBD)		5 Dokumen	50.000.000,00
x	xx	04	2	01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bontang	Dokumen	Rp141.782.112,00	Dana Umum (APBD)		5 Dokumen	200.000.000,00
x	xx	04	2	01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Tarnsaksi Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Laporan	Rp115.499.000,00	Dana Umum (APBD)		1 Laporan	150.000.000,00
Total										**Rp22.005.221.926,00**				**21.444.000.000,00**

XXV. BADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa azas dan tujuannya adalah : 1). Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional; 2). Perencanaan Pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh,dan tanggap terhadap perubahan; 3). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Azas Umum Penyelenggaraan Negara; 4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : a). Mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan; b). Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar pusat dan daerah; c). Menjamin keterikatan dan konsisten antar perencanaan, penganggaran,pelaksana, dan pengawasan; d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e). Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2029, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang telah menyusun dokumen Rencana Stategis (Renstra). Dimana dokumen tersebut dimana dokumen tersebut sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Bontang 2025-2029.

Dalam Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2029 telah memuat tujuan dan sasaran serta kebijakan yang dituangkan dalam

program dan kegiatan, sehingga tersusunlah indikator kinerja yang akan dicapai dalam Tahun 2025-2029.

Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan Tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/ kegiatan prioritas, dalam Tahun berjalan pelaksanaan renja perlu adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kerangka pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang .

Penyusunan Rancangan Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang sebelumnya dibuat dan telah diselaraskan dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan Rancangan RKPD-P Kota Bontang Tahun 2025. Dokumen tersebut selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan dari hasil forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Bontang.

Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah *ya*ng mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang diselaraskan dengan RPJM Daerah atau RENSTRA Daerah sebagai bahan masukan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) untuk pedoman penyusunan RAPBD dan RAPBN TA. 2026 pada Musrenbang Tahun 2025.

Berdasarkan azas, tujuan dan tahapan perencanaan pembangunan tersebut diatas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menyusun Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang Tahun 2025, di samping usulan bidang berdasarkan dengan Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Renja ini merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas BPKAD Kota Bontang yang sesuai dengan Visi

dan Misi Wali Kota terpilih dan usulan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang Kota Bontang.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) OPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang disusun atas dasar landasan dan sejumlah peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) ;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang PJPD Kota Bontang Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor ..... Tahun 2025 Tentang RPJMD 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2025 Nomor ....).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang 2025 disusun dengan maksud

untuk menjadi acuan dalam menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program,kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan ini akan menjadi dasar penyusunan RKA-P , sebagai bahan tersusunnya DPA-P yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Sebagai acuan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang dalam rangka untuk terlaksananya RKPD-P Kota Bontang Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.
2. Untuk merumuskan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang selama Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II **Evaluasi Hasil Renja PD ,** Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang Tahun berjalan dan capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Analisis kinerja pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Isu – isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Sasaran Dan Prioritas Renja Tahun 2025, Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan, yaitu : Telaahan terhadap

kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, Tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan, Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan Perencanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang.

Bab V Penutup, Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Renja, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025

2. 1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025 dan Capaian RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang Tahun 2025 dan proyeksi Tahun 2026 dapat disampaikan sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang setelah pergeseran mendahului perubahan sebesar Rp 33.677.739.875,00 dengan 3 (Tiga) Program, 14 (Empat Belas) kegiatan dan 76 (Tujuh Puluh Enam) Sub Kegiatan, Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 9.488.115.981,00 atau 28,17%

capaian kinerja fisik sebesar 39,53% dengan rincian sebagai berikut:

Sampai dengan periode 30 Juni 2025 progres capaian realisasi Fisik semester pertama yang telah dicapai sebesar 39,53% Sedangkan realisasi Keuangan sebesar Rp 9.488.115.981,00 atau 28,17%. Belanja Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Bontang dianggarkan sebesar Rp. 33.677.739.875,00 yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 26.585.444.126,00 dengan capaian realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni 2025 sebesar Rp. Rp. 9.488.115.981,00 atau 28,17% meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.849.994.387,00 capaian realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni 2024 sebesar Rp. 5.166.139.011,00 atau 47,61%. dan Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 15.735.449.739,00 dengan capaian realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni 2025 sebesar Rp. 4.012.411.470,00 atau 25,49%. *Belanja Modal* dianggarkan

sebesar Rp 592.286.749,00 dengan capaian realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni 2025 sebesar Rp. 54.565.500,00 atau 9,21%. Yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebesar Rp. 592.286.749,00 capaian realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni 2025 sebesar Rp. 54.565.500,00 atau 9,21%. Sedangkan untuk *Belanja Tidak Terduga* yang dianggarkan sebesar Rp 6.500.000.000,00 dengan capaian realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Juni 2025 sebesar Rp. 255.000.000,00 atau 3,92%.

Capaian target fisik kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang masih kurang dari target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan yang belum dilaksanakan pada triwulan I yang anggaran kasnya dibuat pada semester ke II.

Pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai ini secara langsung akan berpengaruh pada proses realisasi keuangan, karena proses realisasi keuangan dapat terlaksana jika realisasi kegiatan secara fisik telah terpenuhi, karena besaran realisasi keuangan tidak boleh lebih tinggi dari besaran realisasi fisik atau besarannya maksimal sama dengan besaran realisasi fisik.

Sementara untuk aspek keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang telah menetapkan Pagu Anggaran Belanja sesuai dengan DPA Perangkat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 Sebesar Rp. *39.693.957.480,00* Sebelum Pergeseran 1 mendahului perubahan yang ditetapkan di awal April 2025 menjadi sebesar Rp. 33.677.739.875,00 Pagu Anggaran tersebut meliputi Belanja Operasi ,Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

Berdasarkan hasil pencatatan Bendahara Pengeluaran, capaian realisasi keuangan per 30 Juni 2025 sebesar Rp 9.488.115.981,00 atau 28,17% dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 9.178.550.481,00 atau sebesar 34.52%
2. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 54.565.500,00 atau sebesar 9,21%
3. Realisasi Belanja Tidak Terduga Rp. 255.000.000,00 atau sebesar 3,92%.

Dari uraian tersebut diatas, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perbandingan rencana kinerja dengan realisasi baik fisik maupun keuangan dalam suatu entitas pelaporan.

Capaian kinerja berdasarkan realisasi fisik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per 30 Juni 2025 sebesar 39,53%. Sedangkan berdasarkan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.488.115.981,00 atau 28,17%.Perbandingan realisasi fisik dengan realisasi keuangan mengalami selisih sebesar 11,36%, dimana realisasi fisik jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi keuangan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Adanya efisiensi anggaran sehingga dilakukan Pergeseran-pergeseran pada kegiatan dan sub kegiatan dan dilakukan Pergeseran mendahului Perubahan.
2. Adanya beberapa sub kegiatan yang akan dihapus diperubahan dikarenakan beberapa kendala.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kota Bontang Triwulan II (Dua) Tahun 2025

No.	Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Ke giatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Pergeseran 1 Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III dan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	'5.02.01	Meningkatnya Pelayanan Teknis dan Administratif untuk Mendukung Penyelenggar aan Tugas dan Fungsi Serta Reformasi Birokrasi BPKAD Kota Bontang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	15,293,922,397	100%	15,839,644,494	100%	20,252,986,180	25%	4,082,035,295	25%	3,971,609,074	50%	8,053,644,369	50%	23,893,288,863	100%	100%	
	5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	34,979,000	100%	22,010,000	100%	11,741,112	25%	-	25%		100%	-	100%	22,010,000		62.92%	
1	5.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	14,000,000	1 Dokumen	6,500,000	3 Dokumen	3,913,704	0		0		0	-	1 Dokumen	6,500,000		60.43%	BPKAD

2	5.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	11,979,000	2 Laporan	9,580,000	2 Laporan	3,913,764	0		1		1	-	3 Laporan	9,580,000		66.67 %	BPKAD
3	5.02.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	9,000,000	1 Laporan	5,930,000	1 Laporan	3,913,764	1 Laporan		0		1 Laporan	-	1 Laporan	5,930,000		65.89 %	BPKAD
	5.02.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**8,134,607,197**	**100 %**	**9,663,368,175**	**100 %**	**11,248,726,795**	**25 %**	**2,555,215,657**	**25 %**	**2,780,249,740**	**25 %**	**5,335,465,397**	**100 %**	**14,998,833,572**		184.3 8%	
4	5.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	8,004,169,197	44 Orang	8,944,637,826	44 Orang/bulan	11,089,994,387	45 Orang/bulan	2,505,456,871	49 Orang/bulan	2,747,927,640	49 Orang/bulan	5,253,384,511	44 Orang	14,198,022,337		127.5 8%	BPKAD
5	5.02.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Orang 31 Orang	118,459,000	42 Dokumen	708,580,349	2 Dokumen	130,905,000	0	49,758,786	0 %	32,322,100	0	82,080,886	42 Dokumen	790,661,235		69.4 8%	BPKAD

No.	Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Ke giatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Pergeseran 1 Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III dan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
6	5.02.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,655,000	1 Laporan	5,075,000	1 Laporan	3,913,704	0		0		0	-	1 Laporan	5,075,000		76.26 %	BPKAD
7	5.02.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5,324,000	1 Dokumen	5,075,000	1 Dokumen	3,913,704	0		0		0	-	1 Dokumen	5,075,000		95.32 %	BPKAD
	5.02.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**5,856,000**	**100 %**	**2,850,000**	**100 %**	**9,096,480**	**0%**	**-**	**25 %**		**25 %**	**-**	**100 %**	**2,850,000**		48.67%	
8	5.02.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,856,000	1 Laporan	2,850,000	1 Laporan	9,096,480			1		1	-	1 Laporan	2,850,000		48.67%	BPKAD
	5.02.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian**	**100%**	**331,019,700**	**100%**	**2,819,891,566**	**100 %**	**742,359,230**	**0%**	**-**	**0%**		**0 %**	**-**	**100%**	**2,819,891,566**		85.68 %	
9	5.02.01.2.05.09		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	87 Paket	127,376,700	5 Paket	250,013,500	5 Paket	307,292,230			0		0	-	5 Paket	250,013,500		196.28 %	BPKAD
10	5.02.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 orang, 3 orang	203,643,000	21 orang	2,356,166,466	0 Orang	171,300,000			0		0	-	21 orang	2,356,166,466		114.61%	BPKAD
11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		230 Orang	213,711,600	70 Orang	3,567,000			0		0	-	230 Orang	213,711,600		0.00%	BPKAD
	5.02.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**2,118,514,000**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**3,060,803,382**	**25 %**	**606,676,657**	**25 %**	**438,801,579**	**50 %**	**1,045,478,236**	**100%**	**1,045,478,237**		49.35 %	

2	5.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	99,825,000	5 Paket	49,130,000	5 Paket	89,349,787			0			-	4 Paket	49,130,000		41.22%	BPKAD
3	5.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	512,435,000	6 Paket	701,893,600	5 Paket	692,797,778	-		-			-	38 Paket	701,893,600		136.97%	BPKAD
4	5.02.01.2.06.04		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	3 Paket	65,640,000	2 Paket	85,616,240		2,250,000	0		0	2,250,000	9 Paket	67,890,000		274.56%	BPKAD

No.	Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Ke giatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Pergeseran 1 Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III dan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	5.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	399,300,000	2 paket	278,329,500	1 Paket	285,718,373	1 Paket		1.00	658,000	2 Paket	658,000	3 paket	278,987,500		69.87 %	BPKAD
6	5.02.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	226,270,000	6 Paket	92,943,241	1 Paket	87,331,126			0		0	-	1 Paket	92,943,241		41.08 %	BPKAD
7	5.02.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	65,884,000	12 Dokumen	31,222,500	3 Dokumen	37,400,000	3 Dokumen	5,761,000	3	4,753,000	6	10,514,000	15 Dokumen	41,736,500		63.35 %	BPKAD
8	5.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	764,800,000	12 Dokumen	2,475,478,491	12 Laporan	1,153,510,000	3 Laporan	394,745,657	3	239,164,999	6 Laporan	633,910,656	15 Dokumen	3,109,389,147		408.58 %	BPKAD
9	5.02.01.2.06.09		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	492,482,500	1 Dokumen	648,680,078	0	203,920,000	1	194,225,580	1	398,145,580	1 Dokumen	890,628,080		3562.51%	BPKAD
	5.02.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah**	**100 %**	**269,615,000**	**100 %**	**213,700,000**	**100 %**	**195,425,265**	**0%**		**33 %**		**33%**	**-**	**100 %**	**213,700,000**		**79.26 %**	
10			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	23,000,000	-	-	1 unit	31,562,000	0		-		-	-	0 Unit	-		0.00 %	BPKAD
11	5.02.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Unit	219,615,000	9 unit	37,300,000	33 unit	112,646,093	0		33		33	-	42 unit	37,300,000		16.98 %	BPKAD

22	5.02.01.2.07.05		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25,000,000	24 Unit	176,400,000	1 unit	13,627,008	0		0		-	-	24 Unit	176,400,000		705.60 %	BPKAD
23	5.02.01.2.07.05		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25,000,000		-	1 unit	37,390,164	-		-		0	-	1 unit	-		0.00%	BPKAD
	5.02.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran**	**100 %**	**3,016,711,500**	**100%**	**3,117,824,751**	**100 %**	**3,380,548,800**	**25 %**	**744,324,598**	**25 %**	**470,776,619**	**25 %**	**1,215,101,217**	**100 %**	**4,332,925,968**		**14.63 %**	
24	5.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	21,961,500	12 Dokumen	15,000,000	1 Laporan	13,130,000	3 Laporan	5,440,000	3 Laporan		6 Laporan	3,440,000	18 laporan	20,440,000		93.07 %	BPKAD

No.	Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Ke giatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Pergeseran 1 Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III dan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
											I		II									
1	2	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
25	5.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	598,950,000	12 Dokumen	487,500,549	12 Laporan	930,000,000	3 Laporan	84,927,385	3 Laporan	82,494,550	6 Laporan	167,421,935	18 laporan	654,922,484		109.35%	BPKAD
26	5.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,395,800,000	12 Dokumen	2,615,324,202	12 Laporan	2,437,416,800	3 Laporan	653,957,213	3 Laporan	388,282,069	6 Laporan	1,042,239,282	18 laporan	3,657,563,484		152.67%	BPKAD
	5.02.01.2.09		**Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**1,382,620,000**	**100%**	**100%**	**100%**	**1,604,285,116**	**25%**	**175,818,383**	**25%**	**281,781,136**	**50%**	**457,599,519**	**100%**	**457,599,520**		33.10%	
27	5.02.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	945,010,000	1 Unit	74,832,090	1 Unit	124,385,474	1 Unit	8,022,300	1	7,870,500	1	15,893,000	Unit	90,725,090		9.60%	BPKAD
28	5.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	25,000,000	43 Unit	598,530,001	43 Unit	884,703,710	39 Unit	73,263,000	39	77,844,050	39	151,107,050	43 Unit	749,638,251		2998.55%	BPKAD
29	5.02.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	146,410,000	157 unit	98,462,550	144 Unit	190,481,932	10 Unit	1,731,480	12	679,320	22	2,430,800	167 unit	100,893,350		68.91%	BPKAD
30	5.02.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	266,200,000	3 Unit	538,369,233	3 Unit	404,714,000	1 Unit	92,780,803		195,387,266	1	288,168,069	4 Unit	826,537,302		310.49%	BPKAD

No.	Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Ke giatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Pergeseran 1 Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III dan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
											I		II									
1	2	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	5.02.02	Tercapainya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Tingkat Kesesuaian Tahapan Penyusunan APBD 2. Jumlah Perangkat Daerah yang menyajikan Laporan Keuangan dengan Baik	100 % 31 OPD	6,522,339,973	25% 31 OPD	10,641,281,311	100 % 31 OPD	11,385,781,083	25% 31 OPD	689,789,586	25% 31	424,045,759	100 % 31 OPD	1,113,835,145	0% 31 OPD		0% 31 OPD	100 % 31 OPD		
	5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen penyusunan APBD yang tepat waktu	10 Dokumen	2,054,575,000	10 dok	4,945,717,956	10 Dokume n	2,867,406,592	0%	309,715,821	0%	155,754,938	0%	465,470,759	10 dok	5,411,188,715		20.37 %		
31	5.02.02.2.01.01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	214,257,755	2 Dokumen	106,989,808	-	7,072,080		13,220,500	0	20,292,580	4 Dokumen	234,550,335		117.28 %	BPKAD	
32	5.02.02.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	4 Dokumen	312,000,000	4 Dokumen	297,508,778	2 Dokumen	104,750,808	-			-	0	-	4 Dokumen	297,508,778		95.36 %	BPKAD	
33			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	68,575,000	31 Dokumen	56,656,000	31 Dokumen	80,884,448	-				0	-	31 Dokumen	56,656,000		0.00 %	BPKAD	
34	5.02.02.2.01.04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	140,000,000	31 Dokumen	56,665,000	31 Dokumen	80,884,448	-		31		31	-	31 Dokumen	56,665,000		40.48 %	BPKAD	
35	5.02.02.2.01.06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	116,000,000	31 Dokumen	56,250,000	31 Dokumen	116,364,448	-				0	-	31 Dokumen	56,250,000		48.49 %	BPKAD	

36	5.02.02.2.01.07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	282,000,000	2 Dokumen	2,037,871,472	2 Dokumen	1,053,978,374	[illegible]	173,036,800		65,605,168	0	238,641,968	2 Dokumen	2,276,513,440		66.27%	BPKAD
37	5.02.02.2.01.08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	285,000,000	2 Dokumen	862,295,307	2 Dokumen	632,655,374	0%	86,207,694		54,878,970	0	141,086,664	2 Dokumen	1,003,381,971		53.06%	BPKAD
38	5.02.02.2.01.09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	240,000,000	2 Dokumen	119,492,008	2 Dokumen	64,020,000	0	27,623,047	1	11,282,700	1	38,905,747	2 Dokumen	158,397,755		66.00%	BPKAD
39	5.02.02.2.01.10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	205,000,000	2 dokumen	108,511,740	2 Dokumen	250,280,932	0	15,776,200	0	10,767,600	0	26,543,800	2 dokumen	135,055,540		64.08%	BPKAD

No.	Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Ke giatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Pergeseran 1 Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III dan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
40	5.02.02.2.01.11		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	160,000,000	2 dokumen	120,453,697	2 Dokumen	22,205,380	0		0		0	-	2 dokumen	120,453,697		75.28%	BPKAD
41	5.02.02.2.01.11		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	23,000,000	1 Dokumen	14,942,400	1 Dokumen	3,488,952	0		0		0	-	1 Dokumen	14,942,400		64.97%	BPKAD
42	5.02.02.2.01.11		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	23,000,000	220 orang	1,000,813,799	30 Orang	340,137,000	0		0		0	-	220 orang	1,000,813,799		434.79%	BPKAD
	5.02.02.2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan Penatausahaan Keuangan**	**31 OPD**	**876,139,973**	**31 OPD**	**952,102,761**	**31 OPD**	**494,901,370**	**31 OPD**	**115,039,102**	**31**	**8,131,725**	**31**	**123,170,827**	**31 OPD**	**1,075,273,588**		**122.73%**	
43	5.02.02.2.02.01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	66,000,000	12 Dokumen	99,868,023	12 Dokumen	49,801,000	3 Dokumen	7,479,450	1	8,131,725	4	15,611,175	15 Dokumen	115,479,198		174.97%	BPKAD
44	5.02.02.2.02.03		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	124 Dokumen	365,705,973	120 Dokumen	255,590,000	120 Dokumen	10,525,370	60 Dokumen		0		60 Dokumen	-	180 Dokumen	255,590,000		69.89%	BPKAD
45			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	23,000,000	1 Dokumen	21,000,000	1 Dokumen	7,500,000					0	-	1 Dokumen	21,000,000		91.30%	BPKAD
46	5.02.02.2.02.05		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan DanaTransfer Lainnya	4 Dokumen	37,553,000	4 Dokumen	59,090,880	4 Dokumen	113,712,000	1 Dokumen	40,536,925	0		1 Dokumen	40,536,925	5 Dokumen	99,627,805		265.30%	BPKAD

47	5.02.02.2.02.05		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	23,000,000	1 Dokumen	109,237,566	1 Dokumen	49,841,000	0	46,367,395	0		-	46,367,395	1 Dokumen	155,624,961		67.66%	BPKAD
48	5.02.02.2.02.08		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	10,881,000	1 Dokumen	11,171,600	1 Dokumen	10,050,000					0	-	1 Dokumen	11,171,600		102.67%	BPKAD

No.	Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Ke giatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Pergeseran 1 Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III dan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
49	5.02.02.2.02.09		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	51 Dokumen	330,000,000	50 Dokumen	396,124,692	50 Dokumen	253,472,000	50 Dokumen	20,655,332	0		50 Dokumen	20,655,332	50 Dokumen	416,780,024		118.08 %	BPKAD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Jumlah OPD yang menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar**	**31 OPD**	**1,218,625,000**	**31 OPD**	**2,207,699,017**	**31 OPD**	**1,367,914,533**	**31 OPD**	**121,210,881**	**31**	**123,548,986**	**31**	**244,759,867**	**31 OPD**	**2,452,458,884**		**204.25 %**	
50	5.02.02.2.03.02		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Daerah	1 Laporan	23,000,000	1 Laporan	24,759,800	3 Laporan	22,577,000	0	3,402,400	0		0	3,402,400	1 Laporan	28,162,200		122.44 %	BPKAD
51	5.02.02.2.03.02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	215,000,000	1 Dokumen	305,744,845	1 Dokumen	300,284,240	0	16,880,400	0	22,992,966	0	33,073,366	1 Dokumen	339,418,211		113.07 %	BPKAD
52	5.02.02.2.03.03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban P elaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	90,000,000	1 Laporan	150,708,793	1 Laporan	127,328,780	0	0	0		0	-	1 Dokumen	150,708,793		167.45 %	BPKAD
53	5.02.02.2.03.04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Laporan	23,000,000	1 Laporan	205,631,300	1 Laporan	26,323,388	1 Laporan	0	0	12,732,600	1	12,732,800	2 Laporan	218,363,900		949.41 %	BPKAD

54	5.02.02.2.03.05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	123,000,000	1 Dokumen	126,818,600	1 Dokumen	162,839,800	0	0	0	11,631,400	0	11,631,400	1 Dokumen	138,450,000		110.78%	BPKAD
55	5.02.02.2.03.06		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	212,000,000	1 Dokumen	463,708,713	1 Dokumen	268,720,000	1 Dokumen	98,034,813	1	76,192,020	0	174,820,833	2 Dokumen	638,535,348		301.20%	BPKAD

No.	Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Ke giatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Pergeseran 1 Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III dan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
56			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 dokumen	25,000,000	1 Dokumen	7,685,000	1 Dokumen	7,095,000	0	-	0		0	-	1 Dokumen	7,685,000		30.74%	BPKAD
57	5.02.02.2.03.08		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 dokumen	47,965,000	4 Dokumen	106,859,998	3 Dokumen	31,532,000	0	8,493,466	0		0	8,493,466	4 Dokumen	114,553,464		238.85%	BPKAD
58	5.02.02.2.03.10		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	76,765,000	1 Dokumen	84,411,360	1 Dokumen	33,894,000	0	0	0		0	-	1 Dokumen	84,411,360		110.00%	BPKAD
59	5.02.02.2.03.11		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	12,895,000	3 Dokumen	127,204,368	1 Dokumen	17,542,000	0	-	0		0	-	3 Dokumen	127,204,368		986.46%	BPKAD
60	5.02.02.2.03.11		Pembinaan Akuntansi,Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	330,000,000	150 orang	591,252,740	70 Orang	310,724,000	0	0	0		0	-	150 orang	591,252,740		179.17%	BPKAD
61	5.02.02.2.03.11		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	25,000,000	1 lembaga	5,017,500	1 Lembaga	4,938,000	0	-	0		0	-	1 lembaga	5,017,500		21.82%	BPKAD
62	5.02.02.2.03.11		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Laporan	25,000,000	2 Laporan	8,716,000	2 Laporan	13,098,085	0	-	0		0	-	2 Laporan	8,716,000		37.90%	BPKAD
	5.02.02.2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan**	**3 Kegiatan**	**2,104,000,000**	3 Laporan	**663,254,835**	**3 Kegiatan**	**6,570,327,000**	1 Laporan	**129,000,000**	1	**136,610,110**		265,610,110	3 Laporan	**928,864,945**		44.13%	

				daerah																
63			Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	23,000,000	1 Laporan	**61,356,777**	1 Laporan	70,327,000	0		0	10,610,110	0	10,610,110	1 Laporan				BPKAD
64	5.02.02.2.04.09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak	4 Laporan	2,104,000,000	4 Laporan	601,898,058	1 Laporan	6,500,000,000	1 Laporan	129,000,000	1	126,000,000	2	255,000,000	4 Laporan	856,898,058		40.73%	BPKAD
	5.02.02.2.04		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**3 Dokumen**	**69,000,000**	3 dokumen	**1,872,506,742**	**3 Dokumen**	**85,231,600**	**0**	**14,823,582**	1	**-**	0%	**14,823,582**	3 dokumen	**1,887,330,324**		2735.26%	

No.	Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Ke giatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Pergeseran 1 Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III dan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
65	5.02.02.2.04.09		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	23,000,000	2 dokumen	633,075,066	1 Dokumen	3,356,000			0		0	-	2 dokumen	666		200.0%	BPKAD
66	5.02.02.2.04.09		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	23,000,000	1 Dokumen	279,039,199	1 Dokumen	22,904,000		14,823,582	1		1	14,823,582	1 Dokumen	294,482,781		1280.36%	BPKAD
67	5.02.02.2.04.09		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 Orang	23,000,000	10 orang	959,772,477	31 Orang	38,711,000	-		0		-	-	10 orang	959,772,477		4172.92%	BPKAD
	5.02.03	**Tercapainya Kriteria Indeks Pengelolaan Aset Katagori Cukup**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di neraca Pemerintah Kota**	**100 %**	**2,545,744,020**	**100 %**	**3,985,265,346**	**100 %**	**2,038,963,600**	**25%**	**173,628,967**	**25 %**	**147,007,500**	**50 %**	**320,636,467**	**100 %**	**4,305,901,813**	**100 %**	**100%**	
	5.02.03.2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Tertib administrasi pengelolaan BMD baik pada lingkup pengguna barang maupun pengelola barang**	**31 OPD**	**2,545,744,020**	**31 OPD**	**3,985,265,346**	**31 OPD**	**2,038,963,600**	**31 OPD**	**173,628,967**	**31 OPD**	**147,007,500**	**31 OPD**	**320,636,467**	**31 OPD**	**4,305,901,813**		169.14 %	
68	5.02.03.2.01.01		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	1 Dokumen	333,000,000	1 Dokumen	691,826,118	2 Dokumen	333,831,400		29,905,062	0	11,344,400	0	41,249,462	1 Dokumen	733,075,578		218.83 %	BPKAD
69	5.02.03.2.01.04		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang MilikDaerah	2 Dokumen	240,000,000	2 Dokumen	110,388,000	1 Dokumen	60,438,400		6,813,700	0		0	6,813,700	2 Dokumen	117,203,700		48.83%	BPKAD

70	5.02.03.2.01.05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	240,000,000	1 Dokumen	320,275,704	1 Laporan	230,427,600	1 Laporan	22,513,884	1	20,112,000	2 Laporan	42,627,884	4 Laporan	562,901,588		234.54%	BPKAD
71	5.02.03.2.01.07		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	290,000,000	4 Laporan	337,098,030	4 Laporan	210,021,000	1 Laporan	14,160,100	1	16,444,300	2 Laporan	30,624,400	5 Laporan	587,722,430		202.66%	BPKAD
72	5.02.03.2.01.08		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	223,000,000	1 laporan	328,723,212	2 Laporan	92,085,000	0	29,998,789	0	15,189,200	0	45,187,989	1 laporan	373,911,201		167.67%	BPKAD

No.	Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Pergeseran 1 Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III dan IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
											I		II								
1	2	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
73	5.02.03.2.01.09		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	162.000.000	2 Laporan	46.659.694	1 Laporan	28.407.000	0		0		0	-	2 Laporan	46.659.694		28,80%	BPKAD
74	5.02.03.2.01.10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang MilikDaerah	5 Dokumen	565.000.000	2 dokumen	428.702.629	3 Dokumen	266.213.000	1 Dokumen	59.634.232	0	39.489.400	1 Dokumen	99.123.632	3 dokumen	527.826.261		93,42%	BPKAD
75	5.02.03.2.01.11		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	31 Laporan	237.000.000	31 Laporan	336.625.569	31 Laporan	401.018.200	31 Laporan	10.579.200	31	44.428.200	31 Laporan	55.007.400	31 Laporan	391.632.969		165,25%	BPKAD
76	5.02.03.2.01.13		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	253.744.020	175 Orang	964.968.392	140 Orang	374.722.000	0		0		0	-	175 Orang	964.968.392		380,29%	BPKAD
											-										
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program		**24.162.006.390**		**30.466.191.151**		**33.677.730.875**		**4.945.453.648**		**4.542.662.333**		**9.488.115.981**					
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program Tanpa Belanja Tidak Terduga (BTT)						**27.177.730.875**		**4.816.453.648**		**4.416.662.333**		**9.233.116.981**					
										Rata-rata capaian kinerja (%)											
										Predikat Kinerja											

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya*) :

*) Diisi oleh Kepala BAPPERIDA

Bontang, 9 Juli 2025

Kepala Badan,

Sony Sawito Adicahyono,SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197004191998031005

1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	14.000.000	3 Dokumen	14.010.000	2 Dokumen	6.877.950	0		25					75	-	3 Dokumen	14.010.000		100,07%	BPKAD
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	11.979.000	4 Laporan	8.180.000	2 Laporan	9.797.080			0					50	-	4 Laporan	8.180.000		68,12%	BPKAD

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang digunakan Standar Pelayanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dapat dilihat pada table T-C.30 dibawah ini :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1	Proses Penyusunan Dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	
1.2	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	keuangan perangkat daerah												
1.3	Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	
1.4	Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	-	-	98 0rang	98 0rang	98 0rang	98 0rang	171 Orang	98 0rang	100%	98 0rang	98 0rang	
1.5	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	-	-	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	40 Paket, 3 Dokumen, 257 Laporan	8 Layanan	100%	8 Layanan	8 Layanan	
1.6	Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah	-	-	55 Unit	55 Unit	55 Unit	55 Unit	11 Unit	55 Unit	100%	55 Unit	55 Unit	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.7	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	-	-	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100%	36 Laporan	36 Laporan	
1.8	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-	-	55 Unit	55 Unit	55 Unit	55 Unit	107 Unit	55 Unit	100%	55 Unit	55 Unit	
2	1.Tingkat Kesesuaian Tahapan Penyusunan APBD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.Jumlah Perangkat Daerah yang menyajikan Laporan Keuangan dengan Baik	-	-	31 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	31 OPD	30 OPD	30 OPD	31 OPD	31 OPD	
2.1	Jumlah Dokumen penyusunan	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	15 Dokumen, 31 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	APBD yang tepat waktu												
2.2	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan Penatausahaan Keuangan	-	-	31 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	31 OPD	30 OPD	30 OPD	31 OPD	31 OPD	
2.3	Jumlah OPD yang menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	-	31 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	31 OPD	30 OPD	30 OPD	31 OPD	31 OPD	
2.4	Jumlah kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	-	-	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	2 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
2.5	Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah												
3	Kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di neraca Pemerintah Kota	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.1	Tertib administrasi pengelolaan BMD baik pada lingkup pengguna barang maupun pengelola barang	-	-	31 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	31 OPD	30 OPD	30 OPD	31 OPD	31 OPD	

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPKAD

Untuk menetapkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang, langkah pertama yang dilakukan dengan memetakan interaksi antara faktor lingkungan internal dengan lingkungan eksternal melalui proses memadukan faktor-faktor internal dengan faktor-faktor eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Dalam kaitan dengan penentuan isu-isu strategis tersebut, maka langkah-langkah yang akan ditempuh adalah dengan melakukan :

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Adanya dinamika dalam perencanaan membutuhkan penyesuaian dalam tahapan penyusunan APBD	Perencana SKPD membutuhkan waktu dalam menyesuaikan dinamika kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah	Selalu ada perubahan dalam penyusunan APBD menyesuaikan kondisi terkini

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD belum tepat waktu	Entitas Akuntansi/SKPD belum menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Penyusun Laporan Keuangan SKPD kurang memahami pedoman penyusunan laporan keuangan
3	Penyusunan Laporan BMD SKPD belum tepat waktu	SKPD belum tertib dalam melaksanakan rekonsiliasi	Penyusun Laporan BMD belum memahami tata cara penyusunan laporan sesuai ketentuan yang berlaku

2. TELAHAAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Bontang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2025-2029.

Visi Kota Bontang :
"*Terwujudnya Kota Bontang Sebagai Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera dan berkelanjutan, sebagai Daerah Mitra IKN*."
maka ditetapkan misi pembangunan Kota Bontang 2025-2029 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Dinamis dan inklusif

Misi 3 :Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel.

Misi 4 : Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan.

Misi 5 : Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada pernyataan Misi ke 3 Kota Bontang : Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel

Pada misi ketiga ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam pengelolaan keuangan yaitu Terciptanya Pengelolaan Keuangan yang berkualitas dan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga diharapkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah bisa dipertahankan WTP (wajar tanpa pengecualian).

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH;

2.PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;

3.PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Visi Kementerian Keuangan

Menjadikan Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Misi Kementerian Keuangan

- Menerapkan kebijakan fiscal yang responsif dan berkelanjutan.
- Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
- Memastikan belanja negara yang berkeadilan,efektif,efisien,dan produktif
- Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
- Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

3. 2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan perencanaan program,kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025, maka Renja ini dengan maksud sebagai berikut :

- Tersedianya perumusan kebijakan teknis lingkup bidang Pengelolaan Keuangan
- Terwujudnya pengkoordinasian, pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja dinas dan hubungan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak lain.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025, sama dengan tujuan disusunnya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang 2021-2026,yaitu berpedoman pada faktor-faktor kunci keberhasilan serta melihat keterkaitan dan implementasi dengan misi yang ada, maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang menetapkan tujuan sebagai berikut :

"Meningkatnya Penyelenggar aan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel Dan Partisipasif dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah."

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Aset Daerah.

BPKAD Kota Bontang untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta meningkatkan pengelolaan manajemen aset daerah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan pada aspek kesejahteraan, layanan publik dan peningkatan daya saing daerah.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang "**Terwujudnya Kota Bontang Sebagai Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera dan berkelanjutan,**

sebagai Daerah Mitra IKN". maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang menetapkan Tujuan dan Sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka BPKAD Kota Bontang Tujuan dan S*asaran* dalam periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Penyelenggar aan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel Dan Partisipasif dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Meningkatnya Pengelolaan Aset .

Meningkatnya Penyelenggar aan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel Dan Partisipasif dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
Opini BPK
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Pengelolaan Aset
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Katagori Baik
Indeks Pengelolaan Aset Katagori Baik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang menyajikan Laporan Keuangan dengan baik dan Kesesuaian Tahapan Penyusunan APBD yang tepat
Persentase Kesesuaian data Rincian BMD dengan aktiva tetap di Neraca
Seketariat
Anggaran;
Perbendaharaan dan Akutansi
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Target Indikator Kinerja Utama Perubahan/S*asaran* Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satua n	BaseLine Capaian 2024	Target Kinerja pada tahun		Realisasi	Proyeksi	
					2024	2025	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatn ya Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaa n Keuangan Daerah Kategori Baik	Indeks	72,59	65	73	72,59	73	74

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satua n	BaseLine Capaian 2024	Target Kinerja pada tahun		Realisasi	Proyeksi	
					2024	2025	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Meningkatnya Pengelolaan Aset	Indeks Pengelolaan Aset Kategori Baik	Indeks	1,85	1,5	1,85	1,85	1,85	1,85

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

Anggaran Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang sebesar **Rp . 33.959.073.683,00** dengan **3 (Tiga) Program**, **14 (Empat Belas) kegiatan** dan **72 (tujuh puluh dua)** Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang Tahun 2025 terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

        1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

        2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

        3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

        1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

        2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

        3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

        4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Mebel

3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

8. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

12. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah

4. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

5. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

6. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

7. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

6. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

7. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

8. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

9. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

10. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

11. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah

2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

1. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah

2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Penyusunan Standar Harga

2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah

4. Pengamanan Barang Milik Daerah.

5. Penilaian Barang Milik Daerah.

6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD

7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

8. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

9. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sesuai dengan dimensi waktu perencanaan yang terlampir pada tabel T-C.33 Rencana Program Kegiatan RKPD-P Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang Tahun 2025.Rencana Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut dibawah ini :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Perubahan Program dan kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							33.333.661.662,00	29.692.967.439,00	32.969.072.833,00	160.622.026,00							39.322.111.024,00	
	6	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							33.333.661.662,00	29.692.967.439,00	32.969.072.833,00	160.622.026,00							39.322.111.024,00	
	6.02	KEUANGAN							33.333.661.662,00	29.692.967.439,00	32.969.072.833,00	160.622.026,00							39.322.111.024,00	
1	6.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	19.604.033.878,00	21.901.204.339,00	20.609.376.709,00	2.242.461.806,00							21.742.426.251,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan Tahapan dan waktu*				100 Persen	100 Persen	16.067.641.00	16.079.641.00	11.741.112.00	-4.326.529.00			-	Peningkatan peny elenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan peny elenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD		22.917.398.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.355.331.00	5.359.331.00	3.913.764.00	-1.441.176.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan peny elenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan peny elenggaraan tata kelola pemerintahan			6.577.958.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.355.331.00	5.359.331.00	3.913.764.00	-1.441.176.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan peny elenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan peny elenggaraan tata kelola pemerintahan			9.797.898.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.355.331.00	5.359.331.00	3.913.764.00	-1.441.176.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan peny elenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan peny elenggaraan tata kelola pemerintahan			6.242.368.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Penyerahan Administrasi dan laporan keuangan perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	10.530.221.277.00	11.253.445.543.00	11.252.347.453.00	721.525.577.00			-	Peningkatan peny elenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan peny elenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD		10.997.151.052.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	49 Orang/bulan	10.469.752.948.00	11.027.932.612.00	11.093.615.040.00	623.856.105.00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Peningkatan peny elenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan peny elenggaraan tata kelola pemerintahan			10.364.729.402.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.202.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				48 Dokumen	2Dokumen	50.020.000,00	154.45 6.000,00	150.905.000,00	100.885.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			72 1.374.500,00	BIDAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.202.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Aset Rekapitulasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.355.220,00	5.35 9.830,00	3.913.704,00	-1.44 2.17 6,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			5.358.975,00	BIDAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.202.0012	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.697.05 6,00	5.691.056,00	3.913.704,00	-1.77 3.35 2,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			5.192.175,00	BIDAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Fungsi pengurusan Administrasi dan Laporan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	3.311.760,00	11.25 3.760,00	30.96 6.420,00	5.784.720,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD		3.177.950,00	BIDAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.203.0006	Pendatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.311.760,00	11.25 3.760,00	30.96 6.420,00	5.784.720,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			3.177.950,00	BIDAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Fungsi Pemenuhan Administrasi Kepegawaian				100 Persen	100 Persen	1.000.657.40 2,00	1.746. 926.277,00	738.2 92.220,00	-261. 395.17 2,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD		2154. 2F 3753,00	BIDAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.205.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2Paket	2Paket	115.754.40 2,00	622. 2F 9.277,00	567.292.220,00	451.537.222,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			251.511.753,00	BIDAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.205.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				90 Orang	10 Orang	772 912.000,00	1.114.420.000,00	171.500.000,00	-607.41 2.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			1.625.022.000,00	BIDAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.205.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	0 Orang	10 6.015.000,00	3.567.000,00	0,00	-10 6.015.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			217. 620.000,00	BIDAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengendalian dan pelaksanaan yang mendukung kelancaran Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	2.69 2F 5.3 1.251,00	3.670.799.301,00	3.092.42 5.3 5 2,00	4 87 291.301,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD		37 91.44 3 0 2 6,00	BIDAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.0.2.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.751.235,00	90.751.235,00	69.549.787,00	-21.201.448,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan Semua 4/D desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan			90.751.235,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.2.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	462.477.907,00	813.777.361,00	692.902.641,00	230.423.621,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua 4/D desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan			443.601.309,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.2.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.611.4.240,00	26.182.440,00	15.016.340,00	5.950.2.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua 4/D desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan			99.904.592,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.2.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	227.721.3.9,00	2.55.71.2.72,00	2.55.71.2.72,00	-2.002.020,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua 4/D desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan			2.96.72.9.23,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.2.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	105.405.5.900,00	107.11.674,00	97.331.112,00	-1.2104.7.0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua 4/D desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan			1.52.550.332,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.2.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																					
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua 4/D desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan			34.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.2.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.450.722.000,00	1.553.707.000,00	1.1 15.0.25.000,00	-345.697.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua 4/D desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan			2.2.5.77.6.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.2.01.2.06.0010	Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD																					
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	161.907.550,00	696.13.914,00	648.220.07.,00	486.9.2.522,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua 4/D desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan			3.95.157.483,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.2.01.2.07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	166.670.2.450,00	1.9.2.66.3.97,00	1.6.3.6.2.6.5,00	-2.2.9.1.5,00			-	Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD		2.54.027.6.0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.2.01.2.07.0001	Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	3.9.37.000,00	31.562.000,00	0,00	-3.9.37.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua 4/D desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan ibadah kelola pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.0.201.207.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Diadakan				12 Unit	12 Unit	965.241.773,00	113.487.773,00	112.946.695,00	1.632.811.322,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi			39.457.937,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.201.207.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				2 Unit	2 Unit	13.627.000,00	13.627.000,00	13.627.000,00	0,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi			263.697.953,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.201.207.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan				1 Unit	1 Unit	16.673.671,00	32.529.671,00	37.379.164,00	20.71 64 93,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.201.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa Layanan umum perkantoran				100 Persen	100 Persen	2.751 9340.000,00	3400.542 800,00	3 380.542 800,00	671. 302.200,00			-	Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD		30 69.505.304,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.201.208.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.050.000,00	13.130.000,00	123 30.000,00	2110.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi			36.13 6.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.201.208.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadakan				12 Laporan	12 Laporan	526.000.000,00	930.000.000,00	930.000.000,00	404.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi			500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.201.208.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan				12 Laporan	12 Laporan	2. 222.350.000,00	2457.41 8.350,00	2457.41 8.350,00	20 90 92.200,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi			25 52. 669.304,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.201.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan Barang milik daerah dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	1.426 570.570,00	1. 664. 225.11 6,00	1. 260.5 63.11 6,00	433 9925 26,00			-	Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi	Seluruh ASN dan TKD di BPKAD		1.452. 784.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.201.209.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	121. 672 170,00	1 91. 325.474,00	1 91. 325.474,00	2713.304,00	Semua Kolektib. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi			37. 320.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.0.201.209.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	39 Unit	875.5 26.926,00	838.70 3.270,00	838.703.270,00	911 6.7 81,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi Peningkatan pengelolaan data dan teknologi informasi			836. 780.444,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.01.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				144 Unit	144 Unit	115.970.000,00	190.481.152,00	1.190.481.152,00	74.511.152,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan			124.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	313.341.494,00	404.714.000,00	660.992.000,00	347.650.506,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan			404.062.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Antara Penyusunan APBD Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik				100 % 3 Tersedia GPU	100 % 3 Tersedia GPU	72.925.524.943,00	74.845.292.347,00	77.345.734.347,00	2.500.442.000,00							74.742.703.184,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan APBD yang Tepat Waktu				10 Dokumen	10 Dokumen	3.425.036.621,00	4.650.655.222,00	2.867.490.655,00	-555.675.627,00			-	Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan	Organisasi Perangkat Daerah		4.227.975.457,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																				
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	2 Dokumen	287.215.000,00	217.655.777,00	106.735.920,00	-180.919.857,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan			340.717.285,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																				
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	2 Dokumen	326.329.000,00	200.206.677,00	104.758.892,00	-215.570.785,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan			362.168.285,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																				
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	65.575.000,00	97.111.653,00	201.864.445,00	12.289.445,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan			68.320.653,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																				
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	96.435.000,00	97.111.653,00	201.864.445,00	-15.624.552,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan			96.255.797,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																				
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	107.157.000,00	123.456.653,00	118.564.445,00	11.407.445,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan			91.875.399,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																				
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.045.530.000,00	1.555.220.934,00	1.055.197.657,00	7.446.574,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan			1.454.243.062,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																				
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	465.220.000,00	920.264.345,00	620.455.574,00	169.435.574,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	-	Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan Peningkatan pemanfaatan teknologi pemanfaatan			652.324.470,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.01.01.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	3 Dokumen	1.77.33.9.000,00	130.3.89.000,00	64.83.8.000,00	-113.3.85.000,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan			198.349.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.01.01.2.01.0010	Koordinasi Penatausahaan Anggaran Pendapatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penatausahaan Anggaran Pendapatan				3 Dokumen	3 Dokumen	480.197.000,00	477.870.724,00	35.8.38.8.153,00	-333.910.045,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan			91.510.3.75,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.01.01.2.01.0011	Koordinasi Penatausahaan Anggaran Belanja Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penatausahaan Anggaran Belanja Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	35.093.3.19,00	33.3.85.520,00	33.3.85.520,00	-3.259.63.5,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan			95.71.6.730,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.01.01.2.01.0013	Koordinasi Penatausahaan Pembiayaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penatausahaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.908.2.000,00	34.5.71.724,00	3.45.6.153,00	-35.5.51.045,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan			3.9.82.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.01.01.2.01.0015	Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	50 Orang	3.19.33.8.000,00	7.19.13.30.000,00	348.13.7.000,00	30.2.01.2.000,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	-	Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan			47.8.385.2.43,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.01.01.2.01	Koordinasi dan Pengelolaan Pelaksanaan Pembendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pembendaharaan Keuangan				31 OPD	31 OPD	3.9.143.355,00	3.70.455.3.0,00	494.101.3.70,00	-461.3.40.535,00			-	Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		1.01.8.799.854,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	88.334.000,00	88.3.85.000,00	4.9.201.000,00	-19.3.33.000,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan			82.055.835,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				120 Dokumen	130 Dokumen	41.05.4.551,00	11.5.77.3.0,00	18.53.5.3.0,00	-30.53.9.3.1,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan			3.93.359.3.3,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Pendataan/Inventarisasi Pembiayaan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan			3.45.9.2.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Simkonteks, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Simkonteks, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	3.10.123.000,00	3.44.0.33.000,00	11.5.71.3.000,00	-145.4.70.000,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	-	Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan			77.1.67.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.764,00	98.93.9.000,00	49.841.000,00	-45.3.5.9.764,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan Peningkatan pemahaman laporan keuangan pemerintahan			10.9.8.9.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.07.02.2.03.0002	Koordinasi Pelaksanaan Pinjaman dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penerimaan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pinjaman dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penerimaan Utang Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	33.456.000,00	33.456.000,00	10.050.000,00	-23.406.000,00	Kota Seminang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			71.852.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Perhitungan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Perhitungan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				50 Dokumen	50 Dokumen	397.415.000,00	397.401.000,00	255.472.000,00	-132.943.000,00	Kota Seminang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			412.509.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar				31 OPD	31 OPD	1.640.513.229.900	1.981.597.009.900	1.367.905.612,00	-272.664.617,00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah			2.042.720.536,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				5 Laporan	5 Laporan	76.000.000,00	33.252.000,00	22.577.000,00	-3.425.000,00	Kota Seminang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			36.707.276,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Asset Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Asset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	1 Dokumen	250.335.000,00	347.655.000,00	300.734.240,00	49.945.240,00	Kota Seminang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			346.869.164,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	96.524.960,00	143.920.700,00	127.328.720,00	-30.203.540,00	Kota Seminang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			175.172.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, SLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, SLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	42.627.424,00	46.524.424,00	76.525.565,00	-16.203.326,00	Kota Seminang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			49.301.055,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	175.454.200,00	175.454.200,00	162.533.960,00	-12.614.940,00	Kota Seminang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			126.275.920,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	361.962.000,00	35.907.000,00	265.720.000,00	-95.242.000,00	Kota Seminang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			365.372.972,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	13.000.000,00	17.994.000,00	0,00	-13.000.000,00	Kota Seminang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			13.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.09.09.3.05.0002	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				3 Dokumen	3 Dokumen	184.474.188.00	73.33 6.000.00	31.333.000.00	-33. 947.333.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			14 91 37.74 k.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.09.09.3.05.0009	Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Teknis Operasional Pengawasan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Pembinaan Teknis Operasional Pengawasan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	70.7 15.000.00	73.33 k.000.00	73.37 6.134.00	4.614.1 34.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			91.951.093.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.09.09.3.05.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	13 2 15.000.00	19 33.3.000.00	17.343.000.00	4.447.000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			1 43 18.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.09.09.3.05.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	488.433.000.00	833. 81 3.000.00	310.73 4.000.00	-1 33. 699.000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			3 493.3 17.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.09.09.3.05.0013	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah SKPD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	3.000.000.00	4.433.000.00	4.433.000.00	-43.000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			3.433.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.09.09.3.05.0015	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				3 Laporan	0 Laporan	13.1 01.3 7 7.00	13.0 9 k.000.00	0.00	-13.101.3 7 7.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			7 7.9 4k.3 4 9.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.09.09.3.04	Penanganan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan penanganan urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah				5 Kegiatan	3 Kegiatan	k.103.033.000.00	k.3 49 33 4.450.00	k.3 15.33 k.300.00	-37.7 05.2.00.00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		k.3 1 3.97 2. k.2.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.09.09.3.04.0003	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	133.033.000.00	1 49 33 4.450.00	70.33 7.000.00	-33. 7 32.2 00.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			3 1 3.97 2. k.2.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.09.09.3.04.0004	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				4 Laporan	4 Laporan	k.300.000.000.00	k.3.00.000.000.00	k.2.3 14. 15 6.3 00.00	3 4. 15 6.3 00.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			k.300.000.000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.09.09.3.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	340.1 37.3 4 0.00	4 33.0 7. k.00.00	33.3 3 1. k.00.00	-3 33. 4 0 k.3 4 0.00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		k.1.4 3 9.1 5 9.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.09.09.3.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Sistem Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Sistem Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	87.1 33.000.00	87.1 3 3.000.00	3.33 k.000.00	-84.033.000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kab/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			3 3.933.1 00.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.07.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																				
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1 49 999 540.00	45 591 000.00	77 964 000.00	-127 025 540.00	Kota Sentang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			225 761 059.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.02.2.05.0005	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				31 Orang	31 Orang	175 000 000.00	340 815 600.00	55 711 400.00	-64 226 400.00	Kota Sentang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			331 715 000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5.07.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Data Inventaris BMD dengan Akurasi yang di Harapkan Pemerintah Kota				100 Persen	100 Persen	2 378 305 439.00	3 237 749 200.00	2 058 963 400.00	437 328 639.00									2 870 322 000.00	
	5.07.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib Administrasi Pengelolaan BMD baik pada lingkup pengguna barang maupun pengelola Barang				31 OPD	31 OPD	2 378 916 439.00	3 279 463 200.00	2 058 963 400.00	-340 079 839.00			-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		2 810 197 069.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																				
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	484 629 018.00	427 151 400.00	355 651 400.00	-48 999 618.00	Kota Sentang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			671 653 053.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																				
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100 006 000.00	99 416 000.00	69 456 400.00	-395 67 600.00	Kota Sentang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			111 140 460.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.03.2.01.0005	Pemanfaatan Barang Milik Daerah																				
			Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	173 305 600.00	345 665 600.00	250 407 400.00	-76 627 000.00	Kota Sentang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			242 537 920.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																				
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	99 999 156.00	469 625 000.00	218 071 000.00	-110 071 244.00	Kota Sentang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			149 965 745.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																				
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koreksi atas Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	99 997 981.00	97 512 000.00	97 035 000.00	-7 917 981.00	Kota Sentang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			199 997 876.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	29 994 000.00	59 994 000.00	25 497 000.00	-1 537 000.00	Kota Sentang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			50 000 000.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.07.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																				
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2 66 747 479.00	417 315 000.00	266 715 000.00	-534 479.00	Kota Sentang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			327 677 064.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				31 Laporan	31 Laporan	517.949.205,00	597.149.200,00	401.018.200,00	-116.931.005,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			351.938.762,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				140 Orang	56 Orang	685.865.000,00	763.139.000,00	374.722.000,00	-311.143.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	-	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan			706.061.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H								**30.808.551.658,00**	**39.690.967.480,00**	**33.959.073.683,00**	**150.522.025,00**							**39.322.111.334,00**	

XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD PERUBAHAN LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membawa konsekuensi bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD. Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sementara itu sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan

memiliki dokumen Renja, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Bontang tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BKPSDM Kota Bontang tahun 2025 yang telah ditetapkan pada Prioritas Pembangunan Daerah dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dimana dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025, telah terjadi perubahan kebutuhan yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renja Tahun 2025. Beberapa faktor, baik eksternal maupun internal, menyebabkan terjadinya perubahan tersebut.

Adapun faktor internal yang mendorong perlunya dilakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2025 terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi perubahan kebutuhan, perubahan target kinerja dan pagu anggaran.

I.2 TUJUAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

10. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.
11. Menjadi dasar penyesuaian nama kegiatan, perubahan target kinerja, dan perubahan pagu anggaran.

I.3 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 mencakup adanya perubahan target kinreja dan pagu anggaran pada beberapa sub kegiatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Dalam Renja Tahun 2025, BKPSDM Kota Bontang merencanakan 3 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp 21.052.188.274,00. Sedangkan, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kota Bontang TA 2025 tanggal 02 Januari 2025, alokasi anggaran BKPSDM sebesar Rp 25.413.461.994,00.

Pemerintah Kota Bontang melakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 dengan hasil efisiensi sebesar Rp 1.853.354.832,- sehingga alokasi anggaran setelah efisiensi sebesarRp 23.560.107.162,-. ~~Terdapat~~s Selisih antara rencana anggaran pada Renja Tahun 2025 dengan efisiensi sebesar Rp 2.507.918.888,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Pada DPA BKPSDM Tahun Anggaran 2025 terdapat 3 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada BKPSDM Kota Bontang sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

TABEL 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM s.d. TW II TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	16
1.	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat perangkat daerah	90	11.616.291.331	92.45	17.473.250.168	89	16.944.128.824	0,00	4.715.547.589,00	-	4.252.740.421,00					0,00	8.968.288.010	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	11.616.291.331	100,00%	17.473.250.168	100%	16.944.128.824	100,00%	4.715.547.589,00	100,00%	4.252.740.421,00					100,00%	8.968.288.010	0,00%	-	0,00	0,00	Sekretariat	
		1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	2.000.000	100%	11.306.600	100%	4.466.856	25%	-	25%	-					50%	-	0%	-	0,00	0,00		
		1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	-	3 Dokumen	2.337.904	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-					0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0,00	0,00		
		1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.000.000	1 laporan	11.306.600	1 laporan	2.128.952	1 laporan	-	0 laporan	-					1 laporan	-	0 laporan	-	0,00	0,00		
		1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkatan pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat darah	100%	9.273.625.312	100 Orang	9.685.961.969	100%	12.114.242.618	100%	2.740.957.176,00	100%	3.004.719.940					100%	5.745.677.116	0%	-	0,00	0,00		
		1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	49 Orang/Bulan	9.271.625.312	49 orang/bulan	9.685.961.969	50 Orang/Bulan	12.112.119.666	54 Orang/Bulan	2.740.957.176,00	55 Orang/Bulan	3.004.719.940					55 Orang/Bulan	5.745.677.116	0 Orang/Bulan	-	0,00	0,00		
		1.2.2 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	2.000.000	1 dokumen	-	1 Dokumen	2.122.952	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-					0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0,00	0,00		
		1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100%	266.000.000	100%	1.502.189.824	100%	994.135.560	100%	340.988.600,00	100%	363.542.000					100%	704.530.600	0%	-	0,00	0,00		
		1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	56.000.000	6 paket	476.851.025	7 Paket	653.352.228	4 Paket	151.830.000,00	6 Paket	345.780.000					7 Paket	497.610.000	0 Paket	-	0,00	0,00		
		1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang	60.000.000	53 Orang	834.127.440	83 Orang	35.900.000	0 Orang	-	3 Orang	15.672.000					3 Orang	15.672.000	0 Orang	-	0,00	0,00		
		1.3.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	93 Orang	150.000.000	98 orang	191.211.359	120 Orang	304.883.332	22 Orang	189.158.600,00	0 Orang	2.090.000					22 Orang	191.248.600	0 Orang	-	0,00	0,00		
		1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100%	754.176.000	100%	1.727.873.980	100%	1.402.318.289	100,00%	815.389.283,00	100%	78.794.430					100,00%	894.183.713	0,00%	-	0,00	0,00		
		1.4.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	150.000.000	5 Paket	483.921.570	9 Paket	676.071.631	8 Paket	582.574.977,00	5 Paket	19.978.730					9 Paket	602.553.707	0 Paket	-	0,00	0,00		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	16
				1.4.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	150.000.000	4 Paket	59.174.795	3 Paket	68.660.491	2 Paket	13.806.040,00	3 Paket	12.309.950					3 Paket	26.115.990	0 Paket	-	0,00	0,00		
				1.4.3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	130.000.000	4 Paket	135.761.879	2 Paket	128.559.167	1 Paket	56.380.000,00	1 Paket	8.819.750					1 Paket	65.199.750	0 Paket	-	0,00	0,00		
				1.4.4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	324.176.000	12 laporan	1.049.015.736	12 laporan	529.027.000	3 laporan	162.628.266,00	3 laporan	37.686.000					6 laporan	200.314.266	0 laporan	-	0,00	0,00		
		1.5.			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**340.000.000**	**100%**	**3.399.761.601**	**100%**	**1.315.977.135**	**100,00%**	**602.943.000,00**	**100%**	**539.636.824**					**100,00%**	**1.142.579.824**	**0%**	**-**	**0,00**	**0,00**		
				1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	270.000.000	3 unit	673.670.000	4 Unit	148.570.000	4 Unit	138.880.000,00	0 Unit	1.890.000					4 Unit	140.770.000	0 Unit	-	0,00	0,00		
				1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30 Unit	70.000.000	80 Unit	2.726.091.601	69 Unit	1.112.363.814	54 Unit	445.013.000,00	5 Unit	-					59 Unit	445.013.000	0 Unit	-	0,00	0,00		
				1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan					7 Unit	55.043.321	3 Unit	19.050.000,00	0 Unit	537.746.824					3 Unit	556.796.824	0 Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1.6.			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran**	**100%**	**332.434.288**	**100%**	**377.218.484**	**100%**	**413.776.480**	**100%**	**155.516.530,00**	**100%**	**81.565.520**					100%	237.082.050	0%	-	0,00	**0,00**		
				1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	8.250.000	12 laporan	9.566.000	12 laporan	450.000	3 laporan	0,00	3 laporan	-					6 laporan	-	0 laporan	-	0,00	0,00		
				1.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	108.000.000	12 laporan	48.840.000	12 laporan	48.000.000	3 laporan	7.770.000,00	3 laporan	11.655.000					6 laporan	19.425.000	0 laporan	-	0,00	0,00		
				1.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	216.184.288	12 laporan	318.812.484	12 laporan	365.326.480	3 laporan	147.746.530,00	3 laporan	69.910.520					6 laporan	217.657.050	0 laporan	-	0,00	0,00		
		1.7.			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**648.055.731**	**100%**	**768.937.710**	**100%**	**699.211.886**	**100%**	**59.753.000,00**	**100%**	**184.481.707**					**100%**	**244.234.707**	**0%**	**-**	**0,00**	**0,00**		
				1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 Unit	200.000.000	22 Unit	355.583.764	27 Unit	396.859.531	27 Unit	52.416.000,00	27 Unit	176.749.707					27 Unit	229.165.707	0 Unit	-	0,00	0,00		
				1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	28 Unit	180.000.000	28 Unit	51.160.980	140 Unit	79.899.000	17 Unit	7.337.000,00	30 Unit	7.732.000					47 Unit	15.069.000	0 Unit	-	0,00	0,00		
				1.7.3.	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2 Unit	50.000.000	1 Unit	93.680.000	1 Unit	110.998.855	0 Unit	-	0 Unit	-					0 Unit	-	0 Unit	-	0,00	0,00		
				1.7.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	218.055.731	1 Unit	268.512.966	1 Unit	111.454.500	0 Unit	-	0 Unit	-					0 Unit	-	0 Unit	-	0,00	0,00		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	16
			Indeks Profesionalitas ASN	**53%**		**49%**		**51%**		**85,36%**		**85,34%**						**85,34%**							
2.	**Terwujudnya tata kelola manajemen ASN yang**		**Indeks Sistem Merit**	**0,7**	**8.373.991.804**	**0,67**	**11.017.355.810**	**0,68**	**6.615.978.338**	**0**	**1.340.308.094,00**	**-**	**937.614.233,00**					**0**	**2.277.922.327**	**0%**	**-**	**0,00**	**0,00**		
		2 **Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase ASN berkinerja minimal bernilai baik**	**99%**	**936.610.000**	**99%**	**1.049.090.384**	**98%**	**737.115.038**	**95,00%**	**19.896.990,00**	**0,00%**	**111.307.600,00**					**95,00%**	**131.204.590**	**0%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**Kabid. Pengadaan, Mutasi dan Pengembangan SDM; Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Penghargaan, Dokumentasi, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN**	
			Persentase kinerja layanan kepegawaian	**100%**	**4.063.390.000**	**100%**	**2.588.855.396**	**100%**	**2.693.806.336**	**100,00%**	**341.780.428,00**	**100,00%**	**297.699.101,00**					**100,00%**	**639.479.529**	**0%**	**-**	**0,00**	**0,00**		
		2.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Jumlah kegiatan layanan pengadaan dan pemberhentian**	**3 Layanan**	**865.065.000**	**3 Layanan**	**554.529.082**	**3 Layanan**	**681.327.306**	**3 Layanan**	**165.691.342,00**	**3 Layanan**	**177.028.331**					**3 Layanan**	**342.719.673**	**0 Layanan**	**-**	**0,00**	**0,00**		
			Jumlah layanan lembaga profesi ASN dan informasi kepegawaian	**2 Layanan**	**214.935.000**	**2 Layanan**	**73.447.920**	**2 Layanan**	**146.154.000**	**2 Layanan**	**25.941.700,00**	**2 Layanan**	**21.366.000**					**2 Layanan**	**47.307.700**	**0 Layanan**	**-**	**0,00**	**0,00**		
		2.1.1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabtan untuk pelaksanaan pengadaan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	1.066.000	1 Dokumen	2.728.952	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-					0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0,00	0,00		
		2.1.2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	741.390.000	1 Dokumen	435.811.167	1 Dokumen	550.365.000	0 Dokumen	64.663.342,00	0 Dokumen	165.028.331					0 Dokumen	229.691.673	0 Dokumen	-	0,00	0,00		
		2.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	1 Dokumen	73.675.000	1 Dokumen	117.651.915	1 Dokumen	128.233.354	1 Dokumen	101.028.000,00	1 Dokumen	12.000.000					1 Dokumen	113.028.000	0 Dokumen	-	0,00	0,00		
		2.1.4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	71.025.000	1 Lembaga	27.102.194	1 Lembaga	91.599.000	0 Lembaga	17.076.700,00	0 Lembaga	13.732.700					0 Lembaga	30.809.400	0 Lembaga	-	0,00	0,00		
		2.1.5. Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	1 Dokumen	143.910.000	1 Dokumen	46.345.726	1 Dokumen	54.555.000	1 Dokumen	8.865.000,00	1 Dokumen	7.633.300					1 Dokumen	**16.498.300**	0 Dokumen	-	0,00	0,00		
		2.2. Mutasi dan Promosi ASN	**Jumlah layanan promosi dan mutasi ASN**	**3 Layanan**	**1.115.000.000**	**3 Layanan**	**1.374.086.099**	**3 Layanan**	**1.299.296.030**	**3 Layanan**	**39.353.722,00**	**3 Layanan**	**80.779.770**					**3 Layanan**	**120.133.492**	**0 Layanan**	**-**	**0,00**	**0,00**		
		2.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksanaan dan mutasi ASN Antar Daerah	2 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	113.790.000	2 Dokumen	24.089.030	2 Dokumen	-	2 Dokumen	1.340.000					2 Dokumen	1.340.000	0 Dokumen	-	0,00	0,00		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	16
		2.2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	467 Dokumen	240.000.000	450 Dokumen	461.548.853	400 Dokumen	159.725.000	153 Dokumen	0,00	29 Dokumen	27.679.500					182 Dokumen	27.679.500	0 Dokumen	-	0,00	0,00		
		2.2.3. Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	2 Dokumen	850.000.000	2 Dokumen	798.747.246	2 Dokumen	1.115.482.000	0 Dokumen	39.353.722,00	0 Dokumen	51.760.270					0 Dokumen	91.113.992	0 Dokumen	-	0,00	0,00		
		2.3. Pengembangan Kompetensi ASN	**Jumlah pengembangan kompetensi ASN yang dilaksankaan**	**2 kegiatan**	**1.868.390.000**	**2 kegiatan**	**586.792.295**	**2 kegiatan**	**567.029.000**	**2 kegiatan**	**110.793.664,00**	**2 kegiatan**	**18.525.000**					**2 kegiatan**	**129.318.664**	**0 kegiatan**	**-**	**0,00**	**0,00**		
		2.3.1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	3 Orang	1.688.390.000	20 Orang	421.993.504	3 Orang	470.218.000	1 Orang	35.606.724,00	1 Orang	18.525.000					1 Orang	54.131.724	0 Orang	-	0,00	0,00		
		2.3.2. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina	50 Orang	180.000.000	315 Orang	164.798.791	150 Orang	96.811.000	8 Orang	75.186.940,00	0 Orang	-					8 Orang	75.186.940	0 Orang	-	0,00	0,00		
		2.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur**	**5 kegiatan**	**936.610.000**	**5 kegiatan**	**1.049.090.384**	**5 kegiatan**	**737.115.038**	**5 kegiatan**	**19.896.990,00**	**5 kegiatan**	**111.307.600**					**5 kegiatan**	**131.204.590**	**0 kegiatan**	**-**	**0,00**	**0,00**		
		2.4.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3000 Dokumen	300.000.000	3361 Dokumen	11.007.200	3000 Dokumen	4.565.952	3537 Dokumen	0,00	0 Dokumen	-					3537 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0,00	0,00		
		2.4.2. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4 Dokumen	280.000.000	12 laporan	895.914.065	12 laporan	635.980.000	3 laporan	15.421.990,00	3 laporan	95.047.600					6 laporan	110.469.590	0 laporan	-	0,00	0,00		
		2.4.3. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	240 Orang	228.610.000	110 Orang	22.501.274	275 Orang	24.903.000	0 Orang	-	0 Orang	-					0 Orang	-	0 Orang	-	0,00	0,00		
		2.4.5. Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	10 Orang	119.000.000	10 Orang	25.870.045	90 Orang	35.084.086	0 Orang	-	0 Orang	-					0 Orang	-	0 Orang	-	0,00	0,00		
		2.4.6. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	1 laporan	9.000.000	1 laporan	93.797.800	1 laporan	36.582.000	0 laporan	4.475.000,00	0 laporan	16.260.000					0 laporan	20.735.000	0 laporan	-	0,00	0,00		
		3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**Persentase peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun**	**40%**	**3.373.991.804**	**51,00%**	**7.379.410.030**	**35%**	**3.185.056.964**	**3,05%**	**978.630.676,00**		**528.607.532,00**					**3,05%**	**1.507.238.208**	**0,00%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**Kabid. Pengadaan, Mutasi dan Pengembangan SDM**	
		3.1. Pengembangan Kompetensi Teknis	**Jumlah pengembangan kompetensi teknis ASN yang dilaksanakan**	**8 kegiatan**	**782.618.112**	**18 kegiatan**	**5.099.601.579**	**8 kegiatan**	**1.613.242.964**	**2 kegiatan**	**978.630.676,00**	**1 kegiatan**	**499.779.732**					**3 kegiatan**	**1.478.410.408**	**0 kegiatan**	**-**	**0,00**	**0,00**		
		3.1.3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	80 Orang	782.618.112	1379 Orang	5.099.601.579	274 Orang	1.613.242.964	114 Orang	978.630.676,00	160 Orang	499.779.732					274 Orang	1.478.410.408	0 Orang	-	0,00	0,00		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14=13/5x100%		15	16
		3.2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional pegawai	4 kegiatan	2.591.373.692	4 kegiatan	2.279.808.451	5 kegiatan	1.571.814.000	0 kegiatan	-	2 kegiatan	28.827.800					2 kegiatan	28.827.800	0 kegiatan	-	0,00	0,00		
		3.2.1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	1 laporan	2.591.373.692	1 laporan	2.279.808.451	1 laporan	1.571.814.000	0 laporan	-	0 laporan	28.827.800					0 laporan	**28.827.800**	0 laporan	-	0,00	0,00		
					19.990.283.135		**28.490.605.978**		**23.560.107.162**		**6.055.855.683**		**5.190.354.654**		-		-		**11.246.210.337**		-				

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Bontang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, secara umum capaian realisasi kinerja maupun keuangan telah sesuai target. Dari tabel diatas terdapat beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kegiatan yang telah selesai di Triwulan II adalah:
   - Dokumen LKjIP pada sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri dari dokumen Renja 2025 Perubahan, Renja 2026 dan dokumen Renstra ditargetkan selesai pada Triwulan III;
c. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sudah berjalan, yang belum direalisasikan pada Belanja Pakaian Batik Nasional dan Belanja pakaian olah raga yang ditargetkan rampung pada Triwulan III;
d. Pemeliharaan asset tak berwujud akan direalisasikan pada Triwulan ke-III;
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya akan direalisasikan pada Triwulan ke-IV karena aka nada perubahan anggaran;
f. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN akan dilaksanakan pada Bulan Juni Triwulan ke -III;
g. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN berupa upacara/perayaan HUT Korpri akan dilaksanakan pada Bulan November Triwulan ke-IV;
h. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dari Pendidikan dan Pelatihan Problem Solving dan Purna Tugas telah dilaksanakan di Triwulan I. Orientasi PPPK selesai dilaksanakan di Triwulan II bulan April;
i. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan sedang dalam proses pelaksanaan:
   - Pendidikan Kepemimpinan Pengawas dilaksanakan pada 4 Juni sampai dengan 27 September 2025 di BPSDM Provinsi Kalimantan Timur;

- Pendidikan Kepemimpinan Administrator dilaksanakan pada 1 Juni sampai dengan 24 September 2025 di BPSDM Provinsi Kalimantan Timur;
- Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat I dilaksanakan pada

j. Kegiatan lainnya yang sifatnya rutin akan selesai di akhir tahun.

2.2 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG

A. Penerapan Sistem Merit

Pengisian JPT melalui seleksi terbuka dan kompetitif merupakan salah satu bentuk Pengisian JPT melalui seleksi terbuka dan kompetitif merupakan salah satu bentuk *quick win* bagi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan Pejabat Pimpinan Tinggi yang kompeten, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi yang dapat mendorong meningkatnya kinerja birokrasi pemerintah. Sebagaimana diatur dalam UU ASN, rencana pengisian JPT diumumkan paling tidak di Tingkat Provinsi untuk JPT Pratama dan di Tingkat nasional untuk JPT Madya dan Utama. Seleksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh PPK dan beranggotakan wakil-wakil internal dan eksternal instansi. Seleksi dilakukan berdasarkan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak, serta dilakukan secara transparan. Panitia seleksi memilih tiga kandidat terbaik yang memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada PPK. Sesuai dengan kewenangannya, PPK akan memilih salah satu diantaranya, menetapkan dan melantik pejabat yang terpilih ke jabatan yang akan diisi.

Sehubungan dengan itu, UU ASN mewajibkan setiap instansi membangun manajemen ASN berbasis merit serta mengembangkan manajemen talenta dengan tujuan untuk menyiapkan para calon pimpinan di instansi pemerintah yang benar-benar sesuai kebutuhan instansi, untuk jangka pendek dan jangka Panjang. Sesuai dengan Pasal 111 Undang-Undang ASN, Instansi Pemerintah yang telah menerapkan system merit dalam manajemen ASN dapat dikecualikan dari seleksi terbuka dalam pengisian JPT di instansinya, dengan persetujuan KASN. Oleh karena itu, sejak Tahun 2016 KASN telah membangun kriteria dan sub kriteria manajemen ASN yang berdasarkan prinsip merit, serta mengembangkan instrument penilaian Tingkat penerapan system merit di Instansi Pemerintah dengan menggunakan pendekatan *Self Assessment.*

Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) merupakan Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berfungsi mengawasi penerapan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. KASN diberikan kewenangan untuk mengawasi setiap proses manajemen ASN agar sesuai dengan sistem merit, yang salah satunya yaitu mengawasi tahapan seleksi pengisian JPT. Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Secara Preventif: Melalui sosialisasi tata cara seleksi dan penerbitan rekomendasi terhadap pelaksanaan dan hasil seleksi;
2. Secara represif: Menindaklanjuti pengaduan Masyarakat atas dugaan terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pengisian JPT dan menerbitkan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi.

SIPINTER diciptakan sebagai instrument untuk menilai Tingkat penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Penilaian ini bersifat obyektif dan terstandar berdasarkan metode *self assessment* atau penilaian mandiri sesuai dengan Peraturan KASN No. 5/2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Hasil penilaian (evaluasi) menghasilkan informasi tentang Tingkat penerapan sistem merit di masing-masing instansi pemerintah dan rekomendasi perbaikan terhadap aspek manajemen ASN yang belum memenuhi prinsip merit.

Undang-Undang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dibubarkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pembubaran KASN juga diimplementasikan melalui Perpres Nomor 91 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Perubahan ini mengakibatkan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Oktober 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2024 yang mengalihkan pengawasan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ke Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa mekanismen pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit pasca pengalihan tugas dan fungsi

KASN kepada Kementerian PANRB dan BKN. Adapun pembagian tugas dan fungsi tersebut sebagai berikut:

a. Kementerian PANRB

   Kementerian PANRB menetapkan kebijakan pengawasan penerapan sistem merit.

b. BKN

   BKN melaksanakan pengawasan penerapan sistem merit yang meliputi:

   1) Pengawasan pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN;
   2) Pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
   3) Menjaga netralitas pegawai ASN;
   4) Pengawasan atas pembinaan profesi ASN.

   Kementerian PAN RB dan BKN saat ini sedang dalam tahap pembahasan kerangka penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga capaian indeks sistem merit akan dapat dihitung setelah sistem perhitungan dari Kementerian PAN dan BKN terbangun.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DALAM PERUBAHAN RENJA BKPSDM TAHUN 2025

3.1 PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BKPSDM TAHUN 2025

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan kepegawaian daerah dan membantu Walikota Bontang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa kompetensi personil.

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 menetapkan visi Kota Bontang Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab". Misi RPJMD yang berkaitan dengan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang adalah "Kota Bontang yang Berdaya Saing dan Sejahtera melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Dalam misi tersebut difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam mewujudkan Kota Bontang yang Berdaya Saing dan Sejahtera.

Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Bontang Tahun 2025 yang didasarkan pada Renstra BKPSDM Kota Bontang 2021-2026.

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN RENJA BKPSDM KOTA BONTANG TAHUN 2025

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN TAHUN 2025	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2025
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	85,40	Terwujudnya tata kelola manajemen ASN yang efektif, efisien,	***Iku*** : Indeks Sistem Merit	0,68

				transparan dan akuntabel		
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	A (84,76)	Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi perangkat daerah	***Ik*** : Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	92.5

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas jabatannya. Indeks Profesionalitas ASN merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif Tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Tahun 2024, Pemerintah Kota Bontang berhasil mendapatkan nilai IP ASN sebesar 85,36 dengan kategori tinggi. Target pada renstra di Tahun 2025 adalah 51, sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target Renja 2025 Perubahan menjadi 85,40. Penilaian ini diperoleh dari aplikasi SIASN dengan link https://siasn-instansi.bkn.go.id/layananIP/nilaiASN. Dengan disesuaikannya target ini menjadi motivasi untuk terus berkinerja memberikan yang terbaik.

Dengan dibubarkannya KASN melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, maka kebijakan pengawasan penerapan sistem merit dialihkan ke Kementerian PANRB dan pengawasan penerapan sistem merit dialihkan ke BKN. Tahun 2024 dan 2025 ini merupakan tahun peralihan dan penyusunan kebijakan sistem merit pasca dibubarkannya KASN. BKPSDM Kota Bontang terus berupaya untuk mendorong sistem ini tetap berjalan walaupun diketahui bahwa alat ukur sistem merit telah dinonaktifkan bersamaan dengan dibubarkannya KASN.

Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 5 Desember 2024 sesuai surat tugas No. 000.1.2.3/617/BKPSDM/2024 bahwa pelaksanaan evaluasi sistem merit Tahun 2024 memprioritaskan pendampingan atau evaluasi bagi instansi yang berada pada kategori kurang sehingga diharapakan dapat berpotensi untuk naik menjadi baik, dan instansi yang berada pada kategori baik berpotensi naik menjadi sangat baik. Pemerintah Kota Bontang sesuai

dengan Keputusan KASN Nomor 59.KEP.KASN/C/VII/2023 telah berada pada kategori III (baik) dengan nilai sebesar 273 dari rentang nilai 250-324 (berada pada nilai tengah) dengan indeks sebesar 0,67 maka pada tahun 2024 tidak dilakukan evaluasi. Selain itu, nilai sistem merit BKPSDM Kota Bontang berada dalam masa transisi dari KASN yang akan dilimpahkan ke BKN. Pemerintah Kota Bontang tidak termasuk 94 instansi yg diprioritaskan dievaluasi *maka diperbolehkan* untuk menggunakan nilai sistem merit tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2023. Prioritas evaluasi lebih dilakukan pada Indonesia bagian Timur. Jika dilihat dari pengukuran indeks sistem merit yang diperoleh Pemerintah Kota Bontang sebesar 0,67 maka capaian Indikator Kinerja Indeks Sistem Merit telah sesuai dengan target 0,67 yang diperjanjikan di tahun 2024 sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Tahun 2025 akan dilakukan penilaian mandiri dengan target sebesar 0,68. Diharapkan target ini dapat tercapai di tahun ini.

Di Tahun 2024, BKPSDM meraih Nilai SAKIP sebesar 87,29 dengan predikat (A). Di Tahun 2025 nilai turun menjadi 84,76. Hal ini menjadi review BKPSDM Kota Bontang dalam menetapkan target lima tahun kedepan.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan dengan koordinasi dari Bagian Organisasi Pemerintah Kota Bontang. Dalam pelaksanaannya, Bagian Organisasi bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN) yang bertindak sebagai analisator serta penyedia platform e-survei. Nilai IKM BKPSDM Tahun 2024 adalah 92,45. Ditargetkan akan naik di Tahun 2025 menjadi 92,5.

Adanya dinamika di lingkup kepegawaian menyebabkan perlunya penyesuaian anggaran maupun target sub kegiatan. Berikut adalah data Sub Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran. Perubahan yang disajikan Adalah data berdasarkan anggaran murni pasca efisiensi dengan data anggaran RKPD Perubahan sebagai berikut:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
9. Pengadaan Mebel
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
16. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
17. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
18. Pengelolaan Data Kepegawaian
19. Pengelolaan Promosi ASN
20. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
21. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
22. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
23. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
24. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
25. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Berikut adalah tabel perubahan rencana program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2025 sesuai dengan batasan pagu perangkat daerah yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

TABEL 3.1.2

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BKPSDM KOTA BONTANG TAHUN 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM	SETELAH	TARGET KINERJA (SEBELUM)	TARGET KINERJA (SETELAH)	PAGU EFISIENSI	NILAI PERUBAHAN PAGU SETELAH PERSETUJUAN		
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**90**				
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu**	**Proses Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu**	**100%**	**100%**				
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	2.337.904	2.337.904	-	0%
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	2.128.952	2.128.952	-	0%
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah**	**Tingkat Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**100%**				
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	55 orang/bulan	12.112.119.666	12.112.119.666	-	0%
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	2.122.952	2.122.952	-	0%
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian**	**Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian**	**100%**	**100%**				
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 paket	7 paket	653.352.228	747.103.428	93.751.200	14%
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	83 orang	61 orang	35.900.000	121.064.000	85.164.000	237%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM	SETELAH	TARGET KINERJA (SEBELUM)	TARGET KINERJA (SETELAH)	PAGU EFISIENSI	NILAI PERUBAHAN PAGU SETELAH PERSETUJUAN		
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 orang	22 orang	304.883.332	199.782.332	(105.101.000)	-34%
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**	**Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**				
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	10 paket	676.071.631	934.440.202	258.368.571	38%
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	68.660.491	75.467.847	6.807.356	10%
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	1 paket	128.559.167	122.525.405	(6.033.762)	-5%
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	529.027.000	558.993.000	29.966.000	5,66%
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah**	**Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**100%**				
5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	6 unit	148.570.000	212.374.000	63.804.000	43%
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit	9 unit	55.043.321	31.311.333	(23.731.988)	-43%
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	69 unit	101 unit	1.112.363.814	1.610.129.083	497.765.269	45%
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran**	**Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran**	**100%**	**100%**				
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 laporan	12 laporan	450.000	450.000	-	0%
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	48.000.000	48.000.000	-	0%
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	365.326.480	450.326.480	85.000.000	23%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM	SETELAH	TARGET KINERJA (SEBELUM)	TARGET KINERJA (SETELAH)	PAGU EFISIENSI	NILAI PERUBAHAN PAGU SETELAH PERSETUJUAN		
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**100%**				
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	27 unit	396.859.531	396.859.531	-	0%
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 unit	140 unit	79.899.000	64.389.000	(15.510.000)	-19%
5.03.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	1 unit	110.998.855	85.690.000	(25.308.855)	-23%
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	111.454.500	57.135.000	(54.319.500)	-49%
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase kinerja layanan kepegawaian**	**Persentase kinerja layanan kepegawaian**	**100%**	**100%**				
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Kegiatan Layanan Pengadaan dan Pemberhentian dan Jumlah Layanan Lembaga Profesi ASN dan Informasi Kepegawaian**	**Jumlah Kegiatan Layanan Pengadaan dan Pemberhentian dan Jumlah Layanan Lembaga Profesi ASN dan Informasi Kepegawaian**	**5 layanan**	**3 layanan; 2 layanan**				
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	1 dokumen	2.728.952	2.728.952	-	0%
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	1 dokumen	550.365.000	417.803.000	(132.562.000)	-24%
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 dokumen	1 dokumen	128.233.354	162.952.343	34.718.989	27%
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	1 lembaga	91.599.000	83.699.000	(7.900.000)	-9%
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	54.555.000	49.755.000	(4.800.000)	-9%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM	SETELAH	TARGET KINERJA (SEBELUM)	TARGET KINERJA (SETELAH)	PAGU EFISIENSI	NILAI PERUBAHAN PAGU SETELAH PERSETUJUAN		
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Layanan Promosi dan Mutasi ASN**	**Jumlah Layanan Promosi dan Mutasi ASN**	**3 layanan**	**3 layanan**				
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 dokumen	1 dokumen	24.089.030	24.089.030	-	0%
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	400 dokumen	400 dokumen	159.725.000	159.725.000	-	0%
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 dokumen	2 dokumen	1.115.482.000	879.767.300	(235.714.700)	-21%
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah pengembangan kompetensi ASN**	**Jumlah pengembangan kompetensi ASN**		**2 kegiatan**				
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3 orang	1 orang	470.218.000	113.218.000	(357.000.000)	-76%
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	150 orang	60 orang	96.811.000	96.811.000	-	0%
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**				**5 kegiatan**				
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3000 dokumen	0	4.565.952	-	(4.565.952)	-100%
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 laporan	12 laporan	635.980.000	611.613.000	(24.367.000)	-4%
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	275 orang	275 orang	24.903.000	24.903.000	-	0%
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	90 orang	90 orang	35.084.086	35.084.086	-	0%
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 laporan	1 laporan	36.582.000	49.277.000	12.695.000	34,70%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM	SETELAH	TARGET KINERJA (SEBELUM)	TARGET KINERJA (SETELAH)	PAGU EFISIENSI	NILAI PERUBAHAN PAGU SETELAH PERSETUJUAN		
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun**	**Persentase peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun**	**35%**	**51%**				
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah pengembangan kompetensi teknis ASN**	**Jumlah pengembangan kompetensi teknis ASN**	**8 kegiatan**	**8 kegiatan**				
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	274 orang	327 orang	1.613.242.964	1.842.078.336	228.835.372	14,18%
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional pegawai**	**Jumlah pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional pegawai**	**5 kegiatan**	**5 kegiatan**				
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 laporan	1 laporan	1.571.814.000	1.171.853.000	(399.961.000)	-25,45%
Total						**23.560.107.162**	**23.560.107.162**		

XXVII. INSPEKTORAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Inspektorat Daerah Kota Bontang adalah aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Bontang. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah bertugas untuk membantu wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah melalui kegiatan pengawasan intern Pemerintahan Daerah.

Pengawasan intern Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah bertujuan untuk memberikan nilai tambah kepada Perangkat Daerah atas efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian intern, dan proses tata kelola yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan pengawasan intern untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Agar peran pengawasan intern dimaksud dapat berjalan efektif dan akuntabel, maka Inspektorat Daerah sebagai organisasi publik pemerintah diharapkan lebih terbuka dan transparan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Strategis *(Strategic Plan)*, Rencana Kinerja *(Performance Plan)*, Rencana Kerja (*Work Plan*) serta laporan pertanggungjawaban kinerja *(Performance Accountability Report)*.

Fokus Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021—2026 menekankan pada peningkatan mutu tata kelola pembinaan dan pengawasan

Fokus Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021—2026 menekankan pada peningkatan mutu tata kelola pembinaan dan pengawasan internal dan kapasitas sumber daya manusia APIP yang mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kota Bontang.

internal dan kapasitas sumber daya manusia APIP yang mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kota Bontang. Hal ini menjadi tujuan Inspektorat Daerah tahun 2021—2026 yakni **"Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Intern Perangkat Daerah yang Berintegritas, Professional, dan Modern"**.
Adapun sasaran tahun 2021—2026 adalah:

1. **Meningkatnya tata kelola intern perangkat daerah yang berintegritas.**
2. **Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang profesional dan kualitas tata kelola organisasi yang modern.**

Atas dasar fokus tersebut, ruang lingkup dan sasaran dalam sistem manajemen pengawasan intern Kota Bontang tahun 2021—2026 tidak hanya menitikberatkan pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (*compliance*) atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, tetapi juga difokuskan pada peningkatan manfaat (*outcome*) atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Bontang tahun 2021—2026. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan intern diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerugian dan pemborosan keuangan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025 merupakan salah satu unsur dari siklus tata kelola perencanaan pembangunan daerah. Renja Perubahan Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang menguraikan lebih rinci atas tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Renja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025 memiliki peran strategis dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Renja Perubahan Inspektorat Daerah menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan dituangkan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan menentukan besarnya indikator kinerja fiskal dalam tata kelola keuangan daerah.
2. Renja Perubahan Inspektorat Daerah merupakan penjabaran tindakan operasional (*action plan*) dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) daerah.

Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025 mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan alur penyusunan sebagai berikut:

1. Renja Perubahan Inspektorat Daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan dan mengacu kebijakan rencana pembangunan daerah oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan intern.
2. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Inspektorat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2021—2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Inspektorat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*), dan indikator kinerja masukan (*outcome*).

Selain berperan sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bontang, Inspektorat Daerah juga masuk dalam organisasi profesi APIP yang tergabung dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Renja Perubahan Inspektorat Daerah menjadi salah satu acuan penyusunan rencana kegiatan audit/pengawasan intern tahunan yang akan ditetapkan menjadi Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (RPPT) Kota Bontang . Hal ini sesuai amanat dari Peraturan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia pada Standar Kinerja Angka 2010 yang menyatakan bahwa Pimpinan APIP harus menyusun perencanaan Pengawasan Intern berbasis risiko untuk menetapkan prioritas Pengawasan Intern sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan Pengawasan Intern disusun dengan dasar penilaian risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2030;
19. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2025;
23. Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kota Bontang Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Tujuan penyusunan dokumen ini adalah:

1. Acuan Inspektorat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.
2. Merumuskan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (RPPT) Kota Bontang selama tahun 2025.
3. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan.
4. Menyediakan satu pedoman jangka menengah untuk menentukan arah kebijakan pengawasan, dengan berdasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksi masa yang akan datang.
5. Menyediakan satu materi kemudahan bagi seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan strategi lima tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan.
6. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hubungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
7. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang .
8. Mengoptimalkan kerja sama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH S.D. TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s.d. Triwulan II dan Capaian Renstra PD

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. triwulan ke-2.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan penjelasan serta catatan penting terjadinya perbedaan tersebut.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, dan pagu indikatif

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang rencana kerja program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH S.D. TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S.D. TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Inspektorat Daerah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk melaksanakan 2 (dua) perspektif sasaran strategis yang didukung Renja Tahun 2025 terdiri dari 2 kelompok program kerja dengan perincian sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) memuat program dan kegiatan utama (*core business*) pembinaan dan pengawasan intern penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bontang untuk melaksanakan sasaran strategis berperspektif pengguna layanan (*stakeholders*). RKPT tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) program prioritas pembangunan daerah yakni :
   1) Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:
      a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
      b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
   2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:
      a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
      b. Pendampingan dan Asistensi.

Renja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025 terdiri 2 (dua) kelompok program kerja yakni Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) dan Rencana Kerja Penunjang Pengawasan Tahunan (RKPPT)

   Adapun arah kebijakan pengawasan intern penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi acuan penetapan RPPT tahun 2025 adalah sebagai berikut:
   a. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan.
   b. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik.
   c. Penunjang pengawasan.

   RKPT tersebut merupakan rencana aksi (*action plan*) pelaksanaan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/43/ITDA/2025 tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah Tahun 2025.

2. Rencana Kerja Penunjang Pengawasan Tahunan (RKPPT) memuat program dan kegiatan operasional perkantoran secara rutin serta

kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi SDM. RKPPT menjadi rencana aksi (*action plan*) sasaran strategis berperspektif proses internal (*internal business process*) pertumbuhan dan pembelajaran (*learning and growth*) serta keuangan (*financial*) terdiri dari 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yakni:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada pelaksanaan DPA Murni TA 2025, terdapat perubahan target fiskal Inspektorat Daerah sebagaimana tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target efisiensi anggaran difokuskan pada beberapa belanja, antara lain:

a. pembatasan belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
b. pengurangan belanja perjalanan dinas;
c. pembatasan belanja honorarium mengacu pada Standar Harga Satuan Regional; dan
d. mengurangi belanja bersifat pendukung (*supporting*) dan tidak memiliki output yang terukur.

Rincian efisiensi anggaran Inspektorat Daerah TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Rincian Efisiensi Anggaran Inspektorat Daerah TA 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		Efisiensi	
		Murni TA 2025	Pergeseran TA 2025 (Efisiensi)	Rp	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**22.499.100.720,00**	**19.481.287.343,00**	**3.017.813.377,00**	**13,41**
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.618.179.254,00	13.618.179.254,00	0,00	0,00
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.933.680.000,00	1.636.005.000,00	2.297.675.000,00	58,41
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.084.577.176,00	1.375.009.799,00	709.567.377,00	34,04
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.192.706.890,00	2.182.135.890,00	10.571.000,00	0,48
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.129.400,00	193.129.400,00	0,00	0,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		Efisiensi	
		Murni TA 2025	Pergeseran TA 2025 (Efisiensi)	Rp	%
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.828.000,00	476.828.000,00	0,00	0,00
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1.631.925.800,00**	**967.307.800,00**	**664.618.000,00**	**40,73**
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.488.279.040,00	884.949.040,00	603.330.000,00	40,54
b	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	143.646.760,00	82.358.760,00	61.288.000,00	42,67
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**2.040.272.212,00**	**1.152.586.602,00**	**887.685.610,00**	**43,51**
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	45.672.228,00	45.672.228,00	0,00	0,00
b	Pendampingan dan Asistensi	1.994.599.984,00	1.106.914.374,00	887.685.610,00	44,50
T O T A L		**26.171.298.732,00**	**21.601.181.745,00**	**4.570.116.987,00**	**17,46**

Hasil evaluasi menunjukkan target kinerja fiskal Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp21.601.181.745,00 terealisasi s.d. Juni 2025 sebesar Rp10.282.404.373,00 atau tercapai 47,60% disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja Fiskal Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT)	2.119.894.402,00	872.056.599,00	41,14
2	Rencana Kerja Penunjang Pengawasan Tahunan (RKPPT)	19.481.287.343,00	9.410.347.774,00	48,30
T O T A L		**21.601.181.745,00**	**10.282.404.373,00**	**47,60**

Hasil evaluasi menunjukkan beberapa kendala dalam pencapaian target tahun 2025 sebagai berikut:

1. Jumlah APIP yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan dan standar kompetensi pegawai pada pelaksanaan pendidikan professional berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi masih terbatas, yang mana belum memenuhi standar yang ditentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 yaitu Pendidikan Profesional Berkelanjutan minimal 120 jam/tahun. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang diperuntukkan untuk meningkatkan

kompetensi dan kecakapan melalui pengembangan profesi berkelanjutan.
2. Realisasi laporan hasil pembinaan dan pengawasan belum sepenuhnya sesuai RPPT Kota Bontang Tahun 2025 karena adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang harus dilaksanakan di luar RPPT, diantaranya pelaksanaan mandatory dari Korsupgah KPK, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian/Lembaga Lainnya.
3. Perangkat Daerah belum menanamkan budaya sadar risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Belum terintegrasinya implementasi pembinaan dan pengawasan yang berbasis digital.
5. Sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan dan pengawasan yang masih terbatas.
6. Masih rendahnya pelaksanaan pencegahan dan Pendidikan budaya anti korupsi pada Perangkat Daerah dan *stakeholders*.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan efektivitas evaluasi pelaksanaan analisa kebutuhan diklat (AKD) dan standar kompetensi pegawai
2. Memutakhirkan data penilaian risiko dalam rangka penyusunan RPPT berbasis risiko serta berpedoman pada beberapa peraturan terkait *mandatory* pengawasan internal.
3. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye budaya sadar risiko dan budaya anti korupsi kepada Perangkat Daerah dan stakeholders dalam melaksanakan program dan kegiatan.
4. Meningkatkan implementasi pembinaan dan pengawasan yang berbasis digital secara terintegrasi.
5. Pemenuhan Sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan dan pengawasan.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 s.d. Triwulan II Inspektorat Daerah Kota Bontang

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
											I		II					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1						2	3	4	5		6		7		8 = 6 + 7		9 = 8 / 5	
6						**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**												
6	**01**					**INSPEKTORAT DAERAH**				**22.370.617.101**		**5.498.182.655**		**4.784.221.718**		**10.282.404.373**		**45,96**
6	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**19.481.287.343**	**25**	**5.119.773.910**	**25**	**4.290.573.864**	**50**	**9.410.347.774**	**50,00**	**48,30**
6	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**13.618.179.254**	**25**	**3.271.475.670**	**25**	**3.427.419.635**	**50**	**6.698.895.305**	**50,00**	**49,19**
6	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	55	13.618.179.254	54	3.271.475.670	57	3.427.419.635	57	6.698.895.305	103,64	49,19
6	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**1.636.005.000**	**25**	**536.547.057**	**25**	**212.647.612**	**50**	**749.194.669**	**50,00**	**45,79**
6	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	226.770.000	2	103.490.850	0	0	2	103.490.850	66,67	45,64
6	01	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	59	1.409.235.000	56	433.056.207	58	212.647.612	114	645.703.819	193,22	45,82
6	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**	**Persen**	**100**	**1.375.009.799**	**25**	**401.748.663**	**25**	**413.842.379**	**50**	**815.591.042**	**50,00**	**59,32**
6	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	77.321.115	3	66.263.225	1	2.200.000	4	68.463.225	80,00	88,54
6	01	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	63.081.676	1	9.490.000	1	6.897.540	2	16.387.540	40,00	25,98
6	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	58.736.625	1	15.878.495	1	24.193.220	2	40.071.715	66,67	68,22

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
											I		II					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1						2	3	4	5		6		7		8 = 6 + 7		9 = 8 / 5	
6	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	43.766.039	1	3.202.000	1	4.300.000	2	7.502.000	50,00	17,14
6	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	8.000.000	15	0	15	1.980.000	30	1.980.000	50,00	24,75
6	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	967.808.000	3	306.914.943	3	326.457.259	6	633.372.202	50,00	65,44
6	01	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	156.296.344	0	0	1	47.814.360	1	47.814.360	100,00	30,59
6	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**2.182.135.890**	**25**	**750.552.000**	**25**	**70.818.000**	**50**	**821.370.000**	**50,00**	**37,64**
6	01	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	4	812.538.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	239.175.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	01	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	32	1.005.961.890	36	750.552.000	4	70.818.000	40	821.370.000	125,00	81,65
6	01	01	2	07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	3	124461000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran**	**Persen**	**100**	**193.129.400**	**25**	**46.062.980**	**25**	**36.881.320**	**50**	**82.944.300**	**50,00**	**42,95**
6	01	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.800.000	0	0	1	192.000	1	192.000	100,00	10,67
6	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	48.000.000	3	11.322.000	3	11.322.000	6	22.644.000	50,00	47,18
6	01	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	19	40.219.000	3	6.345.000	3	8.950.000	6	15.295.000	31,58	38,03

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
											I		II					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1						2	3	4	5		6		7		8 = 6 + 7		9 = 8 / 5	
6	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	103.110.400	3	28.395.980	3	16.417.320	6	44.813.300	50,00	43,46
6	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**Persen**	**100**	**476.828.000**	**25**	**113.387.540**	**25**	**128.964.918**	**50**	**242.352.458**	**50,00**	**50,83**
6	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	476.828.000	20	113.387.540	16	128.964.918	36	242.352.458	124,14	50,83
6	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko**	**Persen**	**80**	**1.765.526.200**	**15**	**203.494.397**	**30**	**173.068.839**	**45**	**376.563.236**	**56,25**	**21,33**
6	**01**	**02**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah penyelesaian pembinaan dan pengawasan internal perangkat daerah**	**Obinas**	**275**	**1.647.808.200**	**114**	**194.473.063**	**65**	**173.068.839**	**179**	**367.541.902**	**65,09**	**22,30**
6	01	02	2	01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	96	452.030.000	9	41.582.473	45	69.678.749	54	111.261.222	56,25	24,61
6	01	02	2	01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	110	878.048.200	52	64.535.923	8	43.213.773	60	107.749.696	54,55	12,27
6	01	02	2	01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	17.850.000	2	5.933.000	0	0	2	5.933.000	100,00	33,24
6	01	02	2	01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	31	99.960.000	10	67.733.667	0	0	10	67.733.667	32,26	67,76
6	01	02	2	01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	10	199.920.000	41	14.688.000	12	60.176.317	53	74.864.317	530,00	37,45
6	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah kasus yang telah selesai ditindaklanjuti**	**Kasus**	**5**	**117.718.000**	**1**	**9.021.334**	**1**	**0**	**2**	**9.021.334**	**40,00**	**7,66**
6	01	02	2	02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	5	117.718.000	1	9.021.334	1	0	2	9.021.334	40,00	7,66
6	**01**	**03**				**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan**	**Persen**	**100**	**1.123.803.558**	**100**	**174.914.348**	**100**	**320.579.015**	**100**	**495.493.363**	**100,00**	**44,09**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
											I		II					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1						2	3	4	5		6		7		8 = 6 + 7		9 = 8 / 5	
							Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan	**Persen**	**95**		**100**		**100**		**100**		**105,26**	
6	**01**	**03**	**2**	**01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah kebijakan pembinaan dan pengawasan**	**Kebijakan**	**1**	**52.980.816**	**1**	**12.760.000**	**0**	**12.683.000**	**1**	**25.443.000**	**100,00**	**48,02**
6	01	03	2	01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	52.980.816	1	12.760.000	1	12.683.000	2	25.443.000	200,00	48,02
6	**01**	**03**	**2**	**02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Kegiatan pendampingan dan asistensi pembinaan dan pengawasan**	**Kegiatan**	**20**	**1.070.822.742**	**5**	**162.154.348**	**5**	**307.896.015**	**10**	**470.050.363**	**50,00**	**43,90**
6	01	03	2	02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	31	419.588.000	3	105.334.680	31	103.770.702	34	209.105.382	109,68	49,84
6	01	03	2	02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	31	132.472.000	31	19.261.200	31	63.783.533	62	83.044.733	200,00	62,69
6	01	03	2	02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	16	518.762.742	2	37.558.468	6	140.341.780	8	177.900.248	50,00	34,29

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah telah menyusun peta strategis berdasarkan *balanced scorecard* yang terdiri dari 2 (dua) perspektif yaitu perspektif eksternal dan internal. Peta strategis tersebut dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Inspektorat Daerah tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Inspektorat Daerah untuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja.
2. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (ADPPK) program terintegrasi secara berkala.
3. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh perangkat daerah terkait secara berkala.
4. Mendorong penerapan reformasi birokrasi Kota Bontang yang efektif.
5. Mendorong implementasi SAKIP Kota Bontang yang efektif.
6. Menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis risiko (*risk-based performance management system*).
7. Menerapkan sistem tata kelola pengawasan intern berbasis risiko (*risk-based internal audit management system*).
8. Mengoptimalkan peran Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (UP2LKPUPD) Kota Bontang.
9. Meningkatkan kendali mutu dan penjaminan mutu (*quality control and quality assurance*) atas pelaksanaan kegiatan pengawasam intern secara efektif.
10. Proses bisnis Inspektorat Daerah Kota Bontang berbasis teknologi informasi komunikasi yang modern (*business process based on modern information communication technology*).
11. Melakukan publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bontang kepada masyarakat.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 345 menyebutkan pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari manajemen pelayanan publik. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak dinamis mengikuti kebutuhan zaman. Kegiatan pengawasan intern tidak lagi terbatas pada pemeriksaan pada akhir periode tahun anggaran saja (*post audit*), tetapi harus dilakukan pada seluruh proses pengelolaan APBD yang sedang berlangsung. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 380 mengatur bahwa kegiatan

pengawasan intern yang terkait keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Fokus pengawasan intern Inspektorat Daerah tidak hanya ditujukan pada aspek pengelolaan keuangan negara, namun secara bertahap terus disempurnakan dan areanya diperluas pada pengawasan kinerja dalam rangka pemantapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Bontang untuk mencapai tujuan otonomi daerah yakni meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Mandatory pengawasan dari instansi pusat, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, BPKP, dan KPK yang meningkat setiap tahun tanpa diimbangi dengan peningkatan jumlah kuantitas APIP.
2. Mandatory pendidikan dan pelatihan APIP sebanyak 120 jam/tahun sebagai upaya peningkatan kapabilitas APIP.
3. Belum optimalnya implementasi penyelenggaraan RB, SAKIP, SPIP, MR, dan kegiatan pencegahan korupsi pada Perangkat Daerah.
4. Kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaannya lebih optimal.
5. Optimalisasi pengawasan berbasis digital seiring berkembangnya penggunaan data dan teknologi informasi.

Untuk itu, Inspektorat Daerah harus menyusun rencana aksi (*action plan*) meliputi:

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang meliputi audit, reviu, monitoring, evaluasi, pendampingan, asistensi, dan konsultansi secara berkala berbasis risiko.
2. Mengikutsertakan APIP pada Pendidikan dan pelatihan profesional yang berkelanjutan.
3. Melakukan pendampingan penyelenggaraan RB, SAKIP, SPIP, MR, dan kegiatan pencegahan korupsi pada Perangkat Daerah dan stakeholders secara berkala.
4. Mengalokasikan anggaran pada pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pembinaan dan pengawasan.
5. Mengintegrasikan aplikasi pembinaan dan pengawasan berbasis digital secara menyeluruh.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Bontang 2021—2026 yang merupakan visi kepemimpinan daerah terpilih yaitu **“Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih HEBAT dan BERADAB”**.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah tersebut, arah dan kebijakan pembangunan akan dijawantahkan melalui tiga misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan.
2. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.
3. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang tahun 2025 mengangkat tema **"Penguatan Daya Saing Investasi, Pariwisata dan UMKM melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Infrasturktur serta Pelestarian Lingkungan Hidup"**. Prioritas pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2025 terdiri dari:

1. Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisara dan UMKM;
2. Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas;
3. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastuktur dasar;
4. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Sasaran dan program prioritas pembangunan daerah Kota Bontang Tahun 2025 yang menjadi mandat Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Terkait Fungsi dan Tugas Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	a. Opini BPK	WTP
	b. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bontang	BB (70,41)

Hasil analisis kebutuhan Renja Perubahan Inspektorat Daerah menyesuaikan dengan rancangan awal RKPD Perubahan Kota Bontang tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025

NO.	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KET.
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bontang**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**19.513.533.912**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bontang**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**19.513.533.912**	
A.1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100 Persen	13.618.179.254	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100 Persen	13.618.179.254	
A.2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	1.520.515.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	1.520.515.000	
A.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan admnistrasi perkantoran	100 Persen	1.513.232.887	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan admnistrasi perkantoran	100 Persen	1.513.232.887	
A.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.151.392.144	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.151.392.144	
A.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100 Persen	197.269.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100 Persen	197.269.400	

NO.	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KET.
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
A.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 Persen	512.945.227	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 Persen	512.945.227	
B.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kota Bontang**	**Cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko**	**78 Persen**	**963.884.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kota Bontang**	**Cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko**	**78 Persen**	**963.884.000**	
B.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Bontang	Jumlah Penyelesaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Perangkat Daerah	275 OP	882.210.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Bontang	Jumlah Penyelesaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Perangkat Daerah	275 OP	882.210.000	
B.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Bontang	Jumlah kasus yang telah selesai ditindaklanjuti	5 kasus	81.674.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Bontang	Jumlah kasus yang telah selesai ditindaklanjuti	5 kasus	81.674.000	
C.	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kota Bontang**	**1. Persentase kebijakan yang telah ditetapkan**	**100 Persen**	**1.123.763.833**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kota Bontang**	**1. Persentase kebijakan yang telah ditetapkan**	**100 Persen**	**1.123.763.833**	
			2. Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan	**100 Persen**				**2. Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan**	**100 Persen**		
C.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Bontang	Jumlah kebijakan pembinaan dan pengawasan	1 Kebijakan	45.672.228	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Bontang	Jumlah kebijakan pembinaan dan pengawasan	1 Kebijakan	45.672.228	

NO.	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KET.
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
C.2	Pendampingan dan Asistensi	Kota Bontang	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi pembinaan dan pengawasan	6 Kegiatan	1.078.091.605	Pendampingan dan Asistensi	Kota Bontang	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi pembinaan dan pengawasan	6 Kegiatan	1.078.091.605	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Renja Perubahan Inspektorat Daerah tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

1.1.1.TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berkaitan dengan kebijakan nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lnspektorat Daerah Kota Bontang selaku APIP, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka penetapan program dan kegiatan terkait pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan secara efisien dan efektif. Selain itu, terdapat kebijakan nasional yang mengamanatkan kepada Perangkat Daerah yang mengampu urusan pengawasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan untuk meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengamanatkan percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi.

Adapun arah kebijakan pemerintahan daerah urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah Pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya.
2. Pengawasan keuangan dan aset daerah
3. Pengawasan pengadaan barang/jasa
4. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
5. Peningkatan kapabilitas APIP secara bertahap
6. Pengawasan Reformasi Birokrasi
7. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) BPK dan APIP

Arah kebijakan pemerintah terkait pengawasan urusan pemerintah daerah dimaksud untuk mencapai target kinerja bidang Aparatur Negara pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Indikator Nasional Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	INSTANSI	TARGET 2025
1.	Peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota dengan capaian Indeks RB Kategori "B" ke atas	Pusat	70 %
2.	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Berintegritas dengan jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	KemenPANRB	500 unit kerja
3.	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel dengan Persentase K/L/D yang memiliki nilai Implementasi SAKIP "B" ke atas	Pusat	80 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat melalui Opini Laporan Keuangan WTP	Pusat	95 %
5.	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Nasional	KPK	4,14
6.	Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern Pemda dengan Persentase Kapabilitas APIP ≥ Level 3	BPKP	92,57 %
7.	Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern Pemda dengan Persentase Maturitas SPIP ≥ Level 3	BPKP	94,13 %

1.1.2. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis untuk melaksanakan visi dan misi di atas.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan pelaksanaan sasaran Misi 1 Kota Bontang tahun 2021—2026 adalah **misi pertama** dengan tujuan dan sasaran strategis terkait sebagai berikut:

Tabel 3.2
Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Menjadi Mandat Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Kota Bontang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
MISI 5 Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik				
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP Pemda	4
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	10
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Meningkatkan Integritas, Kompetensi, dan Profesional APIP	Peningkatan Kapabilitas APIP	4
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Bebas dari KKN	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Hasil Penilaian Integritas Pemda	85

Hasil telaahan kebijakan nasional dan provinsi serta review rancangan RKPD Kota Bontang tahun 2025 terhadap pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Telaahan Kebijakan Nasional, Kebijakan Provinsi, Review RKPD Kota Bontang dan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025

NO.	URAIAN	KEBIJAKAN NASIONAL TAHUN 2025	RKPD PROVINSI KALTIM DAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI KALTIM TAHUN 2025	RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2025	RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021—2026 PERIODE TAHUN 2025
1.	**Tema Pembangunan**	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Optimalisasi Diversifikasi Ekonomi Didukung Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Penguatan Daya Saing Investasi, Pariwisata dan UMKM melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Infrasturktur serta Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Intern Perangkat Daerah yang Berintegritas, Professional, dan Modern
2.	**Sasaran Prioritas Pembangunan**	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	a. Meningkatnya tata kelola intern perangkat daerah yang berintegritas. b. Meningkatnya kapasitas

NO.	URAIAN	KEBIJAKAN NASIONAL TAHUN 2025	RKPD PROVINSI KALTIM DAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI KALTIM TAHUN 2025	RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2025	RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021—2026 PERIODE TAHUN 2025
					sumber daya manusia yang profesional dan kualitas tata kelola organisasi yang modern.
3.	**Target Kinerja**				**Perspektif Eksternal**
		-	-	-	Indeks Pengawasan Internal berpredikat Baik
		-	-	-	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus berpredikat Baik
		Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Kota mencapai 95%	-	Opini BPK mencapai WTP	Indeks Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	URAIAN	KEBIJAKAN NASIONAL TAHUN 2025	RKPD PROVINSI KALTIM DAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI KALTIM TAHUN 2025	RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2025	RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021—2026 PERIODE TAHUN 2025
					atas LKPD mencapai 4 (WTP)
		Instansi Pemerintah Kota yang Akuntabel (Skor SAKIP "B" ke atas) mencapai 80%	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Kategori B sebanyak 7 Kab/Kota	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencapai skor B	Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja SKPD mencapai 3 (BB)
					Perspektif Internal
		Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 mencapai 94,13%	-	-	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang mencapai level 3
		Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 mencapai 92,57%	-	-	Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang mencapai Level 3
		Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Memiliki Nilai Indeks	-	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bontang mencapai BB	Persentase Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

NO.	URAIAN	KEBIJAKAN NASIONAL TAHUN 2025	RKPD PROVINSI KALTIM DAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI KALTIM TAHUN 2025	RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2025	RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021—2026 PERIODE TAHUN 2025
		Reformasi Birokrasi Baik (Kategori "B" ke atas) mencapai 55%			dengan kategori B ke atas 70,41 %
		-	-	-	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah kategori Sedang
		-	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat "Sangat Tinggi" dalam Evaluasi LPPD sebanyak 7 Kab/Kota	Nilai LPPD mencapai Sangat Tinggi	Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mencapai 3 (B)

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH

Memperhatikan hasil telaahan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan review RKPD Perubahan Kota Bontang tahun 2025, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 yang disusun masih relevan terhadap Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021—2026.

Sama halnya dengan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021—2026, perumusan tujuan dan sasaran Renja Perubahan Inspektorat Daerah tahun 2025 menggunakan perumusan strategi dari 2 (dua) perspektif yaitu perspektif Eksternal dan Internal.

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2025
TS.01 Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan intern Perangkat Darah yang berintegritas, profesional, dan modern	**a. Perspektif Eksternal**			
	IT.01.01 Indeks Reformasi Birokrasi **(Berpredikat BB)**	**SS.01.01** Meningkatnya tata kelola intern Perangkat Daerah yang berintegritas	**IKU.01.01.01** Persentase Pengawasan Perangkat Daerah	100%
	IT.01.02 Opini BPK **(Predikat WTP)**		**IK.01.01.02** Nilai capaian MCP Kota Bontang	95,50
			IK.01.01.073 Tingkat maturitas SPIP	Level 3

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2025
			IK.01.01.04 Persentase Pendampingan Perangkat Daerah yang Lulus Administrasi ZI	100%
			IKU.01.01.05 Rata-rata evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	BB (78,76)
	b. Perspektif Internal			
		SS.01.02 Meningkanya kapasitas SDM yang profesional dan kualitas tata kelola organisasi yang modern	**IK.01.02.01** Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	Level 3

Sama halnya dengan tahun 2024, Renja Perubahan Inspektorat Daerah tahun 2025 terdiri dari:

1. **Renja Pengawasan Tahunan (RKPT)** memuat program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan intern penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bontang sebagai acuan penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (RPPT) tahun 2025. RKPT menjadi rencana aksi (renaksi) mencapai target sasaran strategis **perspektif Eksternal**.

2. **Renja Penunjang Pengawasan Tahunan (RKPPT)** memuat program dan kegiatan operasional perkantoran secara rutin dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi SDM. RKPPT menjadi rencana aksi (renaksi) mencapai target sasaran strategis **perspektif Internal**.

Peta strategis Inspektorat Daerah tahun 2025 disajikan pada Gambar 3.1.

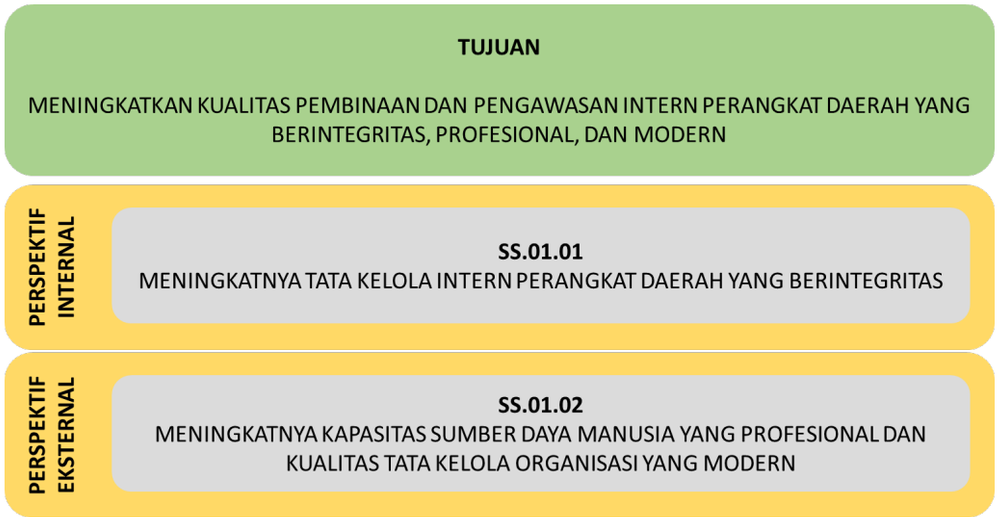

Gambar 3.1 Peta Strategis (*Strategy Map*) Inspektorat Daerah Tahun 2025

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Perubahan Inspektorat Daerah tahun 2025 menjadi upaya menjamin mutu (*quality assurance*) akuntabilitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2025 yang memenuhi unsur ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagai bagian dari misi pertama dalam pembangunan daerah, yaitu Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan. Hasil analisa kebutuhan program dan

kegiatan Perubahan Inspektorat Daerah tahun 2025 tidak memiliki perbedaan dengan rancangan RKPD Perubahan Kota Bontang tahun 2025, walaupun pagu anggaran pada Renja Perubahan tidak sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021—2026 dikarenakan perubahan kondisi struktur organisasi. Namun demikian, hal tersebut tidak mengubah substansi pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah tahun 2025.

Target kinerja fiskal Renja Perubahan Inspektorat Daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp21.601.181.745,00. Program yang dirancang oleh Inspektorat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Rincian Program Prioritas Inspektorat Daerah Tahun 2025

XXVIII. KECAMATAN BONTANG UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.5. LATAR BELAKANG

Inspektorat Daerah Kota Bontang adalah aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Bontang. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah bertugas untuk membantu wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah melalui kegiatan pengawasan intern Pemerintahan Daerah.

Pengawasan intern Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah bertujuan untuk memberikan nilai tambah kepada Perangkat Daerah atas efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian intern, dan proses tata kelola yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan pengawasan intern untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Agar peran pengawasan intern dimaksud dapat berjalan efektif dan akuntabel, maka Inspektorat Daerah sebagai organisasi publik pemerintah diharapkan lebih terbuka dan transparan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Strategis *(Strategic Plan)*, Rencana Kinerja *(Performance Plan)*, Rencana Kerja (*Work Plan*) serta laporan pertanggungjawaban kinerja *(Performance Accountability Report)*.

Fokus Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021—2026 menekankan pada peningkatan mutu tata kelola pembinaan dan pengawasan internal dan kapasitas sumber daya manusia APIP yang mampu meningkatkan

Fokus Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021—2026 menekankan pada peningkatan mutu tata kelola pembinaan dan pengawasan internal dan kapasitas sumber daya manusia APIP yang mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kota Bontang.

akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kota Bontang. Hal ini menjadi tujuan Inspektorat Daerah tahun 2021—2026 yakni **"Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Intern Perangkat Daerah yang Berintegritas, Professional, dan Modern"**.
Adapun sasaran tahun 2021—2026 adalah:

3. **Meningkatnya tata kelola intern perangkat daerah yang berintegritas.**
4. **Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang profesional dan kualitas tata kelola organisasi yang modern.**

Atas dasar fokus tersebut, ruang lingkup dan sasaran dalam sistem manajemen pengawasan intern Kota Bontang tahun 2021—2026 tidak hanya menitikberatkan pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (*compliance*) atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, tetapi juga difokuskan pada peningkatan manfaat (*outcome*) atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Bontang tahun 2021—2026. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan intern diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerugian dan pemborosan keuangan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025 merupakan salah satu unsur dari siklus tata kelola perencanaan pembangunan daerah. Renja Perubahan Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang menguraikan lebih rinci atas tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Renja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025 memiliki peran strategis dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

3. Renja Perubahan Inspektorat Daerah menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan dituangkan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan menentukan besarnya indikator kinerja fiskal dalam tata kelola keuangan daerah.
4. Renja Perubahan Inspektorat Daerah merupakan penjabaran tindakan operasional (*action plan*) dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) daerah.

Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025 mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan alur penyusunan sebagai berikut:

4. Renja Perubahan Inspektorat Daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan dan mengacu kebijakan

rencana pembangunan daerah oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan intern.

5. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Inspektorat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2021—2026.
6. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Inspektorat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*), dan indikator kinerja masukan (*outcome*).

Selain berperan sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bontang, Inspektorat Daerah juga masuk dalam organisasi profesi APIP yang tergabung dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Renja Perubahan Inspektorat Daerah menjadi salah satu acuan penyusunan rencana kegiatan audit/pengawasan intern tahunan yang akan ditetapkan menjadi Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (RPPT) Kota Bontang . Hal ini sesuai amanat dari Peraturan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia pada Standar Kinerja Angka 2010 yang menyatakan bahwa Pimpinan APIP harus menyusun perencanaan Pengawasan Intern berbasis risiko untuk menetapkan prioritas Pengawasan Intern sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan Pengawasan Intern disusun dengan dasar penilaian risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.

1.6. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

24. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
27. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
40. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
41. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2030;
42. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
43. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026;
44. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
45. Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2025;
46. Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

1.7. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kota Bontang Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Tujuan penyusunan dokumen ini adalah:

9. Acuan Inspektorat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.
10. Merumuskan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (RPPT) Kota Bontang selama tahun 2025.
11. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan.
12. Menyediakan satu pedoman jangka menengah untuk menentukan arah kebijakan pengawasan, dengan berdasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksi masa yang akan datang.
13. Menyediakan satu materi kemudahan bagi seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan strategi lima tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan.
14. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hubungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
15. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang .
16. Mengoptimalkan kerja sama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH S.D. TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s.d. Triwulan II dan Capaian Renstra PD

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah s.d. triwulan ke-2.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan penjelasan serta catatan penting terjadinya perbedaan tersebut.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, dan pagu indikatif

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang rencana kerja program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH S.D. TRIWULAN II TAHUN 2025

2.6 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S.D. TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Inspektorat Daerah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk melaksanakan 2 (dua) perspektif sasaran strategis yang didukung Renja Tahun 2025 terdiri dari 2 kelompok program kerja dengan perincian sebagai berikut:

3. Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) memuat program dan kegiatan utama (*core business*) pembinaan dan pengawasan intern penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bontang untuk melaksanakan sasaran strategis berperspektif pengguna layanan (*stakeholders*). RKPT tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) program prioritas pembangunan daerah yakni :

   3) Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:
      c. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
      d. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
   4) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:
      c. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
      d. Pendampingan dan Asistensi.

Renja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025 terdiri 2 (dua) kelompok program kerja yakni Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) dan Rencana Kerja Penunjang Pengawasan Tahunan (RKPPT)

   Adapun arah kebijakan pengawasan intern penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi acuan penetapan RPPT tahun 2025 adalah sebagai berikut:
      d. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan.
      e. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik.
      f. Penunjang pengawasan.

   RKPT tersebut merupakan rencana aksi (*action plan*) pelaksanaan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/43/ITDA/2025 tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah Tahun 2025.

4. Rencana Kerja Penunjang Pengawasan Tahunan (RKPPT) memuat program dan kegiatan operasional perkantoran secara rutin serta

kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi SDM. RKPPT menjadi rencana aksi (*action plan*) sasaran strategis berperspektif proses internal (*internal business process*) pertumbuhan dan pembelajaran (*learning and growth*) serta keuangan (*financial*) terdiri dari 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yakni:

g. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
h. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
i. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
j. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
k. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
l. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada pelaksanaan DPA Murni TA 2025, terdapat perubahan target fiskal Inspektorat Daerah sebagaimana tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Target efisiensi anggaran difokuskan pada beberapa belanja, antara lain:

a. pembatasan belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
b. pengurangan belanja perjalanan dinas;
c. pembatasan belanja honorarium mengacu pada Standar Harga Satuan Regional; dan
d. mengurangi belanja bersifat pendukung (*supporting*) dan tidak memiliki output yang terukur.

Rincian efisiensi anggaran Inspektorat Daerah TA 2025 tersaji sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Rincian Efisiensi Anggaran Inspektorat Daerah TA 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		Efisiensi	
		Murni TA 2025	Pergeseran TA 2025 (Efisiensi)	Rp	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**22.499.100.720,00**	**19.481.287.343,00**	**3.017.813.377,00**	**13,41**
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.618.179.254,00	13.618.179.254,00	0,00	0,00
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.933.680.000,00	1.636.005.000,00	2.297.675.000,00	58,41
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.084.577.176,00	1.375.009.799,00	709.567.377,00	34,04
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.192.706.890,00	2.182.135.890,00	10.571.000,00	0,48
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.129.400,00	193.129.400,00	0,00	0,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		Efisiensi	
		Murni TA 2025	Pergeseran TA 2025 (Efisiensi)	Rp	%
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.828.000,00	476.828.000,00	0,00	0,00
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1.631.925.800,00**	**967.307.800,00**	**664.618.000,00**	**40,73**
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.488.279.040,00	884.949.040,00	603.330.000,00	40,54
b	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	143.646.760,00	82.358.760,00	61.288.000,00	42,67
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**2.040.272.212,00**	**1.152.586.602,00**	**887.685.610,00**	**43,51**
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	45.672.228,00	45.672.228,00	0,00	0,00
b	Pendampingan dan Asistensi	1.994.599.984,00	1.106.914.374,00	887.685.610,00	44,50
T O T A L		**26.171.298.732,00**	**21.601.181.745,00**	**4.570.116.987,00**	**17,46**

Hasil evaluasi menunjukkan target kinerja fiskal Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp21.601.181.745,00 terealisasi s.d. Juni 2025 sebesar Rp10.282.404.373,00 atau tercapai 47,60% disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja Fiskal Renja Inspektorat Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT)	2.119.894.402,00	872.056.599,00	41,14
2	Rencana Kerja Penunjang Pengawasan Tahunan (RKPPT)	19.481.287.343,00	9.410.347.774,00	48,30
T O T A L		**21.601.181.745,00**	**10.282.404.373,00**	**47,60**

Hasil evaluasi menunjukkan beberapa kendala dalam pencapaian target tahun 2025 sebagai berikut:

7. Jumlah APIP yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan dan standar kompetensi pegawai pada pelaksanaan pendidikan professional berkelanjutan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi masih terbatas, yang mana belum memenuhi standar yang ditentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 yaitu Pendidikan Profesional Berkelanjutan minimal 120 jam/tahun. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang diperuntukkan untuk meningkatkan

kompetensi dan kecakapan melalui pengembangan profesi berkelanjutan.

8. Realisasi laporan hasil pembinaan dan pengawasan belum sepenuhnya sesuai RPPT Kota Bontang Tahun 2025 karena adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang harus dilaksanakan di luar RPPT, diantaranya pelaksanaan mandatory dari Korsupgah KPK, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian/Lembaga Lainnya.
9. Perangkat Daerah belum menanamkan budaya sadar risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Belum terintegrasinya implementasi pembinaan dan pengawasan yang berbasis digital.
11. Sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan dan pengawasan yang masih terbatas.
12. Masih rendahnya pelaksanaan pencegahan dan Pendidikan budaya anti korupsi pada Perangkat Daerah dan *stakeholders*.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

6. Meningkatkan efektivitas evaluasi pelaksanaan analisa kebutuhan diklat (AKD) dan standar kompetensi pegawai
7. Memutakhirkan data penilaian risiko dalam rangka penyusunan RPPT berbasis risiko serta berpedoman pada beberapa peraturan terkait *mandatory* pengawasan internal.
8. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye budaya sadar risiko dan budaya anti korupsi kepada Perangkat Daerah dan stakeholders dalam melaksanakan program dan kegiatan.
9. Meningkatkan implementasi pembinaan dan pengawasan yang berbasis digital secara terintegrasi.
10. Pemenuhan Sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan dan pengawasan.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 s.d. Triwulan II Inspektorat Daerah Kota Bontang

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
											I		II					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1						2	3	4	5		6		7		8 = 6 + 7		9 = 8 / 5	
6						**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**												
6	**01**					**INSPEKTORAT DAERAH**				**22.370.617.101**		**5.498.182.655**		**4.784.221.718**		**10.282.404.373**		**45,96**
6	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100**	**19.481.287.343**	**25**	**5.119.773.910**	**25**	**4.290.573.864**	**50**	**9.410.347.774**	**50,00**	**48,30**
6	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**13.618.179.254**	**25**	**3.271.475.670**	**25**	**3.427.419.635**	**50**	**6.698.895.305**	**50,00**	**49,19**
6	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	55	13.618.179.254	54	3.271.475.670	57	3.427.419.635	57	6.698.895.305	103,64	49,19
6	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**1.636.005.000**	**25**	**536.547.057**	**25**	**212.647.612**	**50**	**749.194.669**	**50,00**	**45,79**
6	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	226.770.000	2	103.490.850	0	0	2	103.490.850	66,67	45,64
6	01	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	59	1.409.235.000	56	433.056.207	58	212.647.612	114	645.703.819	193,22	45,82
6	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**	**Persen**	**100**	**1.375.009.799**	**25**	**401.748.663**	**25**	**413.842.379**	**50**	**815.591.042**	**50,00**	**59,32**
6	01	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	77.321.115	3	66.263.225	1	2.200.000	4	68.463.225	80,00	88,54
6	01	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	63.081.676	1	9.490.000	1	6.897.540	2	16.387.540	40,00	25,98
6	01	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	58.736.625	1	15.878.495	1	24.193.220	2	40.071.715	66,67	68,22

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
											I		II					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1						2	3	4	5		6		7		8 = 6 + 7		9 = 8 / 5	
6	01	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	43.766.039	1	3.202.000	1	4.300.000	2	7.502.000	50,00	17,14
6	01	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	8.000.000	15	0	15	1.980.000	30	1.980.000	50,00	24,75
6	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	967.808.000	3	306.914.943	3	326.457.259	6	633.372.202	50,00	65,44
6	01	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	156.296.344	0	0	1	47.814.360	1	47.814.360	100,00	30,59
6	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**	**2.182.135.890**	**25**	**750.552.000**	**25**	**70.818.000**	**50**	**821.370.000**	**50,00**	**37,64**
6	01	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	4	812.538.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	239.175.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	01	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	32	1.005.961.890	36	750.552.000	4	70.818.000	40	821.370.000	125,00	81,65
6	01	01	2	07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	3	124461000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran**	**Persen**	**100**	**193.129.400**	**25**	**46.062.980**	**25**	**36.881.320**	**50**	**82.944.300**	**50,00**	**42,95**
6	01	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.800.000	0	0	1	192.000	1	192.000	100,00	10,67
6	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	48.000.000	3	11.322.000	3	11.322.000	6	22.644.000	50,00	47,18
6	01	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	19	40.219.000	3	6.345.000	3	8.950.000	6	15.295.000	31,58	38,03

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
											I		II					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1						2	3	4	5		6		7		8 = 6 + 7		9 = 8 / 5	
6	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	103.110.400	3	28.395.980	3	16.417.320	6	44.813.300	50,00	43,46
6	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**Persen**	**100**	**476.828.000**	**25**	**113.387.540**	**25**	**128.964.918**	**50**	**242.352.458**	**50,00**	**50,83**
6	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	476.828.000	20	113.387.540	16	128.964.918	36	242.352.458	124,14	50,83
6	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko**	**Persen**	**80**	**1.765.526.200**	**15**	**203.494.397**	**30**	**173.068.839**	**45**	**376.563.236**	**56,25**	**21,33**
6	**01**	**02**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah penyelesaian pembinaan dan pengawasan internal perangkat daerah**	**Obinas**	**275**	**1.647.808.200**	**114**	**194.473.063**	**65**	**173.068.839**	**179**	**367.541.902**	**65,09**	**22,30**
6	01	02	2	01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	96	452.030.000	9	41.582.473	45	69.678.749	54	111.261.222	56,25	24,61
6	01	02	2	01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	110	878.048.200	52	64.535.923	8	43.213.773	60	107.749.696	54,55	12,27
6	01	02	2	01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	17.850.000	2	5.933.000	0	0	2	5.933.000	100,00	33,24
6	01	02	2	01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	31	99.960.000	10	67.733.667	0	0	10	67.733.667	32,26	67,76
6	01	02	2	01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	10	199.920.000	41	14.688.000	12	60.176.317	53	74.864.317	530,00	37,45
6	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah kasus yang telah selesai ditindaklanjuti**	**Kasus**	**5**	**117.718.000**	**1**	**9.021.334**	**1**	**0**	**2**	**9.021.334**	**40,00**	**7,66**
6	01	02	2	02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	5	117.718.000	1	9.021.334	1	0	2	9.021.334	40,00	7,66
6	**01**	**03**				**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan**	**Persen**	**100**	**1.123.803.558**	**100**	**174.914.348**	**100**	**320.579.015**	**100**	**495.493.363**	**100,00**	**44,09**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
											I		II					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1						2	3	4	5		6		7		8 = 6 + 7		9 = 8 / 5	
							Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan	**Persen**	**95**		**100**		**100**		**100**		**105,26**	
6	**01**	**03**	**2**	**01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah kebijakan pembinaan dan pengawasan**	**Kebijakan**	**1**	**52.980.816**	**1**	**12.760.000**	**0**	**12.683.000**	**1**	**25.443.000**	**100,00**	**48,02**
6	01	03	2	01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	52.980.816	1	12.760.000	1	12.683.000	2	25.443.000	200,00	48,02
6	**01**	**03**	**2**	**02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Kegiatan pendampingan dan asistensi pembinaan dan pengawasan**	**Kegiatan**	**20**	**1.070.822.742**	**5**	**162.154.348**	**5**	**307.896.015**	**10**	**470.050.363**	**50,00**	**43,90**
6	01	03	2	02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	31	419.588.000	3	105.334.680	31	103.770.702	34	209.105.382	109,68	49,84
6	01	03	2	02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	31	132.472.000	31	19.261.200	31	63.783.533	62	83.044.733	200,00	62,69
6	01	03	2	02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	16	518.762.742	2	37.558.468	6	140.341.780	8	177.900.248	50,00	34,29

2.7 ANALISA KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah telah menyusun peta strategis berdasarkan *balanced scorecard* yang terdiri dari 2 (dua) perspektif yaitu perspektif eksternal dan internal. Peta strategis tersebut dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Inspektorat Daerah tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Inspektorat Daerah untuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan antara lain:

12. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja.
13. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (ADPPK) program terintegrasi secara berkala.
14. Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh perangkat daerah terkait secara berkala.
15. Mendorong penerapan reformasi birokrasi Kota Bontang yang efektif.
16. Mendorong implementasi SAKIP Kota Bontang yang efektif.
17. Menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis risiko (*risk-based performance management system*).
18. Menerapkan sistem tata kelola pengawasan intern berbasis risiko (*risk-based internal audit management system*).
19. Mengoptimalkan peran Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (UP2LKPUPD) Kota Bontang.
20. Meningkatkan kendali mutu dan penjaminan mutu (*quality control and quality assurance*) atas pelaksanaan kegiatan pengawasam intern secara efektif.
21. Proses bisnis Inspektorat Daerah Kota Bontang berbasis teknologi informasi komunikasi yang modern (*business process based on modern information communication technology*).
22. Melakukan publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bontang kepada masyarakat.

2.8 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 345 menyebutkan pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari manajemen pelayanan publik. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak dinamis mengikuti kebutuhan zaman. Kegiatan pengawasan intern tidak lagi terbatas pada pemeriksaan pada akhir periode tahun anggaran saja (*post audit*), tetapi harus dilakukan pada seluruh proses pengelolaan APBD yang sedang berlangsung. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 380 mengatur bahwa kegiatan

pengawasan intern yang terkait keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

Fokus pengawasan intern Inspektorat Daerah tidak hanya ditujukan pada aspek pengelolaan keuangan negara, namun secara bertahap terus disempurnakan dan areanya diperluas pada pengawasan kinerja dalam rangka pemantapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Bontang untuk mencapai tujuan otonomi daerah yakni meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

6. Mandatory pengawasan dari instansi pusat, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, BPKP, dan KPK yang meningkat setiap tahun tanpa diimbangi dengan peningkatan jumlah kuantitas APIP.
7. Mandatory pendidikan dan pelatihan APIP sebanyak 120 jam/tahun sebagai upaya peningkatan kapabilitas APIP.
8. Belum optimalnya implementasi penyelenggaraan RB, SAKIP, SPIP, MR, dan kegiatan pencegahan korupsi pada Perangkat Daerah.
9. Kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaannya lebih optimal.
10. Optimalisasi pengawasan berbasis digital seiring berkembangnya penggunaan data dan teknologi informasi.

Untuk itu, Inspektorat Daerah harus menyusun rencana aksi (*action plan*) meliputi:

6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang meliputi audit, reviu, monitoring, evaluasi, pendampingan, asistensi, dan konsultansi secara berkala berbasis risiko.
7. Mengikutsertakan APIP pada Pendidikan dan pelatihan profesional yang berkelanjutan.
8. Melakukan pendampingan penyelenggaraan RB, SAKIP, SPIP, MR, dan kegiatan pencegahan korupsi pada Perangkat Daerah dan stakeholders secara berkala.
9. Mengalokasikan anggaran pada pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pembinaan dan pengawasan.
10. Mengintegrasikan aplikasi pembinaan dan pengawasan berbasis digital secara menyeluruh.

2.9 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Bontang 2021—2026 yang merupakan visi kepemimpinan daerah terpilih yaitu **“Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih HEBAT dan BERADAB”**.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah tersebut, arah dan kebijakan pembangunan akan dijawantahkan melalui tiga misi pembangunan daerah sebagai berikut:

4. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan.
5. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.
6. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang tahun 2025 mengangkat tema **"Penguatan Daya Saing Investasi, Pariwisata dan UMKM melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Infrasturktur serta Pelestarian Lingkungan Hidup"**. Prioritas pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2025 terdiri dari:

5. Pengembangan dan peningkatan daya saing ekonomi, khususnya pada sektor investasi, pariwisara dan UMKM;
6. Pengembangan daya saing SDM yang unggul dan berkualitas;
7. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pemantapan prasarana infrastuktur dasar;
8. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Sasaran dan program prioritas pembangunan daerah Kota Bontang Tahun 2025 yang menjadi mandat Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Terkait Fungsi dan Tugas Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	c. Opini BPK	WTP
	d. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bontang	BB (70,41)

Hasil analisis kebutuhan Renja Perubahan Inspektorat Daerah menyesuaikan dengan rancangan awal RKPD Perubahan Kota Bontang tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025

NO.	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KET.
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bontang**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**19.513.533.912**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Bontang**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**19.513.533.912**	
A.1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100 Persen	13.618.179.254	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah	100 Persen	13.618.179.254	
A.2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	1.520.515.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	1.520.515.000	
A.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan admnistrasi perkantoran	100 Persen	1.513.232.887	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan admnistrasi perkantoran	100 Persen	1.513.232.887	
A.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.151.392.144	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.151.392.144	
A.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100 Persen	197.269.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran	100 Persen	197.269.400	

NO.	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KET.
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
A.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 Persen	512.945.227	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 Persen	512.945.227	
B.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kota Bontang**	**Cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko**	**78 Persen**	**963.884.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kota Bontang**	**Cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko**	**78 Persen**	**963.884.000**	
B.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Bontang	Jumlah Penyelesaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Perangkat Daerah	275 OP	882.210.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Bontang	Jumlah Penyelesaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Perangkat Daerah	275 OP	882.210.000	
B.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Bontang	Jumlah kasus yang telah selesai ditindaklanjuti	5 kasus	81.674.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Bontang	Jumlah kasus yang telah selesai ditindaklanjuti	5 kasus	81.674.000	
C.	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kota Bontang**	**1. Persentase kebijakan yang telah ditetapkan**	**100 Persen**	**1.123.763.833**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kota Bontang**	**1. Persentase kebijakan yang telah ditetapkan**	**100 Persen**	**1.123.763.833**	
			2. Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan	**100 Persen**				**2. Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan**	**100 Persen**		
C.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Bontang	Jumlah kebijakan pembinaan dan pengawasan	1 Kebijakan	45.672.228	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Bontang	Jumlah kebijakan pembinaan dan pengawasan	1 Kebijakan	45.672.228	

NO.	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KET.
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
C.2	Pendampingan dan Asistensi	Kota Bontang	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi pembinaan dan pengawasan	6 Kegiatan	1.078.091.605	Pendampingan dan Asistensi	Kota Bontang	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi pembinaan dan pengawasan	6 Kegiatan	1.078.091.605	

2.10 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Renja Perubahan Inspektorat Daerah tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.4. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.4.1.TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berkaitan dengan kebijakan nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lnspektorat Daerah Kota Bontang selaku APIP, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka penetapan program dan kegiatan terkait pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan secara efisien dan efektif. Selain itu, terdapat kebijakan nasional yang mengamanatkan kepada Perangkat Daerah yang mengampu urusan pengawasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan untuk meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengamanatkan percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi.

Adapun arah kebijakan pemerintahan daerah urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah Pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

8. Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya.
9. Pengawasan keuangan dan aset daerah
10. Pengawasan pengadaan barang/jasa
11. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
12. Peningkatan kapabilitas APIP secara bertahap
13. Pengawasan Reformasi Birokrasi
14. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) BPK dan APIP

Arah kebijakan pemerintah terkait pengawasan urusan pemerintah daerah dimaksud untuk mencapai target kinerja bidang Aparatur Negara pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Indikator Nasional Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	INSTANSI	TARGET 2025
1.	Peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/Kota dengan capaian Indeks RB Kategori "B" ke atas	Pusat	70 %
2.	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Berintegritas dengan jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis	KemenPANRB	500 unit kerja
3.	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel dengan Persentase K/L/D yang memiliki nilai Implementasi SAKIP "B" ke atas	Pusat	80 %
4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat melalui Opini Laporan Keuangan WTP	Pusat	95 %
5.	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Nasional	KPK	4,14
6.	Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern Pemda dengan Persentase Kapabilitas APIP ≥ Level 3	BPKP	92,57 %
7.	Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern Pemda dengan Persentase Maturitas SPIP ≥ Level 3	BPKP	94,13 %

3.4.2. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis untuk melaksanakan visi dan misi di atas.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan pelaksanaan sasaran Misi 1 Kota Bontang tahun 2021—2026 adalah **misi pertama** dengan tujuan dan sasaran strategis terkait sebagai berikut:

Tabel 3.2
Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Menjadi Mandat Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Kota Bontang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
MISI 5 Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik				
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP Pemda	4
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	10
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Meningkatkan Integritas, Kompetensi, dan Profesional APIP	Peningkatan Kapabilitas APIP	4
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Bebas dari KKN	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Hasil Penilaian Integritas Pemda	85

Hasil telaahan kebijakan nasional dan provinsi serta review rancangan RKPD Kota Bontang tahun 2025 terhadap pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Telaahan Kebijakan Nasional, Kebijakan Provinsi, Review RKPD Kota Bontang dan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025

NO.	URAIAN	KEBIJAKAN NASIONAL TAHUN 2025	RKPD PROVINSI KALTIM DAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI KALTIM TAHUN 2025	RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2025	RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021—2026 PERIODE TAHUN 2025
1.	**Tema Pembangunan**	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Optimalisasi Diversifikasi Ekonomi Didukung Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Penguatan Daya Saing Investasi, Pariwisata dan UMKM melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Infrasturktur serta Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Intern Perangkat Daerah yang Berintegritas, Professional, dan Modern
2.	**Sasaran Prioritas Pembangunan**	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	c. Meningkatnya tata kelola intern perangkat daerah yang berintegritas. d. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang profesional dan

NO.	URAIAN	KEBIJAKAN NASIONAL TAHUN 2025	RKPD PROVINSI KALTIM DAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI KALTIM TAHUN 2025	RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2025	RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021—2026 PERIODE TAHUN 2025
					kualitas tata kelola organisasi yang modern.
3.	**Target Kinerja**				**Perspektif Eksternal**
		-	-	-	Indeks Pengawasan Internal berpredikat Baik
		-	-	-	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus berpredikat Baik
		Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Kota mencapai 95%	-	Opini BPK mencapai WTP	Indeks Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah atas LKPD mencapai 4 (WTP)
		Instansi Pemerintah Kota yang Akuntabel (Skor SAKIP “B” ke atas) mencapai 80%	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Kategori B sebanyak 7 Kab/Kota	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencapai skor B	Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja SKPD mencapai 3 (BB)

NO.	URAIAN	KEBIJAKAN NASIONAL TAHUN 2025	RKPD PROVINSI KALTIM DAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI KALTIM TAHUN 2025	RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2025	RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021—2026 PERIODE TAHUN 2025
					Perspektif Internal
		Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3 mencapai 94,13%	-	-	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang mencapai level 3
		Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 mencapai 92,57%	-	-	Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang mencapai Level 3
		Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori “B” ke atas) mencapai 55%	-	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bontang mencapai BB	Persentase Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan kategori B ke atas 70,41 %
		-	-	-	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah kategori Sedang

NO.	URAIAN	KEBIJAKAN NASIONAL TAHUN 2025	RKPD PROVINSI KALTIM DAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI KALTIM TAHUN 2025	RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2025	RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021—2026 PERIODE TAHUN 2025
		-	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat "Sangat Tinggi" dalam Evaluasi LPPD sebanyak 7 Kab/Kota	Nilai LPPD mencapai Sangat Tinggi	Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mencapai 3 (B)

5.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT DAERAH

Memperhatikan hasil telaahan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan review RKPD Perubahan Kota Bontang tahun 2025, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 yang disusun masih relevan terhadap Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021—2026.

Sama halnya dengan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021—2026, perumusan tujuan dan sasaran Renja Perubahan Inspektorat Daerah tahun 2025 menggunakan perumusan strategi dari 2 (dua) perspektif yaitu perspektif Eksternal dan Internal.

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2025
TS.01 Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan intern Perangkat Darah yang berintegritas, profesional, dan modern	**a. Perspektif Eksternal**			
	IT.01.01 Indeks Reformasi Birokrasi **(Berpredikat BB)**	**SS.01.01** Meningkatnya tata kelola intern Perangkat Daerah yang berintegritas	**IKU.01.01.01** Persentase Pengawasan Perangkat Daerah	100%
	IT.01.02 Opini BPK **(Predikat WTP)**		**IK.01.01.02** Nilai capaian MCP Kota Bontang	95,50
			IK.01.01.073 Tingkat maturitas SPIP	Level 3
			IK.01.01.04 Persentase Pendampingan Perangkat Daerah yang Lulus Administrasi ZI	100%
			IKU.01.01.05 Rata-rata evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	BB (78,76)
	b. Perspektif Internal			
		SS.01.02 Meningkanya kapasitas SDM yang profesional dan kualitas tata kelola	**IK.01.02.01** Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	Level 3

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2025
		organisasi yang modern		

Sama halnya dengan tahun 2024, Renja Perubahan Inspektorat Daerah tahun 2025 terdiri dari:

3. **Renja Pengawasan Tahunan (RKPT)** memuat program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan intern penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bontang sebagai acuan penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (RPPT) tahun 2025. RKPT menjadi rencana aksi (renaksi) mencapai target sasaran strategis **perspektif Eksternal**.

4. **Renja Penunjang Pengawasan Tahunan (RKPPT)** memuat program dan kegiatan operasional perkantoran secara rutin dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi SDM. RKPPT menjadi rencana aksi (renaksi) mencapai target sasaran strategis **perspektif Internal**.

Peta strategis Inspektorat Daerah tahun 2025 disajikan pada Gambar 3.1.

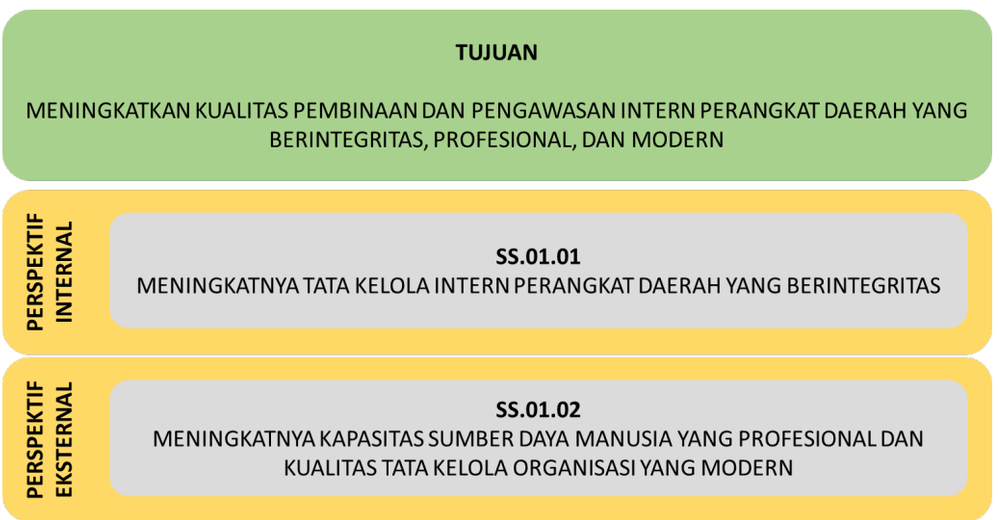

Gambar 3.1 Peta Strategis (*Strategy Map*) Inspektorat Daerah Tahun 2025

5.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Perubahan Inspektorat Daerah tahun 2025 menjadi upaya menjamin mutu (*quality assurance*) akuntabilitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2025 yang memenuhi unsur ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel,

dan partisipatif sebagai bagian dari misi pertama dalam pembangunan daerah, yaitu Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan. Hasil analisa kebutuhan program dan kegiatan Perubahan Inspektorat Daerah tahun 2025 tidak memiliki perbedaan dengan rancangan RKPD Perubahan Kota Bontang tahun 2025, walaupun pagu anggaran pada Renja Perubahan tidak sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021—2026 dikarenakan perubahan kondisi struktur organisasi. Namun demikian, hal tersebut tidak mengubah substansi pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah tahun 2025.

Target kinerja fiskal Renja Perubahan Inspektorat Daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp21.601.181.745,00. Program yang dirancang oleh Inspektorat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Rincian Program Prioritas Inspektorat Daerah Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 TentangPerubahan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Bontang Utara yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perubahan Kecamatan Bontang Utara adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bontang Utara 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Bontang Utara mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan akhir RKPD.

Program/kegiatan/sub kegiatan dari perkembangan situasi dan kondisi terkini yang dihadapi perangkat daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang diusulkan menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perancanaan lainnya, maka Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai koordinator tim penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025, melakukan pembahasan yang mencakup:

- Penentuan kegiatan prioritas yang disesuaikan dari Rencana Strategis 2021 – 2026;
- Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Kota BontangTahun 2025
- Rumusan-rumusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025
- Dokumen kebutuhan perencanaan lainnya.

1.2.LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 adalah :

1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245: Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara;
6) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6987);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 dan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No.42; Tambahan Lembaran Negara No. 6322);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;

13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

21) Instruksi Mendagri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

22) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2; Noreg Peraturan Daerah Kalimantan Timur: (2-98/2019);

23) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 17);

24) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025;

25) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

26) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039;

27) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Thn 2021

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Kota Bontang Tahun 2021-2026;

28) Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah;

29) Peraturan Walikota Bontang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Kota Bontang Tahun 2025 Nomor 18);

30) Keputusan Walikota Bontang Nomor 171 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 421 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bontang Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.
Sedangkan Tujuannya adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh PD
3. Menjamin kesesuian kegiatan lanjutan maupun baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4.SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan, pagu dana indikatif dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan pencapaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksaaan Ranhir Renja dan Rencana Tindak lanjut Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BONTANG UTARA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perubahan Tahun 2025 pada Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi kinerja terhadap pencaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara umum, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Utara adalah menyusun serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Utara adalah menyusun serta mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Adapun capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Lingkungan Kecamatan Bontang Utara Triwulan II Tahun 2025 dapat disampaikan bahwa Anggaran Tahun 2025 di Lingkungan Kecamatan Bontang Utara sebesar Rp. 99.150.861.991,00 yang terdiri atas 5 (lima) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan, serta 141 (Seratus Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.40.225.738.751,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 40,57% sedangkan dengan capaian realisasi kinerja fisik sebesar 48,30%. Data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Realisasi Keuangan dan Fisik Triwulan II

Kecamatan Bontang Utara Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi Keuangan (Rp)		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
		Akuntansi	SKPD		
	Belanja :			40,57 %	Hasil rekonsiliasi realisasi keuangan TW II
1.	**Belanja Operasi**	**27.734.579.611**	**27.734.579.611**		
	- Belanja Pegawai	12.526.504.332	12.526.504.332		
	- Belanja Barang dan Jasa	15.208.075.279	15.208.075.279		
2.	**Belanja Modal**	**12.491.159.140**	**12.491.159.140**		
	Jumlah	**40.225.738.751**	**40.225.738.751**		

Sumber : Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Belanja TW II

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan hingga akhir tahun 2025, maka diharapkan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Lingkungan Kecamatan Bontang Utara dapat tercapai sesuai target.

Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Bontang Utara Tahun 2024 pada umumnya tercapai dengan baik adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

Realisasi Anggaran Kecamatan Bontang Utara Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA BONTANG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5	**BELANJA DAERAH**	144.015.620.374	140.079.390.283		3.908.260.531
5.1	**BELANJA OPERASI**	103.925.049.826	100.894.932.886	97,08	3.002.147.380
5.1.01	**Belanja Pegawai**	22.494.744.314	22.181.511.443	98,61	313.232.871
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	81.430.305.512	78.713.421.443	96,66	2.688.914.509
5.2	**BELANJA MODAL**	40.090.570.548	39.184.457.397	97,74	906.113.151
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	8.921.026.080	8.528.717.609	95,60	392.308.471
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	6.298.530.280	6.237.363.195	99,03	61.167.085
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	24.871.014.188	24.418.376.593	98,18	452.637.595

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	-	-		-
Kecamatan Bontang Utara		41.388.164.249	40.357.710.777	97,51	1.030.453.472
7.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.762.387.104	34.867.811.214	97,50	894.575.890
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.281.734.314	21.971.909.943	98,61	309.824.371
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.347.250.946	6.277.661.808	98,90	69.589.138
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	635.279.460	633.033.482	99,65	2.245.978
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	296.525.000	287.930.000	97,10	8.595.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	270.865.000	218.235.000	80,57	52.630.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	394.423.465	381.653.400	96,76	12.770.065
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.955.648	9.023.850	75,48	2.931.798
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	186.062	86.423	46,45	99.639
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	659.784.698	647.341.319	98,11	12.443.379

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	16.382.051	12.783.851	78,04	3.598.200
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	42.446.443	38.351.853	90,35	4.094.590
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-		-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.589.284.971	6.505.451.018	98,73	83.833.953
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	-	-		-
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	6.778.420.080	6.724.199.849	99,20	54.220.231
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	238.930.490	236.158.090	98,84	2.772.400
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	862.960.875	848.132.500	98,28	14.828.375
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.610.000	1.610.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	99.577.388	94.347.500	94,75	5.229.888
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	35.619.759	34.720.000	97,47	899.759

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	9.719.128	9.680.000	99,60	39.128
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	90.000.000	88.200.000	98,00	1.800.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	349.500.000	348.335.000	99,67	1.165.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	78.000.000	77.220.000	99,00	780.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	135.254.600	131.960.000	97,56	3.294.600
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	63.000.000	61.380.000	97,43	1.620.000
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	720.212.000	702.401.088	97,53	17.810.912
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	254.350.000	240.350.000	94,50	14.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	465.862.000	462.051.088	99,18	3.810.912
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.818.045	11.791.000	99,77	27.045
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	10.128.045	10.101.000	99,73	27.045

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.687.251.622	1.635.717.500	96,95	51.534.122
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.910.000	1.910.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	143.092.245	140.437.500	98,14	2.654.745
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	56.449.200	55.000.000	97,43	1.449.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	17.524.500	15.000.000	85,59	2.524.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	90.203.905	85.800.000	95,12	4.403.905
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.489.500	1.375.000	92,31	114.500
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	200.000.000	198.000.000	99,00	2.000.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.693.735	3.400.000	92,05	293.735
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	131.972.161	124.500.000	94,34	7.472.161
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	244.349.547	237.450.000	97,18	6.899.547
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	95.901.603	95.200.000	99,27	701.603

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	58.424.093	58.030.000	99,33	394.093
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.183.028	5.150.000	99,36	33.028
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	887.805	885.000	99,68	2.805
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	397.252.552	379.700.000	95,58	17.552.552
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	130.346.088	127.800.000	98,05	2.546.088
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	17.167.340	16.400.000	95,53	767.340
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.649.170	44.605.160	95,62	2.044.010
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	9.346.000	8.950.000	95,76	396.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	35.613.170	33.965.160	95,37	1.648.010
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.150.948	108.078.900	98,12	2.072.048

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	70.561.073	69.313.900	98,23	1.247.173
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	37.699.875	36.875.000	97,81	824.875
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.680.000	1.665.000	99,11	15.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.680.000	1.665.000	99,11	15.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.022.946.000	958.671.598	93,72	64.274.402
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.910.000	1.910.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	170.200.000	110.532.000	64,94	59.668.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	850.156.000	845.549.598	99,46	4.606.402
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	460.262.000	321.500.000	69,85	138.762.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	292.848.000	177.500.000	60,61	115.348.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	165.524.000	142.110.000	85,85	23.414.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-		-
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	201.152.500	199.250.000	99,05	1.902.500
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28.700.000	28.267.000	98,49	433.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	170.562.500	169.093.000	99,14	1.469.500
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	165.730.078	155.290.000	93,70	10.440.078
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	64.763.190	61.200.000	94,50	3.563.190
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	14.874.234	14.600.000	98,16	274.234
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	84.402.654	77.800.000	92,18	6.602.654
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.810.000	242.490.059	80,88	57.319.941
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.410.000	1.410.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000	1.051.684	43,82	1.348.316
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.000.000	2.845.875	47,43	3.154.125
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	216.000.000	191.782.500	88,79	24.217.500
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	74.000.000	45.400.000	61,35	28.600.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.244.505.552	7.127.384.796	98,38	117.120.756
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.014.240.000	4.930.871.850	98,34	83.368.150
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.991.466.000	1.985.760.000	99,71	5.706.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	213.285.200	191.383.504	89,73	21.901.696

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.339.712	8.586.035	75,72	2.753.677
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	14.174.640	10.783.407	76,08	3.391.233
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	279.156.000	231.643.900	82,98	47.512.100
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	201.648.000	161.764.200	80,22	39.883.800
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	56.040.000	54.606.700	97,44	1.433.300
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.578.000	13.383.000	68,36	6.195.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	4.121.300	41,21	5.878.700
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000	4.121.300	41,21	5.878.700
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.940.000	16.675.000	53,89	14.265.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	29.250.000	14.985.000	51,23	14.265.000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.518.000	193.647.000	99,04	1.871.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28.700.000	28.267.000	98,49	433.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	164.928.000	163.490.000	99,13	1.438.000
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.910.000	92.836.470	71,46	37.073.530
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	46.470.000	34.325.370	73,87	12.144.630
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	40.150.000	31.285.350	77,92	8.864.650

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	41.400.000	25.335.750	61,20	16.064.250
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	519.707.200	496.838.913	95,60	22.868.287
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.610.000	1.610.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	15.799.618	14.210.423	89,94	1.589.195
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	969.590	800.000	82,51	169.590
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.441.992	843.200	58,47	598.792
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-		-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	103.674.000	103.674.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000	4.800.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000	6.000.000	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	108.000.000	108.000.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	112.800.000	103.801.440	92,02	8.998.560
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	72.150.000	61.250.000	84,89	10.900.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	91.782.000	91.169.850	99,33	612.150
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	573.114.251	572.426.852	99,88	687.399
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.610.000	1.610.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	730.110	666.000	91,22	64.110
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.200.000	21.912.000	98,70	288.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	24.420.000	24.111.200	98,74	308.800
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-		-
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.000.000	13.000.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-		-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	204.000.000	204.000.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	304.674.000	304.671.652	100,00	2.348
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-		-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.800.141	1.776.000	98,66	24.141
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-		-
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	61.877.674	59.390.500	95,98	2.487.174
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.787.674	3.493.500	92,23	294.174
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.240.000	19.032.000	98,92	208.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	25.350.000	24.765.000	97,69	585.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.500.000	4.100.000	74,55	1.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000	8.000.000	100,00	-
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	173.815.000	169.685.000	97,62	4.130.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	75.291.275	73.149.000	97,15	2.142.275
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	12.265.725	11.400.000	92,94	865.725
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	84.568.000	83.446.000	98,67	1.122.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.057.852.299	2.976.174.764	97,33	81.677.535
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.910.000	1.910.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.894.414	5.692.800	96,58	201.614
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.808.132	5.808.000	100,00	132
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	46.843.472	45.670.000	97,49	1.173.472
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	24.658.800	24.160.000	97,98	498.800
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	6.371.820	6.336.000	99,44	35.820

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	5.962.321	5.944.000	99,69	18.321
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.704.340	2.640.000	97,62	64.340
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.000.000	25.303.820	97,32	696.180
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37.340.000	36.302.000	97,22	1.038.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.990.000	9.000.000	90,09	990.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.132.000	11.000.000	98,81	132.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	250.000.000	212.275.000	84,91	37.725.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.768.000	1.768.000	100,00	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.272.000	12.200.000	99,41	72.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.066.500.000	1.066.500.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.283.237.000	1.246.485.144	97,14	36.751.856
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	43.500.000	43.500.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	215.280.000	213.000.000	98,94	2.280.000
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	253.468.921	249.197.913	98,31	4.271.008
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	38.715.921	38.610.000	99,73	105.921
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.360.000	10.225.600	98,70	134.400
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-		-
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	25.500.000	25.160.000	98,67	340.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	177.003.000	173.312.313	97,91	3.690.687
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	585.941.800	571.762.021	97,58	14.179.779
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-		-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-		-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.777.391	7.958.115	90,67	819.276

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.361.748	788.000	57,87	573.748
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.000.000	1.000.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.102.706	2.102.706	100,00	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.340.955	2.175.000	65,10	1.165.955
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.720.000	57.720.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50.320.000	50.320.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	14.000.000	13.300.000	95,00	700.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	82.500.000	82.300.000	99,76	200.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	58.500.000	58.500.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000	3.600.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	18.000.000	18.000.000	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	180.000.000	180.000.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.969.000	38.448.200	87,44	5.520.800
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.500.000	14.300.000	73,33	5.200.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	41.250.000	41.250.000	100,00	-
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	300.000.000	295.191.800	98,40	4.808.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	-	-		-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	227.480	220.000	96,71	7.480
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	57.356.920	52.800.000	92,06	4.556.920
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	114.368.000	114.343.000	99,98	25.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	93.679.600	93.580.000	99,89	99.600
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.368.000	34.248.800	99,65	119.200
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-		-
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	100.000.000	99.231.800	99,23	768.200

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	200.000	200.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	39.332.202	39.312.000	99,95	20.202
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.081.798	17.843.000	98,68	238.798
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000	6.500.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.776.000	25.266.800	98,02	509.200
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.100.000	9.100.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-		-
Kelurahan Guntung		14.949.367.577	14.747.313.752	98,65	202.053.825
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	205.573.737	195.890.487	95,29	9.683.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	882.329	-	-	882.329

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	40.386.408	37.990.487	94,07	2.395.921
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.920.000	24.900.000	96,06	1.020.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	48.475.000	46.600.000	96,13	1.875.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	44.955.000	43.200.000	96,10	1.755.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	44.955.000	43.200.000	96,10	1.755.000
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.059.047.895	1.053.593.145	99,48	5.454.750
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.910.000	1.910.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.150.895	1.150.500	99,97	395
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	400.000	-	-	400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.220.000	2.190.000	98,65	30.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.000.000	9.990.000	99,90	10.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.500.000	4.500.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	499.500.000	499.500.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	539.367.000	534.352.645	99,07	5.014.355
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.194.987.321	1.163.658.705	97,38	31.328.616
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.410.000	1.410.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.577.022	1.560.000	98,92	17.022
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.224.566	8.939.405	96,91	285.161
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.285.940	1.220.000	94,87	65.940
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.000.000	2.000.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	25.908.537	24.738.500	95,48	1.170.037
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	11.829.176	11.160.500	94,35	668.676
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.648.052	5.364.000	94,97	284.052
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.776.738	2.736.000	98,53	40.738
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	245.330	-	-	245.330

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.312.500	7.804.500	93,89	508.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.100.000	5.100.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.084.000	148.859.800	99,18	1.224.200
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	194.625.552	184.800.000	94,95	9.825.552
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	96.393.389	96.300.000	99,90	93.389
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	31.113.469	31.105.000	99,97	8.469
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	36.446.717	35.800.000	98,23	646.717
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	344.163.323	336.600.000	97,80	7.563.323
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	70.121.849	63.800.000	90,98	6.321.849
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	196.721.161	194.361.000	98,80	2.360.161
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	-	-		-
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.734.921	53.000.641	98,63	734.280

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	34.191.291	33.780.641	98,80	410.650
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.543.630	19.220.000	98,34	323.630
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.384.234	24.192.000	70,36	10.192.234
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	34.384.234	24.192.000	70,36	10.192.234
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	877.405.230	846.439.541	96,47	30.965.689
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.373.230	2.275.700	95,89	97.530
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000	34.992.000	99,98	8.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	55.274.000	54.050.000	97,79	1.224.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.400.000	-	-	29.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	755.358.000	755.121.841	99,97	236.159
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	433.450.000	432.611.763	99,81	838.237
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000	1.360.000	100,00	-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	233.510.000	233.073.461	99,81	436.539
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	197.370.000	196.968.302	99,80	401.698
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.000.000	103.490.458	84,83	18.509.542
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	38.000.000	22.558.125	59,36	15.441.875
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	60.000.000	59.301.703	98,84	698.297
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.000.000	21.630.630	90,13	2.369.370
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.515.250	116.373.350	97,37	3.141.900
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	55.006.250	54.976.300	99,95	29.950
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	504.000	500.000	99,21	4.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.117.000	2.113.600	41,31	3.003.400
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	44.832.000	44.754.450	99,83	77.550

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.056.000	14.029.000	99,81	27.000
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	884.294.900	880.745.824	99,60	3.549.076
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000	1.360.000	100,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.817.000	11.280.000	95,46	537.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.103.000	7.883.220	97,29	219.780
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.424.900	8.359.410	99,22	65.490
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	455.010.000	453.551.215	99,68	1.458.785
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	198.370.000	197.624.414	99,62	745.586
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	200.000.000	199.477.565	99,74	522.435
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.801.063	14.792.500	99,94	8.563
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	518.063	509.500	98,35	8.563

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.633.000	6.633.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.800.000	1.800.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000	900.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.950.000	4.950.000	100,00	-
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.358.010.000	3.340.696.477	99,48	17.313.523
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.910.000	1.910.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000	3.400.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	400.000	400.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.000.000	4.925.000	98,50	75.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000	199.363.475	99,68	636.525
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	2.656.980.000	2.642.528.514	99,46	14.451.486
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	490.320.000	488.169.488	99,56	2.150.512

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.332.957.548	2.282.500.389	97,84	50.457.159
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.238.838	6.004.490	58,64	4.234.348
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	438.066	435.000	99,30	3.066
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.355.000	1.350.000	99,63	5.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	536.892	536.000	99,83	892
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	8.298.728	8.208.000	98,91	90.728
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.698.000	93.531.500	99,82	166.500
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.054.862	15.031.500	99,84	23.362
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.250.000	4.000.000	94,12	250.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	232.500.000	231.725.000	99,67	775.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	38.961.000	38.934.000	99,93	27.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	72.000.000	71.760.000	99,67	240.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.100.000	4.200.000	82,35	900.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-		-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	394.650.000	394.650.000	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	528.750.000	528.750.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	896.869.000	856.834.899	95,54	40.034.101
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.150.000	11.450.000	75,58	3.700.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.000.000	9.000.000	100,00	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.800.141	1.800.000	99,99	141
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.307.021	4.300.000	99,84	7.021
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	-	-		-
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.652.845.278	1.637.216.585	99,05	15.628.693
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.410.000	1.410.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.445.789	4.526.600	70,23	1.919.189
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.744.881	10.377.500	96,58	367.381
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.352.000	1.326.000	98,08	26.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	99.960.000	99.688.000	99,73	272.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	58.200.000	58.200.000	100,00	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-		-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.419.600	1.687.200	22,74	5.732.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.719.008	2.109.000	24,19	6.610.008
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	529.200.000	529.200.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	378.594.000	377.892.285	99,81	701.715
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	388.800.000	388.800.000	100,00	-
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	162.000.000	162.000.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.098.810.000	2.097.753.387	99,95	1.056.613
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.910.000	1.910.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.887.526	4.731.600	96,81	155.926
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.737.053	2.590.500	94,65	146.553
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.000.000	2.000.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.892.103	1.870.000	98,83	22.103
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	336.107.688	336.107.687	100,00	1
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.472.000	11.352.000	98,95	120.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.200.000	21.900.000	98,65	300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	5.400.000	100,00	-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	796.000.000	796.000.000	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	135.000.000	135.000.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.992.000	61.680.000	99,50	312.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	712.560.000	712.560.000	100,00	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.651.630	4.651.600	100,00	30
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	51.856.667	51.632.000	99,57	224.667
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	464.667	458.000	98,57	6.667
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	35.190.000	35.045.000	99,59	145.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.402.000	5.329.000	98,65	73.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000	10.800.000	100,00	-
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	233.117.760	232.116.000	99,57	1.001.760
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.267.760	1.687.000	74,39	580.760
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.750.000	5.550.000	96,52	200.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.400.000	14.379.000	99,85	21.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000	200.000	50,00	200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000	24.000.000	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	135.000.000	135.000.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.800.000	43.800.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000	7.500.000	100,00	-
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	222.575.773	220.610.500	99,12	1.965.273
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	497.773	375.000	75,34	122.773
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.416.000	29.991.000	98,60	425.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.662.000	11.444.500	90,38	1.217.500
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	200.000	-	-	200.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	135.000.000	135.000.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.800.000	43.800.000	100,00	-
Kelurahan Loktuan		20.449.115.941	19.795.718.036	96,80	653.397.905
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	357.940.858	334.920.000	93,57	23.020.858
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	130.525.458	122.980.000	94,22	7.545.458
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.000.000	43.240.000	96,09	1.760.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	44.555.400	43.500.000	97,63	1.055.400
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	32.000.000	32.000.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	93.360.000	80.800.000	86,55	12.560.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	12.500.000	12.400.000	99,20	100.000
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.638.823.000	1.577.303.309	96,25	61.519.691
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.910.000	1.910.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	-	-		-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	864.750.000	856.045.000	98,99	8.705.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	772.163.000	719.348.309	93,16	52.814.691
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	939.349.237	890.250.130	94,77	49.099.107
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.610.000	1.610.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.720.000	2.720.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	21.996.225	21.420.000	97,38	576.225
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	43.110.495	42.240.000	97,98	870.495
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.540.000	11.540.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	15.758.661	15.734.250	99,85	24.411
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	13.334.652	12.730.000	95,47	604.652
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.481.150	3.000.000	86,18	481.150
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	6.673.940	6.216.000	93,14	457.940

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	14.544.579	13.277.000	91,28	1.267.579
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-		-
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	20.000.000	19.528.230	97,64	471.770
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	159.508.000	151.680.000	95,09	7.828.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-		-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	198.680.251	188.650.000	94,95	10.030.251
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	58.946.629	56.976.600	96,66	1.970.029
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.183.831	2.750.000	86,37	433.831
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	49.477.200	48.400.000	97,82	1.077.200
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.765.478	29.970.000	97,41	795.478
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	96.453.553	94.000.000	97,46	2.453.553
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	17.418.494	17.120.000	98,29	298.494

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	164.451.799	145.243.500	88,32	19.208.299
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	5.694.300	5.444.550	95,61	249.750
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-		-
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.614.327	25.598.864	99,94	15.463
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	25.614.327	25.598.864	99,94	15.463
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	185.714.000	181.554.000	97,76	4.160.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	184.704.000	180.544.000	97,75	4.160.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462.896.000	434.433.296	93,85	28.462.704
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.356.000	30.782.500	92,28	2.573.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.920.000	15.510.000	91,67	1.410.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	48.100.000	44.650.000	92,83	3.450.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	363.510.000	342.480.796	94,21	21.029.204
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.010.000	20.867.900	99,32	142.100
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-		-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-		-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	-	-		-
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	20.000.000	19.857.900	99,29	142.100
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-		-
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-		-
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.600.000	74.182.236	96,84	2.417.764
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	600.000	575.502	95,92	24.498

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.400.000	2.337.750	97,41	62.250
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	58.000.000	57.936.432	99,89	63.568
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.600.000	13.332.552	85,47	2.267.448
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	18.000.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000	18.000.000	100,00	-
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.564.850	137.734.800	95,94	5.830.050
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	107.967.850	107.894.150	99,93	73.700
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.943.000	1.530.000	30,95	3.413.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	22.416.000	20.085.450	89,60	2.330.550
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.028.000	7.015.200	99,82	12.800
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	309.336.930	302.917.493	97,92	6.419.437

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000	1.360.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	22.005.416	21.600.000	98,16	405.416
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.380.000	9.368.400	99,88	11.600
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.570.000	6.521.250	99,26	48.750
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.210.000	6.201.570	99,86	8.430
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-		-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	82.227.067	80.200.000	97,53	2.027.067
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	23.986.620	22.000.000	91,72	1.986.620
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	6.660.297	6.300.000	94,59	360.297
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	149.927.530	148.356.273	98,95	1.571.257
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	28.650.536	28.384.500	99,07	266.036

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	570.536	555.000	97,28	15.536
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.180.000	12.990.000	98,56	190.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000	4.939.500	98,79	60.500
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000	2.400.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000	7.500.000	100,00	-
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.640.045.273	4.581.560.173	98,74	58.485.100
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.730.000	5.730.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.880.000	10.880.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	10.046.109	8.946.000	89,05	1.100.109
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-		-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	83.640.556	82.060.000	98,11	1.580.556
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.242.618	6.900.000	95,27	342.618

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.169.173.125	1.150.351.718	98,39	18.821.407
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	99.995.125	90.766.551	90,77	9.228.574
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	158.420.000	157.620.000	99,50	800.000
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	1.499.826.790	1.484.687.587	98,99	15.139.203
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	1.595.090.950	1.583.618.317	99,28	11.472.633
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	-	-		-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.192.143.148	3.034.193.403	95,05	157.949.745
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.820.000	2.820.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.479.535	6.196.996	95,64	282.539
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	137.902.665	134.860.782	97,79	3.041.883
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	103.040.000	103.040.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.950.000	1.930.500	99,00	19.500

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	160.270.000	153.450.000	95,74	6.820.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	69.000.000	65.300.000	94,64	3.700.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	102.634.000	100.650.000	98,07	1.984.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	61.400.000	41.200.000	67,10	20.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.000.000	3.000.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.000.000	6.000.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	285.000.000	283.926.900	99,62	1.073.100
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	98.007.000	95.795.000	97,74	2.212.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.476.000	25.585.500	96,64	890.500
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	8.840.000	8.840.000	100,00	-
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	6.750.000	6.382.500	94,56	367.500
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	196.000.000	196.000.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	645.950.000	644.030.000	99,70	1.920.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.071.653.000	960.460.225	89,62	111.192.775
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000	3.500.000	93,33	250.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16.750.000	16.750.000	100,00	-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	37.503.915	37.225.000	99,26	278.915
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.166.223	16.000.000	98,97	166.223
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	92.109.735	90.000.000	97,71	2.109.735
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	32.691.075	31.250.000	95,59	1.441.075
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.685.476.137	1.648.927.800	97,83	36.548.337
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.730.000	5.730.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	46.395.432	42.238.000	91,04	4.157.432
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	160.545.219	160.200.000	99,78	345.219

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-		-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	19.915.200	5.124.600	25,73	14.790.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	23.690.286	6.442.800	27,20	17.247.486
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.123.200.000	1.123.192.400	100,00	7.600
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	306.000.000	306.000.000	100,00	-
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.838.262.140	3.731.258.532	97,21	107.003.608
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.730.000	5.730.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	13.447.695	13.291.112	98,84	156.583
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.415.690	2.340.000	96,87	75.690
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.000.000	3.000.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.355.575	3.250.000	96,85	105.575
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	44.208.510	42.000.000	95,00	2.208.510

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	375.693.155	375.577.000	99,97	116.155
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.960.000	13.755.000	98,53	205.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.500.000	18.250.000	98,65	250.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	30.000.000	27.000.000	90,00	3.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	5.400.000	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	212.850.000	212.475.000	99,82	375.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	276.195.000	215.982.820	78,20	60.212.180
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.633.400.000	2.599.875.100	98,73	33.524.900
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	26.529.020	26.000.000	98,01	529.020
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	173.577.495	167.332.500	96,40	6.244.995
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	506.863.767	505.702.900	99,77	1.160.867
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.410.000	1.149.500	81,52	260.500

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	406.523	400.000	98,40	6.523
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	488.845.244	488.097.400	99,85	747.844
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.402.000	5.256.000	97,30	146.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000	10.800.000	100,00	-
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	633.727.738	583.515.400	92,08	50.212.338
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.610.000	1.610.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	9.929.394	9.350.000	94,16	579.394
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.156.344	5.716.000	92,85	440.344
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000	9.600.000	92,31	800.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	84.898.000	81.687.500	96,22	3.210.500
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000	24.000.000	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	212.850.000	211.990.000	99,60	860.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	283.884.000	239.561.900	84,39	44.322.100
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1.745.098.000	1.684.413.300	96,52	60.684.700
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.910.000	1.910.000		-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	-	-		-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	-	-		-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-		-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-		-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	835.200.000	827.830.000	99,12	7.370.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	907.988.000	854.673.300	94,13	53.314.700
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-		-
Kelurahan Gunung Elai		20.065.196.262	19.758.528.546	98,47	306.667.716

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	78.720.000	78.355.000	99,54	365.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-		-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-		-
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	36.120.000	35.905.000	99,40	215.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	23.100.000	22.950.000	99,35	150.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	19.500.000	19.500.000	100,00	-
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	171.689.685	171.190.000	99,71	499.685
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.210.000	2.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	499.685	-	-	499.685
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	168.300.000	168.300.000	100,00	-
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	666.473.773	638.370.300	95,78	28.103.473

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	850.000	850.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	350.450	-	-	350.450
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	64.881.604	64.269.400	99,06	612.204
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	67.871.600	63.020.000	92,85	4.851.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	23.597.200	23.070.000	97,77	527.200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	22.622.457	14.722.000	65,08	7.900.457
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	7.634.250	6.620.000	86,71	1.014.250
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.504.660	1.315.600	87,44	189.060
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	45.451.825	42.293.000	93,05	3.158.825
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.900.000	63.900.300	98,46	999.700
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-		-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	78.559.617	77.600.000	98,78	959.617
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.186.036	16.400.000	95,43	786.036
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	22.281.562	20.500.000	92,00	1.781.562
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	235.945.774	231.400.000	98,07	4.545.774
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	2.339.833	2.100.000	89,75	239.833
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.286.905	9.100.000	97,99	186.905
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.711.679	47.813.266	92,46	3.898.413
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	36.823.112	34.482.266	93,64	2.340.846
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.388.567	9.831.000	86,32	1.557.567
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.500.000	3.500.000	100,00	-
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	159.840.000	156.240.000	97,75	3.600.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	159.840.000	156.240.000	97,75	3.600.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.310.034.575	1.272.250.630	97,12	37.783.945
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.779.575	2.736.600	72,40	1.042.975
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.730.000	4.675.000	98,84	55.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.773.000	4.717.500	98,84	55.500
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.000.000	3.500.000	87,50	500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	485.100.000	475.200.000	97,96	9.900.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	807.652.000	781.421.530	96,75	26.230.470
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	228.599.250	227.442.109	99,49	1.157.141
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	228.599.250	227.442.109	99,49	1.157.141
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.607.895	92.610.890	86,87	13.997.005
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.607.895	91.589.765	103,37	4.002.995
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.307.895	2.307.895	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.600.000	5.551.875	154,22	1.951.875
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	64.000.000	59.594.000	93,12	394.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.400.000	21.145.120	114,92	2.745.120
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	300.000	-	-	300.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	-	-	18.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000	-	-	18.000.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.163.413	77.461.500	84,97	13.701.913
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35.118.913	34.962.000	99,55	156.913
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.767.000	1.949.400	16,57	9.817.600
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	44.277.500	40.550.100	91,58	3.727.400
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.190.000	30.900.000	99,07	290.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.420.000	13.300.000	99,11	120.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.490.000	9.380.000	98,84	110.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.280.000	8.220.000	99,28	60.000
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-		-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	-	-		-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-		-
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.060.723	16.862.900	98,84	197.823
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.165.723	1.138.400	97,66	27.323
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.195.000	9.054.500	98,47	140.500
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.950.000	1.920.000	98,46	30.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000	1.000.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000	3.750.000	100,00	-
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.913.329.654	6.845.373.085	99,02	67.956.569

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.210.000	2.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.880.000	10.880.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	100.018.600	97.448.000	97,43	2.570.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	12.884.865	10.590.300	82,19	2.294.565
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.000.000	5.000.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	23.480.106	21.000.000	89,44	2.480.106
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-		-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.800.000	13.400.000	90,54	1.400.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	399.995.630	397.091.806	99,27	2.903.824
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	85.770.000	65.580.000	76,46	20.190.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	284.785.619	275.550.000	96,76	9.235.619
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	83.989.702	82.355.000	98,05	1.634.702

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.727.854	21.000.000	96,65	727.854
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	115.718.330	114.330.000	98,80	1.388.330
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.112.249.500	1.107.802.893	99,60	4.446.607
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	4.507.123.448	4.489.215.900	99,60	17.907.548
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	132.696.000	131.919.186	99,41	776.814
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.802.249.274	2.688.363.245	95,94	113.886.029
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.210.000	2.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.720.000	2.720.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	65.473.525	64.460.434	98,45	1.013.091
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.834.035	1.833.750	99,98	285
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.000.000	2.000.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	101.280.100	98.000.000	96,76	3.280.100

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	14.021.489	-	-	14.021.489
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	161.290.000	156.442.000	96,99	4.848.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	58.200.000	53.150.000	91,32	5.050.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	54.948.000	52.981.200	96,42	1.966.800
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.700.000	34.700.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	197.000.000	193.362.000	98,15	3.638.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	237.290.000	235.300.000	99,16	1.990.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	37.500.000	36.350.000	96,93	1.150.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	717.750.000	669.966.720	93,34	47.783.280
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.022.364.000	996.937.141	97,51	25.426.859
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.500.000	42.750.000	96,07	1.750.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	27.000.000	27.000.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.747.370	5.000.000	87,00	747.370
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.054.699	3.800.000	93,72	254.699
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	10.366.056	9.400.000	90,68	966.056
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.739.471.175	1.718.834.365	98,81	20.636.810
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.210.000	2.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000	1.360.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	39.182.442	39.170.226	99,97	12.216
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	32.519.733	32.391.650	99,61	128.083
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.740.000	14.520.000	98,51	220.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	139.200.000	128.800.000	92,53	10.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.000.000	16.000.000	100,00	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.099.000	2.632.489	37,08	4.466.511

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.050.000	4.050.000	100,00	-
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.860.000	4.050.000	83,33	810.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	272.250.000	272.250.000	100,00	-
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	972.000.000	972.000.000	100,00	-
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	234.000.000	229.400.000	98,03	4.600.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.990.977.760	4.000.495.550	100,24	9.517.790
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.210.000	2.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000	2.040.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-		-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	26.986.207	23.661.000	87,68	3.325.207
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.253.140	8.246.500	99,92	6.640
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.000.000	5.000.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	9.664.056	9.302.400	96,26	361.656
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	7.885.125	6.750.000	85,60	1.135.125
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	19.858.900	19.536.000	98,37	322.900
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.251.786.599	1.251.786.599	100,00	-
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.090.900	11.821.500	97,77	269.400
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	-	-		-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.700.000	62.750.000	98,51	950.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	64.706.000	57.507.300	88,87	7.198.700
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	300.000	-	-	300.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	17.205.000	16.650.000	96,77	555.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.000.000	8.880.000	98,67	120.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	574.200.000	573.300.000	99,84	900.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	581.092.000	588.149.122	101,21	25.634.662
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.500.000	10.500.000	100,00	-
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.322.160.000	1.321.727.589	99,97	432.411
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	2.339.833	2.100.000	89,75	239.833
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	106.899.435	105.250.563	98,46	1.648.872
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	106.899.435	105.250.563	98,46	1.648.872
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	1.145.739.000	1.141.155.663	99,60	4.583.337
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	-	-		-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.884.000	8.738.500	98,36	145.500
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.256.000	18.022.500	80,98	4.233.500
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-		-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000	24.000.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	495.000.000	495.000.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	595.599.000	595.394.663	99,97	204.337
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	453.438.971	449.559.480	99,14	3.879.491
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.240.146	7.926.960	96,20	313.186
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	34.536.825	33.750.000	97,72	786.825
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.512.000	7.355.500	97,92	156.500
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.524.000	21.178.500	98,39	345.500
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-		-
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	32.000.000	31.200.000	97,50	800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-		-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	173.250.000	172.920.000	99,81	330.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	176.376.000	175.228.520	99,35	1.147.480
Kelurahan Bontang Baru		16.699.263.616	16.304.212.671	97,63	395.050.945
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	691.551.961	665.105.000	96,18	26.446.961
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	30.933.101	27.575.000	89,14	3.358.101
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	93.219.510	91.200.000	97,83	2.019.510
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	54.360.000	52.300.000	96,21	2.060.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	172.017.350	160.070.000	93,05	11.947.350
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	246.900.000	241.180.000	97,68	5.720.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	92.232.000	90.890.000	98,54	1.342.000
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-		-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	-	-		-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.476.992.704	3.330.680.878	95,79	146.311.826
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.352.210.145	1.277.792.500	94,50	74.417.645
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	41.224.700	40.535.000	98,33	689.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.026.877	10.328.000	93,66	698.877
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	642.520	-	-	642.520
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.920.000	6.920.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	40.908.618	34.672.000	84,75	6.236.618
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	203.259.557	195.217.000	96,04	8.042.557
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	36.305.138	17.570.000	48,40	18.735.138

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	99.294.025	89.250.000	89,88	10.044.025
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.760.401	2.710.500	98,19	49.901
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.237.958	8.050.000	97,72	187.958
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.522.822	9.700.000	92,18	822.822
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	559.086.883	542.950.000	97,11	16.136.883
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	35.680.532	33.575.000	94,10	2.105.532
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.393.999	3.600.000	66,74	1.793.999
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	11.481.886	9.600.000	83,61	1.881.886
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.997.561	1.950.000	97,62	47.561
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	41.413.754	41.000.000	99,00	413.754
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	43.080.000	41.250.000	95,75	1.830.000
5.2.02.06.03.0008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM	97.385.745	97.025.000	99,63	360.745

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	27.697.169	27.000.000	97,48	697.169
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	66.000.000	63.000.000	95,45	3.000.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.460.559	80.269.000	81,52	18.191.559
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	27.396.504	12.915.000	47,14	14.481.504
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	71.064.055	67.354.000	94,78	3.710.055
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	103.894.000	94.976.000	91,42	8.918.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	103.894.000	94.976.000	91,42	8.918.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.922.428.000	1.877.643.378	97,67	44.784.622
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.910.000	1.910.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.228.000	28.290.000	85,14	4.938.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	60.000.000	59.875.000	99,79	125.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	123.424.000	117.745.000	95,40	5.679.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	148.500.000	147.000.000	98,99	1.500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	432.900.000	432.650.000	99,94	250.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.121.786.000	1.089.493.378	97,12	32.292.622
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	352.604.823	349.392.990	99,09	3.211.833
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.410.000	1.410.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.000.000	-	-	1.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	199.764.300	198.818.290	99,53	946.010
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	149.750.523	148.484.700	99,15	1.265.823
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.700.000	149.235.510	80,80	35.464.490
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	50.000.000	44.212.956	88,43	5.787.044

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000	2.006.260	83,59	393.740
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	12.000.000	4.392.250	36,60	7.607.750
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	66.000.000	57.662.589	87,37	3.978.516
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	54.000.000	36.602.560	67,78	17.397.440
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	300.000	-	-	300.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.182.800	125.239.300	96,20	4.943.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	78.852.800	78.816.000	99,95	36.800
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.505.500	1.598.300	35,47	2.907.200
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.944.000	13.980.000	93,55	964.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.028.000	6.650.000	94,62	378.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.312.500	6.900.000	94,36	412.500
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000	6.000.000	98,36	100.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000	7.270.000	99,59	30.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.140.000	4.025.000	97,22	115.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-		-
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.948.491	14.724.250	98,50	224.241
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	542.491	542.250	99,96	241
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.156.000	6.962.000	97,29	194.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000	2.970.000	99,00	30.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000	1.000.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.250.000	3.250.000	100,00	-
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.743.433.954	5.703.408.084	99,30	40.025.870
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.950.000	5.050.000	84,87	900.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.480.000	7.480.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-		-
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	-		-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.428.080	3.427.350	99,98	730
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.120.000	3.120.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	49.920.000	49.750.000	99,66	170.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.002.000	1.920.000	95,90	82.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.460.000	8.950.000	94,61	510.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.000.000	4.980.000	99,60	20.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	207.900.000	206.640.000	99,39	1.260.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000	99.759.000	99,76	241.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	419.438.000	418.848.845	99,86	589.155
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	106.513.196	105.345.989	98,90	1.167.207

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	34.800.778	33.150.000	95,26	1.650.778
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	200.000.000	194.361.000	97,18	5.639.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	293.576.000	292.073.000	99,49	1.503.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	196.800.000	195.697.000	99,44	1.103.000
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	3.449.723.900	3.427.963.900	99,37	21.760.000
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	-		-
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	648.322.000	644.892.000	99,47	3.430.000
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	-	-		-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.787.299.309	2.752.523.761	98,75	34.775.548
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	27.418.129	26.276.600	95,84	1.141.529
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.084.000	2.960.000	95,98	124.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.000.000	5.000.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.432.180	-	-	1.432.180
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.248.000	82.186.000	99,92	62.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	136.972.000	131.660.000	96,12	5.312.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-		-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.800.000	12.000.000	38,96	18.800.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	480.000.000	479.900.000	99,98	100.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	930.600.000	928.385.000	99,76	2.215.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.072.235.000	1.066.646.161	99,48	5.588.839
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-		-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16.500.000	16.500.000	100,00	-
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	958.756.399	940.118.861	98,06	18.637.538

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.591.606	11.291.700	97,41	299.906
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	746.469	720.000	96,45	26.469
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.000.000	2.000.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	88.200.000	88.200.000	100,00	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-		-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.296.800	3.019.200	26,73	8.277.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	13.321.524	3.774.000	28,33	9.547.524
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	604.800.000	604.800.000	100,00	-
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	226.800.000	226.313.961	99,79	486.039
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.677.396.447	1.649.254.214	98,32	28.142.233
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.910.000	1.910.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.200.474.447	1.196.095.214	99,64	4.379.233

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.612.000	-	-	1.612.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-		-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	5.400.000	100,00	-
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	468.000.000	445.849.000	95,27	22.151.000
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	156.345.147	114.806.749	73,43	41.538.398
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	155.135.147	113.596.749	73,22	41.538.398
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	508.231.241	493.698.074	97,14	14.533.167
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	442.000	43,76	568.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	478.791	-	-	478.791
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.061.450	11.100.000	92,03	961.450
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	68.450.000	60.875.000	88,93	7.575.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	77.040.000	76.598.000	99,43	442.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	173.250.000	168.810.000	97,44	4.440.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	175.941.000	175.873.074	99,96	67.926
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.820.340	16.025.000	95,27	795.340
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	228.125	-	-	228.125
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.792.215	13.225.000	95,89	567.215
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.800.000	2.800.000	100,00	-
Kelurahan Api-Api		19.073.588.447	18.746.955.737	98,29	326.632.710
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	59.078.305	58.600.000	99,19	478.305
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	22.078.305	21.870.000	99,06	208.305
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	27.000.000	26.730.000	99,00	270.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.000.000	10.000.000	100,00	-
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	121.500.000	121.500.000	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	121.500.000	121.500.000	100,00	-
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	644.490.722	637.700.000	98,95	6.790.722
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000	1.360.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	22.846.790	22.524.700	98,59	322.090
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.000.000	5.000.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	27.072.271	27.042.800	99,89	29.471
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	6.252.512	5.174.500	82,76	1.078.012
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	4.872.537	4.762.500	97,74	110.037
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.261.618	1.260.000	99,87	1.618

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.211.087	6.405.500	78,01	1.805.587
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	22.747.230	22.680.000	99,70	67.230
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	82.607.892	82.400.000	99,75	207.892
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	281.105.951	279.880.000	99,56	1.225.951
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	9.359.332	9.200.000	98,30	159.332
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	153.416.162	152.000.000	99,08	1.416.162
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	17.167.340	16.800.000	97,86	367.340
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.455.895	32.224.250	88,39	4.231.645
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	28.407.333	24.269.250	85,43	4.138.083
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.048.562	7.955.000	98,84	93.562
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	145.908.000	145.908.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	145.908.000	145.908.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	981.982.000	935.283.170	95,24	46.698.830
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	182.138.000	140.265.000	77,01	41.873.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.380.000	3.250.000	96,15	130.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	796.464.000	791.768.170	99,41	4.695.830
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	879.487.435	872.770.000	99,24	6.717.435
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000	1.360.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.913.351	3.900.000	99,66	13.351
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	-	-		-
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	112.511.745	110.250.000	97,99	2.261.745
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	216.587.745	215.780.000	99,63	807.745
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	250.555.217	250.075.000	99,81	480.217
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	-	-		-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	37.185.585	37.075.000	99,70	110.585
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.161.223	9.500.000	85,12	1.661.223
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	46.212.569	46.150.000	99,86	62.569
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	200.000.000	198.680.000	99,34	1.320.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.650.000	47.439.267	72,26	18.210.733
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000	557.659	23,24	1.842.341
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.000.000	2.331.500	38,86	3.668.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	48.000.000	38.657.508	80,54	9.342.492
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000	5.424.600	75,34	1.775.400
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.050.000	468.000	22,83	1.582.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.609.000	102.863.500	90,54	10.745.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	76.296.000	71.345.600	93,51	4.950.400

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.355.000	316.250	7,26	4.038.750
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	22.416.000	22.256.650	99,29	159.350
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.542.000	8.945.000	84,85	1.597.000
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.310.000	17.835.700	97,41	474.300
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.490.000	5.405.700	98,46	84.300
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000	7.080.000	96,99	220.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.520.000	5.350.000	96,92	170.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.916.090	18.280.000	96,64	636.090
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	316.090	-	-	316.090
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.400.000	7.200.000	97,30	200.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.900.000	3.780.000	96,92	120.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.300.000	2.300.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000	5.000.000	100,00	-
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7.004.270.000	6.884.051.040	98,28	120.218.960
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.520.000	9.520.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	112.000.000	110.640.000	98,79	1.360.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	200.000.000	199.480.320	99,74	519.680
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	193.050.000	192.209.576	99,56	840.424
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	887.080.000	872.547.110	98,36	14.532.890
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	3.033.380.000	2.968.291.429	97,85	65.088.571
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	257.400.000	252.732.613	98,19	4.667.387
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	256.720.000	253.140.848	98,61	3.579.152
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	2.055.120.000	2.025.489.144	98,56	29.630.856
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.573.422.773	3.505.290.660	98,09	68.132.113

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20.298.727	18.342.000	90,36	1.956.727
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.810.000	1.810.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	115.221.255	115.066.000	99,87	155.255
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	270.052.791	265.970.000	98,49	4.082.791
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	110.630.000	110.630.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	118.386.000	110.482.000	93,32	7.904.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	78.120.000	77.895.000	99,71	225.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	85.500.000	81.675.000	95,53	3.825.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.800.000	7.500.000	29,07	18.300.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.000.000	15.000.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	-	-		-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-		-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	-		-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-		-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-		-
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-		-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	-	-		-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.453.500.000	1.453.500.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.250.094.000	1.218.410.660	97,47	31.683.340
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-		-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	28.000.000	28.000.000	100,00	-
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.650.301.707	1.620.921.300	98,22	29.380.407
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	15.342.171	12.902.900	84,10	2.439.271

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.104.397	23.735.000	98,47	369.397
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	130.200.000	130.200.000	100,00	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-		-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	16.912.800	4.574.400	27,05	12.338.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	19.950.339	5.718.000	28,66	14.232.339
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	135.000.000	135.000.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.192.000	63.191.000	100,00	1.000
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	907.200.000	907.200.000	100,00	-
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	338.400.000	338.400.000	100,00	-
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.540.072.093	2.533.986.672	99,76	6.085.421
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	383.256	-	-	383.256
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	952.248.837	946.647.672	99,41	5.601.165

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000	2.500.000	96,15	100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.800.000	13.800.000	100,00	-
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.571.040.000	1.571.039.000	100,00	1.000
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga	102.842.498	102.212.840	99,39	629.658
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	462.667	-	-	462.667
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	86.177.831	86.010.840	99,81	166.991
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.402.000	5.402.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000	10.800.000	100,00	-
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.103.809.341	1.096.829.338	99,37	6.980.003
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.460.921	-	-	1.460.921
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	23.191.854	22.856.000	98,55	335.854

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	32.708.600	32.400.000	99,06	308.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.644.000	78.907.050	99,07	736.950
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.772.000	5.727.600	99,23	44.400
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	64.499.600	64.200.000	99,54	299.600
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.600.000	5.600.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	35.934.000	35.934.000	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	387.000.000	387.000.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	266.400.000	264.444.688	99,27	1.955.312
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	130.498.525	128.750.000	98,66	1.748.525
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	70.089.841	70.000.000	99,87	89.841
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.482.588	13.260.000	98,35	222.588

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	406.523	300.000	73,80	106.523
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	6.676.065	6.660.000	99,76	16.065
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.700.000	3.600.000	97,30	100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	200.000	200.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000	2.500.000	100,00	-
Kelurahan Bontang Kuala		11.390.924.282	10.396.920.324	91,27	994.003.958
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	142.079.000	139.790.000	98,39	2.289.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	3.010.000	2.940.000	97,67	70.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	85.559.000	85.090.000	99,45	469.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	52.500.000	50.750.000	96,67	1.750.000
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	422.535.058	401.629.260	95,05	20.905.798

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	317.058	255.000	80,43	62.058
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000	-	-	500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	241.650.000	237.150.000	98,14	4.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	178.858.000	163.014.260	91,14	15.843.740
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.451.421	185.922.000	83,96	35.529.421
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.210.000	1.210.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	420.540	360.000	85,60	60.540
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.490.571	2.350.000	94,36	140.571
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.400.000	2.400.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	11.755.986	11.520.000	97,99	235.986

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.334.990	4.855.000	91,00	479.990
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	979.155	975.000	99,58	4.155
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	45.000.000	19.950.000	44,33	25.050.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	17.691.435	17.080.000	96,54	611.435
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000	6.050.000	99,18	50.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.723.600	8.375.000	86,13	1.348.600
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.127.200	6.117.000	99,83	10.200
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	50.278.979	44.500.000	88,51	5.778.979
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	61.258.965	59.500.000	97,13	1.758.965
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.209.559	36.534.000	82,64	7.675.559
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	27.906.429	21.504.000	77,06	6.402.429
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.303.130	15.030.000	92,19	1.273.130

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.596.000	47.220.000	66,89	23.376.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	70.596.000	47.220.000	66,89	23.376.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	591.127.989	585.453.838	99,04	5.674.151
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.410.000	1.410.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.100.000	-	-	5.100.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	584.617.989	584.043.838	99,90	574.151
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000	-	-	1.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000	-	-	1.000.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.300.000	86.134.750	88,52	11.165.250
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	16.000.000	12.345.000	77,16	3.655.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	64.000.000	63.964.000	99,94	36.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.000.000	9.825.750	57,80	7.174.250

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	300.000	-	-	300.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.203.840	70.573.100	97,74	1.630.740
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	48.960.000	48.936.400	99,95	23.600
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.644.000	2.066.700	56,72	1.577.300
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	16.587.840	16.560.000	99,83	27.840
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.012.000	3.010.000	99,93	2.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.265.000	16.200.000	99,60	65.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	365.000	300.000	82,19	65.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.400.000	7.400.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000	3.000.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000	1.000.000	100,00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000	4.500.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.935.507.492	4.640.275.500	94,02	295.231.992
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.910.000	1.910.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	15.640.000	14.960.000	95,65	680.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	5.374.448	-	-	5.374.448
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.535.809	2.990.300	84,57	545.509
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.742.460	1.420.000	81,49	322.460
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	490.000	490.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.273.677	3.200.000	97,75	73.677
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-		-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.200.000	21.950.000	98,87	250.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.800.000	14.100.000	95,27	700.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	199.320.000	189.982.000	95,32	9.338.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	194.625.552	187.200.000	96,18	7.425.552
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	29.447.196	23.000.000	78,11	6.447.196
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	208.836.750	207.776.900	99,49	1.059.850
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	-	-		-
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	343.370.500	342.014.500	99,61	1.356.000
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	2.170.376.960	1.914.956.500	88,23	255.420.460
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	1.720.564.140	1.714.325.300	99,64	6.238.840
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.621.026.779	1.366.812.810	84,32	254.213.969
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.610.000	1.610.000	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000	3.400.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	23.707.080	21.130.000	89,13	2.577.080
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.653.998	12.037.100	88,16	1.616.898

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.000.000	2.000.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	334.281	300.000	89,74	34.281
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	200.000.000	177.876.000	88,94	22.124.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	25.281.964	24.366.000	96,38	915.964
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	8.018.292	8.004.000	99,82	14.292
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	59.244.650	58.867.000	99,36	377.650
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.350.000	51.402.000	88,09	6.948.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	36.900.000	36.900.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	70.910.000	70.900.000	99,99	10.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.318.000	14.950.000	97,60	368.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	199.500.000	192.850.000	96,67	6.650.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.000.000	22.000.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	8.000.000	8.000.000	100,00	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.080.000	-	-	2.080.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.000.000	-	-	4.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	348.300.000	288.900.000	82,95	59.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	459.288.000	312.770.710	68,10	146.517.290
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.750.000	19.750.000	100,00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	33.000.000	33.000.000	100,00	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-		-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.380.514	5.800.000	90,90	580.514
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	670.084.208	657.696.800	98,15	12.387.408
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.610.000	1.610.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	64.200.000	64.200.000	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-		-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.013.600	2.260.800	28,21	5.752.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.460.608	2.826.000	29,87	6.634.608
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	432.000.000	432.000.000	100,00	-
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	154.800.000	154.800.000	100,00	-
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.200.893.698	1.016.824.571	84,67	184.069.127
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.910.000	1.910.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.825.000	1.500.000	82,19	325.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	530.000	530.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	183.268.698	-	-	183.268.698
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.400.000	7.400.000	100,00	-
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.005.960.000	1.005.484.571	99,95	475.429

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	76.761.895	76.325.603	99,43	436.292
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000	1.010.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.392.023	1.160.000	83,33	232.023
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	58.157.872	57.953.603	99,65	204.269
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.402.000	5.402.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000	10.800.000	100,00	-
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.197.672.343	1.059.318.092	88,45	138.354.251
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.610.000	1.610.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.286.343	1.057.200	82,19	229.143
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.130.000	1.130.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000	6.493.500	99,90	6.500
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.310.000	33.272.000	99,89	38.000

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	90.000.000	87.000.000	96,67	3.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000	24.000.000	100,00	-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-		-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	755.100.000	652.760.000	86,45	102.340.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	284.736.000	251.995.392	88,50	32.740.608
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	10.210.000	10.210.000	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.210.000	2.210.000	100,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	5.400.000	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	-	-		-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-		-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.600.000	2.600.000	100,00	-
JUMLAH		**144.015.620.374**	**140.079.390.283**	**97,27**	**3.908.260.531**

Sumber : Data Realisasi Pada Aplikasi SIPD-RI

Kegiatan reviu evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2024) dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan triwulan 2 tahun 2025 bertujuan untuk mengindentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Bontang Utara sampai dengan tahun 2024 pada umumnya tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	47.681.518.270,00	57.386.666.576,00	100	100	8.485.950.472,00	100	7.805.347.849,00	100	12.406.989.116,00	100	20.184.069.494,00	100	55.662.914.594,00	97	100	ST	ST
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	Orang	23.933.217.430,00	22.281.734.314,00	227	227	4.621.748.623,00	125	3.088.771.009,00	125	4.680.867.928,00	121	4.780.692.361,00	122	21.971.909.943,00	98,61	54,3	ST	R
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	23.933.217.430,00	22.281.734.314,00	12	12	4.621.748.623,00	3	3.088.771.009,00	3	4.680.867.928,00	3	4.780.692.361,00	3	21.971.909.943,00	98,61	100	ST	ST
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	Orang	794.880.875,00	1.583.172.875,00	227	227	72.057.342,00	125	0	125	354.226.920,00	121	789.975.736,00	122	1.550.533.588,00	97,94	54,3	ST	R
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Bontang Utara)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	513.460.875,00	862.960.875,00	2	2	0	0	0	7	262.865.500,00	0	350.625.000,00	1	848.132.500,00	98,28	100	ST	ST
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	59.078.305,00	59.078.305,00	1	4	0	0	0	0	58.600.000,00	4	0	0	58.600.000,00	99,19	100	ST	ST
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	266.668.648,00	691.551.961,00	1	3	106.050.000,00	0	0	2	155.040.000,00	0	404.015.000,00	3	665.105.000,00	96,18	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
	(Kelurahan Bontang Baru)																			
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Bontang Kuala)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	32.079.000,00	142.079.000,00	4	4	0	0	31.960.000,00	0	2.940.000,00	6	104.890.000,00	10	139.790.000,00	98,39	100	ST	ST
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Guntung)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5.573.737,00	205.573.737,00	1	4	0	0	0	1	4.940.487,00	1	190.950.000,00	4	195.890.487,00	95,29	100	ST	ST
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	86.920.000,00	78.720.000,00	1	2	32.421.050,00	0	32.410.000,00	3	0	0	0	0	78.355.000,00	99,54	100	ST	ST
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	34.878.328,00	357.940.858,00	1	3	0	1	0	0	33.090.000,00	0	301.830.000,00	7	334.920.000,00	93,57	100	ST	ST
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Bontang Utara)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	281.420.000,00	720.212.000,00	29	29	72.057.342,00	0	0	10	91.361.420,00	5	439.350.736,00	60	702.401.088,00	97,53	100	ST	ST
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	121.500.000,00	121.500.000,00	27	27	0	0	121.500.000,00	27	0	0	0	0	121.500.000,00	100	100	ST	ST
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Bontang Baru)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10.500.000,00	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	SR	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Bontang Kuala)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	22.535.058,00	422.535.058,00	33	33	0	0	0	0	215.480.000,00	0	186.149.260,00	33	401.629.260,00	95,05	100	ST	ST
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Guntung)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	649.137.895,00	1.059.047.895,00	15	29	10.569.440,00	0	594.414.640,00	0	0	2	459.178.505,00	27	1.053.593.145,00	99,48	100	ST	ST
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	218.299.685,00	171.689.685,00	33	10	168.325.000,00	10	0	10	0	10	2.890.000,00	10	171.190.000,00	99,71	100	ST	ST
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	336.099.000,00	1.638.823.000,00	30	10	0	30	148.500.000,00	0	328.544.400,00	10	949.097.920,00	10	1.577.303.309,00	96,25	100	ST	ST
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Layanan	1.466.025.869,00	2.880.495.785,00	7	7	152.597.706,00	2	370.672.219,00	2	510.942.752,00	4	1.290.896.781,00	5	2.760.529.158,00	95,84	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11.818.045,00	11.818.045,00	1	1	0	0	0	0	0	0	11.791.000,00	1	11.791.000,00	99,77	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Bontang Utara)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	638.786.861,00	1.687.251.622,00	8	8	10.000.000,00	0	154.000.000,00	4	128.487.500,00	0	1.011.920.000,00	13	1.635.717.500,00	96,95	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	309.425.477,00	644.490.722,00	2	2	222.000.000,00	2	0	1	78.721.000,00	7	336.634.000,00	3	637.700.000,00	98,95	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Bontang Baru)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	303.722.266,00	1.352.210.145,00	8	8	0	3	54.448.000,00	5	176.895.000,00	8	1.056.322.000,00	4	1.277.792.500,00	94,5	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Bontang Kuala)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	174.769.921,00	221.451.421,00	8	8	17.215.000,00	0	14.261.121,00	0	65.975.000,00	0	30.382.000,00	8	185.922.000,00	83,96	100	T	ST
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Guntung)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	570.949.355,00	1.194.987.321,00	1	45	0	5	5.001.500,00	10	392.979.000,00	10	765.678.205,00	20	1.163.658.705,00	97,38	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	501.741.523,00	666.473.773,00	5	5	113.492.376,00	0	172.511.802,00	2	355.163.500,00	9	74.568.360,00	5	638.370.300,00	95,78	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	261.181.743,00	939.349.237,00	3	34	2.000.000,00	3	57.160.000,00	7	157.320.000,00	4	673.770.130,00	20	890.250.130,00	94,77	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	33.711.420,00	46.649.170,00	1	1	0	0	0	0	30.455.160,00	2	14.150.000,00	0	44.605.160,00	95,62	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan Bontang Utara)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	109.379.543,00	110.150.948,00	3	3	0	0	0	1	62.960.900,00	0	35.190.000,00	2	108.078.900,00	98,12	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50.030.957,00	36.455.895,00	1	1	0	0	0	0	26.944.250,00	1	5.280.000,00	1	32.224.250,00	88,39	100	T	ST
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	56.452.724,00	98.460.559,00	1	6	19.640.000,00	1	0	0	26.029.000,00	1	34.600.000,00	4	80.269.000,00	81,52	100	T	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
	(Kelurahan Bontang Baru)																			
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Bontang Kuala)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	48.209.559,00	44.209.559,00	1	1	0	0	37.257.909,00	0	4.500.000,00	0	6.720.000,00	1	36.534.000,00	82,64	100	T	ST
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Guntung)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	53.734.921,00	53.734.921,00	1	10	0	0	25.905.000,00	0	16.452.941,00	5	10.642.700,00	5	53.000.641,00	98,63	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	51.711.679,00	51.711.679,00	9	9	1.991.057,00	0	0	6	34.482.266,00	3	0	0	47.813.266,00	92,46	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25.614.327,00	25.614.327,00	1	5	0	1	0	1	1.599.998,00	1	17.499.061,00	3	25.598.864,00	99,94	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Bontang Utara)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1.680.000,00	1.680.000,00	1	2	420.000,00	0	280.000,00	1	0	0	1.665.000,00	1	1.665.000,00	99,11	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	145.908.000,00	145.908.000,00	1	2	0	3	0	3	20.160.000,00	3	125.748.000,00	3	145.908.000,00	100	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Kelurahan Bontang Baru)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	103.894.000,00	103.894.000,00	1	4	0	1	0	1	0	1	94.976.000,00	1	94.976.000,00	91,42	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	70.596.000,00	70.596.000,00	1	3	0	0	0	0	6.400.000,00	0	40.820.000,00	3	47.220.000,00	66,89	100	S	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
	(Kelurahan Bontang Kuala)	Perundang-Undangan yang Disediakan																		
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Guntung)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	34.384.234,00	34.384.234,00	1	2	0	0	0	0	0	1	24.192.000,00	1	24.192.000,00	70,36	100	S	ST
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	159.840.000,00	159.840.000,00	1	3	39.960.000,00	0	13.320.000,00	1	0	1	145.440.000,00	1	156.240.000,00	97,75	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	185.714.000,00	185.714.000,00	1	3	0	0	0	1	24.960.000,00	1	156.594.000,00	1	181.554.000,00	97,76	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Bontang Utara)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	670.650.000,00	1.022.946.000,00	12	12	142.177.706,00	3	216.392.219,00	3	289.039.192,00	3	216.180.781,00	3	958.671.598,00	93,72	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	553.565.000,00	981.982.000,00	40	12	0	12	41.400.000,00	12	248.178.720,00	12	249.135.505,00	12	935.283.170,00	95,24	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Bontang Baru)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.204.809.000,00	1.922.428.000,00	40	12	183.408.000,00	3	603.039.042,00	3	416.604.332,00	3	663.531.042,00	3	1.877.643.378,00	97,67	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Bontang Kuala)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	204.141.000,00	591.127.989,00	40	12	67.740.000,00	10	109.215.014,00	10	245.071.919,00	10	156.720.905,00	10	585.453.838,00	99,04	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	555.901.230,00	877.405.230,00	1	12	110.600.649,00	0	185.965.410,00	2	166.425.869,00	5	348.917.633,00	5	846.439.541,00	96,47	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
	Konsultasi SKPD (Kelurahan Guntung)	Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.231.506.838,00	1.310.034.575,00	50	12	402.013.990,00	3	55.326.961,00	3	255.088.498,00	3	347.432.443,00	3	1.272.250.630,00	97,12	100	ST	ST
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	211.521.000,00	462.896.000,00	12	12	109.888.702,00	3	10.638.024,00	3	67.357.520,00	3	223.851.550,00	3	434.433.296,00	93,85	100	ST	ST
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	827.144.578,00	827.144.578,00	3	3	0	1	1.690.000,00	1	199.050.000,00	1	145.890.000,00	1	676.040.000,00	81,73	100	T	ST
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	460.262.000,00	460.262.000,00	5	5	0	1	0	0	0	0	144.000.000,00	4	321.500.000,00	69,85	100	S	ST
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Bontang Utara)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	201.152.500,00	201.152.500,00	2	3	0	0	0	1	197.360.000,00	1	1.890.000,00	1	199.250.000,00	99,05	100	ST	ST
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	404.483.977,00	879.487.435,00	1	5	198.795.000,00	376	0	18	37.075.000,00	5	438.900.000,00	57	872.770.000,00	99,24	100	ST	ST
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Bontang Baru)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	202.854.300,00	352.604.823,00	2	2	0	0	198.930.000,00	0	198.930.000,00	2	150.462.990,00	0	349.392.990,00	99,09	100	ST	ST
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100	SR	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
	Lainnya (Kelurahan Bontang Kuala)	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																		
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Guntung)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	433.450.000,00	433.450.000,00	2	2	0	0	36.009.510,00	0	224.144.843,00	0	172.457.410,00	2	432.611.763,00	99,81	100	ST	ST
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	228.599.250,00	228.599.250,00	1	1	0	0	228.599.250,00	1	209.584.429,00	0	0	0	227.442.109,00	99,49	100	ST	ST
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	93.407.530,00	21.010.000,00	1	1	0	0	0	1	19.857.900,00	0	1.010.000,00	0	20.867.900,00	99,32	100	ST	ST
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	165.730.078,00	165.730.078,00	2	2	0	0	1.690.000,00	0	1.690.000,00	0	0	2	155.290.000,00	93,7	100	ST	ST
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	7.561.465.552,00	7.544.315.552,00	2	2	1.679.340.000,00	2	1.339.560.000,00	2	1.769.543.299,00	2	2.422.027.889,00	2	7.369.874.855,00	97,69	100	ST	ST
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	519.610.000,00	299.810.000,00	12	12	0	3	0	3	51.917.046,00	3	86.628.921,00	3	242.490.059,00	80,88	100	T	ST
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	65.650.000,00	65.650.000,00	1	12	11.850.011,00	12	11.711.338,00	12	11.810.565,00	12	12.067.353,00	12	47.439.267,00	72,26	100	S	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Bontang Baru)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	184.700.000,00	184.700.000,00	12	12	15.270.820,00	3	21.654.196,00	3	29.143.444,00	3	70.101.460,00	3	144.876.615,00	78,44	100	T	ST
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Bontang Kuala)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72.300.000,00	97.300.000,00	12	12	14.357.550,00	3	24.838.550,00	3	28.211.800,00	3	19.176.350,00	3	86.134.750,00	88,52	100	T	ST
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Guntung)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	102.000.000,00	122.000.000,00	1	12	26.028.793,00	3	19.495.485,00	3	28.890.353,00	3	26.965.702,00	3	103.490.458,00	84,83	100	T	ST
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	74.607.895,00	88.607.895,00	12	12	18.075.000,00	3	18.075.000,00	3	22.303.520,00	3	27.324.375,00	3	86.647.015,00	97,79	100	ST	ST
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	66.600.000,00	76.600.000,00	1	12	15.936.923,00	3	15.775.869,00	3	18.502.113,00	3	23.967.331,00	3	74.182.236,00	96,84	100	ST	ST
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Bontang Utara)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7.041.855.552,00	7.244.505.552,00	12	12	1.679.340.000,00	3	1.339.560.000,00	3	1.717.626.253,00	3	2.335.398.968,00	3	7.127.384.796,00	98,38	100	ST	ST
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	1	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	1	0	1	0	1	0	0	100	SR	ST
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	12	12	0	3	0	3	3.000.000,00	3	7.500.000,00	3	18.000.000,00	100	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
	Kantor (Kelurahan Loktuan)	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	Jenis	645.524.000,00	645.524.000,00	5	5	0	1	35.379.000,00	2	290.618.500,00	4	125.331.170,00	5	538.923.670,00	83,49	100	T	ST
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Bontang Utara)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	279.156.000,00	279.156.000,00	16	16	0	14	0	14	58.302.000,00	14	70.011.900,00	14	231.643.900,00	82,98	87,5	T	T
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Bontang Utara)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	13	13	0	3	0	3	266.500,00	3	1.589.800,00	4	4.121.300,00	41,21	100	SR	ST
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	142.335.400,00	113.609.000,00	16	11	13.336.650,00	1	0	0	29.172.000,00	1	27.414.850,00	9	102.863.500,00	90,54	100	T	ST
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Bontang Baru)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	357.570.200,00	130.182.800,00	16	7	15.876.000,00	0	19.440.000,00	0	26.731.300,00	0	63.840.000,00	7	125.239.300,00	96,2	100	ST	ST
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	91.787.840,00	72.203.840,00	16	7	0	0	20.720.000,00	0	26.046.700,00	0	23.806.400,00	7	70.573.100,00	97,74	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Bontang Kuala)	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Guntung)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	108.571.250,00	119.515.250,00	1	11	10.989.000,00	0	0	0	40.968.000,00	0	47.932.850,00	11	116.373.350,00	97,37	100	ST	ST
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	89.164.343,00	91.163.413,00	10	12	1.097.790,00	2	0	3	29.626.300,00	5	39.684.200,00	2	77.461.500,00	84,97	100	T	ST
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	156.131.250,00	143.564.850,00	1	9	6.778.000,00	9	30.297.000,00	9	21.530.250,00	9	78.351.550,00	10	137.734.800,00	95,94	100	ST	ST
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Bontang Utara)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30.940.000,00	30.940.000,00	5	5	0	0	0	0	0	0	16.675.000,00	5	16.675.000,00	53,89	100	R	ST
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24.360.000,00	31.190.000,00	3	3	0	1	0	0	0	0	23.600.000,00	2	30.900.000,00	99,07	100	ST	ST
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	195.518.000,00	195.518.000,00	1	1	0	0	18.000.000,00	0	191.757.000,00	1	1.890.000,00	0	193.647.000,00	99,04	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
	(Kecamatan Bontang Utara)																			
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Bontang Utara)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	129.910.000,00	129.910.000,00	2	2	0	0	17.379.000,00	0	40.293.000,00	0	35.164.470,00	2	92.836.470,00	71,46	100	S	ST
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	18.310.000,00	18.310.000,00	1	27	0	0	0	0	5.405.700,00	9	12.430.000,00	18	17.835.700,00	97,41	100	ST	ST
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Guntung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	484.294.900,00	884.294.900,00	1	2	0	0	4.995.000,00	0	0	0	875.750.824,00	2	880.745.824,00	99,6	100	ST	ST
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.107.421,00	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	101.380.000,00	309.336.930,00	1	28	0	5	0	5	4.861.800,00	8	298.055.693,00	10	302.917.493,00	97,92	100	ST	ST
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	3.718.113.091,00	4.639.835.345,00	98	98	1.977.308.493,00	100	1.068.405.229,00	100	295.084.000,00	100	1.234.152.146,00	100	4.523.713.942,00	97,5	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi	Koordinasi	667.854.118,00	1.092.821.451,00	3	3	39.882.453,00	0	290.581.622,00	1	130.331.981,00	1	651.623.291,00	1	1.069.265.765,00	97,84	100	ST	ST
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	519.707.200,00	519.707.200,00	2	2	0	0	262.458.722,00	1	30.086.523,00	0	247.447.250,00	1	496.838.913,00	95,6	100	ST	ST
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	148.146.918,00	573.114.251,00	2	2	39.882.453,00	0	28.122.900,00	1	100.245.458,00	0	404.176.041,00	1	572.426.852,00	99,88	100	ST	ST
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan	Urusan	2.944.221.973,00	3.293.544.973,00	7	7	1.937.426.040,00	4	710.306.163,00	1	98.470.720,00	1	437.601.841,00	1	3.205.250.264,00	97,32	100	ST	ST
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	61.877.674,00	61.877.674,00	1	1	58.090.000,00	1	0	0	0	0	0	0	59.390.500,00	95,98	100	ST	ST
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	173.815.000,00	173.815.000,00	4	4	0	0	83.123.280,00	1	72.472.720,00	1	14.089.000,00	2	169.685.000,00	97,62	100	ST	ST
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2.708.529.299,00	3.057.852.299,00	6	6	1.879.336.040,00	3	627.182.883,00	1	25.998.000,00	1	423.512.841,00	1	2.976.174.764,00	97,33	100	ST	ST
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana	Jumlah Koordinasi	Kali	106.037.000,00	253.468.921,00	6	6	0	1	67.517.444,00	2	66.281.299,00	1	144.927.014,00	2	249.197.913,00	98,31	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
	dan Sarana Pelayanan Umum																			
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	106.037.000,00	253.468.921,00	6	2	0	0	67.517.444,00	1	66.281.299,00	0	144.927.014,00	1	249.197.913,00	98,31	100	ST	ST
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	Persen	48.470.033.839,00	74.305.195.358,00	100	100	2.620.305.927,00	100	9.352.046.290,00	100	18.616.515.704,00	100	40.511.261.776,02	100	72.489.639.419,02	97,56	100	ST	ST
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	18.916.090,00	18.916.090,00	2	8	0	8	17.196.090,00	0	1.400.000,00	0	0	0	18.280.000,00	96,64	100	ST	ST
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Bontang Baru)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	14.948.491,00	14.948.491,00	2	2	14.724.250,00	2	0	0	0	0	0	0	14.724.250,00	98,5	100	ST	ST
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Bontang Kuala)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	16.265.000,00	16.265.000,00	2	2	15.200.000,00	0	0	0	0	0	0	2	16.200.000,00	99,6	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Guntung)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	14.801.063,00	14.801.063,00	2	5	14.792.500,00	5	0	0	0	0	0	0	14.792.500,00	99,94	100	ST	ST
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	17.060.723,00	17.060.723,00	10	10	14.124.860,00	10	737.500,00	0	0	0	0	0	16.862.900,00	98,84	100	ST	ST
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyarakatan	28.650.536,00	28.650.536,00	2	10	28.400.036,00	10	0	0	0	0	0	0	28.384.500,00	99,07	100	ST	ST
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	3.285.470.000,00	7.004.270.000,00	2	2	0	0	961.359.766,00	0	950.078.988,00	17	5.193.485.841,00	16	6.884.051.040,00	98,28	100	ST	ST
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bontang Baru)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2.010.050.491,00	5.743.433.954,00	4	4	0	1	854.837.500,00	2	1.337.152.350,00	1	3.720.633.814,00	3	5.703.408.084,00	99,3	100	ST	ST
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bontang Kuala)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2.931.205.250,00	4.935.507.492,00	3	3	0	0	159.827.500,00	0	1.792.817.000,00	0	2.730.742.000,00	3	4.640.275.500,00	94,02	100	ST	ST
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Guntung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1.448.010.000,00	3.358.010.000,00	3	3	0	0	941.161.898,00	0	256.854.574,00	0	2.142.667.976,00	3	3.340.696.477,00	99,48	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4.510.207.309,00	6.913.329.654,00	4	4	115.980.445,00	1	1.770.554.554,00	2	1.821.181.080,00	5	3.445.098.220,00	17	6.845.373.085,00	99,02	100	ST	ST
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2.606.267.373,00	4.640.045.273,00	1	1	0	0	150.706.950,00	9	1.215.914.459,00	4	3.215.642.534,00	18	4.581.560.173,00	98,74	100	ST	ST
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	3.471.070.863,00	3.573.422.773,00	5	5	0	1	0	1	1.753.632.560,00	1	449.456.000,00	2	3.505.290.660,00	98,09	100	ST	ST
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bontang Baru)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	409.529.740,00	2.787.299.309,00	5	5	13.680.000,00	0	12.600.000,00	0	733.939.720,00	5	1.944.421.641,00	0	2.757.458.961,00	98,93	100	ST	ST
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bontang Kuala)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	884.711.948,00	1.621.026.779,00	5	5	31.887.080,00	0	659.018.000,00	0	30.957.700,00	1	677.632.400,00	3	1.366.812.810,00	84,32	80	T	T
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Guntung)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	647.383.033,00	2.332.957.548,00	5	5	99.000.000,00	0	238.316.440,00	0	499.353.490,00	2	1.431.596.379,00	3	2.282.500.389,00	97,84	100	ST	ST
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	2.564.981.244,00	2.802.249.274,00	5	5	821.992.026,00	1	63.672.083,00	1	641.249.500,00	1	1.082.138.637,00	2	2.688.363.245,00	95,94	100	ST	ST
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Ormas	1.005.710.225,00	3.192.143.148,00	6	6	308.000.000,00	1	315.309.325,00	2	99.211.296,00	2	2.271.157.832,00	1	3.034.193.403,00	95,05	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	498.972.800,00	585.941.800,00	3	3	22.753.176,00	3	242.424.794,00	3	124.185.615,00	3	165.713.706,00	3	571.762.021,00	97,58	100	ST	ST
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Bontang Utara)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	498.972.800,00	585.941.800,00	5	5	22.753.176,00	5	242.424.794,00	5	124.185.615,00	5	165.713.706,00	5	571.762.021,00	97,58	100	ST	ST
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	1.591.086.168,00	1.650.301.707,00	2	2	293.211.900,00	2	474.061.900,00	2	400.820.100,00	2	463.449.200,00	2	1.620.921.300,00	98,22	100	ST	ST
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bontang Baru)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	919.236.475,00	958.756.399,00	5	5	156.119.000,00	0	313.970.600,00	2	231.310.800,00	2	334.190.061,00	2	940.118.861,00	98,06	100	ST	ST
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bontang Kuala)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	641.966.000,00	670.084.208,00	3	3	157.722.000,00	3	157.722.000,00	3	163.722.000,00	3	221.104.800,00	3	657.696.800,00	98,15	100	ST	ST
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Guntung)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	1.626.966.969,00	1.652.845.278,00	2	2	153.251.700,00	0	854.942.885,00	0	305.113.300,00	0	356.600.300,00	2	1.637.216.585,00	99,05	100	ST	ST
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	1.661.527.415,00	1.739.471.175,00	5	5	266.558.409,00	5	663.177.500,00	5	349.987.000,00	5	491.435.989,00	5	1.718.834.365,00	98,81	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	1.613.851.032,00	1.685.476.137,00	2	10	83.487.600,00	10	83.487.600,00	10	399.871.200,00	10	582.588.000,00	10	1.648.927.800,00	97,83	100	ST	ST
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2.540.072.093,00	2.540.072.093,00	42	5	0	0	5.400.000,00	0	969.466.836,00	0	1.556.619.836,00	5	2.533.986.672,00	99,76	100	ST	ST
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Bontang Baru)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1.689.186.000,00	1.677.396.447,00	28	28	0	0	0	0	975.068.415,00	28	663.850.599,00	0	1.644.319.014,00	98,03	100	ST	ST
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Bontang Kuala)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1.200.893.698,00	1.200.893.698,00	20	20	0	0	7.930.000,00	0	0	0	1.008.894.571,02	20	1.016.824.571,02	84,67	100	T	ST
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Guntung)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1.098.810.000,00	2.098.810.000,00	18	18	0	0	7.992.000,00	0	335.000.000,00	0	1.754.761.387,00	18	2.097.753.387,00	99,95	100	ST	ST
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	3.591.054.760,00	3.990.977.760,00	5	5	1.127.459,00	0	346.955.084,00	0	1.372.367.307,00	3	1.832.940.601,00	2	3.974.860.879,00	99,6	100	ST	ST
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	3.275.008.720,00	3.838.262.140,00	52	52	8.260.000,00	0	0	0	1.692.008.550,00	0	2.031.044.982,00	52	3.731.258.532,00	97,21	100	ST	ST
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	86.177.831,00	102.842.498,00	3.011,00	3.011,00	0	0	0	0	0	###	102.212.840,00	###	102.212.840,00	99,39	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Bontang Baru)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	156.345.147,00	156.345.147,00	2.632,00	2.632,00	0	0	48.684.321,00	####	64.912.428,00	####	1.210.000,00	0	114.806.749,00	73,43	100	S	ST
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Bontang Kuala)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	60.153.372,00	76.761.895,00	2.032,00	2.032,00	0	0	0	0	29.078.936,00	0	47.246.667,00	####	76.325.603,00	99,43	100	ST	ST
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Guntung)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	35.190.000,00	51.856.667,00	1.229,00	1.229,00	0	0	0	0	17.522.500,00	####	34.109.500,00	730	51.632.000,00	99,57	100	ST	ST
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	133.946.280,00	106.899.435,00	1.575,00	1.575,00	33.486,00	0	0	0	52.338.000,00	753	52.912.563,00	822	105.250.563,00	98,46	100	ST	ST
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan	Keluarga	164.349.700,00	506.863.767,00	4.387,00	4.387,00	0	0	0	0	0	0	505.702.900,00	####	505.702.900,00	99,77	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
	Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Loktuan)	Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang utara)	Persen	1.998.452.066,00	5.122.297.423,00	100	100	420.509.061,00	100	1.052.996.289,00	100	924.296.708,00	100	2.523.118.286,00	100	4.901.824.367,00	95,7	100	ST	ST
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	696.800.775,00	1.103.809.341,00	1	12	250.478.050,00	3	277.911.100,00	3	190.889.688,00	3	377.550.500,00	3	1.096.829.338,00	99,37	100	ST	ST
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bontang Baru)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	158.561.450,00	508.231.241,00	1	12	38.580.000,00	3	24.900.000,00	3	19.260.000,00	3	403.278.074,00	3	493.698.074,00	97,14	100	ST	ST
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bontang Kuala)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	66.616.343,00	1.197.672.343,00	1	1	28.500.000,00	0	6.110.000,00	0	7.057.200,00	0	1.012.370.892,00	1	1.059.318.092,00	88,45	100	T	ST
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Laporan	233.117.760,00	233.117.760,00	2	12	6.000.000,00	3	184.800.000,00	3	8.880.000,00	3	34.436.000,00	3	232.116.000,00	99,57	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
	Kecamatan (Kelurahan Guntung)	Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	556.962.000,00	1.145.739.000,00	2	2	34.430.011,00	3	510.531.989,00	3	202.409.320,00	3	423.810.320,00	3	1.141.155.663,00	99,6	100	ST	ST
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	136.393.738,00	633.727.738,00	1	12	4.000.000,00	3	6.000.000,00	3	462.786.900,00	3	110.728.500,00	3	583.515.400,00	92,08	100	ST	ST
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	Kegiatan	150.000.000,00	300.000.000,00	1	1	58.521.000,00	1	42.743.200,00	1	33.013.600,00	1	160.944.000,00	1	295.191.800,00	98,4	100	ST	ST
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan Bontang Utara)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	150.000.000,00	300.000.000,00	4	4	58.521.000,00	1	42.743.200,00	1	33.013.600,00	1	160.944.000,00	1	295.191.800,00	98,4	100	ST	ST
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang utara)	Persen	996.752.613,00	2.561.625.672,00	100	100	8.034.593,00	0	280.337.609,00	100	838.761.900,00	0	1.404.422.380,00	100	2.493.310.080,00	97,33	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	2	2	0	0	72.955.000,00	1	7.906.000,00	1	1.010.000,00	0	99.231.800,00	99,23	100	ST	ST
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan Bontang Utara)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	50	50	0	0	72.955.000,00	180	7.906.000,00	0	1.010.000,00	0	99.231.800,00	99,23	100	ST	ST
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Api-Api)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	13.482.588,00	13.482.588,00	40	50	0	0	0	0	13.260.000,00	50	0	0	13.260.000,00	98,35	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Bontang Baru)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	16.820.340,00	16.820.340,00	100	577	0	0	0	577	16.025.000,00	0	0	0	16.025.000,00	95,27	100	ST	ST
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Bontang Kuala)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	10.210.000,00	10.210.000,00	20	20	8.000.000,00	0	2.210.000,00	0	0	0	0	20	10.210.000,00	100	100	ST	ST
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Orang	222.575.773,00	222.575.773,00	10	10	0	0	203.390.000,00	0	49.139.000,00	10	21.871.500,00	0	220.610.500,00	99,12	100	ST	ST

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Kinerja Dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Status Predikat	
								Murni				Perubahan								
								Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Realisasi	%	K	Rp	K
	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Guntung)	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Gunung Elai)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	103.438.917,00	453.438.971,00	50	50	34.593,00	50	1.782.609,00	50	46.078.500,00	50	403.480.980,00	50	449.559.480,00	99,14	100	ST	ST
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Loktuan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	530.224.995,00	1.745.098.000,00	10	45	0	0	0	0	706.353.400,00	45	978.059.900,00	0	1.684.413.300,00	96,52	100	ST	ST

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BONTANG UTARA

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Bontang Utara memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.4

Sasaran Stragegis dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Bontang Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Menigkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bontang Utara yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Persentase Peningkatan Nilai SKM
2.	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Bontang Utara	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum
3.	Meningkatnya Keberdayaan Sosial dan Ekonomi di Wilayah Kecamatan Bontang Utara	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan	Peersentase Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dalam Pembangunan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Kota Bontang diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Bontang Utara sesuai dengan Renstra Kecamatan Bontang Utara berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bontang Utara

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai Persentase Peningkatan Nilai SKM	Persen	-	-	87,5%	87,5%	88%	88%	88,5%	84,81%	90,72%	83,94%	92,93%	0%	96,93%	103,7%	95,93%	105%	0%
2	Persentase Peran Aktif Masyarakat dalam Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban	Persen	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Persen	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bontang Utara

Dari Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada Renstra periode yang lalu berdasarkan indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Indikator : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Bontang Utara**

  Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan penetapan indikator kinerja peningkatan kualitas pelayanan Masyarakat di Kecamatan Bontang Utara. Tujuan dari indikator ini adalah untuk memahami harapan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh Kecamatan Bontang Utara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

  Hasil dari Evaluasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Bontang Utara merupakan evaluasi terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan Bontang Utara selama tahun tersebut. Evaluasi ini didasarkan Unsur pengukuran kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

  Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Bontang Utara Pemerintah Kota Bontang dilakukan secara periodik setiap semester (dua semester dalam satu tahun). Adapun Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan dalam pencapaian Sasaran Pertama, yakni diketahui bahwa Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kesesuaian persyaratan, kesesuaian pelayanan dan kecepatan pelayanan.

  Solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran I melalui indikator Nilai SKM adalah menjaga agar Upaya perbaikan yang telah dilakukan ditahun sebelumnya dijaga agar konsisten dan menerus yakni melalui evaluasi internal Kecamatan Bontang Utara dalam hal memotivasi unit layanan untuk memenuhi standar dan meningkatkan kesesuaian, menggali kebutuhan dan harapan Masyarakat melalui FGD atau wawancara langsung serta meningkatkan kompetensi

staf dalam memberikan pelayanan cepat tanpa mengurangi kualitas dalam rangka menjaga kualitas pelayanan dan perbaikan Nilai SKM Kecamatan Bontang Utara. Keberhasilan pencapaian kinerja pada Sasaran ini, melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Bontang Utara.

- **Indikator : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum**

Peningkatan keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Bontang Utara dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bontang yang Harmoni, Bersih, Adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang.

Sasaran RPJMD untuk Kecamatan Bontang Utara dalam peningkatan kondusifitas wilayah kota Bontang merupakan hal yang sangat penting, hal ini untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi warga kota Bontang secara umum. Untuk mencapai hal tersebut adalah melalui indikator sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Utara untuk melakukan koordinasi terkait penanganan gangguan trantibum terhadap gangguan trantibum yang dilaporkan oleh kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Bontang Utara. Dari laporan-laporan tersebut, Kecamatan Bontang utara melakukan Koordinasi antar instansi (eksternal) Kecamatan Bontang utara yakni Kepolisian, TNI, Satpol PP, BNK, Tokoh Masyarakat, Masyarakat dan Perangkat Daerah yang membidangi.

Jenis gangguan yang dilaporkan sangat beragam, mulai dari:

1) Mediasi sengketa warga (lahan, bangunan, air, status medsos)
2) Gangguan sosial (ODGJ, minuman keras, perkelahian)
3) Gangguan kriminal (pencurian, narkotika)
4) Penertiban PKL dan atribut kampanye
5) Permasalahan publik (pipa pecah, bau solar, gudang sembako)

Seluruh laporan gangguan langsung ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan segera kepada pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan respons cepat dari aparatur kecamatan, Babinkamtibmas, FKPM, serta stakeholder lain, prosedur penanganan yang telah terstruktur dan sinergis serta tingkat

koordinasi yang baik antara kecamatan dan unsur keamanan serta sosial kemasyarakatan.

Kecamatan Bontang Utara menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penanganan gangguan trantibum, Dimana untuk Kasus narkoba dan kriminal ditindaklanjuti dengan melibatkan kepolisian, Penanganan anak di bawah umur dilakukan dengan pendekatan edukatif dan terapi, dan partisipasi masyarakat tinggi, terlihat dari peran RT, tokoh masyarakat, dan warga dalam pelaporan.

Adapun indikator yang menunjukkan keberhasilan tersebut adalah Secara keseluruhan kasus telah ditindaklanjuti secara koordinatif, penanganan dilakukan tepat waktu dan proporsional sesuai jenis gangguan, Penyelesaian melalui mediasi dan pendekatan sosial lebih dominan, mencerminkan upaya menjaga kondusivitas Masyarakat dan Koordinasi lintas sektor berjalan efektif, menciptakan pola kerja kolaboratif antara kecamatan, kelurahan, kepolisian, dan elemen masyarakat.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan di tahun selanjutnya yakni dalam hal:

1) Penguatan deteksi dini gangguan trantibum melalui jaringan RT dan FKPM.
2) Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam teknik mediasi dan manajemen konflik.
3) Penyusunan SOP tematik untuk penanganan kasus sosial-kriminal agar penanganan lebih sistematis.

- **Indikator : Persentase Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Dalam Pembangunan**

Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan Pembangunan di wilayah Kecamatan Bontang Utara Dimana kecamatan sebagai fasilitator dalam melaksanakan Pembangunan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dapat disalurkan melalui Lembaga kemasyakatan yang ada di Kelurahan (LKK) yang meliputi RT (Rukun Tetangga), PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang merupakan mitra kerja bagi kelurahan dan kecamatan.

Untuk itu diperlukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga-Lembaga yang ada di kelurahan agak dapat lebih memaksimalkan pengawasan pembangunan yang ada di Kecamatan Bontang Utara dengan melakukan pemberdayaan Masyarakat yakni proses Pembangunan manusia yang berkelanjutan baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Adapun tujuan dari Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bontang Utara adalah:

1) Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
2) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat desa.
3) Meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
4) Memperkuat kelembagaan desa.
5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
6) Melestarikan budaya lokal dan nilai-nilai kearifan local

Adapun yang menjadi sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dengan Indikator Kinerja: Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan meliputi lembaga pemberdayaan yang ada di kelurahan yaitu RT, TP PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna.

Adapun faktor pendukung dalam mendukung pencapaian sasaran III melalui Indikator Persentase Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan adalah:

a. Tersedianya anggaran daerah, swadaya Masyarakat serta sumber lain yang sifatnya tidak mengikat.
b. Sinergi dan kolaborasi kemitraan serta pihak terkait dalam partisipasi Lembaga kemasyarakatan.

Adapun faktor penghambat yang menghambat pencapaian sasaran III melalui Indikator Peningkatan Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan adalah:

1) Belum adanya sumber data yang valid pada setiap Lembaga kemasyarakatan.
2) Kurangnya komunikasi dan informasi antara Lembaga kemasyarakatan baik dengan pemerintah tingkat kelurahan dan kecamatan maupun dengan Masyarakat.
3) Masih ada Lembaga kemasyarakatan yang kurang aktif menjalankan peran dan fungsinya.

Adapun Solusi yang dapat dilakukan untuk mancapai sasaran III indicator Persentase Peran Aktif Lembaga

kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dalam pembangunan adalah:

1) Membangun basis data yang valid dan terpercaya untuk setiap lembaga kemasyarakatan.
2) Meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi antara lembaga kemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat.
3) Mendorong partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan dan pembinaan peran dan fungsinya.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BONTANG UTARA

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana.

Adanya pertimbangan terkait isu-isu penting ini dilakukan agar selalu ada perbaikan ke depannya sehingga Kecamatan Bontang Utara dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal sehingga tujuan Kecamatan Bontang Utara dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum di dalam RPJMD tahun 2021-2026 yaitu **"*Terwujudnya Kota Bontang Yang Lebih Hebat Dan Beradab*"**

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) **Misi** yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan;
2. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup;
3. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut di atas, serta urusan Umum dan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bontang Utara, maka fungsi dan tugas Kecamatan terkait erat dengan *Misi 1 :* yaitu: *"Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan"* dan

Misi 2: *"Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup". Dan Misi 3 : "Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia".*

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Utara antara lain:

1. Kualitas data data perencanaan pembangunan yang belum optimal
2. Adanya kejenuhan masyarakat dalam proses perencanaan (Musrenbang)
3. Dinamika permasalahan pembangunan yang berubah cepat
4. Interfensi kebijakan politik tinggi
5. Dukungan peningkatan kapasitas SDM
6. Masih tingginya angka RTM pada kecamatan Bontang Utara
7. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintahdan perusahaan (CSR) menyebabkan proses "pemandirian" masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kota Bontang dalam pembangunan kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan yang diawali dari Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (holistik).

Program dan kegiatan sebagaimana permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenanan Organisasi Peangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daeah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KECAMATAN BONTANG UTARA				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7.01	**KECAMATAN**				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**-**	**100 Persen**	**40.094.246.305,00**	**52.365.711.053,00**	**51.749.603.133,00**	**7.949.574.107,00**			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan*	-	4 Dokumen	23.660.540,00	2.936.812,00	851.808,00	-22.808.732,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1.112.725,00	1.117.808,00	387.904,00	-724.821,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	4 Laporan	22.547.815,00	1.819.004,00	463.904,00	-22.083.911,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Bontang Utara, Semua Kel/Desa		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan*	-	123 Orang	25.441.149.748,00	26.259.558.831,00	26.257.546.263,00	816.396.515,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	242 Orang/ bulan	242 Orang/ bulan	25.416.308.591,00	26.254.945.454,00	26.254.945.454,00	838.636.863,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	23.810.856,00	2.863.857,00	1.999.953,00	-21.810.903,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	1 Dokumen	1.030.301,00	1.749.520,00	600.856,00	-429.445,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											DANA BAGI HASIL (DBH)	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian*	-	100 Persen	1.190.509.156,00	5.204.613.741,00	4.580.021.911,00	3.389.512.755,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	9 Paket	747.793.036,00	1.001.983.400,00	996.772.880,00	248.979.844,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	55 Orang	253.278.000,00	1.282.895.000,00	1.064.688.000,00	811.410.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran*	-	100 Persen	2.935.471.487,00	5.643.980.519,00	4.856.561.879,00	1.921.090.392,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.151.505,00	20.728.395,00	16.609.194,00	457.689,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	300.000.000,00	1.025.863.298,00	975.578.143,00	675.578.143,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											DANA BAGI HASIL (DBH)	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	32.288.890,00	45.819.990,00	44.359.050,00	12.070.160,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	104.768.323,00	140.221.552,00	113.357.020,00	8.588.697,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	9.469.076,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-7.789.076,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	346.637.000,00	853.610.000,00	326.105.000,00	-20.532.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*	-	100 Persen	1.420.593.449,00	4.458.386.285,00	5.058.386.407,00	3.637.792.958,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	207.244.815,00	207.244.815,00	157.244.815,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	206.060.200,00	1.890.000,00	1.890.000,00	-204.170.200,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	257.012.500,00	277.012.500,00	277.012.500,00	20.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	72.121.070,00	2.149.963.509,00	2.149.963.509,00	2.077.842.439,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*	-	100 Persen	8.172.035.120,00	8.682.197.200,00	8.682.197.200,00	510.162.080,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	460.466.000,00	685.610.000,00	685.610.000,00	225.144.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.142.919.120,00	7.355.227.200,00	7.355.227.200,00	212.308.080,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*	-	100 Persen	910.826.805,00	2.114.037.665,00	2.314.037.665,00	1.403.210.860,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	18 Unit	200.802.000,00	219.360.000,00	219.360.000,00	18.558.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	41.636.300,00	52.533.500,00	52.533.500,00	10.897.200,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	1.106.746.500,00	1.106.746.500,00	1.096.746.500,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	71.050.000,00	71.050.000,00	61.050.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP**	**98 Persen**	**98 Persen**	**722.815.586,00**	**2.731.085.205,00**	**2.037.533.044,00**	**83.184.414,00**			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Subjek Koordinasi*	3 Koordinasi	3 Koordinasi	465.225.524,00	1.228.257.749,00	984.396.749,00	519.171.225,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	300.937.742,00	300.937.749,00	300.937.749,00	7,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	164.287.782,00	927.320.000,00	683.459.000,00	519.171.218,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Urusan*	-	7 Urusan	132.590.062,00	1.279.438.656,00	882.077.600,00	749.487.538,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	67.561.862,00	254.413.750,00	157.693.750,00	90.131.888,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	49.996.834,00	4.312.000,00	-45.688.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	15.028.200,00	975.028.072,00	720.071.850,00	705.043.650,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Koordinasi*	-	6 Kali	125.000.000,00	223.388.800,00	171.058.695,00	46.058.695,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	125.000.000,00	223.388.800,00	171.058.695,00	46.058.695,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat**	**-**	**100 Persen**	**34.201.560.013,00**	**47.615.196.648,00**	**50.159.423.770,00**	**-5.713.892.923,00**			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan*	-	3 Lembaga	19.397.750.442,00	20.463.646.438,00	22.031.752.528,00	2.634.002.086,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	42.727.090,00	742.725.198,00	703.362.130,00	660.635.040,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penaganan Gangguan Trantibum**	**-**	**100 Persen**	**983.231.960,00**	**2.136.997.392,00**	**894.009.514,00**	**1.520.264.918,00**			
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Koordinasi yang dilakukan*	-	1 Kegiatan	33.375.000,00	385.666.000,00	29.715.000,00	-3.660.000,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	33.375.000,00	385.666.000,00	29.715.000,00	-3.660.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum (Kecamatan Bontang utara)**	**-**	**100 Persen**	**521.873.175,00**	**431.330.069,00**	**328.692.530,00**	**340.126.825,00**			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-	1 Kegiatan	521.873.175,00	431.330.069,00	328.692.530,00	-193.180.645,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	50 Orang	300 Orang	411.116.204,00	71.078.278,00	71.078.278,00	-340.037.926,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	180 Orang	46 Orang	33.375.000,00	33.279.450,00	25.981.522,00	-7.393.478,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
		KELURAHAN GUNTUNG				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7.01	**KECAMATAN**				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi**	**-**	**100 A (90), Persen 100 Persen**	**40.094.246.305,00**	**52.365.711.053,00**	**51.749.603.133,00**	**7.949.574.107,00**			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian*	-	100 Persen	1.190.509.156,00	5.204.613.741,00	4.580.021.911,00	3.389.512.755,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	2 Paket	10.000.000,00	323.347.857,00	320.326.547,00	310.326.547,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											DANA BAGI HASIL (DBH)	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	4 Orang	20.000.000,00	221.314.000,00	216.118.000,00	196.118.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum*	-	7 Layanan	2.935.471.487,00	5.643.980.519,00	4.856.561.879,00	1.921.090.392,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	50.000.000,00	23.451.012,00	18.692.448,00	-31.307.552,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	24.005.660,00	19.112.780,00	-20.887.220,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1 Dokumen	34.384.234,00	34.384.000,00	34.384.000,00	-234,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	118.000.000,00	359.038.000,00	255.927.000,00	137.927.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*	-	100 Persen	1.420.593.449,00	4.458.386.285,00	5.058.386.407,00	3.637.792.958,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	230.000.122,00	200.000.122,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*	-	100 Persen	8.172.035.120,00	8.682.197.200,00	8.682.197.200,00	510.162.080,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*	-	100 Persen	910.826.805,00	2.114.037.665,00	2.314.037.665,00	1.403.210.860,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	90.571.250,00	114.450.000,00	114.450.000,00	23.878.750,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	25.000.000,00	23.974.900,00	23.974.900,00	-1.025.100,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**	**-**	**100 Persen**	**34.201.560.013,00**	**47.615.196.648,00**	**50.159.423.770,00**	**-5.713.892.923,00**			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan*	-	12 Unsur	14.172.703.367,00	22.685.111.063,00	24.672.255.352,00	10.499.551.985,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	13.425.000,00	26.963.639,00	26.963.639,00	13.538.639,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	4 Unit	755.864.000,00	1.110.541.978,00	1.100.429.398,00	344.565.398,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1.109.680.426,00	1.209.648.787,00	780.331.917,00	-329.348.509,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan*	-	2 Lembaga	19.397.750.442,00	20.463.646.438,00	22.031.752.528,00	2.634.002.086,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	641.406.800,00	647.158.903,00	782.091.700,00	140.684.900,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	1.134.000.000,00	1.132.659.637,00	1.329.446.075,00	195.446.075,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan*	-	1 Kelurahan	631.106.204,00	4.466.439.147,00	3.455.415.890,00	2.824.309.686,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	12 Keluarga	1458 Keluarga	35.000.000,00	604.980.000,00	24.480.000,00	-10.520.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**• Tingkat penanganan gangguan Trantibum (Kecamatan Bontang Utara) • Tingkat penanganan gangguan Trantibum**	**-**	**100 100 % Persen**	**983.231.960,00**	**2.136.997.392,00**	**894.009.514,00**	**1.520.264.918,00**			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah lembaga yang diberdayakan*	-	3 Lembaga	949.856.960,00	1.751.331.392,00	864.294.514,00	-85.562.446,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	49.468.992,00	109.429.278,00	113.429.278,00	63.960.286,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**• Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (Kecamatan Bontang utara) • Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum**	**-**	**100 100 % Persen**	**521.873.175,00**	**431.330.069,00**	**328.692.530,00**	**340.126.825,00**			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum*	-	2 Kegiatan	521.873.175,00	431.330.069,00	328.692.530,00	-193.180.645,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 Orang	66 Orang	22.000.000,00	208.332.365,00	131.372.574,00	109.372.574,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
		KELURAHAN LOKTUAN				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7.01	**KECAMATAN**				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi**	**-**	**100 A (90), Persen 100 Persen**	**40.094.246.305,00**	**52.365.711.053,00**	**51.749.603.133,00**	**7.949.574.107,00**			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian*	-	100 Persen	1.190.509.156,00	5.204.613.741,00	4.580.021.911,00	3.389.512.755,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	2 Paket	35.000.000,00	141.123.600,00	141.123.600,00	106.123.600,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30 Orang	10.000.000,00	1.311.641.000,00	994.507.000,00	984.507.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran*	-	100 Persen	2.935.471.487,00	5.643.980.519,00	4.856.561.879,00	1.921.090.392,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7 Paket	70.180.000,00	767.907.467,00	938.248.651,00	868.068.651,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	40.000.000,00	40.423.479,00	32.305.142,00	-7.694.858,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	188.826.000,00	287.567.600,00	287.567.600,00	98.741.600,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	335.441.839,00	269.408.750,00	169.672.750,00	-165.769.089,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*	-	100 Persen	1.420.593.449,00	4.458.386.285,00	5.058.386.407,00	3.637.792.958,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	595 Unit	771.000.000,00	768.998.413,00	768.998.413,00	-2.001.587,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*	-	100 Persen	8.172.035.120,00	8.682.197.200,00	8.682.197.200,00	510.162.080,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	82.600.000,00	94.600.000,00	94.600.000,00	12.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*	-	100 Persen	910.826.805,00	2.114.037.665,00	2.314.037.665,00	1.403.210.860,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	11 Unit	102.914.850,00	168.580.000,00	168.580.000,00	65.665.150,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	37 Unit	25.000.000,00	24.770.000,00	24.770.000,00	-230.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**	**-**	**100 Persen**	**34.201.560.013,00**	**47.615.196.648,00**	**50.159.423.770,00**	**-5.713.892.923,00**			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-	12 Unsur	14.172.703.367,00	22.685.111.063,00	24.672.255.352,00	10.499.551.985,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	21.187.636,00	45.059.636,00	45.059.636,00	23.872.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	4 Unit	2.746.367.500,00	1.046.077.465,00	2.495.087.465,00	-251.280.035,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	365.544.426,00	397.684.214,00	497.666.994,00	132.122.568,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan*	-	3 Lembaga	19.397.750.442,00	20.463.646.438,00	22.031.752.528,00	2.634.002.086,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	10 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.678.150.936,00	1.701.640.536,00	2.045.206.016,00	367.055.080,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	3.062.411.044,00	3.012.436.453,00	3.012.436.453,00	-49.974.591,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan*	-	1 Kelurahan	631.106.204,00	4.466.439.147,00	3.455.415.890,00	2.824.309.686,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	12 Keluarga	5000 Keluarga	165.049.700,00	1.612.167.030,00	1.307.867.030,00	1.142.817.330,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penaganan Gangguan Trantibum**	**-**	**100 Persen**	**983.231.960,00**	**2.136.997.392,00**	**894.009.514,00**	**1.520.264.918,00**			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah lembaga yang diberdayakan*	-	3 Lembaga	949.856.960,00	1.751.331.392,00	864.294.514,00	-85.562.446,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	249.468.992,00	111.113.280,00	108.061.280,00	-141.407.712,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum (Kecamatan Bontang utara)**	**-**	**100 Persen**	**521.873.175,00**	**431.330.069,00**	**328.692.530,00**	**340.126.825,00**			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum*	-	2 Kegiatan	521.873.175,00	431.330.069,00	328.692.530,00	-193.180.645,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 Orang	330 Orang	20.000.000,00	19.960.000,00	11.250.000,00	-8.750.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
		KELURAHAN GUNUNG ELAI				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7.01	**KECAMATAN**				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**-**	**100 Persen**	**40.094.246.305,00**	**52.365.711.053,00**	**51.749.603.133,00**	**7.949.574.107,00**			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian*	-	100 Persen	1.190.509.156,00	5.204.613.741,00	4.580.021.911,00	3.389.512.755,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	1 Paket	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	1 Orang	4.950.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.950.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran*	-	100 Persen	2.935.471.487,00	5.643.980.519,00	4.856.561.879,00	1.921.090.392,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	8 Paket	70.971.506,00	163.113.783,00	132.309.838,00	61.338.332,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	26.943.598,00	70.379.112,00	70.379.112,00	43.435.514,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3 Dokumen	159.840.000,00	132.840.000,00	132.840.000,00	-27.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	85.639.503,00	179.207.000,00	120.664.000,00	35.024.497,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*	-	100 Persen	1.420.593.449,00	4.458.386.285,00	5.058.386.407,00	3.637.792.958,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	5.054.700,00	1.233.540,00	1.233.540,00	-3.821.160,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*	-	100 Persen	8.172.035.120,00	8.682.197.200,00	8.682.197.200,00	510.162.080,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	77.100.000,00	124.800.000,00	124.800.000,00	47.700.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*	-	100 Persen	910.826.805,00	2.114.037.665,00	2.314.037.665,00	1.403.210.860,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	15 Unit	51.904.344,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-49.954.344,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	1 Unit	12.180.000,00	730.000,00	730.000,00	-11.450.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.107.421,00	610.000,00	610.000,00	-497.421,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**	**-**	**100 Persen**	**34.201.560.013,00**	**47.615.196.648,00**	**50.159.423.770,00**	**-5.713.892.923,00**			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-	12 Unsur	14.172.703.367,00	22.685.111.063,00	24.672.255.352,00	10.499.551.985,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.454.770,00	61.775.639,00	61.267.840,00	46.813.070,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	23 Unit	3.350.000.000,00	4.432.943.964,00	4.865.948.964,00	1.515.948.964,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	515.544.426,00	934.822.498,00	483.216.881,00	-32.327.545,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan*	-	3 Lembaga	19.397.750.442,00	20.463.646.438,00	22.031.752.528,00	2.634.002.086,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.351.217.000,00	1.408.123.040,00	1.699.310.156,00	348.093.156,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	2.835.000.000,00	3.163.741.507,00	3.168.516.304,00	333.516.304,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan*	-	1 Kelurahan	631.106.204,00	4.466.439.147,00	3.455.415.890,00	2.824.309.686,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	45 Keluarga	4185 Keluarga	133.946.280,00	1.130.902.040,00	1.250.902.040,00	1.116.955.760,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**• Tingkat penanganan gangguan Trantibum (Kecamatan Bontang Utara)**	**-**	**100 Persen**	**983.231.960,00**	**2.136.997.392,00**	**894.009.514,00**	**1.520.264.918,00**			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah lembaga yang diberdayakan*	-	3 Lembaga	949.856.960,00	1.751.331.392,00	864.294.514,00	-85.562.446,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	49.468.992,00	49.427.000,00	53.032.300,00	3.563.308,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**• Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (Kecamatan Bontang utara)**	**-**	**100 Persen**	**521.873.175,00**	**431.330.069,00**	**328.692.530,00**	**340.126.825,00**			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-	2 Kegiatan	521.873.175,00	431.330.069,00	328.692.530,00	-193.180.645,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	66 Orang	5.006.992,00	65.006.337,00	64.812.517,00	59.805.525,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KELURAHAN BONTANG BARU				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7.01	**KECAMATAN**				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah** **• Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi**	**-**	**100** **A (90),** **Persen** **100 Persen**	**40.094.246.305,00**	**52.365.711.053,00**	**51.749.603.133,00**	**7.949.574.107,00**			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian*	-	100 Persen	1.190.509.156,00	5.204.613.741,00	4.580.021.911,00	3.389.512.755,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	3 Paket	27.664.979,00	178.890.000,00	178.890.000,00	151.225.021,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	30 Orang	17.664.979,00	334.940.000,00	272.934.000,00	255.269.021,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran*	-	100 Persen	2.935.471.487,00	5.643.980.519,00	4.856.561.879,00	1.921.090.392,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7 Paket	27.664.979,00	267.209.587,00	250.116.877,00	222.451.898,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	10.000.000,00	13.930.380,00	12.033.040,00	2.033.040,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	103.894.000,00	496.000,00	496.000,00	-103.398.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	65.329.958,00	171.226.000,00	86.322.000,00	20.992.042,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*	-	100 Persen	1.420.593.449,00	4.458.386.285,00	5.058.386.407,00	3.637.792.958,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	27.664.979,00	29.278.000,00	29.278.000,00	1.613.021,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*	-	100 Persen	8.172.035.120,00	8.682.197.200,00	8.682.197.200,00	510.162.080,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	134.700.000,00	135.710.000,00	135.710.000,00	1.010.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*	-	100 Persen	910.826.805,00	2.114.037.665,00	2.314.037.665,00	1.403.210.860,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	9 Unit	130.182.800,00	117.670.000,00	117.670.000,00	-12.512.800,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	KECAMATAN BONTANG UTARA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**	**-**	**100 Persen**	**34.201.560.013,00**	**47.615.196.648,00**	**50.159.423.770,00**	**-5.713.892.923,00**			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-	12 Unsur	14.172.703.367,00	22.685.111.063,00	24.672.255.352,00	10.499.551.985,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	13.869.001,00	25.510.939,00	24.219.000,00	10.349.999,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	5 Unit	2.687.375.330,00	6.820.654.448,00	6.788.202.140,00	4.100.826.810,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	515.544.426,00	650.901.065,00	630.734.815,00	115.190.389,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan*	-	3 Lembaga	19.397.750.442,00	20.463.646.438,00	22.031.752.528,00	2.634.002.086,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	942.432.800,00	952.200.320,00	1.145.890.320,00	203.457.520,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	1.764.000.000,00	1.765.909.988,00	1.762.599.048,00	-1.400.952,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan*	-	100 Persen	631.106.204,00	4.466.439.147,00	3.455.415.890,00	2.824.309.686,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	300 Keluarga	3635 Keluarga	156.345.147,00	157.370.000,00	157.370.000,00	1.024.853,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**• Tingkat penanganan gangguan Trantibum (Kecamatan Bontang Utara)**	**-**	**100 Persen**	**983.231.960,00**	**2.136.997.392,00**	**894.009.514,00**	**1.520.264.918,00**			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah lembaga yang diberdayakan*	-	3 Lembaga	949.856.960,00	1.751.331.392,00	864.294.514,00	-85.562.446,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	502.508.992,00	1.263.038.278,00	366.429.100,00	-136.079.892,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum (Kecamatan Bontang utara)**	**-**	**100 Persen**	**521.873.175,00**	**431.330.069,00**	**328.692.530,00**	**340.126.825,00**			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-	2 Kegiatan	521.873.175,00	431.330.069,00	328.692.530,00	-193.180.645,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	56 Orang	56 Orang	17.664.979,00	17.592.000,00	12.293.000,00	-5.371.979,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
		KELURAHAN API-API				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7.01	**KECAMATAN**				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi**	**-**	**100 A (90), Persen 100 Persen**	**40.094.246.305,00**	**52.365.711.053,00**	**51.749.603.133,00**	**7.949.574.107,00**			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian*	-	100 Persen	1.190.509.156,00	5.204.613.741,00	4.580.021.911,00	3.389.512.755,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	4 Paket	844.104,00	144.934.104,00	144.934.104,00	144.090.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	1 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	-2.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran*	-	100 Persen	2.935.471.487,00	5.643.980.519,00	4.856.561.879,00	1.921.090.392,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7 Paket	78.816.244,00	90.224.630,00	274.850.058,00	196.033.814,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	49.720.262,00	31.209.637,00	25.444.464,00	-24.275.798,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	145.908.000,00	145.908.000,00	145.908.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	130.624.000,00	171.621.000,00	100.365.000,00	-30.259.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*	-	100 Persen	1.420.593.449,00	4.458.386.285,00	5.058.386.407,00	3.637.792.958,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	758 Unit	680.000,00	798.611.668,00	1.198.611.668,00	1.197.931.668,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*	-	100 Persen	8.172.035.120,00	8.682.197.200,00	8.682.197.200,00	510.162.080,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	64.250.000,00	64.250.000,00	64.250.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*	-	100 Persen	910.826.805,00	2.114.037.665,00	2.314.037.665,00	1.403.210.860,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	9 Unit	105.278.000,00	97.670.000,00	97.670.000,00	-7.608.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	32 Unit	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**	**-**	**100 Persen**	**34.201.560.013,00**	**47.615.196.648,00**	**50.159.423.770,00**	**-5.713.892.923,00**			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-	100 Persen	14.172.703.367,00	22.685.111.063,00	24.672.255.352,00	10.499.551.985,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	17.800.000,00	27.100.000,00	26.928.000,00	9.128.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	15 Unit	500.000.000,00	3.835.900.000,00	4.635.900.000,00	4.135.900.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	115.472.000,00	65.371.000,00	65.371.000,00	-50.101.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan*	-	3 Lembaga	19.397.750.442,00	20.463.646.438,00	22.031.752.528,00	2.634.002.086,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	1.441.952.772,00	1.477.463.172,00	1.780.429.934,00	338.477.162,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	5 Laporan	2.563.000.000,00	2.532.069.654,00	2.530.169.654,00	-32.830.346,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan*	-	1 Kelurahan	631.106.204,00	4.466.439.147,00	3.455.415.890,00	2.824.309.686,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	15 Keluarga	3500 Keluarga	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**• Tingkat penanganan gangguan Trantibum (Kecamatan Bontang Utara)**	**-**	**100 Persen**	**983.231.960,00**	**2.136.997.392,00**	**894.009.514,00**	**1.520.264.918,00**			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah lembaga yang diberdayakan*	-	3 Lembaga	949.856.960,00	1.751.331.392,00	864.294.514,00	-85.562.446,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	49.472.000,00	108.993.278,00	112.993.278,00	63.521.278,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum (Kecamatan Bontang utara)**	**-**	**100 Persen**	**521.873.175,00**	**431.330.069,00**	**328.692.530,00**	**340.126.825,00**			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-	100 Persen	521.873.175,00	431.330.069,00	328.692.530,00	-193.180.645,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sesuai Penugasan Kepala Daerah										
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15 Orang	50 Orang	2.500.000,00	7.173.639,00	4.918.639,00	2.418.639,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
		KELURAHAN BONTANG KUALA				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7.01	**KECAMATAN**				**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi**	**-**	**100 A (90), Persen 100 Persen**	**40.094.246.305,00**	**52.365.711.053,00**	**51.749.603.133,00**	**7.949.574.107,00**			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian*	-	100 Persen	1.190.509.156,00	5.204.613.741,00	4.580.021.911,00	3.389.512.755,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	3 Paket	32.079.000,00	235.710.780,00	235.710.780,00	203.631.780,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	6 Orang	22.535.058,00	14.634.000,00	7.317.000,00	-15.218.058,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran*	-	100 Persen	2.935.471.487,00	5.643.980.519,00	4.856.561.879,00	1.921.090.392,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11 Paket	80.000.000,00	94.797.482,00	93.836.857,00	13.836.857,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	48.209.559,00	52.679.705,00	42.509.855,00	-5.699.704,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	70.950.000,00	70.950.000,00	70.950.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	94.813.011,00	94.079.000,00	63.938.000,00	-30.875.011,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*	-	100 Persen	1.420.593.449,00	4.458.386.285,00	5.058.386.407,00	3.637.792.958,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	194.153.840,00	194.153.840,00	193.153.840,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*	-	100 Persen	8.172.035.120,00	8.682.197.200,00	8.682.197.200,00	510.162.080,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	30.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*	-	100 Persen	910.826.805,00	2.114.037.665,00	2.314.037.665,00	1.403.210.860,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	72.149.840,00	82.842.765,00	82.842.765,00	10.692.925,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	200.000.000,00	199.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**	**-**	**100 Persen**	**34.201.560.013,00**	**47.615.196.648,00**	**50.159.423.770,00**	**-5.713.892.923,00**			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan*	-	12 Unsur	14.172.703.367,00	22.685.111.063,00	24.672.255.352,00	10.499.551.985,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	15.030.000,00	25.029.639,00	24.933.879,00	9.903.879,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	1.752.736.900,00	1.742.447.520,00	642.447.520,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											PENDANAAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	315.544.426,00	216.389.252,00	377.546.264,00	62.001.838,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan*	-	3 Lembaga	19.397.750.442,00	20.463.646.438,00	22.031.752.528,00	2.634.002.086,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	681.452.000,00	681.536.720,00	829.036.720,00	147.584.720,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	1.260.000.000,00	1.245.981.310,00	1.243.258.018,00	-16.741.982,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	631.106.204,00	4.466.439.147,00	3.455.415.890,00	2.824.309.686,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	15 Keluarga	15 Keluarga	56.765.077,00	877.020.077,00	630.796.820,00	574.031.743,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**• Tingkat penanganan gangguan Trantibum (Kecamatan Bontang Utara)**	**-**	**100 Persen**	**983.231.960,00**	**2.136.997.392,00**	**894.009.514,00**	**1.520.264.918,00**			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah lembaga yang diberdayakan*	-	3 Lembaga	949.856.960,00	1.751.331.392,00	864.294.514,00	-85.562.446,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	49.468.992,00	109.330.278,00	110.349.278,00	60.880.286,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum (Kecamatan Bontang utara)**	**-**	**100 Persen**	**521.873.175,00**	**431.330.069,00**	**328.692.530,00**	**340.126.825,00**			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-	2 Kegiatan	521.873.175,00	431.330.069,00	328.692.530,00	-193.180.645,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 Orang	50 Orang	10.210.000,00	8.908.000,00	6.986.000,00	-3.224.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	J U M L A H					**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**725.459.976.351,26**			

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 membutuhkan adanya usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, Perguruan Tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari Perangkat Daerah dari penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kota Bontang. Program/kegiatan Kecamatan Bontang Utara yang telah diperoleh melalui mekanisme usulan dan penelitan dalam Musrenbang. Selanjutnya dari hasil peneltian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bapelitbang Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara dan pihak pemangku kepentingan, antara lain: DSPM, Bagian Sosial, Diskominfo, Dinas Perhubungan, Perkim, PUPR, PPKD, Peerputakaan & Arsip, DPRD, Disnaker, Dinas LH, PMK, Dispopar, Disprindagkop, DKP3, BPBD, Dinkes, Disdik dan PTSP.

Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Kelurahan Guntung					
1	Pembangunan Masjid Jami' Nurul Huda Guntung (Lokasi RT. 06)	RT. 06			
2	Pembangunan Jembatan Beton RT. 13	RT. 07		P: 16 M L: 8 M T: 20 CM	
3	Renovasi Parit Kanan Kiri Jalan Tari Enggang	RT. 06		P: 1200 M L: 1,20 M	
4	Pembangunan Gudang di Kelurahan Guntung	RT. 15		1 Paket	
5	Relokasi Sekolah SDN 07 ke RT. 15	RT. 07		1 Paket	
Kelurahan Bontang Baru					
1	Pengaspalan Jalan Angklung Tembus Jalan Seruling Kolaborasi dengan RT. 21 dan RT. 22	Jl. Angklung Tembus Jalan Seruling		400 x 3,5 M	
2	Peningkatan Jalan Tergenang di Perum Seraton 1 dan 2	Perum Seraton 1 dan 2		200 x 3,5 M	
3	Dibuatkan Sodetan di Jl. R. Suprapto Menuju Sungai Bontang (Dari	R. Suprapto			

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
	Ramayana sampai Lampu Merah Amalia)				
4	Pengerukan Pelabuhan Tanjung Limau	Tanjung Limau			
5	Renovasi Posyandu Menjadi Lantai 2	RT. 22		P: 12 LD: 5 LB: 2	
Kelurahan Api-Api					
1	Pembangunan Lanjutan Turap atau Siring di: - Sungai Bontang (RT. 08, 14, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 37, 39) - Sungai Dahlia (RT. 04, 05, 06, 07, 09, 40) - Sungai Temputu (RT. 21, 23, 35)	Wilayah Kelurahan Api-Api			
2	Pembangunan Drainase Jalan Ahmad Yani, Drainase Rigomasi, Jl. Lombok, Jl. Madura, Jl. Sabang, Jl. Batam	RT. 01, 02, 03, 05, 20			
3	Peninggian Turap Wilayah Kelurahan Api-Api	RT. 17, 28, 33, 08, 22, 35			
4	Pembangunan Jembatan Beton Wilayah Kelurahan Api-Api	RT. 26 – 33, 14 – 34			
5	Pembuatan Gorong-Gorong	RT. 13, 17, 18			
Kelurahan Gunung Elai					
1	Peningkatan/Penaikan badan Jalan, Jl. Labu Putih RT. 19	Jl. Labu Putih RT. 19		300 M	
2	Peningkatan Drainase RT. 08, RT. 09, RT. 42	RT. 08, RT. 09, dan RT. 42		600 M	
3	Pelebaran jalan Akses Jalur Lingkar BSD Jl. G. Tambora, Jl. G. Pangrango, Jl. G. Burangrang, Jl. G. Tinombala, Jl. G. Soputan	Jalur Lingkar BSD Jl. G. Tambora, Jl. G. Pangrango, Jl. G. Burangrang, Jl. G. Tinombala, Jl. G. Soputan		1,5 KM	
4	Pemangkasan Jalan Brokoli Raya	Jl. Brokoli Raya RT. 14		200 M	
5	Peningkatan Jalan Kol Raya (Pengaspalan)	Jl. Kol Raya RT 08 dan RT 42		1 KM	
Kelurahan Loktuan					
1	Pengadaan Penerangan Lampu Jalan	Jl. RE Martadinata dan Jl. Slamet Riyadi		453 Paket	
2	Pengaspalan Jalan	1. Jl. Kapal Pinisi 2. Jl. Kapal Selam 3. Jl. Kapal Layar 1 (Kampung Mandar) 4. Jl. Kapal Layar 2 5. Jl. Kapal Pesiar		1952 M^2	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
3	Peningkatan Semenisasi Jalan Lingkungan dan Perbaikan Jalan	Jl. Kapal Selam, Jl. Kapal Layar, Jl. RE Martadinata, Jl. Masjid Nurul Muttaqin, Jl. Kapal Pinisi, Jl. Slamet Riyadi		7311,35 M^2	
4	Pembuatan dan Renovasi Gapura	Jl. RE Martadinata, Jl. Kapal Selam, Jl. Kapal Pinisi 7, Jl. Kapal Pinisi 4, Jl. Kapal Pinisi 5, Jl. Slamet Riyadi		8 Paket	
5	Pembangunan dan Renovasi BPU	Jl. RE Martadinata, Jl. Kapal Pinisi 1		380 M^2	
Kelurahan Bontang Kuala					
1	Semenisasi Jalan Utama Menuju Cafe Jimbaran	Melalui RT 10, 11, 07, 12 sampai RT. 20 di Cafe		±800 x 4 M	
2	Rehab Jembatan Kayu – Peningkatan Jembatan	Jl. Batu Sahasa 4 RT. 06		400 M x 4 M	
3	Rehab Jembatan Griya Wisata	Jl. Boulevard Perum Griya Wisata RT. 14		30 M x 8 M	
4	Rehab Jembatan Kayu	Terusan Jalan Samping BEKA Futsal RT. 19		8 M x 1 M	
5	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	Jl. Batu Sahasa Arah Musholla ke Cafe Ceria RT. 20		20 Titik	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN BONTANG UTARA

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai suatu keharusan setiap perangkat daerah menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap perangkat daerah termasuk untuk dapat menimplementasikan kebijakan kebijakan pemerintah baik tingkat Kota, Provinsi, maupun kebijakan nasional maka program prioritas pembangunan Kecamatan Bontang Utara secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang adalah sebgai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan Kreativitas dan Inovasi
10. Politik, hukum dan keamanan ketertiban
11. Perekonomian
12. Kesejahteraan Rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kota Bontang.

Kecamatan Bontang Utara sebagai perangkat daerah memiliki peran penting sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BONTANG UTARA

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan *(Critical Succes Factor)* yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Visi Pemerintah Kota Bontang adalah :

"Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab"

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi yang sebagai berikut :

a. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan
b. Kota Bontang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup
c. Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia

Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut di atas, serta urusan Umum dan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bontang Utara, maka fungsi dan tugas Bapelitbang terkait erat dengan misi 1, yaitu: "*Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan*", dan misi 3, yaitu "*Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia".*

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua progam dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Bontang Utara adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Bontang Utara yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif
b. Meningkatkan Kondusifitas wilayah Kecamatan Bontang Utara
c. Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Bontang Utara

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Bontang Utara dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kecamatan Bontang Utara adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Bontang Utara
b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bontang Utara
c. Meningkatkan kualitas Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
d. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bontang Utara

Tabel 3.1

Target Kinerja Dari Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Bontang Utara	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Nilai	87,5	87,5	88	90,54	92,93	95

	yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif								
2	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan Bontang Utara	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya keberdayaan sosial dan ekonomi di wilayah Kecamatan Bontang Utara	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : LKIP Kecamatan Bontang Utara Tahun 2024

3.3 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Kecamatan Bontang Utara yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rencana Kerja Kecamatan Bontang Utara Tahun 2025. Renja Kecamatan Bontang Utara merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Kecamatan Bontang Utara.

Rencana kinerja merupaka penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bontang Utara Tahun 2025 mengacu pada Tujuan Kecamatan Bontang Utara yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontang Utara untuk 5 Tahun mendatang, adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dari Kecamatan Bontang Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan yang akan dikerjakan pada tahun 2025. Menyusun program kegiatan, sub kegiatan tidak di pisah perprogram perkegiatan dan per sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang terkait dengan indikator ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
10. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
11. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
13. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
14. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
15. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan yang terkait dengan indikator ini adalah :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
25. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
26. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
27. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
28. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
29. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
30. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
31. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
32. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
33. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Guntung)
34. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Guntung)
35. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Guntung)
36. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Guntung)
37. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Guntung)
38. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD (Kelurahan Guntung)

39. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Guntung)
40. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Guntung)
41. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Guntung)
42. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Guntung)
43. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Guntung)
44. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Guntung)
45. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Guntung)
46. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Guntung)
47. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Guntung)
48. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Guntung)
49. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Guntung)
50. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Guntung)
51. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Guntung)
52. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Loktuan)
53. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Loktuan)
54. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Loktuan)
55. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Loktuan)
56. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Kelurahan Loktuan)

57. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Loktuan)
58. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Loktuan)
59. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Loktuan)
60. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Loktuan)
61. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Loktuan)
62. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Loktuan)
63. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Loktuan)
64. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Loktuan)
65. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Loktuan)
66. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Loktuan)
67. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Loktuan)
68. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Loktuan)
69. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Loktuan)
70. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Loktuan)
71. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Loktuan)
72. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Gunung Elai)
73. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Gunung Elai)
74. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Gunung Elai)
75. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Gunung Elai)

76. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Kelurahan Gunung Elai)
77. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Gunung Elai)
78. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Gunung Elai)
79. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Gunung Elai)
80. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Gunung Elai)
81. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Gunung Elai)
82. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Gunung Elai)
83. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Gunung Elai)
84. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Gunung Elai)
85. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunung Elai)
86. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunung Elai)
87. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gunung Elai)
88. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Gunung Elai)
89. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Gunung Elai)
90. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gunung Elai)
91. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Gunung Elai)
92. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Bontang Baru)
93. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Bontang Baru)
94. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(Kelurahan Bontang Baru)

95. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Bontang Baru)
96. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Kelurahan Bontang Baru)
97. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Bontang Baru)
98. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Bontang Baru)
99. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Bontang Baru)
100. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Bontang Baru)
101. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Bontang Baru)
102. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bontang Baru)
103. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Bontang Baru)
104. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Bontang Baru)
105. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bontang Baru)
106. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bontang Baru)
107. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bontang Baru)
108. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Bontang Baru)
109. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Bontang Baru)
110. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bontang Baru)
111. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Bontang Baru)
112. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Api-Api)

113. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Api-Api)
114. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Api-Api)

115. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Api-Api)
116. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Kelurahan Api-Api)
117. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Api-Api)
118. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Api-Api)
119. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Api-Api)
120. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Api-Api)
121. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Api- Api)
122. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Api-Api)
123. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Api-Api)
124. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Api-Api)
125. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Api- Api)
126. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Api- Api)
127. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Api-Api)
128. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Api-Api)
129. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Api-Api)

130. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Api-Api)
131. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kelurahan Bontang Kuala)

132. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kelurahan Bontang Kuala)
133. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Bontang Kuala)
134. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Bontang Kuala)
135. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Kelurahan Bontang Kuala)
136. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Bontang Kuala)
137. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Bontang Kuala)
138. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Bontang Kuala)
139. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Bontang Kuala)
140. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kelurahan Bontang Kuala)
141. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Bontang Kuala)
142. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Bontang Kuala)
143. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Bontang Kuala)
144. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bontang Kuala)
145. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bontang Kuala)
146. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bontang Kuala)
147. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Bontang Kuala)
148. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Kelurahan Bontang Kuala)
149. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bontang Kuala)
150. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kelurahan Bontang Kuala)

Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

- ✓ Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
  Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan Kecamatan Bontang Utara adalah 5 program, 15 kegiatan, dan 150 sub kegiatan.
- ✓ Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan.
  Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di Kecamatan Bontang Utara sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan dan 6 perangkat Kecamatan yakni Kelurahan Guntung, Kelurahan Loktuan, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Api Api, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Bontang Baru.
- ✓ Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN BONTANG UTARA

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan bahwa rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaanya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Disamping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencan akerja danpendaaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembanguna Jangka Menengah dan Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang, indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan dimasa mendatang.

Kinerja organisai pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capian sasaran organisais dan tingkat efisiensi dan efektifitas pencapian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan perangkat daerah, diperlukan penetapan indikator program pembangunan perangkat daerah. Secara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan

pembangunan Kecamatan Bontang Utara tahun 2025, dapat dilihat pada tabelberikut:

Tabel.4.1

Matrik Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Bontang Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		KECAMATAN BONTANG UTARA							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7.01	**KECAMATAN**							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**-**	**100 Persen**	**40.094.246.305,00**	**52.365.711.053,00**	**51.749.603.133,00**	**7.949.574.107,00**			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan*				-	4 Dokumen	23.660.540,00	2.936.812,00	851.808,00	-22.808.732,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1 Dokumen	1.112.725,00	1.117.808,00	387.904,00	-724.821,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	22.547.815,00	1.819.004,00	463.904,00	-22.083.911,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan*				-	123 Orang	25.441.149.748,00	26.259.558.831,00	26.257.546.263,00	816.396.515,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				242 Orang/ bulan	242 Orang/ bulan	25.416.308.591,00	26.254.945.454,00	26.254.945.454,00	838.636.863,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23.810.856,00	2.863.857,00	1.999.953,00	-21.810.903,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3 Dokumen	1 Dokumen	1.030.301,00	1.749.520,00	600.856,00	-429.445,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian*				-	100 Persen	1.190.509.156,00	5.204.613.741,00	4.580.021.911,00	3.389.512.755,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	9 Paket	747.793.036,00	1.001.983.400,00	996.772.880,00	248.979.844,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	55 Orang	253.278.000,00	1.282.895.000,00	1.064.688.000,00	811.410.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran*				-	100 Persen	2.935.471.487,00	5.643.980.519,00	4.856.561.879,00	1.921.090.392,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.151.505,00	20.728.395,00	16.609.194,00	457.689,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	300.000.000,00	1.025.863.298,00	975.578.143,00	675.578.143,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	2 Paket	32.288.890,00	45.819.990,00	44.359.050,00	12.070.160,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	104.768.323,00	140.221.552,00	113.357.020,00	8.588.697,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12Dokumen	12Dokumen	9.469.076,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-7.789.076,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	346.637.000,00	853.610.000,00	326.105.000,00	-20.532.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*				-	100 Persen	1.420.593.449,00	4.458.386.285,00	5.058.386.407,00	3.637.792.958,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	207.244.815,00	207.244.815,00	157.244.815,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	206.060.200,00	1.890.000,00	1.890.000,00	-204.170.200,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	257.012.500,00	277.012.500,00	277.012.500,00	20.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	72.121.070,00	2.149.963.509,00	2.149.963.509,00	2.077.842.439,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*				-	100 Persen	8.172.035.120,00	8.682.197.200,00	8.682.197.200,00	510.162.080,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	460.466.000,00	685.610.000,00	685.610.000,00	225.144.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.142.919.120,00	7.355.227.200,00	7.355.227.200,00	212.308.080,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*				-	100 Persen	910.826.805,00	2.114.037.665,00	2.314.037.665,00	1.403.210.860,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	18 Unit	200.802.000,00	219.360.000,00	219.360.000,00	18.558.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	41.636.300,00	52.533.500,00	52.533.500,00	10.897.200,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	1.106.746.500,00	1.106.746.500,00	1.096.746.500,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	71.050.000,00	71.050.000,00	61.050.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP**				**98 Persen**	**98 Persen**	**722.815.586,00**	**2.731.085.205,00**	**2.037.533.044,00**	**83.184.414,00**			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Subjek Koordinasi*				3 Koordinasi	3 Koordinasi	465.225.524,00	1.228.257.749,00	984.396.749,00	519.171.225,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	300.937.742,00	300.937.749,00	300.937.749,00	7,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12Dokumen	12Dokumen	164.287.782,00	927.320.000,00	683.459.000,00	519.171.218,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Urusan*				-	7 Urusan	132.590.062,00	1.279.438.656,00	882.077.600,00	749.487.538,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	67.561.862,00	254.413.750,00	157.693.750,00	90.131.888,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	49.996.834,00	4.312.000,00	-45.688.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	15.028.200,00	975.028.072,00	720.071.850,00	705.043.650,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Koordinasi*				-	6 Kali	125.000.000,00	223.388.800,00	171.058.695,00	46.058.695,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	125.000.000,00	223.388.800,00	171.058.695,00	46.058.695,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat**				**-**	**100 Persen**	**34.201.560.013,00**	**47.615.196.648,00**	**50.159.423.770,00**	**-5.713.892.923,00**			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan*				-	3 Lembaga	19.397.750.442,00	20.463.646.438,00	22.031.752.528,00	2.634.002.086,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				12 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	42.727.090,00	742.725.198,00	703.362.130,00	660.635.040,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penaganan Gangguan Trantibum**				**-**	**100 Persen**	**983.231.960,00**	**2.136.997.392,00**	**894.009.514,00**	**1.520.264.918,00**			
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Koordinasi yang dilakukan*				-	1 Kegiatan	33.375.000,00	385.666.000,00	29.715.000,00	-3.660.000,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	33.375.000,00	385.666.000,00	29.715.000,00	-3.660.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum (Kecamatan Bontang utara)**				**-**	**100 Persen**	**521.873.175,00**	**431.330.069,00**	**328.692.530,00**	**340.126.825,00**			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				-	1 Kegiatan	521.873.175,00	431.330.069,00	328.692.530,00	-193.180.645,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	300 Orang	411.116.204,00	71.078.278,00	71.078.278,00	-340.037.926,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				180 Orang	46 Orang	33.375.000,00	33.279.450,00	25.981.522,00	-7.393.478,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
		KELURAHAN GUNTUNG							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7.01	**KECAMATAN**							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah** **• Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi**				**-**	**100 A (90), Persen 100 Persen**	**40.094.246.305,00**	**52.365.711.053,00**	**51.749.603.133,00**	**7.949.574.107,00**			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian*				-	100 Persen	1.190.509.156,00	5.204.613.741,00	4.580.021.911,00	3.389.512.755,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	2 Paket	10.000.000,00	323.347.857,00	320.326.547,00	310.326.547,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	4 Orang	20.000.000,00	221.314.000,00	216.118.000,00	196.118.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum*				-	7 Layanan	2.935.471.487,00	5.643.980.519,00	4.856.561.879,00	1.921.090.392,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	50.000.000,00	23.451.012,00	18.692.448,00	-31.307.552,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	24.005.660,00	19.112.780,00	-20.887.220,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1 Dokumen	34.384.234,00	34.384.000,00	34.384.000,00	-234,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	118.000.000,00	359.038.000,00	255.927.000,00	137.927.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*				-	100 Persen	1.420.593.449,00	4.458.386.285,00	5.058.386.407,00	3.637.792.958,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	230.000.122,00	200.000.122,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*				-	100 Persen	8.172.035.120,00	8.682.197.200,00	8.682.197.200,00	510.162.080,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*				-	100 Persen	910.826.805,00	2.114.037.665,00	2.314.037.665,00	1.403.210.860,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	90.571.250,00	114.450.000,00	114.450.000,00	23.878.750,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	25.000.000,00	23.974.900,00	23.974.900,00	-1.025.100,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**				**-**	**100 Persen**	**34.201.560.013,00**	**47.615.196.648,00**	**50.159.423.770,00**	**-5.713.892.923,00**			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan*				-	12 Unsur	14.172.703.367,00	22.685.111.063,00	24.672.255.352,00	10.499.551.985,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	13.425.000,00	26.963.639,00	26.963.639,00	13.538.639,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	4 Unit	755.864.000,00	1.110.541.978,00	1.100.429.398,00	344.565.398,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1.109.680.426,00	1.209.648.787,00	780.331.917,00	-329.348.509,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan*				-	2 Lembaga	19.397.750.442,00	20.463.646.438,00	22.031.752.528,00	2.634.002.086,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	641.406.800,00	647.158.903,00	782.091.700,00	140.684.900,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	1.134.000.000,00	1.132.659.637,00	1.329.446.075,00	195.446.075,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan*				-	1 Kelurahan	631.106.204,00	4.466.439.147,00	3.455.415.890,00	2.824.309.686,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				12 Keluarga	1458 Keluarga	35.000.000,00	604.980.000,00	24.480.000,00	-10.520.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**• Tingkat penanganan gangguan Trantibum (Kecamatan Bontang Utara)** **• Tingkat penanganan gangguan Trantibum**				**-**	**100** **100 %** **Persen**	**983.231.960,00**	**2.136.997.392,00**	**894.009.514,00**	**1.520.264.918,00**			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah lembaga yang diberdayakan*				-	3 Lembaga	949.856.960,00	1.751.331.392,00	864.294.514,00	-85.562.446,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	49.468.992,00	109.429.278,00	113.429.278,00	63.960.286,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**• Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (Kecamatan Bontang utara)** **• Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum**				**-**	**100** **100 %** **Persen**	**521.873.175,00**	**431.330.069,00**	**328.692.530,00**	**340.126.825,00**			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum*				-	2 Kegiatan	521.873.175,00	431.330.069,00	328.692.530,00	-193.180.645,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				12 Orang	66 Orang	22.000.000,00	208.332.365,00	131.372.574,00	109.372.574,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		KELURAHAN LOKTUAN							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7.01	**KECAMATAN**							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi**				**-**	**100 A (90), Persen 100 Persen**	**40.094.246.305,00**	**52.365.711.053,00**	**51.749.603.133,00**	**7.949.574.107,00**			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian*				-	100 Persen	1.190.509.156,00	5.204.613.741,00	4.580.021.911,00	3.389.512.755,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	2 Paket	35.000.000,00	141.123.600,00	141.123.600,00	106.123.600,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	30 Orang	10.000.000,00	1.311.641.000,00	994.507.000,00	984.507.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran*				-	100 Persen	2.935.471.487,00	5.643.980.519,00	4.856.561.879,00	1.921.090.392,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	7 Paket	70.180.000,00	767.907.467,00	938.248.651,00	868.068.651,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	2 Paket	40.000.000,00	40.423.479,00	32.305.142,00	-7.694.858,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	188.826.000,00	287.567.600,00	287.567.600,00	98.741.600,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	335.441.839,00	269.408.750,00	169.672.750,00	-165.769.089,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*				-	100 Persen	1.420.593.449,00	4.458.386.285,00	5.058.386.407,00	3.637.792.958,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	595 Unit	771.000.000,00	768.998.413,00	768.998.413,00	-2.001.587,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*				-	100 Persen	8.172.035.120,00	8.682.197.200,00	8.682.197.200,00	510.162.080,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	82.600.000,00	94.600.000,00	94.600.000,00	12.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*				-	100 Persen	910.826.805,00	2.114.037.665,00	2.314.037.665,00	1.403.210.860,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	11 Unit	102.914.850,00	168.580.000,00	168.580.000,00	65.665.150,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	37 Unit	25.000.000,00	24.770.000,00	24.770.000,00	-230.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**				**-**	**100 Persen**	**34.201.560.013,00**	**47.615.196.648,00**	**50.159.423.770,00**	**-5.713.892.923,00**			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan*				-	12 Unsur	14.172.703.367,00	22.685.111.063,00	24.672.255.352,00	10.499.551.985,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga K emasyarak atan	5 Lembaga Kemasyara katan	21.187.636,00	45.059.636,00	45.059.636,00	23.872.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	4 Unit	2.746.367.500,00	1.046.077.465,00	2.495.087.465,00	-251.280.035,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	365.544.426,00	397.684.214,00	497.666.994,00	132.122.568,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan*				-	3 Lembaga	19.397.750.442,00	20.463.646.438,00	22.031.752.528,00	2.634.002.086,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				10 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.678.150.936,00	1.701.640.536,00	2.045.206.016,00	367.055.080,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	3.062.411.044,00	3.012.436.453,00	3.012.436.453,00	-49.974.591,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan*				-	1 Kelurahan	631.106.204,00	4.466.439.147,00	3.455.415.890,00	2.824.309.686,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				12 Keluarga	5000 Keluarga	165.049.700,00	1.612.167.030,00	1.307.867.030,00	1.142.817.330,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penaganan Gangguan Trantibum**				**-**	**100 Persen**	**983.231.960,00**	**2.136.997.392,00**	**894.009.514,00**	**1.520.264.918,00**			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah lembaga yang diberdayakan*				-	3 Lembaga	949.856.960,00	1.751.331.392,00	864.294.514,00	-85.562.446,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	249.468.992,00	111.113.280,00	108.061.280,00	-141.407.712,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum (Kecamatan Bontang utara)**				**-**	**100 Persen**	**521.873.175,00**	**431.330.069,00**	**328.692.530,00**	**340.126.825,00**			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum*				-	2 Kegiatan	521.873.175,00	431.330.069,00	328.692.530,00	-193.180.645,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				12 Orang	330 Orang	20.000.000,00	19.960.000,00	11.250.000,00	-8.750.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
		KELURAHAN GUNUNG ELAI							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7.01	**KECAMATAN**							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**-**	**100 Persen**	**40.094.246.305,00**	**52.365.711.053,00**	**51.749.603.133,00**	**7.949.574.107,00**			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian*				-	100 Persen	1.190.509.156,00	5.204.613.741,00	4.580.021.911,00	3.389.512.755,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	1 Paket	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	1 Orang	4.950.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.950.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran*				-	100 Persen	2.935.471.487,00	5.643.980.519,00	4.856.561.879,00	1.921.090.392,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	8 Paket	70.971.506,00	163.113.783,00	132.309.838,00	61.338.332,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3 Paket	26.943.598,00	70.379.112,00	70.379.112,00	43.435.514,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3 Dokumen	159.840.000,00	132.840.000,00	132.840.000,00	-27.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	85.639.503,00	179.207.000,00	120.664.000,00	35.024.497,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*				-	100 Persen	1.420.593.449,00	4.458.386.285,00	5.058.386.407,00	3.637.792.958,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	5.054.700,00	1.233.540,00	1.233.540,00	-3.821.160,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*				-	100 Persen	8.172.035.120,00	8.682.197.200,00	8.682.197.200,00	510.162.080,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	77.100.000,00	124.800.000,00	124.800.000,00	47.700.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*				-	100 Persen	910.826.805,00	2.114.037.665,00	2.314.037.665,00	1.403.210.860,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	15 Unit	51.904.344,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-49.954.344,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	1 Unit	12.180.000,00	730.000,00	730.000,00	-11.450.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.107.421,00	610.000,00	610.000,00	-497.421,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**				**-**	**100 Persen**	**34.201.560.013,00**	**47.615.196.648,00**	**50.159.423.770,00**	**-5.713.892.923,00**			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan*				-	12 Unsur	14.172.703.367,00	22.685.111.063,00	24.672.255.352,00	10.499.551.985,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.454.770,00	61.775.639,00	61.267.840,00	46.813.070,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	23 Unit	3.350.000.000,00	4.432.943.964,00	4.865.948.964,00	1.515.948.964,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	515.544.426,00	934.822.498,00	483.216.881,00	-32.327.545,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan*				-	3 Lembaga	19.397.750.442,00	20.463.646.438,00	22.031.752.528,00	2.634.002.086,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	1.351.217.000,00	1.408.123.040,00	1.699.310.156,00	348.093.156,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	2.835.000.000,00	3.163.741.507,00	3.168.516.304,00	333.516.304,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan*				-	1 Kelurahan	631.106.204,00	4.466.439.147,00	3.455.415.890,00	2.824.309.686,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				45 Keluarga	4185 Keluarga	133.946.280,00	1.130.902.040,00	1.250.902.040,00	1.116.955.760,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**• Tingkat penanganan gangguan Trantibum (Kecamatan Bontang Utara)**				**-**	**100 Persen**	**983.231.960,00**	**2.136.997.392,00**	**894.009.514,00**	**1.520.264.918,00**			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah lembaga yang diberdayakan*				-	3 Lembaga	949.856.960,00	1.751.331.392,00	864.294.514,00	-85.562.446,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	49.468.992,00	49.427.000,00	53.032.300,00	3.563.308,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**• Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (Kecamatan Bontang utara)**				**-**	**100 Persen**	**521.873.175,00**	**431.330.069,00**	**328.692.530,00**	**340.126.825,00**			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				-	2 Kegiatan	521.873.175,00	431.330.069,00	328.692.530,00	-193.180.645,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				25 Orang	66 Orang	5.006.992,00	65.006.337,00	64.812.517,00	59.805.525,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
		KELURAHAN BONTANG BARU							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7.01	**KECAMATAN**							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijkan reformasi birokrasi**				**-**	**100 A (90), Persen 100 Persen**	**40.094.246.305,00**	**52.365.711.053,00**	**51.749.603.133,00**	**7.949.574.107,00**			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian*				-	100 Persen	1.190.509.156,00	5.204.613.741,00	4.580.021.911,00	3.389.512.755,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	3 Paket	27.664.979,00	178.890.000,00	178.890.000,00	151.225.021,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	30 Orang	17.664.979,00	334.940.000,00	272.934.000,00	255.269.021,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran*				-	100 Persen	2.935.471.487,00	5.643.980.519,00	4.856.561.879,00	1.921.090.392,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	7 Paket	27.664.979,00	267.209.587,00	250.116.877,00	222.451.898,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	2 Paket	10.000.000,00	13.930.380,00	12.033.040,00	2.033.040,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	103.894.000,00	496.000,00	496.000,00	-103.398.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	65.329.958,00	171.226.000,00	86.322.000,00	20.992.042,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*				-	100 Persen	1.420.593.449,00	4.458.386.285,00	5.058.386.407,00	3.637.792.958,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	27.664.979,00	29.278.000,00	29.278.000,00	1.613.021,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*				-	100 Persen	8.172.035.120,00	8.682.197.200,00	8.682.197.200,00	510.162.080,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	134.700.000,00	135.710.000,00	135.710.000,00	1.010.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*				-	100 Persen	910.826.805,00	2.114.037.665,00	2.314.037.665,00	1.403.210.860,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	9 Unit	130.182.800,00	117.670.000,00	117.670.000,00	-12.512.800,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	KECAMATAN BONTANG UTARA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**				**-**	**100 Persen**	**34.201.560.013,00**	**47.615.196.648,00**	**50.159.423.770,00**	**-5.713.892.923,00**			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan*				-	12 Unsur	14.172.703.367,00	22.685.111.063,00	24.672.255.352,00	10.499.551.985,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	13.869.001,00	25.510.939,00	24.219.000,00	10.349.999,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	5 Unit	2.687.375.330,00	6.820.654.448,00	6.788.202.140,00	4.100.826.810,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	515.544.426,00	650.901.065,00	630.734.815,00	115.190.389,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan*				-	3 Lembaga	19.397.750.442,00	20.463.646.438,00	22.031.752.528,00	2.634.002.086,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	942.432.800,00	952.200.320,00	1.145.890.320,00	203.457.520,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	1.764.000.000,00	1.765.909.988,00	1.762.599.048,00	-1.400.952,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan*				-	100 Persen	631.106.204,00	4.466.439.147,00	3.455.415.890,00	2.824.309.686,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				300 Keluarga	3635 Keluarga	156.345.147,00	157.370.000,00	157.370.000,00	1.024.853,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**• Tingkat penanganan gangguan Trantibum (Kecamatan Bontang Utara)**				**-**	**100 Persen**	**983.231.960,00**	**2.136.997.392,00**	**894.009.514,00**	**1.520.264.918,00**			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah lembaga yang diberdayakan*				-	3 Lembaga	949.856.960,00	1.751.331.392,00	864.294.514,00	-85.562.446,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	502.508.992,00	1.263.038.278,00	366.429.100,00	-136.079.892,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum (Kecamatan Bontang utara)**				**-**	**100 Persen**	**521.873.175,00**	**431.330.069,00**	**328.692.530,00**	**340.126.825,00**			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				-	2 Kegiatan	521.873.175,00	431.330.069,00	328.692.530,00	-193.180.645,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				56 Orang	56 Orang	17.664.979,00	17.592.000,00	12.293.000,00	-5.371.979,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
		KELURAHAN API-API							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7.01	**KECAMATAN**							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah** **• Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi**				**-**	**100** **A (90),** **Persen** **100 Persen**	**40.094.246.305,00**	**52.365.711.053,00**	**51.749.603.133,00**	**7.949.574.107,00**			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian*				-	100 Persen	1.190.509.156,00	5.204.613.741,00	4.580.021.911,00	3.389.512.755,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	4 Paket	844.104,00	144.934.104,00	144.934.104,00	144.090.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	1 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	-2.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran*				-	100 Persen	2.935.471.487,00	5.643.980.519,00	4.856.561.879,00	1.921.090.392,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	7 Paket	78.816.244,00	90.224.630,00	274.850.058,00	196.033.814,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	49.720.262,00	31.209.637,00	25.444.464,00	-24.275.798,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	145.908.000,00	145.908.000,00	145.908.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12 Laporan	130.624.000,00	171.621.000,00	100.365.000,00	-30.259.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*				-	100 Persen	1.420.593.449,00	4.458.386.285,00	5.058.386.407,00	3.637.792.958,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	758 Unit	680.000,00	798.611.668,00	1.198.611.668,00	1.197.931.668,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*				-	100 Persen	8.172.035.120,00	8.682.197.200,00	8.682.197.200,00	510.162.080,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64.250.000,00	64.250.000,00	64.250.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*				-	100 Persen	910.826.805,00	2.114.037.665,00	2.314.037.665,00	1.403.210.860,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	9 Unit	105.278.000,00	97.670.000,00	97.670.000,00	-7.608.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	32 Unit	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**				**-**	**100 Persen**	**34.201.560.013,00**	**47.615.196.648,00**	**50.159.423.770,00**	**-5.713.892.923,00**			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan*				-	100 Persen	14.172.703.367,00	22.685.111.063,00	24.672.255.352,00	10.499.551.985,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	17.800.000,00	27.100.000,00	26.928.000,00	9.128.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	15 Unit	500.000.000,00	3.835.900.000,00	4.635.900.000,00	4.135.900.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	115.472.000,00	65.371.000,00	65.371.000,00	-50.101.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan*				-	3 Lembaga	19.397.750.442,00	20.463.646.438,00	22.031.752.528,00	2.634.002.086,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	1.441.952.772,00	1.477.463.172,00	1.780.429.934,00	338.477.162,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	5 Laporan	2.563.000.000,00	2.532.069.654,00	2.530.169.654,00	-32.830.346,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan*				-	1 Kelurahan	631.106.204,00	4.466.439.147,00	3.455.415.890,00	2.824.309.686,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				15 Keluarga	3500 Keluarga	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**• Tingkat penanganan gangguan Trantibum (Kecamatan Bontang Utara)**				**-**	**100 Persen**	**983.231.960,00**	**2.136.997.392,00**	**894.009.514,00**	**1.520.264.918,00**			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah lembaga yang diberdayakan*				-	3 Lembaga	949.856.960,00	1.751.331.392,00	864.294.514,00	-85.562.446,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	49.472.000,00	108.993.278,00	112.993.278,00	63.521.278,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum (Kecamatan Bontang utara)**				**-**	**100 Persen**	**521.873.175,00**	**431.330.069,00**	**328.692.530,00**	**340.126.825,00**			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				-	100 Persen	521.873.175,00	431.330.069,00	328.692.530,00	-193.180.645,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				15 Orang	50 Orang	2.500.000,00	7.173.639,00	4.918.639,00	2.418.639,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		KELURAHAN BONTANG KUALA							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
	7.01	**KECAMATAN**							**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**28.645.534.952,00**			
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**• Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah • Nilai IKM Perangkat Daerah ; Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi**				**-**	**100 A (90), Persen 100 Persen**	**40.094.246.305,00**	**52.365.711.053,00**	**51.749.603.133,00**	**7.949.574.107,00**			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan layanan administrasi kepegawaian*				-	100 Persen	1.190.509.156,00	5.204.613.741,00	4.580.021.911,00	3.389.512.755,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	3 Paket	32.079.000,00	235.710.780,00	235.710.780,00	203.631.780,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	6 Orang	22.535.058,00	14.634.000,00	7.317.000,00	-15.218.058,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran*				-	100 Persen	2.935.471.487,00	5.643.980.519,00	4.856.561.879,00	1.921.090.392,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	11 Paket	80.000.000,00	94.797.482,00	93.836.857,00	13.836.857,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	48.209.559,00	52.679.705,00	42.509.855,00	-5.699.704,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	70.950.000,00	70.950.000,00	70.950.000,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	94.813.011,00	94.079.000,00	63.938.000,00	-30.875.011,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah*				-	100 Persen	1.420.593.449,00	4.458.386.285,00	5.058.386.407,00	3.637.792.958,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	194.153.840,00	194.153.840,00	193.153.840,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa layanan umum perkantoran*				-	100 Persen	8.172.035.120,00	8.682.197.200,00	8.682.197.200,00	510.162.080,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	30.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik*				-	100 Persen	910.826.805,00	2.114.037.665,00	2.314.037.665,00	1.403.210.860,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	72.149.840,00	82.842.765,00	82.842.765,00	10.692.925,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	200.000.000,00	199.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**				**-**	**100 Persen**	**34.201.560.013,00**	**47.615.196.648,00**	**50.159.423.770,00**	**-5.713.892.923,00**			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan*				-	12 Unsur	14.172.703.367,00	22.685.111.063,00	24.672.255.352,00	10.499.551.985,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	15.030.000,00	25.029.639,00	24.933.879,00	9.903.879,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	5 Unit	1.100.000.000,00	1.752.736.900,00	1.742.447.520,00	642.447.520,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	315.544.426,00	216.389.252,00	377.546.264,00	62.001.838,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan*				-	3 Lembaga	19.397.750.442,00	20.463.646.438,00	22.031.752.528,00	2.634.002.086,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	681.452.000,00	681.536.720,00	829.036.720,00	147.584.720,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	1.260.000.000,00	1.245.981.310,00	1.243.258.018,00	-16.741.982,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	631.106.204,00	4.466.439.147,00	3.455.415.890,00	2.824.309.686,00			KECAMATAN BONTANG UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Tingkat Kecamatan dan Kelurahan													
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				15 Keluarga	15 Keluarga	56.765.077,00	877.020.077,00	630.796.820,00	574.031.743,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**• Tingkat penanganan gangguan Trantibum (Kecamatan Bontang Utara)**				**-**	**100 Persen**	**983.231.960,00**	**2.136.997.392,00**	**894.009.514,00**	**1.520.264.918,00**			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah lembaga yang diberdayakan*				-	3 Lembaga	949.856.960,00	1.751.331.392,00	864.294.514,00	-85.562.446,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	49.468.992,00	109.330.278,00	110.349.278,00	60.880.286,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum (Kecamatan Bontang utara)**				**-**	**100 Persen**	**521.873.175,00**	**431.330.069,00**	**328.692.530,00**	**340.126.825,00**			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				-	2 Kegiatan	521.873.175,00	431.330.069,00	328.692.530,00	-193.180.645,00			KECAMATAN BONTANG UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				12 Orang	50 Orang	10.210.000,00	8.908.000,00	6.986.000,00	-3.224.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	KECAMATAN BONTANG UTARA
	J U M L A H								**76.523.727.039,00**	**105.280.320.367,00**	**105.169.261.991,00**	**725.459.976.351,26**			

XXVIII. KECAMATAN BONTANG SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 dan RKPD , Setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu perubahan kegiatan tahun berjalan. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bontang Selatan ini mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Kota Bontang Tahun Anggaran 2025, Renstra Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2021-2026, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan Perubahan RKPD Kota Bontang Bontang Tahun 2025 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan Kecamatan Bontang Selatan, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Kecamatan Bontang Selatan menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2025 yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2025, selaras dengan Renstra Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Kecamatan Bontang Selatan dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2025 adalah :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
h. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2010;
i. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 17);
j. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021 – 2026.
k. Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
l. Surat Edaran Walikota Bontang Nomor 000.7.2/495/BAPPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud memberikan arahan kegiatan Pembangunan Kecamatan Bontang Selatan yang merupakan bagian dari arah pembangunan Kota Bontang, sehingga terjadi kesamaan langkah dalam Visi yang terkoordinasi.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2025 yaitu :

1. Terwujudnya Rencana program utama yang akan dicapai selama tahun 2025
2. Terwujudnya kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) organisasi.

1.4. **Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Bontang Selatan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Hasil Renja SKPD Triwulan II Tahun 2025.

Pada bagian ini memuat kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Selatan tahun 2025.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam bagian ini diuraikan hasil Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program , kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggarannya yang disediakan di RKPD .

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan target kinerja Renstra SKPD

1.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAR DAERAH

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Hasil Renja SKPD Triwulan II Tahun 2025

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Selatan adalah menyusun serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Bontang Selatan Triwulan II Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Bontang Selatan sebesar Rp. 87.618.554.412,00 dengan 5 (lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan terdiri dari 141 (seratus empat puluh satu) Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 32.094.823.022,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 45,78% dan capaian kinerja keuangan sebesar 36,63%. dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Operasional	71.971.250.936	25.589.401.582	35,55
2	Modal	15.647.303.476	6.505.421.440	41,57
3	Tak Terduga	-	-	-
4	Transfer	-	-	-
	JUMLAH	**87.618.554.412**	**32.094.823.022**	**36,63**

Dari hasil evaluasi program/kegiatan yang telah ditetapkan kecamatan Bontang Selatan tahun lalu semua program/kegiatan telah sesuai target yang ditetapkan. dengan demikian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 triwulan II serta perkiraan capaian program dan kegiatan hingga akhir tahun 2025, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bontang Selatan sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sumber daya manusia untuk mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.
b. Sarana dan prasarana yang dimiliki terbatas sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan.

c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan kurangnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
d. Kelurahan telah bergabung dengan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah. Dengan anggaran yang terbatas menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi kurang maksimal karena kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat tidak mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.
e. Belum optimalnya penyerapan anggaran PPTK sesuai dengan target pertriwulan yang telah ditetapkan disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sehingga dilakukan penyesuaian Penyusunan program Kegiatan dan Penyusunan anggaran kas.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Bontang Selatan tahun 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Bontang Selatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan Bontang Selatan yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat.	1. Meningkatkan kualitas SDM 2. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 3. Memfasilitasi kegiatan Pemilu	1. Pengembangan data dan informasi pelayanan 2. Optimalisasi peran aparatur dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 3. Optimalisasi peran dan fungsi pemerintahan kelurahan 4. Pengembangan etos dan budaya kerja sumber daya manusia aparatur 5. Pengembangan kecakapan dan ketrampilan sumber daya manusia aparatur
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBBM	1. Mengoptimalkan sistem pengawasan integritas melalui penerapan manajemen 2. Peningkatan komitmen agar mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan berintegrasi serta mendorong inovasi di unit kerja dan diukur secara berkala efektifitasnya 3. Membangun komunikasi dan kedekatan yang lebih intensif dengan pengguna layanan dan stakeholder untuk memperkecil gap antara harapan pengguna layanan dengan kinerja	1.1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemudahan perizinan. 2.2. Integritas dalam melindungi informasi organisasi . 3. Integritas dalam menggunakan komunikasi elektronik. . 4. Integritas dalam memelihara lingkungan kerja yang bebas dari suap, korupsi, kolusi, pelecehan dan perbuatan asusila, ancaman dan kekerasan. 5.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		layanan yang diberikan. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan manajemen media sebagai upayan mempercepat penyebaran informasi dan memaksimalkan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	5.
Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	1. Pemantapan system ketentraman dan ketertiban masyarakat 2. Penguatan peran aktif lembaga kemasyarakatan	1. Pembinaan dan monitoring tingkat kelurahan. 2. Mengembangkan sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi 3. Sinergi bersama TNI/Polri dan stakeholder dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban 4. Mendorong peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat ddi Wilayah Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1. Melakukan sosialisasi, monitoring, gotong royong dan penghaijauan 2. Memberikan undangan dan pengumuman pelaksanaan kegiatan sampai tingkat kelurahan 3. Memberikan motivasi dan pembinaan/bimbingan	1. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan 2. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		ke tingkat kelurahan terkait lomba kelurahan dan pemukiman sehat	pembangunan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Selatan sampai triwulan II Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

tabel 2.2 (T-C.29) Terlampir

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan, maka perlu mengukur tingkat pencapaian yang telah diwujudkan pada akhir periode. Pengukuran ini diperlukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, selain itu digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan di masa yang akan datang..

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontang Selatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.3 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Bontang Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target IK Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Proyeksi			Catatan
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1	Presentase Peningkatan Nilai SKM	-	-	-	87,5	87,5	88	88	89	88	87,5	88	95,36	-	88	88	89	Nilai
2	Nilai Zona Integritas	-	-	-	N/A	90	92	93	94	N/A	93	92	N/A	-	92	93	94	Nilai
3	Presentase Peran Aktif Masyarakat dalam Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	Persen
4	Presentase Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	-	-	-	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	Persen

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan ekseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi permasalahan-permasalahan Kecamatan Bontang Selatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat:

1. Permasalahan Internal :

- Sumber Daya Manusia belum optimal
  Secara kuantitas 192 orang pegawai Kecamatan Bontang Selatan termasuk didalamnya 6 Kelurahan, sudah memadai bahkan cenderung lebih tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Harapan kedepan masing-masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan anggaran yang memadai. Selain itu pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pelaksanaan tugas pada jam kerja masih kurang bisa mematuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sarana dan Prasarana Terbatas
  Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Bontang Selatan masih terbatas sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan rutin. Hal ini disebabkan pagu anggaran yang terbatas sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan, sementara peralatan kantor yang ada rata-rata sudah berumur sehingga biaya perawatannya cukup tinggi sedangkan produktifitasnya tidak dapat maksimal.
- Administrasi belum tertata dengan baik
  Arsip merupakan hal sangat penting sebagai bukti dokumen pelaksanaan setiap kegiatan atau dokumen penting lainnya. Pengelolaan arsip di Kecamatan Bontang Selatan belum tertib sehingga masih perlu penataan yang lebih baik khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan diperlukan. Dibutuhkan tenaga administrasi yang cakap dalam menata dokumen-dokumen Kecamatan.

2. **Permasalahan Eksternal antara lain :**

- Lingkungan Hidup
  - ✓ Banjir, penanggulangan banjir yang sering melanda kawasan Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Laut dan Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Indah.
  - ✓ Eksploitasi terumbu karang, pencegahannya dengan mengupayakan pelestarian lingkungan hidup dan biota laut.

- Pengentasan kemiskinan
  - ✓ Angka kemiskinan cukup tinggi. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dengan memperhatikan sektor riil dan UKM.
- Pertanahan
  - ✓ Pelaksanaan administrasi pertanahan terhambat karena sengketa tanah.
- Kependudukan
  - ✓ Pencapaian bidang administrasi kependudukan yang telah melakukan perekaman e-KTP mencapai 48.608 jiwa dari 50.423 warga wajib KTP (98.66%) disebabkan masih banyak KTP Siak yang masih berlaku dan masyarakat tidak mengurus pergantian dengan e-KTP. Harapan bersama dengan instansi terkait agar bersinergi dalam pelaksanaan penertiban KTP sehingga permasalahan KTP bisa teratasi dan tertib sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional. Masih terdapat 1.608 warga belum melakukan perekaman e-KTP.

2.3.1 Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan

Seiring dengan misi yang ditetapkan Kecamatan Bontang Selatan, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian visi, misi dan nilai – nilai organisasi yang telah didentifikasi adalah sebagai berikut :

- Komitmen Pimpinan dan Staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing – masing
- Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada;
- Tersedianya aparatur yang professional dan berkualitas;
- Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban;
- Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;

2.3.2 Faktor Penghambat

Identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Bontang Selatan didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Identifikasi Permasahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	**Permasalahan pada Pelayanan Tata Pemerintahan**			

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
	- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan	Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan kelurahan belum optimal	Kurang koordinasi antara kecamatan dan kelurahan	Koordinasi yang masih lemah
	- Pengelolaan data Tata Pemerintahan kurang optimal	Belum optimalnya data Tata pemerintahan	Data dan informasi yang belum optimal	Data dan informasi tata pemerintahan belum akurat dan akuntabel
2	**Permasalahan pada pelayan Trantibum**			
	- Masih tingginya angka kenakalan remaja dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang	Kurangnya kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat
3	**Permasalaahan pada pelayanan Ekonomi dan Pembangunan**			
	- Masih rendahnya pertisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang dan Kualitas data, bahan petunjuk teknis yang belum optimal	Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisir.	Tidak lengkapnya data usulan yang disampaikan dalam musrenbang Kecamatan	Kejenuhan masyarakat dalam proses perencanaan musrenbang
4	**Permasalahan pada pelayanan Pemberdayaan Masyarakat**			
	- Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik ditingkat kelembagaan maupun masyarakat	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organnisasi masyarakat dengan kecamatan	Koordinasi antar lembaga yang masih lemah
5	**Permasalahan prasarana sarana dan pelayanan umum**			
	- Masih ada beberapa kelurahan yang menyewa dan belum memiliki BPU	Pembangunan Kantor Kelurahan yang masih menyewa.	1 kelurahan belum ada kantor (masih nyewa/numpang) dan 2 kelurahan sudah punya kantor tapi perlu dibangun karena sudah tidak memadai	Perlunya pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran
	- Ada beberapa jalan lingkungan yang tidak layak	Sarana dan prasara pelayanan belum memadai	Belum adanya rencana untuk kegiatan perbaikan jalan	Keterbatasan anggaran
6	**Permalahan umum dan kepegawaian**			
	- Kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan	Kualitas pelayanan perlu ditingkatkan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	Kurangmya profesionalitas petugas pelayanan
	- Lemahnya Team Work dan belum tergalinya SDM secara Optimal	Kemampuan SDM belum optimal	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM	Kompetensi SDM kurang memadai

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program , kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggarannya yang disediakan di RKPD.

Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kecamatan Bontang Selatan tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan diluar Kecamatan Bontang Selatan.

Adapun hasil review terhadap Perubahan RKPD per program dan perkegiatan serta per sub kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 (T-C.31) berikut:

Tabel 2.4 (T-C 31)

REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KOTA BONTANG

Perangkat Daerah Kecamatan Bontang Selatan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN URUSAN PEMERINTAHAN				75,758,707,741	UNSUR KEWILAYAHAN URUSAN PEMERINTAHAN				92,115,054,412	
	KECAMATAN				75,758,707,741	KECAMATAN				92,115,054,412	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	38,131,596,854	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	41,576,710,812	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	24,466,660,037	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	24,598,933,869	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/Bulan	24,466,660,037	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/Bulan	24,598,933,869	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100 Persen**	**426,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100 Persen**	**2,249,524,379**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	30,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	30,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	44,464,620	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	200,022,005	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	244,770,545	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	37,996,379	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	204,740,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	164,103,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	18,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	9,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	18,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	329,814,800	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	18,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	292,957,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	18,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	367,482,650	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	18,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	6,750,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	18,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	9,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	18,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	308,423,380	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**	**100 Persen**	**3,797,456,600**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**	**100 Persen**	**3,409,261,461**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	150,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	248,677,971	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	75,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	85,393,399	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	80,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	43,686,091	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	70,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	370,000,000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	78,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	83,347,526	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	85,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	135,083,570	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	73,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	120,289,314	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	35,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	35,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,983,326	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,995,825	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,765,148	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,997,261	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,999,138	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	58,679,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	64,580,290	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	34,694,210	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	45,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	44,381,133	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	47,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39,096,004	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	41,389,762	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	34,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	11,325,600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11,325,600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	88,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	88,800,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	134,976,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	134,976,000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	67,488,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	67,488,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	117,216,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	117,210,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	220,224,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	220,038,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	85,248,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	85,248,000	
	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	350,000,000	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	117,990,400	

	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	275,000,000	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	171,945,000	
	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	275,000,000	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	207,635,393	
	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	275,000,000	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	106,852,350	
	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	275,000,000	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	208,925,000	
	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	275,000,000	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	264,606,000	

	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	275,000,000	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	83,861,750	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**161,444,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**1,402,489,742**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	81,444,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	453,900,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8,500,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	409,620,710	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	110,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	9,993,065	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	305,447,558	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	87,000,600	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8,027,809	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tingkat Pemenuhan Jasa layanan Umum Perkantoran**	**100 Persen**	**7,349,934,096**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tingkat Pemenuhan Jasa layanan Umum Perkantoran**	**100 Persen**	**7,668,585,711**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	408,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	408,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	139,933,448	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94,133,448	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	141,600,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86,100,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86,100,000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105,100,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	99,600,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	170,133,448	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	153,713,431	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93,300,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93,610,200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6,253,233,752	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6,544,962,080	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**	**1,930,102,121**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**	**2,247,915,650**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Kota Bontang, Bontang Selatan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	15 Unit	174,915,900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Kota Bontang, Bontang Selatan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	15 Unit	180,743,000	

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kelurahan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kelurahan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	10,229,671	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	10,200,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	135,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	135,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	150,126,050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	145,509,380	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	127,432,850	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	127,432,850	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	143,597,650	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	131,024,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	165,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	164,578,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	125,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	122,451,800	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang , Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	450,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang , Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	450,000,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang , Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	60,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang , Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	59,620,000	

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	38,480,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	49,980,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	249,937,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	200,293,100	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	49,974,500	

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang , Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	138,800,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang , Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	132,692,020	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**1. Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan**	**1. 98 % 2. 98 %**	**1,199,143,047**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**1. Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan**	**1. 98 % 2. 98 %**	**1,733,370,601**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Jumlah Subjek Koordinasi**	**2 Subjek**	**843,543,047**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Jumlah Subjek Koordinasi**	**2 Subjek**	**1,171,666,326**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bontang , Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	763,543,047	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bontang , Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	1,071,986,884	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	80,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bontang , Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	99,679,442	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah		**1. Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2. Jumlah Urusan**	**1. Kegiatan 2. Urusan**	**340,600,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah**		**1. Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2. Jumlah Urusan**	**1. Kegiatan 2. Urusan**	**551,245,575**	

	yang Ada di Kecamatan					**yang Ada di Kecamatan**					
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	50,600,000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	50,600,000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	160,000,000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	395,298,934	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	130,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	105,346,641	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**Jumlah objek koordinasi**	**6 Objek**	**15,000,000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Jumlah objek koordinasi**	**6 Objek**	**10,458,700**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	10,458,700	

3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**	**100 %**	**34,558,967,840**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**	**100 %**	**46,983,213,912**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan**	**12 Unsur**	**14,205,400,000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan**	**12 Unsur/Komponen**	**22,391,638,132**	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	39,958,639	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	44,776,974	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	37,607,278	

	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,545,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	3,782,747,625	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,060,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	2,596,959,788	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,320,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	2,725,841,327	

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,265,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	2,193,849,607	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	934,700,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1,984,700,000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,470,700,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	5,685,402,530	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	170,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	424,396,862	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	490,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	16,790,000	

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	155,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	562,288,927	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	180,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	575,817,611	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	215,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	405,536,594	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	160,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	1,194,964,370	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan**	**3 Lembaga**	**19,959,111,040**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan**	**3 Lembaga**	**21,891,135,966**	

	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1,150,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1,572,825,796	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	759,996,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	920,817,635	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1,244,593,920	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1,486,406,720	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	699,996,960	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	857,119,835	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1,084,794,720	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1,322,732,977	

	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1,902,190,080	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	2,306,511,358	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	848,996,160	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1,036,854,421	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25 Laporan	1,523,500,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25 Laporan	1,511,320,709	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	38 Laporan	2,364,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	38 Laporan	2,347,045,800	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	19 Laporan	1,157,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	19 Laporan	1,157,000,000	

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	33 Laporan	2,019,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	33 Laporan	2,018,708,515	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	62 Laporan	3,749,623,200	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	62 Laporan	3,698,372,200	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	24 Laporan	1,455,420,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	24 Laporan	1,655,420,000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		**Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**	**6 Kelurahan**	**394,456,800**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**	**6 Kelurahan**	**2,700,439,814**	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	475 Keluarga	51,500,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	475 Keluarga	152,943,300	

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	600 Keluarga	30,000,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	600 Keluarga	145,674,912	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	350 Keluarga	40,000,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	350 Keluarga	40,000,000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	585 Keluarga	60,000,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	585 Keluarga	1,106,497,000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	878 Keluarga	156,376,800	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	878 Keluarga	198,722,920	

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	400 Keluarga	56,580,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	400 Keluarga	1,056,601,682	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Tingkat Penaganan Gangguan Trantibum**	**100%**	**194,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Tingkat Penaganan Gangguan Trantibum**	**100%**	**243,906,197**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Jumlah Koordinasi yang dilakukan**	**1 Kegiatan**	**144,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah Koordinasi yang dilakukan**	**1 Kegiatan**	**206,160,000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28,000,000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	66,160,000	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28,000,000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28,000,000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28,000,000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28,000,000	

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**2 Perda/Perkada**	**50,000,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**2 Perda/Perkada**	**37,746,197**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Bontang , Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	50,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Bontang , Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	37,746,197	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**	**1,675,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**	**1,577,852,890**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan**	**2 Kegiatan**	**1,675,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan**	**2 Kegiatan**	**1,577,852,890**	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	365 Orang	445,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	365 Orang	236,110,148	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	380,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	219,130,598	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	30,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 Orang	74,712,294	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	630,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	650 Orang	90,948,992	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	30,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	78,043,364	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	30,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	322,602,095	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	130,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	700 Orang	556,305,399	
TOTAL					**75,758,707,741**	**TOTAL**				**92,115,054,412**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan

Berkaitan dengan usulan dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan.

Dari hasil Kegiatan Musrenbang yang telah dilaksanakan Kecamatan Bontang Selatan dan akan diteruskan ke Musrenbang Tingkat Kota terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang menjadi prioritas dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi yang telah dihimpun melalui Musrenbang Tingkat Kelurahan antara lain :

1. Kelurahan Tanjung Laut Usulan Prioritas 9 kegiatan terdiri dari :
   - Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 9 Kegiatan
   - Kegiatan Bidang Ekonomi : - Kegiatan
   - Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan
2. Kelurahan Berbas Tengah Usulan Prioritas 12 kegiatan terdiri dari :
   - Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 12 Kegiatan
   - Kegiatan Bidang Ekonomi : - Kegiatan
   - Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan
3. Kelurahan Berbas Pantai Usulan Prioritas 18 kegiatan terdiri dari :
   - Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 14 Kegiatan
   - Kegiatan Bidang Ekonomi : 4 Kegiatan
   - Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan
4. Kelurahan Satimpo Usulan Prioritas 6 kegiatan terdiri dari :
   - Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 6 Kegiatan
   - Kegiatan Bidang Ekonomi : - Kegiatan
   - Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan
5. Kelurahan Bontang Lestari Usulan Prioritas 10 kegiatan terdiri dari :
   - Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 9 Kegiatan
   - Kegiatan Bidang Ekonomi : 1 Kegiatan
   - Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan
6. Kelurahan Tanjung Laut Indah Usulan Prioritas 3 kegiatan terdiri dari :
   - Kegiatan Bidang Infrastruktur Pembangunan : 3 Kegiatan
   - Kegiatan Bidang Ekonomi : - Kegiatan
   - Kegiatan Bidang Sosial : - Kegiatan

Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang di wilayah Kelurahan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.5 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Bontang

Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Bontang Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rehabilitasi/peningkatan drainase/ parit lingkungan	Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 M	
2	Rehabilitasi/peningkatan drainase/ parit lingkungan	Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	95 M	
3	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan RT.08	Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P = 19,5 M, L = 1 M	
4	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan RT.02	Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P = 53 M, L - 2,4 M	
5	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan RT.09	Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P = 70 M, L = 0,5 M	
6	Rehabilitasi Gg. Paus II RT.19	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P= 71 M L= 2 M	
7	Rehabilitasi Parit dan Gorong-gorong	Kelurahan Tanjung	Jumlah Sarana dan	Parit (P= 75 M,	

	RT.12	Laut Indah	Prasarana Kelurahan yang Terbangun	L= 45 CM, T= 85 CM) Gorong-gorong (L= 7 M, T= 85 CM)	
8	Peningkatan jalan di Gg. Musholla Al-Falah RT.02	Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P= 25 M, L= 2 M, T= 20 CM	
9	Pengecoran Tutup Parit RT.16	Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P = 154m, L = 80cm, T = 15cm	
10	Perbaikan Parit RT.18	Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P = 200m, L = 50cm, T = 25cm	
11	Perbaikan Parit dan Penutup Parit RT.26	Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P = 65m, L = 50cm,T.25 CM	
12	Peningkatan Drainase RT.27	Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(P = 128m, L = 40cm, T = 60cm	
13	Perbaikan Parit RT.30	Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P = 90m, L = 40cm, T = 40cm	
14	Semenisasi Jalan RT.32	Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	P = 80m, L = 2m, T = 15cm	

			Terbangun		
15	Peningkatan Drainase RT.52	Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P = 160m, L = 65cm, T = 65cm	
16	Semenisasi Jalan RT.56	Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P = 70m, L = 1,5m, T = 15cm	
17	Semenisasi Jalan RT.57	Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=50 ,L=1,5 ,T=15CM	
18	Semenisasi Jalan RT.62	Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P = 150m, L = 2m, T = 15cm	
19	Sarana prasarana kantor Posyandu Tunas Muda	Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Renovasi Bangunan (Lantai Ditinggikan Karena Banjir)	
20	Sarana prasarana kantor Posyandu Cempaka 2	Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Renovasi Bangunan	
21	Taman PKK	Kelurahan Satimpo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
22	Rehap Parit RT.15	Kelurahan Satimpo	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Paket	

			Kelurahan yang Terbangun		
23	Rehap Parit RT.16	Kelurahan Satimpo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
24	Turap di lingkungan RT.18	Kelurahan Satimpo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
25	Pembangunan Pos Kamling RT.22	Kelurahan Satimpo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
26	Pengaspalan Jl. Mangga RT.25	Kelurahan Satimpo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
27	Becek dan rumput menganggu Pejalan RT.05	Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	300 M x 0,5 X 2 (Kanan Kiri)	
28	Rusak/Pembuatan baru	Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 meter/3 x 4	
29	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan RT.03	Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	L 3 M	
30	Pembangunan/peningkatan Gg.	Kelurahan Bontang	Jumlah Sarana dan	P = 100 M L = 3 M	

	Pemuda 2	Lestari	Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
31	Pembangunan Gg. Ambo Disi	Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P = 70 M L = 3 M	
32	Dibutuhkan akan adanya sarana tsb (ATK, Motor, Meja kursi Lemari dll)	Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Kelurahan	
33	Becek dan rumput menganggu Pejalan RT.06	Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Panjang 650 M x 0,5 X 2 (Kanan Kiri)	
34	Jalan hancur RT.03	Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P = 170, L = 3 M	
35	jalan becek, belum pernah dilakukan pembangunan RT.10	Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=120, L=3 M	
36	Belum ada parit, air tumpah - tumpah ke rumah warga RT.01	Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P = 120 M L = 3 M	
37	Perbaikan System drainage/parit yang longsor akibat gerusan air hujan di Gg losari 1 RT.01	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P 3m,L 30cm,T 120cm	

38	Semenisasi jalan losari 5 yang sudah rusak RT.02	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P 55m,L 3m	
39	Perbaikan Jembatan yang tidak Layak RT.03	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
40	Pembuatan Parit di Gg losari 15 RT.05	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P 200m,L 30cm	
41	Pengadaan Tempat sampah yg ada Roda nya RT.06	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Pcs	
42	Pengadaan CCTV yang sudah rusak tersambar petir RT.08	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Pcs	
43	Pengadaan CCTV 3 Titik Tipe 360 Derajat wifi RT.09	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Pcs	
44	Perbaikan drainage dan penutup di Gg pendidikan RT.10	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P 72m,L 40cm	
45	Renovasi Jembatan ulin di jln Pangandaran 7 RT.13	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	L 2m,P 50m	

			Terbangun		
46	Pembuatan Parit dan Penutup di jln carita yg rusak RT.14	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P 50m,L 40 Cm	
47	Pembuatan dan Perbaikan Parit Jl Melawai RT.15	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P 45m,L 40cm	
48	Pembuatan Gapura dari Besi Stenlist Stel RT.16	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	
49	Perbaikan jembatan ulin/Gg.1 RT.17	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	L 2m,P 50m	
50	Renovasi parit dan penutup di lingkungan RT.21	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P 90m,L 30cm	
51	Renovasi parit dan penutup di jln Tengku umar RT.22	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P 80m,L 1m	
52	Pengadaan CCTV RT.23	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Titik	
53	Pengadaan CCTV RT.24	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Titik	

			yang Terbangun		
54	Renovasi jembatan ulin di jln bunaken yg sdh rapuh RT.19	Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2019 – 2024 mengusung Visi " Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong – Royong " dengan 9 Misi yang dikenal dengan sebagai NAWACITA kedua, yang selanjutnya diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan. Agenda pembangunan yang diemban Kecamatan yaitu " Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transpormasi Pelayanan Publik " melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas.

Pusat Lingkungan di Kota Bontang tersebar di 15 (lima belas) Kelurahan termasuk kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan. Adapun pelayanan yang dapat dilayani pada pusat lingkungan meliputi :

a. Pelayanan pemerintahan berupa kantor kelurahan;
b. Pelayanan kesehatan berupa praktek dokter keluarga/puskesmas/pusban;
c. Pelayanan pendidikan berupa sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas;
d. Pelayanan persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah dan Tempat Penampungan Akhir (TPA);

Berdasarkan pembagian wilayah menurut Bagian Wilayah Kota (BWK), proyeksi pertumbuhan penduduk kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan termasuk proyeksi pertumbuhan 3% per tahun (pertumbuhan normal).

Sebagian wilayah Kecamatan Bontang Selatan termasuk dalam kawasan Mangrove dan Hutan lindung Bontang. Namun hutan lindung tersebut mengalami degradasi yang cepat karena digunakan sebagai permukiman, pertanian musiman, galian C, serta menjadi semak belukar.

Dalam Kecamatan Bontang Selatan terdapat kawasan mangrove yang berada diwilayah Kelurahan Berbas Pantai. Dalam perencanaan tata ruang Kota Bontang wilayah tersebut akan dimanfaatkan sebagai wisata alam sekaligus akan dikembangkan menjadi salah satu tempat wisata mangrove Kota Bontang.

Dalam perencanaan tata ruang Kota Bontang, kawasan di Kelurahan Bontang Lestari akan dikembangkan sebagai kawasan industri, bandara udara dan pengembangan pusat investasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bontang yang akan akan diwujudkan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2021 – 2026 yang meliputi Kantor Camat Bontang Selatan, Kantor Lurah Tanjung Laut, Kantor Lurah Tanjung Laut Indah, Kantor Lurah Berbas Tengah, Kantor Lurah Berbas Pantai, Kantor Lurah Satimpo dan Kantor Lurah Bontang Lestari adalah :

“ Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab “

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan beberapa misi sebagai berikut :

1. ***Kota Bontang Yang Harmoni melalui pemantapan dan sinergi, kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan;***
2. ***Kota Bontang berkelanjutan yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, social budaya dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup;***
3. ***Kota Bontang yang berdaya saing dan sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;***

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Bontang Selatan adalah

- ***Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan Bontang Selatan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif***
- ***Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Bontang Selatan***
- ***Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bontang Selatan.***

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Bontang Selatan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam

proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran Kecamatan Bontang Selatan adalah

- ***Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Masyarakat***
- ***Meningkatnya Kualitas Pembangunan Zona INtegritas Menuju WBK/WBBM***
- ***Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum.***
- ***Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan***

3.3. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bontang Selatan

3.3.1. **Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program-program yang akan dilaksanakan Kecamatan Bontang Selatan tahun 2025 berdasarkan peraturan baru yakni Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah Program : 5 Program
2. Jumlah Kegiatan : 15 Kegiatan
3. Jumlah Sub Kegiatan : 141 Sub Kegiatan

Adapun Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut ini ;

Tabel. 3.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025
KECAMATAN BONTANG SELATAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan, Indikator sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja
				UNSUR KEWILAYAHAN URUSAN PEMERINTAHAN		
				KECAMATAN		
Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan Bontang Selatan yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Nilai Zona Integritas	**94**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/Bulan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100 Persen**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket

				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang

				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**	**100 Persen**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	5 Paket
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	4 Paket

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	4 Paket
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	4 Paket
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	4 Paket
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	4 Paket
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	4 Paket

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	1 Paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Satimpo)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	1 Paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Tanjung Laut)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	1 Paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Bontang Lestari)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	1 Paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	1 Paket
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Berbas Tengah)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	1 Paket

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Berbas Pantai)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	1 Paket
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket

				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Dokumen
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Dokumen

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Dokumen
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Dokumen
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Dokumen
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Dokumen
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Dokumen

				Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan
				Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan
				Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan
				Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan
				Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan

				Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan
				Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 Unit
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tingkat Pemenuhan Jasa layanan Umum Perkantoran**	**100 Persen**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 Unit
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 Unit
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit

				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Presentase peningkatan Nilai SKM	**89%**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1. Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP** **2. Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan**	**1. 98 %** **2. 98 %**
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Subjek Koordinasi**	**2 Subjek**
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**1. Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** **2. Jumlah Urusan**	**1 Kegiatan** **2 Urusan**

				Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah objek koordinasi**	**6 objek**
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	**100%**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**	**100%**
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Satimpo)	**Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan**	**12 Unsur**
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	2 Unit
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Tanjung Laut)	**Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan**	**12 Unsur**

				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	2 Unit
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Bontang Lestari)	**Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan**	**12 Unsur**
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	2 Unit

				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Tanjung Laut Indah)	**Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan**	**12 Unsur**
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	2 Unit
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (	**Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam**	**12 Unsur**

				Kelurahan Berbas Tengah)	**pemberdayaan kelurahan**	
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	2 Unit
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Berbas Pantai)	**Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan**	**12 Unsur**

				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	2 Unit
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan**	**3 Lembaga**
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan

				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan

				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	14 Laporan
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	24 Laporan
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16 Laporan
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20 Laporan

				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	36 Laporan
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	14 Laporan
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**	**6 Kelurahan**
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	475 Keluarga
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	600 Keluarga

				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	350 Keluarga
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	585 Keluarga
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	878 Keluarga

				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	400 Keluarga
Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Bontang Selatan	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Presentase Peran Aktif Masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	**100%**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penaganan Gangguan Trantibum**	**100 %**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi yang dilakukan**	**1 Kegiatan**
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan

				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan	**Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**2 Perda/Perkada**

				Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 %**
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan**	**2 Kegiatan**

				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	300 Orang
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	200 Orang

				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	200 Orang
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	200 Orang

				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	200 Orang
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	200 Orang

				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	200 Orang

Kegiatan Perubahan Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sebagaimana tabel.3.2 (T-C.33) sebagai berikut:

Tabel. 3.2 (T-C.33)
Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Bontang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**92,115,054,412**				**94,971,452,791**
7.01	**KECAMATAN**				**92,115,054,412**				**94,971,452,791**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**41,576,710,812**			**100%**	**42,671,588,998**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**		**100 Persen**	**24,598,933,869**			**100 Persen**	**24,844,923,208**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	124 Orang/Bulan	24,598,933,869	DANA UMUM (APBD)		108 Orang/Bulan	24,844,923,208

7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian**		**100 Persen**	**2,249,524,379**			**100 Persen**	**2,362,000,598**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	1 Paket	30,000,000	DANA UMUM (APBD)		1 Paket	31,500,000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	1 Paket	44,464,620	DANA UMUM (APBD)		1 Paket	46,687,851
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	3 Paket	200,022,005	DANA UMUM (APBD)		3 Paket	210,023,105
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	3 Paket	244,770,545	DANA UMUM (APBD)		3 Paket	257,009,072

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	1 Paket	37,996,379	DANA UMUM (APBD)		1 Paket	39,896,198
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	2 Paket	204,740,000	DANA UMUM (APBD)		2 Paket	214,977,000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	3 Paket	164,103,000	DANA UMUM (APBD)		3 Paket	172,308,150
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	4 Orang	9,000,000	DANA UMUM (APBD)		4 Orang	9,450,000
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	50 Orang	329,814,800	DANA UMUM (APBD)		50 Orang	346,305,540

7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	65 Orang	292,957,000	DANA UMUM (APBD)		65 Orang	307,604,850
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	50 Orang	367,482,650	DANA UMUM (APBD)		50 Orang	385,856,783
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	4 Orang	6,750,000	DANA UMUM (APBD)		4 Orang	7,087,500
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	4 Orang	9,000,000	DANA UMUM (APBD)		4 Orang	9,450,000
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	60 Orang	308,423,380	DANA UMUM (APBD)		60 Orang	323,844,549
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**		**100 Persen**	**3,409,261,461**			**100 Persen**	**3,579,724,534**

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	1 Paket	16,000,000	DANA UMUM (APBD)		1 Paket	16,800,000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	7 Paket	248,677,971	DANA UMUM (APBD)		7 Paket	261,111,870
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	4 Paket	85,393,399	DANA UMUM (APBD)		4 Paket	89,663,069
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	4 Paket	43,686,091	DANA UMUM (APBD)		4 Paket	45,870,396
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	15 Paket	370,000,000	DANA UMUM (APBD)		15 Paket	388,500,000

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	6 Paket	83,347,526	DANA UMUM (APBD)		6 Paket	87,514,902
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	8 Paket	135,083,570	DANA UMUM (APBD)		8 Paket	141,837,749
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	5 Paket	120,289,314	DANA UMUM (APBD)		5 Paket	126,303,780
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	2 Paket	35,000,000	DANA UMUM (APBD)		2 Paket	36,750,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	1 Paket	14,983,326	DANA UMUM (APBD)		1 Paket	15,732,492

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	1 Paket	14,995,825	DANA UMUM (APBD)		1 Paket	15,745,616
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	1 Paket	15,000,000	DANA UMUM (APBD)		1 Paket	15,750,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	1 Paket	16,765,148	DANA UMUM (APBD)		1 Paket	17,603,405
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	1 Paket	14,997,261	DANA UMUM (APBD)		1 Paket	15,747,124
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	1 Paket	14,999,138	DANA UMUM (APBD)		1 Paket	15,749,095
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	3 Paket	64,580,290	DANA UMUM (APBD)		3 Paket	67,809,305

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	2 Paket	34,694,210	DANA UMUM (APBD)		2 Paket	36,428,921
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	2 Paket	44,381,133	DANA UMUM (APBD)		2 Paket	46,600,190
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	2 Paket	35,000,000	DANA UMUM (APBD)		2 Paket	36,750,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	2 Paket	39,096,004	DANA UMUM (APBD)		2 Paket	41,050,804
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	2 Paket	41,389,762	DANA UMUM (APBD)		2 Paket	43,459,250

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	2 Paket	34,000,000	DANA UMUM (APBD)		2 Paket	35,700,000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	11,325,600	DANA UMUM (APBD)		12 Dokumen	11,891,880
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	12 Dokumen	88,800,000	DANA UMUM (APBD)		12 Dokumen	93,240,000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	12 Dokumen	134,976,000	DANA UMUM (APBD)		12 Dokumen	141,724,800
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	12 Dokumen	67,488,000	DANA UMUM (APBD)		12 Dokumen	70,862,400

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	12 Dokumen	117,210,000	DANA UMUM (APBD)		12 Dokumen	123,070,500
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	12 Dokumen	220,038,000	DANA UMUM (APBD)		12 Dokumen	231,039,900
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	12 Dokumen	85,248,000	DANA UMUM (APBD)		12 Dokumen	89,510,400
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	30 Laporan	117,990,400	DANA UMUM (APBD)		30 Laporan	123,889,920
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	20 Laporan	171,945,000	DANA UMUM (APBD)		20 Laporan	180,542,250

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	50 Laporan	207,635,393	DANA UMUM (APBD)		50 Laporan	218,017,163
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	20 Laporan	106,852,350	DANA UMUM (APBD)		20 Laporan	112,194,968
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	20 Laporan	208,925,000	DANA UMUM (APBD)		20 Laporan	219,371,250
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	20 Laporan	264,606,000	DANA UMUM (APBD)		20 Laporan	277,836,300
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	20 Laporan	83,861,750	DANA UMUM (APBD)		20 Laporan	88,054,838

7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**		**100 Persen**	**1,402,489,742**			**100 Persen**	**1,472,614,229**
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	4 Unit	453,900,000	DANA UMUM (APBD)		4 Unit	476,595,000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	1 Unit	8,500,000	DANA UMUM (APBD)		1 Unit	8,925,000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	4 Unit	409,620,710	DANA UMUM (APBD)		4 Unit	430,101,746
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	2 Unit	110,000,000	DANA UMUM (APBD)		2 Unit	115,500,000

7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	1 Unit	9,993,065	DANA UMUM (APBD)		1 Unit	10,492,718
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	3 Unit	305,447,558	DANA UMUM (APBD)		3 Unit	320,719,936
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	1 Unit	10,000,000	DANA UMUM (APBD)		1 Unit	10,500,000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	2 Unit	87,000,600	DANA UMUM (APBD)		2 Unit	91,350,630
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	1 Unit	8,027,809	DANA UMUM (APBD)		1 Unit	8,429,199

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Jasa layanan Umum Perkantoran**		**100 Persen**	**7,668,585,711**			**100 Persen**	**8,052,014,997**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	408,000,000	DANA UMUM (APBD)		12 Laporan	428,400,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	12 Laporan	141,000,000	DANA UMUM (APBD)		12 Laporan	148,050,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	12 Laporan	141,600,000	DANA UMUM (APBD)		12 Laporan	148,680,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	12 Laporan	86,100,000	DANA UMUM (APBD)		12 Laporan	90,405,000

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	12 Laporan	99,600,000	DANA UMUM (APBD)		12 Laporan	104,580,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	12 Laporan	153,713,431	DANA UMUM (APBD)		12 Laporan	161,399,103
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	12 Laporan	93,610,200	DANA UMUM (APBD)		12 Laporan	98,290,710
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	6,544,962,080	DANA UMUM (APBD)		12 Laporan	6,872,210,184
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**		**100 Persen**	**2,247,915,650**			**100 Persen**	**2,360,311,433**

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	15 Unit	180,743,000	DANA UMUM (APBD)		15 Unit	189,780,150
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	15 Unit	10,200,000	DANA UMUM (APBD)		15 Unit	10,710,000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	11 Unit	135,000,000	DANA UMUM (APBD)		11 Unit	141,750,000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	6 Unit	145,509,380	DANA UMUM (APBD)		6 Unit	152,784,849
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	11 Unit	127,432,850	DANA UMUM (APBD)		11 Unit	133,804,493

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	13 Unit	131,024,000	DANA UMUM (APBD)		13 Unit	137,575,200
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	10 Unit	164,578,000	DANA UMUM (APBD)		10 Unit	172,806,900
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	6 Unit	122,451,800	DANA UMUM (APBD)		6 Unit	128,574,390
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	5 Unit	450,000,000	DANA UMUM (APBD)		5 Unit	472,500,000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	80 Unit	59,620,000	DANA UMUM (APBD)		80 Unit	62,601,000

7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	3 Unit	38,480,000	DANA UMUM (APBD)		3 Unit	40,404,000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	3 Unit	49,980,000	DANA UMUM (APBD)		3 Unit	52,479,000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	4 Unit	249,937,000	DANA UMUM (APBD)		4 Unit	262,433,850
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	3 Unit	200,293,100	DANA UMUM (APBD)		3 Unit	210,307,755
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	3 Unit	49,974,500	DANA UMUM (APBD)		3 Unit	52,473,225

7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	3 Unit	132,692,020	DANA UMUM (APBD)		3 Unit	139,326,621
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1. Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan**		**1. 98 % 2. 98 %**	**1,733,370,601**			**1. 98 % 2. 98 %**	**1,809,057,496**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Subjek Koordinasi**		**2 Subjek**	**1,171,666,326**			**2 Subjek**	**1,230,249,642**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	1,071,986,884	DANA UMUM (APBD)		10 Laporan	1,125,586,228

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	99,679,442	DANA UMUM (APBD)		5 Dokumen	104,663,414
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**1. Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2. Jumlah Urusan**		**1. Kegiatan 2. Urusan**	**551,245,575**			**1. Kegiatan 2. Urusan**	**578,807,854**
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	50,600,000	DANA UMUM (APBD)		2 Dokumen	53,130,000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	395,298,934	DANA UMUM (APBD)		6 Laporan	415,063,881
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	105,346,641	DANA UMUM (APBD)		2 Laporan	110,613,973
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah objek koordinasi**		**6 Objek**	**10,458,700**			**6 Objek**	**10,981,635**

7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,458,700	DANA UMUM (APBD)		1 Dokumen	10,981,635
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**		**100 %**	**46,983,213,912**			**100 %**	**48,577,959,256**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan**		**12 Unsur**	**22,391,638,132**			**12 Unsur**	**23,511,220,039**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	5 Lembaga Kemasyarakatan	39,958,639	DANA UMUM (APBD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	41,956,571
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	5 Lembaga Kemasyarakatan	44,776,974	DANA UMUM (APBD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	47,015,823

7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	5 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	DANA UMUM (APBD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	42,000,000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	5 Lembaga Kemasyarakatan	37,607,278	DANA UMUM (APBD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	39,487,642
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	5 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	DANA UMUM (APBD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	42,000,000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	5 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	DANA UMUM (APBD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	42,000,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	16 Unit	3,782,747,625	DANA UMUM (APBD)		16 Unit	3,971,885,006
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	13 Unit	2,596,959,788	DANA UMUM (APBD)		13 Unit	2,726,807,777

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	13 Unit	2,725,841,327	DANA UMUM (APBD)		13 Unit	2,862,133,393
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	14 Unit	2,193,849,607	DANA UMUM (APBD)		14 Unit	2,303,542,087
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	11 Unit	1,984,700,000	DANA UMUM (APBD)		11 Unit	2,083,935,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	22 Unit	5,685,402,530	DANA UMUM (APBD)		22 Unit	5,969,672,657
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	3 Pokmas/Ormas	424,396,862	DANA UMUM (APBD)		3 Pokmas/Ormas	445,616,705
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	3 Pokmas/Ormas	16,790,000	DANA UMUM (APBD)		3 Pokmas/Ormas	17,629,500

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	3 Pokmas/Ormas	562,288,927	DANA UMUM (APBD)		3 Pokmas/Ormas	590,403,373
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	3 Pokmas/Ormas	575,817,611	DANA UMUM (APBD)		3 Pokmas/Ormas	604,608,492
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	3 Pokmas/Ormas	405,536,594	DANA UMUM (APBD)		3 Pokmas/Ormas	425,813,424
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	3 Pokmas/Ormas	1,194,964,370	DANA UMUM (APBD)		3 Pokmas/Ormas	1,254,712,589
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	**3 Lembaga**	**21,891,135,966**			**3 Lembaga**	**22,366,299,403**
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1,572,825,796	DANA UMUM (APBD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	1,651,467,086

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	3 Lembaga Kemasyarakatan	920,817,635	DANA UMUM (APBD)		3 Lembaga Kemasyarakatan	966,858,517
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	3 Lembaga Kemasyarakatan	1,486,406,720	DANA UMUM (APBD)		3 Lembaga Kemasyarakatan	1,560,727,056
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	2 Lembaga Kemasyarakatan	857,119,835	DANA UMUM (APBD)		2 Lembaga Kemasyarakatan	899,975,827
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	3 Lembaga Kemasyarakatan	1,322,732,977	DANA UMUM (APBD)		3 Lembaga Kemasyarakatan	1,388,869,626
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas tengah	3 Lembaga Kemasyarakatan	2,306,511,358	DANA UMUM (APBD)		3 Lembaga Kemasyarakatan	2,421,836,926

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	3 Lembaga Kemasyarakatan	1,036,854,421	DANA UMUM (APBD)		3 Lembaga Kemasyarakatan	1,088,697,142
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	25 Laporan	1,511,320,709	DANA UMUM (APBD)		25 Laporan	1,511,320,709
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	38 Laporan	2,347,045,800	DANA UMUM (APBD)		38 Laporan	2,347,045,800
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	19 Laporan	1,157,000,000	DANA UMUM (APBD)		19 Laporan	1,157,000,000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	33 Laporan	2,018,708,515	DANA UMUM (APBD)		33 Laporan	2,018,708,515

7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas tengah	62 Laporan	3,698,372,200	DANA UMUM (APBD)		62 Laporan	3,698,372,200
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	24 Laporan	1,655,420,000	DANA UMUM (APBD)		24 Laporan	1,655,420,000
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**		**6 Kelurahan**	**2,700,439,814**			**6 Kelurahan**	**2,700,439,814**
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	475 Keluarga	152,943,300	DANA UMUM (APBD)		475 Keluarga	152,943,300
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	600 Keluarga	145,674,912	DANA UMUM (APBD)		600 Keluarga	145,674,912

7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	350 Keluarga	40,000,000	DANA UMUM (APBD)		350 Keluarga	40,000,000
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	585 Keluarga	1,106,497,000	DANA UMUM (APBD)		585 Keluarga	1,106,497,000
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas tengah	878 Keluarga	198,722,920	DANA UMUM (APBD)		878 Keluarga	198,722,920

7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	400 Keluarga	1,056,601,682	DANA UMUM (APBD)		400 Keluarga	1,056,601,682
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penaganan Gangguan Trantibum**		**100%**	**243,906,197**			**100%**	**256,101,507**
7.01.0.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi yang dilakukan**		**1 Kegiatan**	**206,160,000**			**1 Kegiatan**	**216,468,000**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	12 Laporan	28,000,000	DANA UMUM (APBD)		12 Laporan	29,400,000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	12 Laporan	66,160,000	DANA UMUM (APBD)		12 Laporan	69,468,000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	12 Laporan	28,000,000	DANA UMUM (APBD)		12 Laporan	29,400,000

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	12 Laporan	28,000,000	DANA UMUM (APBD)		12 Laporan	29,400,000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	12 Laporan	28,000,000	DANA UMUM (APBD)		12 Laporan	29,400,000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	12 Laporan	28,000,000	DANA UMUM (APBD)		12 Laporan	29,400,000
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan**		**2 Perda/Perkada**	**37,746,197**			**2 Perda/Perkada**	**39,633,507**
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	37,746,197	DANA UMUM (APBD)		2 Laporan	39,633,507

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**		**100%**	**1,577,852,890**			**100%**	**1,656,745,535**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan**		**2 Kegiatan**	**1,577,852,890**			**2 Kegiatan**	**1,656,745,535**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	365 Orang	236,110,148	DANA UMUM (APBD)		365 Orang	247,915,655

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	500 Orang	219,130,598	DANA UMUM (APBD)		500 Orang	230,087,128
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	350 Orang	74,712,294	DANA UMUM (APBD)		350 Orang	78,447,909

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	650 Orang	90,948,992	DANA UMUM (APBD)		650 Orang	95,496,442
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	300 Orang	78,043,364	DANA UMUM (APBD)		300 Orang	81,945,532

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Keliurahan Berbas Tengah	500 Orang	322,602,095	DANA UMUM (APBD)		500 Orang	338,732,200
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	700 Orang	556,305,399	DANA UMUM (APBD)		700 Orang	584,120,669
	TOTAL				**92,115,054,412**				**94,971,452,791**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif , yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Visi, Misi dan tujuan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021 – 2026. Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi 1 yaitu *"Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan"* dan Misi 3 yaitu *"Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia"*

Dengan mencapai tujuan Renstra Kecamatan Bontang Selatan menetapkan 3 (tiga) Tujuan yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan Kecamatan Bontang Selatan yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif.
2. Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Bontang Selatan.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bontang Selatan.

Dalam rangka mendukung pencapaian rencana strategis tersebut ditetapkan Sasaran antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
3. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum.
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan.

Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di perangkat daerah Kantor Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2025 mengacu pada Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021. Sebagaimana tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025
KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Kegiatan					Pagu Anggaran		Persen
		Tolak Ukur	Tolak Ukur (Perubahan)	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	Bertambah/Berkurang	
2	3	4	4	5	5	6	6	7	9
UNSUR KEWILAYAHAN URUSAN PEMERINTAHAN						**87,618,554,412**	**92,115,054,412**	**4,496,500,000**	
KECAMATAN						**87,618,554,412**	**92,115,054,412**	**4,496,500,000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**41,526,710,812**	**41,576,710,812**	**50,000,000**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**24,598,933,869**	**24,598,933,869**	**0,00**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/Bulan	108 Orang/Bulan	24,598,933,869	24,598,933,869	-	0,05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2,249,524,379**	**2,249,524,379**	**0,00**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	30,000,000	30,000,000	-	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	44,464,620	44,464,620	-	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	200,022,005	200,022,005	-	0,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	244,770,545	244,770,545	-	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	37,996,379	37,996,379	-	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	204,740,000	204,740,000	-	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	164,103,000	164,103,000	-	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	9,000,000	9,000,000	-	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	329,814,800	329,814,800	-	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	65 Orang	292,957,000	292,957,000	-	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	367,482,650	367,482,650	-	0,00

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	6,750,000	6,750,000	-	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	9,000,000	9,000,000	-	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang	308,423,380	308,423,380	-	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**	**Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3,359,261,461**	**3,409,261,461**	**50,000,000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16,000,000	16,000,000	-	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	248,677,971	248,677,971	-	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	85,393,399	85,393,399	-	0,01
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	43,686,091	43,686,091	-	0,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	370,000,000	370,000,000		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	83,347,526	83,347,526	-	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8 Paket	85,083,570	135,083,570	50,000,000	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	120,289,314	120,289,314	-	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	35,000,000	35,000,000	-	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14,983,326	14,983,326	-	0,59
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14,995,825	14,995,825	-	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15,000,000	15,000,000	-	0,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16,765,148	16,765,148	-	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14,997,261	14,997,261	-	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14,999,138	14,999,138	-	0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	64,580,290	64,580,290	-	0,59
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	34,694,210	34,694,210	-	0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	44,381,133	44,381,133	-	0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	35,000,000	35,000,000	-	0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	39,096,004	39,096,004	-	0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	41,389,762	41,389,762	-	0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	34,000,000	34,000,000	-	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	11,325,600	11,325,600	-	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	88,800,000	88,800,000	-	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	134,976,000	134,976,000	-	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	67,488,000	67,488,000	-	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	117,210,000	117,210,000	-	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	220,038,000	220,038,000	-	0,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	85,248,000	85,248,000	-	0,00
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	117,990,400	117,990,400	-	0,00
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	171,945,000	171,945,000	-	0,00
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	207,635,393	207,635,393	-	0,00
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	106,852,350	106,852,350	-	0,00
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	208,925,000	208,925,000	-	0,00
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	264,606,000	264,606,000	-	0,00
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	83,861,750	83,861,750	-	0,00

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1,402,489,742**	**1,402,489,742**	**0,00**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	453,900,000	453,900,000	-	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	8,500,000	8,500,000	-	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	409,620,710	409,620,710	-	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	110,000,000	110,000,000	-	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	9,993,065	9,993,065	-	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	305,447,558	305,447,558	-	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	10,000,000	10,000,000	-	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	87,000,600	87,000,600	-	0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	8,027,809	8,027,809	-	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Tingkat Pemenuhan Jasa layanan Umum Perkantoran**	**Tingkat Pemenuhan Jasa layanan Umum Perkantoran**	**100 Persen**	**100 Persen**	**7,668,585,711**	**7,668,585,711**	**0,00**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	408,000,000	408,000,000	-	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	141,000,000	141,000,000	-	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	141,600,000	141,600,000	-	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	86,100,000	86,100,000	-	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	99,600,000	99,600,000	-	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	153,713,431	153,713,431	-	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	93,610,200	93,610,200	-	0,00

	Berbas Pantai								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6,544,962,080	6,544,962,080	-	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2,247,915,650**	**2,247,915,650**	**0,00**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	180,743,000	180,743,000	-	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	10,200,000	10,200,000	-	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	135,000,000	135,000,000	-	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	145,509,380	145,509,380	-	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	127,432,850	127,432,850	-	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	131,024,000	131,024,000	-	0,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	164,578,000	164,578,000	-	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	122,451,800	122,451,800	-	0,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	450,000,000	450,000,000	-	0,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	80 Unit	59,620,000	59,620,000	-	0,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	38,480,000	38,480,000	-	0,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	49,980,000	49,980,000	-	0,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	249,937,000	249,937,000	-	0,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	200,293,100	200,293,100	-	0,00

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	49,974,500	49,974,500	-	0,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	132,692,020	132,692,020	-	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**1. Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan**	**1. Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP 2. Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan**	**1. 98 % 2. 98 %**	**1. 98 % 2. 98 %**	**1,733,370,601**	**1,733,370,601**	**0,00**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Jumlah Subjek Koordinasi**	**Jumlah Subjek Koordinasi**	**2 Subjek**	**2 Subjek**	**1,171,666,326**	**1,171,666,326**	**0,00**	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	10 Laporan	1,071,986,884	1,071,986,884	-	0,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen	99,679,442	99,679,442	-	0,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**1. Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2. Jumlah Urusan**	**1. Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2. Jumlah Urusan**	**1. Kegiatan 2. Urusan**	**1. Kegiatan 2. Urusan**	**551,245,575**	**551,245,575**	**0,00**	
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	50,600,000	50,600,000	-	0,00

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	395,298,934	395,298,934	-	0,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	105,346,641	105,346,641	-	0,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**Jumlah objek koordinasi**	**Jumlah objek koordinasi**	**6 Objek**	**6 Objek**	**10,458,700**	**10,458,700**	**0,00**	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	10,458,700	10,458,700	-	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**	**Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat**	**100 %**	**100 %**	**42,560,713,912**	**46,983,213,912**	**4,422,500,000**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan**	**Jumlah Komponen Masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan kelurahan**	**12 Unsur**	**12 Unsur/Komponen**	**19,371,638,132**	**22,391,638,132**	**3,020,000,000**	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	39,958,639	39,958,639	-	0,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	44,776,974	44,776,974	-	0,10
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	40,000,000	-	0,16

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	37,607,278	37,607,278	-	0,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	40,000,000	-	0,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	40,000,000	-	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	16 Unit	3,282,747,625	3,782,747,625	500,000,000	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	2,596,959,788	2,596,959,788	-	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	2,725,841,327	2,725,841,327	-	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	2,193,849,607	2,193,849,607	-	0,15

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	11 Unit	1,784,700,000	1,984,700,000	200,000,000	0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	22 Unit	3,365,402,530	5,685,402,530	2,320,000,000	0,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	424,396,862	424,396,862	-	0,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	16,790,000	16,790,000	-	0,11
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	562,288,927	562,288,927	-	0,69
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	575,817,611	575,817,611	-	0,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	405,536,594	405,536,594	-	0,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	1,194,964,370	1,194,964,370	-	0,00

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan**	**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	**20,488,635,966**	**21,891,135,966**	**1,402,500,000**	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1,572,825,796	1,572,825,796	-	0,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	759,817,635	920,817,635	161,000,000	0,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1,219,206,720	1,486,406,720	267,200,000	0,07
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	704,219,835	857,119,835	152,900,000	0,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1,089,732,977	1,322,732,977	233,000,000	0,21
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	1,902,511,358	2,306,511,358	404,000,000	0,22
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	852,454,421	1,036,854,421	184,400,000	0,22

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25 Laporan	25 Laporan	1,511,320,709	1,511,320,709	-	0,21
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	38 Laporan	38 Laporan	2,347,045,800	2,347,045,800	-	0,21
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	19 Laporan	19 Laporan	1,157,000,000	1,157,000,000	-	0,22
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	33 Laporan	33 Laporan	2,018,708,515	2,018,708,515	-	0,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	62 Laporan	62 Laporan	3,698,372,200	3,698,372,200	-	0,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	24 Laporan	24 Laporan	1,655,420,000	1,655,420,000	-	0,00
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		**Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**	**Tingkat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**	**6 Kelurahan**	**6 Kelurahan**	**2,700,439,814**	**2,700,439,814**	**0,00**	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	475 Keluarga	475 Keluarga	152,943,300	152,943,300	-	0,00

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	600 Keluarga	600 Keluarga	145,674,912	145,674,912	-	0,00
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	350 Keluarga	350 Keluarga	40,000,000	40,000,000	-	0,00
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	585 Keluarga	585 Keluarga	1,106,497,000	1,106,497,000	-	0,00
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	878 Keluarga	878 Keluarga	198,722,920	198,722,920	-	0,00
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	400 Keluarga	400 Keluarga	1,056,601,682	1,056,601,682	-	0,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Tingkat Penaganan Gangguan Trantibum**	**Tingkat Penaganan Gangguan Trantibum**	**100%**	**100%**	**219,906,197**	**243,906,197**	**24,000,000**	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Jumlah Koordinasi yang dilakukan**	**Jumlah Koordinasi yang dilakukan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**182,160,000**	**206,160,000**	**24,000,000**	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	28,000,000	4,000,000	0,00

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	62,160,000	66,160,000	4,000,000	0,11
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	28,000,000	4,000,000	0,13
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	28,000,000	4,000,000	0,17
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	28,000,000	4,000,000	0,06
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	28,000,000	4,000,000	0,17
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**2 Perda/Perkada**	**2 Perda/Perkada**	**37,746,197**	**37,746,197**	**0,00**	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	2 Laporan	37,746,197	37,746,197	-	0,17
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**	**100%**	**1,577,852,890**	**1,577,852,890**	**0,00**	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan**	**Kegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**1,577,852,890**	**1,577,852,890**	**0,00**	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	365 Orang	365 Orang	236,110,148	236,110,148	-	0,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Satimpo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	500 Orang	219,130,598	219,130,598	-	0,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 Orang	350 Orang	74,712,294	74,712,294	-	0,00

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	650 Orang	650 Orang	90,948,992	90,948,992	-	0,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	300 Orang	78,043,364	78,043,364	-	0,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	500 Orang	322,602,095	322,602,095	-	0,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Kelurahan Berbas Pantai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	700 Orang	700 Orang	556,305,399	556,305,399	-	0,00

TOTAL		**87,618,554,412**	**92,115,054,412**	**4,496,500,000**	

XXIX. KECAMATAN BONTANG BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) pada Kecamatan Bontang Barat adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja PD merupakan wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja PD mengacu pada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada dokumen Rencana Stategis (Renstra) PD. Renja PD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan tahun berikutgnya.

Sejalan dengan pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025, telah terjadi perubahan mendasar yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renja Tahun 2025.

Faktor internal yang mendorong perlunya dilakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2025 terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi perubahan kebutuhan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator, maupun pagu anggaran.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bontang Barat Tahun 2025, dengan mendasarkan pada Peraturan Kepala Daerah Nomor Tahun 2025 tanggal 2025 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi pedoman penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Barat Tahun 2025 adalah :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
d. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
k. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
l. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021 – 2026;
m. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
n. Peraturan Kepala Daerah Nomor tahun 2025 tanggal 2025 Tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025;
o. Peraturan Kepala Daerah Nomor Tahun 2025 tanggal 2025 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Tujuan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.
2. Menjadi dasar penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan, perubahan indikator kinerja, perubahan target, dan perubahan pagu anggaran.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Dasar pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bontang Barat Tahun 2025 mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Adanya penambahan kegiatan baru, dan tuntutan pelayan.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2025. Jika ada perubahan prioritas atau alokasi anggaran di tingkat kota, kecamatan harus menyesuaikan Renja-nya
4. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Bontang. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan anggaran, sehingga setiap perubahan di dalamnya akan memengaruhi Renja Kecamatan

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Barat Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Barat adalah menyusun serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun konsep kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaannya, menjalankan tugas dan fungsinya, oleh karena itu Kecamatan Bontang Barat telah menyusun program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

keseluruhan Alokasi Anggaran Kecamatan Bontang Barat sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) 2025 sebesar Rp. 38.053.590.103,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan Semester I sebesar 39,35 % atau Rp. 14.976.747.708,00 yang terdiri dari:

Tabel 2.1
Pagu Anggaran dan Realisasi Semester I Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran				
		Murni	Perubahan	Realisasi	Prosentase	Sisa Anggaran
1	Operasional	33.598.468.219,00	39.974.089.986,00	13.680.728.104,00	29.09%	19.917.740.115,00
2	Modal	4.455.121.884,00	-	1.296.019.604,00	39.35%	3.159.102.280,00
3	Tak Terduga	-	-	-	-	-
4	Transfer	-	-	-	-	-
Jumlah		**38.053.590.103,00**	**39.974.089.986,00**	**14.976.747.708,00**	**-**	**23.076.842.395,00**

Sumber : laporan Realisasi keuangan Kecamatan Bontang Barat Bulan Juni Tahun 2025

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bontang Barat sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Barat Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

SEKSI/SUB BAG	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI		RENCANA REALISASI KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		RENCANA REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA		PERMASALAHAN
							TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		
							Rp	%	Rp	%	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	
PMKS	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	422.152.362,00	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	Kegiatan MTQ	Uang Transportasi Dalam Kota	420.062.362,00	99,5	1.625.000,00	0,38	laporan	2	0,00	2	Masih dalam proses
						Hadiah Perlombaan									
						Pakaian Seragam Batik Kegiatan									
					Belanja Jasa	Honorarium Narasumber atau									
					Barang Pakai Habis	Makanan dan Minuman Rapat dan Aktifitas Lapangan									
Ekobang	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.610.086,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	Sosialisasi dan monitoring stimulan RT	Sosialisasi untuk Ketua RT dan Pokmas	6.517.543,00	41,75	5.521.800,00	35,37	dokumen	2	0,00	2	Masih dalam proses
						Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan stimulan RT									
					Pengembangan UMKM	Sosilisasi kepada pelaku usaha UMKM terkait pengemasan produk									
Ekobang	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	35.564.639,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 dokumen	Pelaksanaan Musrenbang	Musrenbang tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan kelurahan	35.564.639,00	100	35.085.000,00	98,65	dokumen	1	100	1	Kegiatan telah selesai di laksanakan
						Menghadiri musrenbang tingkat Kota Bontang yang diwakili oleh Tim Delegasi									
Tata Pemerintahan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	56.573.000,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Pelayanan PATEN, Pelayanan pertanahan, Administrasi kependudukan	Pengadaan makan minum kegiatan dan bahan dan peralatan kegiatan	56.573.000,00	100	40.493.439,00	71,58	laporan	4	2,00	4	Dalam proses
					Penimgkatan SDM pengurus RT	Bimtek pengurus RT ke luar daerah									
Tata Pemerintahan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	78.871.511,00	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	Lomba Kelurahan	Penyelenggaraan lomba kelurahan tingkat kecamatan	78.871.511,00	100	67.526.485,00	85,62	laporan	2	1,00	2	Dalam proses
					Peningkatan SDM PATEN	Bimtek pelayanan prima bagi aparatur pelayanan									
Sarpras	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	19.821.000,00	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	Kegiatan Forkohat dan Perpustakaan	Monitoring dan Koordinasikegiatan Forkohat dan Perpustakaan	19.821.000,00	100	6.022.000,00	30,38	dokumen	1	0,00	1	Dalam proses

SEKSI/SUB BAG	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI		RENCANA REALISASI KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		RENCANA REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA		PERMASALAHAN
							TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		
							Rp	%	Rp	%	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	
Ekobang	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.491.704,00	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas	Lomba TTG	Penyediaan honorarium, bahan dan peralatan kerja kegiatan	75.491.704,00	100	22.659.700,00	30,02	Pokmas	1	0,00	1	Dalam proses
PMKS	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	167.564.612,00	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan PKK	Supervisi dan pembinaan PKK Kelurahan	165.674.612,00	98,87	95.474.362,00	56,98	lembaga	6	6,00	6	Dalam proses
					Germas	Senam pagi									
					Lomba-lomba	LBSI, Posyandu, PHBS, PKK									
Trantib	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60.513.784,00	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Patroli	Patroli rutin dan pengadaan bahan dan peralatan kegiatan	49.542.800,00	81,87	39.690.200,00	65,59	laporan	1	0,00	1	Dalam proses
Trantib	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70.686.292,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	Sosialisasi FPK dan FKDM	Mengadakan sosialisasi yang diikuti oleh anggota FPK dan FKDM Kecamatan	43.683.639,00	61,8	28.323.000,00	40,07	orang	100	0,00	100	Dalam proses
					HUT RI	Memperingati HUT RI melalui jalan sehat, cerdas cermat dan lomba-lomba									
Umum dan Kepegawai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	##############	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang	Gaji dan tunjangan	Penyediaan gaji dan tunjangan/TPP untuk ASN Kecamatan dan Kelurahan	9.105.774.198,00	64,01	5.038.983.690,00	35,42	orang	64	65,00	64	Dalam proses
Umum dan Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	32.784.476,00	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Cetak Penggandaan dan Penjilidan	Cetak Penggandaan dan Penjilidan Dokumen	32.784.476,00	100	8.322.400,00	25,39	Dokumen	1	100	1	Dalam proses
Umum dan Kepegawaian	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	684.760,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Cetak Penggandaan dan Penjilidan	Cetak Penggandaan dan Penjilidan Dokumen	684.760,00	100	684.760,00	100	laporan	1	100	1	Kegiatan telah selesai di laksanakan

SEKSI/SUB BAG	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI		RENCANA REALISASI KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		RENCANA REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA		PERMASALAHAN
							TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		
							Rp	%	Rp	%	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	
Umum dan Kepegawaian	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	684.760,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Cetak Penggandaan dan Penjilidan	Cetak Penggandaan dan Penjilidan Dokumen	684.760,00	100	684.760,00	100	Dokumen	1	100	1	Kegiatan telah selesai di laksanakan
Umum dan Kepegawai	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.400.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	2 paket	Pengadaan PDH	Pengadaan pakaian untuk Pegawai Kecmatan	0	0	0	0	paket	2	0,00	2	Dalam proses
Umum dan Kepegawaian	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.911.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	Bimbingan teknis	Penyediaan biaya kontribusi dan perjalanan dinas	39.911.000,00	100	10.232.000,00	25,64	orang	20	2,00	20	Dalam proses
Sarpras	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.017.541,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Penyediaan peralatan kelistrikan	batery, bola lampu, kabel dll	13.017.541,00	100	12.851.500,00	98,72	paket	1	0,00	1	Kegiatan telah selesai di laksanakan
Umum dan Kepegawai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.847.577,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	Belanja barang pakai habis	ATK dan perlengkapan kerja	114.980.068,00	87,87	14.720.000,00	11,25	paket	5	2,00	5	Dalam proses
					Belanja modal	Mesin fotocopy									
Umum dan Kepegawai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.454.551,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	Barang Pakai Habis	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman, Alat Kebersihan	82.608.384,00	73,46	30.834.315,00	27,42	paket	4	1,00	4	Dalam proses
					makan minum	penyediaan makan minum tamu dan rapat									
					cendramata	Pembelian cendramata									
					Perabot kantor	Pembelian logistik non makanan									
Umum dan Kepegawai	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.254.473,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Belanja pakai habis	belanja barang cetakan dan karangan bunga	21.771.919,00	69,66	1.300.000,00	4,16	paket	2	0,00	2	Dalam proses
					Belanja modal	belanja papan himbauan									
Sarpras	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.688.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	belanja koran	belanja koran	2.688.000,00	100	0	0	dokumen	1	0,00	1	Dalam proses
Umum dan Kepegawaian	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.584.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 56 laporan	belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat	belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat	201.300.000,00	81,97	131.984.503,00	53,74	laporan	30	5,00	30	Dalam proses
Sarpras	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.774.421,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	46 unit	Belanja pakai habis	Belanja Shower Set, Kran air	10.848.306,00	28,72	398.000,00	1,05	unit	46	0,00	46	Dalam proses
					Belanja modal	Belanja Mesin Pemotong Dahan, Kursi Kerja									

SEKSI/SUB BAG	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI		RENCANA REALISASI KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		RENCANA REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA		PERMASALAHAN
							TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		
							Rp	%	Rp	%	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	
Sarpras	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	366.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	belanja air, listrik, dan intenet	belanja air, listrik, dan intenet	2.763.303.280,00	53,93	1.681.360.866,00	32,81	laporan	12	3,00	12	Dalam proses
Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	##########	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	Belanja TKD	Penyediaan honorarium TKD	2.763.303.280,00	53,93	1.681.360.866,00	32,81	laporan	2	2,00	2	Dalam proses
					Belanja cleaning service	Penyediaan jasa kebersihan									
Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.794.686,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 unit	Belanja BBM	penyediaan BBM untuk kendaraan dinas	132.652.386,00	72,57	69.520.800,00	38,03	unit	13	4,00	13	Dalam proses
					Pemeliharaan kendaraan dinas	Penyediaan jasa sevice dan perbaikan kendaraan									
Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.350.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	Pembayaran PKB	Pembayaran PKB	1.100.000,00	11,76	160.000,00	1,71	unit	18	6,00	18	Dalam proses
Sarpras	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.038.676,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Pemeliharaan Bangunan Gedung	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat	200.828.676,00	99,4	0	0	unit	1	0,00	1	Dalam proses
					Perawatan gedung	Perawatan Gedung Negara Sederhana (Sedang)									
Sarpras	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.228.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 unit	pemeliharaan peralatan kantor	pemeliharaan jaringan air, komputer, AC, printer, Mesin Fotocopy	37.968.000,00	87,83	13.040.000,00	30,17	unit	54	18,00	54	Dalam proses
kanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14.432.847,00	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Musrembang	Honorarium, makan minum, seragam Tim Delegasi Musrembang	14.432.847,00	100	14.407.000,00	99,82	Lembaga Kemasyarakatan	6	6,00	6	Kegiatan telah selesai di laksanakan

SEKSI/SUB BAG	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI		RENCANA REALISASI KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		RENCANA REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA		PERMASALAHAN
							TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		
							Rp	%	Rp	%	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	
kanaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	############	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Pembangunan Gedung Terpdu, Biaya Perencanaan Teknis Pembangunan Posyandu Sejahtera 1, Pembangunan Jalan, dan Pagar Posyandu Sejahtera 2	Pembangunan Gedung Terpdu, Biaya Perencanaan Teknis Pembangunan Posyandu Sejahtera 1, Pembangunan Jalan, dan Pagar Posyandu Sejahtera 2	2.001.147.900,00	99,36	18.000.000,00	0,89	Unit	5	0,00	5	Dalam proses
kanaan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	273.203.230,00	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	PKK/HKG	Rakor PKK	265.258.230,00	97,09	11.160.000,00	4,08	Pokmas/Ormas	12	0,00	12	Dalam proses
					MTQ	Pakaian Seragam Kegiatan MTQ									
					Makan Minum	Minuman Kegiatan dan Makan Minum Aktifitas Lapangan									
kanaan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	432.021.187,00	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan Pokja Sehat Kelurahan	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pokja Sehat Kelurahan	232.376.187,00	53,79	120.831.360,00	27,97	Lembaga Kemasyarakatan	6	0,00	6	Dalam proses
					Posyandu, Posbindu, Poslansia	Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan									
					Kader PPKBK, PHBS	Insentif Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan									
					RT	Insentif Pengurus RT									
kanaan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	734.161.204,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usah Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Stimulan RT	Stimulan Urban Farming, stimulan UMKM	727.291.204,00	99,06	0	0	Laporan	1	0,00	1	Dalam proses
kanaan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	26.816.000,00	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	29 Keluarga	PMT Balita -dan penanganan Stunting	Penyuluham PMT Balita -dan penanganan Stunting	15.680.000,00	58,47	0	0	Keluarga	29	0,00	29	Dalam proses
kanaan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	84.129.278,00	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jasa Tenaga Keamanan	Jasa Tenaga Keamanan	72.129.278,00	85,74	66.392.000,00	78,92	Laporan	1	0,00	1	Dalam proses

SEKSI/SUB BAG	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI		RENCANA REALISASI KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		RENCANA REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA		PERMASALAHAN
							TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		
							Rp	%	Rp	%	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	
Kanaan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	32.440.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	HUT RI	Memperingati HUT RI hadiah lomba-lomba Kegiatan 17 Agustus	5.750.000,00	17,73	0	0	Orang	150	0,00	150	Dalam proses
					PDU	Pakaian Dinas Upacara Anggota Paskibraka									
Kanaan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.000.000,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Belanja Pakaian Dinas Upacara Lurah	0,00	0	0,00	0	Paket	1	0,00	1	Dalam proses
Kanaan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Bimbingan teknis	Penyediaan biaya kontribusi dan perjalanan dinas	15.000.000,00	100	0	0	Orang	6	11,00	6	Kegiatan telah selesai di laksanakan
Kanaan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	289.223.588,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Belanja barang pakai habis	ATK dan perlengkapan kerja	289.223.588,00	100	30.437.750,00	10,52	Paket	2	1,00	2	Dalam proses
Kanaan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.337.213,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Belanja Barang Pakai Habis	Alat Kebersihan Kantor, Natura Logistik Kantor	11.337.213,00	100	10.492.750,00	92,55	Paket	1		1	Kegiatan telah selesai di laksanakan
Kanaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.999.686,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Belanja pakai habis	belanja barang cetakan dan pengandaan	20.999.686,00	100	4.868.000,00	23,18	Paket	2	1,00	2	Dalam proses
Kanaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.760.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	belanja koran RT	belanja koran RT	19.110.000,00	58,33	0	0	Dokumen	12	0,00	12	Dalam proses
Kanaan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.287.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Belanja Perjalanan Dinas biasa dan Luar daerah	Belanja Perjalanan Dinas biasa dan Luar daerah	77.052.000,00	92,51	27.059.614,00	32,49	Laporan	15	3,00	15	Dalam proses
Kanaan	Penyediaan Jasa Komunikasi,	78.500.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	belanja air, listrik, dan	belanja air, listrik, dan intenet	66.600.000,00	84,84	23.561.285,00	30,01	Laporan	12	3,00	12	Dalam proses
Kanaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.467.554,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Pembayaran PKB	Pembayaran PKB	107.353.554,00	81,04	32.692.970,00	24,68	Unit	11	2,00	11	Dalam proses
Kanaan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.570.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	Pemeliharaan Komputer/PC, Komputer, Printer	Pemeliharaan Sarana Kantor AC SpIit, Personal Computer/Notebook, Printer	34.150.000,00	71,79	13.144.500,00	27,63	Unit	17	2,00	17	Dalam proses

SEKSI/SUB BAG	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI		RENCANA REALISASI KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		RENCANA REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA		PERMASALAHAN
							TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		
							Rp	%	Rp	%	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	
Kanaan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.112.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Belanja Barang Pakai Habis	Belanja Barang Pakai Habis Kran air, bor listrik, kran zink	7.112.000,00	100	0	0	Unit	1	0,00	1	Dalam proses
Telihan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.630.111,00	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Musrembang	Honorarium, makan minum, seragam Tim Delegasi Musrembang	16.630.111,00	100	16.595.000,00	99,79	Lembaga Kemasyarakatan	6	6,00	6	Kegiatan telah selesai di laksanakan
Telihan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	403.325.431,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Drainase, Jalan Lingkungan	Penutup Parit RT.12, Jalan Bandung 1 RT 25, Penutup Parit RT.12, DRAINASE RT 29	395.695.431,00	98,11	391.985.930,00	97,19	Unit	1	0,00	1	Kegiatan telah selesai di laksanakan
Telihan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84.345.206,00	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas/Ormas	Bunda Paud	Sosialisasi PAUD Holistik Integrasi	80.565.206,00	95,52	5.083.668,00	6,03	Pokmas/Ormas	30	7,00	30	Dalam proses
					MTQ	Pakaian Seragam Kegiatan MTQ									
					Makan Minum	Minuman Kegiatan dan Makan Minum Aktifitas Lapangan									
Telihan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	##############	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Insentif RT	Insentif RT	619.548.950,00	59,55	408.907.600,00	39,31	Lembaga Kemasyarakatan	6	1,00	6	Dalam proses
					Tenaga Kesehatna	Posbindu, Posyandu Usila									
					Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jasa layanan kesehatan, Jasa tenaga penyuluh kesehatan									
Telihan	Fasilitasi Pengembangan Usaha	##############	Jumlah Laporan Fasilitasi	1 Laporan	Stimulan RT	Stimulan Urban Farming	1.675.758.406,00	99,54	0	0	Laporan	1	0,00	1	Dalam proses
					Seragam Lapangan	Pakaian Kerja Lapangan									
Telihan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	205.843.000,00	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	39 Keluarga	makan minum	Sosialisasi dan Rakor Bunda Paud, Karang Taruna, Halal Bihalal, PKK, PPKBK, Posyandu dan Majelis Taklim	182.843.000,00	88,83	78.437.000,00	38,11	Keluarga	39	0,00	39	Dalam proses
					Barang Pakai Habis	PMT Stimulan									
Telihan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	90.943.528,00	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jasa Tenaga Keamanan	Jasa Tenaga Keamanan	80.943.528,00	89	71.363.600,00	78,47	Laporan	1	1,00	1	Dalam proses

SEKSI/SUB BAG	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI		RENCANA REALISASI KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		RENCANA REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA		PERMASALAHAN
							TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		
							Rp	%	Rp	%	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	
Telihan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	21.223.668,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	150 Orang	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	HUT RI, Patroli	21.223.668,00	100	4.668.000,00	21,99	Orang	150	0,00	150	Dalam proses
Telihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Bimbingan teknis	Penyediaan biaya kontribusi dan perjalanan dinas	15.000.000,00	100	7.000.000,00	46,67	Orang	6	0,00	6	Dalam proses
Telihan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.491.351,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	6 Paket	Belanja barang pakai habis	ATK dan perlengkapan kerja	66.391.351,00	95,54	2.500.000,00	3,6	Paket	6	0,00	6	
					Belanja AC	AC Split									
Telihan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.172.814,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Barang Pakai Habi	Natura dan Pakan-Natura, Makanan dan Minuman Tamu	7.172.814,00	58,92	12.085.200,00	99,28		2		2	Dalam proses
Telihan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.491.810,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Belanja pakai habis	belanja barang cetakan dan penggandaan	39.491.810,00	72,47	33.120.400,00	60,78	Paket	2	1,00	2	Dalam proses
Telihan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	116.100.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	belanja koran RT	belanja koran RT	67.725.000,00	58,33	0	0	Dokumen	12	3,00	12	Dalam proses
Telihan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.835.900,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	Belanja Perjalanan Dinas biasa dan Luar daerah	Belanja Perjalanan Dinas biasa dan Luar daerah	143.921.900,00	83,76	106.071.784,00	61,73	Laporan	11	2,00	11	Dalam proses
Telihan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	belanja air, listrik, dan internet	belanja air, listrik, dan internet	71.750.000,00	58,33	48.686.931,00	39,58	Laporan	12	3,00	12	Dalam proses
Telihan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	98.532.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas	11 Unit	Pembayaran PKB	Pembayaran PKB	63.044.000,00	63,98	37.557.420,00	38,12	Unit	11	4,00	11	Dalam proses
Telihan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.250.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Pemeliharaan Komputer/PC, Komputer, Printer	Pemeliharaan Sarana Kantor AC SpIit, Personal Computer/Notebook, Printer	21.240.000,00	95,46	0	0	Unit	28	6,00	28	Dalam proses
Belimbing	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.667.111,00	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Musrembang	Honorarium, makan minum, seragam Tim Delegasi Musrembang	15.667.111,00	100	14.174.000,00	90,47	Lembaga Kemasyarakatan	6	6,00	6	Kegiatan telah selesai di laksanakan

SEKSI/SUB BAG	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI		RENCANA REALISASI KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		RENCANA REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA		PERMASALAHAN
							TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		
							Rp	%	Rp	%	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	
Belimbing	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	############	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Bangunan Gedung Kantor	Lanjutan Pembuatan Poskamling RT. 47,	1.425.979.154,00	99,33	0	0	Unit	1	0,00	1	Dalam proses
						Pembangunan Lanjutan Gedung GSI,									
						Rehabilitasi/Peningkatan Balai RT. 36,									
						Perbaikan Gang RT. 43,									
						Pembangunan/Perbaikan Drainase ,									
						Pembuatan Drainase Gg. Bukit Doa RT. 49,									
						Pembuatan Badan Jalan RT. 41,									
						Rehabilitasi/Peningkatan Parit Jl. Pelanduk Blok NN									
Belimbing	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	186.952.805,00	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	Kegiatan MTQ	Perlengkapan/Peralatan Kaligrafi (MTQ)	179.272.805,00	95,89	13.500.000,00	7,22	Pokmas/Ormas	2	0,00	2	Dalam proses
						Makanan dan Minuman MTQ									
						Pakaian Batik Kafilah MTQ									
						Transport Kafilah MTQ									
Belimbing	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	############	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	makan minum	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Rapat	1.033.928.070,00	58,52	569.255.600,00	32,22	Lembaga Kemasyarakatan	6	0,00	6	Dalam proses
					Belanja Pakaian Batik Tradisiona	Belanja Pakaian Batik Tradisiona Pakaian Batik Dasawisma									
					Jasa Kesehatan	Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan									
					Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Jasa Tenaga PPKBK									
					Pengurus RT	Iuran JKK Pengurus RT, JKM Pengurus RT, Insentif Pengurus RT									
Belimbing	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	############	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Stimulan RT	Stimulan Urban Farming	1.418.515.147,00	48,81	0	0	Laporan	1	0,00	1	Dalam proses
					Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat,									
					UMKM	Pengembangan UMKM									
Belimbing	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	294.926.000,00	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	Barang Pakai Habis	Kegiatan Upaya Penurunan dan Pencegahan Stunting PMT Stimulan	264.937.278,00	89,94	89.286.000,00	30,31	Keluarga	50	0,00	50	Dalam proses

SEKSI/SUB BAG	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI		RENCANA REALISASI KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		RENCANA REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA		PERMASALAHAN
							TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		
							Rp	%	Rp	%	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	
Belimbing	Sinergitas dengan Kepolisian	294.584.278,00	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	1 Laporan	Jasa Tenaga Keamanan	Jasa Tenaga Keamanan	15.331.000,00	100	0	0	Laporan	1	0,00	1	Dalam proses
					Makan Minum Rapat	Konsumsi Sosialisasi Restorative Justic									
						Sosialisasi Pencegahan Korupsi									
					Pakaian Dinas	Belanja Pakaian Lapangan Trantib									
Belimbing	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.331.000,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	150 Orang	makan minum	Makanan dan Minuman Rapat	15.331.000,00	100	0	0	Orang	150	0,00	150	Dalam proses
					Uang Transport	Uang Transportasi Dalam Kota									
Belimbing	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.750.000,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Bimbingan teknis	Penyediaan biaya kontribusi dan perjalanan dinas	15.750.000,00	100	12.500.000,00	79,37	Orang	6	30,00	6	Kegiatan telah selesai di laksanakan
Belimbing	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.775.264,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	5 Paket	Belanja barang pakai habis	ATK dan perlengkapan kerja	19.775.264,00	100	6.000.000,00	30,34	Paket	5	0,00	5	Kegiatan telah selesai di laksanakan
Belimbing	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.492.591,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Belanja barang pakai habis	Alat Tulis Kantor	33.802.591,00	95,24	0	0	Paket	2		2	Kegiatan telah selesai di laksanakan
Belimbing	Penyediaan Barang Cetakan dan	21.781.534,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	5 Paket	Belanja pakai habis	belanja barang cetakan dan	21.781.534,00	100	4.457.400,00	20,46	Paket	5	0,00	5	Kegiatan telah
Belimbing	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	210.528.000,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	belanja koran RT	belanja koran RT	122.808.000,00	58,33	0	0	Dokumen	12	3,00	12	Dalam proses
Belimbing	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.465.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Belanja Perjalanan Dinas biasa dan Luar daerah	Belanja Perjalanan Dinas biasa dan Luar daerah	175.999.000,00	95,41	117.591.400,00	63,75	Laporan	15	1,00	15	Dalam proses
Belimbing	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.892.741,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Belanja Modal Mebel	Kursi Rapat	14.892.741,00	100	0	0	Unit	6	0,00	6	Dalam proses

SEKSI/SUB BAG	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI		RENCANA REALISASI KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		RENCANA REALISASI KINERJA		REALISASI KINERJA		PERMASALAHAN
							TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		TRIWULAN II		
							Rp	%	Rp	%	KINERJA	TARGET	KINERJA	TARGET	
Belimbing	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.000.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	belanja air, listrik, dan intenet	belanja air, listrik, dan intenet	57.500.000,00	75,66	30.915.195,00	40,68	Laporan	12	3,00	12	Dalam proses
Belimbing	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.216.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Pembayaran PKB	Pembayaran PKB	83.000.000,00	67,36	34.106.070,00	27,68	Unit	10	2,00	10	Dalam proses
Belimbing	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.790.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	Pemeliharaan Komputer, AC	Pemeliharaan Sarana Kantor AC SpIit, Personal Computer/Notebook, Printer	10.000.000,00	78,19	2.870.000,00	22,44	Unit	29	0,00	29	Dalam proses
Belimbing	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pemeliharaan Gedung Kantor	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat	9.000.000,00	100	0	0	Unit	1	0,00	1	Dalam proses

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Bontang Barat sampai dengan Triwulan II esmart Juni Tahun 2025

Sampai dengan semester 1 Tahun anggaran 2025, pencapaian kegiatan dan sub kegiatan mencapai :

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Semester 1 Tahun 2025

Pagu Anggaran	Realisasi					
	Keuangan				Fisik	
	Target		Realisasi		Target	Realisasi
Rp	Rp	%	Rp	%	%	%
38.053.590.103,00	19.755.929.254,00	51,92	12.608.858.932,00	33,13	57,76	42,22

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Esmart Juni Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Barat sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025, secara umum capaian realisasi kinerja maupun keuangan belum sepenuhnya mencapai target terhadap capaian tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Realisasi keuangan sampai dengan semester pertama 33.13% atau Rp. 19.755.929.254,00 dari Total Anggaran Rp. 38.053.590.103,00 Adapun target realisasi fisik pada semester pertama adalah 42,22%. Dengan demikian ada deviasi capaian relaisasi keuangan sebesar – 18,79 %, sedangkan utuk capaian realisasi fisk sampai dengan semester pertama sebesar 42,22% dengan target 57,76%, ada deviasi capaian relaisasi fisik sebesar – 15,54 %
b. Dari 31 Sub Kegiatan, ada 10 Sub Kegiatan telah selesai (realisasi Fisik mencapai 100%) sampai dengan semester pertama, yaitu :

Tabel. 2.4.

a. Sub Kegiatan yang telah selasai dilaksanakan pada semester pertama Tahun 2025

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Fisik %		
			Target %	Realisasi %	Deviasi Realisasi Fisik %
7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	100	0,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	0,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	100	0,00
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	0,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	0,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	100	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	0,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	100	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	0,00

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Esmart Bulan Juni Tahun 2025

b. Sub Kegiatan dengan deviasi fisik dengan nilai positif yaitu :

Tabel 2.5.
Sub Kegiatan dengan deviasi fisik positif Tahun 2025

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Fisik %		
			Target %	Realisasi %	Deviasi Realisasi Fisik %
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42,14	50,00	7,86
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	75,94	77,14	1,20
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	95,19	95,19	-
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	52,00	52,00	-
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85,17	85,17	-
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89,74	89,74	-
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84,00	84,00	-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86,48	86,48	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,23	52,23	-
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	50,94	55,11	4,17
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82,58	87,65	5,07
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66,00	71,62	5,62
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,15	56,83	6,68
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	55,97	63,21	7,24

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Esmart Bulan Juni Tahun 2025

c. Sub Kegiatan dengan deviasi fisik (Deviasi = Target – Realisasi) antara 0 sampai dengan – 10 %, yaitu :

Tabel 2.6.
Sub Kegiatan dengan deviasi fisik antara 0 sampai dengan – 10 %
Tahun 2025

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Fisik %		
			Target %	Realisasi %	Deviasi Realisasi Fisik %
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	99,50	4,00	- 95,50
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,00	-	- 50,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,00	-	- 50,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	-	- 100,00
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	-	- 100,00
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97,82	9,78	- 88,04
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	-	- 100,00
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	-	- 100,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,00	9,00	- 2,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,40	-	- 99,40
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4,37	4,37	-
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	95,52	6,03	- 89,49
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	50,34	-	- 50,34
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,54	3,96	- 91,58
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,00	-	- 60,00

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Fisik %		
			Target %	Realisasi %	Deviasi Realisasi Fisik %
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	Pemeliharaan Barang Milik	78,19	-	- 78,19
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	49,53	-	- 49,53
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	49,38	-	- 49,38
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	-	- 100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	-	- 100,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	-	- 100,00
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	-	- 100,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Esmart Bulan Juni Tahun 2025

d. Sub Kegiatan dengan deviasi fisik (Deviasi = Target – Realisasi) antara - 10 sampai dengan – 80 %, yaitu :

Tabel 2.7.
Sub Kegiatan dengan deviasi fisik antara - 10 sampai dengan – 80 % Tahun 2025

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Fisik %		
			Target %	Realisasi %	Deviasi Realisasi Fisik %
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	84,74	- 15,26
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	86,79	- 13,21
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100,00	51,98	- 48,02
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	98,87	75,52	- 23,35
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	62,29	40,63	- 21,66

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Fisik %		
			Target %	Realisasi %	Deviasi Realisasi Fisik %
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59,15	52,23	- 6,92
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	30,52	- 69,48
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66,17	27,94	- 38,23
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72,98	54,51	- 18,47
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79,03	62,07	- 16,96
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28,72	20,45	- 8,27
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51,00	33,92	- 17,08
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46,82	41,09	- 5,73
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66,55	47,65	- 18,90
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,16	42,86	- 40,30
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	55,30	53,02	- 2,28
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	46,59	39,58	- 7,01
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52,00	50,00	- 2,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,03	56,97	- 3,06
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63,51	59,88	- 3,63
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	98,11	97,80	- 0,31
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	69,09	36,94	- 32,15
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	63,95	37,51	- 26,44
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	50,00	- 50,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81,81	69,65	- 12,16
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,34	44,01	- 14,33
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	57,59	42,88	- 14,71
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	39,17	34,40	- 4,77
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	80,00	- 20,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,24	41,59	- 53,65
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60,00	35,00	- 25,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71,32	30,79	- 40,53
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,15	41,42	- 10,73

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Esmart Bulan Juni Tahun 2025

e. Sub Kegiatan dengan deviasi fisik (Deviasi = Target – Realisasi) di bawah – 20 %, yaitu :

Tabel 2.8.
Sub Kegiatan dengan deviasi fisik di bawah – 20 % Tahun 2025

Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Fisik %		
			Target %	Realisasi %	Deviasi Realisasi Fisik %
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67,05	14,29	- 52,76
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	95,89	14,77	- 81,12
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,11	15,26	- 69,85

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Esmart Bulan Juni Tahun 2025

II.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontang Barat

Analisa isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan ekseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi permasalahan-permasalahan Kecamatan Bontang Barat :

1. Permasalahan Internal :
   - Sumber Daya Manusia belum optimal

     Sumber Daya Manusia Kecamatan Bontang Barat beserta 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Telihan, Kelurahan Kanaan, dan Kelurahan Belimbing dari segi peningkatan kualitas masih perlu ditingkatkan, Harapan kedepan masing-masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SDM baik secara formal maupun non formal. Hal ini akan memperlancar pelaksanaan program kegiatan guna mewujudkan tercapainya sasaran dan tujuan yang tepat, serta didukung dengan anggaran yang memadai.
   - Sarana dan Prasarana Terbatas

     Sarana dan Prasarana menjadi faktor yang sangat diperlukan dalam menunjang proses semua kegiatan agar dalam

pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan dari permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana kantor, hal ini disebabkan anggaran yang terbatas sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan.

- Pembangunan infrastruktur yang lebih memadai, sehingga dapat memberikan peran dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan di dukung anggaran yang cukup.
- Administrasi belum tertata dengan baik

  Arsip merupakan hal sangat penting sebagai bukti dokumen pelaksanaan setiap kegiatan atau dokumen penting lainnya. Pengelolaan arsip di Kecamatan Bontang Barat belum tertib sehingga masih perlu penataan yang lebih baik khususnya arsip aktif yang harus selalu siap kapan diperlukan, dan di dukung anggaran untuk meningkatkan kemampuan SDM Pengelola Arsip Hal ini akan memperlancar pelaksanaan program kegiatan.

2. Permasalahan Eksternal antara lain :
   - Lingkungan Hidup
     - ✓ Seiring dengan pertambahan penduduk Bontang Barat berdampak pesat terhadap pembangunan termasuk pemukiman di kawasan hutan lindung. Sampai saat ini pemerintah belum bisa berbuat banyak untuk melakukan penggusuran atau tindakan lain terhadap pemukiman tersebut.
     - ✓ Kawasan hutan lindung kondisinya sampai saat ini dalam proses pengalihan ke Area Penggunaan Lain (APL) yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan tumpeng tindih lahan.
     - ✓ Kelurahan Kanaan berpenduduk mayoritas memelihara babi yang dijadikan sebagai mata pencaharian dan menambah pendapatan keluarga. Sampai saat ini ternak babi masih menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks bagi masyarakat maupun dampak lingkungannya yaitu:

- Kandang-kandang babi letaknya berdekatan dengan permukiman penduduk dan kantor pemerintahan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan pencemaran udara bagi lingkungan sekitar.
- Belum ada pengelolaan yang baik untuk pembuangan limbah/kotoran babi dan makanan babi sehingga berdampak terhadap pencemaran udara dan pencemaran sanitasi lingkungan.
- Belum adanya Peraturan Daerah Kota Bontang yang mengatur sistem peternakan koloni yang dikembangkan.
- Sesuai hasil musrenbang tingkat kecamatan masalah kandang babi merupakan skala prioritas setiap tahunnya tetapi sampai saat ini belum terealisasi karena masih terkendala lahan/lokasi.

- Pertanahan

  Pencapaian administrasi pertanahan mencapai 80% disebabkan tidak semua permohonan bidang pertanahan dapat direalisasikan karena adanya permohonan yang masuk kawasan hutan lindung, dan sengketa tanah. Untuk kawasan hutan lindung harapan masyarakat agar ditinjau kembali tentang dan diberikan sosialisasi sehingga masyarakat bisa memahaminya. Hasil dilapangan menunjukkan bahwa dikawasan hutan lindung banyak penduduk yang membangun tempat tinggal, pemukiman lainnya termasuk rumah ibadah, sekolah dan tempat usaha.

  Selain itu permasalahan tapal batas antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerintah Kota Bontang (Kecamatan Bontang Barat) yang belum selesai sampai sekarang. Lokasi perbatasan berada disepanjang jalan pipa gas berbatasan dengan Kelurahan Belimbing : RT.49, Kelurahan Gunung Telihan : RT.20, RT.23, RT.25 dan RT.26 dan Kelurahan Kanaan : RT.01 sepanjang jalan Flores.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA KECAMATAN BONTANG BARAT TAHUN 2025

III.1 Sasaran Dan Prioritas Renja Tahun 2025

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Bontang Barat 2021- 2026, sasaran strategis Kecamatan Bontang Barat beserta indikator kinerja dan target tahun 2025 adalah sebagai berikut:

e. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Bontang Barat
f. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Bontang Barat
g. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Bontang Barat

Tabel 3.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Bontang Barat	Nilai Survey Kepuasan Masyarkat	92,80
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Bontang Barat	Persentase Partisipasi Kelompok Kemasyarakatan dalam Program Stimulan RT	100%
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Bontang Barat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%

Sumber : Dokumen Review Rencana Strategis Kec. Barat Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan sasaran tersebut, prioritas program ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Koordinasi Ketentraman Danketertiban Umum
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

III.2 Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Kecamatan Bontang Barat Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bontang Barat Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, hasil analisis isu-isu strategis, dan mengacu pada sasaran dan prioritas Renja Tahun 2025, maka program dan kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Bontang Barat Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Seluruh program yang telah direncanakan dalam Renja 2025 tetap dilaksanakan pada Perubahan Renja 2025.
b. Adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 2.827.938.452,00 atau 7,61 **%** dari pagu dana Murni Rp. 37.146.151.534,00 sehingga pagu anggaran perubahan menjadi Rp. 39.974.089.986,00 adapun rincian penambahan dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2.

Perubahan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Prioritas Kecamatan Bontang Barat Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
		KECAMATAN BONTANG BARAT				**37.146.151.534,00**	**39.648.502.323,00**	**39.974.089.986,00**	**2.827.938.452,00**	**35.028.242.726,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**37.146.151.534,00**	**39.648.502.323,00**	**39.974.089.986,00**	**2.827.938.452,00**	**35.028.242.726,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**37.146.151.534,00**	**39.648.502.323,00**	**39.974.089.986,00**	**2.827.938.452,00**	**35.028.242.726,00**
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**-**	**100 persen**	**22.551.582.488,00**	**23.720.131.371,00**	**22.989.061.002,00**	**930.512.368,00**	**23.482.094.856,00**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*	-	2 Kegiatan	3.569.152,00	3.701.904,00	14.875.992,00	11.306.840,00	4.300.000,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.784.576,00	1.917.328,00	13.506.472,00	11.721.896,00	2.500.000,00
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2 Laporan	2 Laporan	1.784.576,00	1.784.576,00	1.369.520,00	-415.056,00	1.800.000,00
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-	4 Kegiatan	14.189.283.751,00	14.286.134.480,00	14.258.839.359,00	69.555.608,00	15.062.000.000,00
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	14.127.834.634,00	14.224.685.363,00	14.224.685.363,00	96.850.729,00	15.000.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	59.699.965,00	59.699.965,00	32.784.476,00	-26.915.489,00	60.000.000,00
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	874.426,00	874.426,00	684.760,00	-189.666,00	1.000.000,00
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	874.726,00	874.726,00	684.760,00	-189.966,00	1.000.000,00
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-	2 Kegiatan	198.742.000,00	195.842.000,00	95.061.000,00	-103.681.000,00	223.600.000,00
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	25.210.000,00	23.520.000,00	8.400.000,00	-16.810.000,00	26.200.000,00
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	80.832.000,00	79.822.000,00	39.911.000,00	-40.921.000,00	88.400.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	6 Kegiatan	2.027.965.883,00	2.477.979.963,00	1.869.587.893,00	-158.377.990,00	1.852.800.000,00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.820.868,00	13.017.541,00	13.017.541,00	196.673,00	41.200.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	137.402.367,00	138.688.860,00	130.847.577,00	-6.554.790,00	175.000.000,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	119.731.482,00	120.541.482,00	112.454.551,00	-7.276.931,00	96.700.000,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	39.908.024,00	38.898.024,00	31.254.473,00	-8.653.551,00	37.500.000,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1095 Dokumen	1 Dokumen	7.472.000,00	2.688.000,00	2.688.000,00	-4.784.000,00	8.200.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	273.585.855,00	447.389.000,00	245.584.000,00	-28.001.855,00	284.700.000,00
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-	2 Kegiatan	100.511.884,00	94.761.088,00	92.544.162,00	-7.967.722,00	110.600.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	34.000.000,00	39.877.000,00	39.877.000,00	5.877.000,00	37.000.000,00
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	46 Unit	51.512.092,00	39.991.347,00	37.774.421,00	-13.737.671,00	56.600.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	2 Kegiatan	5.281.729.520,00	5.767.803.680,00	5.767.803.680,00	486.074.160,00	5.368.553.256,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	366.000.000,00	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	450.000.000,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	4.675.729.520,00	5.124.303.680,00	5.124.303.680,00	448.574.160,00	4.653.553.256,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Kegiatan	749.780.298,00	893.908.256,00	890.348.916,00	140.568.618,00	860.241.600,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	211.016.758,00	182.794.686,00	182.794.686,00	-28.222.072,00	260.000.000,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	9.350.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	9.400.000,00
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	11.821.700,00	202.038.676,00	202.038.676,00	190.216.976,00	15.000.000,00
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	54 Unit	32.530.000,00	43.228.000,00	43.228.000,00	10.698.000,00	35.841.600,00
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan ; Persentase Pelayanan Publik yang**	**-**	**100 Persen**	**581.291.191,00**	**796.346.561,00**	**628.592.598,00**	**18.308.809,00**	**599.600.000,00**
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan*	-	2 kegiatan	467.824.764,00	481.325.660,00	437.762.448,00	-30.062.316,00	473.600.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	446.411.413,00	446.396.670,00	422.152.362,00	-24.259.051,00	450.000.000,00
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	21.413.351,00	34.928.990,00	15.610.086,00	-5.803.265,00	23.600.000,00
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Pemerintah Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-	3 Kegiatan	92.067.523,00	278.428.901,00	171.009.150,00	78.941.627,00	101.000.000,00
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.203.221,00	35.564.639,00	35.564.639,00	6.361.418,00	32.000.000,00
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	32.864.302,00	137.905.000,00	56.573.000,00	23.708.698,00	36.000.000,00
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	104.959.262,00	78.871.511,00	48.871.511,00	33.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	-	1 Kegiatan	21.398.904,00	36.592.000,00	19.821.000,00	-1.577.904,00	25.000.000,00
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	21.398.904,00	36.592.000,00	19.821.000,00	-1.577.904,00	25.000.000,00
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat**	**-**	**100 Persen**	**12.978.984.539,00**	**14.358.173.905,00**	**15.674.584.558,00**	**-2.263.336.669,00**	**10.715.647.870,00**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-	3 Kegiatan	3.700.515.445,00	4.829.863.522,00	5.769.805.237,00	2.069.289.792,00	1.706.200.000,00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	49.933.509,00	120.065.509,00	75.491.704,00	25.558.195,00	100.000.000,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	-	2 Kegiatan	8.955.714.565,00	8.998.479.183,00	9.377.194.321,00	421.479.756,00	9.009.447.870,00
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	303.878.029,00	303.860.029,00	167.564.612,00	-136.313.417,00	105.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat penanganan gangguan Trantibum (kec bontang barat)**	**-**	**100 Persen**	**945.918.823,00**	**572.909.948,00**	**542.170.868,00**	**-811.918.823,00**	**134.000.000,00**
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	-	1 Kegiatan	725.656.589,00	92.365.864,00	60.513.784,00	-665.142.805,00	50.000.000,00
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	725.656.589,00	92.365.864,00	60.513.784,00	-665.142.805,00	50.000.000,00
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum (kec bontang barat)**	**-**	**100 Persen**	**88.374.493,00**	**200.940.538,00**	**139.680.960,00**	**8.525.507,00**	**96.900.000,00**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum*	-	2 Kegiatan	88.374.493,00	200.940.538,00	139.680.960,00	51.306.467,00	96.900.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	27.750.589,00	80.938.873,00	70.686.292,00	42.935.703,00	30.500.000,00
		KELURAHAN KANAAN				**37.146.151.534,00**	**39.648.502.323,00**	**39.974.089.986,00**	**2.827.938.452,00**	**35.028.242.726,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**37.146.151.534,00**	**39.648.502.323,00**	**39.974.089.986,00**	**2.827.938.452,00**	**35.028.242.726,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**37.146.151.534,00**	**39.648.502.323,00**	**39.974.089.986,00**	**2.827.938.452,00**	**35.028.242.726,00**
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**-**	**100 persen**	**22.551.582.488,00**	**23.720.131.371,00**	**22.989.061.002,00**	**930.512.368,00**	**23.482.094.856,00**
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-	2 Kegiatan	198.742.000,00	195.842.000,00	95.061.000,00	-103.681.000,00	223.600.000,00
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	2.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.700.000,00	10.000.000,00
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	33.000.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	6 Kegiatan	2.027.965.883,00	2.477.979.963,00	1.869.587.893,00	-158.377.990,00	1.852.800.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	166.957.791,00	289.223.588,00	289.223.588,00	122.265.797,00	180.000.000,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.337.213,00	11.337.213,00	11.337.213,00	0,00	7.000.000,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	25.203.476,00	25.203.476,00	20.999.686,00	-4.203.790,00	28.000.000,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	32.760.000,00	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00	45.000.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	132.510.000,00	179.002.000,00	83.287.000,00	-49.223.000,00	122.000.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	3 Kegiatan	5.281.729.520,00	5.767.803.680,00	5.767.803.680,00	486.074.160,00	5.368.553.256,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	78.500.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	85.000.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Kegiatan	749.780.298,00	893.908.256,00	890.348.916,00	140.568.618,00	860.241.600,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	127.517.000,00	132.467.554,00	132.467.554,00	4.950.554,00	135.000.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	47.570.000,00	47.570.000,00	47.570.000,00	0,00	51.000.000,00
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.671.340,00	10.671.340,00	7.112.000,00	-3.559.340,00	12.000.000,00
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat**	**-**	**100 Persen**	**12.978.984.539,00**	**14.358.173.905,00**	**15.674.584.558,00**	**-2.263.336.669,00**	**10.715.647.870,00**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-	3 Kegiatan	3.700.515.445,00	4.829.863.522,00	5.769.805.237,00	2.069.289.792,00	1.706.200.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	14.563.847,00	14.432.847,00	14.432.847,00	-131.000,00	16.000.000,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	2.014.097.900,00	2.089.097.900,00	89.097.900,00	330.000.000,00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	72.277.000,00	476.084.230,00	273.203.230,00	200.926.230,00	75.000.000,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	-	2 Kegiatan	8.955.714.565,00	8.998.479.183,00	9.377.194.321,00	421.479.756,00	9.009.447.870,00
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	435.213.600,00	446.854.760,00	504.521.187,00	69.307.587,00	450.000.000,00
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	745.620.564,00	744.897.326,00	734.161.204,00	-11.459.360,00	736.057.790,00
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	322.754.529,00	529.831.200,00	527.585.000,00	204.830.471,00	0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan	29 Keluarga	29 Keluarga	24.796.877,00	26.816.000,00	26.816.000,00	2.019.123,00	0,00
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**945.918.823,00**	**572.909.948,00**	**542.170.868,00**	**-811.918.823,00**	**134.000.000,00**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum*	-	1 Kegiatan	220.262.234,00	480.544.084,00	481.657.084,00	261.394.850,00	84.000.000,00
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	73.468.992,00	84.129.278,00	88.129.278,00	14.660.286,00	28.000.000,00
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**88.374.493,00**	**200.940.538,00**	**139.680.960,00**	**8.525.507,00**	**96.900.000,00**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum*	-	2 Kegiatan	88.374.493,00	200.940.538,00	139.680.960,00	51.306.467,00	96.900.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	16.239.800,00	65.710.917,00	32.440.000,00	16.200.200,00	17.500.000,00
		KELURAHAN GUNUNG TELIHAN				**37.146.151.534,00**	**39.648.502.323,00**	**39.974.089.986,00**	**2.827.938.452,00**	**35.028.242.726,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**37.146.151.534,00**	**39.648.502.323,00**	**39.974.089.986,00**	**2.827.938.452,00**	**35.028.242.726,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**37.146.151.534,00**	**39.648.502.323,00**	**39.974.089.986,00**	**2.827.938.452,00**	**35.028.242.726,00**
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**-**	**100 persen**	**22.551.582.488,00**	**23.720.131.371,00**	**22.989.061.002,00**	**930.512.368,00**	**23.482.094.856,00**
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-	2 Kegiatan	198.742.000,00	195.842.000,00	95.061.000,00	-103.681.000,00	223.600.000,00
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	33.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	6 Kegiatan	2.027.965.883,00	2.477.979.963,00	1.869.587.893,00	-158.377.990,00	1.852.800.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	130.303.011,00	77.855.063,00	69.491.351,00	-60.811.660,00	135.000.000,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.330.415,00	12.172.814,00	12.172.814,00	9.842.399,00	5.500.000,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	36.370.834,00	54.491.810,00	54.491.810,00	18.120.976,00	39.000.000,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	173.853.302,00	131.199.000,00	116.100.000,00	-57.753.302,00	120.000.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	11 Laporan	167.611.774,00	272.590.093,00	171.835.900,00	4.224.126,00	132.000.000,00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	3 Kegiatan	5.281.729.520,00	5.767.803.680,00	5.767.803.680,00	486.074.160,00	5.368.553.256,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	21.000.000,00	115.000.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Kegiatan	749.780.298,00	893.908.256,00	890.348.916,00	140.568.618,00	860.241.600,00
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	104.398.000,00	98.532.000,00	98.532.000,00	-5.866.000,00	125.000.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit	20.720.000,00	22.250.000,00	22.250.000,00	1.530.000,00	25.000.000,00
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat**	**-**	**100 Persen**	**12.978.984.539,00**	**14.358.173.905,00**	**15.674.584.558,00**	**-2.263.336.669,00**	**10.715.647.870,00**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-	3 Kegiatan	3.700.515.445,00	4.829.863.522,00	5.769.805.237,00	2.069.289.792,00	1.706.200.000,00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	16.587.111,00	16.630.111,00	16.630.111,00	43.000,00	18.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	406.881.288,00	1.478.325.431,00	1.078.325.431,00	330.000.000,00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas / Ormas	30 Pokmas / Ormas	187.817.668,00	86.355.206,00	84.345.206,00	-103.472.462,00	190.000.000,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	-	2 Kegiatan	8.955.714.565,00	8.998.479.183,00	9.377.194.321,00	421.479.756,00	9.009.447.870,00
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.057.284.300,00	1.079.069.500,00	1.248.105.095,00	190.820.795,00	1.100.000.000,00
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1.889.999.998,00	1.740.990.220,00	1.683.528.406,00	-206.471.592,00	1.840.144.474,00
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	322.754.529,00	529.831.200,00	527.585.000,00	204.830.471,00	0,00
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan	39 Keluarga	39 Keluarga	3.024.000,00	208.089.200,00	205.843.000,00	202.819.000,00	0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**945.918.823,00**	**572.909.948,00**	**542.170.868,00**	**-811.918.823,00**	**134.000.000,00**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum*	-	1 Kegiatan	220.262.234,00	480.544.084,00	481.657.084,00	261.394.850,00	84.000.000,00
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	73.324.250,00	92.383.528,00	94.943.528,00	21.619.278,00	28.000.000,00
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**88.374.493,00**	**200.940.538,00**	**139.680.960,00**	**8.525.507,00**	**96.900.000,00**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum*	-	2 Kegiatan	88.374.493,00	200.940.538,00	139.680.960,00	51.306.467,00	96.900.000,00
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	21.037.528,00	30.936.748,00	21.223.668,00	186.140,00	23.300.000,00
		KELURAHAN BELIMBING				**37.146.151.534,00**	**39.648.502.323,00**	**39.974.089.986,00**	**2.827.938.452,00**	**35.028.242.726,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**37.146.151.534,00**	**39.648.502.323,00**	**39.974.089.986,00**	**2.827.938.452,00**	**35.028.242.726,00**
	7.01	**KECAMATAN**				**37.146.151.534,00**	**39.648.502.323,00**	**39.974.089.986,00**	**2.827.938.452,00**	**35.028.242.726,00**
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**-**	**100 persen**	**22.551.582.488,00**	**23.720.131.371,00**	**22.989.061.002,00**	**930.512.368,00**	**23.482.094.856,00**
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-	2 Kegiatan	198.742.000,00	195.842.000,00	95.061.000,00	-103.681.000,00	223.600.000,00
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	31.500.000,00	15.750.000,00	-14.250.000,00	33.000.000,00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	6 Kegiatan	2.027.965.883,00	2.477.979.963,00	1.869.587.893,00	-158.377.990,00	1.852.800.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	90.000.000,00	29.431.843,00	19.775.264,00	-70.224.736,00	100.000.000,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	43.906.376,00	35.492.591,00	33.492.591,00	6.000.000,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	27.453.471,00	27.344.780,00	21.781.534,00	-5.671.937,00	30.000.000,00
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	210.528.000,00	210.528.000,00	210.528.000,00	0,00	135.000.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	227.826.000,00	319.711.000,00	184.465.000,00	-43.361.000,00	125.000.000,00
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-	2 Kegiatan	100.511.884,00	94.761.088,00	92.544.162,00	-7.967.722,00	110.600.000,00
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	14.999.792,00	14.892.741,00	14.892.741,00	-107.051,00	17.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	3 Kegiatan	5.281.729.520,00	5.767.803.680,00	5.767.803.680,00	486.074.160,00	5.368.553.256,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	59.500.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	16.500.000,00	65.000.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	4 Kegiatan	749.780.298,00	893.908.256,00	890.348.916,00	140.568.618,00	860.241.600,00
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	143.152.000,00	123.216.000,00	123.216.000,00	-19.936.000,00	155.000.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit	22.033.500,00	12.790.000,00	12.790.000,00	-9.243.500,00	25.000.000,00
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat**	**-**	**100 Persen**	**12.978.984.539,00**	**14.358.173.905,00**	**15.674.584.558,00**	**-2.263.336.669,00**	**10.715.647.870,00**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-	3 Kegiatan	3.700.515.445,00	4.829.863.522,00	5.769.805.237,00	2.069.289.792,00	1.706.200.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	15.684.795,00	15.667.111,00	15.667.111,00	-17.684,00	17.200.000,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	1.435.659.154,00	1.535.658.892,00	885.658.892,00	330.000.000,00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	293.651.515,00	243.990.166,00	186.952.805,00	-106.698.710,00	300.000.000,00
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	-	2 Kegiatan	8.955.714.565,00	8.998.479.183,00	9.377.194.321,00	421.479.756,00	9.009.447.870,00
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.608.157.800,00	1.771.963.074,00	2.132.863.670,00	524.705.870,00	1.650.000.000,00
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	2.915.560.274,00	2.910.844.274,00	2.906.450.147,00	-9.110.127,00	3.128.245.606,00
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	322.754.529,00	529.831.200,00	527.585.000,00	204.830.471,00	0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan	50 Keluarga	50 Keluarga	294.933.652,00	294.926.000,00	294.926.000,00	-7.652,00	0,00
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**945.918.823,00**	**572.909.948,00**	**542.170.868,00**	**-811.918.823,00**	**134.000.000,00**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum*	-	1 Kegiatan	220.262.234,00	480.544.084,00	481.657.084,00	261.394.850,00	84.000.000,00
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	73.468.992,00	304.031.278,00	298.584.278,00	225.115.286,00	28.000.000,00
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**88.374.493,00**	**200.940.538,00**	**139.680.960,00**	**8.525.507,00**	**96.900.000,00**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum*	-	2 Kegiatan	88.374.493,00	200.940.538,00	139.680.960,00	51.306.467,00	96.900.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	150 Orang	23.346.576,00	23.354.000,00	15.331.000,00	-8.015.576,00	25.600.000,00
	J U M L A H					**37.146.151.534,00**	**39.648.502.323,00**	**39.974.089.986,00**	**2.827.938.452,00**	**35.028.242.726,00**

Sumber : Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bontang Barat Tahun 2025

XXX. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di amanatkan untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai alat kontrol bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Sesuai amanat Undang-Undang tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib Menyusun Perubahan Rencana Kerja tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan, penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang Tahun 2021-2026. Ranwal Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam perencanaan pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, konflik dan tantangan, melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun suatu perencanaan yang baik. Proses penyusunan Ranwal Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, RENJA-SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) instansi, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Perubahan RENJA merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKA) tahun 2025.

3. Perubahan RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun bagan alur tahapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1
Alur Tahapan Penyusunan Renja Tahun 2025

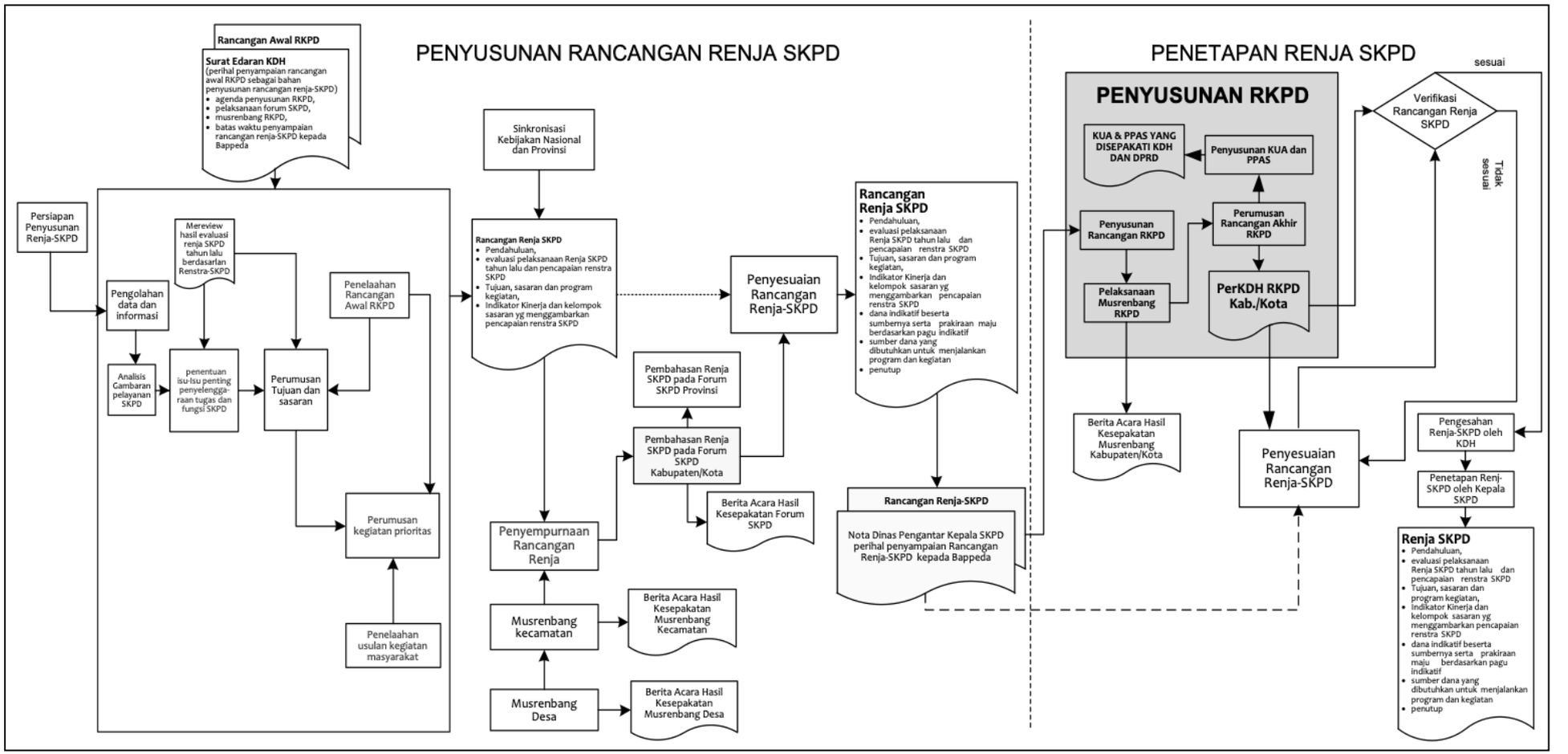

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Prubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten nunukan, malinau, kutai barat, kutai timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 175, tambahan lembaran negara RI Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (lembaran negara RI Tahun 2000 Nomor 74, tambahan lembaran negara RI nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah;
6. Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
7. Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang Tahun 2021 - 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang ini adalah sebagai pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan pada Anggaran Murni tahun 2025, dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi kebutuhan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator dan pagu anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi acuan bagi Badan Kesbangpol Kota Bontang untuk penambahan kegiatan, penghapusan kegiatan, perubahan indikator kinerja, perubahan target dan perubahan pagu anggaran Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2025;
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Tahun 2025;
3. Sebagai alat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun metode sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang Tahun 2025, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan RENJA Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain 6 program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan, dengan pagu anggaran sebanyak **Rp. 47.061.013.320,00** setelah adanya efesiensi menjadi **Rp. 44.307.376.131,00** namun realisasi terhadap pelaksanaannya tidak mencapai target sesuai yang di rencanakan sebelumnya, karena disebabkan oleh beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehubungan dengan adanya Efesiensi Anggaran, Perubahan kegiatan, Sehingga target pencapaiannya realisasi Per Juni tahun 2025 sebanyak 11,19%. Dengan sisa anggaran sebanyak **Rp**. **35.670.732.830,47**. Dalam rangka mewujudkan visi **"Terwujudnya Kota Bontang Sebagai Kota Industri, Jasa yang maju, berkelanjutan, ekonomi dinamis dan sejahtra sebagai daerah mitra IKN"**.

Pada Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain 6 program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan,namum pada perubahan tidak terdapat tambahan Sub kegiatan dengan pagu anggaran murni setelah diefesiensi sebanyak Rp. 44.307.376.131,00 namun setelah RKPD Anggaran Perubahan pagu anggaran sebanyak Rp. 45,507,376,131, ada tambahan sebanyak Rp. 1.200.000.000, anggaran ini termasuk Hibah Instansi Vertikal di kota Bontang Tahun 2025.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang bersifat Fisik yaitu belanja hibah barang ke instansi vertikal yang sebelumnya dilaksanakan oleh DINAS PUPR namun sekarang di alihkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang dan non fisik, yaitu berupa sosialisasi, penyuluhan baik kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, OKP, LSM, ETNIS, dan juga pramuka dan pelajar, baik itu yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota maupun di Kecamatan yang berada di wilayah Kota Bontang.

Adapun evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, dengan melihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Bontang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025 Setelah Perubahan		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										

08.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	100	100%	100	100	100	100	100	100%
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	3	dokumen	3	3	2	2	100	2	3	100
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1	dokumen	1	2	2	1	50	2	2	200

8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	1	1	1	100	1	1	100
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah tenaga adm keuangan PD yang terbayarkan	25	orang	25	25	25	23	92	25	25	100
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	orang	25	25	25	23	92	25	25	100

8.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	1	dokumen	1					1	1	100
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	5	1	1	1	100	1	1	20
8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis prognosis	1	dokumen	1	1	1	1	100	1	1	100

8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pegawai yang mendapat layanan adm. Kepegawaian Daerah	40	Pegawai	40	39	40	40	100	40	41	103
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan Kelengkapan	43	Paket	43	139	43	43	100	43	43	100
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	orang	25	10	17	17	100	17	24	96
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	2	Unit	2	4	2	2	100	2	2	100

8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit		4	4	4	100	0	2	0
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2	Unit	2	2	2	1	50	2	2	100
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Aset yang di pelihara	4	jenis	4	16	3	3	100	3	3	75

8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	Unit	18	16	16	16	100	16	16	89
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	Unit	18	18	18	18	100	16	16	89

8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	3	3	3	3	100	3	3	100
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Unit	0	0	0	-	0	0	0	0
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	jenis	3	3	3	3	100	3	3	100
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	Laporan	1000	598	950	950	100	950	950	100

8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	12	12	3	25	12	12	100
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	Laporan	16	12	12	12	100	16	16	100
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket adm.umum yang disediakan	11	Paket	11	11	11	11	100	11	11	100
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38	Paket	38	11	38	38	38	100	38	100

8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	3	9	-	-	-	3	3	100
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Paket	9	9	9	9	100	9	9	100
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10	Paket	10	10	10	10	100	10	10	100
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145	Laporan	290	127	127	84	66,14	127	127	88

08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi	50	Persen	50	36	36	36	100	36	36	72
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kebijakan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7	Pelaksanaan Kebijakan	7	7	7	7	100	7	7	100
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,	1200	Orang	1500	1200	1200	1200	100	1200	1200	100

	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	256	Orang	2700	212	256	54	21,09	256	256	100

08:01:03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan	72	Persen	72	56	61	61	100	6	61	85
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	3	Pelaksanaan Kebijakan	3	4	2	2	100	2	2	67

	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	330	Orang	550	100	330	330	100	330	330	100

	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	25	Laporan	25	12	13	12	92	13	13	52

	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	57	Persen	60	43	43	43	100	0,5	50	88

	ORGANISASI KEMASYARAKATAN											
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	2	Pelaksanaan Kebijakan	2	4	2	2	100	2	2	100
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	200	Orang	400	200	200	200	100	200	200	100

	ormas asing di Daerah	Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200	Orang	400	200	200	200	100	200	200	100
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran	12	Laporan	12	16	12	12	100	0	12	

	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas										
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan pembinaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	80	Persen	80	67%	67	67	100	73	73	91,25
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan tekhnis Bidang Ketahanan Ekonomi,	4	Pelaksanaan Kebijakan	4	7	4	4	100	4	4	100

	Sosial dan Budaya	Sosial dan Budaya										
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150	Orang	200	150	150	150	100	150	150	100
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan	100	Orang	150	100	100	100	100	100	100	100

	Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagun	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan	12	Laporan	0	12	12	12	100	12	12	100

	aan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		Kebijakan	0	1	1	1	100	0	0	

08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik	100	Persen	100	100	1	1	100	1	1	1
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5	Pelaksanaan Kebijakan	5	5	5	5	100	5	5	100

8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	425	Orang	500	400 Orang	425 Orang	425	100	425	425	100

8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	Laporan	12	12	12	12	100	12	12	100

	Penanganan Konflik di Daerah											

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase penyelesaian konflik	-	-	43	43	50	50	43	43	50	50	
2	Persentase Cakupan pendidikan politik masyarakat	-	-	60	72	80	50	60	72	80	80	
3	Persentase pembinaan terhadap masyarakat tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan dan bela negara	-	-	-	-	-	-	-	81,2	90	20	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Walikota di bidang Kesatuan Bangsa, demokrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang memiliki peran penting dalam pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, karena dalam membangun tentunya sangat diperlukan suatu situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif, selain itu kesamaan pola pikir masyarakat yang bernilai kebangsaan

yang kuat tentunya juga sangat diperlukan agar tercipta saling toleransi, menghargai dan penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Badan Kesbangpol merawat Kesatuan Bangsa melalui kepekaan dan cegah dini untuk membangun Demokrasi yang bermartabat dan elegan.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu ada berbagai masalah yang timbul, semua itu mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota Bontang,hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh Instansi Pemerintah, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang yang diberi tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri ini Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, didalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021-2025.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka isu-isu strategis bagi Kesbangpol Kota Bontang adalah sebagai berikut:

1. Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi Tupoksi dapat tercapai;
2. Efisiensi dan efektifitas anggaran yang ada guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan;
3. Pemfasilitasian yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik.
4. Untuk meningkatkan harmonisasi diharapkan aparatur menciptakan hubungan yang harmonis dengan Lembaga-lembaga (LSM,Ormas dan Nirlaba Lainya) agar terciptanya stabilitas politik.
5. Pengoptimalisasian sosialisasi tentang pemahaman pentingnya Kesatuan Bangsa hingga tercapai harmonisasi di masyarakat.
6. Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya Kesatuan Bangsa;
7. Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk dapat melaksananakan Tupoksi dan Mengarahkan Personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM, Ormas dan Nirlaba Lainya Agar tidak terjadi efek negatif dari ancaman instabilitas;
8. Meningkatkan Pembinaan terhadap kewaspadaan Dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat;
9. Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat;
10. Meningkatkan Pembinaan/sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa serta Toleransi antar umat beragama.

Untuk meminimalisir efek negatif dari kelemahan kelembagaan SDM Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi dilakukan Upaya Pembinaan Hubungan

baik dengan unsur Internal & Ekternal, agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan Peraturan. Adapun struktur organisasi Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kota Bontang. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 2
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bontang

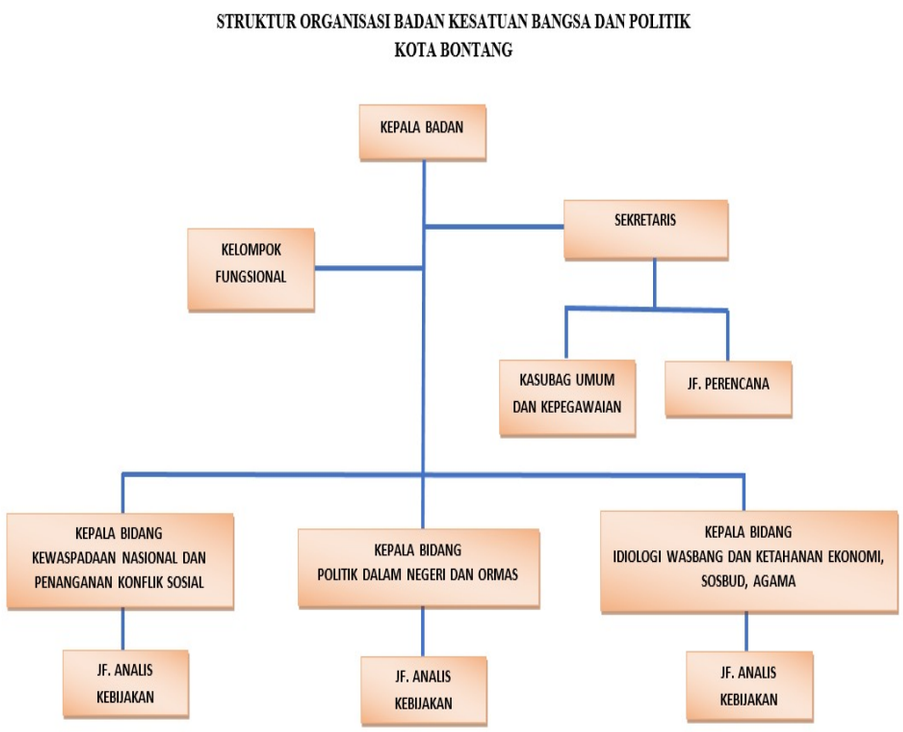

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan awal Perubahan RKPD Perangkat Daerah dan hasil Analisa kebutuhan pendanaan terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dan analisa kebutuhan pendanaan, karena terdapat program dan kegiatan baru yaitu Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat (Instansi Vertikal).

Yang menjadi catatan penting atas perbedaan Rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dengan rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD, namun pendanaannya berbeda ini dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Bontang

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Setelah Perubahan					
	Program / Kegiatan dan sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					25.589.609.337,00	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					44.307.376.131,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					25.589.609.337,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					44.307.376.131,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	9.973.018.940,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	persen	11.277.407.640,00

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	dokumen	32.253.832,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	jumlah dokumen perencanaanpenganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	3,00	dokumen	25.959.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1 Dokumen	dokumen	18.386.024,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1,00	dokumen	9.730.000,00
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	Laporan	13.867.808,00	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1,00	Laporan	16.229.000,00

			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	jumlah tenaga adm keuangan PD yang terbayarkan	25	Orang	6.994.942.683,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	jumlah tenaga adm keuangan PD yang terbayarkan	25,00	Orang	6.846.104.684,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	Orang	6.994.942.683,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25,00	Orang	6.846.104.684,00

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	jumlah pegawai yang mendapat layanan adm. Kepegawaian Daerah	40 pegawai	Pegawai	90.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	jumlah pegawai yang mendapat layanan adm. Kepegawaian Daerah	40,00	pegawai	87.435.720,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Jenis	orang	45.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25,00	orang	76.565.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	34	Orang	45.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	34	Orang	10.870.720,00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Jumlah Pengadaan BMD	2	Unit	407.308.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Jumlah Pengadaan BMD	2,00	Unit	318.018.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	Unit	407.308.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2,00	Unit	318.018.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Bontang	Jumlah jenis Aset yang di pelihara	4	jenis	605.179.026,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Bontang	Jumlah jenis Aset yang di pelihara	4,00	jenis	616.229.945,00

	Pemerintahan Daerah						Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	Unit	563.054.026,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18,00	18 unit	52.090.150,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	18	Unit	20.225.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	18,00	unit	509.729.795,00

	atau Lapangan		Perizinannya						dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	21.900.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	54.410.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	jenis	827.640.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,00	Jenis	1.258.522.680,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150,00	Laporan	20.700.000,00

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	64.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	64.800.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	Laporan	752.840.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16,00	Laporan	1.173.022.680,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah paket adm.umum yang disediakan	11	Paket	1.015.695.399,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah paket adm.umum yang	11,00	Paket	2.125.137.611,00

									disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38	Paket	319.645.152,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38,00	Paket	1.055.559.714,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Paket	32.320.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9,00	Paket	125.251.525,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	13.320.247,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	paket	130.678.372,00

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	650.410.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145,00	Laporan	813.648.000,00
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Bontang	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi	63	%	9.648.476.008,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Bontang	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi	50,00	persen	3.442.872.927,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Bontang	Jumlah pelaksanaan kebijakan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2049 Orang 7 Kebijakan 7 Pelaksanaan	orang	9.648.476.008,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Bontang	Jumlah pelaksanaan kebijakan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1200,00	orang	3.442.872.927,00

				Kebijakan								
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12,00	Laporan	6.692.018.887,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12,00	Laporan	515.733.632,00

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	256	orang	2.956.457.121,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600,00	orang	867.114.480,00

	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3	Dokumen	-	-		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	3	dokumen	2.060.024.815,00
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Bontang	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan	72	persen	1.113.084.614,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Bontang	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan	61,00	persen	985.499.275,00

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Bontang	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	2	kebijakan	1.113.084.614,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Bontang	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	2,00	kebijakan	985.499.275,00

			Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerinta	330,00	orang	1.099.999.854,00	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	330,00	orang	963.219.275,00

	Pemantauan Situasi Politik di Daerah		han, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	25	Laporan	13.084.760,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika	25	Laporan	22.280.000,00

	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi		Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan			
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Kota Bontang	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	100	persen	1.272.022.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Kota Bontang	Persentase pembinaan terhadap LSM,	57,00	persen	1.807.529.985,00

	KEMASYARAKATAN						KEMASYARAKATAN		Ormas dan OKP			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bontang	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	2,00	kebijakan	1.272.022.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bontang	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	2,00	kebijakan	1.807.529.985,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	200,00	Orang	260.422.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	200,00	Orang	872.533.431,00

	ormas asing di Daerah		Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				ormas asing di Daerah		Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasa	200,00	orang	1.011.600.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	200,00	orang	934.996.554,00

			n Ormas dan Ormas Asing di Daerah						Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Bontang	Persentase Peningkatan pembinaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100	persen	1.717.090.895,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Bontang	Persentase Peningkatan pembinaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	80,00	persen	25.922.356.304,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Bontang	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan tekhnis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2,00	kebijakan	1.717.090.895,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Bontang	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan tekhnis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial	2,00	kebijakan	25.922.356.304,00

									dan Budaya			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercaya	150,00	Orang	1.504.590.895,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	150,00	Orang	25.902.576.304,00

			an di Daerah						Penghayat Kepercayaan di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	100	Orang	212.500.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	100	Org	19.780.000,00

			Kepercayaan di Daerah						Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Bontang	Persentase Penanganan Konflik	100,00	persen	1.865.916.880	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Bontang	Persentase Penanganan Konflik	100,00	persen	871.710.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Bontang	jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan	5,00	kebijakan	1.865.916.880	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Bontang	jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantap	5,00	kebijakan	871.710.000,00

			Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						an Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspada	425,00	orang	1.859.004.880,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	425,00	orang	846.570.000,00

	serta Penanganan Konflik di Daerah		an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				serta Penanganan Konflik di Daerah		Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantaua	12,00	Laporan	6.912.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Kota Bontang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	12,00	Laporan	25.140.000,00

	Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		n Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat terkait dengan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) sebelumnya di tangani oleh Dinas Pemuda Pemuda Olah raga dan Pariwisata (DISPOPAR) tahun 2022. sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI).

Program/Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 pada program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.

Penelaahan usulan program dan kegiatan terkait dengan Program Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat (Vertikal) pada belanja barang dan jasa atau Pembangunan fisik yang sebelumnya di tangani oleh Dinas Pekerjaan Umum (PUPR). Sesuai dengan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat (Instansi Vertikal).

Program/Kegiatan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 pada program Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.

Program/kegiatan tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Tahun 2025
Kota Bontang

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Bontang	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi	2.000.000.000	Terdapat penambahan usulan terkait Kegiatan Paskibraka dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Tahun 2025 pada Bakesbangpol
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Bontang	Jumlah pelaksanaan kebijakan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.000.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.000.000.000	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pada Bab. I Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	23.855.180.304	

			Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	23.855.180.304	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	23.855.180.304	

	Kepercayaan di Daerah		Kepercayaan di Daerah		
3	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Penanganan Konflik	256.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	256.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	256.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka memperkuat pemerintahan agar dapat berjalan dengan sesuai harapan dan dapat mencapai target yang akan dicapai, maka pada masa pemerintahan tahun 2021-2026 mempunyai Visi, Misi dan beberapa agenda prioritas program yang tercantum dalam Renstra Kesbangpol Kota Bontang.

Adapun Arah kebijakan Nasional terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu;

1. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
   a. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di pusat, daerah, dan desa melalui penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola;
   b. Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk perempuan kelompok miskin, kepala keluarga, disabilitas, serta penyintas kekerasan dan bencana, melalui peningkatan kapasitas, literasi keuangan, literasi digital, dan optimalisasi teknologi, informasi dan komunikasi;
   c. Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan daerah.
2. mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal yang dapat diwujudkan melalui:
   a. penguatan penyelenggaraan pemilu sebagai persiapan tahapan pemilu serentak tahun 2025;
   b. penguatan peraturan perundangan bidang politik;
   c. peningkatan bantuan keuangan partai politik;
   d. penguatan demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik; serta
   e. penguatan demokrasi secara umum yang dapat direfleksikan dengan angka Indeks.
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:
   a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
   b. mempertajam mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik. Rancangan tersebut akan memuat antara lain mengenai pemantapan demokrasi internal serta penguatan transparansi dan akuntabilitas partai politik. Muatan ini merupakan suatu upaya untuk

mewujudkan sistem demokrasi yang substansial dan berintegritas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan RENJA Perangkat Daerah

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang yang mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang Yang Demokratis, dengan tujuan:
   - Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Demokratis.
2. Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang Yang Berwawasan Kebangsaan, dengan tujuan:
   - Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang Khususnya Pelajar SLTA yang Berwawasan dan Berkarakter Kebangsaan.
3. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, dengan tujuan:
   - Terwujudnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bontang.
4. Mewujudkan Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kota Bontang, dengan tujuan:
   - Terwujudnya Kewaspadaan dini dan Kondusifitas di Kota Bontang.

Berdasarkan visi dan misi beserta penjelasannya, di atas maka sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran yang hendak dicapai Misi: Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang Yang Demokratis, dengan sasaran:
   - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi
2. Sasaran yang hendak dicapai Misi: Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang Yang Berwawasan Kebangsaan, dengan sasaran:
   - Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Khususnya Pelajar SLTA di Kota Bontang
3. Sasaran yang hendak dicapai Misi: Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sasaran:
   - Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
4. Sasaran yang hendak dicapai Misi: Mewujudkan Kewaspadaan dan Kondusifitas di Kota Bontang, dengan sasaran:
   - Meningkatnya Kewaspadaan Dalam Menjaga Kondusifitas yang Tertib, Aman dan Nyaman di Kota Bontang

3.3. Program dan Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 6 Program, 12 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan total pagu Anggaran Murni **Rp.47.061.013.320,00** namun setelah ada Efesiensi Anggaran Murni menjadi **Rp.44.307.376.131,00** dan pada anggaran RKPD perubahan total pagu Anggaran sebesar **Rp.47.061.013.320,00** termasuk anggaran Hibah kepada Pemerintrah Pusat (Instansi Vertikal) Tahun 2025.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Bontang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kota Bontang	-	44.307.376.131	45.507.376.131	PAD		-	47.061.013.320
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik		Kota Bontang	-	44.307.376.131	45.507.376.131	PAD		-	47.061.013.320

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bontang	100	%	11.277.407.640	11.277.407.640	PAD		100 %	12.470.259.590
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	Kota Bontang	3	Dokumen	25.959.000,00	25.959.000	PAD		3	40.230.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
		daerah yang disusun									
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kota Bontang	1	Dokumen	9.730.000,00	9.730.000,00	PAD		1	15.090.000
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kota Bontang	1	Laporan	16.229.000,00	16.229.000	PAD		1	25.140.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah tenaga adm keuangan PD yang terbayarkan	Kota Bontang	25 Orang	6.846.104.684	6.846.104.684	PAD		25	6.846.104.684
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	25 Orang	6.846.104.684	6.846.104.684	PAD		25	6.846.104.684

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pegawai yang mendapat layanan adm. Kepegawaian Daerah	Kota Bontang	40	pegawai	87.435.720	87.435.720	PAD		40	352.732.464
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bontang	43	paket	10.870.720	10.870.720			43	200.812.464

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sesuai tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan	Kota Bontang	25	paket	76.565.000	76.565.000	PAD		43	151.920.000
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	Kota Bontang	2	Unit	318.018.000	318.018.000	PAD		2	318.018.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Bontang	2	Unit	318.018.000	318.018.000	PAD		2	318.018.000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah jenis Aset yang di pelihara	Kota Bontang	4	jenis	616.229.945	616.229.945	PAD		4	616.229.945

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemerintahan Daerah										
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bontang	18	unit	52.090.150	52.090.150	PAD		18	52.090.150
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kota Bontang	18	unit	509.729.795	509.729.795	PAD		18	509.729.795

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bontang	3	UNIT	54.410.000	54.410.000	PAD		3	54.410.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan	Kota Bontang	3	unit	1.258.522.680	899.214.822	PAD		3	1.378.756.370

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah									
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	1000	laporan	20.700.000	20.700.000	PAD		1000	20.700.000
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bontang	12	laporan	64.800.000	64.800.000	PAD		12	64.800.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	16	laporan	1.173.022.680	1.173.022.680	PAD		16	1.293.256.370
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket adm.umum yang disediakan	Kota Bontang	11	paket	2.125.137.611	1.173.022.680	PAD		11	2.918.188.127

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	38	paket	1.055.559.714	1.055.559.714	PAD		38	1.213.784.390
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	9	paket	125.251.525	125.251.525	PAD		9	125.251.525
8.01.01.2.09.0006	Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan	Kota Bontang	3	paket	130.678.372	130.678.372	PAD		3	140.417.212

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Rumah Tangga	Rumah Tangga yang Disediakan								
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	127 laporan	813.648.000	813.648.000	PAD		145	1.438.735.000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Bontang	50 %	3.442.872.927	3.442.872.927	PAD		50 %	19.037.447.822

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	KEBANGSAAN										
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kebijakan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Bontang	7	Kebijakan	3.442.872.927	3.442.872.927	PAD		7	19.037.447.822
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan	Kota Bontang	0	Orang	515.733.632	515.733.632	PAD		1.200	15.375.944.516

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di	Kota Bontang	256	Orang	867.114.480	867.114.480	PAD		256	1.547.903.480

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrak				2.060.024.815	2.060.024.815			3 Dok	2.113.599.826

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	aan dan Purnapaskibraka										
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan	Kota Bontang	61	%	985.499.275	985.499.275	PAD		61 %	1.138.398.275,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	SERTA BUDAYA POLITIK										
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Kota Bontang	3	kebijakan	985.499.275	985.499.275	PAD		3	1.138.398.275,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Kota Bontang	330	Orang	963.219.275	963.219.275	PAD		330	1.111.608.275

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di		25 Laporan	22.280.000	22.280.000			25	26.790.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
2.849.004.4648.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kota Bontang	57 %	1.807.529.985	1.807.529.985	PAD		86%	2.298.784.985,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	KEMASYARAKATAN										
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Kota Bontang	2	Pelaksanaan kebijakan	1.807.529.985	1.807.529.985	PAD		2	2.298.784.985,00
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang	Jumlah Orang yang Melaksanaka	Kota Bontang	200	orang	872.533.431	872.533.431	PAD		200	876.943.431

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	n Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di	Kota Bontang	200	Orang	934.996.554	934.996.554	PAD		200	1.421.841.554

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Peningkatan pembinaan bidang ketahanan	Kota Bontang	80	%	25.922.356.304	27.122.356.304	PAD		93%	11.244.412.648

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	ekonomi, sosial dan budaya								
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan tekhnis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Bontang	4 kebijakan	25.922.356.304	27.122.356.304	PAD		4	11.244.412.648

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Kota Bontang	150 Orang	25.902.576.304	27.102.576.304	PAD	Ada Tambahan Hibah Instansi Vertikal	150	11.222.622.648

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Penghayat Kepercayaan di Daerah	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Kota Bontang	100 Orang	19.780.000	19.780.000			100	21.790.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN	Persentase Penanganan Konflik Sosial	Kota Bontang	100 %	871.710.000	871.710.000	PAD		100%	871.710.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan	jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan	Kota Bontang	5	kebijakan	871.710.000	871.710.000	PAD		5	871.710.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Konflik Sosial	Konflik Sosial									
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa	Kota Bontang	425	Orang	846.570.000	846.570.000	PAD		425	846.570.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	n Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan	Kota Bontang	0 Laporan	25.140.000	25.140.000	PAD		12	25.140.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah / Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif setelah perubahan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
	Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perubahan merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

4.2 Rencana Pendanaan

Adapun rumusan Perubahan rencana kerja program dan pendanaan perangkat Daerah tahun 2025 dan Renja Perubahan tahun 2025 Badan Kesatuan bangsa dan politik Kota Bontang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bontang Tahun 2025

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.31.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.31.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Perkiraan Kebutuhan Dana
												Program	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		8					UNSUR PEMERITAHAN UMUM												
		8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							47.061.013.320,00	47.257.210.781				38.434.651.454
		8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							12.470.259.590	11.277.432.808				9.142.500.000
		8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							40.230.000	32.493.526				60,550,249

Meningkatnya kerukunan dan toleransi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan masyarakat berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, politik dan ekososbud	8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	Bakesbangpol	100 persen	1 Dokumen	15.090.000,00	9.730.000,00	APBD Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	25,000,000

		8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	Bakesbangpol	100 persen	1 Laporan	25.140.000,00	16.229.000,00	APBD Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	35,550,249

									Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
25.140.000,00	16.229.000,00	8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6.846.104.684	6.846.104.684			4,371,102,986
		8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Bakesbangpol	100 persen	23 Orang	6.846.104.684,00	6.846.104.684,00	APBD Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	4,357,102,986

		8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						352.732.464,00	87.435.720,00				180,000,000
		8	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Daerah Pengadaan Pakaian Dina	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Paket Pakai	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	Bakesbangpol	100 persen	8 Orang	151.920.000,00 200.812.464,00	76.565.000,00 10.870.720,00	APBD Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	180,000,000

								s beserta Atribut Kelengkapannya	an Dinas beserta Atribut Kelengkapan									
		8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.918.188.127,00	2.125.162.779,30				1,839,256,165
		8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Perk	Bakesbangpol	100 persen	7 Paket	1.213.784.390,00	1.055.559.714,00	APBD Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	577,339,104

							daerah		antoran							daerah		
		8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	Bakesbangpol	100 persen	1 Paket	125.251.525	125.251.525	APBD Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	106,334,863
125.251.525,00	125.251.525,00	8	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan laya	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Terpenuhinya Pegawai yang men	Bakesbangpol	100 persen	1 Paket	140.417.212,00	130.678.372,00	APBD Kota Bontang	Persentase pemenuhan laya	100 persen	54,000,000

								nan penunjang urusan pemerintahan daerah	Tangga yang Disediakan	dapatkan Layanan Administrasi Perkantoran							nan penunjang urusan pemerintahan daerah		
		8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Perkantoran	Bakesbangpol	100 persen	12 Laporan	1.438.735.000,00	813.673.168,30	APBD Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	1,101.582198

		8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							318.018.000,00	318.018.000,00			1.715.690.000
		8	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan BMD	Bakesbangpol	100 persen	2 Unit	318.018.000,00	318.018.000,00	APBD Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	265,690,000
		8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.378.756.370,00	1.258.522.680,00			697,435,600
		8	1	1	2.	1	Penyediaan Jasa Surat	Persentase	Jumlah Lapor	Tingkat Peme	Bakesb	100 persen	150 Lapora n	20.700.000,00	20.700.000,00	APBD Kota	Persentase	100 p	10,000,000

					08		Menyurat	pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	an Penyediaan Jasa Surat Menyurat	nuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	ang pol				Bontang	pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	ersen	
		8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan peme	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	Bakesbang pol	100 persen	1 Laporan	64.800.000,00	64.800.000,00	APBD Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan peme	100 persen	54,650,000

								rintahan daerah	dan Listrik yang Disediakan							rintahan daerah		
		8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	Bakesbangpol	100 persen	16 Laporan	1.293.256.370,00	1.173.022.680,00	APBD Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	632,785,600
		8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							616.229.945,00	616.229.945,00				278,465,000

		8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemenuhan Kebutuhan BMD dalam Kondisi Baik	Bakesbangpol	100 persen	18 Unit	52.090.150,00	52.090.150,00	APBD Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	193,170,000
		8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Persentase pemenuhan layanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Pemenuhan Kebutuhan BMD dala	Bakesbangpol	100 persen	18 Unit	509.729.795,00	509.729.795,00	APBD Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan	100 persen	22,000,000

							dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penunjang urusan pemerintahan daerah	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	m Kondisi Baik							penunjang urusan pemerintahan daerah		
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemenuhan Kebutuhan BMD dalam Kondisi Baik	Bakesbangpol	100 persen	3 Unit	54.410.000,00	54.410.000,00	APBD Kota Bontang	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	

								daerah									daerah		
		8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							19.037.447.822,00	3.442.872.927,00				2,545,000,000
		8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							19.037.447.822,00	3.442.872.927,00				2,545,000,000
		8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangs	presentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	Bakesbangpol	50 persen	600 Orang	1.547.903.480,00	867.114.480,00	APBD Kota Bontang	presentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila	50 persen	2,545,000,000

							aan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dan karakter kebangsaan	Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tuggal Ika dan Sejarah Bangsa.							dan karakter kebangsaan		

							Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan				50 Persen	900 Org	15.375.944.516,00	515.733.632,00		Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	50 Persen	

							Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				3 lap	2.113.599.826,00	2.060.024.815,00				
		8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI							1.138.398.275,00	985.499.275,00				25,486,875,000

							PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											
		8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							1.138.398.275,00	985.499.275,00			25,486,875,000
		8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika	Bakesbangpol	57 %	300 Orang	1.111.608.275,00	963.219.275,00	APBD Kota Bontang	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	57 %	25,486,875,000

							Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Budaya Politik,, Peningkatan Demokrasi fASILITASI Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umu									

									Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	m/ Pe,ilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.				26.790.000,00				
							Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidik	Persentase pembinaan terhadap LSM, Orm	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan						22.280.000,00				

							an Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	as dan OKP	Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan								

							Situasi Politik di Daerah		Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
		8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						2.298.784.985,00	1.807.529.985,00			120,686,454

		8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							2.298.784.985,00	1.807.529.985,00			120,686,454
		8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Presentase terhadap Pembinaan LSM, Ormas dan OKP	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Media	Terpenuhinya Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Seng	Bakesbang pol	50 persen	4 Laporan	876.943.431,00	872.533.431,00	APBD Kota Bontang	Presentase terhadap Pembinaan LSM, Ormas dan OKP	50 persen	120,686,454

									si Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	ketaOrmas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah.								
							Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi		Jumlah Orang yang melaksanakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pembe	Terpenuhinya Laporan Koordinasi di bidang Pendaftaran Orm	Bakesbangpol			1.421.841.554,00	934.996.554,00				

							Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		rdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	as, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah								

		8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							11.244.412.648,00	28.872.165.785,70				354,590,000
		8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							11.244.412.648,00	28.872.165.785,70				354,590,000
		8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukun	Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Terciptanya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan berkurangnya penyalagunaan Nark	Bakesbangpol	80 %	150 Orang	11.222.622.648,00	28.852.385.785,70	APBD Kota Bontang	Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	80 %	354,590,000

							an Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	otika.				21.790.000,00				
							Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan	.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordi						19.780.000,00			

							Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		nasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalaguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan										

									Penghayat Kepercayaan di Daerah									
		8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							871.710.000,00	871.710.000,00				785,000,000
		8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							871.710.000,00	871.710.000,00				785,000,000
		8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Perensentase penanganan konflik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,	jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanta	Bakesbangpol	100 Persen	61 Orang	846.570.000,00	846.570.000,00	APBD Kota Bontang	Perensentase penanganan konflik	100 Persen	785,000,000

							Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa	pan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									

									n Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
		8	1	6	2.01	5	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,		Jumlah Orang yang Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja	jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan	Bakesbangpol	100 Persen	12 Laporan	25.140.000,00	25.140.000,00	APBD Kota Bontang	Perensentase penanganan konflik	100 Persen	6.824.000

							Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								

									Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
TOTAL													47.061.013.320,00	47.257.210.781,00				38.434.651.454

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Bontang serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan (2025).

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran Visi dan Misi instansi, diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bontang maupun perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

No.	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Agus Haris, SH	Wakil Walikota		
2	Ir. Aji Erlinawati, M.T.	Sekretaris Daerah		
3	Drs. Dasuki, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra		
4	Sony Suwito Adicahyono, SH, MM	Plt. Kepala Bapperida		
5	M. Taupan Kurnia S, S.Si	Sekretaris		
6	Syahruddin, SE,M.A,M.Eng	Kabid P3EP		